

Optimizing **Synergy** for **Sustainable Future**

Optimalisasi Sinergi
Untuk Masa Depan Berkelanjutan

PT PLN Indonesia Power Services
Laporan Tahunan **2023** *Annual Report*



Sanggahan

Disclaimer

Di dalam Laporan Tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan Perusahaan yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang serta lingkungan bisnis dimana Perusahaan menjalankan kegiatan usaha. Pernyataan yang terdapat di Laporan Tahunan ini bukan menjadi jaminan kinerja di masa yang akan datang, mengingat kinerja aktual di masa depan dapat berbeda dengan pernyataan pada Laporan Tahunan ini karena dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor di luar kendali Perusahaan.

Laporan Tahunan ini diterbitkan sesuai Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 Tanggal 06 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.

Laporan Tahunan ini memuat kata “PLN IP Services”, “Perusahaan”, “Perseroan”, “Cogindo”, “CDB” dan “PT PLN Indonesia Power Services” yang didefinisikan sebagai PT Cogindo DayaBersama, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perusahaan ketenagalistrikan. Penyebutan satuan mata uang “Rupiah”, “Rp”, atau “IDR” merujuk pada mata uang resmi Republik Indonesia, sedangkan “Dolar AS” atau “USD” merujuk pada mata uang resmi Amerika Serikat. Semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah.

Pemberitahuan Tabel dan Grafik

Tabel dan grafik pada Laporan Tahunan ini memaparkan data numerik dengan standar penulisan mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Pemaparan numerik dalam teks menggunakan standar kaidah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sesuai konteks.

In this Annual Report contains statements of financial condition, result of operation, projection, plan, strategy, policy and objective of the Company which classified as forwardlooking statements in the implementation of applicable laws, except for matters that are historical. These statements have prospect of risk, uncertainty, and may result in actual development which materially different from those reported.

Prospective statements in this Annual Report are prepared based on various assumptions regarding current and future conditions as well as business environment in which the Company conduct its business activities. Statements contained in this Annual Report are not a guarantee of future performance, considering that actual performance in the future may differ from the statements in this Annual Report because they may be influenced by several factors beyond the Company's control.

This Annual Report published in accordance with Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies and SOEs Minister Regulation No. PER-09/MBU/2012 Dated July 6, 2012 on the Amendment to the Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

This Annual Report contains the word “PLN IP Services”, “Perusahaan”, “Perseroan”, “Cogindo”, “CDB” and “PT PLN Indonesia Power Services” which defined as PT Cogindo DayaBersama, which carries out business activities as an electricity company. Mention of currency unit “Rupiah”, “Rp”, or “IDR” refers to the official currency of the Republic of Indonesia, while “US Dollar” or “USD” refers to the official currency of the United States. All financial information is presented in Rupiah.

Notice of Table and Chart

Table and chart in this Annual Report present numerical data with writing standards following the rules of Indonesian language. Numerical disclosure in the text use standard rules of Indonesian and English language according to the context.

Kesinambungan Tema

Theme Continuity

Cultural Transformation to Drive Execution Excellent as Global Player

Transformasi Budaya untuk Mendorong Eksekusi
Ekselen sebagai Pemain Global

2021.

Cogindo merupakan perusahaan yang mengusung visi untuk menjadi perusahaan terpercaya dalam penyediaan solusi bidang energi di kawasan Asia, dengan memberikan layanan terintegrasi yang inovatif, kompetitif, adaptif, berkelanjutan, memperhatikan kelestarian lingkungan dalam setiap aktivitas bisnisnya.

Dalam rangka menciptakan iklim kerja yang mendukung visi dan misi Perusahaan, pada tahun 2021 Cogindo telah melakukan transformasi budaya Perusahaan dari SIAP AKSI menjadi AKHLAK sebagai penyaluran terhadap tata nilai Perusahaan sekaligus mengoptimalkan sinergi organisasi PLN Group dengan memperhatikan dinamika bisnis serta arah strategis Perusahaan.

Cogindo is a company that carries a vision to become a trusted company in providing energy solutions in the Asian region, by providing integrated services that are innovative, competitive, adaptive, sustainable, as well as paying attention to environmental sustainability in every business activity.

In order to create a work climate that supports the Company's vision and mission, in 2021 Cogindo has transformed its corporate culture from SIAP AKSI to AKHLAK as an alignment with the Company's values while optimizing the organizational synergy of the PLN Group by taking into account business dynamics and the Company's strategic direction.



Strengthening Performance Through Digitalization

Memperkuat Kinerja Melalui Digitalisasi

2022.

Sebagai Perusahaan ketenagalistrikan di bawah naungan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Indonesia Power, Cogindo memiliki potensi untuk bergerak lebih lincah dan kompetitif secara profesional dalam menjalankan bisnisnya. Kejelian Perusahaan memanfaatkan tantangan sekaligus peluang, akan menggerakkan Cogindo untuk meningkatkan kemampuan dan mempersiapkan diri menyongsong perubahan atas kondisi perekonomian dan teknologi yang semakin berkembang pesat.

Teknologi informasi dan komunikasi akan menggilas perusahaan yang enggan berbenah mengikuti perkembangan zaman dan untuk bisa bertahan di tengah era digital, Cogindo menghadapi arus perubahan melalui strategi khusus.

As an electricity company under PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) and PT Indonesia Power, Cogindo has potential to be more agile and professionally competitive in running its business. The Company's foresight to take advantage of challenges as well as opportunities will move Cogindo to increase its capabilities and prepare itself to face changes in economic conditions and rapidly developing technology.

Information and communication technology will crush companies that are reluctant to keep up with the times and to survive in digital era, Cogindo faces changes through a special strategy.



Penjelasan Tema

Theme Explanation

Optimizing Synergy for Sustainable Future

Optimalisasi Sinergi untuk Masa Depan Berkelanjutan

PT PLN Indonesia Power Services (PLN IP Services) menargetkan pertumbuhan berkelanjutan melalui inovasi digital untuk meningkatkan *brand awareness* dan reputasi di sektor energi melalui optimalisasi sinergi yang menyeluruh. Perusahaan fokus pada teknologi digital untuk membentuk masa depan yang lebih berkelanjutan, dengan inovasi yang diterapkan pada setiap aspek operasional yang terdigitalisasi. Ini termasuk penggunaan platform digital untuk kolaborasi dan teknologi analisis data guna memahami pasar dengan lebih baik.

Inovasi digital yang dilakukan PLN IP Services tidak hanya menguntungkan Perusahaan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Hal ini terlihat dari penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan akses layanan di daerah terpencil, serta pengurangan emisi karbon melalui solusi hemat energi. PLN IP Services berkomitmen untuk terus berinovasi dan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan, serta melaporkan kemajuan mereka dalam mencapai tujuan keberlanjutan.

PLN IP Services juga fokus pada diversifikasi portofolio energinya dengan memperluas bisnis di sektor minyak dan gas, energi baru terbarukan (EBT), dan berbagai inisiatif bisnis digital. Perusahaan berusaha memenuhi kebutuhan energi konvensional yang masih dominan di pasar, sementara investasi dalam EBT merupakan langkah strategis untuk keberlanjutan jangka panjang, sejalan dengan peningkatan permintaan global akan energi bersih. Oleh karena itu, tema **“Optimalisasi Sinergi untuk Masa Depan Berkelanjutan”** PLN IP Services menunjukkan komitmennya terhadap perubahan menuju era digital dan keberlanjutan.

PT PLN Indonesia Power Services (PLN IP Services) targets sustainable growth by digital innovation to increase brand awareness and reputation in the energy sector through the comprehensive synergy. The Company focuses on digital technology to shape a more sustainable future, with innovations applied to every aspect of digitized operations. This includes the use of digital platforms for collaboration and data analytics technology to better understand the market.

Digital innovations by PLN IP Services not only benefit the Company but also have a positive impact on society and the environment. This can be seen in the creation of new jobs, improved access to services in remote areas, and reduced carbon emissions through energy-efficient solutions. PLN IP Services is committed to continuing to innovate and contribute to sustainable development, and reporting on their progress in achieving sustainability goals.

PLN IP Services also focuses on diversifying its energy portfolio by expanding business in the oil and gas sector, new renewable energy (“EBT”), and various digital business initiatives. The Company strives to fulfill the conventional energy needs that are still dominant in the market, while investment in renewable energy is a strategic move for long-term sustainability, in line with the increasing global demand for clean energy. Therefore, the theme **“Optimizing Synergy for Sustainable Future”** PLN IP Services shows its commitment to change towards the digital era and sustainability.

Optimizing Synergy for Sustainable Future

Optimalisasi Sinergi
Untuk Masa Depan Berkelanjutan

PT PLN Indonesia Power Services
Laporan Tahunan 2023 Annual Report



Daftar Isi

Table of Contents

2	Sanggahan Disclaimer	4	Penjelasan Tema Theme Explanation	9	Pencapaian Penting 2023 2023 Key Achievements
3	Kesinambungan Tema Theme Continuity	6	Daftar Isi Table of Contents		

Ikhtisar Utama Main Highlights

01.

12	Ikhtisar Data Keuangan Penting Important Financial Highlight	17	Aksi Korporasi Corporate Action	18	Ikhtisar Obligasi Bonds Overview
16	Ikhtisar Operasional Operational Highlights	18	Penghentian Sementara Perdagangan Saham (<i>Suspension</i>), dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (<i>Delisting</i>)	19	Peristiwa Penting 2023 Important Events in 2023
17	Informasi Saham Share Highlights		Temporary Suspension of Stock Trading, and/or Delisting of Share	29	Penghargaan dan Sertifikasi 2023 Awards and Certifications 2023
17	Ikhtisar Efek Lainnya Other Securities Highlights				

Laporan Manajemen Management Report

02.

39	Laporan Dewan Komisaris The Board of Commissioner's Report	52	Laporan Direksi The Board of Directors' Report
----	----------------------------------------------------------------------	----	----------------------------------------------------------

Profil Perusahaan Company Profile

03.

78	Identitas Perusahaan Company Identity	104	Struktur Organisasi Organizational Structure	134	Roadmap Sumber Daya Manusia Roadmap Human Capital
80	Riwayat Singkat Perusahaan Brief History of The Company	106	Dewan Komisaris Board of Commissioners	135	Manajemen Sumber Daya Manusia Human Capital Management
85	Budaya Perusahaan Corporate Culture	107	Direksi Board of Directors	135	Tata Kelola Sumber Daya Manusia Human Capital Governance
86	Visi Misi Perusahaan Company Vision Mission	108	Profil Dewan Komisaris Profile of the Board of Commissioners	136	Rekrutmen Sumber Daya Manusia Human Capital Recruitment
90	Motto Perusahaan Motto of The Company	118	Profil Direksi Profile of the Board of Directors	139	Human Capital; Satisfaction & Engagement / HCSE Human Capital Satisfaction & Engagement / HCSE
91	Logo Perusahaan Logo of The Company	126	Pejabat Eksekutif Executive Officers	141	Produktivitas SDM HC Productivity
93	Bidang Usaha Line of Business	128	Sumber Daya Manusia Human Capital	141	Hubungan Industrial Industrial Relations
98	Keanggotaan Asosiasi Association Membership	130	Direktorat Sumber Daya Manusia Human Capital Directorate		
100	Wilayah Operasional Operational Area				

142	Penilaian Kinerja Performance Assessment	171	Roadmap Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Infrastructure Roadmap of Information Technology and Communication	187	Entitas Anak dan Asosiasi Subsidiaries and Associated Entity
143	Pencapaian Program Kerja Tahun 2023 Achievement of Work Program in 2023	171	Struktur Tata Kelola dan Manajemen TI Cogindo IT Governance and Management Structure of Cogindo	188	Struktur Grup Perusahaan Corporate Group Structure
143	Rencana Pengembangan SDM Ke Depan HC Development Plan In The Future	174	Program Kinerja TI Tahun 2023 IT Performance Program In 2023	188	Kronologis Pencatatan Saham Chronology of Share Listing
145	Statistik Sumber Daya Manusia Human Capital Statistics	179	Penelitian dan Pengembangan Research and Development	189	Kronologis Pencatatan Efek Lainnya Chronology of Share Listing
168	Teknologi Informasi Information Technology	180	Pengembangan Kompetensi Competency Development	189	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm
170	Struktur Organisasi Departemen Sistem Informasi Organizational Structure of Information System Department	181	Rencana Pengembangan TI 2023 IT Development Plan In 2023	192	Lembaga/Profesi Penunjang Supporting Institutions/Professions
		184	Struktur dan Komposisi Pemegang Saham Shareholders Structure and Composition	194	Situs Web Perusahaan Company Website



Analisa dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

04.

200	Tinjauan Makroekonomi dan Industri Macroeconomic and Industrial Review	240	Investasi Barang Modal yang Direalisasikan pada Tahun Buku Terakhir Capital Goods Investment Realized in the Fiscal Year	249	Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan/atau Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan Management Stock Ownership Program (MSOP) and/or Employee Stock Ownership Program (ESOP)
206	Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha Operational Performance Overview by Segment	242	Perlindungan Risiko terhadap Mata Uang Asing Risk Protection Against Foreign Currency	250	Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Berelasi Material Transaction Information Containing Conflict of Interest and/or Transactions with Affiliated Parties
220	Tinjauan Keuangan Financial Review	243	Perbandingan Target dan Realisasi, Serta Proyeksi Satu Tahun ke Depan Comparison of Targets and Realizations, and Projections for the Next Year	254	Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berdampak Terhadap Perusahaan Changes to Regulations that Impact on the Company
227	Laporan Laba (Rugi) Statement of Profit (Loss)	245	Kebijakan dan Pembagian Dividen Dividend Policy and Distribution	255	Perubahan Kebijakan Akuntansi Changes in Accounting Policy
229	Laporan Arus Kas Statement of Cash Flows	246	Kontribusi kepada Negara Contribution to the State	256	Aspek Pemasaran Marketing Aspect
232	Rasio Keuangan Utama Key Financial Ratio	246	Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Realization of the Use of Public Offering Proceeds	257	Prospek dan Kelangsungan Usaha Prospects and Business Continuity
233	Kemampuan Membayar Utang Solvability	247	Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan Realization of the Use of Public Offering Proceeds		
234	Kolektibilitas Piutang Receivables Collectibility	249	Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, Restrukturisasi Utang/Modal Material Information Regarding Investment, Expansion, Divestment, Merger/Consolidation, Acquisition, Debt/Capital Restructuring		
235	Struktur Modal dan Kebijakan Struktur Modal Capital Structure and Capital Structure Policy				
237	Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal Material Bonds for Capital Investment				
237	Ikatan Material Tahun 2023 Material Bond of 2023				



Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

05.

264	Pendahuluan Introduction	363	Pengungkapan Hubungan Afiliasi Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali Disclosure of Affiliated Relationship Between Members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Major and/or Controlling Shareholders	444	Akses Informasi dan Data Perusahaan Access to Company Information and Data
278	Penilaian Penerapan Governansi Korporat Assessment of The Implementation of Corporate Governance	364	Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi Performance Assessment of The Board of Commissioners and Board of Directors	446	Kode Etik Code of Conduct
287	Tingkat Kesehatan Perusahaan The Company's Soundness Level	370	Sekretaris Dewan Komisaris Secretary to The Board of Commissioners	451	Cogindo Bersih Cogindo Bersih
288	Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholder	373	Komite Audit Audit Committee	452	Whistleblowing System Whistleblowing System
305	Dewan Komisaris Board of Commissioners	373	Komite Audit Audit Committee	462	Transparansi Praktik <i>Bad Corporate Governance</i> Transparency of Bad Corporate Governance Practice
323	Direksi Board of Directors	384	Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee	464	Penerapan Tata Kelola Perusahaan Lainnya Implementation of Other Corporate Governance
344	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Meetings of The Board of Commissioners and The Board of Directors	395	Pelaksana Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi Implementing Functions of The Nomination and Remuneration Committee	464	Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan/atau Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan Management Stock Ownership Program (MSOP) and/or Employee Stock Ownership Program (ESOP)
352	Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Working Relationship of the Board of Commissioners and the Board of Directors	396	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	465	Kebijakan Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Anti-Corruption Policy and Gratification Control
354	Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Nomination of The Board of Directors and Commissioners	401	Satuan Audit Internal Internal Audit Unit	469	Pemberian Dana untuk Kegiatan Politik dan Sosial Provision of Funding for Political and Social Activities
359	Independensi dan Transparansi Dewan Komisaris dan Direksi Independence and Transparency of the Board of Commissioners and Board of Directors	417	Sistem Pengendalian Internal Internal Control System	470	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Management of State Official Wealth Report (LHKPN)
361	Kebijakan Mengenai Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris Dan Direksi Policy Regarding Diversity in The Composition of The Board of Commissioners and Board of Directors	423	Manajemen Risiko Risk Management		



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

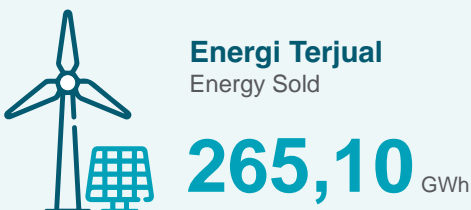
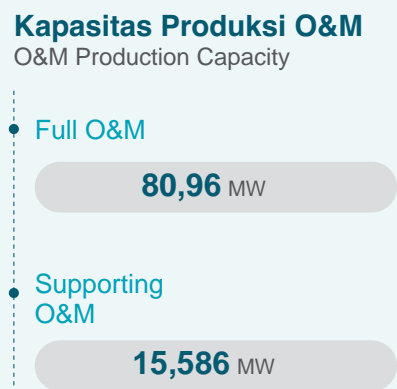
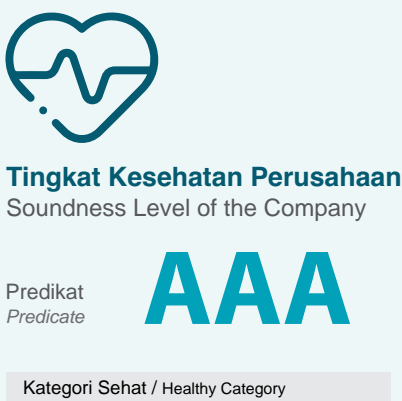
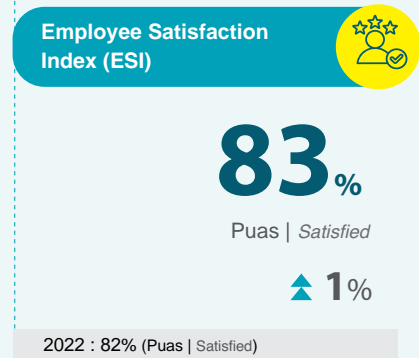
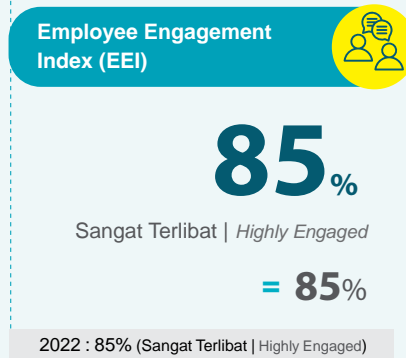
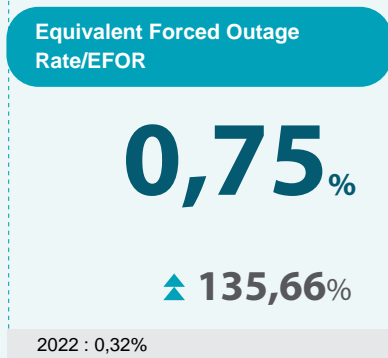
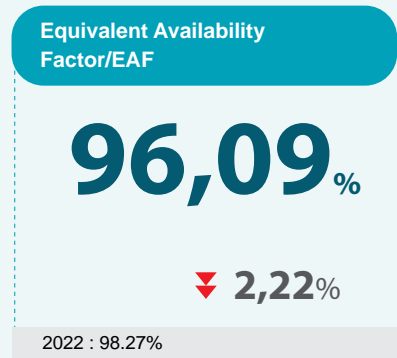
Corporate Social Responsibility

06.

476	Kinerja Ekonomi Economic Performance	488	Kinerja Sosial Social Responsibilities Related to Fair Operations	498	Pengungkapan Laporan Keberlanjutan Sustainability Report Disclosure
478	Kinerja Lingkungan Hidup Environmental Performance				
501	Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2023 PT PLN Indonesia Power Services Statement of Board of Commissioners and Board of Directors Members on Accountability for the Annual Report 2023 of PT PLN Indonesia Power Services	505	Referensi SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021: Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik SEOJK Reference Number 16/SEOJK.04/2021: Form and Content of the Annual Report of Issuers or Public Companies	545	Laporan Keuangan Konsolidasian Consolidated Financial Report
		527	Kriteria Annual Report Awards Annual Report Award Criteria		

Pencapaian Penting 2023

2023 Key Achievements





01 ◀

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Financial Highlights

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Important Financial Highlights

IKHTISAR KEUANGAN

FINANCIAL HIGHLIGHTS

► Aset Assets

Uraian	2023	2022	2021	Description
Aset Lancar				Current Assets
Kas dan Setara Kas	227.025	259.449	261.332	Cash and Cash Equivalents
Deposito Berjangka	2.500	-	-	Time Deposits
Kas yang Dibatasi Penggunaannya - bagian lancar	22.900	-	-	Restricted cash - current portion
Piutang Usaha	408.483	464.792	376.376	Trade Receivable
Piutang Lain-lain	4.581	7.606	15.384	Other receivables
Persediaan	15.649	9.348	8.507	Inventories
Pajak Dibayar Dimuka – bagian lancar	70.906	39.034	44.809	Prepaid Taxes - current portion
Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka – bagian lancar	9.475	14.525	3.034	Prepaid Expenses and Advances - current portion
Piutang dari Ventura Bersama – bagian lancar	-	-	9.225	Receivables from Joint Venture - current portion
Aset Lancar Lainnya	6.711	2.551	6.449	Other Current Assets
Jumlah Aset Lancar	768.230	797.305	725.116	Total Current Assets
Aset Tidak Lancar				Non-Current Assets
Kas yang Dibatasi Penggunaannya - bagian tidak lancar	2.083	-	-	Restricted Cash - non current portion
Piutang dari Ventura Bersama	22.826	17.559	-	Receivable from Joint Ventures
Pajak Dibayar di Muka - bagian tidak lancar	78.110	86.445	46.978	Prepaid Tax - non-current portion
Biaya dibayar di muka dan uang muka – bagian tidak lancar	-	3.244	25.203	Prepaid Expenses and advance-non-current portion
Aset Tetap	188.370	254.767	283.919	Fixed Assets
Aset Hak-Guna	12.784	12.679	17.465	Right of Use Assets
Investasi pada Ventura Bersama	11.057	9.521	8.234	Investment in Joint Venture
Aset Pajak Tangguhan	20.795	8.662	9.778	Deferred Tax Assets
Aset tidak lancar lainnya	13.096	9.461	80.113	Other Non-Current Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar	349.121	402.338	399.509	Total Non-Current Assets
Total Aset	1.117.351	1.199.643	1.124.625	Total Assets

Dalam juta Rupiah | In Rupiah million

► Liabilitas dan Ekuitas

Liabilities and Equity

Uraian	2023	2022	2021*)	Description
Liabilitas Jangka Pendek				Current Liabilities
Utang Usaha	42.577	82.180	39.705	Trade Payable
Utang Lain-lain	1.976	2.539	2.826	Other Payables
Utang Pajak				Tax Debt
Pajak Penghasilan Badan	9.996	2.654	2.338	Corporate Income Tax
Pajak lainnya	14.144	28.565	17.301	Other Taxes
Biaya Masih Harus Dibayar	64.951	134.680	162.285	Accrued Expenses
Liabilitas Imbalan Kerja - jangka pendek	31.791	18.857	57.575	Short term Employee Benefits Liabilities
Liabilitas Sewa – jangka pendek	6.993	7.664	11.881	Lease Liabilities - Current Portion
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	172.428	277.139	293.911	Total Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang				Non-Current Liabilities
Liabilitas Sewa - jangka panjang	5.209	5.566	6.416	Lease Liabilities - Non Current Portion
Liabilitas Imbalan Pascakerja	40.627	30.047	23.671	Post-Employment Benefit Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	45.836	35.613	30.087	Total Non-Current Liabilities
Total Liabilitas	218.264	312.752	323.998	Total Liabilities
Ekuitas				Equity
Modal Saham	514.868	514.868	514.868	Capital Stock
Tambahan Modal Disetor	23.719	23.719	23.719	Additional paid - In Capital Retained Earnings
Saldo Laba				Retained Earning
Ditentukan Penggunaannya	159.332	159.332	159.332	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	203.842	190.973	179.827	Non-Appropriated
Rugi Komprehensif Lain	(2.674)	(2.001)	(4.938)	Other Comprehensive Loss
Total Ekuitas	899.087	886.891	872.808	Total Equity
Total Liabilitas dan Ekuitas	1.117.351	1.199.643	1.196.806	Total Liabilities and Equity

Dalam juta Rupiah | In Rupiah million

► **Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lainnya**
Consolidated Profit and Other Comprehensive Income

Uraian	2023	2022	2021	Description
Pendapatan Usaha	1.607.653	1.752.466	1.248.106	Revenues
Beban Pokok Pendapatan	(1.371.525)	(1.438.402)	(967.683)	Cost of Revenue
Laba Bruto	236.128	314.064	280.423	Gross Profit
Beban Umum dan Administrasi	(91.269)	(85.464)	(65.394)	General and Administrative Expenses
Beban Lain-Lain - Bersih	(13.759)	(15.662)	(4.590)	Others Expenses - Net
Laba Usaha	131.100	212.938	210.439	Operating Income
Penghasilan Keuangan	5.567	4.868	5.050	Financial Income
Biaya Keuangan	(922)	(1.143)	(1.853)	Financial Expenses
(Kerugian)/Keuntungan Selisih Kurs - Bersih	(178)	2.493	305	(Loss)/Gain on Foreign Exchange - Net
Bagian Laba Bersih pada Ventura Bersama	1.585	121	-	Share of Net Income in Joint Ventures
Laba Sebelum Pajak	137.152	219.277	213.941	Profit Before Tax
Beban pajak penghasilan	(46.055)	(62.822)	(59.021)	Income Tax Expense
Laba Tahun Berjalan	91.097	156.455	154.920	Profit for the Year
(Kerugian)/Penghasilan Komprehensif Lain				Other Comprehensive (Loss)/Income
Pos-pos yang akan direklasifikasike laba rugi:				Items that will be reclassified to profit or loss:
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(49)	1.166	-	Foreign exchange differences on translation of financial statements
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasike laba rugi:				Items that will not be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pascakerja	(800)	2.270	(420)	Remeasurement on post-employment benefit liabilities
Pajak penghasilan terkait	176	(499)	92	Income tax related
(Kerugian)/Penghasilan Komprehensif Lain	(673)	2.937	(328)	Other Comprehensive (Loss)/Income, Net of Tax
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	90.424	159.392	154.292	Total Comprehensive Income for The Year

Dalam juta Rupiah | In Rupiah million

► **Arus Kas**
Cash Flows

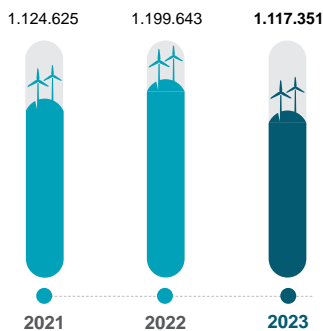
Uraian	2023	2022	2021	Description
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	78.271	202.523	152.132	Cash Flow from Operating Activities
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(24.177)	(45.821)	(9.395)	Cash Flow from Investing Activities
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	(86.518)	(158.571)	(149.480)	Cash Flow from Financing Activities
Penurunan Bersih Kas dan Setara Kas	(32.424)	(1.883)	(6.563)	Net Decrease in Cash and Cash Equivalents
Kas dan Setara Kas Awal tahun	259.449	261.332	267.895	Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year
Kas dan Setara Kas Akhir tahun	227.025	259.449	261.332	Cash and Cash Equivalents at the End of the Year

Dalam juta Rupiah | In Rupiah million

► **Rasio Keuangan**
Financial Ratios

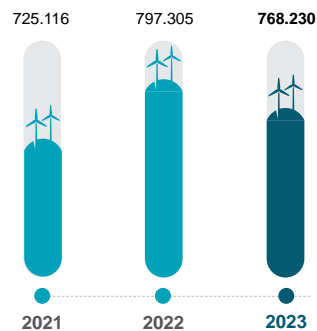
Uraian	2023	2022	2021	Description
Rasio Likuiditas		Liquidity Ratio		
Rasio Kas	1,32	0,94	0,89	Cash Ratio
Rasio Cepat	4,36	2,84	2,44	Quick Ratio
Rasio Lancar	4,46	2,88	2,47	Current Ratio
Rasio Solvabilitas		Solvency Ratio		
Rasio Utang terhadap Aset (DAR)	0,20	0,26	0,29	Debt to Assets Ratio (DAR)
Rasio Utang terhadap Ekuitas (DER)	0,24	0,35	0,37	Debt to Equity Ratio (DER)
Rasio Profitabilitas (%)		Profitability Ratio (%)		
Tingkat Pengembalian Aset (ROA)	8,15%	13,04%	13,78%	Return on Assets (ROA)
Tingkat Pengembalian Ekuitas (ROE)	10,13%	17,64%	17,75%	Return on Equity (ROE)
Profit Margin Rasio	5,67%	8,93%	12,41%	Margin Ratio Profit
Kolektibilitas Piutang		Accounts Receivable		
Receivables Turnover (kali)	3,68	4,17	2,85	Receivables Turnover (times)
Collection Period (hari)	99	88	128	Collection Period (days)

► **Total Aset**
Total Assets



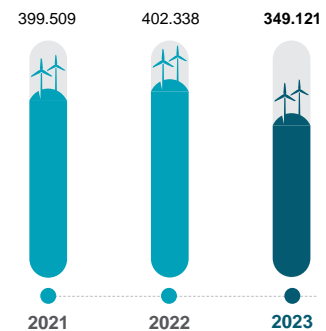
Dalam juta Rupiah
in Rupiah million

► **Jumlah Aset Lancar**
Total Current Assets



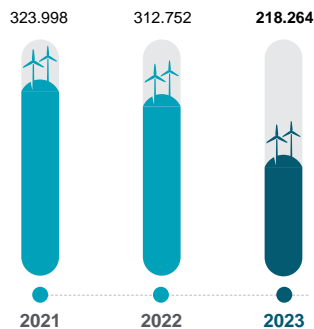
Dalam juta Rupiah
in Rupiah million

► **Jumlah Aset Tidak Lancar**
Total Non Current Assets



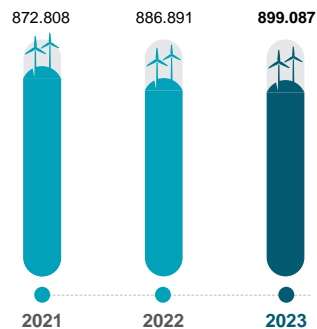
Dalam juta Rupiah
in Rupiah million

► **Total Liabilitas**
Total Liabilities



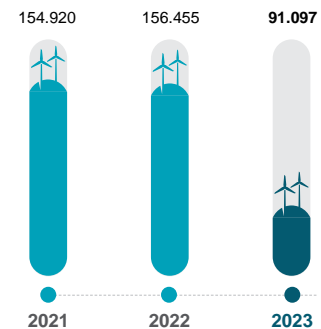
Dalam juta Rupiah
in Rupiah million

► **Total Ekuitas**
Total Equity



Dalam juta Rupiah
in Rupiah million

► **Laba Tahun Berjalan**
Profit for the Year



Dalam juta Rupiah
in Rupiah million

Ikhtisar Operasional

Operational Highlights

Uraian	2023	2022	2021	Description
Equivalent Availability Factor/EAF (%)	96,09	98,27	94,44	Equivalent Availability Factor/ EAF (%)
Equivalent Forced Outage Rate/ EFOR (%)	0,75	0,32	0,3	Equivalent Forced Outage Rate/ EFOR (%)
Skor Assessment GCG (poin)	91,90	91,71	91,07	GCG Assessment Score (points)
Penjualan Tenaga Listrik * (Rp juta)	181.141	156.627	65.368	Sales of Electricity (Rp million)
Jasa O&M (Rp juta)	917.384	652.933	663.796	O&M Services (Rp million)
Penjualan Material dan Suku Cadang (MRO Services) (Rp Juta)	509.128	942.906	518.942	Sales of materials and spare parts (MRO Services) (Rp million)
Jumlah Pendapatan Usaha (Rp juta)	1.607.653	1.752.466	1.248.106	Total Revenue (Rp million)

Catatan | Note* :

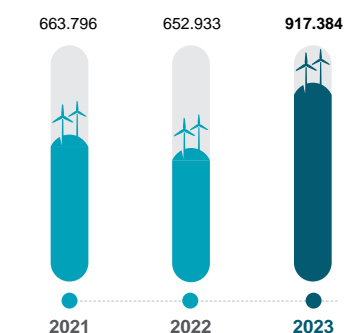
Terdapat penyesuaian pada tahun 2023, dimana sewa genset digabungkan dengan Penjualan tenaga listrik.

There was an adjustment in 2023, where generator rental was merged with electricity sales.

Jaringan Usaha Business Network

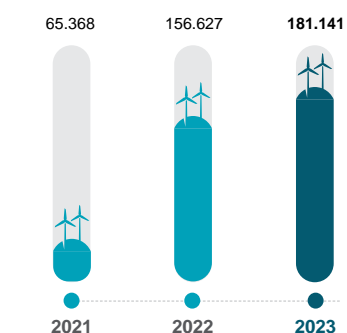
Uraian	2023	2022	2021	Description
PLTU	18	18	14	PLTU
PLTG/U	4	4	5	PLTG/U
PLTD/G	5	5	5	PLTD/G
PLTMG	11	11	11	PLTMG
PLTP	2	2	2	PLTP
PLTA	1	1	1	PLTA
Jaringan Distribusi	1	1		Distribution Network
BMPP	1	1		BMPP
Jumlah	43	43	38	Total

Jasa O&M O&M Services



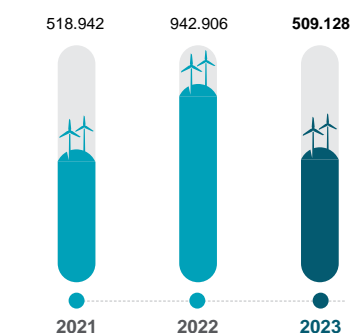
Dalam juta Rupiah
in Rupiah million

Penjualan Tenaga Listrik Electric Power Sales



Dalam juta Rupiah
in Rupiah million

MRO Services MRO Services



Dalam juta Rupiah
in Rupiah million

Informasi Saham

Share Highlights

Sampai dengan akhir tahun 2023, PLN IP Services tidak melakukan perdagangan saham sehingga tidak ada informasi terkait dengan jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, harga saham terendah dan harga saham penutupan serta volume saham yang diperdagangkan.

Until the end of 2023, PLN IP Services did not trade stock, so there is no information related to the number of outstanding shares, market capitalization, highest share price, lowest share price and closing share price and volume of shares traded.

Ikhtisar Efek Lainnya

Other Securities Highlights

Hingga 31 Desember 2023, PLN IP Services tidak menerbitkan obligasi, sukuk dan obligasi konversi sehingga tidak ada informasi terkait dengan jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar, tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo dan peringkat obligasi/sukuk.

As of December 31, 2023, PLN IP Services did not issue bonds, sukuk and convertible bonds, so there is no information related to the number of outstanding bonds/sukuk/convertible bonds, interest/ yield rates, maturity dates and bond/sukuk rating.

Aksi Korporasi

Corporate Action

Perusahaan tidak melakukan aksi korporasi terkait pencatatan saham pada tahun 2023, sehingga tidak terdapat informasi terkait kegiatan tersebut.

The company did not conduct any corporate actions related to the listing of shares in 2023, so there is no information related to these activities.

Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*), dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*)

Temporary Suspension of Stock Trading, and/or Delisting of Share

Laporan ini tidak menyertakan pengungkapan informasi terkait penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*), serta penjelasannya.

This report does not include the disclosure of information regarding the temporary suspension of stock trading (*suspension*) and/or delisting, as well as the explanation.

Ikhtisar Obligasi

Bonds Overview

Sampai dengan akhir tahun 2023, PT PLN Indonesia Power Services tidak menerbitkan obligasi, sukuk dan obligasi konversi sehingga tidak terdapat informasi terkait dengan jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar, tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo dan peringkat obligasi/sukuk.

Until the end of 2023, PT PLN Indonesia Power Services had not issued any bonds, sukuk, and convertible bonds and therefore no information is available pertaining to the total bonds/sukuks/convertible bonds issued, interest rate/yield, maturity date, and ratings of the bonds/sukuks.

Peristiwa Penting 2023

Important Events in 2023

Januari | Januari

▶ 5



Kunjungan Direktur Megaprojek & EBT PT PLN (Persero) ke PLTMG Ambon

Visit of Director of Megaproject & EBT PT PLN (Persero) to PLTMG Ambon

Bapak Wiluyo Kusdiharto mengunjungi unit Perusahaan di PLTMG Ambon dalam rangka ramah tamah dengan pegawai serta melaksanakan *Site Visit* ke Area Pembangkit.

Mr. Wiluyo Kusdiharto visited the Company's unit at PLTMG Ambon in order to be friendly with employees and carry out a *Site Visit* to the Power Generation Area.

▶ 12



Sosialisasi Aplikasi College di IT PLN

Socialization of College Application in IT PLN

PT Cogindo DayaBersama melaksanakan Sosialisasi Aplikasi *College* di IT PLN dengan tujuan memberikan peluang atau terobosan dalam metode pembelajaran *online* khususnya materi pembangkitan dengan menggunakan Aplikasi *College*.

PT Cogindo DayaBersama conducted Socialization of *College* Application in IT PLN with the purpose of providing change or breakthrough in online learning methods, especially generation material using *College* Application.

Februari | February

▶ 16



Kunjungan Direktur Utama Cogindo ke PLN Indonesia Power Adipala PGU

Visit of President Director of Cogindo to PLN Indonesia Power Adipala PGU

Direktur Utama Cogindo melaksanakan kunjungan ke PLN Indonesia Power Adipala PGU dalam rangka penandatanganan kerjasama pada komitmen penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.

President Director of Cogindo site visited PLN Indonesia Power Adipala PGU in order to sign collaboration on the commitment of safety and healthy work implementation.

▶ 22



Cogindo Raih 2 Penghargaan di Indonesia Best Electricity Award (IBECA)

Cogindo Receives 2 Awards at Indonesia Best Electricity Award (IBECA)

Di ajang ini PT Cogindo Dayabersama memenangkan ajang Indonesia Best Electricity Awards 2023, berhasil kembali meraih *The Best Operation & Maintenance Company* dan juga penghargaan *Special Award* dengan kategori *Innovation of Converting Services Motorized Vehicles to Electric Vehicle*.

In this event PT Cogindo Dayabersama won the Indonesia Best Electricity Awards 2023, won again The Best Operation and Maintenance Company and also Special Award with the category of Innovation of Converting Services Motorized Vehicles to Electric Vehicle.

Maret | March

▶ 3



Rapat Koordinasi Awal Tahun 2023 PT Cogindo DayaBersama *PT Cogindo DayaBersama Early 2023 Coordination Meeting*

Acara berlangsung selama 2 hari dengan beberapa agenda kegiatan seperti, sambutan dan arahan dari Komisaris Utama, Direktur SDM PLN Indonesia Power dan jajaran Direksi PT Cogindo DayaBersama, serta *sharing session* dari pembicara eksternal, dan pemaparan dari manajemen.

The event lasted for 2 days with several agendas of activities such as, remarks and directions from the President Commissioner, Director of Human Capital of PLN Indonesia Power and the Board of Directors of PT Cogindo DayaBersama, and sharing sessions from external speakers, and exposure from management.

▶ 14



Kunjungan Kementerian ESDM Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan ke PLTMG Sorong

Visit of Ministry of Energy and Mineral Resources Directorate General of Electricity to Sorong PLTMG

Kunjungan Kementerian ESDM ke PLTMG Sorong menandai kerjasama strategis antara pemerintah dan sektor ketenagalistrikan, memperkuat infrastruktur listrik daerah dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

The Ministry of Energy and Mineral Resources' visit to the Sorong PLTMG marks a strategic cooperation between the government and the power sector, strengthening regional electricity infrastructure and supporting sustainable development.

▶ 29



Cogindo Meraih 3 Penghargaan dalam Ajang Digitech Award 2023

Cogindo Wins 3 Awards at the Digitech Award 2023 Event

Di ajang ini PT Cogindo DayaBersama berhasil meraih tiga kategori penghargaan 5 Stars, untuk *The Best CEO For Corporate Digital Transformation Of The Year*, Ade Hendratno (Energy Services), *The Best IT Human Capital Development (Energy Services)* dan *The Best Transformation & Digital Innovation (Energy Services)*.

In this event PT Cogindo DayaBersama won three 5 Stars award categories, for The Best CEO For Corporate Digital Transformation Of The Year, Ade Hendratno (Energy Services), The Best IT Human Capital Development (Energy Services), and The Best Transformation & Digital Innovation (Energy Services).

April | April

▶ 12



Inspeksi Siaga Lebaran BOD PLN Indonesia Power di PLTMG Sorong

PLN Indonesia Power Board of Directors' Eid Standby Inspection at PLTMG Sorong

Kegiatan Inspeksi Siaga ini untuk memonitor kesiapan pembangkit dalam menyambut lebaran, serta memberikan semangat kepada tim operasi dalam menjaga keandalan unit pembangkit. Acara Kegiatan ini dilanjut dengan pemberian santunan di masyarakat sekitar pembangkit PLTMG Sorong.

This Standby Inspection is to monitor the readiness of the power plant in welcoming Eid, and to encourage the operation team in maintaining the reliability of the generating unit. This activity was continued with the provision of compensation in the community around the Sorong PLTMG plant.

▶ 14



Inspeksi Siaga Lebaran Direktur Utama Cogindo Daya Bersama di PLTD Tenau

Cogindo Daya Bersama President Director's Eid Standby Inspection at Tenau PLTD

Seusai Kegiatan Site Visit dilaksanakan, Bapak Ade Hendratno melaksanakan Penyerahan Santunan kepada Anak Yatim dan Bantuan Pendidikan Siswa/i yang kurang mampu kepada Yayasan (AI Anshar An'Nur) yang terdapat di Area Ring 1 Unit PLTD Tenau, dalam rangka HUT PT CDB yang ke-25.

After the Site Visit was conducted, Mr. Ade Hendratno conducted the Distribution of Donations to Orphans and Education Assistance for underprivileged students to the Foundation (AI Anshar An'Nur) located in the Ring 1 Area of the Tenau PLTD Unit, in the framework of PT CDB's 25th Anniversary.

Mei | May

▶ 1



7th Commercial Operation Date "Best Effort to Performance Excellent" PLTD Cogindo Tenau

7th Commercial Operation Date "Best Effort to Performance Excellent" PLTD Cogindo Tenau

PLTD Cogindo Tenau merayakan "Tanggal Operasional Komersial ke-7" dengan acara "Best Effort to Performance Excellent". Acara tersebut merupakan momen penting yang menandai dedikasi PLTD Cogindo Tenau dalam memberikan kinerja terbaik. Dengan fokus pada keunggulan kinerja, perusahaan menegaskan posisinya sebagai pemimpin dalam industri energi, memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

PLTD Cogindo Tenau celebrated its "7th Commercial Operation Date" with a "Best Effort to Performance Excellent" event. The event was an important moment marking PLTD Cogindo Tenau's dedication to delivering the best performance. With a focus on performance excellence, the Company affirms its position as a leader in the energy industry, providing the best service to the community.

▶ 11



Kunjungan SMK Negeri 1 Cirebon Mengunjungi *Workshop Cogindo* sebagai Implementasi Kurikulum Merdeka
Visit of State Vocational School 1 Cirebon to Cogindo Workshop as Implementation of Merdeka Curriculum

Siswa SMK Negeri 1 Cirebon melaksanakan kunjungan Ke *Workshop Cogindo* yang terletak di Sunyaragi, Cirebon Jawa Barat. Kegiatan kunjungan ini adalah untuk implementasikan kurikulum merdeka pada *project* penguatan profil pelajar pancasila bagi peserta didik kelas X di SMK Negeri 1 Cirebon.

Students of State Vocational School 1 Cirebon conducted a visit to the Cogindo Workshop located in Sunyaragi, Cirebon, West Java. This visit was to implement the merdeka curriculum in the project of strengthening the Pancasila student profile for class X students at the State Vocational School 1 Cirebon.

▶ 12



PLTP Ulumbu Siap Alirkan Listrik untuk Mendukung KTT Asean di Labuan Bajo
Ulumbu PLTP Ready to Provide Electricity to Support the Asean Summit in Labuan Bajo

PT PLN Indonesia Power (PLN IP) menjaga stabilitas pasokan listrik dalam menyukseskan gelaran KTT ASEAN 2023 atau ASEAN Summit 2023, dengan mengandalkan energi ramah lingkungan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) Ulumbu.

PT PLN Indonesia Power (PLN IP) maintains the stability of electricity supply in the success of the ASEAN Summit 2023, by relying on environmentally friendly energy through the Ulumbu Geothermal Power Plant (PLTP).

▶ 23



Perjanjian Kerjasama antara Jenderal Energi Baru Terbarukan dengan Cogindo DayaBersama
Cooperation Agreement between the Directorate General of New, Renewable Energy and Cogindo DayaBersama

Cogindo telah melaksanakan perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, Dan Konservasi Energi tentang Pelaksanaan Program Konversi Motor Listrik.

Cogindo has signed a cooperation agreement with the Directorate General of New, Renewable Energy and Energy Conservation on the Implementation of the Electric Motor Conversion Program.

Juni | June

▶ 16



Peringatan Acara Puncak 25 Tahun Cogindo
Cogindo's 25th Anniversary Commemoration

PT Cogindo DayaBersama merayakan acara puncak serta selebrasi anniversary Cogindo yang ke-25 dengan tema "25nergy : A Journey To Greatness Moments".

PT Cogindo DayaBersama celebrated its 25th anniversary with the theme "25nergy : A Journey To Greatness Moments".

▶ 16



Cogindo Raih 4 Penghargaan di Ajang HSE Indonesia Award 2023
Cogindo wins 4 Awards at HSE Indonesia Award 2023

PT Cogindo Daya Bersama mendapatkan penghargaan sebagai *The Best Campaign Safety 2023 (Energy Services)*, *The Best Company Concerned HSE 2023 (Energy Services)*. Adapun *Manager Dept. K3L dan Jasa Operasi Pemeliharaan Sholihah Fahtunisa* sebagai *The Best HSE Project Manager Of The Year 2023*, *Direktur Operasi CDB Mulyadi* sebagai *The Best HSE Director Of The Year 2023*. Penghargaan tersebut diraih dalam ajang *The Health, Safety, and Environment (HSE) Indonesia Award 2023* yang diselenggarakan oleh Majalah HSE di Hotel Bidakara Jakarta.

PT Cogindo Daya Bersama was awarded *The Best Campaign Safety 2023 (Energy Services)* and the *Best Company Concerned HSE 2023 (Energy Services)*. The *Manager of the Department of HSE and Maintenance Operation Services Sholihah Fahtunisa* was *The Best HSE Project Manager Of 2023*, and *CDB Director of Operations Mulyadi* was *The Best HSE Director Of 2023*. The awards were achieved at *The Health, Safety, and Environment (HSE) Indonesia Award 2023* organized by HSE Magazine at Bidakara Hotel Jakarta.

▶ 23



Penandatanganan MoU Layanan Fasilitas Ekstra untuk Pertamina EP Papua Field 2.075 MVA

MoU signing of Extra Facility Services for Pertamina EP Papua Field 2,075 MVA

Kerjasama ini adalah bentuk Sinergi BUMN dalam mendukung kualitas listrik di Pertamina EP Papua Site Klamono, serta berpotensi dapat menurunkan biaya operasional dalam memproduksi migas dan menurunkan emisi karbon secara signifikan.

This collaboration is a form of SOE Synergy in supporting the quality of electricity at Pertamina EP Papua Site Klamono, and has the potential to reduce operational costs in producing oil and gas and significantly reduce carbon emissions.

▶ 22



PLTU Kalbar-1 & PLTD Nusa Penida Raih Penghargaan K3 dari Kementerian RI

PLTU Kalbar-1 & PLTD Nusa Penida Receive OHS Award from Ministry of Republic of Indonesia

Penghargaan ini diperoleh atas komitmen PT Cogindo DayaBersama dalam menjalankan Budaya K3 di Lingkungan Kerja serta dapat mempertahankan kinerja K3, karena K3 merupakan investasi dalam menjaga keberlangsungan usaha, serta mencapai produktivitas perusahaan.

This award was obtained for PT Cogindo DayaBersama's commitment to implementing the OHS Culture in the Work Environment and being able to maintain OHS performance because OHS is an investment in maintaining business continuity and achieving company productivity.

▶ 28



Cogindo Melaksanakan Hand Over PLTMG Nabire 20 MW dari Wartsila Indonesia

Cogindo Hand Over 20 MW Nabire PLTMG from Wartsila Indonesia

Tanggal 28 Juni 2023 telah dilakukan *hand over* PLTMG Nabire 20 MW dari PT Wartsila Indonesia ke PT Cogindo DayaBersama. Ini adalah Bukti Pencapaian Cogindo dalam Bisnis Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit semakin luas untuk mendukung sistem kelistrikan di Indonesia.

On June 28, 2023, the handover of the 20 MW Nabire PLTMG from PT Wartsila Indonesia to PT Cogindo DayaBersama was conducted. This is proof of Cogindo's achievements in the Operation and Maintenance of Power Plant business to support the electricity system in Indonesia.

Juli | July

▶ 14



Kerjasama EVNNPS & Cogindo dalam operation & Maintenance Services

EVNNPS & Cogindo Cooperation in Operation & Maintenance Services

Dalam kunjungan ini EVN NPS dan Cogindo melakukan diskusi pembahasan kerjasama *Maintenance Repair & Overhaul* serta *Operation & Maintenance Services* di Pembangkitan yang dikelola oleh Cogindo.

During this visit, EVN NPS and Cogindo discussed the cooperation of *Maintenance Repair & Overhaul* and *Operation & Maintenance Services* in the Power Plant managed by Cogindo.

▶ 14



Penandatanganan MoU antara PLN Enjiniring dan Cogindo DayaBersama

MoU signing between PLN Enjiniring and Cogindo DayaBersama

PT Cogindo DayaBersama melakukan penandatanganan MoU dengan PLN Enjiniring, untuk Perencanaan Studi dan Pengembangan *Re-Engineering* serta *Continuous Emission Monitoring System*.

PT Cogindo DayaBersama signed an MoU with PLN Enjiniring, for Study Planning and Development of *Re-Engineering* and *Continuous Emission Monitoring System*.

▶ 20



Cogindo Raih Penghargaan di Ajang HR Excellence Award 2023

Cogindo Receives Awards in HR Excellence Award 2023

PT Cogindo DayaBersama mendapatkan penghargaan sebagai :

1. *Learning & Development (L&D) and Knowledge Management (Very good)*
2. *HR Digitization and People Analytic (Very good)*
3. *Wellbeing Management (Good)*

PT Cogindo DayaBersama obtained awards as follows:

1. *Learning & Development (L&D) and Knowledge Management (Very good)*
2. *HR Digitization and People Analytic (Very good)*
3. *Wellbeing Management (Good)*

Agustus | August

▶ 2



Kunjungan Direktur PLN IP ke BMPP Nusantara 1

Visit of Director of PLN IP to BMPP Nusantara 1

Dengan sinergi dan kolaborasi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kunjungan Direktur PLN IP ke BMPP Nusantara 1 menandai langkah penting dalam memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat. Melalui kerjasama ini, diharapkan dapat terwujudnya pemanfaatan sumber daya secara optimal dan berkelanjutan demi kemajuan bersama.

With synergy and collaboration between State-Owned Enterprises (SOEs), the visit of the Director of PLN IP to BMPP Nusantara 1 marks an important step in contributing more to society. Through this collaboration, it is hoped that optimal and sustainable utilization of resources can be realized for mutual progress.

▶ 6



PLN IP dan Cogindo Gelar Program IP Pintar
PLN IP and Cogindo Holds IP Pintar Program

Pada tahun 2023 ini Program IP Pintar dilaksanakan di 2 lokasi yaitu PLTU Kalbar 1 di Kalimantan Barat dan PLTP Kamojang di Garut, Jawa Barat dengan diikuti 60 siswa dari 3 SMK di Kalimantan Barat dan 6 SMK di Garut. Program IP Pintar ini dimulai dari 1 Agustus 2023 hingga 31 Januari 2024, selama 6 bulan sebagai prasyarat untuk uji kompetensi.

In 2023, the IP Pintar Program was implemented in 2 locations, namely PLTU West Kalimantan 1 in West Kalimantan and PLTP Kamojang in Garut, West Java, followed by 60 students from 3 vocational schools in West Kalimantan and 6 vocational schools in Garut. This Smart IP Program starts from August 1, 2023, to January 31, 2024, for 6 months as a prerequisite for competency testing.

▶ 15
-
▶ 16



Cogindo Gelar Rapat Koordinasi Tengah Tahun 2023
Cogindo Holds 2023 Mid-Year Coordination Meeting

Dalam rapat ini dihadiri oleh Pembina dari PLN Indonesia Power, Pemegang Saham, Komisaris Independen, Direksi dan seluruh manajemen Cogindo yang dilaksanakan secara *Offline* dan *Online* pada tanggal 15-16 Agustus 2023.

The meeting was attended by Supervisors from PLN Indonesia Power, Shareholders, Independent Commissioners, the Board of Directors, and all Cogindo management conducted Offline and Online on August 15-16, 2023.

September | September

▶ 1



PT Cogindo DayaBersama Meraih penghargaan Vision Award LACP Annual Report Competition 2023

PT Cogindo DayaBersama Achieved Vision Award LACP Annual Report Competition 2023

PT Cogindo DayaBersama meraih penghargaan *Vision Award LACP Annual Report Competition 2023* atas komitmen dan konsistensi dalam menegakkan *Good Corporate Governance*.

PT Cogindo DayaBersama was awarded the Vision Award LACP Annual Report Competition 2023 for its commitment and consistency in upholding Good Corporate Governance.

▶ 15



Serah Terima Jabatan Komisaris Independen PT Cogindo DayaBersama

Handover of Position of Independent Commissioner of PT Cogindo DayaBersama

Dengan terlaksananya serah terima jabatan Komisaris Independen PT Cogindo DayaBersama, perusahaan memasuki babak baru dalam kepemimpinan dan pengelolaan. Langkah ini menandai komitmen perusahaan untuk memperkuat struktur kepemimpinan dan memastikan kesinambungan serta kualitas dalam pengambilan keputusan strategis.

With the handover of the position of Independent Commissioner of PT Cogindo DayaBersama, the Company enters a new chapter in leadership and management. This step marks the company's commitment to strengthen its leadership structure and ensure continuity and quality in strategic decision-making.

▶ 23



Overseas Business Maintenance Repair Overhaul (MRO) meeting in Vietnam

Overseas Business Maintenance Repair Overhaul (MRO) meeting in Vietnam

Sebuah prestasi untuk Cogindo dalam memperluas bisnisnya di luar negeri dan memperkuat Beyond kWh PLN Group, serta Cogindo dapat bersaing di *overseas* pasar global.

An achievement for Cogindo in expanding its business overseas and strengthening Beyond kWh PLN Group, and Cogindo can compete in the global overseas market.

▶ 29



Direktur Mega Proyek PLN/Komisaris Utama PLN Indonesia Power Berkunjung ke PLTMG Sorong

PLN Mega Project Director/President Commissioner of PLN Indonesia Power Visits Sorong Power Plant

Direktur Mega Proyek PLN/Komisaris Utama PLN Indonesia Power Berkunjung ke PLTMG Sorong dalam rangka *First Pouring Concrete Ceremony* PLTU Sorong dengan Kapasitas 4 X 7 MV.

The Director of PLN Mega Projects / President Commissioner of PLN Indonesia Power visited the Sorong PLTMG in the context of the First Pouring Concrete Ceremony of the Sorong PLTU with a Capacity of 4 X 7 MV.

Oktober | October

▶ 7



Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Layanan Fasilitas Ekstra

Extra Facility Service Cooperation Agreement Signed

Dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Layanan Fasilitas Ekstra Pertamina EP Papua Field 2,075 MVA, PT PLN (Persero) UIW Papua & Papua Barat Pertamina EP Regional 4 Zona 14 - PT Cogindo DayaBersama sebagai bentuk Sinergi BUMN.

The Cooperation Agreement for Extra Facility Services of Pertamina EP Papua Field 2,075 MVA, PT PLN (Persero) UIW Papua & West Papua Pertamina EP Regional 4 Zone 14 - PT Cogindo DayaBersama was signed as a form of SOE Synergy.

▶ 23



Cogindo Raih Penghargaan di Indonesia Most Respected In-House Counsel 2023

Cogindo Honored in Indonesia Most Respected In-House Counsel 2023

Cogindo meraih Penghargaan di Indonesia *Most Respected In-House Counsel* 2023 sebagai penghargaan atas kreativitas dan inovasi dalam urusan legal dan mendukung kepatuhan hukum perusahaan.

Cogindo was awarded the Indonesia Most Respected In-House Counsel 2023 in recognition of its creativity and innovation in legal affairs and supporting corporate legal compliance.

November | November

▶ 18



PT Cogindo DayaBersama Berhasil Raih Penghargaan Internasional

PT Cogindo DayaBersama Achieves International Award

PT Cogindo DayaBersama berhasil raih penghargaan Internasional pada ajang *Global Performance Excellence Award*.

PT Cogindo DayaBersama won an international award at the Global Performance Excellence Award.

▶ 21



Kunjungan Direktur Distribusi PLN Ke PLTMG MPP Biak

PLN Distribution Director Visit to Biak MPP PLTMG

Direktur Distribusi PT PLN (Persero) Bapak Adi Priyanto yang didampingi oleh GM UIW P2B Bapak Budiono dan *Manager* UPK Bapak Kurniawan melaksanakan kunjungan ke Unit PLTMG MPP Biak dalam kunjungannya adalah mengecek kesiapan Siaga Event Sail Teluk Cenderawasih 2023 yang diselenggarakan di Papua pada tanggal 21 - 27 November 2023 yang dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

Distribution Director of PT PLN (Persero) Mr. Adi Priyanto, accompanied by GM UIW P2B Mr. Budiono and UPK Manager Mr. Kurniawan, paid a visit to the MPP Biak PLTMG Unit during his visit to check the readiness of the 2023 Sail Teluk Cenderawasih Event which was held in Papua on November 21-27, 2023, attended by the President of the Republic of Indonesia.

▶ 23



Direktur Operasi Sapa Pegawai Cogindo Di PLTGU Grati

Director of Operations Greet Cogindo Employees at PLTGU Grati

Dengan kunjungan Direktur Operasi untuk menyapa pegawai di PLTGU Grati, PT Cogindo menunjukkan komitmennya terhadap keterlibatan langsung dalam operasional perusahaan. Langkah ini tidak hanya memperkuat hubungan antara manajemen dan karyawan, tetapi juga menggambarkan pentingnya komunikasi dan keterbukaan dalam mencapai tujuan bersama.

With the Operations Director's visit to greet employees at PLTGU Grati, PT Cogindo showed its commitment to direct involvement in the company's operations. This step not only strengthens the relationship between management and employees but also illustrates the importance of communication and openness in achieving common goals.

Desember | December

▶ 12



Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) Biru
Blue Rating in the Corporate Performance Rating Program in Environmental Management (PROPER)

Ditjen PPKL di bawah naungan KLHK telah memberikan penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) periode 2022-2023 kepada PT PLN Indonesia Power Services - PLTD Nusa Penida. Penghargaan dengan 'Peringkat Biru' ini diberikan oleh Bapak Sigit Reliantoro sebagai apresiasi atas kinerja dan komitmen Perusahaan terhadap upaya keberlanjutan lingkungan.

Directorate General of Environmental Pollution Degradation Control under the Ministry of Environment and Forestry has awarded the Company Performance Rating Assessment Program in Environmental Management (PROPER) to PT PLN Indonesia Power Services - PLTD Nusa Penida for the 2022-2023 period. This 'Blue Rating' award was given by Mr. Sigit Reliantoro as an appreciation for the performance and commitment of the Company to environmental sustainability efforts.

▶ 15



Rapat Koordinasi Pembangkit Evaluasi Kinerja 2023 & Rencana Strategis 2023
2023 Performance Evaluation & Strategic Plan Coordination Meeting

PT Cogindo DayaBersama melaksanakan Rapat Koordinasi Pembangkit Evaluasi Kinerja 2023 & Rencana Strategis 2023.

PT Cogindo DayaBersama conducted the 2023 Plant Performance Evaluation & 2023 Strategic Plan Coordination Meeting.

▶ 28



Penyerahan Sertifikat
Certification Submission

PT Cogindo DayaBersama melaksanakan penyerahan Sertifikat Proper Biru, Penghargaan Terhadap Pengelolaan Limbah B3, dan Penghargaan Pelaporan Lingkungan Terbaik kepada PLTMG MPP 50 MW Jayapura, PLTMG MPP Nabire 2, PLTMG Timika, PLTMG Merauke 2 untuk periode 2021-2022.

PT Cogindo DayaBersama submitted the Blue Proper Certificate, Award for Hazardous Waste Management, and Best Environmental Reporting Award to PLTMG MPP 50 MW Jayapura, PLTMG MPP Nabire 2, PLTMG Timika, PLTMG Merauke 2 for the period 2021-2022.

▶ 28



MPP Papua Raih 3 Penghargaan Dalam Rapat Koordinasi Pembangkit PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat

MPP Papua Receives 3 Awards at the Coordination Meeting of PT PLN (Persero) Generating Unit for Papua and West Papua Regions

MPP Papua Raih 3 Penghargaan Dalam Rapat Koordinasi Pembangkit PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat atas kinerja keandalan terbaik.

MPP Papua won 3 awards at the PT PLN (Persero) Generating Coordination Meeting for the Papua and West Papua Region Central Unit for the best reliability performance.

Penghargaan dan Sertifikasi 2023

Awards and Certifications 2023

► Penghargaan Awards



01. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Financial Highlights

No.	Nama Penghargaan Awards Name	Lembaga/ Badan (yang memberikan) Institution/Body (who present)	Tahun Perolehan Year	Keterangan Description
1.	<i>The Best O&M Company</i> untuk Kategori <i>Best Electricity Award</i>	IBEA Award	Februari 2023	PT Cogindo DayaBersama meraih penghargaan bergengsi " <i>The Best O&M Company 2023</i> " dalam kategori <i>Best Electricity Award</i> yang diselenggarakan oleh IBEA Award 2023. Penghargaan ini diberikan pada bulan Februari 2023 sebagai bentuk pengakuan atas kinerja luar biasa perusahaan dalam bidang operasi dan pemeliharaan.
	The Best O&M Company for Best Electricity Award		February 2023	PT Cogindo DayaBersama won the prestigious "The Best O&M Company 2023" award in the Best Electricity Award category organized by IBEA Award 2023. This award was given in February 2023 as a form of recognition for the outstanding performance of the company in the operations and maintenance field.
2.	<i>Innovation of Converting Services Motorized Vehicles to Electric Vehicles</i> untuk Kategori <i>Best Electricity Award</i>	IBEA Award	Februari 2023	Pada ajang IBEA Award 2023, PT Cogindo DayaBersama kembali menunjukkan keunggulannya dengan memenangkan penghargaan " <i>Innovation of Converting Services Motorized Vehicles to Electric Vehicles</i> ". Penghargaan yang diterima pada Februari 2023 ini menegaskan komitmen perusahaan dalam inovasi di sektor kelistrikan.
	Innovation of Converting Services Motorized Vehicles to Electric Vehicles for Best Electricity Award Category		February 2023	At the 2023 IBEA Award, PT Cogindo DayaBersama again showed its excellence by winning the "Innovation of Converting Services Motorized Vehicles to Electric Vehicles" award. The award, received in February 2023, confirms the company's commitment to innovation in the electricity sector.
3.	<i>The Best CEO For Corporate Digital Transformation Of The Year</i> , Ade Hendratno untuk Kategori <i>Energy Industries</i>	Digitech Award	Maret 2023	CEO PT Cogindo DayaBersama, Ade Hendratno, dinobatkan sebagai " <i>The Best CEO For Corporate Digital Transformation Of The Year 2023</i> " oleh Digitech Award 2023. Penghargaan ini diberikan pada bulan Maret 2023, mengakui kontribusi besar dalam transformasi digital di industri energi.
	The Best CEO For Corporate Digital Transformation Of The Year, Ade Hendratno for Energy Industries Category		March 2023	CEO of PT Cogindo DayaBersama, Ade Hendratno, was honored as "The Best CEO For Corporate Digital Transformation Of The Year 2023" by Digitech Award 2023. The award was given in March 2023, recognizing major contributions to digital transformation in the energy industry.
4.	<i>The Best IT Human Capital Development</i> untuk Kategori <i>Energy Industries</i>	Digitech Award	Maret 2023	PT Cogindo DayaBersama menerima penghargaan " <i>The Best IT Human Capital Development 2023</i> " dari Digitech Award 2023. Diberikan pada Maret 2023, penghargaan ini mengapresiasi upaya perusahaan dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi.
	The Best IT Human Capital Development for Energy Industries Category		March 2023	PT Cogindo DayaBersama received the "The Best IT Human Capital Development 2023" award from Digitech Award 2023. Awarded in March 2023, this award recognizes the company's efforts in developing human capital in information technology.
5.	<i>The Best Transformation & Digital Innovation</i> untuk Kategori <i>Energy Industries</i>	Digitech Award	Maret 2023	Dalam ajang Digitech Award 2023, PT Cogindo DayaBersama berhasil meraih penghargaan " <i>The Best Transformation & Digital Innovation 2023</i> ". Penghargaan ini, yang diterima pada Maret 2023, mencerminkan komitmen perusahaan dalam inovasi dan transformasi digital.
	The Best Transformation & Digital Innovation for Energy Industries Category		March 2023	In the Digitech Award 2023, PT Cogindo DayaBersama won the "The Best Transformation & Digital Innovation 2023" award. This award, received in March 2023, reflects the company's commitment to digital innovation and transformation.
6.	<i>The Best Company Concerned HSE 2023</i> untuk Kategori <i>Energy Services</i>	HSE Award	Juni 2023	PT Cogindo DayaBersama dinobatkan sebagai " <i>The Best Company Concerned HSE 2023</i> " dalam bidang <i>Energy Services</i> oleh HSE Award. Penghargaan yang diberikan pada Juni 2023 ini mengakui dedikasi perusahaan terhadap kesehatan, keselamatan, dan lingkungan.
	The Best Company Concerned HSE 2023 Energy Services Category		June 2023	PT Cogindo DayaBersama was honored as "The Best Company Concerned HSE 2023" in Energy Services by the HSE Award. The award, given in June 2023, recognizes the company's dedication to health, safety and the environment.

No.	Nama Penghargaan Awards Name	Lembaga/ Badan (yang memberikan) Institution/Body (who present)	Tahun Perolehan Year	Keterangan Description
7.	<i>The Best Campaign Safety 2023</i> untuk Kategori <i>Energy Services</i>	HSE Award	Juni 2023	Pada HSE Award 2023, PT Cogindo DayaBersama memenangkan penghargaan " <i>The Best Campaign Safety 2023</i> ". Penghargaan ini diterima pada bulan Juni 2023 sebagai pengakuan atas kampanye keselamatan yang sukses di sektor energi.
	The Best Campaign Safety 2023 for Energy Services Category		June 2023	At the HSE Award 2023, PT Cogindo DayaBersama won the "The Best Campaign Safety 2023" award. This award was received in June 2023 for a successful safety campaign in the energy sector.
8.	<i>The Best HSE Project Manager of The Year</i> untuk Kategori <i>Energy Services</i>	HSE Award	Juni 2023	Sholihah Fahtunisa dari PT Cogindo DayaBersama menerima penghargaan " <i>The Best HSE Project Manager of The Year 2023</i> " dari HSE Award pada bulan Juni 2023. Penghargaan ini diberikan untuk mengapresiasi kepemimpinannya dalam manajemen proyek HSE.
	The Best HSE Project Manager of The Year for Energy Services Category		June 2023	Sholihah Fahtunisa from PT Cogindo DayaBersama received the "The Best HSE Project Manager of The Year 2023" award from the HSE Award in June 2023. This award was given to recognize her leadership in HSE project management.
9.	<i>The Best HSE Director Of The year</i> untuk Kategori <i>Energy Services</i>	HSE Award	Juni 2023	Direktur PT Cogindo DayaBersama, Mulyadi, dianugerahi penghargaan " <i>The Best HSE Director of The Year 2023</i> " oleh HSE Award. Penghargaan ini diberikan pada Juni 2023 sebagai bentuk pengakuan atas kepemimpinan yang luar biasa dalam bidang HSE.
	The Best HSE Director Of The year for Energy Services Category		June 2023	Director of PT Cogindo DayaBersama, Mulyadi, was awarded "The Best HSE Director of The Year 2023" by the HSE Award. The award was given in June 2023 in recognition of outstanding leadership in HSE.
10.	Penghargaan <i>Zero Accident</i>	Anugerah Penghargaan K3 Tahun 2023 PLTU Kalbar	Juni 2023	PT Cogindo DayaBersama menerima "Penghargaan <i>Zero Accident</i> " dari Anugerah Penghargaan K3 Tahun 2023 PLTU Kalbar. Penghargaan ini, yang diberikan pada Juni 2023, mengakui prestasi perusahaan dalam mencapai nol kecelakaan kerja.
	Zero Accident Award	OHS Award Year 2023 West Kalimantan PLTU	June 2023	PT Cogindo DayaBersama received the "Zero Accident Award" from the OHS Award Year 2023 West Kalimantan PLTU. This award, which was given in June 2023, recognizes the company's achievement in achieving zero work accidents.
11.	Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS (P2HIV)	Anugerah Penghargaan K3 Tahun 2023 PLTU Kalbar	Juni 2023	Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, PT Cogindo DayaBersama dianugerahi "Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS (P2HIV)" oleh Anugerah Penghargaan K3 Tahun 2023 PLTU Kalbar pada Juni 2023.
	HIV AIDS Prevention and Response Program (P2HIV) Award	OHS Award Year 2023 West Kalimantan PLTU	June 2023	In an effort to prevent and control HIV/AIDS, PT Cogindo DayaBersama was awarded the "HIV AIDS Prevention and Control Program Award (P2HIV)" by the OHS Award Year 2023 West Kalimantan PLTU.
12.	Penghargaan Program Penanggulangan COVID (P2-COVID)	Anugerah Penghargaan K3 Tahun 2023 PLTU Kalbar	Juni 2023	PT Cogindo DayaBersama kembali meraih penghargaan dari Anugerah Penghargaan K3 Tahun 2023 PLTU Kalbar untuk "Penghargaan Program Penanggulangan COVID (P2-COVID)". Penghargaan ini diberikan pada Juni 2023 sebagai pengakuan atas upaya perusahaan dalam penanggulangan COVID-19.
	COVID Countermeasure Program (P2-COVID) Award	OHS Award Year 2023 West Kalimantan PLTU	June 2023	PT Cogindo DayaBersama won another award from OHS Award Year 2023 West Kalimantan PLTU for the "COVID Countermeasure Program Award (P2-COVID)". This award was given in June 2023 in recognition of the company's efforts in overcoming COVID-19.
13.	Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS (P2HIV)	Anugerah Penghargaan K3 Tahun 2023 PLTD Nusa Penida	Juni 2023	PT Cogindo DayaBersama memperoleh "Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS (P2HIV)" dari Anugerah Penghargaan K3 Tahun 2023 PLTD Nusa Penida. Penghargaan ini diterima pada Juni 2023, mengakui kontribusi perusahaan dalam pencegahan HIV/AIDS.
	HIV AIDS Prevention and Response Program (P2HIV) Award	OHS Award Year 2023 Nusa Penida PLTD	June 2023	PT Cogindo DayaBersama received the "HIV AIDS Prevention and Response Program Award (P2HIV)" from the OHS Award Year 2023 Nusa Penida PLTD. This award was received in June 2023, recognizing the company's contribution to HIV/AIDS prevention.

01. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Financial Highlights

No.	Nama Penghargaan Awards Name	Lembaga/ Badan (yang memberikan) Institution/Body (who present)	Tahun Perolehan Year	Keterangan Description
14.	Penghargaan Program Penanggulangan COVID (P2-COVID)	Anugerah Penghargaan K3 Tahun 2023 PLTD Nusa Penida	Juni 2023	Pada Anugerah Penghargaan K3 Tahun 2023 PLTD Nusa Penida, PT Cogindo DayaBersama dianugerahi "Penghargaan Program Penanggulangan COVID (P2-COVID)" pada Juni 2023. Penghargaan ini mengapresiasi upaya perusahaan dalam penanggulangan pandemi COVID-19.
	COVID Countermeasure Program (P2-COVID) Award	OHS Award Year 2023 Nusa Penida PLTD	June 2023	At the OHS Award Year 2023 Nusa Penida PLTD, PT Cogindo DayaBersama was awarded the "COVID Countermeasure Program Award (P2-COVID)" in June 2023. This award recognizes the company's efforts in overcoming the COVID-19 pandemic.
15.	<i>Learning & Development (L&D) and Knowledge Management (Very good)</i>	HR Excellence Award 2023	Juli 2023	PT Cogindo DayaBersama menerima penghargaan " <i>Learning & Development (L&D) and Knowledge Management (Very Good)</i> " dari HR Excellence Award 2023. Penghargaan yang diberikan pada Juli 2023 ini mengakui keberhasilan perusahaan dalam pengembangan dan manajemen pengetahuan.
			July 2023	PT Cogindo DayaBersama received the "Learning & Development (L&D) and Knowledge Management (Very Good)" award from the HR Excellence Award 2023. The award, given in July 2023, recognizes the company's success in knowledge development and management.
16.	<i>HR Digitization and People Analytic (Very good)</i>	HR Excellence Award 2023	Juli 2023	Pada HR Excellence Award 2023, PT Cogindo DayaBersama meraih penghargaan " <i>HR Digitization and People Analytic (Very Good)</i> " pada Juli 2023. Penghargaan ini mengapresiasi digitalisasi HR dan analitik sumber daya manusia yang diterapkan oleh perusahaan.
			July 2023	At the HR Excellence Award 2023, PT Cogindo DayaBersama won the "HR Digitization and People Analytic (Very Good)" award in July 2023. This award appreciates the Human Capital digitization and people analytics implemented by the company.
17.	<i>World Class Company</i>	Global Performance Excellence Awards (GPEA)	Agustus 2023	PT Cogindo DayaBersama diakui sebagai " <i>World Class Company</i> " oleh Global Performance Excellence Awards (GPEA) 2023. Penghargaan yang diberikan pada Agustus 2023 ini menegaskan status perusahaan sebagai entitas kelas dunia.
			August 2023	PT Cogindo DayaBersama was recognized as a "World Class Company" by the Global Performance Excellence Awards (GPEA) 2023. The award, given in August 2023, confirms the company's status as a world-class entity.
18.	<i>Platinum Award Annual Report World Class</i>	LACP Award	Agustus 2023	Pada LACP Award 2023, PT Cogindo DayaBersama meraih penghargaan " <i>Platinum Award Annual Report World Class</i> ". Penghargaan ini diterima pada Agustus 2023 sebagai pengakuan atas laporan tahunan yang luar biasa.
			August 2023	At the LACP Award 2023, PT Cogindo DayaBersama won the "Platinum Award Annual Report World Class". This award was received in August 2023 in recognition of an outstanding annual report.
19.	<i>Top 80 Regional Ranking: 9 (Asia - Pasific)</i>	LACP Award	Agustus 2023	PT Cogindo DayaBersama masuk dalam " <i>Top 80 Regional Ranking: 9 (Asia - Pasific)</i> " dalam LACP Award 2023. Penghargaan ini, yang diberikan pada Agustus 2023, mengukuhkan posisi perusahaan di antara yang terbaik di kawasan Asia-Pasifik.
			August 2023	PT Cogindo DayaBersama was included in the "Top 80 Regional Ranking: 9 (Asia - Pasific)" in the LACP Award 2023. This award, which was given in August 2023, solidifies the company's position among the best in the Asia-Pacific region.
20.	<i>Top 20 Indonesian Reports of 2022</i>	LACP Award	Agustus 2023	PT Cogindo DayaBersama mendapatkan penghargaan " <i>Top 20 Indonesian Reports of 2022</i> " dari LACP Award 2023. Penghargaan yang diterima pada Agustus 2023 ini mengakui kualitas laporan perusahaan sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia.
			August 2023	PT Cogindo DayaBersama received the "Top 20 Indonesian Reports of 2022" award from the LACP Award 2023. The award, received in August 2023, recognizes the quality of the company's reports as one of the best in Indonesia.

No.	Nama Penghargaan Awards Name	Lembaga/ Badan (yang memberikan) Institution/Body (who present)	Tahun Perolehan Year	Keterangan Description
21.	<i>Best Booth</i>	Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE)	September 2023	Dalam Indonesia <i>International Geothermal Convention & Exhibition</i> (IIGCE) 2023, PT Cogindo DayaBersama memenangkan penghargaan "Best Booth Silver Category" pada September 2023. Penghargaan ini mengapresiasi desain dan presentasi booth perusahaan.
			September 2023	In Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2023, PT Cogindo DayaBersama won the "Best Booth Silver Category" award in September 2023. This award recognizes the company's booth design and presentation.
22.	<i>Favorite Booth</i>	Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE)	September 2023	PT Cogindo DayaBersama juga meraih penghargaan " <i>Favorite Booth</i> " dalam ajang IIGCE 2023 pada September 2023. Penghargaan ini menegaskan popularitas dan daya tarik <i>booth</i> perusahaan di acara tersebut.
			September 2023	PT Cogindo DayaBersama also won the "Favorite Booth" award at IIGCE 2023 in September 2023. This award affirmed the popularity and attractiveness of the company's booth at the event.
23.	<i>Indonesia Most Innovative In-House Counsel</i>	Indonesian In-House Counsel Awards (IHCA)	Oktober 2023	PT Cogindo DayaBersama menerima penghargaan " <i>Indonesia Most Innovative In-House Counsel Team</i> " dalam sektor <i>Industrial Maintenance, Repair, Overhaul</i> dari <i>Indonesian In-House Counsel Awards</i> (IHCA) 2023 pada Oktober 2023. Penghargaan ini mengakui inovasi tim hukum internal perusahaan.
			October 2023	PT Cogindo DayaBersama received the "Indonesia Most Innovative In-House Counsel Team" award in the Industrial Maintenance, Repair, Overhaul sector from the Indonesian In-House Counsel Awards (IHCA) 2023 in October 2023. This award recognizes the innovation of the company's in-house legal team.
24.	<i>Indonesia Most Respected In-House Counsel Leader</i> (Bu Rika)	Indonesian In-House Counsel Awards (IHCA)	Oktober 2023	Rika dari PT Cogindo DayaBersama dinobatkan sebagai " <i>Indonesia Most Respected In-House Counsel Leader</i> " oleh <i>Indonesian In-House Counsel Awards</i> (IHCA) 2023 pada Oktober 2023. Penghargaan ini mengakui kepemimpinannya yang dihormati dalam bidang hukum.
			October 2023	Rika of PT Cogindo DayaBersama was honored as the "Indonesia Most Respected In-House Counsel Leader" by the Indonesian In-House Counsel Awards (IHCA) 2023 in October 2023. The award recognizes her respected leadership in the legal field.
25.	Piagam Penghargaan Unit PLTMG MPP Nabire, PLTMG MPP Biak, PLTMG MPP Timika dan PLTMG MPP Merauke Kategori Kepatuhan Pengelolaan Limbah B3	Pengelolaan Lingkungan Terbaik	Desember 2023	PT Cogindo DayaBersama menerima Piagam Penghargaan Unit PLTMG MPP Nabire, PLTMG MPP Biak, PLTMG MPP Timika, dan PLTMG MPP Merauke dalam kategori Kepatuhan Pengelolaan Limbah B3 dari Pengelolaan Lingkungan Terbaik 2023 pada Desember 2023. Penghargaan ini mengakui upaya perusahaan dalam pengelolaan limbah.
			December 2023	PT Cogindo DayaBersama received the Nabire PLTMG MPP, Biak PLTMG MPP, Timika PLTMG MPP, and Merauke PLTMG MPP Unit Award Charter in the Hazardous Waste Management Compliance category from Best Environmental Management 2023 on December 2023. This award recognizes the company's efforts in waste management.

01. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Financial Highlights

No.	Nama Penghargaan Awards Name	Lembaga/ Badan (yang memberikan) Institution/Body (who present)	Tahun Perolehan Year	Keterangan Description
26.	Pelaporan Pengelolaan Lingkungan Terbaik Dari Dinas KLHK Propinsi Papua	Pengelolaan Lingkungan Terbaik	Desember 2023	PT Cogindo DayaBersama mendapatkan penghargaan "Pelaporan Pengelolaan Lingkungan Terbaik Dari Dinas KLHK Provinsi Papua" pada Desember 2023. Penghargaan ini mengakui komitmen perusahaan terhadap pelaporan lingkungan yang unggul.
	Best Environmental Management Reporting from the Papua Province KLHK Office	Best Environmental Management	December 2023	PT Cogindo DayaBersama received the "Best Environmental Management Reporting Award from the Papua Province KLHK Office" in December 2023. This award recognizes the company's commitment to superior environmental reporting.
27.	PLTMG MANOKWARI 20 MW - Juara 1 Kinerja keandalan terbaik pembangkit non EBT Non PLTU SULMAPANA untuk Kinerja keandalan terbaik pembangkit non EBT Non PLTU SULMAPANA	Perusahaan Induk	Desember 2023	PT Cogindo DayaBersama meraih Juara 1 Kinerja keandalan terbaik pembangkit non EBT Non PLTU SULMAPANA dalam Kinerja Keandalan Terbaik 2023 PLTMG MANOKWARI 20 MW. Penghargaan ini diterima pada Desember 2023.
	MANOKWARI 20 MW PLTMG - 1st place Best reliability performance of nonrenewable power plant Non-PLTU SULMAPANA for Best reliability performance of nonrenewable power plant Non-PLTU SULMAPANA	Holding Company	December 2023	PT Cogindo DayaBersama won 1st place for the best reliability performance of the SULMAPANA nonrenewable power plant in the Best Reliability Performance 2023 MANOKWARI 20 MW PLTMG. This award was received in December 2023.
28.	Juara 2 Kinerja Keandalan Terbaik Pembangkit Non EBT Area PLN UIW P2B untuk Kinerja Keandalan Terbaik Pembangkit Non EBT Area PLN UIW P2B	Perusahaan Induk	Desember 2023	PT Cogindo DayaBersama meraih Juara 2 Kinerja Keandalan Terbaik Pembangkit Non EBT Area PLN UIW P2B dalam Kinerja Keandalan Terbaik 2023 PLTMG TIMIKA 10 MW. Penghargaan ini diberikan pada Desember 2023.
	2 nd Place Best Reliability Performance of Non- REG Plants PLN UIW P2B Area for Best Reliability Performance of Non-REG Plants PLN UIW P2B Area	Holding Company	December 2023	PT Cogindo DayaBersama won 2nd place for the Best Reliability Performance of Non-Renewable Power Plants in PLN UIW P2B Area in the Best Reliability Performance 2023 TIMIKA 10 MW PLTMG. This award was given in December 2023.
29.	Juara 3 Kinerja keandalan terbaik pembangkit Non EBT Non PLTU SULMAPANA untuk Kinerja keandalan terbaik pembangkit Non EBT Non PLTU	Perusahaan Induk	Desember 2023	PT Cogindo DayaBersama memenangkan Juara 3 Kinerja keandalan terbaik pembangkit Non EBT Non PLTU SULMAPANA dalam Kinerja Keandalan Terbaik 2023 PLTMG SORONG 50 MW. Penghargaan ini diterima pada Desember 2023.
	3 rd place Best reliability performance of nonrenewable SULMAPANA PLTU for Best reliability performance of nonrenewable SULMAPANA PLTU	Holding Company	December 2023	PT Cogindo DayaBersama won 3 rd place for the best reliability performance of nonrenewable SULMAPANA PLTU in the 2023 Best Reliability Performance of the 50 MW SORONG PLTMG. This award was received in December 2023.

► **Sertifikasi**
Certification



No.	Nama Sertifikasi Certification Name	Bidang Sertifikasi Certification scope	Lembaga/Badan (yang memberikan) Institution/Body (who present)	Tahun Perolehan Year	Masa Berlaku Validity Period
1.	ISO 31000	Manajemen Risiko Risk Management	PT BSI	27 Desember 2022 December 27, 2022	27 Desember 2023 December 27, 2023
2.	ISO 45001:2018	<i>Provision of Electricity Generation and Supply</i>	PT BVI	2 Januari 2020 January 2, 2020	29 Januari 2026 January 29, 2026
3.	ISO 55001:2014	<i>Operation and Maintenance of Power Generation and Supply of Electrical Energy to Substation</i>	PT BVI	2 Januari 2020 January 2, 2020	1 Januari 2023 January 1, 2023
4.	ISO 9001:2015	<i>Provision of Office Management Power Supply Activity, Manpower Supply for Operation Maintenance, Repair and Overhaul Services</i>	PT BVI Transfer ke PT BSI PT BVI Transfer to PT BSI	23 September 2013 September 23, 2013	1 September 2025 September 1, 2025
5.	ISO 14001:2015	<i>Provision of Electricity Generation and Supply</i>	PT BVI	6 November 2020 November 6, 2020	5 November 2023 November 5, 2023
6.	ISO 37001:2016	Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Anti Bribery Management System	PT BSI	21 Desember 2021 December 21, 2021	20 Desember 2024 December 20, 2024
7.	Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Occupational Health and Safety Management System Certificate	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Occupational Safety and Health (OHS)	Kementerian Ketenagakerjaan RI Ministry of Labor of the Republic of Indonesia	13 Mei 2022 May 13, 2022	13 Mei 2025 May 13, 2025



02 ◀

Laporan Manajemen

Management Report



KHUSNUL MUBIEN

Komisaris Utama
President Commissioner

Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioner Report



PLN IP Services pada tahun 2023 menunjukkan upaya optimal dalam menghadapi tantangan ekonomi dan industri yang kompleks. Direksi berhasil mengelola operasional dengan efektif yang terbukti dengan pencapaian signifikan realisasi penjualan energi listrik. Dewan Komisaris optimis terhadap percepatan pengembangan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) secara berkelanjutan, yang diharapkan akan menjadi kontributor kunci dalam transisi menuju Net Zero Emission pada tahun 2060.

PLN IP Services in 2023 showed optimal efforts in encountering complex economic and industrial challenges. The Board of Directors managed the operations effectively as evidenced by the significant achievement of electric energy sales realization. The Board of Commissioners is optimistic about the accelerated development of renewable energy generation, expected to be a key contributor in the transition to Net Zero Emission by 2060.

**Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,
*Dear shareholders and stakeholders,***

Melalui kesempatan ini, kami, Dewan Komisaris, ingin menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pengawasan, pemberian saran, dan arahan kepada Direksi selama tahun 2023. Kami bersyukur atas pencapaian kinerja Perusahaan yang telah sesuai dengan target yang diharapkan.

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya, sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan pedoman kerja yang berlaku. Sebagai organ pengawas, kami telah melakukan pemantauan dan penilaian menyeluruh terhadap kinerja Direksi.

Through this opportunity, we, the Board of Commissioners, would like to deliver a report on the implementation of supervisory duties, providing advice and direction to the Board of Directors during 2023. We are grateful for the Company's performance achievements that are in line with the expected targets.

Throughout 2023, the Board of Commissioners has conducted its duties and responsibilities as appropriate, according to the Company's Articles of Association and applicable work guidelines. As the supervisory organ, we have conducted comprehensive monitoring and assessment of the performance of the Board of Directors.

Kami dapat memastikan bahwa kegiatan operasional Perusahaan telah berjalan sesuai dengan rencana bisnis yang telah ditetapkan, dikelola secara profesional, dan selaras dengan kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, kami juga memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kami memberikan apresiasi yang tinggi atas dedikasi dan kerja keras Direksi dalam mengimplementasikan strategi yang telah disusun, terutama di tengah situasi yang penuh tantangan. Kami meyakini bahwa dengan kepemimpinan dan kerja sama yang solid, Perusahaan akan terus berkembang dan mencapai kesuksesan yang lebih besar di masa depan.

PENILAIAN TERHADAP KINERJA DIREKSI MENGENAI PENGELOLAAN PERUSAHAAN

Dewan Komisaris memandang bahwa Direksi telah memberikan upaya yang optimal sehingga pada tahun 2023 PT PLN Indonesia Power Services dapat membukukan kinerja yang baik. Kontribusi yang diberikan Direksi di tengah kondisi perekonomian dan industri yang penuh tantangan patut diapresiasi karena di bawah kepemimpinan mereka, Perusahaan berhasil menghadapi tantangan sepanjang tahun 2023.

Kami sangat mengapresiasi prestasi PT PLN Indonesia Power Services yang merupakan hasil dari dedikasi seluruh manajemen dan staf Perusahaan. Keberhasilan kinerja positif PLN IP Services pada tahun 2023 diyakini Dewan Komisaris berakar dari ketekunan Direksi dalam menerapkan strategi yang adaptif, kemampuan dalam mengeksplorasi segmen yang berpotensi, dan pemanfaatan transformasi digital di hampir semua aspek operasional. Selama tahun 2023, Perusahaan mencatatkan pertumbuhan positif serta peningkatan kinerja operasional, bisnis, dan keuangan yang signifikan.

Tahun 2023 dihadapi oleh berbagai tantangan yang cukup rumit, termasuk isu geopolitik global, perubahan iklim, meluasnya dampak El Nino, dan fluktuasi harga komoditas ekspor utama yang mempengaruhi stabilitas pasar di Indonesia. Meski demikian, Direksi PT PLN Indonesia Power Services mampu menyesuaikan diri dengan tantangan-tantangan tersebut, yang tercermin dari pencapaian kinerja yang positif. Dewan Komisaris

We are able to ensure that the Company's operational activities are according to the established business plan, professionally managed, and aligned with the interests of shareholders and other stakeholders. In addition, we also ensure the Company's compliance with all applicable laws and regulations.

We highly appreciate the dedication and hard work of the Board of Directors in implementing the strategies that were prepared, especially in the midst of a challenging situation. We believe that with solid leadership and cooperation, the Company will continue to grow and achieve greater success in the future.

ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF THE BOARD OF DIRECTORS CONCERNING THE MANAGEMENT OF THE COMPANY

The Board of Commissioners considers the Board of Directors has provided optimal efforts so that in 2023 PT PLN Indonesia Power Services can record a good performance. The contributions made by the Board of Directors in the midst of challenging economic and industrial conditions should be appreciated because under their leadership, the Company managed to encounter challenges throughout 2023.

We greatly appreciate the achievements of PT PLN Indonesia Power Services which are the result of the dedication of all management and staff of the Company. The success of PLN IP Services' positive performance in 2023 is believed by the Board of Commissioners to be rooted in the Board of Directors diligence in implementing adaptive strategies, the ability to explore potential segments, and the utilization of digital transformation in almost all operational aspects. During 2023, the Company recorded positive growth and significant improvements in operational, business, and financial performance.

2023 was encountered with complex challenges, including global geopolitical issues, climate change, the widespread impact of El Nino, and fluctuations in the prices of key export commodities that affected market stability in Indonesia. Nevertheless, the Board of Directors of PT PLN Indonesia Power Services was able to adjust to these challenges, which is reflected in the positive performance achievements. The Board of Commissioners

juga memandang Direksi tetap memperhatikan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan manajemen risiko dalam seluruh upaya tersebut.

Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kinerja Direksi dalam pengelolaan PT PLN Indonesia Power Services sepanjang tahun ini. Berdasarkan data yang tersedia, Perusahaan mencatatkan penurunan laba bersih sebesar 41,77%, dengan total laba bersih tercatat sebesar Rp91,1 miliar. Pendapatan juga mengalami penurunan sebesar 8,26%, menjadi Rp1,61 triliun.

Namun, di tengah tantangan tersebut, Direksi berhasil menunjukkan kinerja yang positif dalam aspek operasional. Dewan Komisaris mencatat adanya peningkatan signifikan dalam realisasi penjualan energi listrik. Daya listrik terjual mencapai 265,10 GWh, melebihi target yang ditetapkan sebesar 256,08 GWh dengan pencapaian 103,52%.

Penurunan kinerja keuangan menunjukkan tantangan yang signifikan dalam menghadapi kondisi ekonomi dan pasar yang dinamis. Dewan Komisaris mengapresiasi upaya Direksi dalam mengelola operasional Perusahaan dan memanfaatkan peluang pasar dengan efektif serta menjalankan strategi operasional yang tepat.

Direksi Perusahaan juga melakukan monitoring berkala atas pemenuhan regulasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Lingkungan Hidup (K3LH) dan memastikan implementasinya sesuai ketentuan. Pencapaian tertinggi Perusahaan dalam penerapan K3 adalah dengan menerima sertifikat penghargaan atas Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menerapkan seluruh peraturan terkait K3LH secara menyeluruh.

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Perusahaan dengan baik. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari upaya dan komitmen seluruh jajaran manajemen dan pegawai PLN IP Services. Namun demikian, Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk terus melakukan pengelolaan dan pengurusan Perusahaan dengan mengedepankan kepatuhan pada

also considered the Board of Directors to continue to pay attention to the principles of Good Corporate Governance and risk management in all these efforts.

The Board of Commissioners evaluated the performance of the Board of Directors in managing PT PLN Indonesia Power Services throughout this year. Based on available data, the Company recorded a 41.77% decrease in net profit, with total net profit recorded at Rp91.1 billion. Revenue also decreased by 8.26%, to Rp1.61 trillion.

However, amidst these challenges, the Board of Directors managed to show positive performance in operational aspects. The Board of Commissioners recorded a significant increase in the realization of electrical energy sales. Electric power sold reached 265.10 GWh, exceeding the set target of 256.08 GWh with an achievement of 103.52%.

This decrease in financial performance represents a significant challenge in the midst of dynamic economic and market conditions. The Board of Commissioners appreciates the efforts of the Board of Directors in managing the company's operations and effectively capitalizing on market opportunities as well as executing appropriate operational strategies.

The Board of Directors of the Company also conducts periodic monitoring of the fulfillment of Occupational Health and Safety and Environment (OHSE) regulations and ensures its implementation according to the provisions. The highest achievement of the Company in the implementation of OHS is receiving a certificate of appreciation for the Occupational Safety and Health Management System from the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia. The Board of Commissioners ensures the Board of Directors has thoroughly implemented all regulations related to OHS.

The Board of Commissioners considers the Board of Directors has performed its duties and responsibilities in managing the Company well. This success cannot be separated from the efforts and commitment of all levels of management and employees of PLN IP Services. However, the Board of Commissioners encourages the Board of Directors to continue to manage and manage the Company by prioritizing compliance with applicable laws

ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dan unggul serta menghadirkan prioritas keselamatan di seluruh organisasi.

Dewan Komisaris akan terus mendukung Direksi dalam upaya perbaikan dan peningkatan kinerja perusahaan, serta memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sejalan dengan kepentingan pemangku kepentingan dan visi jangka panjang Perusahaan. Kami percaya bahwa dengan perbaikan strategi keuangan dan operasional yang lebih terarah, kinerja keuangan Perusahaan dapat kembali meningkat di masa mendatang.

PENGAWASAN TERHADAP PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI STRATEGI DIREKSI

Dewan Komisaris secara rutin memantau semua kebijakan strategis yang diambil oleh Direksi, memastikan kesesuaiannya dengan rencana kerja, visi dan misi, serta nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh Perusahaan. Pemantauan ini dilakukan dengan berpegang pada rencana kerja dan anggaran yang telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Pemegang Saham. Selain itu, Dewan Komisaris memberikan saran kepada Direksi terkait implementasi strategi bisnis, baik jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) maupun jangka pendek dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), serta pencapaian target-target Perusahaan.

Pada tahun 2023, Indonesia menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang kompleks, termasuk dampak ketidakpastian geopolitik akibat konflik Ukraina-Rusia dan Israel-Palestina, yang mempengaruhi pasokan energi dan pangan global serta meningkatkan ketidakpastian di pasar keuangan global. Ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok juga berdampak pada ekspor dan impor Indonesia, menciptakan tantangan eksternal dalam sektor perdagangan.

Perubahan cuaca ekstrem seperti cuaca dingin di Eropa dan kekeringan di Asia turut memperburuk situasi dengan dampak signifikan pada pasokan energi dan pangan, yang menekan ekonomi Indonesia. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi positif sebesar 5,05% tetap terjaga, didukung oleh aktivitas produksi yang kuat, terutama di sektor Industri Pengolahan. Kebijakan

and regulations to realize good and excellent corporate governance and present safety priorities throughout the organization.

The Board of Commissioners will continue to support the Board of Directors in its efforts to improve and enhance the performance of the Company and ensure that the steps taken are in line with the interests of stakeholders and the long-term vision of the Company. We believe that with a more focused financial and operational strategy, the financial performance of the Company can improve in the future.

SUPERVISION TO THE FORMULATION AND IMPLEMENTATION THE BOARD OF DIRECTORS STRATEGY

The Board of Commissioners regularly monitors all strategic policies adopted by the Board of Directors, ensuring that they are in line with the work plan, vision and mission, and cultural values of the Company. This monitoring is conducted by referring to the work plans and budgets prepared by the Board of Directors and approved by the Shareholders. In addition, the Board of Commissioners provides advice to the Board of Directors on the implementation of business strategies, both long-term as set out in the Company's Long-Term Plan (RJPP) and short-term in the Company's Work Plan and Budget (RKAP), as well as the achievement of the Company's targets.

In 2023, Indonesia encountered a range of complex economic challenges, including the impact of geopolitical uncertainty due to the Ukraine-Russia and Israel-Palestine conflicts, which affect global energy and food supplies and increase uncertainty in global financial markets. Trade tensions between the United States and China also impact Indonesia's exports and imports, causing external challenges in the trade sector.

Extreme weather changes such as cold weather in Europe and drought in Asia exacerbated the situation with significant impacts on energy and food supplies, putting pressure on the Indonesian economy. Nevertheless, positive economic growth of 5.05% was maintained, supported by robust production activity, especially in the Manufacturing Industry sector. Government policies in

pemerintah dalam mengendalikan inflasi, persiapan pemilu, dan konsolidasi nasional juga memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.

Dalam kondisi tantangan yang dinamis ini, diperlukan kehati-hatian dan responsivitas dari Direksi dalam menerapkan strategi yang tepat. Dewan Komisaris memandang bahwa Perusahaan berhasil menavigasi tantangan ini dengan melakukan evaluasi, penyesuaian, dan pembaharuan strategi yang sejalan dengan pencapaian target yang telah ditetapkan. Upaya ini termasuk pengoptimalan pendapatan investasi, pemanfaatan teknologi digital, dan penyusunan strategi yang sesuai dengan peraturan baru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris secara aktif mengawasi jalannya manajemen Perusahaan oleh Direksi dan memberikan nasihat serta masukan yang konstruktif secara berkala melalui rapat dengan jajaran Direksi guna memantau perkembangan bisnis serta memperhatikan isu-isu yang mempengaruhi perjalanan PT PLN Indonesia Power Services. Semua langkah ini dilakukan sesuai dengan fungsi Dewan Komisaris sebagai pengawas pengelolaan Perusahaan yang dipimpin Direksi, agar senantiasa sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai kepentingan dan tujuan Perusahaan.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA PERUSAHAAN YANG DISUSUN DIREKSI

Dewan Komisaris secara penuh mendukung strategi yang dijalankan oleh Direksi, terutama terkait dengan program Kementerian BUMN dalam mengoptimisasi lini bisnis Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai Holding ketenagalistrikan. Dewan Komisaris yakin bahwa keberlanjutan usaha Perusahaan dalam mencapai kinerja positif di tahun mendatang didasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2024 yang telah dirumuskan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Pengawasan terhadap target dan rencana kerja Perusahaan akan terus dilakukan oleh Dewan Komisaris, sementara keyakinan tetap teguh bahwa PLN IP Services akan mampu menghadapi kondisi pasar dan meraih kesuksesan jangka panjang.

controlling inflation, election preparations, and national consolidation also contributed positively to Indonesia's economic stability.

In this dynamic challenging environment, prudence and responsiveness are needed from the Board of Directors to implement the right strategy. The Board of Commissioners considers the Company successfully navigated these challenges by evaluating, adjusting, and updating its strategy in line with the achievement of the set targets. These efforts included optimizing investment income, leveraging digital technology, and developing strategies in line with new regulations from the Financial Services Authority ("OJK").

Throughout 2023, the Board of Commissioners actively supervised the management of the Company by the Board of Directors and provided constructive advice and input regularly through meetings with the Board of Directors to monitor business developments and pay attention to issues affecting the journey of PT PLN Indonesia Power Services. All of these steps are conducted in line with the function of the Board of Commissioners as the supervisor of the management of the Company led by the Board of Directors, in order to always comply with the provisions of the Articles of Association and the GMS Resolution, as well as the prevailing laws and regulations according to the interests and objectives of the Company.

OUTLOOK TO THE BUSINESS PROSPECT THAT PREPARED BY THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Commissioners fully supports the strategies implemented by the Board of Directors, especially about the Ministry of SOEs program in optimizing the State Electricity Company (PLN) business line as the Electricity Holding. The Board of Commissioners believes that the sustainability of the Company's business in achieving positive performance in the coming year is based on the Company's 2024 Work Plan and Budget (RKAP) formulated by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners. Supervision of the targets and work plans of the Company will continue to be conducted by the Board of Commissioners, while confidence remains firm that PLN IP Services will be able to encounter market conditions and achieve long-term success.

Dewan Komisaris memandang bahwa prospek bisnis yang telah dirumuskan oleh Direksi PLN IP Services, bersama dengan strategi yang telah disusun, telah dipersiapkan untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini bertujuan agar Perusahaan mampu menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang bisnis dengan baik sehingga target Perusahaan dapat tercapai secara optimal.

Selain itu, Dewan Komisaris juga berpandangan bahwa Direksi perlu terus melakukan evaluasi berkala terhadap strategi yang telah diterapkan untuk meningkatkan kinerja Perusahaan ke tingkat yang lebih optimal. Evaluasi ini harus dilakukan dengan mengelola risiko yang mungkin timbul di masa depan, dengan tetap mempertimbangkan efisiensi, keamanan, keselamatan, dan stabilitas kerja karyawan.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GCG)

PLN IP Services menegaskan komitmennya yang tinggi dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/ GCG*) dalam semua aktivitas yang dilaksanakan, sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi beserta seluruh jajaran manajemen.

Pendekatan Dewan Komisaris dalam penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga memantau proses untuk memastikan bahwa hasil yang diharapkan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris bertugas untuk menyampaikan hasil pemantauan dan peninjauan atas kesesuaian aktivitas operasional Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan serta praktik terbaik dalam penerapan GCG.

Kualitas penerapan GCG di lingkungan Perusahaan terus mengalami peningkatan, yang tercermin dari infrastruktur, struktur organisasi, dan mekanisme GCG yang semakin baik dan lengkap. Meskipun demikian, Dewan Komisaris menghimbau Direksi untuk terus meningkatkan kualitas penerapan GCG dengan melakukan benchmarking terhadap praktik terbaik, baik dari Perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Direksi juga diminta untuk membangun kebijakan tata kelola yang mengacu

The Board of Commissioners considers the business prospects formulated by the Board of Directors of PLN IP Services, together with the strategies developed, have been prepared for both the short and long term. It is intended that the Company will be able to encounter challenges and utilize business opportunities well so that the Company's targets can be achieved optimally.

In addition, the Board of Commissioners is also of the view that the Board of Directors needs to continue to conduct periodic evaluations of the strategies implemented to improve the Company's performance to a more optimal level. This evaluation must be conducted by managing risks that may arise in the future, while still considering the efficiency, security, safety, and stability of employee work.

OUTLOOK TO THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

PLN IP Services emphasizes its high commitment to implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG) in all activities implemented, as part of the duties and responsibilities shared between the Board of Commissioners and Directors and all levels of management.

The Board of Commissioners' approach to assessment not only focuses on the end result but also monitors the process to ensure that the expected results are in line with applicable regulations and procedures. The committees under the Board of Commissioners are tasked with delivering the results of monitoring and reviewing the compliance of the operational activities of the Company with laws and regulations as well as best practices in GCG implementation.

The quality of GCG implementation within the Company continues to improve, as reflected in the better and more complete GCG infrastructure, organizational structure, and mechanisms. Nevertheless, the Board of Commissioners urges the Board of Directors to continue improving the quality of GCG implementation by benchmarking against best practices, both from domestic and foreign companies. The Board of Directors is also asked to develop governance policies referring

pada visi, misi, dan arah strategis Perusahaan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, disesuaikan dengan kegiatan bisnis Perusahaan melalui identifikasi dan peninjauan terhadap peraturan internal dan eksternal Perusahaan untuk diselaraskan dengan Program Transformasi di PLN Group.

Pada tahun 2023, Perusahaan secara cermat melakukan self-assessment atas implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) PT PLN Indonesia Power Services, total nilai yang diperoleh Perusahaan adalah sebesar 91,90 dan mendapatkan predikat “Sangat Baik”. Hasil evaluasi ini tidak hanya dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tetapi juga disampaikan kepada PLN sebagai Holding. Sejalan dengan komitmen untuk menerapkan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik, PLN IP Services terus meningkatkan penerapan GCG melalui serangkaian program sosialisasi dan internalisasi GCG kepada seluruh Insan PLN IP Services.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN/ PENGELOLAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) DAN PERANAN DEWAN KOMISARIS DALAM WBS

Dalam menjalankan aktivitasnya, Perusahaan selalu memperhatikan kepentingan stakeholders berdasarkan prinsip kewajaran dan kesetaraan, sebagai bagian dari penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*). Sebagai upaya untuk menjaga integritas dan transparansi, Perusahaan telah menerapkan Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System/WBS*) yang berlaku bagi seluruh pegawai dan pemangku kepentingan. Setiap pengaduan pelanggaran akan ditindaklanjuti dengan cepat untuk mengurangi risiko terhadap reputasi Perusahaan, sehingga mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap Perusahaan.

Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi, Perusahaan telah menerapkan Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran untuk meningkatkan efektivitas WBS. Pedoman ini telah disosialisasikan kepada semua stakeholder dan Insan PLN IP Services agar dapat dipahami dan diterapkan. Pada tahun 2023, Perusahaan berhasil menindaklanjuti dan menyelesaikan 2 (dua) laporan yang masuk melalui WBS.

to the vision, mission, and strategic direction of the Company, and ensure compliance with prevailing laws and regulations, adapted to the Company’s business activities through identification and review of the internal and external regulations of the Company to be aligned with the Transformation Program in PLN Group.

In 2023, the Company carefully conducted a self-assessment of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) of PT PLN Indonesia Power Services, the total score obtained by the Company was 91.90 and received the predicate “Very Good”. The results of this evaluation were not only reported to the Financial Services Authority (“OJK”) but also submitted to PLN as the Holding Company. In line with the commitment to implement good Corporate Governance practices, PLN IP Services continues to improve the implementation of GCG through a series of GCG socialization and internalization programs for all PLN IP Services personnel.

OUTLOOK TO THE IMPLEMENTATION/ MANAGEMENT OF WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) AND THE BOARD OF COMMISSIONERS ROLES IN WBS

In conducting its activities, the Company always pays attention to the interests of stakeholders based on the principles of fairness and equality, as part of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles. As an effort to maintain integrity and transparency, the Company has implemented a Whistleblowing System (WBS) Policy that applies to all employees and stakeholders. Any complaints of violations will be followed up quickly to reduce the risk to the reputation of the Company, therefore maintaining public trust in the Company.

Following the development of Information Technology, the Company has implemented the Violation Complaint Management Guidelines to improve the effectiveness of the WBS. These guidelines have been socialized to all stakeholders and PLN IP Services personnel so they can be understood and applied. In 2023, the Company successfully followed up and resolved 2 (two) reports submitted through the WBS.

Dewan Komisaris PLN IP Services memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam menangani dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Organ Penunjang Dewan Komisaris. Dewan Komisaris membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran dan Tim Investigasi, yang terdiri dari perwakilan dari Komite Audit dan pihak lain yang diperlukan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. Kedua tim tersebut membantu Dewan Komisaris dalam mengelola dan memeriksa kebenaran dari pengaduan yang diterima serta menetapkan sanksi sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

Dewan Komisaris mengapresiasi efektivitas implementasi WBS dan berkomitmen untuk terus mengembangkan sistem ini agar tetap relevan dalam menghadapi dinamika lingkungan bisnis yang berubah-ubah. Dewan Komisaris menyadari pentingnya penyesuaian dan pembaruan terhadap WBS untuk mengatasi tantangan dan perubahan dalam lingkup operasional serta tuntutan regulasi yang berkembang. Pendekatan progresif ini diharapkan dapat memastikan bahwa WBS tidak hanya berjalan efektif saat ini, tetapi juga relevan dan adaptif di masa depan.

FREKUENSI DAN CARA PEMBERIAN NASIHAT KEPADA DIREKSI

Sebagai Dewan Komisaris, pengawasan terhadap Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) serta pencapaian yang direalisasikan pada tahun 2023 merupakan hal yang sangat penting bagi kami. Kami melaksanakan tugas pengawasan ini dengan cermat dan menyeluruh, yang mencakup persetujuan terhadap strategi yang dijalankan dan kebijakan yang dibuat oleh Direksi.

Mekanisme pengawasan kami dijalankan melalui berbagai saluran, termasuk laporan-laporan yang kami terima dari Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko. Selain itu, kami juga melakukan diskusi dan rapat secara berkala sepanjang tahun 2023 untuk membahas perkembangan Perusahaan dan kebijakan strategis yang diambil oleh Direksi.

The Board of Commissioners of PLN IP Services has the responsibility and authority to handle alleged violations committed by members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and Supporting Organs of the Board of Commissioners. The Board of Commissioners established a Violation Complaint Management Team and an Investigation Team, consisting of representatives from the Audit Committee and other parties required according to their competence and expertise. Both teams assist the Board of Commissioners in managing and examining the truth of complaints received and determining sanctions following applicable laws and regulations.

The Board of Commissioners appreciates the effectiveness of the WBS implementation and is committed to continuously developing this system to remain relevant in the face of the changing dynamics of the business environment. The Board of Commissioners recognizes the importance of adjusting and updating the WBS to address challenges and changes in the operational scope and evolving regulatory demands. This progressive approach is expected to ensure the WBS is not only effective today but also relevant and adaptive in the future.

FREQUENCY AND METHOD OF PROVIDING TO THE BOARD OF DIRECTORS

As the Board of Commissioners, supervision of the Company's Long-Term Plan ("RJPP") and the achievements realized by 2023 is very important to us. We carry out this supervisory duty carefully and thoroughly, which includes approving the strategies implemented and policies made by the Board of Directors.

Our supervisory mechanism is conducted through various channels, including reports received from the Audit Committee and Risk Management Committee. In addition, we also held regular discussions and meetings throughout 2023 to discuss the development of the Company and strategic policies taken by the Board of Directors.

Kami sebagai Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk meminta penjelasan langsung terkait dengan pencapaian kinerja Perusahaan dan perkembangan kebijakan strategis dalam forum rapat gabungan dengan Direksi. Selain itu, kami juga secara rutin meninjau semua laporan yang disampaikan oleh Direksi dan Komite di bawah kami.

Selama periode tersebut, Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan rapat bersama sebanyak 11 (sebelas) kali. Dalam rapat-rapat ini, Dewan Komisaris memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengelolaan Perusahaan, termasuk strategi bisnis, rencana operasional, dan tantangan yang dihadapi Perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Melalui forum tersebut, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi dan arahan kepada Direksi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya untuk memastikan keselarasan tujuan Perusahaan.

Dalam menjalankan tanggung jawab kami, kami tidak hanya sekedar meninjau laporan-laporan tersebut, tetapi juga kami bertindak dengan memberikan arahan, nasihat, dan pengambilan keputusan yang diperlukan untuk memastikan perbaikan dan percepatan pertumbuhan Perusahaan.

PENILAIAN TERHADAP KINERJA KOMITE-KOMITE DALAM MENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris didukung oleh serangkaian komite yang memiliki peran penting dalam fungsi pengawasan, yaitu Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko yang juga melaksanakan fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi. Berdasarkan evaluasi Dewan Komisaris sepanjang tahun 2023, masing-masing komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan mandat dalam charter yang berlaku.

We as the Board of Commissioners have the authority to request direct explanations related to the Company's performance achievements and strategic policy developments in a joint meeting forum with the Board of Directors. In addition, we also regularly review all reports submitted by the Board of Directors and the Committees under us.

During the period, the Board of Commissioners and the Board of Directors held 11 (eleven) joint meetings. During these meetings, the Board of Commissioners obtained an in-depth understanding of the Company's management, including business strategies, operational plans, and challenges encountered by the Company in running its activities. Through this forum, the Board of Commissioners provides recommendations and directions to the Board of Directors in line with its duties, responsibilities, and authorities to ensure the alignment of the Company's objectives.

In carrying out our responsibilities, we not only review the reports, but we also act by providing the direction, advice, and decision-making necessary to ensure the improvement and accelerated growth of the Company.

ASSESSMENT TO THE COMMITTEES PERFORMANCE IN SUPPORT THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is supported by a series of committees that play an important role in the supervisory function, namely the Audit Committee and Risk Management Committee, which also carry out the functions of the Remuneration and Nomination Committee. Based on the Board of Commissioners' evaluation throughout 2023, each committee has carried out its duties and responsibilities according to the mandate in the applicable charter.

Komite Audit bertanggung jawab atas pengawasan terhadap efektivitas sistem pengendalian internal, audit internal, dan proses pelaporan keuangan. Sepanjang tahun 2023, Komite Audit telah mengadakan 12 kali rapat untuk memberikan rekomendasi berdasarkan analisis terhadap informasi keuangan serta hasil audit dari Satuan Audit Internal (SAI) dan Kantor Akuntan Publik. Rekomendasi ini sangat penting bagi Dewan Komisaris dalam memastikan integritas dan keandalan laporan keuangan Perusahaan.

Komite Manajemen Risiko memiliki fokus pada pengawasan sistem manajemen risiko internal dan optimalisasi mitigasi risiko. Selama tahun 2023, komite ini telah melaksanakan 28 kali rapat untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris berdasarkan evaluasi terhadap implementasi manajemen risiko yang telah berlangsung. Rekomendasi ini membantu Dewan Komisaris dalam memastikan bahwa Perusahaan memiliki strategi yang efektif untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko-risiko yang dihadapi.

Selain itu, Komite Manajemen Risiko juga berperan sebagai Pelaksana Fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi. Tugasnya meliputi pemantauan, pengawasan, dan penilaian talenta serta manajemen Sumber Daya Manusia di PT PLN Indonesia Power Services. Sepanjang tahun 2023, komite ini telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penilaian kinerja Direksi serta usulan mengenai remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

Dewan Komisaris menilai bahwa kedua komite tersebut telah memberikan kontribusi yang signifikan melalui rekomendasi dan laporan yang relevan terkait perihal-perihal yang memerlukan perhatian khusus dan tindak lanjut. Kinerja yang efisien dan efektif dari setiap komite memastikan bahwa fungsi pengawasan Dewan Komisaris berjalan dengan optimal, mendukung tercapainya tujuan dan kepentingan Perusahaan.

The Audit Committee is responsible for supervising the effectiveness of the internal control system, internal audit, and financial reporting processes. Throughout 2023, the Audit Committee held 12 meetings to provide recommendations based on analysis of financial information and audit results from the Internal Audit Unit ("SAI") and the Public Accounting Firm. These recommendations are very important for the Board of Commissioners in ensuring the integrity and reliability of the Company's financial statements.

The Risk Management Committee focuses on supervising the internal risk management system and optimizing risk mitigation. During the year, the committee held 28 meetings to provide recommendations to the Board of Commissioners based on its evaluation of the ongoing risk management implementation. These recommendations assist the Board of Commissioners in ensuring that the Company has an effective strategy to identify, assess, and manage its risks.

In addition, the Risk Management Committee also acts as the Executive Function of the Remuneration and Nomination Committee. Its duties include monitoring, supervising, and assessing talent and Human Capital management at PT PLN Indonesia Power Services. Throughout 2023, this committee has provided recommendations to the Board of Commissioners on the performance assessment of the Board of Directors and proposals on the remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors.

The Board of Commissioners assess that both committees have contributed significantly through relevant recommendations and reports on matters requiring special attention and follow-up. The efficient and effective performance of each committee ensures that the Board of Commissioners' supervisory function is optimized, supporting the achievement of the Company's goals and interests.

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2023, terjadi dua kali perubahan dalam komposisi anggota Dewan Komisaris PT Cogindo DayaBersama. Perubahan pertama merujuk pada Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 02 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Februari 2023.

Berdasarkan keputusan ini, perusahaan memberhentikan dengan hormat Ibu Susiana Mutia dan Bapak Zaenal Mustofa, kemudian mengangkat Bapak Khusnul Mubien sebagai Komisaris Utama dan Bapak Sunandar sebagai Komisaris Independen per tanggal 1 Februari 2023. Dengan perubahan ini, komposisi Dewan Komisaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Sebelum Perubahan Before Change		Sesudah Perubahan After Change	
Nama Name	Jabatan Position	Nama Name	Jabatan Position
Susiana Mutia	Komisaris Utama President Commissioner	Khusnul Mubien	Komisaris Utama President Commissioner
Muhammad Mursid	Komisaris Commissioner	Muhammad Mursid	Komisaris Commissioner
Zaenal Mustofa	Komisaris Independen Independent Commissioner	Sunandar	Komisaris Independen Independent Commissioner
Masykuri Abdillah	Komisaris Commissioner	Masykuri Abdillah	Komisaris Commissioner

Perubahan kedua terjadi pada tanggal 29 September 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 25. Dalam keputusan ini, pemegang saham mengangkat dan menetapkan Bapak Fredy Eko Prasetyo T sebagai Komisaris Independen Perusahaan dengan masa jabatan satu periode, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.

COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In 2023, there were two changes in the composition of the Board of Commissioner of PT Cogindo DayaBersama. The first appointment on the Statement of Shareholders Decision No.02 issued on February 8, 2023.

Based on this decision, the Company honorably dismissed Mrs. Susiana Mutia and Mr. Zaenal Mustofa, then appointed Mr. Khusnul Mubien as a President Commissioner and Mr. Sunandar as a Independent Commissioner as of February 1, 2023. With this change, the composition of the Board of Commissioners of the Company is as follows:

Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris Perusahaan setelah perubahan ini adalah sebagai berikut:

Therefore, the composition of the Board of Commissioners of the Company after changes is as follows:

Sebelum Perubahan Before Change		Setelah Perubahan After Change	
Nama Name	Jabatan Position	Nama Name	Jabatan Position
Khusnul Mubien	Komisaris Utama President Commissioner	Khusnul Mubien	Komisaris Utama President Commissioner
Muhammad Mursid	Komisaris Commissioner	Muhammad Mursid	Komisaris Commissioner
Sunandar	Komisaris Independen Independent Commissioner	Sunandar	Komisaris Independen Independent Commissioner
Masykuri Abdillah	Komisaris Commissioner	Fredy Eko Prasetyo T	Komisaris Independen Independent Commissioner
		Masykuri Abdillah	Komisaris Commissioner

Namun, terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris setelah periode tanggal pelaporan akuntan, yang tercantum dalam agenda Akta Notaris No 02 tanggal 05 Januari 2024. Perubahan tersebut adalah pengangkatan Ibu Julita Indah sebagai Komisaris dan Bapak Fredy Eko Prasetyo T sebagai Komisaris Independen. Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

However, there is a change in the composition of the Board of Commissioners after the accounting reporting date period, which is listed in the agenda of Notarial Deed No. 02 dated January 05, 2024. The changes are the appointment of Mrs. Julita Indah as Commissioner and Mr. Fredy Eko Prasetyo T as Independent Commissioner. Therefore, the composition of the Board of Commissioners of the Company is as follows:

Nama Name	Jabatan Position
Khusnul Mubien	Komisaris Utama President Commissioner
Julita Indah	Komisaris Commissioner
Sunandar	Komisaris Independen Independent Commissioner
Masykuri Abdillah	Komisaris Commissioner
Fredy Eko Prasetyo T	Komisaris Independen Independent Commissioner

APRESIASI DAN PENUTUP

Dewan Komisaris meyakini bahwa seluruh Insan PLN IP Services di Perusahaan memiliki komitmen yang tinggi dan menunjukkan determinasi yang kuat dalam menghadapi setiap tantangan, yang tercermin dalam pencapaian positif yang diraih pada tahun 2023. Sebagai penutup, Dewan Komisaris ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan, yang telah memungkinkan Perusahaan untuk beradaptasi di tengah tantangan demi keberlanjutan bisnis yang lebih baik di masa mendatang.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Direksi serta seluruh Insan PLN IP Services yang telah menunjukkan dedikasi dan kerja keras mereka, yang telah membantu mewujudkan sejumlah target yang ditetapkan dengan baik. Dewan Komisaris berharap bahwa upaya kolaboratif ini akan membawa manfaat bagi pertumbuhan berkelanjutan Perusahaan. Evaluasi yang terus kami lakukan terhadap prospek bisnis di masa depan akan difokuskan pada pertumbuhan sektor bisnis yang dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi PT PLN Indonesia Power Services.

APPRECIATION AND CLOSING

The Board of Commissioners believes that all PLN IP Services personnel in the Company are highly committed and show strong determination in encountering every challenge, which is reflected in the positive achievements achieved in 2023. In closing, the Board of Commissioners would like to express its highest appreciation to the Shareholders and Stakeholders for their trust and support, which has enabled the Company to adapt amidst challenges for better business sustainability in the future.

We would also like to express our gratitude and appreciation to the Board of Directors and all PLN IP Services personnel who have shown their dedication and hard work, which has helped realize several well-defined targets. The Board of Commissioners hopes that this collaborative effort will bring benefits to the Company's sustainable growth. Our ongoing evaluation of future business prospects will focus on the growth of business sectors that can have a significant positive impact on PT PLN Indonesia Power Services.

Atas nama Dewan Komisaris
On behalf of Board of Commissioners
PT PLN Indonesia Power Services

Khusnul Mubien
Komisaris Utama
President Commissioner

Laporan Direksi

The Board of Directors' Report



PLN IP Services mencatat pencapaian solid sepanjang 2023. Meskipun laba bersih tidak mencapai target, realisasi penjualan energi listrik melebihi target menunjukkan efektivitas strategi dan operasional. Kami terus melakukan identifikasi dan evaluasi yang menjadi dasar Perusahaan dalam menjaga kelangsungan dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

PLN IP Services recorded solid achievements throughout 2023. Although net profit did not reach the target, the realization of electric energy sales exceeded the target, showing the effectiveness of strategies and operations. We continue to conduct identification and evaluation that become the basis of the Company in maintaining continuity and sustainable business growth.

Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,
Dear shareholders and stakeholders,

Marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Dengan izin-Nya, PT PLN Indonesia Power Services (PLN IP Services) berhasil melalui tahun 2023 yang penuh tantangan dengan capaian kinerja yang memuaskan. Izinkan saya, mewakili Direksi, untuk menyampaikan laporan atas pengelolaan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023. Laporan ini mencakup laporan keuangan, analisis kinerja, prospek usaha, serta perkembangan tata kelola perusahaan yang baik.

Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan para pemegang saham, dedikasi manajemen, dan kerja keras seluruh Insan PLN IP Services. Laporan Tahunan ini menjadi dasar bagi kami dalam mempertanggungjawabkan langkah-langkah strategis serta pencapaian operasional kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan. Laporan ini merefleksikan konsistensi kami dalam

Let us express our praise and gratitude to God Almighty for all the blessings and gifts given to all of us. With His grace, PT PLN Indonesia Power Services (PLN IP Services) made it through the challenging year of 2023 with excellent performance achievements. Allow me, on behalf of the Board of Directors, to submit a report on the management of the Company for the fiscal year ended December 31, 2023. This report includes financial statements, performance analysis, business prospects, and the development of good corporate governance.

This success cannot be separated from the support of shareholders, management dedication, and hard work of all PLN IP Services personnel. This Annual Report serves as a basis for us to account for our strategic initiatives and operational achievements to our shareholders and stakeholders. This report reflects our consistency in planning and implementing actions that support the Company's



HARI CAHYONO

Direktur Utama
President Director

merencanakan dan melaksanakan tindakan yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan Perseroan. Dengan penuh rasa hormat, kami persembahkan Laporan Tahunan PT PLN Indonesia Power Services sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kami.

TINJAUAN MAKROEKONOMI DAN INDUSTRI

Tinjauan Makroekonomi 2023

Tahun 2023 adalah tahun yang penuh tantangan dan peluang bagi perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 hanya berada di level 3,1%, sedikit melambat dibandingkan 2022 yang sebesar 3,5% dan masih menjadi tahun penuh tantangan. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan ketegangan geopolitik yang memicu gangguan suplai energi dan pangan global sehingga mendorong kenaikan inflasi.

Meski menghadapi ketidakpastian ekonomi global, Indonesia berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang solid sebesar 5,05%. Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp20.892,4 triliun, dengan PDB per kapita sebesar Rp75 juta atau setara dengan 4.919,7 Dolar AS. Pertumbuhan ini didukung oleh konsumsi domestik yang kuat dan kinerja perdagangan internasional yang baik, meskipun ada tantangan dari inflasi global, perubahan iklim, dan konflik geopolitik.

Bank Indonesia mencatat stabilitas nilai tukar Rupiah, yang menguat 2% pada akhir 2023 dibandingkan akhir 2022. Inflasi Harga Konsumen (IHK) pada Desember 2023 mencapai 2,61% yoy, turun dari 5,51% yoy pada tahun sebelumnya, berkat kebijakan moneter pro-stabilitas dan kerjasama antara Bank Indonesia, Pemerintah Pusat, dan Daerah. Inflasi inti tetap rendah pada 1,80% yoy, dipengaruhi oleh inflasi impor yang rendah dan ekspektasi inflasi yang terkendali.

Sektor pengadaan listrik dan gas memainkan peran vital dalam perekonomian. Pada 2023, PDB sektor ini mencapai Rp218,2 triliun, meningkat 6,60% dari tahun sebelumnya. Dari dasar harga konstan 2010, PDB sektor ini mencapai Rp128,5 triliun, meningkat 4,90% dari tahun sebelumnya. Meskipun ada penurunan laju pertumbuhan sektor ini dari 6,61% pada 2022 menjadi 4,91% pada 2023, distribusi PDB sektor pengadaan listrik dan gas tetap stabil di 1,04%.

growth and sustainability. With great respect, we present the Annual Report of PT PLN Indonesia Power Services as a form of transparency and accountability.

MACROECONOMIC AND INDUSTRY OVERVIEW

Macroeconomic Overview 2023

2023 is a year full of challenges and opportunities for the Indonesian economy. Despite global economic uncertainties, Indonesia's global economic growth in 2023 is only at 3.1%, a slight slowdown compared to 2022's 3.5%, and still a challenging year. This is mainly due to increased geopolitical tensions that trigger disruptions in global energy and food supplies, pushing up inflation.

Despite encountering global economic uncertainty, Indonesia managed to achieve solid economic growth of 5.05%. Gross Domestic Product (GDP) reached Rp20,892.4 trillion, with a GDP per capita of Rp75 million or equivalent to US\$4,919.7. This growth was supported by strong domestic consumption and good international trade performance, despite challenges from global inflation, climate change, and geopolitical conflicts.

Bank Indonesia recorded a stable Rupiah exchange rate, which strengthened by 2% by end-2023 compared to end-2022. Consumer Price Inflation (CPI) in December 2023 reached 2.61% yoy, decreased from 5.51% yoy in the previous year, due to pro-stability monetary policy and cooperation between Bank Indonesia, Central and Local Governments. Core inflation remained low at 1.80% yoy, influenced by low imported inflation and manageable inflation expectations.

The electricity and gas procurement sector plays a vital role in the economy. In 2023, the sector's GDP reached Rp218.2 trillion, an increase of 6.60% from the previous year. At constant 2010 prices, the sector's GDP reached Rp128.5 trillion, an increase of 4.90% from the previous year. Despite a decrease in the growth rate of this sector from 6.61% in 2022 to 4.91% in 2023, the GDP distribution of the electricity and gas procurement sector remained stable at 1.04%.

PT PLN Indonesia Power Services menganalisis informasi untuk perencanaan strategis dan pengembangan bisnis ke depan. Dengan memahami tren dan dinamika dalam sektor ini, Perseroan dapat lebih siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang untuk pertumbuhan berkelanjutan. Melalui strategi yang tepat, PLN IP Services akan terus berkontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih baik.

Tinjauan Industri Ketenagalistrikan 2023

Industri ketenagalistrikan di Indonesia merupakan tulang punggung pembangunan ekonomi dan sosial. Sektor ini terus berkembang, didukung oleh berbagai aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Pada tahun 2023, tren penjualan listrik dan jumlah pelanggan menunjukkan pertumbuhan yang positif.

Penjualan listrik meningkat signifikan menjadi 285,23 TWh dari 270,82 TWh pada tahun 2022, mencatat pertumbuhan sebesar 5,32%. Pertumbuhan ini mencerminkan strategi pemerintah yang efektif dalam memenuhi permintaan listrik yang terus meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan populasi. Peningkatan jumlah pelanggan listrik juga mencerminkan upaya pemerintah dalam memperluas akses listrik ke seluruh pelosok negeri.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan ESDM memiliki target ambisius untuk mencapai rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik 100%. Namun, hingga akhir tahun 2023, masih terdapat 185.662 rumah tangga di 140 desa yang belum teraliri listrik, mayoritas berada di Pulau Papua. Tantangan geografis yang signifikan menjadi kendala utama dalam mencapai target ini.

Pemerintah merencanakan investasi sebesar Rp22,08 triliun hingga tahun 2025 untuk mencapai rasio elektrifikasi 100%, dengan alokasi 75,66% untuk perluasan jaringan listrik. Di wilayah yang sulit dijangkau, seperti Papua, pemerintah juga menganggarkan Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL) dan Stasiun Pengisian Energi Listrik (SPEL) untuk memastikan akses listrik yang merata.

Realisasi konsumsi listrik per kapita pada tahun 2023 mencapai 1.337 kWh/kapita, memenuhi target yang telah ditetapkan. Dalam upaya mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan demand listrik moderat sebesar 4.500 kWh/kapita, dengan 88% berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT) dan 12% dari energi fosil dan *Carbon Capture and Storage* (CCS).

PT PLN Indonesia Power Services analyzes information for strategic planning and future business development. By understanding the trends and dynamics in the sector, the Company can be better prepared to encounter challenges and capitalize on opportunities for sustainable growth. Through the right strategy, PLN IP Services will continue to contribute to the development of a better Indonesian economy.

Electricity Industry Overview 2023

The electricity industry in Indonesia is the cornerstone of economic and social development. The sector continues to grow, supported by political, economic, social, technological, environmental, and legal aspects. In 2023, the trend of electricity sales and the number of customers showed positive growth.

Electricity sales increased significantly to 285.23 TWh from 270.82 TWh in 2022, recording a growth of 5.32%. This growth reflects the government's effective strategy in meeting the growing demand for electricity in line with economic development and population growth. The increase in the number of electricity customers also reflects the efforts of the government in expanding access to electricity to all corners of the country.

The Directorate General of Electricity of ESDM has ambitious targets to achieve a 100% electrification ratio and a 100% electrified village ratio. However, by the end of 2023, there are still 185,662 households in 140 unelectrified villages, the majority of which are located in Papua Island. Significant geographical challenges are a major obstacle to achieving this target.

The government plans to invest Rp22.08 trillion by 2025 to achieve a 100% electrification ratio, with 75.66% allocated for grid expansion. In hard-to-reach areas, such as Papua, the government is also budgeting for Electric Power Distribution Equipment ("APDAL") and Electric Energy Charging Stations ("SPEL") to ensure equitable access to electricity.

The realization of electricity consumption per capita in 2023 reached 1,337 kWh/capita, meeting the set target. To achieve Net Zero Emission by 2060, the government projects a moderate growth in electricity demand of 4,500 kWh/capita, with 88% coming from Renewable Energy (RE) and 12% from fossil energy and *Carbon Capture and Storage* (CCS).

Implementasi Supergrid menjadi langkah strategis dalam mencapai target elektrifikasi dan transisi energi. *Supergrid* akan meningkatkan interkoneksi energi antar pulau dan mengatasi ketidakseimbangan bauran energi di Indonesia, mendukung distribusi energi yang lebih efisien dan andal.

Kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk BUMN seperti PLN, BUMD, swasta, koperasi, dan masyarakat, sangat penting untuk mewujudkan target elektrifikasi. PLN, sebagai prioritas pertama Pemegang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL), memainkan peran sentral dalam penyediaan listrik, namun partisipasi berbagai pihak juga diperlukan untuk mempercepat pencapaian target dan meningkatkan pemerataan akses listrik di daerah yang belum teraliri listrik.

Industri ketenagalistrikan Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan tren positif dengan peningkatan penjualan dan jumlah pelanggan listrik. Meskipun menghadapi tantangan geografis, dengan perencanaan matang dan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan, target elektrifikasi dapat tercapai. Implementasi Supergrid dan fokus pada energi terbarukan menjadi langkah penting dalam mendukung transisi energi dan mencapai target *Net Zero Emission* pada tahun 2060. PT PLN Indonesia Power Services, sebagai bagian dari ekosistem ketenagalistrikan, berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan industri listrik yang andal, berkelanjutan, dan inklusif di Indonesia.

ANALISIS KINERJA 2023

Aktualisasi dari prinsip transparansi dalam akuntabilitas pengelolaan PT PLN Indonesia Power Services sangat baik, dengan strategi-strategi khusus yang dilaksanakan Perseroan dengan tetap memperhatikan risiko yang ada, mencapai beberapa pencapaian kinerja yang signifikan. Laba bersih Perseroan mencapai Rp91,1 miliar, yang setara dengan 36,71% dari RKAP Tahun 2023.

Dalam hal pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) Perseroan, nilai NKO proporsional mencapai 100,51 hingga Triwulan IV Tahun 2023. Dari 17 indikator KPI, 14 di antaranya tercapai, sementara 3 indikator lainnya di bawah target. Penyebab ketidakcapaian ini antara lain adalah realisasi pendapatan yang masih di bawah target dan beberapa tender yang masih dalam proses.

Supergrid implementation is a strategic initiative in achieving electrification and energy transition targets. Supergrid will improve energy interconnection between islands and overcome the imbalance of the energy mix in Indonesia, supporting more efficient and reliable energy distribution.

Collaboration from all stakeholders, including SOEs such as PLN, ROEs, the private sector, cooperatives, and communities, is essential to realize the electrification target. PLN, as the priority Electricity Supply Business Holder (IUPTL), plays a central role in the provision of electricity, but the participation of various parties is also needed to accelerate the achievement of targets and improve equitable access to electricity in unelectrified areas.

Indonesia's electricity industry in 2023 is showing a positive trend with increasing sales and the number of electricity customers. Despite geographical challenges, with careful planning and collaboration from various stakeholders, the electrification target can be achieved. The implementation of Supergrid and the focus on renewable energy are important steps in supporting the energy transition and achieving the Net Zero Emission target by 2060. PT PLN Indonesia Power Services as part of the electricity ecosystem is committed to continue to contribute to realizing a reliable, sustainable, and inclusive electricity industry in Indonesia.

PERFORMANCE ANALYSIS 2023

The actualization of the principle of transparency in the accountability management of PT PLN Indonesia Power Services is very good, with special strategies implemented by the Company while still paying attention to existing risks, achieving several significant performance achievements. The Company's net profit reached Rp91.1 billion, equivalent to 36.71% of the 2023 RKAP.

In terms of the Company's Key Performance Indicator (KPI) achievement, the proportional NKO value reached 100.51 until the fourth quarter of 2023. From 17 KPI indicators, 14 of them were achieved, while 3 other indicators were under the target. The causes of this underachievement include revenue realization that is still below the target and several tenders that are still in process.

Dalam mencapai target, PLN IP Services mendapatkan dukungan yang signifikan dari pemegang saham dan pemerintah. Hal ini termasuk percepatan penyelesaian kontrak Jasa O&M, penambahan lingkup Jasa O&M, sinergi IT dalam peningkatan digitalisasi bisnis di lingkungan PT PLN Indonesia Power, sinergi pengelolaan SDM, memperoleh SKUP, SKP PJK3 Kemenaker, dan fasilitas impor dari BEA Cukai, serta memperoleh anggaran Investasi untuk skema project DRUPS.

Kinerja Keuangan

PLN IP Services menunjukkan kinerja keuangan yang baik pada tahun 2023. Hingga Triwulan IV, Perseroan berhasil membukukan pendapatan usaha sebesar Rp1,61 triliun, mencapai 72,53% target RKAP Tahun 2023. Pencapaian ini menegaskan keunggulan strategi bisnis Perseroan dan kemampuan dalam mengakselerasi portofolio bisnis secara optimal.

Portofolio Jasa O&M menjadi motor utama pertumbuhan dengan kontribusi pendapatan yang luar biasa mencapai Rp917,38 miliar. Tak ketinggalan, MRO Services dan Penjualan Tenaga Listrik turut menyumbang secara signifikan dengan pendapatan masing-masing Rp509,13 miliar dan Rp181,14 miliar. Terlepas dari dinamika pasar yang menantang, PLN IP Services mencetak laba bersih sebesar Rp91,1 miliar.

Diversifikasi pendapatan yang kuat menunjukkan kesehatan bisnis Perseroan yang prima dan ketelitian dalam tata kelola portofolio. Lebih dari sekadar angka, pencapaian ini adalah hasil dari semangat dan dedikasi luar biasa seluruh tim dalam mewujudkan visi dan misi Perseroan. Prestasi ini merupakan bukti nyata dari efektivitas Perseroan dalam mengoptimalkan biaya dan meningkatkan produktivitas yang menjanjikan prospek cerah di masa depan.

Kinerja Operasional

1. Suplai Energi

- a. Realisasi Pencapaian penjualan Energi Listrik PLTD Tenau sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 sebesar 201,52 GWh atau 76,02% dari target RKAP Tahun 2023.

In achieving the target, PLN IP Services received significant support from shareholders and the government. This includes accelerating the completion of O&M Services contracts, increasing the scope of O&M Services, IT synergies in increasing business digitalization within PT PLN Indonesia Power, HC management synergies, obtaining SKUP, SKP PJK3 Ministry of Manpower, and import facilities from BEA Cukai, and obtaining an Investment budget for the DRUPS project scheme.

Financial Performance

PLN IP Services showed good financial performance in 2023. Until the fourth quarter, the Company managed to record an operating income of Rp1.61 trillion, reaching 72.53% of the 2023 RKAP target. This achievement confirms the excellence of the Company's business strategy and the ability to optimally accelerate the business portfolio.

The O&M Services portfolio was the main driver of growth with a remarkable revenue contribution of Rp917.38 billion. MRO Services and Power Sales also contributed significantly with revenues of Rp509.13 billion and Rp181.14 billion respectively. Despite the challenging market dynamics, PLN IP Services posted a net profit of Rp91.1 billion.

Strong revenue diversification shows the excellent health of the Company's business and rigor in portfolio governance. More than numbers, this achievement is the result of the extraordinary passion and dedication of the entire team in realizing the vision and mission of the Company. This achievement is a true testament to the effectiveness of the Company in optimizing costs and improving productivity which promises bright prospects in the future.

Operational Performance

1. Energy Supply

- a. Realization of Electric Energy Sales Achievement of Tenau PLTD up to the fourth quarter of 2023 amounted to 201.52 GWh or 76.02% of the 2023 RKAP target.

- b. Realisasi Pencapaian penjualan Energi Listrik PLTD Nusa Penida sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 sebesar 54,60 GWh atau 119,78% dari target RKAP Tahun 2023.

Catatan: Yang masuk dalam RKAP Korporat hanya Unit Nusa Penida dan Tenau.

2. Jasa O&M (Operation and Maintenance)

- a. Realisasi Pencapaian penjualan Energi Listrik PLTU Sanggau sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 sebesar 96,20 GWh atau 100,66% dari target RKAP 2023.
- b. Realisasi Pencapaian penjualan Energi Listrik PLTP Ulumbu sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 sebesar 57,42 GWh atau 123,03% dari target RKAP 2023.
- c. Realisasi Pencapaian penjualan Energi Listrik PLTU Sintang sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 sebesar 128,98 GWh atau 144,55% dari target RKAP 2023.
- d. Realisasi Pencapaian penjualan Energi Listrik PLTU Holtekamp sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 sebesar 55,04 GWh atau sebesar 66,43% dari target RKAP 2023.

Catatan: Untuk Sanggau, Ulumbu, Sintang dan Holtekamp sifatnya Monitoring Jasa O&M.

Pada tahun 2023, PT PLN Indonesia Power Services melakukan survei untuk mengevaluasi kepuasan pelanggan terhadap produk dan layanan yang disediakan. Berdasarkan hasil survei ini, produk/jasa yang terdapat peningkatan kepuasan pelanggan terhadap layanan GDES yang mencapai 88,10%, diikuti oleh MRO dengan nilai 86,26%, dan O&M dengan nilai 84,36%. Terakhir adalah *Supply* Energi Listrik (SEL) dengan nilai 82,84%.

Secara keseluruhan, *Customer Satisfaction Index* (CSI) rata-rata PT PLN Indonesia Power Services pada tahun 2023 adalah sebesar 85,39% menunjukkan kenaikan sebesar 1,19% dari tahun lalu sebesar 84,55%. Perseroan akan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan produknya guna memastikan kepuasan pelanggan tetap tinggi dan mencapai standar yang lebih baik di masa depan.

- b. Realization of Electric Energy Sales Achievement of Nusa Penida PLTD up to the third quarter of 2023 amounted to 54.60 GWh or 119.78% of the 2023 RKAP target.

Notes: Only Nusa Penida and Tenau Units are included in the Corporate RKAP.

2. O&M (Operation and Maintenance) Service

- a. Realization of Electric Energy Sales Achievement of Sanggau PLTU up to the fourth quarter of 2023 amounted to 96.20 GWh or 100.66% of the 2023 RKAP target.
- b. Realization of Electric Energy Sales Achievement of Ulumbu PLTP up to the fourth quarter of 2023 amounted to 57.42 GWh or 123.03% of the 2023 RKAP target.
- c. Realization of Electric Energy Sales Achievement of Sintang PLTU up to the fourth quarter of 2023 amounted to 128.98 GWh or 144.55% of the 2023 RKAP target.
- d. Realization of Electric Energy Sales Achievement of Holtekamp PLTU up to the fourth quarter of 2023 amounted to 55.04 GWh or 66.43% of the 2023 RKAP target.

Notes: For Sanggau, Ulumbu, Sintang and Holtekamp, it is Monitoring O&M Services.

In 2023, PT PLN Indonesia Power Services was surveyed to evaluate customer satisfaction with the products and services provided. Based on the results of this survey, products/services with increased customer satisfaction for GDES services reached 88.10%, followed by MRO with a value of 86.26%, and O&M with a value of 84.36%. The last is Electric Energy Supply (“SEL”) with a value of 82.84%.

Overall, the average Customer Satisfaction Index (CSI) of PT PLN Indonesia Power Services in 2023 is 85.39% showing an increase of 1.19% from last year’s 84.55%. The Company will continuously strive to improve the quality of its services and products to ensure customer satisfaction remains high and achieve better standards in the future.

PT PLN Indonesia Power Services menunjukkan pencapaian yang solid dalam beberapa aspek bisnisnya selama tahun 2023. Namun, kami juga mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. Analisis ini menjadi landasan evaluasi terhadap capaian dan tantangan yang dihadapi Perseroan. Berbagai langkah-langkah yang selanjutnya akan diambil dengan mempertimbangkan perubahan situasi dan kebutuhan pasar, termasuk mencapai target-target, memastikan kelangsungan dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di masa depan.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS

Transformasi PLN Group dengan pembentukan *Holding Subholding* (“HSH”) yang telah dilaksanakan sejak awal tahun 2023, telah berjalan dengan lancar. Ditetapkannya PLN Indonesia Power sebagai salah satu *Subholding* Pembangkitan PLN membawa konsekuensi besar atas peran PLN Indonesia Power Services pada kondisi tersebut. PLN mengalihkan kepemilikan aset-aset pembangkit yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia kepada Subholding PLN Indonesia Power, sehingga kapasitas terpasang pembangkit PLN Indonesia Power meningkat signifikan disertai bertambahnya Unit pembangkit yang dikelola.

Kondisi tersebut berdampak pada bertambahnya penugasan Jasa Operasi dan pemeliharaan pada PT PLN IP Services, yang semula 39 Unit bertambah menjadi 43 Unit dan bertambahnya jumlah pegawai 3.488 orang menjadi 4.305 orang. Untuk itu, diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat guna menjawab tantangan dalam mencapai target dalam RKAP 2023 dan bisnis beyond kWh untuk menjaga kelangsungan usaha jangka panjang Perusahaan.

Menghadapi kondisi tahun 2023, Direksi merumuskan strategi dan kebijakan PLN Indonesia Power Services yang selaras dengan aspirasi Pemegang Saham dan strategi jangka panjang Perusahaan. Guna mendukung pencapaian target kinerja dan menjaga keberlangsungan bisnisnya ke depan, PLN Indonesia Power Services melanjutkan strategi serta kebijakan tahun sebelumnya dengan melakukan perbaikan yang diperlukan dan tertuang dalam program kerja strategis Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (“RKAP”) 2023 dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang berlaku dan telah disetujui oleh Pemegang Saham.

PT PLN Indonesia Power Services showed solid achievements in several aspects of its business during 2023. However, we also identified areas that require further attention to improve future performance. This analysis serves as the basis for evaluating the achievements and challenges encountered by the Company. Further steps will be taken considering the changing situation and market needs, including achieving targets and ensuring the continuity and sustainable growth of the business in the future.

STRATEGY AND STRATEGIC POLICY

The transformation of PLN Group with the establishment of Subholding Holding (“HSH”) implemented since the beginning of 2023, has been running smoothly. The establishment of PLN Indonesia Power as one of PLN’s Generation Subholding brought great consequences to the role of PLN Indonesia Power Services in these conditions. PLN transferred ownership of generating assets spread throughout Indonesia to PLN Indonesia Power Subholding so that PLN Indonesia Power’s installed capacity increased significantly along with the increase in the number of generating units managed.

This condition has an impact on the increase in the assignment of Operations and Maintenance Services to PT PLN IP Services, which initially 39 Units increased to 43 Units and the increase in the number of employees from 3,488 people to 4,305 people. For this reason, appropriate strategies and policies are needed to answer the challenges in achieving the targets in the 2023 RKAP and the beyond kWh business to maintain the long-term business continuity of the Company.

Encountering the conditions of 2023, the Board of Directors formulated strategies and policies for PLN Indonesia Power Services in line with the aspirations of Shareholders and the long-term strategy of the Company. To support the achievement of performance targets and maintain the sustainability of its business in the future, PLN Indonesia Power Services continues the previous year’s strategies and policies by making the necessary improvements and as stated in the Company’s Work Plan and Budget strategic work program.

PLN IP Services menetapkan Sasaran Utama Perseroan yang selaras dengan *strategic mission* SOLID PLN dan transformasi PLN. SOLID PLN adalah.

1. *Securing Business Sustainability* (menjamin keberlangsungan bisnis);
2. *Optimizing Cost Efficiency* (optimasi efisiensi biaya);
3. *Leading Industry Capabilities* (kapabilitas terdepan dalam industri);
4. *Increasing Profit Contribution* (meningkatkan kontribusi laba); dan
5. *Developing New Edge* (mengembangkan teknologi dan bisnis baru).

Untuk mewujudkan sasaran utama tersebut, disusun Strategi utama dan Program Utama Perseroan sebagai langkah strategis yang luas, mencakup berbagai aspek pengembangan bisnis dan manajemen, antara lain.

1. Menambahkan portofolio baru di bidang MRO, *supply energy*, dan O&M.
2. Mengembangkan bisnis baru dibidang EPC dan pelatihan pembangkitan.
3. Mengembangkan bisnis di sektor Pembangkit EBT.
4. Mengembangkan pasar internasional.
5. Melakukan *market research* untuk pengembangan bisnis terkait perubahan teknologi listrik.
6. Peningkatan penggunaan TKDN dalam bisnis Pembangkitan.
7. Optimalisasi rekrutmen pegawai dari daerah sekitar pembangkit melalui program pembelajaran berkelanjutan
8. Perbaikan sistem pengelolaan SDM.
9. Peningkatan pengelolaan *branding management* dan kompetensi inti Perseroan.
10. Menambah mitra kerjasama untuk pengembangan bisnis Perseroan
11. Perbaikan proses bisnis dan implementasi digitalisasi.
12. Perbaikan sistem dan peningkatan penggunaan IT pada proses bisnis Perseroan.

Sebagai realisasi dari Sasaran Utama Perseroan, kami berhasil memperluas pasar dan mendapatkan kontrak pekerjaan jasa O&M, MRO dan EPC, EBT serta digital business dengan diraihnya 3 (tiga) kontrak bisnis Luar negeri, 17 (tujuh belas) kontrak *beyond* kWh, 9 (Sembilan) Kontrak IPP, 3 (tiga) kontrak *Oil & Gas*, 1 (satu) kontrak Mining & 4 (empat) kontrak *Industrial Cleaning* serta didapatkannya kontrak Layanan Fasilitas Ekstra

PLN IP Services sets the Company's Main Objectives in line with SOLID PLN's strategic mission and PLN's transformation. SOLID PLN are.

1. *Securing Business Sustainability*;
2. *Optimizing Cost Efficiency*;
3. *Leading Industry Capabilities*;
4. *Increasing Profit Contribution*; and
5. *Developing New Edge* (developing new technologies and businesses).

To realize these main objectives, the company's main strategies and programs were developed as broad strategic initiatives covering various aspects of business development and management, among others.

1. Adding new portfolios in MRO, energy supply, and O&M.
2. Develop new business in EPC and generation training.
3. Develop business in the renewable generation sector.
4. Develop international market.
5. Conduct market research for business development related to changes in electricity technology.
6. Increase the use of TKDN in the generation business.
7. Optimization of employee recruitment from areas around the plant through continuous learning programs.
8. Improvement of HC management system.
9. Improvement of the branding management and core competencies of the Company.
10. Adding cooperation partners for the Company's business development
11. Business process improvement and digitalization implementation.
12. System improvement and increased use of IT in the business processes of the Company.

As the realization of the Company's Main Objectives, we managed to expand the market and obtain contracts for O&M, MRO and EPC services, EBT and digital business by acquiring 3 (three) overseas business contracts, 17 (seventeen) *beyond* kWh contracts, 9 (nine) IPP contracts, 3 (three) *Oil & Gas* contracts, 1 (one) Mining contract & 4 (four) *Industrial Cleaning* contracts as well as obtaining an Extra Facility Service contract (DRUPS)



(DRUPS) untuk Pertamina EP Papua *Site* Klamono 2.075 MVA. Perusahaan juga mendapatkan Pekerjaan Relokasi 3 (tiga) Unit PLTD di Kuala Pembuang ke Sistem Melak, serta PLTD Muara Wahau dan Kuala Kurun Nanga Bulik ke Sistem Tanjung Redeb Kalimantan Timur serta penambahan Sewa Mesin Genset 8 MW di Nusa Penida.

Selain itu, kami telah mengimplementasikan standar manajemen aset untuk berbagai pembangkit, dengan fokus pada reliabilitas, operasional, dan perencanaan kerja yang terkontrol. Sistem Manajemen *Outage* dan Pemeliharaan (Sistem Manohara) menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya kami untuk memastikan kualitas dan efisiensi dalam operasional kami.

Dalam konteks pengembangan bisnis digital, kami telah mengembangkan berbagai kompetensi baru, termasuk melalui *Reliability Efficiency Optimized Center* (REOC), *MRO Marketplace* (MROLine), *Cogindo Learning Generation* (College), dan *Cogindo Link Expert* (Collext). Kami juga telah melaksanakan implementasi digital marketing dan penyesuaian proses bisnis berdasarkan STO terbaru dengan menggunakan *Enterprise Architecture* (EA) secara bertahap.

for Pertamina EP Papua *Site* Klamono 2,075 MVA. The Company also obtained the Relocation of 3 (three) PLTD Units in Kuala Pembuang to Melak System, and Muara Wahau and Kuala Kurun Nanga Bulik PLTD to Tanjung Redeb System in East Kalimantan and the addition of 8 MW Genset Engine Rental in Nusa Penida.

In addition, we have implemented asset management standards for various plants, focusing on reliability, operations, and controlled work planning. The *Outage and Maintenance Management System* (Manohara System) is an integral part of our efforts to ensure quality and efficiency in our operations.

In the context of digital business development, we have developed various new competencies, including through *Reliability Efficiency Optimized Center* (REOC), *MRO Marketplace* (MROLine), *Cogindo Learning Generation* (College), and *Cogindo Link Expert* (Collext). We have also implemented digital marketing and business process adjustments based on the latest STO using *Enterprise Architecture* (EA) in stages.

Selain itu, kami terus berinovasi dengan mengintegrasikan teknologi, seperti *Enterprise Resource Planning* (ERP) dan *Electronic Business Solutions* (EBS), serta pengembangan bengkel konversi motor listrik untuk mendukung untuk mempercepat proses kerja dan meningkatkan efisiensi. Kami juga telah melakukan persiapan untuk implementasi berbagai program, seperti Cogeneration, dan telah menyusun *road map* untuk ESG 2024-2028.

Dengan langkah-langkah ini, kami percaya bahwa PT PLN Indonesia Power Services akan terus berkembang dan menghadapi tantangan masa depan dengan keyakinan dan kesiapan yang tinggi. Dengan strategi dan kebijakan strategis yang terstruktur dan terukur ini, kami yakin dapat mencapai tujuan kami untuk tahun 2023 dan terus berkembang sebagai Perseroan yang inovatif dan berkelanjutan.

Peranan Direksi dalam Perumusan Strategi dan Kebijakan Strategis

Dalam proses perumusan program kerja Perusahaan, baik dalam RKAP yang disusun setiap tahun maupun RJPP yang disusun lima tahun sekali, Direksi telah memetakan tantangan dan risiko yang dihadapi PLN Indonesia Power Services. Dalam rangka menghadapi tantangan dan risiko tersebut dapat dikelola dengan baik maka Direksi menyusun strategi dan kebijakan, dengan memastikan bahwa strategi dan kebijakan yang disusun tersebut telah sesuai dengan penerapan tata kelola, termasuk memperhatikan aspek keberlanjutan yang menjadi topik hangat dunia usaha saat ini.

Direksi merumuskan strategi dan kebijakan untuk tahun 2023 selaras dengan amanat Pemegang Saham sebagaimana tercantum dalam RKAP Tahun 2023 dan RJPP yang berlaku yang telah ditetapkan. Penyusunan RKAP dan RJPP dilakukan Direksi dengan pengawasan dan arahan yang diberikan oleh Dewan Komisaris, untuk selanjutnya disahkan oleh Pemegang Saham. Untuk memastikan penerapan strategi dan kebijakan berjalan efektif, Direksi memastikan strategi dan kebijakan tersebut dipahami dan diterapkan oleh seluruh fungsi dalam semua tingkatan organisasi. Direksi melakukan komunikasi secara langsung kepada *Leader*, melakukan tinjauan manajemen atau rapat bersama Departemen atau unit terkait, serta memeriksa laporan hasil audit, internal maupun eksternal untuk meninjau efektivitas implementasi strategi dan kebijakan tersebut telah berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang ditetapkan.

In addition, we continue to innovate by integrating technologies, such as Enterprise Resource Planning (ERP) and Electronic Business Solutions (EBS), and the development of electric motor conversion workshops to speed up work processes and improve efficiency. We have also made preparations for the implementation of several programs, such as Cogeneration, and have developed a road map for ESG 2024-2028.

With these steps, we believe that PT PLN Indonesia Power Services will continue to grow and encounter future challenges with high confidence and readiness. With these structured and measurable strategies and strategic policies, we are confident that we can achieve our goals for 2023 and continue to develop as an innovative and sustainable Company.

The Role of the Board of Directors in the Formulation of Strategic Strategy and Policy

In the process of formulating the work program of the Company, both in the RKAP prepared annually and the RJPP prepared every five years, the Board of Directors has mapped the challenges and risks encountered by PLN Indonesia Power Services. To ensure that these challenges and risks can be managed properly, the Board of Directors formulates strategies and policies, ensuring that the strategies and policies formulated are in line with the implementation of governance, including considering the sustainability aspects that are a hot topic in the business world today.

The Board of Directors formulates strategies and policies for 2023 in line with the mandate of the Shareholders as stated in the RKAP Year 2023 and the applicable RJPP established. The preparation of the RKAP and RJPP is conducted by the Board of Directors with supervision and direction provided by the Board of Commissioners, to be subsequently ratified by the Shareholders. To ensure the effective implementation of strategies and policies, the Board of Directors ensures that the strategies and policies are understood and implemented by all functions at all levels of the organization. The Board of Directors communicates directly to the Leaders, conducts management reviews or meetings with relevant departments or units, and examines audit reports, internal and external, to review the effectiveness of the implementation of strategies and policies in line with the objectives and targets set.

Perseroan telah merumuskan dan menyelaraskan Strategi Perseroan dalam Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) Tahun 2021-2025, yang sejalan dengan visi sasaran utama PLN IP Services adalah “*Trusted Energy Solution Company in Asia by 2025*” dengan Target 2023 sebagai “*Energy Solution Leading industry in ASEAN*”.

Komitmen kami untuk mengoptimalkan layanan dan kualitas produk yang kami tawarkan tercermin dalam strategi jangka panjang kami. Kami berkomitmen untuk menjalankan operasional Perseroan dengan inovasi sebagai salah satu pilar utama, serta dengan mengedepankan mitigasi risiko secara efektif.

Proses yang Dilakukan Direksi untuk Memastikan Implementasi Strategi

PT PLN Indonesia Power Services telah menjalankan proses yang teliti dan terstruktur untuk memastikan implementasi strategi Perseroan secara efektif. Proses ini dilakukan dengan penuh koherensi, dengan mempertimbangkan arahan dan pengawasan dari Dewan Komisaris serta kebijakan yang telah disahkan.

Untuk memastikan penerapan strategi dan kebijakan terlaksana dengan baik, maka Direksi melakukan berbagai upaya, antara lain dengan memberikan penjabaran dan pengarahan lebih lanjut yang diperlukan agar target RKAP Tahun 2023 dapat dieksekusi pencapaiannya. Direksi berperan aktif untuk memastikan bahwa seluruh bagian dalam organisasi memahami serta menerapkan strategi Perusahaan secara konsisten pada masing-masing unit kerja maupun unit bisnis.

Direksi melakukan pemantauan dan analisis terhadap berbagai indikator dalam pelaksanaan proses evaluasi dan monitoring penerapan strategi dan kebijakan. Dalam proses penerapannya, Direksi dapat melakukan penyesuaian strategi dan kebijakan apabila diperlukan. Kami juga terus merespon setiap perubahan yang terjadi dengan melakukan penyesuaian secara cepat dan efisien. Direksi terlibat langsung dalam pengawasan implementasi strategi serta memastikan bahwa seluruh bagian dalam organisasi PLN Indonesia Power memiliki kesempatan yang sama dalam menyampaikan ide-ide dan inovasi yang dapat mendukung pencapaian tujuan Perusahaan.

The Company has formulated and aligned the Company’s Strategy in the Company’s Long Term Plan (RJPP) for 2021-2025, in line with the vision of PLN IP Services’ main goal of “*Trusted Energy Solution Company in Asia by 2025*” with a Target of 2023 as “*Energy Solution Leading industry in ASEAN*”.

Our commitment to optimizing the services and quality of products we offer is reflected in our long-term strategy. We are committed to running the Company’s operations with innovation as one of the main pillars, and by prioritizing effective risk mitigation.

Processes Conducted by the Board of Directors to Ensure Strategy Implementation

PT PLN Indonesia Power Services has conducted a rigorous and structured process to ensure the effective implementation of the strategy of the Company. This process is carried out with full coherence, considering the direction and supervision of the Board of Commissioners and the policies authorized.

To ensure the implementation of strategies and policies is well executed, the Board of Directors makes various efforts, including by providing further elaboration and direction needed so that the 2023 RKAP target can be executed. The Board of Directors plays an active role in ensuring that all parts of the organization understand and implement the strategy of the Company consistently in each work unit and business unit.

The Board of Directors monitors and analyzes various indicators in the process of evaluating and monitoring the implementation of strategies and policies. In the process of implementation, the Board of Directors may make adjustments to strategies and policies if necessary. We also continue to respond to any changes that occur by making adjustments quickly and efficiently. The Board of Directors is directly involved in monitoring the implementation of the strategy and ensuring that all parts of the PLN Indonesia Power organization have equal opportunities to convey ideas and innovations that can support the achievement of the goals of the Company.

Dengan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan, kami yakin bahwa proses implementasi strategi Perseroan dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Keberhasilan implementasi strategi ini menjadi kunci bagi pencapaian tujuan jangka panjang Perseroan, dan kami siap untuk terus beradaptasi dan melakukan penyesuaian sesuai dengan dinamika yang terjadi dalam industri dan pasar.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2023

PLN IP Services melakukan evaluasi rutin terhadap pencapaian hasil operasional Perseroan selama tahun buku. Evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan hasil aktual pada akhir tahun dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran.

Pada tahun 2023, RKAP Perseroan disetujui dan disahkan oleh RUPS pada tanggal 31 Januari 2023. RKAP ini mencakup *Key Performance Indicator* (KPI) PT PLN Indonesia Power Services untuk tahun tersebut, yang terdiri dari 5 perspektif KPI berbasis *Balanced Scorecard*. Pengukuran kinerja Perseroan dilakukan sesuai dengan KPI ini, dengan nilai KPI Perseroan mengacu pada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN.

Berdasarkan nilai KPI Perseroan pada Triwulan IV Tahun 2023 mencapai 100,51. Namun, terdapat beberapa perbedaan antara target dan realisasi pada tahun 2023. Pencapaian pendapatan usaha hingga Triwulan IV hanya mencapai 72,53% dari RKAP Tahun 2023. Ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk realisasi pencapaian portofolio bisnis O&M yang hanya mencapai 77,02% dari RKAP 2023.

Labanya bersih hingga Triwulan IV 2023 mencapai 36,71% dari RKAP 2023. Hal ini disebabkan oleh belum terealisasinya kontrak AMC yang direncanakan karena belum mendapat persetujuan dari PT PLN Indonesia Power.

With a systematic and sustainable approach, we are confident that the Company's strategy implementation process can conduct smoothly and effectively. The successful implementation of this strategy is key to the achievement of the Company's long-term goals, and we are ready to continue to adapt and make adjustments following the dynamics that occur in the industry and market.

Comparison between Target and Realization of 2023

PLN IP Services conducts regular evaluations of the achievement of the operational results of the Company during the fiscal year. This evaluation is conducted by comparing the actual results at the end of the year with the Company's Work Plan and Budget ("RKAP") set at the beginning of the fiscal year.

In 2023, the Company's RKAP was approved and authorized by the GMS on January 31, 2023. This RKAP includes PT PLN Indonesia Power Services' Key Performance Indicator (KPI) for the year, which consists of 5 *Balanced Scorecard*-based KPI perspectives. The performance measurement of the Company is conducted according to these KPIs, with the Company's KPI scores referring to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. KEP-100/MBU/2002 on the Assessment of the Health Level of SOEs.

Based on the Company's KPI score in the fourth quarter of 2023, reaching 100.51. However, there are some differences between the target and realization in 2023. The achievement of operating income until the fourth quarter only reached 72.53% of the 2023 RKAP. This was due to several factors, including the realization of the O&M business portfolio achievement which only reached 77.02% of the 2023 RKAP.

Net profit until the fourth quarter of 2023 reached 36.71% of the 2023 RKAP. This is due to the non-realization of the planned AMC contract because it has not yet received approval from PT PLN Indonesia Power.

Evaluasi ini memberikan wawasan yang berharga bagi Direksi dalam mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki atau disempurnakan untuk mencapai tujuan Perseroan dengan lebih baik di masa mendatang.

This evaluation provides valuable insights for the Board of Directors in identifying areas for improvement or refinement to better achieve the Company's goals in the future.

Berikut adalah perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2023 dalam tabel berikut:

A comparison between the Target and Realization of 2023 is shown in the following table:

Mata Uang Asing	Target RKAP 2023 2023 RKAP Target	Realisasi 2023 2023 Realization	Pencapaian RKAP RKAP Achievement	Foreign currency
Pendapatan Usaha	2.216.465	1.607.653	72,53%	Operating Revenues
Beban Usaha	1.855.805	1.462.795	78,82%	Operating Expenses
Laba Usaha	360.660	144.858	40,16%	Operating Profit
Laba Tahun Berjalan	248.155	91.097	36,71%	Profit for the Year
Aset	1.242.334	1.117.351	89,94%	Assets
Liabilitas	288.844	218.264	75,56%	Liabilities
Ekuitas	953.490	899.087	94,29%	Equity

Dalam Juta Rupiah | In Million Rupiah

Kendala yang Dihadapi dan Langkah Penyelesaiannya

Direksi berkomitmen untuk terus mengembangkan strategi dan kebijakan perusahaan yang efektif dalam mitigasi risiko guna memastikan kontinuitas produksi tenaga listrik.

Obstacles Encountered and Steps to Solve Them

The Board of Directors is committed to continue developing effective corporate strategies and policies in risk mitigation to ensure continuity of power production.

Perusahaan telah menetapkan Tujuan Strategis (*Strategic Objective/SO*) untuk mencapai Sasaran Utama. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin timbul. Hasil identifikasi tersebut menemukan 10 risiko yang dianggap tidak dapat diterima, sehingga langkah-langkah mitigasi yang tepat telah direncanakan. Rencana mitigasi ini terdiri dari 57 item yang dipetakan dalam program inisiatif strategis (*Strategic Initiative/SI*).

The company has set Strategic Objectives (SOs) to achieve the Main Goals. The first step taken was to identify potential risks that may arise. The identification results found 10 risks considered unacceptable, so appropriate mitigation measures were planned. This mitigation plan consists of 57 items mapped out in a strategic initiative (SI) program.

Pada tahun 2023, PLN IP Services menghadapi tantangan utama berupa risiko kehilangan pertumbuhan pendapatan dan bisnis. Selain itu, terdapat risiko-risiko kunci lainnya yang telah diidentifikasi dan direncanakan mitigasinya. Risiko finansial termasuk biaya yang tidak optimal, potensi denda pajak, serta kesulitan dalam pembiayaan proyek. Dalam bidang K3LH, ada risiko terkait potensi kecelakaan kerja dan pencemaran lingkungan.

In 2023, PLN IP Services encountered the key challenge of losing revenue and business growth. In addition, there are other key risks identified and planned for mitigation. Financial risks include sub-optimal costs, potential tax penalties, and difficulties in project financing. In the area of OHSE, there are risks related to potential workplace accidents and environmental pollution.



Dalam aspek Sumber Daya Manusia (SDM), risiko yang dihadapi meliputi transfer pengelolaan aset dari *Holding* ke *Subholding* serta kesenjangan kompetensi dalam pengembangan bisnis. Selain itu, perubahan regulasi pemerintah dan kemunculan kompetitor baru juga menjadi risiko signifikan. Risiko lainnya termasuk penurunan performa kinerja perusahaan, ketidakcukupan material untuk pemeliharaan, dan penurunan kualitas layanan kepada pelanggan.

Untuk mengatasi risiko-risiko tersebut, Perusahaan telah merencanakan dan melaksanakan langkah mitigasi secara konsisten dengan harapan dapat menurunkan tingkat risiko. Untuk mengatasi risiko keberlangsungan usaha, perusahaan melakukan riset bisnis domestik dan luar negeri, menginisiasi proyek layanan listrik premium, dan menambah aset pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT). Untuk mengatasi risiko penurunan pendapatan, perusahaan menempatkan perwakilan di bisnis luar negeri, mengembangkan *workshop*, serta memperluas pasar *beyond kWh*.

In terms of Human Capital ((HC), risks include the transfer of asset management from Holding to Subholding and competency gaps in business development. In addition, changes in government regulations and the emergence of new competitors are also significant risks. Other risks include a decline in company performance, insufficient materials for maintenance, and a decrease in the quality of service to customers.

To overcome these risks, the Company has planned and implemented mitigation steps consistently in the hope of reducing the level of risk. To overcome the risk of business continuity, the company conducts domestic and overseas business research, initiates premium electricity service projects, and adds renewable energy generation assets. To overcome the risk of revenue reduction, the company places representatives in overseas businesses, develops workshops, and expands the beyond kWh market.

Perusahaan juga berencana melakukan *rebranding* dan mempertahankan sertifikasi berstandar nasional dan internasional. Dalam mengatasi risiko keuangan, perusahaan mencari alternatif pendanaan untuk pembiayaan proyek dan investasi. Untuk mengantisipasi risiko terkait SDM, perusahaan memanfaatkan teknologi digital untuk pengembangan kompetensi pegawai serta sertifikasi kompetensi pegawai dalam mendukung pekerjaan *beyond kWh*.

Perusahaan juga fokus pada mitigasi risiko kecelakaan kerja melalui sosialisasi program HSSE secara berkala dan berkelanjutan. Dengan melaksanakan dan memantau langkah-langkah mitigasi ini secara konsisten, perusahaan berharap dapat menurunkan tingkat risiko secara signifikan.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GCG)

PLN IP Services memandang praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance-GCG*) sebagai salah satu pilar utama dalam menciptakan sistem pengelolaan yang mendukung kesuksesan bisnis dan akuntabilitas yang tinggi. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasi GCG kami setiap tahunnya guna mencapai hasil yang optimal. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya kami untuk memastikan bahwa tidak ada *conflict of interest* dan bahwa kami selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan Perusahaan.

Pelaksanaan GCG Perseroan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam berbagai regulasi, termasuk Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002, Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011, dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012. Mekanisme Tata Kelola Perusahaan kami diatur dalam serangkaian kebijakan yang telah disahkan bersama oleh Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk Pedoman GCG, *Board Manual*, *Code of Conduct*, Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System/WBS*), dan Pedoman Penerimaan, Pemberian Hadiah/ Cinderamata & Hiburan (*Entertainment*). Perseroan juga menginisiasi penerapan 13 (tigabelas) Program Kepatuhan sesuai arahan Pemegang Saham. Selain itu, kami juga memiliki Piagam Audit Internal CDB, Piagam Komite Audit Komisaris, dan Piagam Komite Manajemen Risiko Komisaris.

The company also plans to rebrand and maintain national and international standard certifications. In overcoming financial risks, the company explores alternative funding for project and investment financing. To anticipate risks related to human capital, the company utilizes digital technology for employee competency development and employee competency certification to support beyond kWh work.

The company also focuses on mitigating the risk of occupational accidents through regular and continuous socialization of HSSE programs. By consistently implementing and monitoring these mitigation steps, the company expects to significantly reduce risk levels.

IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

PLN IP Services considers Good Corporate Governance (GCG) practices as one of the key pillars in creating a management system that supports business success and high accountability. We are committed to continuously improving our GCG implementation every year to achieve optimal results. This is an inseparable part of our efforts to ensure that there is no conflict of interest and we always adhere to the basic principles in managing the Company.

The Company's GCG implementation follows the provisions set in various regulations, including the Decree of the Minister of SOEs No. 117/M-MBU/2002, Regulation of the Minister of SOEs No. PER-01/MBU/2011, and Regulation of the Minister of SOEs No. PER-09/MBU/2012. Our Corporate Governance mechanism is regulated by a series of policies jointly approved by the Board of Directors and the Board of Commissioners, including GCG Guidelines, Board Manual, Code of Conduct, Guidelines for the Management of Whistleblowing Complaints (WBS), and Guidelines for Receiving, Giving Gifts / Souvenirs & Entertainment (Entertainment). In addition, we also have the CDB Internal Audit Charter, Audit Committee Charter, and Risk Management Committee Charter.

Program kerja PLN IP Services 2023 mencakup langkah-langkah konkret dalam mengoptimalkan implementasi GCG. Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) mengacu pada ISO 37001:2016 guna melakukan penguatan integritas bisnis untuk mencegah praktik korupsi, gratifikasi dan pengelolaan benturan kepentingan. Implementasi SMAP ditujukan mampu mendorong terciptanya budaya anti suap. Direksi telah melakukan penyusunan RKAP 2023 berbasis risiko, yang memetakan risiko utama Penerapan manajemen risiko di PLN IP Services salah satunya dimonitor melalui pelaksanaan *assessment maturity level* manajemen risiko, yang hasilnya semakin baik setiap tahunnya.

Hasil *assessment maturity level* manajemen risiko di tahun 2023 mendapatkan skor 3,48 dari skor maksimum 5, lebih baik dari target 2,95 atau lebih baik dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar 3,14. Direksi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko, baik terkait dengan aspek *leadership, people, process* maupun *result* serta penerapan *Business Continuity Management System* (BCMS) sebagai strategi penanganan risiko apabila terjadi krisis penyediaan energi listrik.

Penilaian implementasi GCG dilakukan setiap tahun dan untuk tahun 2023 PLN Indonesia Power Services menggunakan standar penilaian GCG berdasarkan Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No.SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012, walaupun sudah dicabut namun belum terdapat peraturan penggantinya dan masih dipergunakan dalam lingkungan PLN Group. Perseroan secara cermat melakukan *self-assessment* atas implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) PT PLN Indonesia Power Services, total nilai yang diperoleh Perseroan adalah sebesar 91,90 dan mendapatkan predikat "Sangat Baik". Dengan komitmen yang kokoh dan langkah-langkah yang terstruktur, PLN IP Services yakin dapat terus meningkatkan praktik GCG untuk mencapai tujuan Perseroan secara berkelanjutan.

The implementation of the Anti-Bribery Management System (SMAP) refers to ISO 37001:2016 to strengthen business integrity to prevent corrupt practices, gratuities, and management of conflicts of interest. The implementation of SMAP is intended to encourage the creation of an anti-bribery culture. The Board of Directors has prepared a risk-based 2023 RKAP, which maps the main risks. The implementation of risk management in PLN IP Services is monitored through the implementation of risk management maturity level assessments, the results of which are getting better every year.

The results of the risk management maturity level assessment in 2023 received a score of 3.48 out of a maximum score of 5, better than the target 2.95 or better than the previous year's achievement of 3.14. The Board of Directors is committed to continuously improving the quality of risk management implementation, both related to the aspects of leadership, people, process, and results as well as the implementation of the Business Continuity Management System (BCMS) as a risk management strategy in the event of a crisis in the provision of electricity.

Assessment of GCG implementation is conducted annually and for 2023 PLN Indonesia Power Services uses GCG assessment standards based on the Decree of the Secretary of the Minister of BUMN No.SK-16/S.MBU/2012 on June 6, 2012, although it has been repealed but there is no replacement regulation and is still used within the PLN Group. The Company carefully conducted a self-assessment of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) of PT PLN Indonesia Power Services, the total score obtained by the Company was 91.90 and received the predicate "Very Good". With a solid commitment and structured steps, PLN IP Services is confident that it can continue to improve GCG practices to achieve the goals of the Company in a sustainable manner.

KOMPOSISI DIREKSI

Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat perubahan atau perubahan nomenklatur jabatan atas komposisi Direksi. Kami berkomitmen untuk terus memadukan sinergi dan kolaborasi dalam mendukung pertumbuhan Perseroan kedepannya.

Susunan Direksi Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Nama Name	Jabatan Position
Ade Hendratno	Direktur Utama President Director
R. Triyono Budi P	Direktur Sumber Daya Manusia Director of Human Capital
Kukuh Pambudi	Direktur Bisnis Director of Business
Hari Muhardani Nasution	Direktur Keuangan Director of Finance
Mulyadi	Direktur Operasi Director of Operation

Namun, terdapat perubahan komposisi Direksi setelah periode tanggal pelaporan akuntan, yang tercantum dalam agenda Akta Notaris No 02 tanggal 05 Januari 2024. Perubahan tersebut adalah pengangkatan Bapak Hari Cahyono sebagai Direktur Utama dan Bapak Imam Adi Prihantoro sebagai Direktur Sumber Daya Manusia. Dengan demikian, komposisi Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position
Hari Cahyono	Direktur Utama President Director
Imam Adi Prihantoro	Direktur Sumber Daya Manusia Director of Human Capital
Kukuh Pambudi	Direktur Bisnis Director of Business
Hari Muhardani Nasution	Direktur Keuangan Director of Finance
Mulyadi	Direktur Operasi Director of Operation

COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Throughout 2023, there were no changes or changes in the position nomenclature of the composition of the Board of Directors. We are committed to continue to integrate synergy and collaboration in supporting the Company's future growth.

The composition of the Company's Board of Directors as of December 31, 2023 is as follows.

However, there was a change in the composition of the Board of Directors after the accounting reporting date period, which is listed in the agenda of Notarial Deed No. 02 dated January 05, 2024. The change was the appointment of Mr. Hari Cahyono as President Director and Mr. Imam Adi Prihantoro as Director of Human Capital. Therefore, the composition of the Board of Directors of the Company is as follows:

PROSPEK USAHA

Direksi optimis melihat prospek usaha Perseroan di tahun 2024. Indonesia, dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan populasi yang besar, memerlukan strategi cerdas untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat. Dalam konteks ini, komitmen pemerintah Indonesia terhadap transisi energi bersih dan mitigasi perubahan iklim memberikan peluang besar bagi Perseroan.

Prospek ekonomi global untuk tahun 2024 diproyeksikan tetap stagnan, dengan IMF memperkirakan pertumbuhan sebesar 3,1% dan Bank Indonesia menurunkan proyeksinya menjadi 2,8%. Faktor-faktor yang mempengaruhi prediksi ini termasuk ketegangan geopolitik yang berlanjut, perlambatan ekonomi di beberapa negara, dan tingginya suku bunga serta imbal hasil obligasi di negara maju. Inflasi tetap tinggi dengan harga minyak dunia yang meningkat, menjaga suku bunga internasional tetap tinggi dan meningkatkan volatilitas di pasar keuangan global.

Indonesia diperkirakan tetap memiliki ketahanan ekonomi yang baik terhadap ketidakpastian global. Dengan pertumbuhan ekonomi yang solid di tahun 2023 sebesar 5,05%, proyeksi untuk tahun 2024 menunjukkan peningkatan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2%. Tingkat inflasi diperkirakan 2,86% dan suku bunga 6,7%. Kestabilan politik dari Pemilihan Umum tahun 2024 diharapkan memperkuat stabilitas ekonomi, sosial, dan politik nasional.

Pertumbuhan ekonomi yang stabil diperkirakan akan meningkatkan permintaan listrik. Proyeksi peningkatan kebutuhan listrik dalam negeri sebesar 3,6% hingga 4,2% pada tahun 2024, mencapai sekitar 283,12 TWh, menunjukkan adanya kebutuhan tambahan pembangkit dan infrastruktur penyediaan tenaga listrik. Untuk itu, PLN Indonesia Power memiliki semangat optimis bahwa ke depan kami dapat lebih mengoptimalkan peluang bisnis di bidang usaha energi listrik berikut jasa pendukung lainnya berdasarkan asumsi-asumsi tersebut di atas.

BUSINESS PROSPECT

The Board of Directors is optimistic about the business prospects of the Company in 2024. Indonesia, with its rapid economic growth and large population, requires smart strategies to fulfill its growing energy needs. In this context, the Indonesian government's commitment to clean energy transition and climate change mitigation provides great opportunities for the Company.

The global economic outlook for 2024 is projected to remain stagnant, with the IMF expecting growth of 3.1% and Bank Indonesia lowering its projection to 2.8%. Factors influencing these predictions include continued geopolitical tensions, economic slowdown in some countries, and high interest rates and bond yields in developed countries. Inflation remains high with world oil prices rising, keeping international interest rates high and increasing volatility in global financial markets.

Indonesia is expected to remain economically resilient to global uncertainties. With solid economic growth in 2023 of 5.05%, projections for 2024 show an increase in economic growth to 5.2%. The inflation rate is expected to be 2.86% and the interest rate is 6.7%. Political stability from the General Election in 2024 is expected to strengthen national economic, social, and political stability.

Stable economic growth is expected to increase electricity demand, indicating the need for PT PLN Indonesia Power Services (PLN IP Services) to continue increasing its power generation capacity. The projected increase in domestic electricity demand of 3.6% to 4.2% by 2024, reaching approximately 283.12 TWh, indicates the need for additional power generation and power supply infrastructure.

Indonesia berkomitmen pada mitigasi perubahan iklim, bekerja sama dengan *International Energy Agency* (IEA) untuk merumuskan peta jalan *Net Zero Emission* sektor energi Indonesia tahun 2060. Berdasarkan kajian IEA, diperlukan hampir tiga kali lipat investasi energi pada tahun 2030, sekitar 8 miliar Dolar AS per tahun, untuk mendukung pengembangan infrastruktur energi terbarukan seperti PLTS dan tenaga angin. PLN IP Services harus siap berpartisipasi dalam peluang investasi ini untuk memperkuat posisinya di pasar energi terbarukan.

PLN IP Services harus meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia dan berinvestasi dalam pelatihan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan di sektor energi terbarukan. Pemerintah mendukung percepatan pengembangan energi terbarukan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103 Tahun 2023, yang menyediakan pendanaan dan dukungan keuangan bagi proyek-proyek energi terbarukan.

Direksi telah merumuskan strategi dan program unggulan pengembangan bisnis dan inovasi produk *beyond kWh* yang disampaikan dalam *roll over* selaras dengan tujuan, visi dan misi PLN Indonesia Power Services yang lebih terukur serta menjadi solusi eksistensi PLN Indonesia Power Services di masa depan.

PLN IP Services menetapkan fokus bisnisnya di tahun 2024 sebagai berikut Peningkatan *Value Creation* CDB sebagai AP Sub Holding PLN IP melalui peningkatan kompetensi dan layanan terutama jasa OM, MRO dan EPC dalam mendukung bisnis induk perusahaan, Peningkatan *market share* Jasa O&M, MRO dan EPC di industri *oil & gas, petrochemical, mining* dan IPP serta menambah portofolio EBT, Pengembangan skema *strategic partnership* untuk meningkatkan nilai tambah dan *positioning* dalam mendukung keberlanjutan serta pertumbuhan bisnis perusahaan, Peningkatan *competitive advantage* CDB melalui *Talent Capacity & Capability Building, Business Process Improvement, Digitalization and Business Research Intelligent*, serta *Zero Accident* dan Implementasi ESG sesuai dengan *Road Map* yang ditetapkan.

Indonesia is committed to climate change mitigation, working with the International Energy Agency (IEA) to formulate a Net Zero Emission roadmap for Indonesia's energy sector by 2060. Based on the IEA study, nearly three times as much energy investment is required by 2030, approximately US\$8 billion per year, to support the development of renewable energy infrastructure such as solar PV and wind power. PLN IP Services should be ready to participate in this investment opportunity to strengthen its position in the renewable energy market.

PLN IP Services must improve human capital capabilities and invest in labor training to meet the needs of the renewable energy sector. The government supports the acceleration of renewable energy development through Minister of Finance Regulation No. 103 of 2023, which provides funding and financial support for renewable energy projects.

The Board of Directors has formulated strategies and superior programs for business development and product innovation beyond kWh delivered in the rollover in line with the goals, vision, and mission of PLN Indonesia Power Services which are more measurable and become a solution for the existence of PLN Indonesia Power Services in the future.

PLN IP Services sets its business focus in 2024 as follows Increased Value Creation of CDB as AP Sub Holding PLN IP through increased competence and services, especially OM, MRO, and EPC services in supporting the business of the holding company, Increased market share of O&M, MRO and EPC services in the oil & gas, petrochemical, mining and IPP industries and adding to the EBT portfolio, Development of strategic partnership schemes to increase added value and positioning in supporting the sustainability and growth of the company's business, Increasing CDB's competitive advantage through Talent Capacity & Capability Building, Business Process Improvement, Digitalization and Business Research Intelligent, as well as Zero Accident and ESG Implementation in line with the established Road Map.

PLN IP Services menargetkan menjadi penyedia solusi energi terpercaya dengan target profit sebesar Rp115 miliar dan pendapatan mencapai Rp1945 triliun.

Total kapasitas yang dikelola diproyeksikan sebesar 20.245 gigawatt, dengan pendapatan komprehensif mencapai Rp83.176 miliar. Target maturity Information Capital Readiness (ICR) ditetapkan pada angka 4.3 sedangkan dalam pengembangan SDM, *maturity Human Capital Readiness* (HCR) dan *Organizational Capability Readiness* (OCR) diharapkan mencapai angka 4.5.

Sedangkan untuk mendukung program *Beyond kWh*, Kami menargetkan pengembangan proyek *Overseas Market penetration* di Vietnam dan perluasan pasar di GCC – Asia Pacific, dengan fokus pada jaringan distribusi listrik O&M dan kerjasama di bidang pengoperasian, pemeliharaan, overhaul, perbaikan, jasa engineering, dan *reverse engineering* komponen pembangkit listrik.

PLN Indonesia Power Services berkeyakinan di tahun yang akan datang dengan didukung berbagai kebijakan ekonomi dan pembangunan yang dilakukan pemerintah akan berdampak pada kinerja PLN Indonesia Power Services menjadi lebih baik. Melalui berbagai program yang telah dijalankan, PLN Indonesia Power Services optimis pertumbuhan bisnis di masa depan akan semakin baik. PLN IP Services berkomitmen untuk memberikan kontribusi signifikan dalam sektor energi, memainkan peran kunci dalam memenuhi kebutuhan energi yang meningkat, serta sejalan dengan keberlanjutan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Target/ Proyeksi 2024

Memasuki tahun 2024, Perusahaan telah menetapkan sejumlah target yang dituangkan dalam RKAP 2024, antara lain.

PLN IP Services targets to become a trusted energy solution provider with a profit target of Rp115 billion and revenue of Rp1945 trillion.

Total managed capacity is projected at 20,245 gigawatts, with comprehensive revenue reaching Rp83,176 billion. For innovation, the Innovation Capability Rate (ICR) maturity target is set at 4.3. In HC development, the maturity of Human Capital Readiness (HCR) and Organizational Capability Readiness (OCR) is expected to reach 4.5.

Meanwhile, to support the *Beyond kWh* program, we are targeting the development of *Overseas Market penetration* projects in Vietnam and market expansion in the GCC - Asia Pacific, with a focus on O&M electricity distribution networks and cooperation in the fields of operation, maintenance, overhaul, repair, engineering services, and reverse engineering of power plant components.

PLN Indonesia Power Services believes in the coming year with the support of various economic and development policies carried out by the government will have an impact on the performance of PLN Indonesia Power Services for the better. Through various programs carried out, PLN Indonesia Power Services is optimistic that future business growth will be even better. PLN IP Services is committed to significantly contributing to the energy sector, playing a key role in meeting increasing energy needs, and in line with environmental sustainability and inclusive economic growth.

Target/Projection 2024

Entering 2024, the Company has set several target as outlined in the 2024 RKAP, among others.

Uraian	Target RKAP 2024 2024 RKAP Target	Description
Pendapatan Usaha	1.945.448	Operating Revenues
Beban Usaha	1.751.306	Operating Expenses
Laba Usaha	194.142	Operating Profit
Laba Tahun Berjalan	115.989	Profit for the Year
Aset	1.214.863	Assets
Liabilitas	374.578	Liabilities
Ekuitas	840.285	Equity

Dalam juta Rupiah | in Rupiah million

Rebranding PT Cogindo DayaBersama menjadi PT PLN Indonesia Power Services sebagai Strategi dan Penguatan Identitas Korporat

Perseroan bertujuan untuk meningkatkan citra perusahaan dan memperkuat sinergi dengan entitas terkait dalam *Holding Subholding* (HSH) dengan Rebranding. Targetnya pada tahun 2024, perubahan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pengenalan merek, tetapi juga mendukung pencapaian proyeksi kinerja perusahaan yang lebih baik, termasuk pertumbuhan pendapatan dan efisiensi operasional.

Pada pertengahan tahun 2023, pemegang saham PT Cogindo DayaBersama menginstruksikan untuk segera melaksanakan *rebranding* yang mencakup perubahan nama dan logo Perseroan yang semula bernama PT Cogindo DayaBersama berubah menjadi PT PLN Indonesia Power Services. Arah ini merupakan bagian dari inisiatif Kementerian BUMN dalam program *Holding Subholding* (HSH) di bawah PT PLN (Persero).

Berdasarkan Risalah RUPS RKAP 2023, PT Cogindo DayaBersama diberi mandat untuk memperkuat branding, baik di level PLN Group maupun di luar PLN Group. Perseroan diminta untuk mempersiapkan implementasi perubahan logo secara bertahap, memastikan bahwa perubahan ini memperkuat identitas Perseroan dan mendukung strategi bisnis jangka panjang.

Proses rebranding ini dilaksanakan secara menyeluruh melalui tahapan perancangan, perumusan, penyusunan, dan evaluasi yang mendetail. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa perubahan identitas visual dan nama Perseroan tidak hanya meningkatkan citra Perseroan di mata publik dan pelanggan, tetapi juga sesuai dengan visi dan misi jangka panjang PT Cogindo DayaBersama.

Perubahan nama dan penambahan lini usaha yang dilakukan PT Cogindo DayaBersama menunjukkan adaptasi strategis terhadap dinamika pasar dan kebutuhan bisnis ke depan. Perseroan berkomitmen untuk terus inovatif dan adaptif sekaligus memperkuat posisi Perseroan di industri ketenagalistrikan nasional.

Rebranding PT Cogindo DayaBersama to PT PLN Indonesia Power Services as a Strategy and Strengthening Corporate Identity

The Company aims to enhance its corporate image and strengthen synergy with related entities within the Holding Subholding through rebranding. By 2024, this change is expected to not only improve brand recognition but also support the achievement of the Company's performance projections, including revenue growth and operational efficiency.

In the middle 2023, shareholders of PT Cogindo DayaBersama instructed to immediately conducted rebranding consisting of the name and logo of the Company originally named PT Cogindo DayaBersama changed to PT PLN Indonesia Power Services. This direction is part of the Ministry of SOE's initiative in the Holding Subholding (HSH) under PT PLN (Persero).

Based on the Minutes of the 2023 RKAP GMS, PT Cogindo DayaBersama was mandated to strengthen its branding, both at the PLN Group level and outside the PLN Group. Company is asked to implement the logo changes in stages, ensuring that these changes strengthen the Company's identity and support long-term business strategy.

This rebranding process has been carried out thoroughly detailed design, formulation, preparation and evaluation stages. The main objective of this process is to ensure that changes to the visual identity and name of the Company not only to improve the Company's image in public and customers but also in line with the long-term vision and mission of PT Cogindo DayaBersama.

The name change and addition of business lines carried out by PT Cogindo DayaBersama showcases strategic adaptation to market and future business needs. The Company is committed to continuing to innovate and adapt while strengthening the Company's position in the national electricity industry.

APRESIASI DAN PENUTUP

Tahun 2023 adalah periode pengembangan bisnis inti Perseroan yang signifikan, dukungan para pemegang saham dan pemangku kepentingan menjadi kunci kesuksesan dalam mencapai kinerja yang membanggakan. Kami mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi, termasuk pemegang saham, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Kerja keras, dukungan, dan partisipasi telah menjadi pendorong utama kinerja Perseroan sepanjang tahun 2023. Direksi juga ingin mengungkapkan terima kasih kepada seluruh insan PLN IP Services atas dedikasi yang tanpa lelah berkontribusi pada Perseroan.

Perseroan menghadapi tantangan dan mengelola risiko dengan baik dalam mencapai keberlanjutan bisnis sepanjang tahun 2023. Maka, Direksi juga mengapresiasi kerja sama yang baik dengan mitra bisnis dan pelanggan dalam mewujudkan visi dan misi Perseroan. Kami memiliki komitmen untuk menciptakan inovasi terbaik guna mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan dedikasi ini, PT PLN Indonesia Power Services bertekad menjadi Perseroan terkemuka yang menjadi kebanggaan bangsa. Demikianlah laporan Direksi mengenai kinerja Perseroan pada tahun 2023. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda selama ini.

APPRECIATION & CLOSING

2023 is a period of significant development of the core business of the Company, and the support of our shareholders and stakeholders is key to our success in achieving outstanding performance. We would like to express our highest appreciation to all those who have contributed, including shareholders, regulators and other stakeholders. Hard work, support and participation have been the main drivers of the Company's performance throughout 2023. The Board of Directors would also like to express its gratitude to all PLN IP Services personnel for their tireless dedication in contributing to the Company.

The Company encountered challenges and managed risks well in achieving business sustainability throughout 2023. The Board of Directors also appreciates the good cooperation with business partners and customers in realizing the vision and mission of the Company. We are committed to creating the best innovations to support sustainable growth. With this dedication, PT PLN Indonesia Power Services is determined to become a leading company that is the pride of the nation. This is the Board of Directors' report on the performance of the Company in 2023. Thank you for your attention and support.

Atas nama Direksi
On behalf of Board of Directors

PT PLN Indonesia Power Services



Hari Cahyono
Direktur Utama
President Director





03 ◀

Profil Perusahaan

Company Profile



Identitas Perusahaan

Company Identity



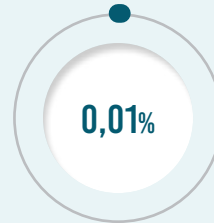
	Nama Perusahaan Company's Name	PT PLN Indonesia Power Services	
	Sektor Usaha Business Sector	Kelistrikan	Electricity
	Tanggal Pendirian Date of Establishment	15 April 1998	April 15, 1998
	Bidang Usaha Line of Business	Ketenagalistrikan, perindustrian, jasa dan perdagangan berdasarkan prinsip industri niaga yang sehat dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas serta melaksanakan penugasan dari Pemegang Saham Mayoritas.	Electricity, industry, services and trade based on sound commercial industry principles by applying the principles of Limited Liability Companies and carrying out assignments from Majority Shareholders.
	Modal Ditempatkan Issued Capital	Rp514.867.770.000 (Lima ratus empat belas miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu Rupiah) 514.867.770 Lembar saham	Rp514,867,770,000 (Five hundred and fourteen billion eight hundred and sixty seven million seven hundred and seventy thousand Rupiah) 514.867.770 shares
	Modal Dasar Authorized Capital	Rp600.000.000.000 (Enam ratus miliar Rupiah) 600.000.000 Lembar saham	Rp600,000,000,000 (Six hundred billion Rupiah) 600.000.000 shares
	Jumlah Pegawai Number of Employees	4.305 Pegawai	4,305 Employees



Kepemilikan
Share Ownership



PT Indonesia Power



YPK Indonesia Power



Dasar Hukum Pendirian
Legal Basis of Establishment

- Akta Notaris Haryanto, S.H. No. 25 Tanggal 11 Agustus 2008 SK Menkumham nomor AHU-87862.AH.01.02.Tahun 2008
- Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H. No. 27 Tanggal 29 Januari 2014 SK AHU-12381. AH.01.02 Tanggal 27 Maret 2014
- Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H. No. 08 Tanggal 19 Oktober 2018 SK AHUAH.01.03-0255203 Tanggal 22 Oktober 2018
- Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H. No. 26 Tanggal 22 Desember 2020 SK AHU-0085417. AH.01.02 Tanggal 22 Desember 2020
- Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H. No. 09 Tanggal 12 Juli 2022 SK AHUAH.01.09-0032748 Tanggal 14 Juli 2022
- Akta Notaris Shahreza Annaz, S.H., M.Kn No 15 Tanggal 12 April 2023
- Notarial Deed of Haryanto, S.H. No. 25 Dated August 11, 2008 Decree of Minister of Law and Human Rights No. AHU-87862. AH.01.02.Tahun 2008
- Notarial Deed of Lenny Janis Ishak, S.H. No. 27 Dated January 29, 2014 SK AHU-12381. AH.01.02 Dated March 27 2014
- Notarial Deed of Lenny Janis Ishak, S.H. No. 08 Dated October 19, 2018 SK AHUAH.01.03-0255203 Dated October 22, 2018
- Notarial Deed of Lenny Janis Ishak, S.H. No. 26 Dated December 22, 2020 SK AHU0085417.AH.01.02 Dated December 22, 2020
- Notarial Deed of Lenny Janis Ishak, S.H. No. 09 Dated July 12, 2022 SK AHUAH.01.09-0032748 Dated July 14, 2022
- Notarial Deed of Shahreza Annaz, S.H., No. 15 Dated April 12, 2023



Alamat Kantor Pusat
Head Office Address

Jl Raya Pasar Minggu No. 190,
Jakarta Selatan 12510

Telp : +62 21 2178 9990
Fax : +62 21 2178 9989



Media Sosial
Social Media

PLN Indonesia Power Services
 @cogindodayabersama

PLN Indonesia Power Services
 PLN Indonesia Power Services



Kontak
Contact

Email
Email : info@plnip-services.co.id

Situs Web Perusahaan
Company Website : www.plnip-services.co.id

Layanan Informasi
Information Service : +62 21 2178 9990 (ext.1202)

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary : Ulfa Milany

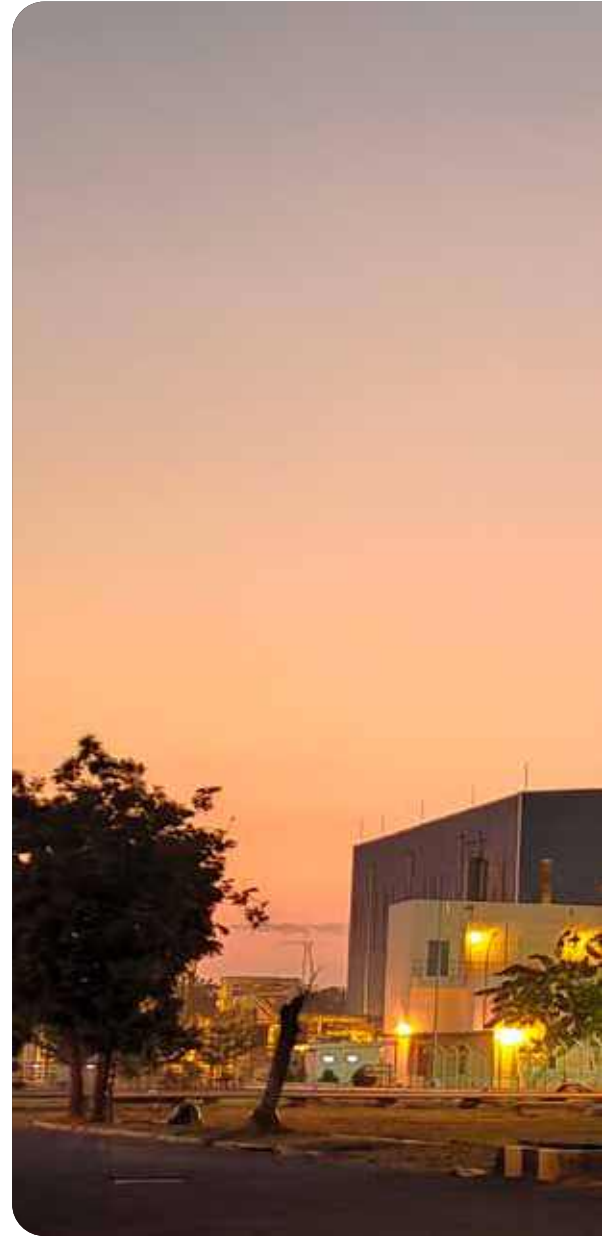
Riwayat Singkat Perusahaan

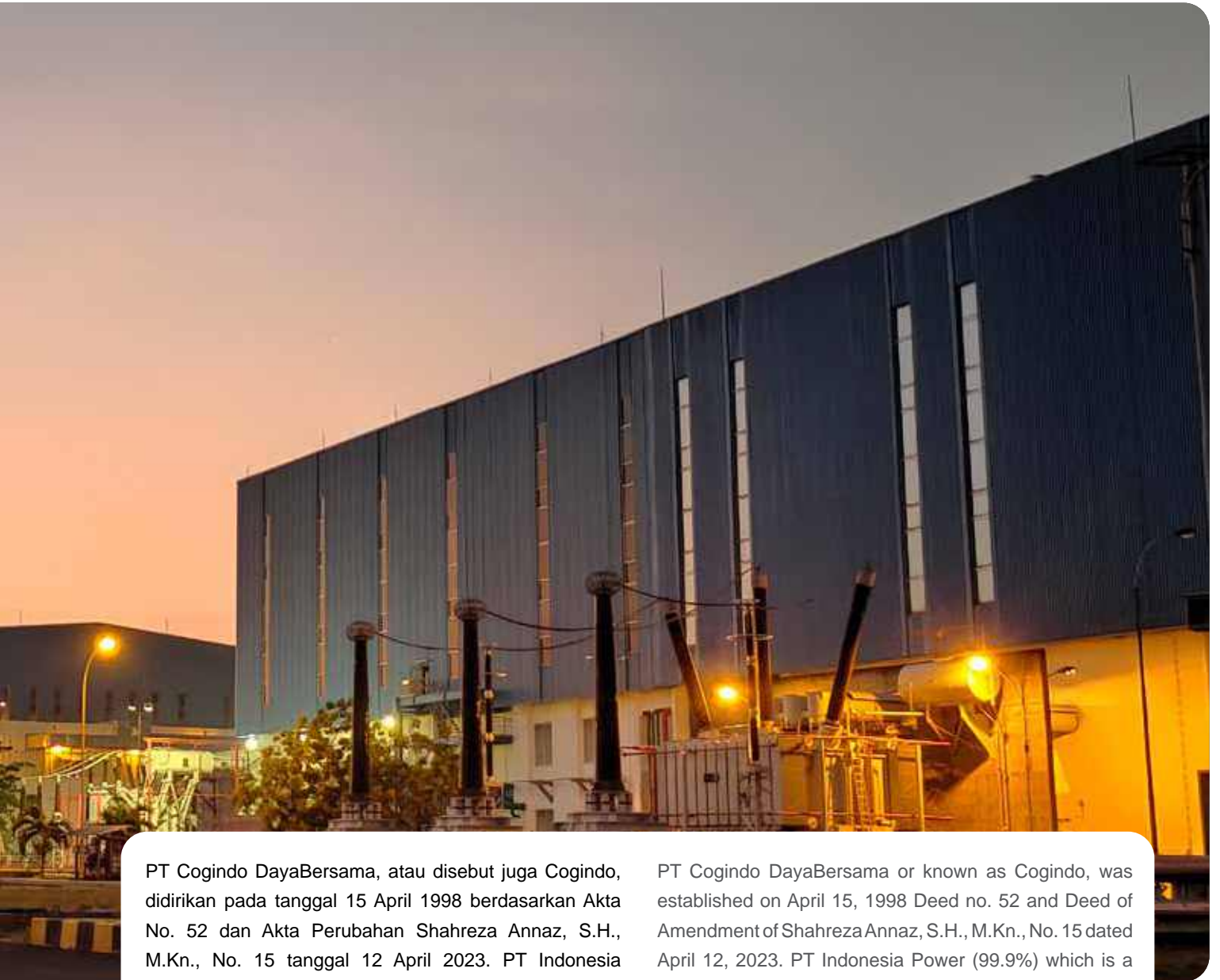
Brief History of The Company



Lebih dari (dua) dekade berkiprah dalam industri ketenagalistrikan, Cogindo semakin matang dan memantapkan diri sebagai Perusahaan *Energy Solution Provider* tepercaya dengan menawarkan *Jasa Layanan Integrated Energy Solutions* khususnya di Asia. Berbagai penghargaan dan sertifikasi telah mendukung keberadaan perusahaan setiap tahunnya.

More than (two) decades of working in the electricity industry, Cogindo has matured and established itself as a trusted Energy Solution Provider Company by offering Integrated Energy Solutions Services especially in Asia. Various awards and certifications have been received as an appreciation to the existence of the Company.





PT Cogindo DayaBersama, atau disebut juga Cogindo, didirikan pada tanggal 15 April 1998 berdasarkan Akta No. 52 dan Akta Perubahan Shahreza Annaz, S.H., M.Kn., No. 15 tanggal 12 April 2023. PT Indonesia Power (99,9%), yang merupakan anak perusahaan PT PLN (Persero), adalah pemegang saham utama Cogindo sebesar 99,9%, sementara saham lainnya sebesar 0,01% dimiliki oleh Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Pegawai (YPK) PT Indonesia Power. Pendirian awal perusahaan dimaksudkan untuk menjadi pionir dalam pengembangan bisnis *Cogeneration*, *Distributed Generation*, serta pengelolaan *Captive Power* yang optimal di wilayah Indonesia.

PT Cogindo DayaBersama or known as Cogindo, was established on April 15, 1998 Deed no. 52 and Deed of Amendment of Shahreza Annaz, S.H., M.Kn., No. 15 dated April 12, 2023. PT Indonesia Power (99.9%) which is a Subsidiary of PT PLN (Persero) is the Major Shareholder of Cogindo with 99.9% and other shares of 0.01% owned by Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Pegawai (YPK) PT Indonesia Power. Initial establishment of the Company was intended to be a pioneer in developing the Cogeneration, Distributed Generation business, as well as optimal management of Captive Power in Indonesia.

Operasional perusahaan secara resmi dimulai pada tanggal 15 Agustus 1998, dan sejak itu, perusahaan mulai mengembangkan bisnis awalnya dalam bidang pembangkitan tenaga listrik. Perusahaan mulai melakukan pengembangan bisnis dengan kegiatan usaha penjualan tenaga listrik serta penyediaan jasa *Maintenance Repair Overhaul* (MRO). Pemeliharaan pembangkit listrik tidak hanya mengacu pada pemeliharaan aset dan peralatan, tetapi juga meliputi inspeksi rutin, pelaporan rutin oleh inspektur, integrasi dan tinjauan sistem, serta pemeliharaan periodik yang terjadwal untuk memastikan pembangkit listrik tetap aktif dan bekerja dengan baik.

Lebih dari dua dekade berkiprah dalam industri ketenagalistrikan, Cogindo semakin matang dan memantapkan diri sebagai perusahaan *energy solution provider* terpercaya dengan menawarkan jasa layanan *integrated energy solutions* khususnya di Asia. Berbagai penghargaan dan sertifikasi telah mendukung keberadaan perusahaan setiap tahunnya. Hingga akhir tahun 2023, perusahaan telah berkembang pesat dan menyebar hampir di seluruh wilayah kepulauan Indonesia, serta telah melakukan pengembangan bisnis hingga ke kancah internasional, salah satunya adalah kerjasama dengan negara Kuwait pada April 2021. Pencapaian tersebut telah menjadikan Cogindo sebagai salah satu perusahaan mitra terpercaya dalam industri pembangkitan tenaga listrik dengan dukungan tenaga kerja yang terampil dan ahli dalam bidangnya.

Perusahaan mulai menyusun *roadmap* pengembangan bisnis *overseas*. Kerjasama dengan Kuwait telah menjadi jangkar Cogindo dalam pengembangan pasar di luar negeri, khususnya negara-negara Timur Tengah. Di ASEAN, Cogindo telah menandatangani perjanjian kesepakatan dengan negara Vietnam dan Malaysia untuk memperkuat kerjasama dalam bidang ketenagalistrikan.

Cogindo terus berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Berbagai inovasi dan pengembangan teknologi terus dilakukan untuk dapat diterapkan dalam kegiatan operasional, antara lain dalam bidang marketing dengan berbagai jenis media digital marketing seperti Instagram dan *e-commerce* yang menjadi andalan untuk melebarkan sayap dalam hal penjualan.

The Company's operations officially started on August 15, 1998, and since then, the company began to develop its initial business in the field of power generation. The Company started to develop its business by selling electricity and providing Maintenance Repair Overhaul (MRO) services. Power plant maintenance does not only refer to maintenance of assets and equipment, but also includes routine inspections, regular reporting by inspectors, system integration and review, as well as scheduled periodic maintenance to ensure power plant remains active and working properly.

More than two decades in the power industry, Cogindo has matured and established itself as a trusted energy solution provider by offering integrated energy solutions services, especially in Asia. Several awards and certifications have supported the existence of the company every year. Until the end of 2023, the company has developed rapidly and spread almost throughout the Indonesian archipelago, and has expanded its business to the international arena, one of which is cooperation with the country of Kuwait in April 2021. This achievement has made Cogindo one of the trusted partner companies in the power generation industry with the support of a skilled workforce and experts in their sector.

The Company began to develop an overseas business development roadmap. Collaboration with Kuwait has become Cogindo's anchor in overseas market development, especially in Middle East countries. In ASEAN, Cogindo has signed agreements with Vietnam and Malaysia to strengthen cooperation in the electricity sector.

Cogindo continues to strive to provide the best for the community. Various innovations and technological developments continue to be carried out to be applied in operational activities, including in the field of marketing with various types of digital marketing media such as Instagram and e-commerce being the mainstay for sales expansion.

Dalam hal teknologi informasi, Cogindo telah bersinergi dengan perusahaan induk untuk memperkuat investasi infrastruktur IT berbasis industri 4.0. Berbagai aplikasi telah berhasil dikembangkan, salah satunya aplikasi Monita, yaitu aplikasi *Power Plant Monitoring & Reporting* untuk meningkatkan keandalan pembangkit PLTD Tenau dan Nusa Penida.

Perusahaan juga meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance/GCG*) dengan melakukan revisi pada struktur organisasi dan perangkat kebijakan menjadi lebih baik dan sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kinerja perusahaan yang akan berefek pada meningkatnya pelayanan terhadap para pemangku kepentingan.

Cogindo senantiasa berkomitmen untuk mewujudkan visi dan misi menjadi perusahaan terpercaya dalam industri pembangkitan tenaga listrik yang mengacu ke masa depan, dan semakin kokoh mendukung bisnis Indonesia Power dan PLN Group untuk memajukan sektor ketenagalistrikan nasional serta siap mengambil peran di masa depan untuk menjadi Penyedia Solusi Energi Terpercaya di Asia.

Dalam Arahan RUPS RKAP tahun 2022 PT Cogindo DayaBersama tanggal 29 Januari 2022, Cogindo diminta untuk mempersiapkan implementasi perubahan logo Perusahaan secara bertahap. Sebagai bagian dari identitas PLN Group, pelaksanaan perubahan ini harus dikoordinasikan dengan *Corporate Secretary* PT Indonesia Power. Hal ini berlanjut sampai pada pertengahan tahun 2023, pemegang saham Cogindo memberikan arahan tegas untuk segera mengimplementasikan *rebranding*, termasuk perubahan nama dan logo korporat. Arahan ini merupakan bagian dari program Kementerian BUMN terkait *Holding Subholding* (HSH) di lingkungan PT PLN (Persero).

Dalam Risalah RUPS RKAP 2023, PT Cogindo DayaBersama diminta untuk memperkuat *branding* di level PLN Group maupun Non-PLN Group, serta mempersiapkan implementasi perubahan logo Perusahaan secara bertahap, program ini untuk memastikan bahwa perubahan tersebut memperkuat identitas Perusahaan dan mendukung strategi bisnis

In terms of information technology, Cogindo has synergized with the parent company to strengthen IT infrastructure investment based on industry 4.0. Various applications have been successfully developed, one of which is the Monita application, the Power Plant Monitoring & Reporting application to increase the reliability of Tenau PLTD and Nusa Penida PLTD generators.

The Company is also increasing the implementation of the principles of good corporate governance (GCG) by revising the organizational structure and policy tools to become better and in accordance with the objectives of increasing operational efficiency and corporate performance which will have an effect on improving services to stakeholders.

Cogindo is always committed to realize the vision and mission of becoming a trusted company in the power generation industry that looks to the future, as well as always increasingly support the business of Indonesia Power and the PLN Group to advance the national electricity sector and is ready to take on a role in the future to become a trusted Energy Solution Provider in Asia.

In the 2022 RKAP GMS Direction of PT Cogindo DayaBersama on January 29, 2022, Cogindo was required to prepare the implementation of the Company's logo change in stages. As part of the identity of the PLN Group, the implementation of this change must be coordinated with the Corporate Secretary of PT Indonesia Power. This continued until in mid-2023, the shareholders of Cogindo issued a firm directive to immediately implement the rebranding, including changes to the corporate name and logo. This directive is part of the Ministry of SOEs program related to Subholding Holding (HSH) within PT PLN (Persero).

In the 2023 RKAP GMS Minutes, PT Cogindo DayaBersama was required to strengthen branding at the PLN Group and Non-PLN Group levels, and prepare for the implementation of the Company's logo changes in stages, this program is to ensure that the changes strengthen the identity of the Company and support long-term business strategies. The rebranding process was

jangka panjang. Proses *rebranding* ini dilakukan secara komprehensif, melalui tahap perancangan, perumusan, penyusunan, dan evaluasi mendetail untuk memastikan perubahan ini memperkuat identitas Perusahaan dan mendukung strategi bisnis jangka panjang.

Pada tahun 2024, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Cogindo DayaBersama Nomor 08 tanggal 19 April 2024 mengenai perubahan Anggaran Dasar PT Cogindo DayaBersama dalam rangka rebranding perusahaan melalui perubahan nama dan logo korporat yang semula bernama PT Cogindo DayaBersama berubah menjadi PT PLN Indonesia Power Services.

Perubahan tersebut efektif berlaku sejak tanggal 2 Mei 2024 dan telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0025785.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Terbatas PT PLN Indonesia Power Services.

INFORMASI PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN

Perubahan Nama Perusahaan PT Cogindo DayaBersama menjadi PT PLN Indonesia Power Services, sebagaimana diarahkan oleh Pemegang Saham dengan dasar sebagai berikut:

1. Program Kementerian BUMN terkait *Holding Subholding* (HSH) di lingkungan PT PLN (Persero);
2. Arahan Pemegang Saham CDB dalam Risalah RUPS RKAP 2023 dimana PT CDB diminta agar memperkuat branding di level PLN Group maupun Non-PLN Group untuk menjadi *top of mind* dan membangun *trust* serta *leading* di berbagai lini bisnis Perusahaan;
3. Arahan RUPS RKAP tahun 2022 PT Cogindo DayaBersama tanggal 29 Januari 2022 yaitu CDB diminta untuk mempersiapkan implementasi perubahan logo Perusahaan secara bertahap, sebagai bagian dari identitas PLN Group dalam pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan *Corporate Secretary* PT Indonesia Power;

conducted comprehensively, through detailed design, formulation, drafting, and evaluation stages to ensure that the changes strengthen the identity of the Company and support the long-term business strategy.

In 2024, based on the Deed of Shareholders Decree of PT Cogindo DayaBersama Number 08 on April 19, 2024, regarding the amendment of the Articles of Association of PT Cogindo DayaBersama in order to rebrand the company through changes in the name and corporate logo originally named PT Cogindo DayaBersama changed to PT PLN Indonesia Power Services.

The amendment is effective as of May 2, 2024, and was approved based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights Number AHU-0025785.AH.01.02. Year of 2024 on May 2, 2024, concerning Approval of Amendments to the Articles of Association of PT PLN Indonesia Power Services Limited Liability Company.

INFORMATION ON CHANGE OF NAME OF THE COMPANY

The changes of the Company's Name of PT Cogindo DayaBersama to PT PLN Indonesia Power Services, as of directed by Shareholders with the following basic:

1. The Ministry of SOEs Program related to Holding Subholding (HSH) in with in PT PLN (Persero)
2. CDB Shareholders direction in the Minutes of RKAP GMS 2023 where the PT CDB required to strengthening the branding in the level of PLN Group or Non-PLN Group to become top of mind and build the trust as well as leading in the several business line of the Company;
3. The direction of the 2022 RKAP GMS of PT Cogindo DayaBersama on January 29, 2022, namely CDB was required to prepare the implementation of the Company's logo change in stages, as part of the PLN Group identity in its implementation to coordinate with the Corporate Secretary of PT Indonesia Power;

Budaya Perusahaan

Corporate Culture

Perusahaan telah melakukan penyesuaian terhadap implementasi tata nilai perusahaan dalam rangka mengoptimalkan sinergi organisasi PLN Group. Transformasi budaya Perusahaan dari SIAP AKSI menjadi AKHLAK yang disahkan dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor: 027.K/CDB/V/2021 dan Nomor: 03.K/DEKOM-CDB/2021 tentang Pedoman Budaya Perusahaan sesuai Surat Edaran KBUMN No. SE-7/MBU/07/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. AKHLAK merupakan akronim dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif yang dijadikan sebagai identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan di setiap BUMN.

Implementasi budaya Perusahaan Cogindo dilakukan melalui berbagai media baik offline maupun online secara rutin setiap bulan dengan tujuan agar insan Cogindo dapat cepat memahami nilai-nilai AKHLAK, meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai serta memiliki perilaku yang dapat mendukung pencapaian visi misi Perusahaan dan mencerminkan identitas Perusahaan secara spesifik.

Pedoman Budaya Perusahaan meliputi:

- Visi Perusahaan
- Misi Perusahaan
- Nilai-Nilai Utama Perusahaan
- Motto Perusahaan

The Company has aligned the implementation of corporate values in order to optimize the organizational synergy of the PLN Group. Transformation of corporate culture from SIAP AKSI to AKHLAK which was ratified in the Joint Decrees of the Board of Commissioners and Board of Directors Number: 027.K/ CDB/V/2021 and Number: 03.K/DEKOM-CDB/2021 on the Guideline for Corporate Culture according to KBUMN Circular Letter No. SE-7/MBU/07/2020 dated July 1, 2020 on Core Values of Human Capital for State-Owned Enterprises. AKHLAK is an acronym for Amanah, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive and Collaborative which is used as an identity and work culture adhesive that supports continuous performance improvement in every SOEs.

Implementation of Cogindo's corporate culture is carried out through various media both offline and online regularly every month with the aim that Cogindo people can quickly understand AKHLAK values, increase employee motivation and performance and have behaviors that can support the achievement of the Company's vision and mission and reflect the specific identity of the Company

Corporate Culture Guidelines include:

- Company Vision
- Company Mission
- Core Values of the Company
- Company Motto

Visi Misi Perusahaan

Company Vision Mission



Visi Vision

Menjadi Perusahaan Terpercaya Dalam Penyediaan Solusi Bidang Energi Di Kawasan Asia dan Global

To be a Trusted Energy Solutions Company in the Asia Region and Global



Misi Mission

Menyediakan Solusi Layanan Energi Yang Terbaik, Terkini, Dan Terintegrasi

Providing the Best, Latest, and Integrated Energy Services Solutions

Dewan Komisaris dan Direksi PLN IP Services telah melakukan tinjauan kembali akan visi dan misi Perusahaan yang disahkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan tahun 2021-2025. Dewan Komisaris dan Direksi menganggap bahwa visi dan misi Perusahaan saat ini masih sesuai dengan kondisi dan perkembangan industri yang dihadapi.

The Board of Commissioners and Board of Directors of PLN IP Services have reviewed the vision and mission of the Company which was approved in the Company's Long Term Plan for 2021-2025. The Board of Commissioners and Board of Directors consider that the Company's current vision and mission are still in accordance with the conditions and developments of the industry they are facing.

Kata Kunci Keywords	Penjelasan Description	Target Target
Perusahaan Terpercaya	<p>Diakui sebagai perusahaan terpercaya meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perusahaan yang <i>profitable</i> dan memiliki <i>revenue</i> tinggi Mendapatkan kontrak lelang pekerjaan di level nasional dan regional 	<ul style="list-style-type: none"> Termasuk 20 besar perusahaan dengan <i>revenue</i> tertinggi di Asia untuk perusahaan sejenis pada tahun 2025 Memiliki <i>market share</i> lebih dari 25% di kawasan regional Asia pada tahun 2025.
Trusted Company	<p>Being recognized as a trusted company which includes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Company that are profitable and have high revenue Obtain work tender contract at the national and regional levels. 	<ul style="list-style-type: none"> Included in the top 20 companies with the highest revenue in Asia for similar companies in 2025. Have market share of more than 25% in the Asia region in 2025.
Penyedia Solusi Bidang Energi	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan yang memiliki solusi layanan dengan teknologi, kompetensi dan layanan yang menjadi solusi terintegrasi dan menjadikan proses lebih handal, efisien dan terkoneksi. Perusahaan yang memiliki pelanggan dari berbagai segmen pengguna dan penyedia energi seperti : <i>Oil & Gas</i>, <i>IPP</i>, <i>Mining</i>, Industri Manufaktur, Kawasan Industri, dan sebagainya. 	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki solusi layanan bidang energi yang lengkap dan terintegrasi Pertumbuhan pendapatan lebih dari 10% per tahun.
Energy Solution Provider	<ul style="list-style-type: none"> Company that have service solutions with technology, competence and services that become integrated solutions and make processes more reliable, efficient and connected. Company that have customers from various segments of energy users and providers such as: <i>Oil & Gas</i>, <i>IPP</i>, <i>Mining</i>, Manufacturing Industry, Industrial Estate, and so on. 	<ul style="list-style-type: none"> Have complete and integrated energy service solutions. Revenue growth of more than 10% per year.

Perusahaan berperan aktif di dalam menyediakan solusi energi baik regional, nasional maupun internasional, sesuai ruang lingkup bisnisnya dengan menyediakan solusi-solusi terbaik yang dibutuhkan oleh pelanggan maupun calon pelanggan, dengan memberikan layanan-layanan terintegrasi yang inovatif, kompetitif, adaptif, berkelanjutan, memperhatikan kelestarian lingkungan dalam setiap aktivitas bisnisnya, berorientasi pada kebutuhan dan memenuhi harapan pelanggan.

The Company plays an active role in providing regional, national and international energy solutions, according to its business scope by providing the best solutions by customers and prospective customers, by providing integrated services that are innovative, competitive, adaptive, sustainable, attentive to sustainability environment in every business activity, oriented to the needs and meet customer expectations.

NILAI-NILAI UTAMA DAN BUDAYA PERUSAHAAN

Nilai-Nilai Utama Perusahaan adalah AKHLAK yang merupakan akronim dari 6 (Enam) Nilai Utama dan diturunkan ke dalam 18 (Delapan Belas) Panduan Perilaku sebagai berikut:

CORE VALUES AND CULTURE OF THE COMPANY

Core Values of the Company are AKHLAK which is an acronym for 6 (Six) Core Values and is derived into 18 (Eighteen) Codes of Conduct as follows:



A.	Amanah Trust	Memegang Teguh Kepercayaan yang Diberikan. Uphold to the Trust Given.	<ul style="list-style-type: none">• Memenuhi janji dan komitmen• Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan• Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika• Fulfilling promises and commitments• Responsible for the tasks, decisions, and actions taken• Adhering to moral and ethical values
K.	Kompeten Competent	Terus Belajar dan Mengembangkan Kapabilitas Continue to Learn and Develop Capabilities	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah• Membantu orang lain belajar• Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik• Improving self-competence to respond to ever-changing challenges• Helping others learn• Completing tasks with the best quality
H.	Harmonis Harmonious	Saling Peduli dan Menghargai Perbedaan Care for Each Other and Respect Differences.	<ul style="list-style-type: none">• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.• Suka menolong orang lain• Membangun lingkungan kerja yang kondusif• Appreciate everyone regardless of background• Likes to help others• Build a conducive work environment
L.	Loyal Loyal	Berdedikasi dan Mengutamakan Kepentingan Bangsa dan Negara. Dedicate and Prioritize the Interests of The Nation and the State.	<ul style="list-style-type: none">• Menjaga nama baik sesama pegawai, Pimpinan, BUMN, dan Negara• Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar• Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika• Maintain the good name of fellow employees, Leaders, SOEs, and the State.• Willing to make sacrifices to achieve greater goal• Obey the leadership as long as it does not conflict with law and ethics
A.	Adaptif Adaptive	Terus Berinovasi dan Antusias dalam Menggerakkan ataupun Menghadapi Perubahan. Continue to Innovate and Enthusiastic in Driving or Facing Change.	<ul style="list-style-type: none">• Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik• Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi• Bertindak proaktif• Quickly adjust to be better• Continuously make improvements and follow technological developments• Act proactively
K.	Kolaboratif Collaborative	Membangun Kerjasama yang Sinergis. Build a Synergistic Cooperation.	<ul style="list-style-type: none">• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi• Terbuka untuk bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah• Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama• Providing opportunities for various parties to contribute• Open to work together to generate added value• Mobilizing the use of various resources for common goals.

Cogindo Way

Cogindo Way merupakan pola sikap dan perilaku insan PLN IP Services dalam membangun komunikasi intensif agar tercipta team work yang unggul dan memiliki pandangan yang lebih komprehensif lagi dalam menghadapi persaingan bisnis, khususnya di bidang Jasa O&M untuk mencapai tujuan Perusahaan. *Cogindo Way* diwujudkan dalam bentuk skema sebagai berikut:

Cogindo Way

The *Cogindo Way* is a pattern of attitude and behavior of PLN IP Services people in building intensive communication so as to create superior team work and have more comprehensive view in dealing with business competition, especially in the field of O&M Services to achieve the Company's goals. The *Cogindo way* is realized in the form of a scheme as follows:



Deskripsi dan makna Profil “COGINDO WAY” adalah sebagai berikut:

- Bentuk segitiga menghadap ke atas yang menunjukkan gerakan kegiatan usaha Perusahaan yang selalu fokus pada peningkatan kinerja secara terus menerus dalam rangka mencapai visi Perusahaan.
- Visi Perusahaan terletak di bagian atas gambar mengandung makna bahwa pencapaian visi Perusahaan adalah tujuan utama yang menjadi prioritas dalam menjalankan bisnis Perusahaan.
- Misi Perusahaan terletak di bagian bawah gambar, tegak lurus menghadap Visi Perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa Misi Perusahaan yang berfungsi sebagai penghantar dalam mewujudkan Visi Perusahaan, diterjemahkan ke dalam program-program strategis baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- 2 (Dua) Etika Perusahaan berupa 2 tanda panah melingkar, menunjukkan siklus berkesinambungan antara 2 Etika Perusahaan yang mencakup Etika Pegawai dan Etika Bisnis yang saling terkait dan menggerakkan proses pencapaian maturitas Perusahaan.

The description and meaning of the “COGINDO WAY” Profile are as follows:

- Triangle shape facing upwards show movement of the Company's business activities which always focus on continuous performance improvement in order to achieve the Company's vision.
- The Company's vision is located at the top of the image, meaning that achieving the Company's vision is the main goal and priority in running the Company.
- The Company's Mission is located at the bottom of the image, perpendicular to the Vision. This shows that the Company's Mission, which serve as a carrier in realizing the Company's Vision, is translated into both short term and long term strategic programs.
- 2 (Two) Corporate Ethics in the form of 2 circular arrows, indicating continuous cycle between 2 Corporate Ethics which includes Employee Ethics and Business Ethics which are interrelated and drive the process of achieving Company maturity.

- Warna merah pada tanda panah Etika Pegawai melambangkan bahwa dalam berperilaku Insan Cogindo senantiasa bekerja dengan penuh energi, kekuatan, hasrat, dan keberanian.
- Warna hijau pada tanda panah Etika Bisnis bermakna bahwa di dalam menjalankan bisnis Insan Cogindo senantiasa memperhatikan lingkungan hidup sekitarnya.
- Lingkaran Nilai-Nilai Budaya Perusahaan yang meliputi *Safety*, Integritas, Profesional, Proaktif, dan Sinergi yang menggerakkan dan menjadi landasan Perilaku Pegawai dalam rangka mencapai Visi dan Misi Perusahaan.
- Dalam inti lingkaran terdapat Motto Perusahaan, yakni tulisan “*Trusted Energy Solution Provide*” yang melambangkan semangat Perusahaan untuk berperan sebagai mitra jasa pembangkitan yang menjadi andalan dalam mewujudkan harapan stakeholder terkait.
- Sinergi antara Motto, Nilai-Nilai Budaya, dan Pilar Perilaku dilambangkan dalam poros bergerigi yang terus bergerak untuk mewujudkan Visi dan Misi Perusahaan.
- Red color on the Employee Ethics arrow symbolizes that Cogindo People always behave and work with full energy, strength, passion and courage.
- Green color on the Business Ethics arrow means that in conducting business, Cogindo People always pay attention to the surrounding environment.
- Circle of Corporate Culture Values which includes Safety, Integrity, Professional, Proactive, and Synergy that drive and become the basis for Employee Behavior in order to achieve the Company’s Vision and Mission.
- Within the core of the circle is the Company’s Motto, “*Trusted Energy Solution Provide*” which symbolize the Company’s spirit to play a role as a partner in power generation services that is a mainstay in realizing the expectations of all stakeholders.
- Synergy between Motto, Culture Values, and Behavior Pillars is symbolized in a jagged axis that continuously moves to realize the Company’s Vision and Mission.

Motto Perusahaan

Motto of The Company

Motto Perusahaan, berupa kalimat “**Trusted Energy Solution Provider**” yang memiliki arti sebagai berikut:

- **Arti ke dalam:**
Menginspirasi seluruh Insan Cogindo untuk berkomitmen memberikan yang terbaik sehingga mampu saling memberikan solusi, meningkatkan kecepatan proses, dan mewujudkan kinerja unggul.
- **Arti ke luar:**
Membangun kepercayaan Pelanggan dan Stakeholder lainnya agar tercipta loyalitas dan keterikatan kepada Perusahaan sehingga selalu menjadi mitra pilihan dalam solusi bisnis pembangkitan melalui penyediaan kualitas layanan terbaik, solusi bisnis terintegrasi dan komitmen untuk tumbuh bersama.

Motto of the Company, in the form of sentence “**Trusted Energy Solution Provider**” has the following meaning:

- **Internal meaning:**
To inspire all Cogindo People to commit to giving the best hence they are able to provide solutions to each other, increase process speed, and achieve superior performance.
- **External meaning:**
To build customer and other stakeholder trust in order to create loyalty and attachment to the Company hence it is always the partner of choice in generation business solutions through providing the best quality service, integrated business solutions and a commitment to grow together.

Logo Perusahaan

Logo of The Company

Logo PLN IP Services telah diatur didalam yang mengatur tentang identitas perusahaannya dalam Surat Edaran Direksi Nomor: 097/ED/PLN IP SERVICES/V/2024 perihal Informasi Perubahan Nama dan Logo Perusahaan.

The logo of PLN IP Services is regulated in the document that governs the company's identity, as stated in the Circular Letter of the Board of Directors Number: 097/ED/PLN IP SERVICES/V/2024 regarding Information on Company Name and Logo Changes.

Logo



Komponen Logo

Component Logo

Logo PLN IP Services terdiri dari komponen *logogram* dan *logotype*. Dalam pengaplikasiannya pada berbagai media, kedua komponen logo ini tidak boleh dipisah.

Logogram tersusun dari tiga elemen visual yang tidak terpisahkan, bentuk persegi sebagai dasar dari petir dan tiga gelombang dengan tampilan warna bermuatan filosofi visual sesuai cita dan citra korporat.

Logotype berupa akronim dari kalimat Perusahaan Listrik Negara (PLN) & nama *Subholding* secara eksklusif disusun dari khusus dan identitas berupa huruf yang hanya dimiliki PLN IP Services

The PLN IP Services logo consists of logogram and logotype components. In its application on various media, these two logo components should not be separated.

The logogram is composed of three inseparable visual elements, a square shape as the basis of lightning and three waves with a color display charged with visual philosophy according to the corporate mind and image.

The logotype is an acronym of the phrase Perusahaan Listrik Negara (PLN) & the name of the Subholding is exclusively composed of special and identity letters only owned by PLN IP Services.

Warna

Colour

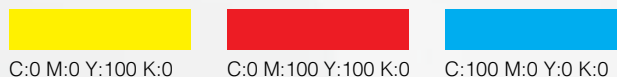
Logo PLN IP Services terdiri dari warna kuning, merah, dan biru dengan komposisi warna seperti tercantum.

Warna korporat sebagai aksen pada aplikasi desain media komunikasi visual dengan komposisi warna seperti tercantum.

The PLN IP Services logo consists of yellow, red, and blue colors with the color composition listed.

Corporate colors as accents in visual communication media design applications with color composition as listed.

Warna Logo | Logo Colour



C:0 M:0 Y:100 K:0

C:0 M:100 Y:100 K:0

C:100 M:0 Y:0 K:0

Warna Korporat | Corporate Colour



C:100 M:70 Y:53 K:0

C:100 M:7 Y:28 K:0

Konsep dan Filosofi
Concept & Philosophy

Masing-masing bentuk dan warna dari elemen yang tersusun dalam logogram memiliki makna visual yang terinspirasi dari cita dan citra insan PLN sebagai sumber daya utama pengelola bisnis perusahaan.

Each shape and color of the elements arranged in the logogram has a visual meaning inspired by the ideals and image of PLN personnel as the main resource for managing the company's business.



Persegi
Square

Bidang Persegi sebagai dasar, berwarna kuning, dan tanpa garis pinggir. Bidang Persegi melambangkan bahwa PLN merupakan wadah atau organisasi yang terorganisir dengan sempurna. Warna kuning menggambarkan pencerahan, seperti yang diharapkan PLN bahwa listrik mampu menciptakan pencerahan bagi kehidupan masyarakat. Kuning juga melambangkan semangat yang menyala-nyala yang dimiliki tiap insan yang berkarya di PLN.

Square as the base, yellow in color, and without border. The Square represents PLN as a perfectly organized entity or organization. The yellow color describes enlightenment, as PLN hopes that electricity can create enlightenment for people's lives. Yellow also symbolizes the fiery spirit of every person who works in PLN.



Petir atau Kilat
Lightning or Thunder

Petir atau Kilat, berwarna merah, bentuk atas tebal, bentuk bawah runcing, dan memotong/menembus tiga gelombang. Petir atau Kilat melambangkan tenaga listrik yang terkandung didalamnya sebagai produk jasa utama yang dihasilkan oleh PLN. Selain itu, Petir juga mengartikan kerja cepat dan tepat para insan PLN dalam memberikan solusi terbaik bagi pelanggannya. Warna merah memberikan representasi kedewasaan PLN selaku perusahaan listrik pertama di Indonesia dan dinamisme gerak laju PLN beserta insan perusahaan, serta keberanian dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman.

Lightning or Thunder, red in color, thick upper shape, pointed lower shape, and cutting/penetrating three waves. Lightning or Thunder represents the electricity contained therein as the main service product produced by PLN. In addition, Lightning also means the fast and precise work of PLN people in providing the best solution for its customers. The red color represents the maturity of PLN as the first electricity company in Indonesia and the dynamism of PLN's pace and the company's people, and the courage to overcome the challenges of the times.



Tiga Gelombang
(Ujung Gelombang Menghadap
Kebawah)
Three Waves (Wave Edge Facing
Downward)

Tiga Gelombang, berwarna biru, berbentuk sinusodia (2 ½ periode), ujung gelombang menghadap ke bawah, tersusun sejajar dalam arah mendatar, dan terletak di tengah-tengah pada dasar kuning. Tiga Gelombang memiliki arti gaya rambat energi listrik yang dialirkan oleh tiga bidang usaha utama yang digeluti oleh PLN yaitu pembangkitan, penyaluran, dan distribusi yang seiring sejalan dengan kerja keras para insan PLN guna memberikan layanan terbaik bagi pelanggannya. Warna biru melambangkan kesetiaan dan pengabdian pada tugas untuk menuju dan mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta keandalan yang dimiliki insan PLN dalam memberikan layanan terbaik bagi para pelanggannya.

Three Waves, blue in color, sinusoidal-shaped (2 ½ periods), the end of the wave facing a downward direction, arranged in parallel in a horizontal direction, and located in the center on a yellow base. Three Waves means the propagation force of electrical energy flowed by the three main business fields engaged by PLN, namely generation, distribution, and distribution, which are in line with the hard work of PLN people to provide the best service for its customers. The blue color represents loyalty and devotion to duty towards and achieving the prosperity and welfare of the Indonesian people, and the reliability of PLN people in providing the best service for its customers.

Bidang Usaha

Line of Business

BIDANG USAHA SESUAI DENGAN ANGGARAN DASAR TERAKHIR

Bidang usaha Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan No. 15 tanggal 12 April 2023, pasal 3 ayat 1 adalah untuk menjalankan usaha-usaha dalam bidang ketenagalistrikan, perindustrian, jasa dan perdagangan.

KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN PADA TAHUN BUKU

Hingga 31 Desember 2023, PLN IP Services telah menjalankan seluruh usaha yang tercantum di dalam Anggaran Dasar. Setiap tahun PT PLN Indonesia Power Services senantiasa berusaha meningkatkan kualitas pelayanan pada bidang usaha yang dimiliki demi kemajuan Perusahaan serta kepuasan pelanggan dan pemegang saham.

KEGIATAN USAHA BERDASARKAN ANGGARAN DASAR TERAKHIR

- a. Maksud dan tujuan dibentuknya Perusahaan adalah untuk menyelenggarakan usaha di bidang ketenagalistrikan, perindustrian, jasa dan perdagangan berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat dengan menerapkan prinsip-prinsip Perusahaan Terbatas serta melaksanakan penugasan dari Pemegang Saham Mayoritas dalam rangka mendukung kegiatan usaha Pemegang Saham dengan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dan kepatutan serta Etika Bisnis pada Perusahaan Terbatas.
- b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha :
 - 1) Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin;
 - 2) Reparasi Motor Listrik, Generator dan Transformator;
 - 3) Transmisi Tenaga Listrik;
 - 4) Distribusi Tenaga Listrik;
 - 5) Pembangkit Tenaga Listrik;

LINE OF BUSINESS IN ACCORDANCE WITH THE LATEST ARTICLES OF ASSOCIATION

The Company's line of business as stated in the Company's Articles of Association No. 15 dated April 12, 2023, article 3 paragraph 1 is to run businesses in the electricity, industry, services and trade sectors.

BUSINESS ACTIVITIES CONDUCTED IN THE FISCAL YEAR

As of December 31, 2023, PLN IP Services has carried out all the businesses listed in the Articles of Association. Every year PT PLN Indonesia Power Services always strives to improve service quality in its line of business for the sake of progress of the Company as well as for the satisfaction of customer and shareholder.

BUSINESS ACTIVITIES BASED ON THE LATEST ARTICLES OF ASSOCIATION

- a. The purpose and objective of the Company is to conduct business in the fields of electricity, industry, services and trade based on the sound principles of industry and commerce by implementing the principles of Limited Liability Company as well as conducting assignments from the Majority Shareholders in order to support business activities of the Shareholders by applying the principles of good corporate governance as well as compliance and business ethics in Limited Liability Company.
- b. To achieve the aims and objectives above, the Company may carry out business activities:
 - 1) Machinery and Turbine Spare Parts and Components Industry;
 - 2) Repair of Electric Motors, Generators and Transformers;
 - 3) Electric Power Transmission;
 - 4) Electric Power Distribution;
 - 5) Power Plant;

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6) Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin; | 6) Procurement of Steam/Hot Water and Cold Air; |
| 7) Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik; | 7) Operation of Electricity Supply Installation; |
| 8) Pendidikan Teknik Swasta; | 8) Private Engineering Education; |
| 9) Aktivitas keinsinyuran dan Konsultasi Teknik YBDI; | 9) YBDI Engineering and Technical Consultation Activities; |
| 10) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Kreatif Lainnya; | 10) Leasing and Renting Activities without Machinery and Other Creative Industry Equipment Option Rights; |
| 11) Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus; | 11) Motorized Transportation for Special Goods; |
| 12) Konstruksi bangunan Sipil Elektrikal; | 12) Construction of Electrical Civil buildings; |
| 13) Instalasi Listrik; | 13) Electrical Installation; |
| 14) Konstruksi Gedung Lainnya; | 14) Other Building Construction; |
| 15) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya; | 15) Other Management Consulting Activities; |
| 16) Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer; | 16) Wholesale of Computers and Computer Equipment; |
| 17) Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya; | 17) Wholesale of Office Machinery and Processing Industry, Spare Parts and Its Equipment; |
| 18) Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya; | 18) Wholesale of Machinery, Equipment and Other Supplies; |
| 19) Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam; | 19) Petroleum and Natural Gas Mining Support Activities; |
| 20) Reparasi Mesin untuk Keperluan Umum; | 20) Repair of Machinery for General Purposes; |
| 21) Reparasi Mesin untuk Keperluan Khusus; | 21) Repair of Machinery for Special Purposes; |
| 22) Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi, dan Pengontrol; | 22) Repair of Measuring Instruments, Testing Instruments and Navigation Equipment, and Controllers; |
| 23) Reparasi Peralatan Listrik Lainnya; | 23) Repair of Other Electrical Equipment; |
| 24) Penjualan Tenaga Listrik; | 24) Sale of Electric Power; |
| 25) Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik; | 25) Installation of Electric Power Utilization; |
| 26) Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha; | 26) Generation, Transmission, and Sale of Electricity in One Business Unit; |
| 27) Instalasi Minyak dan Gas; | 27) Oil and Gas Installation; |
| 28) Instalasi Mekanikal; | 28) Mechanical Installation; |
| 29) Pemasangan Perancah (<i>Steiger</i>); | 29) Scaffolding Installation (<i>Steiger</i>); |
| 30) Pengembangan Aplikasi Perdagangan melalui Internet (<i>E-commerce</i>); | 30) Development of Internet Trading Applications (<i>E-commerce</i>); |
| 31) Konsultasi Manajemen Lainnya; | 31) Other Management Consulting; |
| 32) Jasa Inspeksi Periodik; | 32) Periodic Inspection Services; |
| 33) Jasa Inspeksi Teknik Instalasi; | 33) Installation Engineering Inspection Services; |
| 34) Jasa <i>Commissioning</i> Proses Industrial, <i>Quality Assurance</i> , dan <i>Quality Control</i> ; | 34) Industrial Process Commissioning, Quality Assurance, and Quality Control Services; |
| 35) Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri; | 35) Domestic Labor Selection and Placement Activities; |
| 36) Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu; | 36) Fixed-term Labor Supply Activities; |
| 37) Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia; | 37) Human Capital Provision and Management of Human Capital Functions; |

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>38) Pelatihan Kerja Teknik Swasta;
39) Konstruksi Gedung Industri;
40) Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air;
41) Konstruksi Bangunan Sipil Jalan;
42) Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi;
43) Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif;
44) Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial;
45) Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya;
46) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perusahaan dapat melakukan perdagangan dan/atau kegiatan usaha pendukung dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber data yang dimiliki Perusahaan.</p> | <p>38) Private Technical Job Training;
39) Industrial Building Construction;
40) Water Resources Infrastructure Building Construction;
41) Road Civil Building Construction;
42) Oil and Gas Civil Building Construction;
43) Immersive Media Content Programming and Production Activities;
44) Web Portals and/or Digital Platforms with Commercial Purposes;
45) Information Technology Activities and Other Computer Services;
46) In addition to the business activities as referred to in paragraph 2, the Company may conduct trading and/or supporting business activities in order to optimize the utilization of data sources owned by the Company.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Produk Dan Layanan Yang Diberikan

Products and Services

Jenis Jasa Type of Services	Skema Jasa Scheme of Services
<p>Jasa Operasi dan Pemeliharaan (O&M) Merupakan jasa yang ditawarkan PLN IP Services dalam penyediaan segala perlengkapan dan fasilitas secara cepat demi meningkatkan kualitas kerja berbagai pembangkit listrik, mulai dari diesel, turbin gas, turbin uap, siklus ganda, hingga tenaga air.</p> <p>Operation and Maintenance (O&M) Services A service offered by PLN IP Services in providing all equipment and facilities quickly to improve the quality of work of various power plants, ranging from diesel, gas turbines, steam turbines, double cycles, to hydro power plants.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Perjanjian Jasa Support Operasi dan Pemeliharaan Jasa yang diberikan dengan asas penggantian biaya kegiatan operasi dan pemeliharaan yang meliputi masa mobilisasi sebelum COD sampai dengan FAC Pembangkit. Perjanjian Jasa Operasi dan Pemeliharaan berbasis Kinerja Jasa dengan melakukan kesepakatan bersama antara <i>asset owner</i> dengan aset operator, dimana diterapkan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> atas kinerja dan <i>asset operator</i> O&M bertanggung jawab terhadap kinerja Pembangkit. <ol style="list-style-type: none"> O&M Supporting Agreement Services provided on the principle of reimbursement of operating and maintenance costs, which include the mobilization period before COD to the generator FAC. O&M Performance Base Agreement Services provided by entering into a mutual agreement between the asset owner and the operator's assets, where rewards and punishments are applied for the performance and the O&M operator assets are responsible for the performance of the Power Plant.
<p>Jasa Suplai Energi Merupakan solusi cepat demi mengatasi kurangnya pasokan energi dalam jangka waktu pendek dan menengah melalui opsi penyewaan mesin pembangkit listrik yang ditawarkan oleh PLN IP Services.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Long Term Energy Supply Merupakan jasa penyediaan tenaga listrik, melalui pembangunan IPP (<i>Independent Power Producer</i>) jenis pembangkit mulai dari diesel, turbin gas, turbin uap, siklus ganda, hingga tenaga air ataupun pembangkit energi terbarukan dengan perjanjian jual beli listrik/<i>Power Purchase Agreement</i> (PPA) jangka panjang selama 15 tahun. Temporary Energy Supply (Rental Mobile Genset) Merupakan jasa penyediaan tenaga listrik, melalui penyewaan pembangkit/ <i>rental power</i> jenis pembangkit diesel ataupun pembangkit listrik tenaga mesin gas, dengan masa perjanjian pekerjaan jangka waktu pendek hingga menengah yaitu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
<p>Energy Supply A fast solution to overcome the lack of energy supply in short-and medium-terms through power plant rental offered by PLN IP Services.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Long Term Energy Supply Energy supply service with the construction of IPP (Independent Power Producer), type of power plant starting from diesel, gas turbine, combined cycle, to hydroelectric or renewable-energy power plant with a 15-year, long-term power purchase Agreement (PPA). Temporary Energy Supply (Rental Mobile Genset) Energy supply service, through diesel or gas power plant rental, with short to medium-term agreement from 1 to 5 years.

Jenis Jasa Type of Services	Skema Jasa Scheme of Services
<p>Jasa Maintenance, Repair dan Overhaul (MRO) Merupakan jasa penunjang lain di bidang pembangkitan demi memberikan solusi terbaik bagi para pelanggan sekaligus meningkatkan bisnis utama perusahaan. Dalam melaksanakan Jasa MRO PLN IP Services berusaha untuk meningkatkan unsur Sumber Daya Manusia (SDM), alat, prosedur kerja, dan aplikasi teknologi. Hal ini ditujukan demi memaksimalkan kinerja unit pembangkit.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periodic Maintenance PLN IP Services menyediakan jasa pemeliharaan periodik (rawat pulih/ inspeksi/ peremajaan) baik secara bertahap maupun total dengan lingkup pekerjaan meliputi: elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen untuk mendukung efektifitas kerja pembangkit. 2. Total Maintenance Contract Pelayanan pemeliharaan total dalam lingkup mekanikal, elektrikal dan kontrol/ instrumen unit pembangkit dalam satu paket selama jangka waktu yang ditentukan. Layanan ini meliputi penyediaan suku cadang OEM/Non OEM, bahan habis pakai, perangkat umum, pemeliharaan alat, pemeliharaan rutin, prediktif, serta preventif. 3. Breakdown/ Recovery/ Corrective Merupakan pelayanan langsung dengan melakukan inspeksi dan pemulihan pembangkit yang mengalami gangguan, termasuk program <i>zero-hour maintenance</i>. 4. Repair, Refurbish, Re-powering & Retrofit Layanan paket atau parsial berupa modernisasi, rekondisi, dan perbaikan pada beberapa bagian pembangkit. 5. Modification, Rehabilitation & Relocation Layanan pembongkaran, relokasi, perbaikan, pemasangan, modifikasi, dan pengujian komisioning yang dilindungi asuransi. 6. Engineering, Procurement & Construction Menyediakan jasa analisis teknik mesin pembangkit yang disesuaikan dengan kebutuhan serta biaya yang bersaing. Memiliki jaminan yang berkualitas, tim professional dari PLN IP Services juga mampu memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja pembangkit. 7. Troubleshooting Tim teknis PLN IP Services menganalisis sidik gangguan di berbagai bidang pembangkit. Dengan pengalaman luas yang dimiliki para tenaga ahli, kami siap memeriksa segala masalah individu maupun keseluruhan dalam sistem kontrol, instrumentasi, analisa vibrasi, hingga pengimbangan situs. 8. Testing & Commissioning Menyediakan jasa pengujian, pemeriksaan tes individu atau keseluruhan sistem kerja serta pengujian <i>precommissioning</i> dan <i>commissioning</i>.
<p>Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) Services Supporting services in electricity generation sector to provide the best solutions for the customers while ensuring the continuity of energy supply. In providing MRO Services, PLN IP Services strives to develop its human capital, equipment, work procedures, and technology applications. This aims at maximizing power plant unit performance.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periodic Maintenance PLN IP Services provides periodic maintenance services (overhaul/inspection/refurbish) either partly or totally, with the electrical, mechanical, and power plant unit instrument/control scopes to support power plant work effectiveness at the same time in a certain period. 2. Total Maintenance Contract Total maintenance service in the mechanical, electrical, and power plant unit instrument/control scopes in one package throughout the specified period of time. This service includes the provision of OEM/Non-OEM parts, consumable materials, general equipment, equipment maintenance, and routine, predictive, and preventive maintenance. 3. Breakdown/ Recovery/ Corrective Direct service by performing inspection and repair of interrupted power plant, including zero-hour maintenance. 4. Repair, Refurbish, Re-powering & Retrofit A package or partial service of repair, refurbish, re-powering, and retrofit of partial parts of power plant. 5. Modification, Rehabilitation & Relocation The service for overhaul, relocation, repair, installation, modification, and the testing of insurance protected commissioning. 6. Engineering, Procurement & Construction The provision of technical analytical service for power plant machinery according to the needs with competitive price. With assured quality, PLN IP Services's professional team can also provide recommendation to improve power plant performance. 7. Troubleshooting PLN IP Services's technical team performs troubleshooting at various power plant sectors. With vast experience, our experts are ready to troubleshoot every individual and total issue in system control, instrumentation, vibration analysis, and site balancing. 8. Testing & Commissioning Providing testing service, individual test or overall working system checking, and pre-commissioning and commissioning testing.

Jenis Jasa Type of Services	Skema Jasa Scheme of Services
<p>Gas Diesel Engine Services</p> <p>Merupakan jasa trading dan <i>stockiest</i> bekerjasama dengan PT Wartsila Indonesia.</p>	<p>Value Proposition yang ditawarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Excellent Supply Chain Management Inventory <ul style="list-style-type: none"> Identifikasi <i>spare parts</i> berdasarkan tingkat kekritisan, tingkat ketersediaan maupun tingkat penggunaan Penentuan <i>re-order point</i> untuk jumlah persediaan minimum dan <i>safety stock</i> untuk <i>fast moving spare parts (safety parts)</i> maupun <i>slow moving spare parts (exchange parts)</i> Warehousing <ul style="list-style-type: none"> Penyiapan dan penentuan lokasi gudang yang strategis Monitoring dan penyimpanan material <i>spare part</i> Harga <i>spare parts</i> yang transparan Better <i>lead times</i> PLN IP Services berperan sebagai <i>centralized maintenance planner</i> untuk aset PLTD, tersedianya <i>record</i> terkait <i>historical services & equipment, roll in roll out part, updated running hour engine, dukungan service letter</i> Jaminan kualitas OEM <i>Spare Parts</i> Mendapat keunggulan prioritas produk jasa Wartsila Membangun kompetensi PLTD Ketersediaan TA (<i>Technical Advisor</i>) untuk <i>troubleshooting, improvement, technology update</i> Pengiriman barang tepat waktu Jasa <i>After Sales</i> terhadap produk yang disuplai
<p>Gas Diesel Engine Services</p> <p>Trading and stockist service in collaboration with PT Wartsila Indonesia.</p>	<p>Value Proposition offered:</p> <ol style="list-style-type: none"> Excellent Supply Chain Management Inventory <ul style="list-style-type: none"> Spare parts are identified by critical, availability, and usage levels Determination of re-order points for minimum inventory quantities and safety stock for fast moving spare parts (safety parts) and slow-moving spare parts (exchange parts) Warehousing <ul style="list-style-type: none"> Preparation and determination of strategic warehouse locations Spare parts material monitoring and storage Transparent spare parts prices Better lead times PLN IP Services acts as a centralized maintenance planner for PLTD assets, availability of records related to historical services & equipment, roll in roll out parts, updated running hour engine, service letter support Quality assurance of OEM Spare Parts Get the priority of Wartsila service products Building PLTD competencies Availability of TA (Technical Advisor) for troubleshooting, improvement, technology update Delivery of goods on time After Sales Services for products supplied
<p>Jasa Lainnya</p> <p>Another Services</p>	<ol style="list-style-type: none"> Jasa Relokasi Pembangkit/Konstruksi Pembangkit Jasa Sistem Informasi - <i>Reliability Efficiency Optimization Center (REOC)</i> <ol style="list-style-type: none"> Plant Relocation / Plant Construction Services Information System Services - Reliability Efficiency Optimization Center (REOC)

Pada tahun 2023, fokus Perusahaan dinyatakan dalam Tema Korporat tahun 2023 yaitu “*Unlocking The Capacity & Go To Extra Miles*” yang mempresentasikan 9 inisiatif pengembangan perusahaan yaitu:

1. Kontrak baru di *oil & gas, mining* dan IPP;
2. Pemenuhan kompetensi dan kualifikasi SDM dan perizinan untuk pekerjaan di *oil & gas, mining* dan IPP;
3. *Portfolio creation* untuk *Overhaul and AMC* pembangkit < 50 MW;
4. *Mapping market landscape* bisnis *domestic* dan *overseas*;
5. *Best Fit & cost effective Marketing Strategy*;
6. Pengembangan *Workshop CDB*;
7. *MRO & EPC Capacity Building*;
8. Inisiasi *Digital Business*;
9. Akselerasi bisnis EBT;

In 2023, focus of the Company stated in Corporate Theme 2023 “*Unlocking The Capacity & Go To Extra Miles*” that presenting 9 initiatives the company’s development such as:

1. New contracts in *oil & gas, mining* and IPP;
2. Fulfillment of competencies and qualifications of human capital and licenses for work in *oil & gas, mining* and IPP;
3. Portfolio creation for *Overhaul and AMC* of power plants < 50 MW;
4. Mapping domestic and overseas business market landscape;
5. Best Fit & cost effective Marketing Strategy;
6. CDB Workshop Development;
7. MRO & EPC Capacity Building;
8. Digital Business Initiation;
9. EBT business acceleration.

Keanggotaan Asosiasi Association Membership

Sampai dengan akhir tahun 2023, PLN IP Services telah tergabung dalam keanggotaan Asosiasi HAKIT (Himpunan Ahli Pembangkit Tenaga Listrik Indonesia) LPL - HAKIT.

Until the end of 2023, PLN IP Services has been a member of the HAKIT Association (Association of Indonesian Power Plant Experts) LPL - HAKIT.





Wilayah Operasional

Operational Area





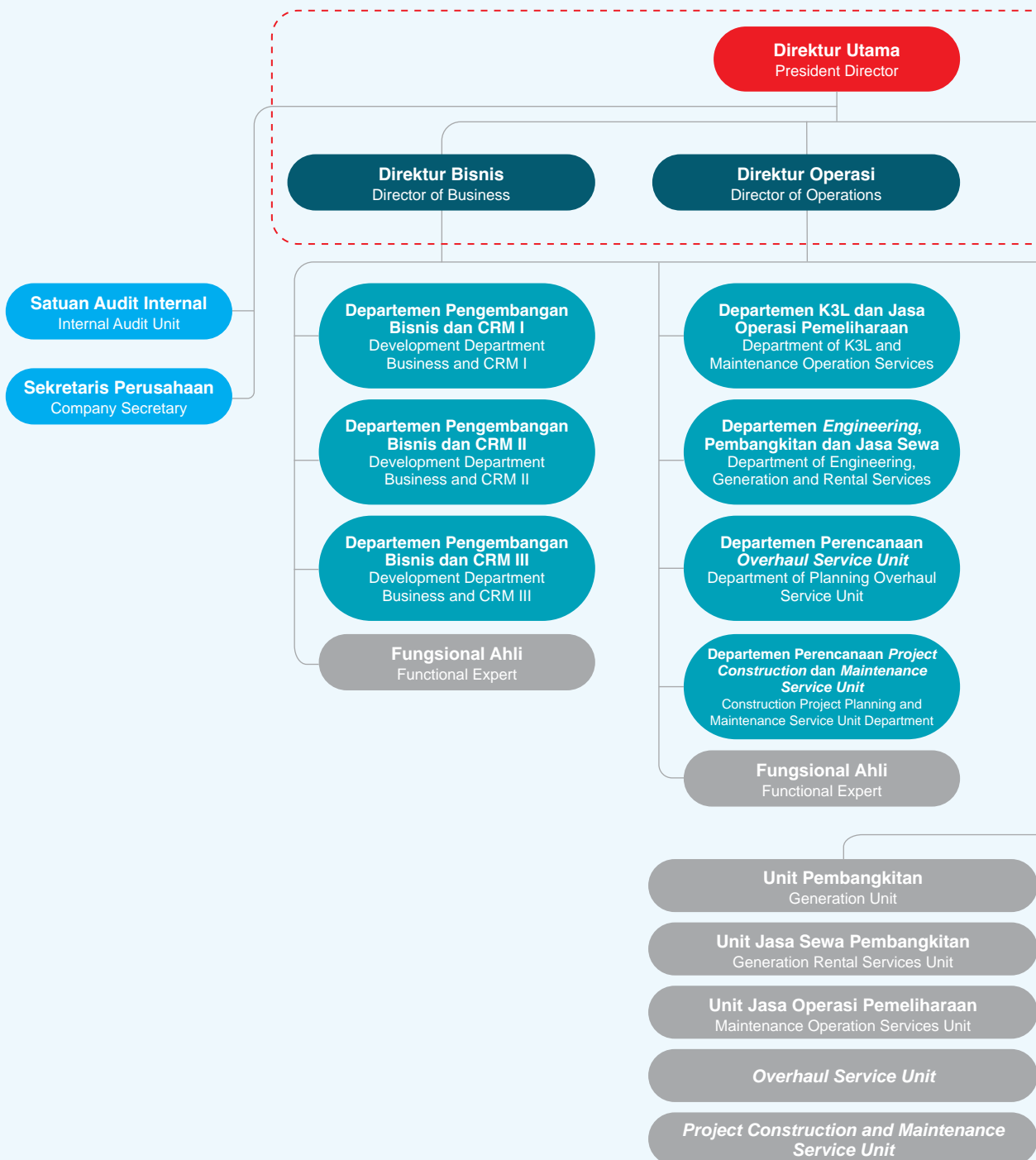
No.	Unit Unit	Kapasitas Capacity	Pekerjaan Work	Alamat Address
1.	PLTD Tenau	40 MW	Suplai Energi Listrik Electricity Supply	Jl Yos Sudarso Kec Alak, Kupang - NTT, 85224
2.	PLTD MFO NUSA PENIDA	10 MW	Suplai Energi Listrik Electricity Supply	Jl. Nusa Penida No. 53 Kutampi Kaler Kab. Klungkung - Pulau Nusa Penida - Bali 80771
3.	OVERHAUL SERVICE UNIT (OSU)	-	MRO MRO	Jl Brigjen Dharsono By Pass Karyamulya Kec Kesambi, Kota Cirebon 45135
4.	PLTU ASAM-ASAM	-	Jasa O&M (Support) O&M Services (Support)	Jl Raya Banjarmasin-Kotabaru, Km 122 Ds. Asam-asam, Kec. Jorong Pelaihari, Kab Tanah Laut, Kalsel 70882
5.	PLTD SENAYAN	101 MW	Jasa O&M (Support) Alat Bantu Auxiliary O&M Services (Support)	Jl. Tentara Pelajaran, RT 7/RW. 7 Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12210
6.	PLTU ADIPALA	660 MW	Jasa O&M (Support) O&M Services (Support)	Desa Bunton, Kec. Adipala, Kab. Cilacap Jawa Tengah 53271
7.	PLTU BARRU	2 x 50 MW	Jasa O&M (Support) O&M Services (Support)	Desa Bawasaloe, Kec. Balusu, Kab. Barru, Sulawesi Selatan
8.	PLTU TELUK BAYUR (BERAU)	2x7 MW	Jasa O&M (Support) O&M Services (Support)	Jl. Pulau Sambit, No. 764, RT 05, Kel.Tanjung Redeb, Kec.Tanjung Redeb, Kab Berau 77315
9.	PLTU HOLTEKAMP	2 x 10 MW	Jasa O&M (Support) O&M Services (Support)	Jl. Hanurata KM 9, Kampung Holtekamp Distrik MuaraTami, Jayapura
10.	PLTU JERANJANG	3 x 25 MW	Jasa O&M (Support) O&M Services (Support)	Jl. Raya PLTU Jeranjang, Desa Taman Ayu, Kec. Gerung, Lombok Barat, Mataram, Nusa Tenggara Barat
11.	PLTU LABUAN	2x300 MW	Jasa O&M (Support) O&M Services (Support)	Jl, Laba Terusan Panimbang, Desa Sukamaju Kec. Labuan, Pandeglang, Banten 42264
12.	PLTU LONTAR	2x315 MW	Jasa O&M (Support) O&M Services (Support)	Jl. Ir Sutami, Desa Lontar, Kec. Kemiri Kab. Tangerang 43364
13.	PLTU PANGKALAN SUSU	2x200 MW	Jasa O&M (Support) O&M Services (Support)	Desa Tanjung Pasir, Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat, Sumatera Utara
14.	PLTU PELABUHAN RATU	3x350 MW	Jasa O&M (Support) O&M Services (Support)	Jl. Pelita Kampung Cipatuguran, Desa Jayanti Kec. Pelabuhan Ratu, Kab. Sukabumi - Jawa Barat, 43364
15.	PLTU SANGGAU	2x7 MW	Jasa O&M (Support) O&M Services (Support)	Jl. Sempiyang, RT. 012, RW. 003, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau, Kalimantan Barat
16.	PLTU SINTANG	3x7 MW	Jasa O&M (Support) O&M Services (Support)	Desa Sungai Ringin, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Kalimantan Barat
17.	PLTU SURALAYA	1 x 625 MW	Jasa O&M (Support) O&M Services (Support)	Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Cilegon, Banten 42439
18.	UP SURALAYA	3.400 MW	Jasa O&M (Support) O&M Services (Support)	Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Cilegon, Banten 42439
19.	PLTMG MPP MERAUKE	20 MW	Jasa O&M (Support) O&M Services (Support)	Jl. Noari (Komplek Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Merauke, Kelurahan Karang Indah, Kab. Merauke - Papua
20.	PLTMG MPP SORONG	5 x 10 MW	Jasa O&M (Support) O&M Services (Support)	Jl. Durian Dusun Anak, RT 04, RW. 01, Distrik Mayamuk, Papua Barat, Sorong 98418
21.	PLTMG BAU BAU	30 MW	Jasa O&M (Support) O&M Services (Support)	PLTMG Bau-bau, Desa Kolese, Kel. Kolese, Kec. Lealea, Kota Bau-bau, Sulawesi tenggara 93733
22.	PLTMG JAYAPURA PEAKER	40 MW	Jasa O&M (Support) O&M Services (Support)	Jl. Abepura2, Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua Kode pos 99351
23.	PLTMG AMBON PEAKER MALUKU	30 MW	Jasa O&M (Support) O&M Services (Support)	Waai, Salahutu, Kabupaten MalukuTengah Prov. Maluku
24.	PLTMG MPP NABIRE	10 MW	Jasa O&M (Support) O&M Services (Support)	Jl. Christina MarthaTiahahu, Kel. Kalibobo Kab. Nabire, Provinsi Papua

No.	Unit Unit	Kapasitas Capacity	Pekerjaan Work	Alamat Address
25.	PLTMG/DEFPP BIAK	10 MW	Jasa O&M (<i>Support</i>) O&M Services (<i>Support</i>)	Jl. Raya Sorindo - Urfu. Yendidori, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98155
26.	PLTMG MPP MANOKWARI	20 MW	Jasa O&M (<i>Support</i>) O&M Services (<i>Support</i>)	Jl. Trikora Arfai II KM 19, Kel. Anday, Distrik Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat 98315
27.	PLTMG NIAS	25 MW	Jasa O&M (<i>Support</i>) O&M Services (<i>Support</i>)	Tripatra Site Office Project MPP Nias 25 MW project Jl. Turendra. Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Nias, Sumatera Utara
28.	PLTP ULUMBU	2x2.5 MW & 2 x 3 MW	Jasa O&M (<i>Support</i>) O&M Services (<i>Support</i>)	Desa Wewo, Kec. Satarmese, Kab Manggarai, Flores - NTT
29.	(PLTP) UP-KAMOJANG	375 MW	Jasa O&M (<i>Support</i>) Alat Bantu Auxiliary O&M Services (<i>Support</i>)	Komp. Indonesia Power, Jl. Raya Kamojang Desa Laksana, Kec. Ibum, Bandung
30.	PLTDG PESANGGARAN	200 MW	Suplai Energi Listrik Electricity Supply	Jl Nusa Penida No 53 Kutampi Kaler Kab Klungkung, Bali - 80771
31.	PLTGU - CILEGON	2x200 MW	Jasa O&M (<i>Support</i>) Alat Bantu Auxiliary O&M Services (<i>Support</i>)	Jl. Raya Bojonegara Salira, Desa Margasari Kecamatan Pulo Ampel, Kab Serang - Banten
32.	(PLTGU) UP-SEMARANG	1 0 3 3 . 9 0 MW	Jasa O&M (<i>Support</i>) Alat Bantu Auxiliary O&M Services (<i>Support</i>)	Komp, Pelabuhan Tanjung Mas, Jl. Ronggowarsito, Kota Semarang, Jawa Tengah 50174
33.	(PLTGU) UP-PERAK GRATI	765 MW	Jasa O&M (<i>Support</i>) Alat Bantu Auxiliary O&M Services (<i>Support</i>)	Jl. Raya Surabaya-Probolinggo KM. 73 Desa Wates, Kec. Lekok, Grati, Kab. Pasuruan, Jawa Timur 67184
34.	(PLTGU) UP-TANJUNG PRIOK	1248 MW	Jasa O&M (<i>Support</i>) Alat Bantu Auxiliary O&M Services (<i>Support</i>)	Jl. Laksamana RE Martadinata, Ancol, Kel. Pademangan, Kec. Pademangan, Jakarta Utara 14310
35.	PLTMG Bontang		Jasa O&M (<i>Support</i>) O&M Services (<i>Support</i>)	Jl Asmawarwan No 18 Kel Kanaan, Kec. Bontang Barat, Bontang - Kaltim
36.	PLTMG MPP Timika	10MW	Jasa O&M (<i>Support</i>) O&M Services (<i>Support</i>)	Jl. Poros Desa Pomako, Kabupaten Mimika Papua 99910
37.	PLTU Labuhan Angin	2x115MW	Jasa O&M (<i>Support</i>) O&M Services (<i>Support</i>)	Desa Labuhan Angin, Sibolga, Tapanuli Tengah, Sumut
38.	KUWAIT	-	Jasa O&M Jaringan Distribusi Ketenagalistrikan Electricity Distribution Network O&M Services	Al Bahar Tower, 2nd Floor Ahmad al Jaber Street, Sharq, Kuwait City, Kuwait
39.	PLTMG Baloi	30MW	Supply Energi Supply Energi	Jl Jend. Sudirman, Komplek PLN Batam GI Sei Baloi, Sukajadi, Batam Kota.
40.	BMPP NUSANTARA	60 MW	Jasa O&M O&M Services	Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah
41.	SAGULING	797 MW	Jasa O&M O&M Services	Komplek PLN Cioray Tromol Pos No. 7, Rajamandala Kab. Bandung 40554
42.	KALBAR 1	100 MW	Jasa O&M O&M Services	Karimunting, Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat 79271
43.	MRICA	180 MW	Jasa O&M O&M Services	Jl. Raya Banyumas KM. 8. Kota. Banjarnegara, Jawa Tengah 53471.

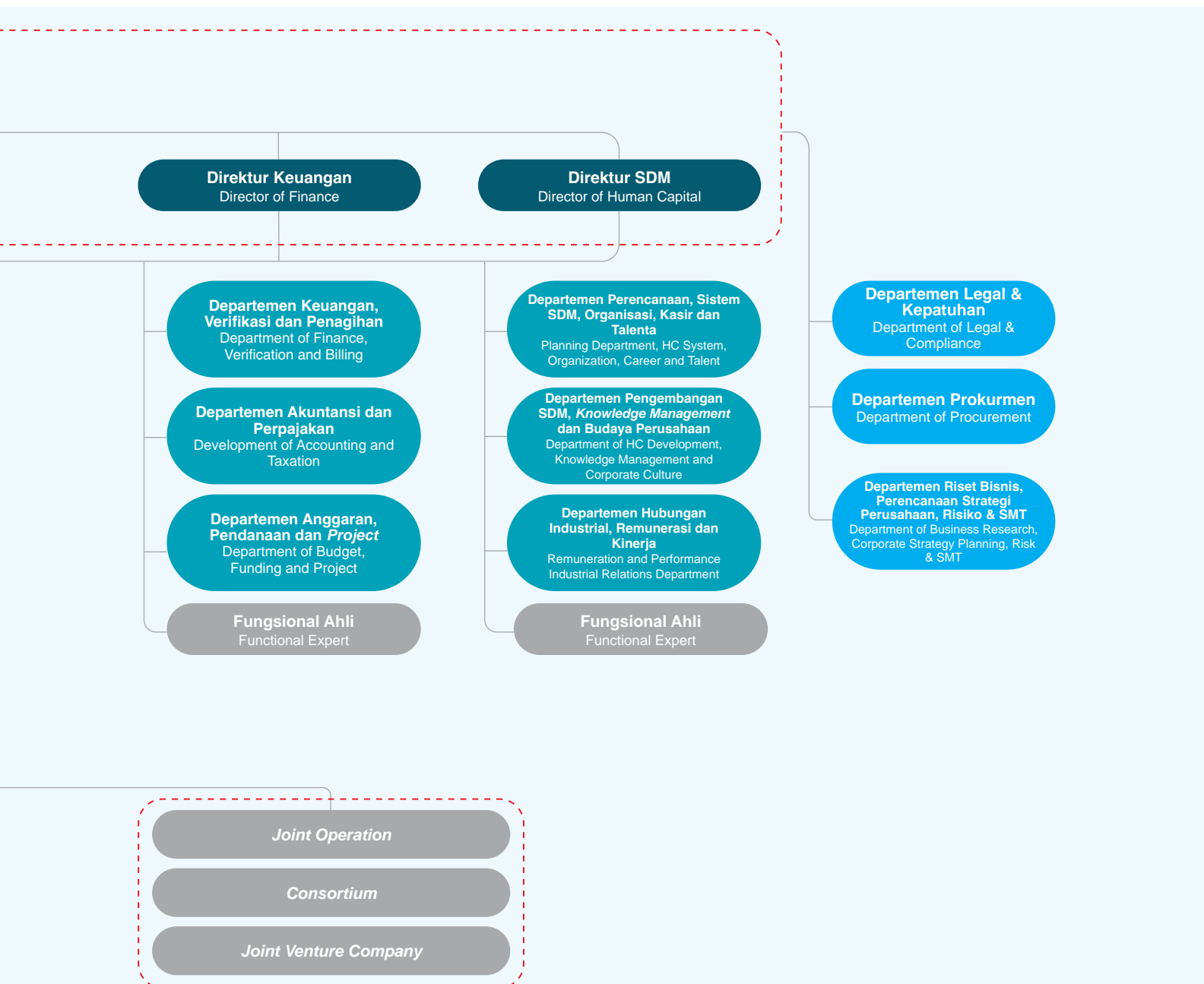
Struktur Organisasi

Organizational Structure

Perusahaan telah melakukan pembaruan atas Struktur Organisasi Perusahaan dalam rangka penyalarsan proses bisnis guna menciptakan fleksibilitas dan meningkatkan kemampuan mewujudkan kinerja unggul. Perubahan telah disahkan dalam Keputusan Direksi Nomor: 020.K/CDB/IV/2022 Tentang Struktur Organisasi PT PLN Indonesia Power Services tanggal 1 April 2022.



The Company has updated the Company's Organizational Structure in order to align business processes to create flexibility and increase the ability to achieve superior performance. The changes have been ratified in the Decree of the Board of Directors Number: 020.K/CDB/IV/2022 on the Organizational Structure of PT PLN Indonesia Power Services dated April 1, 2022.



Dewan Komisaris

Board of Commisioners



KHUSNUL MUBIEN

Komisaris Utama
President Commissioner



JULITA INDAH

Komisaris
Commissioner



MASYKURI ABDILLAH

Komisaris
Commissioner



SUNANDAR

Komisaris Independen
Independent Commissioner



FREDY EKO PRASETYO T

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Direksi

Board of Directors



HARI CAHYONO

Direktur Utama
President Director



IMAM ADI PRIHANTORO

Direktur Sumber Daya Manusia
Director of Human Capital



KUKUH PAMBUDI

Direktur Bisnis
Director of Business



MULYADI

Direktur Operasi
Director of Operations



HARI MUHARDANI NASUTION

Direktur Keuangan
Director of Finance


Profil Dewan Komisaris


Profile of the Board of Commissioners





Khusnul Mubien

Komisaris Utama
President Commissioner

 **Kewarganegaraan | Citizenship**
Indonesia
Indonesian

 **Domisili | Domicile**
Jakarta
Jakarta

 **Usia | Age**
55 tahun per 31 Desember 2023
55 years old as of December 31, 2023

 **Periode | Period**
Periode 1 : 2023 - 2026
1 Period : 2023 - 2026

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Komisaris Utama berdasarkan Surat Keputusan RUPS 001.K/010/RUPS-CDB/2023 tgl 20 Januari 2023
Appointed as a President Commissioner based on Decree of the GMS 001.K/010/RUPS-CDB/2023 dated January 20, 2023

Sertifikasi Certification

Sertifikasi Manajemen Risiko SNI 31000 pada November 2019
SNI 31000 Risk Management Certification on November 2019

Riwayat Pendidikan Educational Background

- S1 Ekonomi Akuntansi Universitas Brawijaya (1992)
- S2 Manajemen UNKRIS (2000)
- Bachelor of Accounting from University of Brawijaya (1992)
- Master of Management from UNKRIS (2000)

Riwayat Pekerjaan Professional Experience

- *Executive Vice President* Pengendalian Kinerja Korporat pada Divisi Pengendalian Kinerja Korporat Direktorat Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2022-sekarang)
- *Expert* Perencanaan Strategi pada Direktorat Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2022)
- Direktur Keuangan (Tugas Karya ke PT Indonesia Power) PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2020)
- Executive Vice President of Corporate Performance Control at the Corporate Performance Control Division of the Directorate of Corporate Planning and Business Development of PT PLN (Persero) Head Office (2022-present)
- Strategic Planning Expert at the Directorate of Corporate Planning and Business Development of PT PLN (Persero) Head Office (2022)
- Director of Finance (assignment to PT Indonesia Power) PT PLN (Persero) Head Office (2020)

Rangkap Jabatan Concurrent Position

Executive Vice President Pengendalian Kinerja Korporat pada Divisi Pengendalian Kinerja Korporat Direktorat Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PT PLN (Persero) Kantor Pusat .

Executive Vice President of Corporate Performance Control at Corporate Performance Control Division of the Directorate of Corporate Planning and Business Development of PT PLN (Persero) Head Office

Pelatihan pada Tahun Buku 2023 Trainings During 2023 Fiscal Year

- *Induction Training* Dewan Komisaris Baru CDB (8 Maret 2023)
- *Into the unknown : Charting the Future Agenda* (7-8 Desember 2023)
- Induction Training for CDB's New Board of Commissioners (March 8, 2023)
- Into the unknown : Charting the Future Agenda (December 7-8 2023)

Hubungan Afiliasi Affiliations

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or with the controlling and major shareholders.



Julita Indah

Komisaris
Commissioner

Kewarganegaraan | Citizenship

Indonesia
Indonesian

Domisili | Domicile

Jakarta
Jakarta

Usia | Age

69 tahun per 31 Desember 2023
69 years old as of December 31, 2023

Periode | Period

Periode 1 : 2024 - 2027
1 Period : 2024 - 2027

Dasar Hukum Pengangkatan

Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Cogindo DayaBersama No.02 tanggal 5 Januari 2024.

Appointed as Commissioner based on the Deed of Shareholder Decision Statements of PT Cogindo DayaBersama No.02 dated January 5, 2024.

Sertifikasi

Certification

-

Riwayat Pendidikan

Educational Background

- S1 Listrik (2003)
- S2 Bidang Sumber Daya Manusia - STIE Kampus Ungu (2007)
- Bachelor's Degree in Electricity (2003)
- Master of Human Capital - STIE Kampus Ungu (2007)

Riwayat Pekerjaan

Professional Experience

- *Executive Vice President* Pengadaan Transmisi, Gardu Induk, dan Material Terpusat PT PLN (Persero)
- *Expert* Manajemen Niaga pada Direktorat Retail dan Niaga PT PLN (Persero) Kantor Pusat
- Executive Vice President of Transmission Procurement, Substation, and Central Material of PT PLN (Persero)
- Management of Trade Expert on Retail Directorate and Trade in PT PLN (Persero) Head Office

Rangkap Jabatan

Concurrent Position

Tidak Ada
None

Pelatihan pada Tahun Buku 2023

Trainings During 2023 Fiscal Year

Tidak Ada
None

Hubungan Afiliasi

Affiliations

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or with the controlling and major shareholders.



Masykuri Abdillah

Komisaris
Commissioner

 **Kewarganegaraan | Citizenship**

Indonesia
Indonesian

 **Domisili | Domicile**

Tangerang
Tangerang

 **Usia | Age**

65 tahun per 31 Desember 2023
65 years old as of December 31, 2023

 **Periode | Period**

Periode 1 : 2022 - 2025
1 Period : 2022 - 2025

Dasar Hukum Pengangkatan

Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Surat Keputusan RUPS Sirkuler No.008.K/010/RUPS-CDB/2022 Tanggal 27 Juni 2022
Appointed as a Commissioner based on Decree of Circular GMS No.008.K/010/RUPS-CDB/2022 Dated June 27, 2022

Sertifikasi
Certification

Sertifikasi Manajemen Risiko SNI 31000 pada 16 Desember 2022
SNI 31000 Risk Management Certification on December 16, 2022

Riwayat Pendidikan
Educational Background

- Sarjana muda Fakultas Syari'ah, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ) Jakarta (1981)
- Sarjana lengkap Fakultas Syari'ah, Jurusan Mu'amalat, pada IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1985)
- Doktor dalam bidang Islamic studies pada Universitas Hamburg, Jerman (1995)
- *Post Doctoral Program* di Bonn University, Jerman (1998)
- *Post Doctoral Program* di Boston University, Amerika Serikat (2002)
- Bachelor Degree from the Faculty of Syari'ah, College of Al-Quran Studies (PTIQ) Jakarta (1981)
- Complete Bachelor's Degree in Syari'ah Faculty, Mu'amalat Department, at IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1985)
- Doctorate in Islamic studies from the University of Hamburg, Germany (1995)
- Post Doctoral Program from Bonn University, Germany (1998)
- Post Doctoral Program from Boston University, USA (2002)

Riwayat Pekerjaan
Professional Experience

- Sekretaris Bidang Kehidupan Beragama/Hubungan Antar Agama, Dewan Pertimbangan Presiden (2008-2014)
- Direktur Sekolah Pascasarjana (SPs) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2015-2019)
- Dosen/guru besar pada Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta (1996-sekarang)
- Secretary for Religious Life/Interfaith Relation, Presidential Advisory Council (2008-2014)
- Director of Postgraduate School (SPs) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2015-2019)
- Lecturer/professor at the Faculty of Sharia and Law and Graduate School of UIN Jakarta (1996-present)

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

- Ketua DPS Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Jakarta
- Dosen/guru besar pada Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta (1996-sekarang)
- Head of Supervisory Board Sharia Business Unit PT Jamkrida Jakarta
- Lecturer/professor at the Faculty of Sharia and Law and Postgraduate School of UIN Jakarta (1996-present)

Pelatihan pada Tahun Buku 2023
Trainings During 2023 Fiscal Year

Into the unknown : Charting the Future Agenda (7-8 Desember 2023)
Into the unknown : Charting the Future Agenda (December 7-8, 2023)

Hubungan Afiliasi
Affiliations

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.
Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or with the controlling and major shareholders.



Sunandar

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Kewarganegaraan | Citizenship

Indonesia
Indonesian

Domisili | Domicile

Jakarta
Jakarta

Usia | Age

53 tahun per 31 Desember 2023
53 years old as of December 31, 2023

Periode | Period

Periode 1 : 2023 - 2026
1 Period : 2023 - 2026

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan Surat Keputusan RUPS 001.K/010/RUPS-CDB/2023 tgl 20 Januari 2023

Appointed as a Independent Commissioner based on Decree of the GMS 001.K/010/RUPS-CDB/2023 dated January 20, 2023

Sertifikasi Certification

-

Riwayat Pendidikan Educational Background

S2 Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia, 2003
Master of Planning and Public Policy, University of Indonesia 2003

Riwayat Pekerjaan Professional Experience

- Plt. Asisten Deputi Agro, Farmasi, dan Pariwisata, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2022-sekarang)
- Plt. Asisten Deputi Migas, Pertambangan, dan Petrokimia, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2022-sekarang)
- Asisten Deputi Utilitas dan Industri Manufaktur, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2020-sekarang)
- Acting. Assistant Deputy for Agro, Pharmaceuticals, and Tourism, Deputy for Coordination of SOE Business Development, Research, and Innovation, Coordinating Ministry for Economic Affairs (2022-present)
- Acting. Assistant Deputy for Oil and Gas, Mining and Petrochemicals, Deputy for Coordinating SOE Business Development, Research and Innovation, Coordinating Ministry for Economic Affairs (2022-present)
- Assistant Deputy for Utilities and Manufacturing Industry, Deputy for Coordination of SOE Business Development, Research and Innovation, Coordinating Ministry for Economic Affairs (2020-present)

Rangkap Jabatan Concurrent Position

- Plt. Asisten Deputi Agro, Farmasi, dan Pariwisata, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Plt. Asisten Deputi Migas, Pertambangan, dan Petrokimia, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Asisten Deputi Utilitas dan Industri Manufaktur, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Acting. Assistant Deputy for Agro, Pharmaceuticals, and Tourism, Deputy for Coordination of SOE Business Development, Research, and Innovation, Coordinating Ministry for Economic Affairs
- Acting. Assistant Deputy for Oil and Gas, Mining and Petrochemicals, Deputy for Coordinating SOE Business Development, Research and Innovation, Coordinating Ministry for Economic Affairs
- Assistant Deputy for Utilities and Manufacturing Industry, Deputy for Coordination of SOE Business Development, Research and Innovation, Coordinating Ministry for Economic Affairs

Pelatihan pada Tahun Buku 2023 Trainings During 2023 Fiscal Year

- *Induction Training* Dewan Komisaris Baru CDB (8 Maret 2023)
- *Pelaksanaan Sertifikasi QRGP* (17 November 2023)
- *Into the unknown : Charting the Future Agenda* (7-8 Desember 2023)
- Induction Training for CDB's New Board of Commissioners (March 8, 2023)
- Implementation of QRGP Certification (November 17, 2023)
- Into the unknown : Charting the Future Agenda (December 7-8, 2023)

Hubungan Afiliasi Affiliations

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or with the controlling and major shareholders.



Fredy Eko Prasetyo T

Komisaris Independen
Independent Commissioner

 **Kewarganegaraan |** Citizenship

Indonesia
Indonesian

 **Domisili |** Domicile

Jakarta
Jakarta

 **Usia |** Age

45 tahun per 31 Desember 2023
45 years old as of December 31, 2023

 **Periode |** Period

Periode 1 : 2023 - 2026
1 Period : 2023 - 2026

Dasar Hukum Pengangkatan

Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.25 tanggal 29 September 2023.

Appointed as Independent Commissioner based on the Deed of Shareholder Decision Statements of PT Cogindo DayaBersama No.25 dated September 29, 2023.

Sertifikasi
Certification

-

Riwayat Pendidikan
Educational Background

- Sarjana Ekonomi di STIE IBMI (2010)
- Jurnalis di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta (1993-1999)
- Bachelor of Economic in STIE IBMI (2010)
- Journalist in Jakarta Institute of Social and Political Sciences (1993-1999)

Riwayat Pekerjaan
Professional Experience

- *General Manager* di Bu Tani Rice (2018-Sekarang)
- *Contributor* di Tabloid Negerawan untuk Sumatera Utara (2015-2017)
- Staf Ahli Media Center di DPRD Labuhanbatu (2013)
- General Manager of Bu Tani Rice (2018-Present)
- Contributor in Negerawan Tabloid for North Sumatera (2015-2017)
- Media Expert Staff Center of DPRD Labuhanbatu (2013)

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

Tidak Ada
None

Pelatihan pada Tahun Buku 2023
Trainings During 2023 Fiscal Year

- Undangan Induction Training Dewan Komisaris Baru CDB
- Pelaksanaan Sertifikasi QRGP
- *Into the unknown : Charting the Future Agenda* (7-8 Desember 2023)
- Invitation of Induction Training for CDB's New Board of Commissioners
- Implementation of QRGP Certification
- Into the unknown : Charting the Future Agenda (December 7-8, 2023)

Hubungan Afiliasi
Affiliations

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or with the controlling and major shareholders.



Susiana Mutia *)

Komisaris Utama
President Commissioner

Kewarganegaraan | Citizenship

Indonesia
Indonesian

Domisili | Domicile

Bandung
Bandung

Usia | Age

55 tahun per 31 Desember 2023
55 years old as of December 31, 2023

Periode | Period

Periode 1 : 2020 - 2023
1 Period : 2020 - 2023

Dasar Hukum Pengangkatan
Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Komisaris Utama berdasarkan Surat Keputusan RUPS Sirkuler No.008.K/010/RUPS-CDB/2022 Tanggal 27 Juni 2022

Appointed as a President Commissioner based on Decree of Circular GMS No.008.K/010/RUPS-CDB/2022 Dated June 27, 2022

Sertifikasi
Certification

Sertifikasi Manajemen Risiko SNI 31000 pada 18 Oktober 2022
SNI 31000 Risk Management Certification on October 18, 2022

Riwayat Pendidikan
Educational Background

- S1 Ekonomi Umum/Administrasi Negara Sekolah Tinggi (1991)
- S1 Ekonomi Perusahaan Universitas Padjadjaran (1992)
- Bachelor of General Economics/High School State Administration (1991)
- Bachelor of Corporate Economics, University of Padjadjaran (1992)

Riwayat Pekerjaan
Professional Experience

- General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung (2017-2018)
- General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat (2018)
- EVP Pengendalian Kinerja Korporat PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2019-2021)
- General Manager of PT PLN (Persero) Bangka Belitung Region (2017-2018)
- General Manager of PT PLN (Persero) West Sumatra Region (2018)
- PT PLN (Persero) Head Office Corporate Performance Control EVP (2019-2021)

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

EVP Pengendalian Kinerja Korporat PT PLN (Persero) Kantor Pusat
Corporate Performance Control EVP at PT PLN (Persero) Head Office

Pelatihan pada Tahun Buku 2023
Trainings During 2023 Fiscal Year

Tidak Ada
None

Hubungan Afiliasi
Affiliations

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or with the controlling and major shareholders.


* Dibebastugaskan sebagaimana Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Cogindo DayaBersama No.02 tanggal 8 Februari 2023


Honorably dismissed according to the Deed of Shareholder Decision Statements of PT Cogindo DayaBersama No.02 dated February 8, 2023.





Muhammad Mursid *)

Komisaris
Commissioner

 **Kewarganegaraan | Citizenship**
Indonesia
Indonesian

 **Domisili | Domicile**
Bogor
Bogor

 **Usia | Age**
57 tahun per 31 Desember 2023
57 years old as of December 31, 2023

 **Periode | Period**
Periode 1 : 2022 - 2025
1 Period : 2022 - 2025

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Surat Keputusan RUPS Sirkuler No.008.K/010/RUPS-CDB/2022 Tanggal 27 Juni 2022.
Appointed as a Commissioner based on Decree of Circular GMS No.008.K/010/RUPS-CDB/2022 Dated June 27, 2022

Sertifikasi Certification

Sertifikasi Manajemen Risiko SNI 31000 pada 18 Oktober 2022
SNI 31000 Risk Management Certification on October 18, 2022

Riwayat Pendidikan Educational Background

S1 Teknik Mesin Universitas Diponegoro (1992)
Bachelor of Engineering from Diponegoro University (1992)

Riwayat Pekerjaan Professional Experience

- Kepala Divisi Energi Primer dan *Settlement* II (2018-2019)
- *Vice President of Primary Energy and Settlement* II (2019-2021)
- *Senior Analyst I of Power Generation* II (2021)
- Division Head of Primary Energy and Settlement II (2018-2019)
- Vice President of Primary Energy and Settlement II (2019-2021)
- Senior Analyst I of Power Generation II (2021)

Rangkap Jabatan Concurrent Position

Anggota Komite Manajemen Risiko
Member of Risk Management Committee

Pelatihan pada Tahun Buku 2023 Trainings During 2023 Fiscal Year

Into the unknown : Charting the Future Agenda (7-8 Desember 2023)
Into the unknown : Charting the Future Agenda (December 7-8, 2023)

Hubungan Afiliasi Affiliations

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.
Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or with the controlling and major shareholders.

* Dibebastugaskan sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Cogindo DayaBersama No.02 tanggal 5 Januari 2024.
Honorably dismissed according to the Deed of Shareholder Decision Statements of PT Cogindo DayaBersama No.02 dated January 5, 2024.



Zaenal Mustofa *)

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Kewarganegaraan | Citizenship

Indonesia
Indonesian

Domisili | Domicile

Bandung
Bandung

Usia | Age

55 tahun per 31 Desember 2023
55 years old as of December 31, 2023

Periode | Period

Periode 1 : 2022 - 2025
1 Period : 2022 - 2025

Dasar Hukum Pengangkatan
Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan Surat Keputusan RUPS Sirkuler No.008.K/010/RUPS-CDB/2022 Tanggal 27 Juni 2022
Appointed as a Independent Commissioner based on Decree of Circular GMS No.008.K/010/RUPS-CDB/2022 Dated June 27, 2022

Sertifikasi
Certification

Sertifikasi Manajemen Risiko SNI 31000 pada 18 Oktober 2022
SNI 31000 Risk Management Certification on October 18, 2022

Riwayat Pendidikan
Educational Background

S1 Teknik Mesin Universitas Indonesia (1991)
Bachelor of Mechanical Engineering from University of Indonesia (1991)

Riwayat Pekerjaan
Professional Experience

- *General Manager* Unit Jasa Pemeliharaan (2013-2018)
- *Kepala Satuan Riset Inovasi dan Engineering* (2017-2018)
- *General Manager* Unit Bisnis Pemeliharaan (2017-2018)
- *General Manager* of Maintenance Service Unit (2013-2018)
- *Head* of Innovation and Engineering Research Unit (2017-2018)
- *General Manager* of Maintenance Business Unit (2017-2018)

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

EVP Pengendalian Kinerja Korporat PT PLN (Persero) Kantor Pusat
Corporate Performance Control EVP at PT PLN (Persero) Head Office

Pelatihan pada Tahun Buku 2023
Trainings During 2023 Fiscal Year

Tidak Ada
None

Hubungan Afiliasi
Affiliations

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.
Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or with the controlling and major shareholders.

* Dibebastugaskan sebagaimana Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Cogindo DayaBersama No.02 tanggal 8 Februari 2023
Honourably dismissed according to the Deed of Shareholder Decision Statements of PT Cogindo DayaBersama No.02 dated February 8, 2023.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Di tahun 2023, terdapat 2 (dua) kali perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris sebagaimana merujuk kepada Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Cogindo DayaBersama No.02 tanggal 8 Februari 2023 dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.25 tanggal 29 September 2023.

Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Cogindo DayaBersama No.02 tanggal 8 Februari 2023

Perusahaan memberhentikan dengan hormat Ibu Susiana Mutia dan Bapak Zaenal Mustofa untuk kemudian mengangkat Bapak Khusnul Mubien sebagai Komisaris Utama dan Bapak Sunandar sebagai Komisaris Independen pada tanggal 1 Februari 2023.

Sebelum Perubahan Before Change		Sesudah Perubahan After Change	
Nama Name	Jabatan Position	Nama Name	Jabatan Position
Susiana Mutia	Komisaris Utama President Commissioner	Khusnul Mubien	Komisaris Utama President Commissioner
Muhammad Mursid	Komisaris Commissioner	Muhammad Mursid	Komisaris Commissioner
Zaenal Mustofa	Komisaris Independen Independent Commissioner	Sunandar	Komisaris Independen Independent Commissioner
Masykuri Abdillah	Komisaris Commissioner	Masykuri Abdillah	Komisaris Commissioner

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.25 tanggal 29 September 2023.

Pada tanggal 29 September 2023, Pemegang Saham memutuskan untuk mengangkat dan menetapkan Bapak Fredy Eko Prasetyo T sebagai Komisaris Independen Perusahaan dengan masa jabatan 1 (satu) periode jabatan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan. Komposisi Dewan Komisaris Perusahaan menjadi sebagai berikut:

COMPOSITION OF BOARD OF COMMISSIONERS

In 2023, there were 2 (two) times changes of the composition of member the Board of Commissioners as follows the Statement of the Shareholder Decision of PT Cogindo DayaBersama No.02 on February 8, 2023, and Deed of Shareholders Decision Statement No.25 on September 29, 2023.

Statement of the Shareholder Decision of PT Cogindo DayaBersama No.02 on February 8, 2023

The Company honorably dismissed Mrs. Susiana Mutia and Mr. Zaenal Mustofa to the appoint Mr. Khusnul Mubien as a President Commissioner and Mr. Sunandar as a Independent Commissioner on February 1, 2023.

Deed of Shareholders Decision Statement No.25 on September 29, 2023

On September 29, 2023, Shareholders decides to appoint and determine Mr. Fredy Eko Prasetyo.T as an Independent Commissioner with term of office 1 (one) period without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to be dismissed at any time following the Articles of Association of the Company. The composition of the Board of Commissioners is as follows:

Sebelum Perubahan Before Change		Sesudah Perubahan After Change	
Nama Name	Jabatan Position	Nama Name	Jabatan Position
Khusnul Mubien	Komisaris Utama President Commissioner	Khusnul Mubien	Komisaris Utama President Commissioner
Muhammad Mursid	Komisaris Commissioner	Muhammad Mursid	Komisaris Commissioner
Sunandar	Komisaris Independen Independent Commissioner	Sunandar	Komisaris Independen Independent Commissioner
Masykuri Abdillah	Komisaris Commissioner	Fredy Eko Prasetyo T	Komisaris Independen Independent Commissioner
		Masykuri Abdillah	Komisaris Commissioner

Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan

Terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris setelah periode tanggal pelaporan akuntan, yang tercantum dalam agenda Akta Notaris No 02 tanggal 5 Januari 2024. Pemegang saham memberhentikan dengan hormat bapak Muhammad Mursid dan digantikan oleh Ibu Julita Indah sebagai Komisaris Perusahaan. Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris Perusahaan adalah:

The Change of composition of member the Board of Commissioners that after the end of the financial year until the deadline of submission of Annual Report

There is a change of composition of the Board of Commissioners after the accountant's reporting date period, stated in agenda of Notary Deed No.02 on January 5, 2023. The Shareholders honorably dismissed Mr. Muhammad Mursid and replaced by Mrs. Julita Indah as a Commissioner of the Company. Therefore, the composition of the Board of Commissioners is as follows:

Sebelum Perubahan Before Change		Sesudah Perubahan After Change	
Nama Name	Jabatan Position	Nama Name	Jabatan Position
Khusnul Mubien	Komisaris Utama President Commissioner	Khusnul Mubien	Komisaris Utama President Commissioner
Muhammad Mursid	Komisaris Commissioner	Julita Indah	Komisaris Commissioner
Sunandar	Komisaris Independen Independent Commissioner	Sunandar	Komisaris Independen Independent Commissioner
Fredy Eko Prasetyo T	Komisaris Independen Independent Commissioner	Fredy Eko Prasetyo T	Komisaris Independen Independent Commissioner
Masykuri Abdillah	Komisaris Commissioner	Masykuri Abdillah	Komisaris Commissioner

Profil Direksi

Profile of the Board of Directors



Hari Cahyono

Direktur Utama
President Director

 **Kewarganegaraan |** Citizenship

Indonesia
Indonesian

 **Domisili |** Domicile

Depok
Depok

 **Usia |** Age

50 tahun per 31 Desember 2023
50 years old as of December 31, 2023

 **Periode |** Period

Periode 1 : 2024 - 2027
1 Period : 2024 - 2027

Dasar Hukum Pengangkatan

Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Cogindo DayaBersama No.02 tanggal 5 Januari 2024.

Appointed as a President Director based on the Deed of Shareholder Decision Statements of PT Cogindo DayaBersama No.02 dated January 5, 2024.

Sertifikasi

Certification

Lokakarya Kompetensi Insinyur Profesional (LKIP)

Professional Engineer Competency Workshop (LKIP)

Riwayat Pendidikan

Educational Background

- S1 Fisika di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) (1997)
- S2 Teknik Mesin di Institut Teknologi Bandung (2010)
- Bachelor of Physics at Sepuluh Nopember Institute of Technology (ITS) (1997)
- Master of Mechanical Engineering at Bandung Institute of Technology (2010)

Riwayat Pekerjaan

Professional Experience

- *Senior Specialist* Operasi Pembangkit Batubara (2021-2023)
- *General Manager* PT PLN (Persero) Tanjung Jati B (2022-2023)
- VP Pengelolaan Aset Pembangkit Listrik RJMB (2021-2022)
- Kepala Divisi Pembangkitan PT Indonesia Power (2017-2021)
- Senior Specialist of Coal Plant Operation (2021-2023)
- General Manager of PT PLN (Persero) Tanjung Jati B (2022-2023)
- VP Asset Management of RJMB Power Plant (2021-2022)
- Head of Generation Division of PT Indonesia Power (2017-2021)

Rangkap Jabatan

Concurrent Position

Tidak Ada

None

Pelatihan pada Tahun Buku 2023

Trainings During 2023 Fiscal Year

Tidak Ada

None

Hubungan Afiliasi

Affiliations

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or with the controlling and major shareholders.



Imam Adi Prihantoro

Direktur Sumber Daya Manusia
Director of Human Capital

Kewarganegaraan | Citizenship

Indonesia
Indonesian

Domisili | Domicile

Depok
Depok

Usia | Age

45 tahun per 31 Desember 2023
45 years old as of December 31, 2023

Periode | Period

Periode 1 : 2024 - 2027
1 Period : 2024 - 2027

Dasar Hukum Pengangkatan

Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Cogindo DayaBersama No.02 tanggal 5 Januari 2024.
Appointed as a Director of Human Capital based on the Deed of Shareholder Decision Statements of PT Cogindo DayaBersama No.02 dated January 5, 2024.

Sertifikasi

Certification

Action Plan Development Based on Baldrige Assessment Feedback IQA 2016 dan Changes in Baldrige Excellence Framework 2017

Action Plan Development Based on Baldrige Assessment Feedback IQA 2016 dan Changes in Baldrige Excellence Framework 2017

Riwayat Pendidikan

Educational Background

- S1 Komunikasi di Universitas Sebelas Maret (2002)
- S2 Psikologi di Universitas Indonesia (2015)
- Bachelor of Communication at Sebelas Maret University (2002)
- Master of Psychology at University of Indonesia (2015)

Riwayat Pekerjaan

Professional Experience

- Manajemen Menengah Bidang SDM KP Tugas Karya ke PT CDB (2023)
- *Vice President Human Capital Development* (2023)
- *Manager Talenta PT Indonesia Power* (2017 -2019)
- *Manager Rekrutmen dan Pengembangan Karir PT Indonesia Power* (2013-2017)
- Middle Management of HC Division KP Work Assignment to PT CDB (2023)
- Vice President Human Capital Development (2023)
- Talent Manager PT Indonesia Power (2017-2019)
- Manager of Recruitment and Career Development PT Indonesia Power (2013-2017)

Rangkap Jabatan

Concurrent Position

Tidak Ada
None

Pelatihan pada Tahun Buku 2023

Trainings During 2023 Fiscal Year

Tidak Ada
None

Hubungan Afiliasi

Affiliations

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or with the controlling and major shareholders.



Kukuh Pambudi

Direktur Bisnis
Director of Business

Kewarganegaraan | Citizenship

Indonesia
Indonesian

Domisili | Domicile

Purwokerto
Purwokerto

Usia | Age

47 tahun per 31 Desember 2023
47 years old as of December 31, 2023

Periode | Period

Periode 1 : 2021 - 2024
1 Period : 2021 - 2024

Dasar Hukum Pengangkatan

Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Direktur Bisnis berdasarkan Surat Keputusan RUPS Sirkuler No. 011.K/010/RUPS-CDB/2021 tanggal 19 Agustus 2021

Appointed as a Director of Business based on Decree of the Circular GMS No. 011.K/010/RUPS-CDB/2021 dated August 19, 2021

Sertifikasi

Certification

Sertifikasi Manajemen Risiko SNI 31000 pada 18 Oktober 2022

SNI 31000 Risk Management Certification on October 18, 2022

Riwayat Pendidikan

Educational Background

S1 Elektro/ Listrik Universitas Diponegoro (2001)

Bachelor of Electrical Engineering from Diponegoro University (2001)

Riwayat Pekerjaan

Professional Experience

- *General Manager* PLTU Pangkalan Susu *Operation dan Maintenance Services Unit* (2019-2020)
- *General Manager of* PLTU Jawa Tengah 2 Adipala *Operation And Maintenance Services Unit* (2020-2021)
- General Manager of Operation and Maintenance Services Unit at PLTU Pangkalan Susu (2019-2020)
- General Manager of Adipala Operation And Maintenance Services Unit at PLTU Jawa Tengah 2 (2020-2021)

Rangkap Jabatan

Concurrent Position

Tidak Ada
None

Pelatihan pada Tahun Buku 2023

Trainings During 2023 Fiscal Year

- Undangan PRA RAKERNAS PLN Indonesia Power Tahun 2023 (14 Februari 2023)
- *Workshop* Strategi Pencapaian Program *Derivative Business* (20 Februari 2023)
- *Into the unknown : Charting the Future Agenda* (7-8 Desember 2023)
- Invitation to PRA RAKERNAS PLN Indonesia Power 2023 (February 14, 2023)
- Workshop on Strategy for Achieving Derivative Business Program (February 20, 2023)
- Into the unknown : Charting the Future Agenda (December 7-8, 2023)

Hubungan Afiliasi

Affiliations

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or with the controlling and major shareholders.



Mulyadi

Direktur Operasi
Director of Operations

Kewarganegaraan | Citizenship

Indonesia
Indonesian

Domisili | Domicile

Bogor
Bogor

Usia | Age

49 tahun per 31 Desember 2023
49 years old as of December 31, 2023

Periode | Period

Periode 1 : 2022 - 2025
1 Period : 2022 - 2025

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Direktur Operasi berdasarkan Surat Keputusan RUPS Sirkuler No. 008.K/010/RUPS-CDB/2022

Appointed as a Director of Operations based on Decree of Circular GMS No. 008.K/010/RUPS-CDB/2022

Sertifikasi Certification

Sertifikasi Manajemen Risiko SNI 31000 pada 18 Oktober 2022
SNI 31000 Risk Management Certification on October 18, 2022

Riwayat Pendidikan Educational Background

- S1 Elektro/Listrik, Universitas Indonesia (1999)
- S2 Manajemen Institut Pertanian Bogor (2017)
- Bachelor of Electrical Engineering from University of Indonesia (1999)
- Master of Management from Bogor Agricultural University (2017)

Riwayat Pekerjaan Professional Experience

- *General Manager of Grati Power Generation and O&M Services Unit (2019-2020)*
- *General Manager of Semarang Power Generation Unit PT Indonesia Power (2020-2022)*
- *Senior Analyst of Power Generation PT Indonesia Power (2022)*
- *General Manager of Grati Power Generation and O&M Services Unit (2019-2020)*
- *General Manager of Semarang Power Generation Unit at PT Indonesia Power (2020-2022)*
- *Senior Analyst of Power Generation at PT Indonesia Power (2022)*

Rangkap Jabatan Concurrent Position

Tidak Ada
None

Pelatihan pada Tahun Buku 2023 Trainings During 2023 Fiscal Year

- *Undangan FGD *Outage Management Workshop Capability* (16 Maret 2023)*
- *Permohonan Sebagai Narasumber Talkshow di INARI (22 September 2023)*
- *Undangan Seminar Nasional on *Integrated Strategic Asset Management* (27 September 2023)*
- *Launching & Talkshow *Energy Transition Conference & Exhibition 2023* (3 Oktober 2023)*
- *Into the unknown : *Charting the Future Agenda* (7-8 Desember 2023)*
- *Invitation to FGD Workshop on *Capability Enhancement for Outage Management* (March 16, 2023)*
- *Application as a Talk Show Speaker at INARI (September 22, 2023)*
- *Invitation to National Seminar on *Integrated Strategic Asset Management* (September 27, 2023)*
- *Launch & Talkshow of *Energy Transition 2023 Conference & Exhibition* (October 3, 2023)*
- *Into the unknown : *Charting the Future Agenda* (7-8 Desember 2023)*

Hubungan Afiliasi Affiliations


Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.


Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or with the controlling and major shareholders.





Hari Muhardani Nasution

Direktur Keuangan
Director of Finance

 **Kewarganegaraan |** Citizenship
Indonesia
Indonesian

 **Domisili |** Domicile
Tangerang
Tangerang

 **Usia |** Age
47 tahun per 31 Desember 2023
47 years old as of December 31, 2023

 **Periode |** Period
Periode 1 : 2021 - 2024
1 Period : 2021 - 2024

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Direktur Keuangan berdasarkan Surat Keputusan RUPS Sirkuler No. 011.K/010/RUPS-CDB/2021 tanggal 19 Agustus 2021
Appointed as a Director of Finance based on Decree of Circular GMS No. 011.K/010/RUPS-CDB/2021 dated August 19, 2021

Sertifikasi Certification

Sertifikasi Manajemen Risiko SNI 31000 pada 18 Oktober 2022
SNI 31000 Risk Management Certification on October 18, 2022

Riwayat Pendidikan Educational Background

- S1 Ekonomi Manajemen Universitas Gadjah Mada (2000)
- S2 Hukum Universitas Indonesia (2014)
- Bachelor of Management from Gadjah Mada University (2000)
- Master of Law from University of Indonesia (2014)

Riwayat Pekerjaan Professional Experience

- Ahli Litigasi dan Advokasi (2015-2016)
- Direktur Keuangan PT GCLIT (2016-2021)
- Litigation and Advocacy Expert (2015-2016)
- Finance Executive Assigned to PT GCLIT (2016-2021)

Rangkap Jabatan Concurrent Position

Tidak Ada
None

Pelatihan pada Tahun Buku 2023 Trainings During 2023 Fiscal Year

Into the unknown : Charting the Future Agenda (7-8 Desember 2023)
Into the unknown : Charting the Future Agenda (December 7-8, 2023)

Hubungan Afiliasi Affiliations

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.
Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or with the controlling and major shareholders.



Ade Hendratno*

Direktur Utama
President Director

Kewarganegaraan | Citizenship

Indonesia
Indonesian

Domisili | Domicile

Tangerang
Tangerang

Usia | Age

52 tahun per 31 Desember 2023
52 years old as of December 31, 2023

Periode | Period

Periode 1 : 2018 - 2021
Periode 2 : 2021 - 2024
1 Period : 2018 - 2021
2 Period : 2021 - 2024

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan RUPS Sirkuler No. 011.K/010/RUPS-CDB/2021 tanggal 19 Agustus 2021
Appointed as a President Director based on Decree of Circular GMS No. 011.K/010/RUPS-CDB/2021 dated August 19, 2021

Sertifikasi Certification

Sertifikasi Manajemen Risiko SNI 31000 pada 18 Oktober 2022
SNI 31000 Risk Management Certification on October 18, 2022

Riwayat Pendidikan Educational Background

Sarjana Mesin/Diploma Teknik Instrument Universitas Indonesia (1993)
Bachelor of Mechanical/Diploma in Instrument Engineering from University of Indonesia (1993)

Riwayat Pekerjaan Professional Experience

- Deputy General Manager Bidang Teknik dan Umum UJH. PT Indonesia Power (2015-2017)
- Kepala Divisi Sistem SDM dan Manajemen Perubahan PT Indonesia Power (2017)
- Kepala Divisi Talenta PT Indonesia Power (2017-2018)
- UJH Deputy General Manager for Engineering and General Affairs at PT Indonesia Power (2015-2017)
- Division Head of HC System and Change Management at PT Indonesia Power (2017)
- Head of Talent Division at PT Indonesia Power (2017-2018)

Rangkap Jabatan Concurrent Position

Tidak Ada
None

Pelatihan pada Tahun Buku 2023 Trainings During 2023 Fiscal Year

- Undangan Pra Rakernas PLN Indonesia Power Tahun 2023 (14 Februari 2023)
- Undangan FGD *Outage management Workshop Capability* (16 Maret 2023)
- Undangan Seminar Nasional *on Integrated Strategic Asset Management* (27 September 2023)
- *Launching & Talkshow Energy Transition Conference & Exhibition 2023* (3 Oktober 2023)
- *Into the unknown : Charting the Future Agenda* (7-8 Desember 2023)
- Invitation to PRA RAKERNAS PLN Indonesia Power 2023 (February 14, 2023)
- Application as a Talk Show Speaker at INARI (September 22, 2023)
- Invitation to National Seminar on Integrated Strategic Asset Management (September 27, 2023)
- Launch & Talkshow of Energy Transition 2023 Conference & Exhibition (October 3, 2023)
- Into the unknown : Charting the Future Agenda (December 7-8, 2023)

Hubungan Afiliasi Affiliations

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.
Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or with the controlling and major shareholders.


* Dibebastugaskan sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Cogindo DayaBersama No.02 tanggal 5 Januari 2024.
Honourably dismissed according to the Deed of Shareholder Decision Statements of PT Cogindo DayaBersama No.02 dated January 5, 2024.





R. Triyono Budi P*)

Direktur Sumber Daya Manusia
Director of Human Capital

 **Kewarganegaraan | Citizenship**
Indonesia
Indonesian

 **Domisili | Domicile**
Bogor
Bogor

 **Usia | Age**
54 tahun per 31 Desember 2023
54 years old as of December 31, 2023

 **Periode | Period**
Periode 1 : 2018 - 2021
Periode 2 : 2021 - 2024
1 Period : 2018 - 2021
2 Period : 2021 - 2024

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia berdasarkan Surat Keputusan RUPS Sirkuler No. 011.K/010/RUPS-CDB/2021 tanggal 19 Agustus 2021
Appointed as a Director of Human Capital based on Decree of the Circular GMS No. 011.K/010/GMS-CDB/2021 dated August 19, 2021

Sertifikasi Certification

Sertifikasi Manajemen Risiko SNI 31000 pada 18 Oktober 2022
SNI 31000 Risk Management Certification on October 18, 2022

Riwayat Pendidikan Educational Background

- Sarjana Mesin dari Universitas Sriwijaya (1992)
- Magister Bidang Manajemen dari IPWI (1998)
- Magister Bidang Mesin dari Universitas Indonesia (2004)
- Bachelor of Engineering from Sriwijaya University (1992)
- Master of Management from IPWI (1998)
- Master of Engineering from University of Indonesia (2004)

Riwayat Pekerjaan Professional Experience

- Ahli Kinerja Pembangkit PT Indonesia Power (2011-2013)
- Ahli Senior Perencanaan dan Peningkatan Mutu dan Kinerja PT Indonesia Power (2013)
- Direktur Operasi Pembangkit KP TK KE PT Indo Ridlatama Power (2013-2014)
- Generator Performance Expert at PT Indonesia Power (2011-2013)
- Senior Planning and Quality Improvement and Performance Expert at PT Indonesia Power (2013)
- Director of Generator Operations of KP TK KE at PT Indo Ridlatama Power (2013-2014)

Rangkap Jabatan Concurrent Position

Tidak Ada
None

Pelatihan pada Tahun Buku 2023 Trainings During 2023 Fiscal Year

Into the unknown : Charting the Future Agenda (7-8 Desember 2023)
Into the unknown : Charting the Future Agenda (December 7-8, 2023)

Hubungan Afiliasi Affiliations

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.
Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or with the controlling and major shareholders.

* Dibebastugaskan sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Cogindo DayaBersama No.02 tanggal 5 Januari 2024.
Honorably dismissed according to the Deed of Shareholder Decision Statements of PT Cogindo DayaBersama No.02 dated January 5, 2024.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Sepanjang tahun 2023, komposisi anggota Direksi tidak mengalami perubahan

Perubahan susunan anggota Direksi yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan

Perubahan komposisi anggota Direksi baru terjadi pada awal tahun 2024 berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Cogindo DayaBersama No.02 tanggal 5 Januari 2024. Pemegang saham memberhentikan dengan hormat Bapak Ade Hendratno sebagai Direktur Utama, Bapak R. Triyono Budi P sebagai Direktur Sumber Daya Manusia. Maka, komposisi Direksi menjadi sebagai berikut:

THE CHANGES OF COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Throughout 2023, the composition of members of the Board of Directors has no changes.

The Change of composition of member the Board of Directors that after the end of the financial year until the deadline of submission of Annual Report

Changes in the composition of the Board of Directors occurred at the beginning of 2024 based on the Decree of Shareholders of PT Cogindo DayaBersama No.02 dated January 5, 2024. The shareholders honorably dismissed Mr. Ade Hendratno as President Director and Mr. R. Triyono Budi P as Director of Human Capital. Therefore, the composition of the Board of Directors is as follows:

Sebelum Perubahan Before Change		Sesudah Perubahan After Change	
Nama Name	Jabatan Position	Nama Name	Jabatan Position
Ade Hendratno	Direktur Utama President Director	Hari Cahyono	Direktur Utama President Director
R. Triyono Budi P	Direktur Sumber Daya Manusia Director of Human Capital	Imam Adi Prihantoro	Direktur Sumber Daya Manusia Director of Human Capital
Kukuh Pambudi	Direktur Bisnis Director of Business	Kukuh Pambudi	Direktur Bisnis Director of Business
Mulyadi	Direktur Operasi Director of Operations	Mulyadi	Direktur Operasi Director of Operations
Hari Muhandani Nasution	Direktur Keuangan Director of Finance	Hari Muhandani Nasution	Direktur Keuangan Director of Finance

Pejabat Eksekutif

Executive Officers

Nama Name	Jabatan Position
Ulfa Millany	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary
Mardiana Budiarti	Lead Analyst Tata Kelola Dan Informasi Korporat Pada Sekretaris Perusahaan di Kantor Pusat Lead Analyst of Corporate Governance and Information at Corporate Secretary at the Head Office
Yakobus Krisnu Brayanto	Kepala Satuan Audit Internal Head of Internal Audit Unit
Candra Budiman	<i>Lead Auditor</i> Bidang 1 Pada Satuan Audit Internal Di Kantor Pusat Lead Auditor Field 1 at the Internal Audit Unit at the Head Office
M. Akib Mapahir	<i>Lead Auditor</i> Bidang 2 Pada Satuan Audit Internal Di Kantor Pusat Lead Auditor Field 2 at the Internal Audit Unit at the Head Office
Iswandi Lodde	<i>Lead Auditor</i> Bidang Konsultasi Lead Auditor of Consulting Field
Haris Kartiwa	<i>Lead Analyst</i> Operasi Pada Direktorat Operasi di Kantor Pusat Lead Operations Analyst at the Directorate of Operations at Head Office
Lucky Andriani	<i>Lead Analyst</i> Optimasi Sumber Daya Manusia Human Capital Optimization Lead Analyst
Rika Maleni	Manajer Legal dan Kepatuhan Pada Departemen Legal dan Kepatuhan di Kantor Pusat Manager of Legal and Compliance in the Legal and Compliance Department at Head Office
Dani Rukmito	Manager Departemen Pengembangan Bisnis dan <i>Customer Relationship Management I</i> Pada Direktorat Bisnis di Kantor Pusat Manager of Business Development Department and Customer Relationship Management I at the Directorate of Business at Head Office
Hardito Danikurniawan Tjojudo	Manajer Departemen K3L dan Jasa Operasi Pemeliharaan Pada Direktorat Operasi di Kantor Pusat Manager of K3L Department and Maintenance Operation Services at the Directorate of Operations at the Head Office
Sholihah Fahtunisa	Manajer Departemen K3L dan Jasa Operasi Pemeliharaan Pada Direktorat Operasi di Kantor Pusat Manager of K3L Department and Maintenance Operation Services at the Directorate of Operations at the Head Office
Kreshna Bayu Ajie	Manajer Prokurmen Pada Departemen Prokurmen di Kantor Pusat Manager of Procurement at the Procurement Department at Head Office
Arief Chandra Putra Buana	Manajer Departemen Anggaran, Pendanaan dan Project Pada Direktorat Keuangan di Kantor Pusat Manager of the Budget, Funding and Project Department at the Directorate of Finance at the Head Office
Aris Aryanto	Manajer Departemen Akuntansi dan Perpajakan Pada Direktorat Keuangan di Kantor Pusat Manager of Accounting and Taxation Department at the Directorate of Finance at the Head Office
Agus Supriyono	Manajer Riset Bisnis, Perencanaan Strategi Perusahaan, Risiko dan SMT pada Departemen Riset Bisnis, Perencanaan Strategi Perusahaan, Risiko dan SMT di Kantor Pusat Manager of Business Research, Corporate Strategy Planning, Risk and SMT at the Department of Business Research, Corporate Strategy Planning, Risk and SMT at Head Office
Santy Dian Lestari	Manajer Sistem SDM, Organisasi, Karir dan Talenta Pada Direktorat Sumber Daya Manusia di Kantor Pusat Manager of HC, Organizational, Career and Talent System at the Human Capital Directorate at Head Office

Nama Name	Jabatan Position
Thesa Kapiyana	Manager Hubungan Industrial, Remunerasi dan Kinerja Pada Direktorat Sumber Daya Manusia di Kantor Pusat Manager of Industrial Relations, Remuneration and Performance at the Directorate of Human Capital at the Head Office
Gugun Gumilang	Manajer Pengembangan SDM, Knowledge Management dan Budaya Perusahaan Manager of HC Development, Knowledge Management and Corporate Culture
Bayu Prastiady	Manajer Sistem Informasi pada Sekretaris Perusahaan di Kantor Pusat Manager of Information System at Corporate Secretary at the Head Office
Eri Sukoco	Manajer <i>Overhaul Service Unit</i> Manager of Overhaul Service Unit
Panca Satri Hudiono	Manajer Perencanaan <i>Project Construction</i> dan <i>Maintenance Service Unit</i> Pada Direktorat Operasi di Kantor Pusat Manager of Project Construction Planning and Maintenance Service Unit at the Directorate of Operations at Head Office
Elida Chaerunissa	Pegawai Pada Jenjang Eksekutif Pada Direktorat Bisnis Yang Ditugaskan Penuh Waktu sebagai <i>Project Director</i> Pada Unit Kerjasama Operasi PT COGINDO DAYABERSAMA dengan PT TAKA TURBOMACHINERY, PT MATRA, PT ABB SAKTI INDUSTRI, PT PILAR BAHTERA ENERGY Employees at the Executive Level in the Directorate of Business who are assigned full-time as Project Director in the Operation Cooperation Unit of PT COGINDO DAYABERSAMA with PT TAKA TURBOMACHINERY, PT MATRA, PT ABB SAKTI INDUSTRI, PT PILAR BAHTERA ENERGY
Hermansyah Bin A. Manaf	Pegawai Pada Jenjang Eksekutif Pada Direktorat Operasi Yang Ditugaskan Penuh Waktu sebagai <i>Project Director</i> Pada Unit Kerjasama Operasi PT COGINDO DAYA BERSAMA dengan PT IHI CORPORATION, PT ANDALAN FLUID SYSTEM, PT VARLEY INDONESIA, PT KLES INC, PT ISS. Employees at the Executive Level in the Directorate of Operations who are assigned full-time as Project Director in the Operation Cooperation Unit of PT COGINDO DAYABERSAMA with PT IHI CORPORATION, PT ANDALAN FLUID SYSTEM, PT VARLEY INDONESIA, PT KLES INC, PT ISS.
Inanda Ervita	Manajer Departemen Pengembangan Bisnis dan <i>Customer Relationship Management III</i> Manager of Business Development Department and Customer Relationship Management III
Idris Sardi	<i>Lead Analyst</i> Operasi Lead Operations Analyst
Yudho Agus Darmawanto	<i>Lead Analyst</i> Operasi pada Direktorat Operasi di Kantor Pusat Lead Operations Analyst in the Operations Directorate at Head Office
Iwan Syambudi	<i>Lead Analyst</i> Optimasi Keuangan Lead Finance Optimization Analyst
Aditya Oktavianto	Manajer Departemen Enjiniring, Pembangkitan dan Jasa Sewa Manager of Engineering, Generation and Rental Services Department
Muammar Syakir	Manajer Departemen Keuangan, Verifikasi dan Penagihan Manager of Finance, Verification and Billing Department
Encep Supratman	<i>Engineer Cems</i>
Teguh Wibowo	Tenaga Ahli <i>Engineering</i>, Pembangkitan dan Jasa Sewa Engineering, Generation and Rental Services Experts
Budi Satriyo	Tenaga Ahli <i>Advisor</i> Pembangkit Plant Advisor Expert
Yeni Fajariati	Manajer Departemen Perencanaan <i>Overhaul Service Unit</i> Manager of Overhaul Service Unit Planning Department
Wahyu Kurniawan	<i>Lead Analyst Account Executive</i> pada Departemen Bisnis Lead Account Analyst Executive in Business Department

Sumber Daya Manusia

Human Capital

“

Sumber daya manusia yang dimiliki PLN IP Services adalah merupakan ujung tombak Perusahaan. Sebagian besar adalah anak-anak muda yang tergolong Gen-Y atau biasa kita sebut Generasi Millennial. Merekalah generasi masa depan untuk kemajuan Perusahaan.

PLN IP Services's human resources are the spearhead of the Company. Most of them are young people who belong to Gen-Y or what we usually call the Millennial Generation. They are the future generation for the progress of the Company.



Di tengah dinamika ekonomi yang diwarnai ketidakpastian, PLN IP Services harus selalu berada dalam posisi siap untuk menghadapi berbagai perubahan dimana keberadaan sumber daya manusia (SDM) yang andal merupakan sebuah keharusan. PLN IP Services menyadari bahwa SDM merupakan aset utama Perusahaan, oleh karenanya PLN IP Services berupaya memberikan *treatment* yang terbaik bagi para karyawan. Keberhasilan dalam pencapaian kinerja Perusahaan selama tahun 2023 juga merupakan hasil kerja keras dan komitmen bersama dari seluruh karyawan.

PLN IP Services memastikan seluruh karyawan memiliki keunggulan dan keahlian dengan melatih dan mengembangkan SDM sejalan dengan kebutuhan dan membenahan sistem manajemen *human capital* untuk menunjang terciptanya iklim kerja yang kondusif bagi peningkatan produktivitas.

In the midst of economic dynamics with uncertainty, PLN IP Services shall always be in a position to be ready to face various changes where the presence of reliable human capital (HC) is fundamental. PLN IP Services realize that HC is the main asset of the Company, therefore PLN IP Services strives to provide the best treatment for employees. Success in achieving the Company's performance in 2023 is also the result of hard work and joint commitment of all employees.

PLN IP Services ensures that all employees have excellence and expertise by training and developing human capital in line with the needs and improving the human capital management system to support the creation of a work climate that is conducive to increased productivity

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SDM

Pengelolaan sumber daya manusia Perusahaan didasarkan kepada penetapan kebijakan sistem pengelolaan sumber daya manusia. Pada awal tahun 2023 telah dilakukan identifikasi kebijakan-kebijakan sistem SDM yang kemudian disimpulkan bahwa daftar sistem SDM yang perlu menjadi prioritas penyusunan ketetapan.

Pada tahun 2023, jumlah karyawan PLN IP Services adalah 4.305 orang, mengalami peningkatan sebesar 23,42% atau sebanyak 817 karyawan dari tahun sebelumnya yaitu 3.488 orang. Hal ini disebabkan adanya pemenuhan formasi di semua unit kerja selama tahun 2023.

Berdasarkan kelompok tenaga kerja, sejumlah 60,86% merupakan karyawan yang berada dalam rentang usia 18-30 tahun. Dominasi ini menunjukkan bahwa PLN IP Services diisi oleh para millennial dan gen-Z dengan semangat yang tinggi. Perusahaan menyadari bahwa mereka merupakan potensi bagi masa depan PLN IP Services yang lebih baik lagi. Oleh karenanya Perusahaan merasa perlu melakukan penyesuaian kebijakan – kebijakan antara Perusahaan Induk dengan PLN IP Services yang menyangkut permasalahan kepegawaian antara lain *manpower planning*, pembinaan kompetensi, dan karir pegawai.

COFFEE MORNING

Perusahaan mulai memberikan ruang dan kesempatan kepada para karyawan khususnya *millennial*, agar mereka memiliki kemampuan unggul saat menduduki posisi yang lebih tinggi di divisinya masing-masing. Tidak hanya itu, Perusahaan juga memberikan dorongan dan semangat agar para pegawai memiliki keberanian mengambil peluang, menyampaikan kritik, saran bahkan usulan yang berkaitan dengan inovasi penting bagi kemajuan Perusahaan.

Kedekatan antar karyawan dibangun melalui agenda rutin *morning coffee* dimana para karyawan dari seluruh level organisasi melakukan sarapan dan ngopi bersama sambil bertukar pikiran, berdiskusi mengenai persoalan dalam pekerjaan atau hanya sekedar menyapa satu sama lain. Dalam *moment morning coffee* juga para karyawan dapat langsung bertanya kepada Direksi, baik secara

HC MANAGEMENT POLICY

The management of the Company's human capital is based on the establishment of a human capital management system policy. At the beginning of 2023, HC system policies had been identified. It was then concluded that the list of HC systems that needed to be prioritized for making decisions.

In 2023, the number of PLN IP Services employees was 4,305 people, an increase of 23,42% or as many as 817 employees from the previous year of 3,488 people. This was due to the fulfillment of formations in all units during 2023.

Based on labor group, 60.86% are employees within the age range of 18-30 years. This dominance shows that PLN IP Services is filled with millennials and gen-Z with high enthusiasm. The Company realizes that they are a potential for a better future for PLN IP Services. Therefore, the Company feels the need to make adjustments to the policies between the Parent Company and the PLN IP Services regarding staffing issues, including manpower planning, competency development, and employee careers.

COFFEE MORNING

The Company has begun to provide space and opportunities for employees, especially millennials, hence they have excellence abilities when occupying higher positions in their respective divisions. In addition, the Company also provides encouragement and enthusiasm so that employees have the courage to take opportunities, submit criticisms, suggestions and even ideas related to important innovations for the progress of the Company.

Closeness between employees is built through a routine morning coffee agenda where employees from all levels of the organization have breakfast and coffee together while exchanging ideas, discussing issues at work or just greeting one another. During the morning coffee moment, employees can directly ask the Board of Directors, either directly or anonymously. This is one way to cultivate a culture of

langsung maupun anonim. Hal ini merupakan salah satu cara untuk membudayakan kultur keterbukaan dan berani berkomunikasi. Setelah *morning coffee* biasanya dilakukan survei mengenai hal-hal yang harus dilakukan untuk kemajuan Perusahaan.

WEEKLY IMPORTANT GOALS (WIG)

WIG merupakan implementasi turunan dari *Key Performance Indicator* (KPI) manajer. Dilaksanakan secara rutin setiap minggu dimana para karyawan mendapatkan arahan untuk menentukan target yang hendak dicapai. Karyawan juga dapat menyampaikan kendala dan keluhan teknis kepada atasannya, untuk kemudian diberikan saran dan solusi pemecahan. Semua hal ini dilakukan demi menciptakan kontrol sekaligus komitmen dalam diri karyawan untuk terus ber-progress sehingga perkembangan Perusahaan dapat terukur secara detail.

transparency and the courage to communicate. After morning coffee, a survey is usually conducted regarding the things that must be done for the progress of the Company.

WEEKLY IMPORTANT GOALS (WIG)

WIG is a derivative implementation of the manager's Key Performance Indicator (KPI). It is carried out routinely every week where employees get directions to determine the targets to be achieved. Employees can also convey technical problems and complaints to their superiors, to then be given suggestions and solutions to solve them. All of these things are done in order to create control as well as commitment in employees to continue to progress hence the development of the Company can be measured in detail.

Direktorat Sumber Daya Manusia

Human Capital Directorate

SDM Perusahaan dikelola oleh Direktorat Sumber Daya Manusia yang berada dibawah pengawasan Direktur Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum didalam Struktur organisasi yang ditetapkan pada Surat Keputusan Direksi Nomor 020.K/ CDB/IV/2022 tanggal 01 April 2022 tentang Struktur Organisasi PT Cogindo DayaBersama.

Terdapat 3 (tiga) departemen dan 1 fungsional ahli di dalam susunan struktur organisasi Direktorat Sumber Daya Manusia yaitu:

- Departemen Perencanaan Sistem SDM, Organisasi, Karir dan Talenta
- Departemen Pengembangan SDM, *Knowledge Management* dan Budaya Perusahaan
- Departemen Hubungan Industrial, Remunerasi dan Kinerja
- Fungsional Ahli

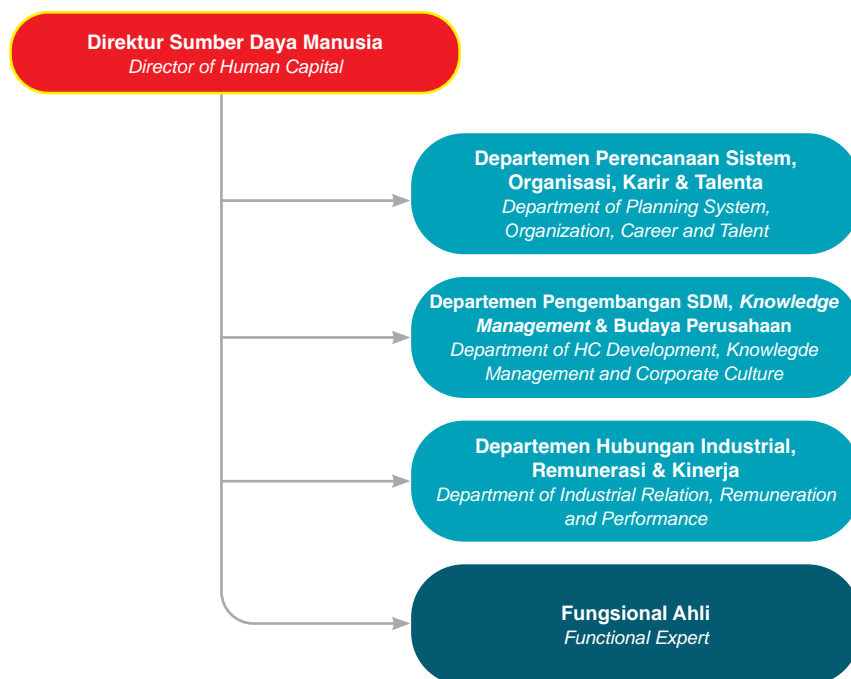
The Company's HC is managed by Human Capital Directorate which is under the supervision of the Director of Human Capital as stated in the organizational structure stipulated in the Decree of the Board of Directors Number 020.K/CDB/ IV/2022 dated April 1, 2022 on the Organizational Structure of PT Cogindo DayaBersama.

There are 3 (three) departments and 1 functional expert in the organizational structure of the Human Capital Directorate, namely:

- HC System Planning, Organization, Career and Talent Department
- Department of HC Development, Knowledge Management and Corporate Culture
- Department of Industrial Relations, Remuneration and Performance
- Functional Expert

Fungsi utama Direktorat Sumber Daya Manusia adalah menterjemahkan kebijakan dan strategi Perusahaan di bidang SDM dan sistem informasi ke dalam proses bisnis, prosedur dan aturan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan perencanaan SDM, pengembangan organisasi, pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan hubungan industrial, pengelolaan budaya perusahaan, manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, mengelola kegiatan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan standar kompetensi Perusahaan, pengelolaan sistem informasi perusahaan serta melakukan koordinasi sesuai fungsi utama dengan pihak internal dan eksternal dalam pengelolaan kegiatan perusahaan.

The main function of the Human Capital Directorate is translating Company policies and strategies in the field of HC and information system into business processes, procedures and rules, carrying out guidance and supervision of HC planning activities, organizational development, management and development of human capital, management of industrial relations, management corporate culture, change management, knowledge management, managing activities and coordinating the implementation of Company competency standard education and training, managing company information system and coordinating in accordance to the main function with internal and external parties in managing company activities.



Departemen Perencanaan, Sistem SDM, Organisasi, Karir dan Talenta

Departemen Perencanaan, Sistem SDM, Organisasi dan Talenta bertugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis, menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja strategis, mengelola sumber daya dan kompetensi, menerapkan GCG dan *cost effectiveness*, mengelola K3 dan risiko, melakukan inovasi dan perbaikan berkesinambungan serta melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan di bidang kerja perencanaan, sistem SDM, organisasi, karir dan talenta.

Department of Planning, HC System, Organization, Career and Talent

Department of Planning, HC System, Organization and Talent is tasked with formulating and implementing policies and technical standardization, compiling and implementing strategic work plans and programs, managing resources and competencies, implementing GCG and cost effectiveness, managing OHS and risk, carrying out innovation and continuous improvement as well as coordinating with stakeholders in the field of work planning, HC system, organization, career and talent.

Fungsi dari Departemen antara lain melakukan :

1. Penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan strategi perusahaan;
2. Penyusunan dan penyelarasan kebijakan, strategi dan sistem manajemen SDM (perencanaan, rekrutmen, diklat, penilaian kinerja, remunerasi, pengembangan karir dan hubungan industrial) baik terhadap berbagai regulasi ketenagakerjaan, maupun terhadap perkembangan bisnis Perusahaan;
3. Penyusunan dan pembinaan matriks kompetensi, *training path*, *career path* dan kelompok keahlian;
4. Penyusunan dan penyelarasan master plan perencanaan SDM jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek dengan kebutuhan bisnis, sebagai rujukan induk bagi kesinambungan pengelolaan SDM Perusahaan;
5. Penyusunan strategi pemenuhan tenaga kerja agar selaras dengan tuntutan dan dinamika bisnis Perusahaan;
6. Pemetaan, pengembangan dan perencanaan suksesi *high flyer talent*;
7. Pengelolaan pengangkatan pegawai, penempatan dan pengembangan karir;
8. Pembinaan peningkatan maturitas *human capital readiness* (HCR) dan maturitas *organizational capital readiness* (OCR) terkait.

Departemen Pengembangan SDM, Knowledge Management dan Budaya Perusahaan

Departemen Pengembangan SDM, *knowledge management* dan budaya perusahaan memiliki tugas pokok dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis, menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja strategis, mengelola sumber daya dan kompetensi, menerapkan GCG dan *cost effectiveness*, mengelola K3 dan melakukan inovasi dan perbaikan berkesinambungan serta melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan pada bidang kerja pengembangan SDM, *knowledge management*, karir dan talenta.

Fungsi dari Departemen Pengembangan SDM, *Knowledge Management* dan budaya perusahaan :

1. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pengembangan kompetensi serta sertifikasi;
2. Penyelenggaraan, Pengembangan kompetensi melalui *learning center* dan simulator;
3. Pengukuran dan pembinaan *working climate* yang kondusif guna efektivitas penyelenggaraan operasi bisnis perusahaan;

The functions of the Department include:

1. Preparation of an organizational structure in accordance with the company's strategy;
2. Formulation and alignment of HC policies, strategies and management system (planning, recruitment, training, performance assessment, remuneration, career development and industrial relations) both with various labor regulations, as well as with the development of the Company's business;
3. Compilation and development of competency matrix, training path, career path and skill group;
4. Compilation and alignment of long-term, medium-term and short-term HC planning master plan with business needs, as a main reference for the continuity of the Company's HC management;
5. Formulation of labor fulfillment strategy to be in line with the demand and dynamic of the Company's business;
6. Mapping, developing and planning the succession of high flyer talent;
7. Management of employee appointment, placement and career development;
8. Fostering human capital readiness (HCR) maturity and related organizational capital readiness (OCR) maturity.

Department of HC Development, Knowledge Management and Corporate Culture

Department of HC Development, knowledge management and corporate culture has primary duties of formulating and implementing policies and technical standardization, preparing and implementing strategic work plan and program, managing resources and competencies, implementing GCG and cost effectiveness, managing OHS and carrying out continuous innovation, also improvement as well as coordinating with stakeholders in the areas of human capital development, knowledge management, career and talent.

Functions of the Department of HC Development, Knowledge Management and corporate culture:

1. Planning, implementing and evaluating competency development and certification programs;
2. Organizing, developing competencies through learning center and simulator;
3. Measuring and fostering a conducive working climate for the effectiveness of the company's business operations;

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 4. <i>Change management</i> perusahaan termasuk pengelolaan budaya perusahaan; 5. Pengukuran dan pembinaan keselarasan antara tingkat kepuasan dan engagement pegawai dengan tingkat produktivitas dan pertumbuhan bisnis perusahaan; 6. Pengelolaan dan pembinaan <i>knowledge management</i>; 7. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kegiatan sosialisasi dan internalisasi budaya perusahaan; 8. Pengembangan <i>roadmap</i> budaya perusahaan, inisiatif program tahunan dan evaluasinya serta kegiatan pengukuran dan pembinaan <i>working climate</i>; 9. Pembinaan peningkatan maturitas <i>human capital readiness</i> (HCR) dan maturitas <i>organizational capital readiness</i> (OCR) | <ol style="list-style-type: none"> 4. Change management of the company including management of corporate culture; 5. Measuring and fostering alignment between levels of employee satisfaction and engagement with productivity levels and the company's business growth; 6. Management and development of knowledge management; 7. Planning, implementing, and evaluating program activities for socialization and internalization of corporate culture; 8. Development of corporate culture roadmap, annual program initiative and their evaluation as well as activities for measuring and fostering working climate; 9. Fostering human capital readiness (HCR) maturity and organizational capital readiness (OCR) maturity |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Departemen Hubungan Industrial, Remunerasi dan Kinerja

Departemen Hubungan Industrial, Remunerasi dan Kinerja memiliki tugas pokok dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis, menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja strategis, mengelola sumber daya dan kompetensi, menerapkan GCG dan *cost effectiveness*, mengelola K3 dan risiko, melakukan inovasi dan perbaikan berkesinambungan serta melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan pada bidang kerja Hubungan Industrial, Remunerasi dan Kinerja.

Fungsi dari Departemen Hubungan Industrial, Remunerasi dan Kinerja antara lain:

1. Pengukuran dan pembinaan kinerja SDM perusahaan;
2. Identifikasi kebutuhan dan pengelolaan sistem informasi serta *database* SDM;
3. Pengelolaan seleksi, rekrutmen dan pemberhentian pegawai;
4. Pengelolaan perjanjian kerja, peraturan perusahaan disiplin pegawai dan hubungan industrial;
5. Pengelolaan kompensasi, *benefit* dan *intangible reward* lainnya;
6. Mengelola administrasi kepegawaian antara lain kehadiran, cuti, ijin dan pensiun Pegawai;

Department of Industrial Relation, Remuneration and Performance

Department of Industrial Relation, Remuneration and Performance has primary duties of formulating and implementing policies and technical standardization, preparing and implementing strategic work plan and program, managing resources and competencies, implementing GCG and cost effectiveness, managing OHS and risks, carrying out innovation and continuous improvement as well as coordinating with stakeholders in the field of Industrial Relation, Remuneration and Performance.

The functions of Department of Industrial Relation, Remuneration and Performance include:

1. Measurement and development of the company's HC performance;
2. Identification of needs and management of information system and HC database;
3. Management of selection, recruitment and dismissal of employees;
4. Management of work agreement, company regulations, employee discipline and industrial relation;
5. Management of compensation, benefit and other intangible rewards;
6. Manage personnel administration including attendance, leave, permit, and employee retirement;

- 7. Mengelola dan mengendalikan data dan informasi tenaga kerja Perusahaan (pegawai, TKWT dan *outsourcing*).
- 8. Pembinaan peningkatan maturitas *human capital readiness* (HCR) dan maturitas *organizational capital readiness* (OCR) terkait.

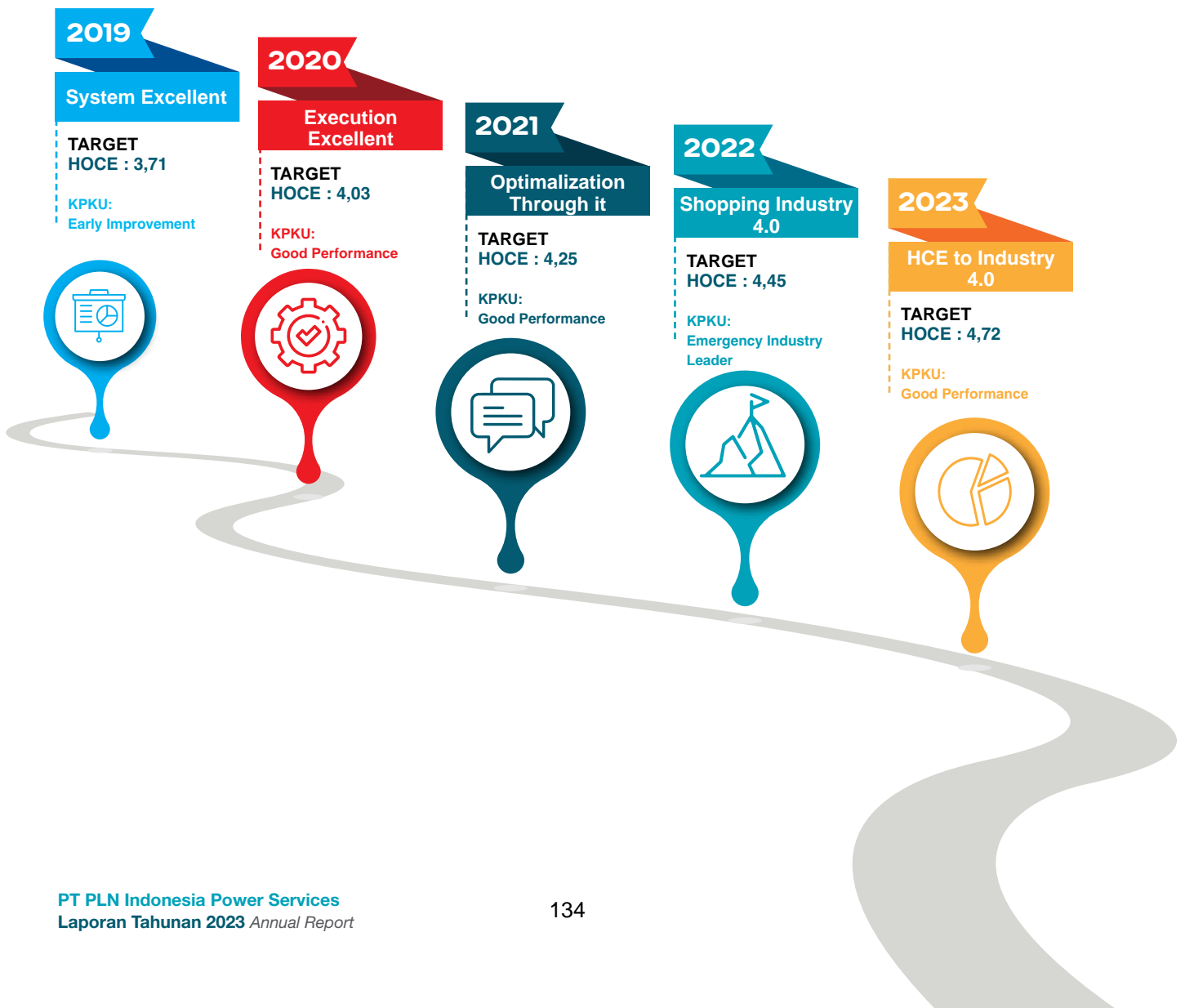
- 7. Manage and control data and information on the Company's workforce (employees, TKWT and outsourcing).
- 8. Fostering human capital readiness (HCR) maturity and related organizational capital readiness (OCR) maturity

Roadmap Sumber Daya Manusia

Roadmap Human Capital

Roadmap SDM telah disusun oleh Perusahaan berdasarkan Rencana Jangka Panjang yang ditinjau secara berkala. Berikut ini dijelaskan visi serta target pengembangan SDM perusahaan yang *roadmap* bidang SDM sampai dengan tahun 2023.

The HC roadmap has been prepared by the Company based on the Long-Term Plan that is reviewed periodically. The following describes the vision and target of the company's HC development roadmap until 2023.



Manajemen Sumber Daya Manusia

Human Capital Management

Manajemen SDM berperan untuk memastikan kesiapan, kesediaan dan kemampuan organisasi untuk mengakomodasi perubahan yang dibutuhkan dan mengantisipasi kesiapan internal dalam menghadapi dinamika bisnis dalam memberikan layanan kualitas terbaik yang dikelola dengan Profesional. Kompetensi SDM adalah kunci yang akan mengantar Perusahaan untuk menang dalam era persaingan yang semakin kompetitif.

Perusahaan mempunyai komitmen yang tinggi terhadap program-program pengembangan kompetensi SDM, baik kompetensi teknis, manajerial maupun perilaku di setiap jenjang dan tiap jabatan atau pekerjaan. Oleh karenanya PLN IP Services melakukan pengelolaan SDM secara komprehensif, mulai dari perencanaan kebutuhan karyawan hingga pelaksanaan program pensiun, dengan berbasis pada strategi dan rencana bisnis yang terintegrasi dengan visi dan misi Perusahaan.

HC Management plays a role in ensuring the readiness, willingness and ability of the organization to accommodate needed changes and anticipate internal readiness in dealing with business dynamics in providing the best quality services managed by professionals. HC competence is the key that will lead the Company to win in an increasingly competitive era.

The Company has high commitment to HC competency development program, both technical, managerial and behavioral competencies at every level and every position or job. Therefore PLN IP Services conducts HC management in a comprehensive manner, starting from planning, employee needs to implementing a retirement program, based on strategy and business plan that is integrated with the Company's vision and mission.

Tata Kelola Sumber Daya Manusia

Human Capital Governance

Implementasi pengelolaan HC yang berkelanjutan tersebut diberlakukan sesuai kebijakan Perusahaan nomor CDB.STP. TLN.001 tentang Pedoman Sistem Sumber Daya Manusia yang disahkan oleh pada tanggal 15 Juni 2021.

PLN IP Services memulai serangkaian kegiatan dalam pembuatan perencanaan SDM dimulai dari melakukan identifikasi, pelatihan, pengembangan kompetensi, evaluasi, hingga membuat perencanaan pemenuhan kebutuhan SDM sesuai dengan perkembangan bisnis Perusahaan dan kebutuhan Organisasi yang berlaku di Perusahaan.

The implementation of sustainable HC management is enforced in accordance with Company policy number CDB.STP.TLN.001 on the Guidelines for Human Capital System which was ratified by June 15, 2021.

PLN IP Services started series of activities in making HC planning starting from identifying, training, competency development, evaluation, to making plans to meet HC needs in accordance with the Company's business development and organizational needs that apply in the Company.

Untuk menghasilkan SDM yang andal, dibutuhkan proses yang sangat panjang dan saling terintegrasi satu dengan lainnya. Perusahaan mengelola Sumber Daya Manusia nya dengan menyelenggarakan berbagai program yang dapat memotivasi setiap pegawainya untuk terus bekerja lebih baik dengan strategi pengembangan SDM saat ini adalah pengembangan SDM yang berbasis kompetensi, yang utamanya meliputi: organisasi & sistem SDM, rekrutmen yang berbasis kompetensi, kaderisasi & pengembangan SDM secara berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi, peningkatan produktivitas melalui sistem remunerasi berbasis kompetensi, penerapan *reward & punishment* serta pengendalian biaya SDM dan Budaya perusahaan terus ditanamkan melalui serangkaian program internalisasi Visi, Misi dan Nilai-nilai perusahaan PLN IP Services.

Lengthy and integrated process needed to produce reliable human capital. The Company manages its Human Capital by organizing various programs that can motivate each of its employees to continue to work better. The current HC development strategy is competency-based HC development, which mainly includes: HC organization & system, competency-based recruitment, HR regeneration & development in sustainable manner to increase competency, increase productivity through a competency-based remuneration system, apply reward & punishment and control HC costs and the Company's culture continues to be instilled through series of internalization programs of PLN IP Services's Vision, Mission and Corporate Values.

Rekrutmen Sumber Daya Manusia

Human Capital Recruitment

Selaras dengan rencana dan strategi Perusahaan, SDM membuat perencanaan dan pengembangan organisasi. Salah satu bagian dari perencanaan tersebut adalah analisa untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan kebutuhan bisnis Perusahaan baik dalam waktu jangka panjang, menengah maupun pendek atau yang disebut dengan *Manpower Planning*.

Proses *Manpower Planning* tersebut ditindaklanjuti dengan menjalankan proses rekrutmen pegawai yang dilakukan melalui jalur internal yaitu dengan melakukan pengisian jabatan bagi pegawai internal Perusahaan dan juga melalui jalur eksternal dengan merekrut tenaga *fresh graduate* maupun *pro-hire* perekrutan khusus pada level ahli (*expert*) untuk memenuhi kebutuhan proyek tertentu atau bekerjasama dengan PLN Grup untuk pemenuhan kebutuhan SDM suatu proyek.

Rekrutmen merupakan usaha untuk meningkatkan kuantitas pegawai yang memenuhi persyaratan kompetensi yang dibutuhkan Perusahaan untuk mengisi formasi jabatan dan formasi tenaga kerja yang dibutuhkan dalam rangka mendukung operasional, peningkatan kinerja, dan pencapaian visi Perusahaan.

Aligned with the Company's plans and strategies, HC plans and develops the organization. One part of the plan is an analysis to meet the organizational needs and business needs of the Company both in the long, medium, and short term in the form of Manpower Planning.

The Manpower Planning process is followed up by carrying out the employee recruitment process which is carried out internally, namely by filling positions for internal employees of the Company and also carried out externally by recruiting fresh graduates and pro-hire special recruitment at the expert level to meet the needs of certain projects or in cooperation with the PLN Group to meet the human capital needs of a project.

Recruitment is carried out to increase the quantity of employees who meet the competency requirements needed by the Company to fill the position and workforce required in order to support operations, improve performance, and achieve the Company's vision.

Di lingkungan Perusahaan terdapat status karyawan yang berasal dari Perusahaan induk PT Indonesia Power yang berstatus Tugas Karya, Organik (karyawan tetap) dan juga TWKT atau Tenaga Kerja Waktu Tertentu. Lebih dari 80% karyawan Perusahaan merupakan pegawai organik yang menduduki berbagai level jabatan mulai dari staf hingga level manajer sedangkan level Direksi merupakan SDM dari Perusahaan induk.

In the Company, the employee status consists of employee from the parent company, namely PT Indonesia Power, with the status of Work Assignment, organic employees (permanent employees) and also TWKT or Certain Time Workforce. More than 80% of the Company's employees are organic employees who occupy various levels of positions ranging from staff to manager level while at the Board of Directors level are assigned from the parent company.

Hingga akhir tahun 2023, Perusahaan telah merekrut 810 orang pegawai dengan rincian penempatan sebagai berikut:

Until the end of 2023, the Company has recruited 810 employees with details of placement as follows:

► Perekrutan Pegawai Berdasarkan Wilayah Employees Recruitment by Area

No.	Wilayah	Rencana Plan	Realisasi Realization	Area
1.	Bali	55	55	Bali
2.	Banten	203	198	Banten
3.	Bengkulu	13	13	Bengkulu
4.	DKI Jakarta	43	34	DKI Jakarta
5.	Jawa Barat	66	58	West Java
6.	Jawa Tengah	65	65	Central Java
7.	Jawa Timur	2	2	East Java
8.	Kalimantan Barat	27	27	West Kalimantan
9.	Kalimantan Selatan	122	122	South Kalimantan
10.	Kalimantan Timur	19	19	East Kalimantan
11.	Kepulauan Riau	21	21	Riau Islands
12.	Maluku	9	9	Maluku
13.	Nusa Tenggara Timur	5	5	East Nusa Tenggara
14.	Papua	24	24	Papua
15.	Papua Barat	7	7	West Papua
16.	Papua Barat Daya	7	7	Southwest Papua
17.	Papua Selatan	8	8	South Papua
18.	Papua Tengah	26	24	Central Papua
19.	Sulawesi Selatan	31	31	South Sulawesi
20.	Sulawesi Tenggara	4	4	Southeast Sulawesi
21.	Sumatera Barat	66	66	West Sumatera
22.	Sumatera Selatan	7	7	South Sumatera
23.	Sumatera Utara	3	3	North Sumatera
24.	Lampung	1	1	Lampung
Jumlah		834	810	Total

► **Usia dan Jenis Kelamin tidak ditampilkan Perekrutan Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia**
Employees Recruitment by Age Group

No.	Usia	Realisasi Realization	Age
1.	18 - 25	439	18 - 25
2.	26 - 30	282	26 - 30
3.	> 30	89	> 30
Jumlah		810	Total

► **Perekrutan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**
Employees Recruitment by Gender

No.	Jenis Kelamin	Realisasi Realization	Gender
1.	Laki-laki	439	Male
2.	Perempuan	282	Female
Jumlah		810	Total

TURNOVER PEGAWAI

Sepanjang tahun 2023, PT PLN Indonesia Power Services mengalami perubahan signifikan dalam komposisi tenaga kerja guna mengakomodasi kebutuhan yang semakin beragam. Berikut adalah informasi perputaran pegawai yang diuraikan dalam bentuk tabel.

EMPLOYEE TURNOVER

Throughout 2023, PT PLN Indonesia Power Services experienced significant changes in workforce composition to accommodate increasingly diverse needs. The following is information on employee turnover described in table.

Keterangan	Karyawan Keluar Resigned Employee	Karyawan Eksisting Existing Employee	Turnover Karyawan Employee Turnover	Description
Jenis Kelamin				Gender
Laki-laki	71	4.018	1,77%	Male
Perempuan	5	287	1,74%	Female
Status Kepegawaian				Employment Status
Tugas Karya	9	61	14,75%	Work Assignment
Organik	23	2.783	0,83%	Organic
Tenaga Kerja Waktu Tertentu (TKWT)	44	1.461	3,01%	Specific Time Employee (TKWT)
Rentang Usia				Age Range
18 - 30	43	2.620	1,64%	18 - 30
> 30	33	1.685	1,96%	> 30

Human Capital Satisfaction & Engagement / HCSE

Human Capital; Satisfaction & Engagement / HCSE

HRSE merupakan Program budaya yang diatur oleh SK No. 039.K/CDB/XII/2015 tentang Survei Kepuasan dan Keterikatan Pegawai. Program survey *Human Capital Satisfaction and Engagement* (HCSE) dilakukan secara berkala setiap tahunnya untuk mengukur tingkat kepuasan dan keterikatan pegawai terhadap Perusahaan sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang mempengaruhi kepuasan dan keterikatan Pegawai. Hasil dari survei kepuasan dan keterikatan pegawai bermanfaat untuk mengukur dan memetakan aspek-aspek yang perlu ditingkatkan di periode selanjutnya.

Aspek-aspek penilaian dalam *survey* HRSE adalah sebagai berikut:

1. Strategi dan Misi
2. Budaya Perusahaan
3. *Enabling Infrastructure*
4. Kerjasama
5. Rekognisi
6. Iklim Perusahaan
7. Penilaian Kinerja
8. *Leadership*
9. Komunikasi
10. Pelatihan dan Pengembangan
11. Pengembangan Karir
12. Sistem Penggajian

PELAKSANAAN SURVEY TAHUN 2023

Pelaksanaan *survey* tahun 2023 merupakan *survey* kepuasan pada tahun sebelumnya. *Survey* dilakukan pihak internal Perusahaan menggunakan metode survei yang itemnya disusun oleh Internal dan sudah diuji secara statistik tingkat validitas dan reliabilitasnya serta korelasi. *Survey* diikuti oleh seluruh pegawai Perusahaan dengan kriteria masa kerja minimal 3 bulan. Total pegawai yang menjadi partisipan *Survey* HRSE adalah sebanyak 3.109 dari 3.419 orang dan tingkat partisipasi mencapai 91%.

HRSE is a cultural program regulated by Decree No. 039.K/CDB/XII/2015 on Survey for Employee Satisfaction and Attachment. The Human Capital Satisfaction and Engagement (HCSE) survey is conducted periodically every year to measure the level of employee satisfaction and engagement with the Company as well as identify aspects that affect employee satisfaction and engagement. Results of employee satisfaction and engagement survey are useful for measuring and mapping aspects that need to be improved in the next period.

Assessment aspects in the HRSE survey are as follows:

1. Strategy and Mission
2. Corporate Culture
3. Enabling Infrastructure
4. Cooperation
5. Recognition
6. Company Climate
7. Performance Assessment
8. Leadership
9. Communication
10. Training and Development
11. Career Development
12. Payroll System

SURVEY IMPLEMENTATION IN 2023

2023 survey was a satisfaction survey for the previous year. The survey was conducted internally by the Company using method in which the items were compiled by Internal Affairs and had been statistically tested for the level of validity and reliability as well as the correlation. The survey was attended by all employees of the Company with a minimum working period of 3 months. Total number of employees participated in HRSE Survey was 3,109 out of 3,419 people with participation rate reached 91%.

Hasil Survey Indeks Kepuasan Pegawai

Indeks kepuasan karyawan pada tahun 2023 meningkat sebesar 1,00 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini didukung oleh meningkatnya tingkat kepuasan karyawan terhadap 12 aspek kepuasan yang diukur.

Survey Result Employee Satisfaction Index

The employee satisfaction index in 2023 increased by 1.00 points when compared to the previous year. This is supported by the increasing level of employee satisfaction with the 12 aspects of satisfaction measured.

No.	Aspek-aspek Kepuasan Satisfaction Aspects	Indeks Kepuasan 2022 2022 Satisfaction Index	Indeks Kepuasan 2023 2023 Satisfaction Index	Trend Trend
1.	Strategi dan Misi January 2023	85%	86%	↑
2.	Budaya Perusahaan Corporate Culture	86%	85%	↓
3.	Enabling Infrastructure	84%	83%	↓
4.	Iklim Perusahaan Company Climate	83%	84%	↑
5.	Kerjasama Cooperation	83%	84%	↑
6.	Rekognisi Recognition	83%	84%	↑
7.	Penilaian Kinerja Performance Assessment	82%	82%	=
8.	Leadership	83%	83%	=
9.	Pelatihan & Pengembangan Training & Development	82%	82%	=
10.	Komunikasi Communication	81%	82%	↑
11.	Pengembangan Karir Career Development	80%	80%	=
12.	Sistem Penggajian Payroll System	78%	79%	↑
Indeks Kepuasan Pegawai Employee Satisfaction Index		82%	83%	↑

Indeks Keterikatan Pegawai

Indeks keterikatan pegawai tahun 2023 masih tetap pada nilai yang sama dengan tahun sebelumnya, dengan adanya dinamika perubahan pada aspek sebagaimana berikut:

Employee Engagement Index

Employee engagement index in 2023 was remained the same for value as the previous year, with dynamics of changes in the following aspects:

No.	Aspek-aspek Kepuasan Satisfaction Aspects	Indeks Kepuasan 2022 2022 Satisfaction Index	Indeks Kepuasan 2023 2023 Satisfaction Index	Trend Trend
1.	Say	85%	86%	↑
2.	Stay	84%	85%	↑
3.	Strive	85%	85%	=
Indeks Kepuasan Pegawai Employee Satisfaction Index		85%	85%	=

Produktivitas SDM

HC Productivity

Produktivitas kinerja pegawai PLN IP Services merupakan salah satu tolak ukur atas keberhasilan perusahaan dalam menjalankan usaha. Pada tahun 2023, total pendapatan Perusahaan adalah sebesar Rp1,61 Triliun dengan total jumlah pegawai per 31 Desember 2023 adalah sebanyak 4.305 pegawai, maka pendapatan yang dihasilkan per pegawai pada tahun 2023 adalah sebesar Rp401,91 juta. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 10,95% atau sebesar Rp49,42 juta bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp451,33 juta.

The performance productivity of PLN IP Services employees is one of the benchmarks for the success indicator in running a business. In 2023, the Company's total revenue was Rp1.61 trillion with total number of employees as of December 31, 2023 of 4,305 employees. So, the revenue generated per employee in 2023 was Rp401.91 million. This figure experienced a decrease of 10.95% or Rp49.42 million when compared to the previous year which amounted to Rp451.33 million.

Hubungan Industrial

Industrial Relations

Perusahaan berupaya untuk membangun hubungan industrial yang harmonis dengan pegawai yaitu dengan cara saling menghormati dan mentaati hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sebagai bagian dari komitmen Perusahaan dalam membina hubungan kerja yang bermartabat dengan seluruh jajaran karyawan, Perusahaan telah mengeluarkan Pedoman Disiplin Pegawai dalam bentuk Surat Keputusan yang sudah disahkan oleh Kementerian ketenagakerjaan melalui Keputusan Direksi No. 066.K/CDB/XII/2021 tentang Penerbitan Peraturan Perusahaan Direksi PT Cogindo DayaBersama.

The Company strives to build harmonious industrial relations with the employee by respecting each other and obeying rights and obligations of each party. As a part of the commitment of the Company in dignified fostering work relationship with all of employee, the Company issued Employee Discipline Guidelines in the Decree ratified by the Ministry of Manpower through the Board of Directors Decision Number 066.K/CDB/XII/2021 on the Issuance of Company Regulations of the Board of Directors PT Cogindo DayaBersama.

Perusahaan melakukan pendekatan kepada pegawai melalui program "Rabu Harmonis" yang berisi tentang peraturan dan kebijakan terbaru yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Program tersebut ditujukan sebagai wadah Perusahaan untuk berkomunikasi kepada pegawai perihal kebijakan perusahaan, kondisi kerja, serta penyelesaian masalah yang timbul di tempat kerja.

The Company approached employees through the "Rabu Harmonis" program that stated new regulations and policies related to employment. The program is intended as a forum for the Company to communicate to employees regarding company policies, working conditions, and resolution of problems that arise in the workplace.

Selain poin-poin diatas, program “Rabu Harmonis” juga bertujuan untuk:

1. Kolaborasi dan konsultasi terbuka
2. Komunikasi dengan pendekatan konstruktif
3. Pemberdayaan karyawan melalui partisipasi aktif

In addition to the points above, the “Rabu Harmonis” program aims to:

1. Open Collaboration and Consultation
2. Communication with constructive approach
3. Employee Empowerment through the active participation

Penilaian Kinerja Performance Assessment

Penilaian kinerja karyawan dilakukan 2 (dua) kali per tahun. Periode pertama dimulai dari bulan Januari hingga Juni dan periode berikutnya pada bulan Juli hingga Desember. Hasil evaluasi program penilaian kinerja karyawan PLN IP Services digunakan sebagai data pendukung pembinaan karir, pengembangan kompetensi, serta pemberian Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) Pegawai.

Employee performance assessment is conducted 2 (two) times a year. The first period start from January to June and the next period from July to December. Results of the PLN IP Services employee performance assessment program are used as supporting data for career development, competency development, and the provision of Employee Performance Allowances (TPK).

Pengelola Penilaian Kinerja menerapkan kebijakan penilaian kinerja sebagai berikut:

- Verifikasi pemenuhan bukti pendukung (*evidence*) oleh Unit Kerja
- Verifikasi kalibrasi pada distribusi hasil nilai kinerja oleh Pengelola Penilaian Kinerja Kantor Pusat
- Kalibrasi hasil penilaian kinerja untuk mencegah terjadinya kelebihan penilaian.

Performance Assessment Manager applies the following policies:

- Verification of compliance with supporting evidence by the Work Unit
- Calibration verification on the distribution of performance scores by the Head Office Performance Assessment Manager
- Calibration of performance assessment results to prevent overvaluation from occurring

Berikut merupakan data hasil penilaian kinerja pegawai PLN IP Services untuk Semester 2 tahun 2022 dan semester 1 tahun 2023:

The following is the results of the performance assessment of PLN IP Services employees for 2nd period of 2022 and 1st period of 2023:

No.	Nilai Value	Presentase Percentage	Jumlah Pegawai Semester 2 (2022) Number of Employees in Semester 2 (2022)	Jumlah Pegawai Semester 1 (2023) Number of Employees in Semester 1 (2023)
1.	5	Maksimal 5% Maximum 5%	11 Pegawai Employee	4 Pegawai Employee
2.	4	Maksimal 40% Maximum 40%	1.041 Pegawai Employee	999 Pegawai Employee
3.	1 s/d 3 1 to 3	Minimal 60% Minimum 60%	1.767 Pegawai Employee	1.803 Pegawai Employee
Jumlah Total		100%		

Pencapaian Program Kerja Tahun 2023

Achievement of Work Program in 2023

Berbagai pelatihan dan pendidikan yang dilakukan oleh PLN IP Services bagi para karyawannya mampu meningkatkan kemampuan masing-masing karyawan untuk mencapai hasil kerja yang diharapkan berdasarkan potensi sumber daya yang ada. Efektivitas dan efisiensi kerja semakin meningkat berbanding lurus dengan kualitas dan kuantitas yang dihasilkan. Pada tahun 2023 pendapatan yang dihasilkan per pegawai tercatat sebesar Rp401,91 juta menurun 10,95% dari tahun sebelumnya yaitu Rp451,33 juta.

Various training and education programs conducted by PLN IP Services for its employees are able to increase the ability of each employee to achieve the expected work results based on the potential of existing resources. The effectiveness and efficiency of work is increasing in direct proportion to the quality and quantity produced. In 2023 the income generated per employee was recorded at Rp401.91 million a decrease of 10.95% from the previous year, which was Rp451.33 million.

Rencana Pengembangan SDM Ke Depan

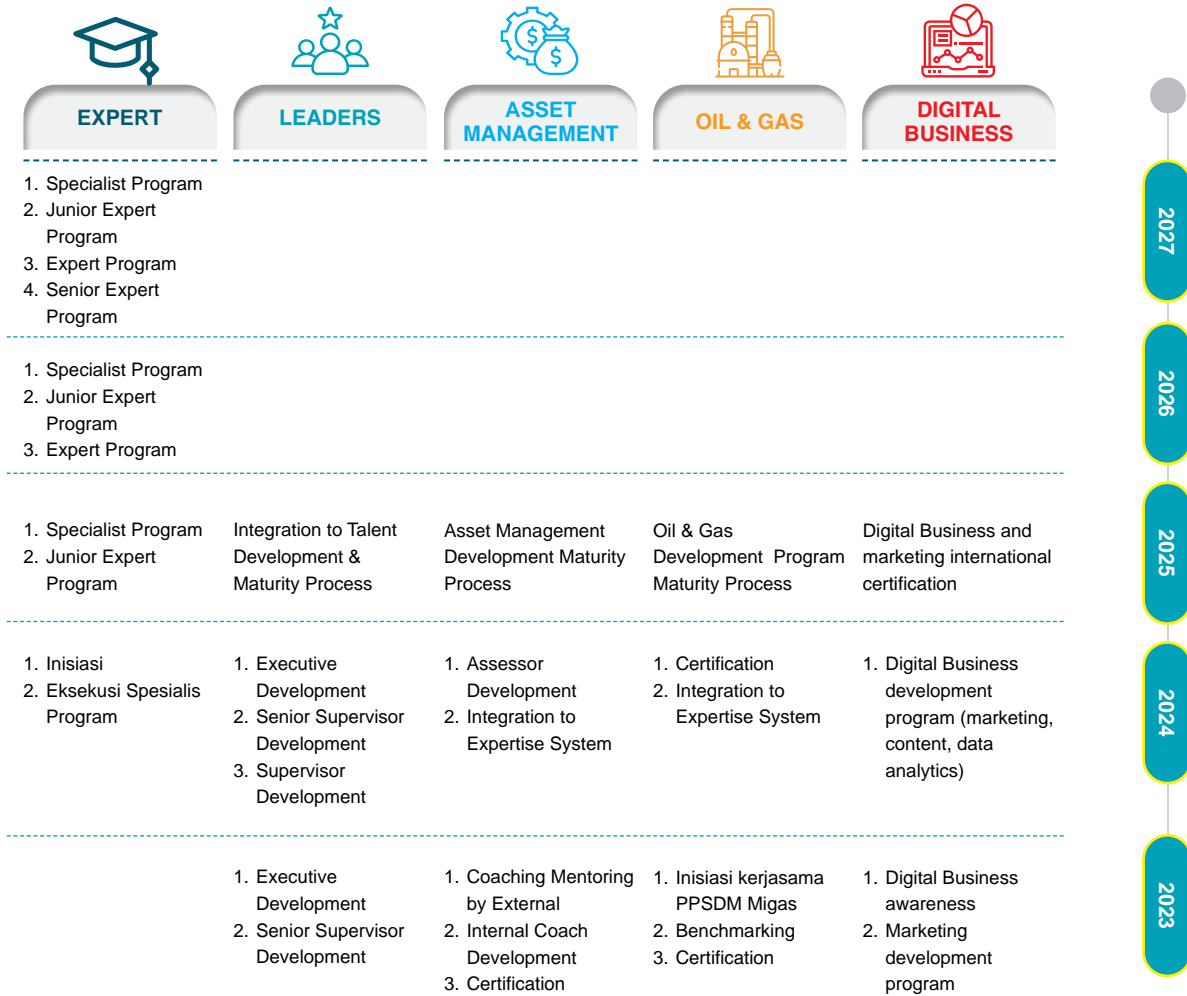
HC Development Plan In The Future

Dalam mendukung visi misi untuk menjadi Perusahaan yang terpercaya dalam penyediaan solusi bidang energi di kawasan Asia, dan mampu menyediakan solusi energi yang terbaik, terkini dan terintegrasi, PLN IP Services melakukan perencanaan khusus atas sumber daya manusia yang dimiliki. Serangkaian kegiatan direncanakan sebagai upaya mengantisipasi fluktuasi permintaan bisnis dengan memperhatikan lingkungan di masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja.

In supporting the vision and mission to become a trusted company in providing energy solutions in the Asian region, and to be able to provide the best, most up-to-date and integrated energy solutions, PLN IP Services has made special plans for its human capital. A series of activities are planned as an effort to anticipate fluctuations in business demand by taking into account the environment in the future to meet workforce needs.

PLN IP Services membuat perencanaan yang senantiasa ditinjau setiap tahunnya untuk memenuhi kesesuaian dengan kondisi industri ketenagalistrikan untuk 5 (lima) tahun mendatang sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

PLN IP Services makes a plan that is constantly reviewed annually to comply with the conditions of the electricity industry for the next 5 (five) years as described in the following table:



Statistik Sumber Daya Manusia

Human Capital Statistics

Perusahaan berupaya untuk menciptakan organisasi yang efektif dan efisien dan mampu menjawab setiap tantangan di dunia bisnis. Namun, sejalan dengan pertumbuhan usaha, penambahan jumlah pegawai merupakan hal yang tidak dapat terelakkan.

The Company strives to create an effective and efficient organization capable of responding to every challenge in the business world. However, in line with business growth, an increase in the number of employees is inevitable.

Per 31 Desember 2023, Perusahaan memiliki 4.305 orang pegawai yang menunjukkan adanya peningkatan sebesar 23,42% bila dibandingkan dengan jumlah karyawan tahun 2022 yaitu 3.488 orang. Peningkatan jumlah karyawan PLN IP Services pada tahun 2023 lebih dikarenakan oleh penambahan tenaga kerja waktu tertentu (TKWT).

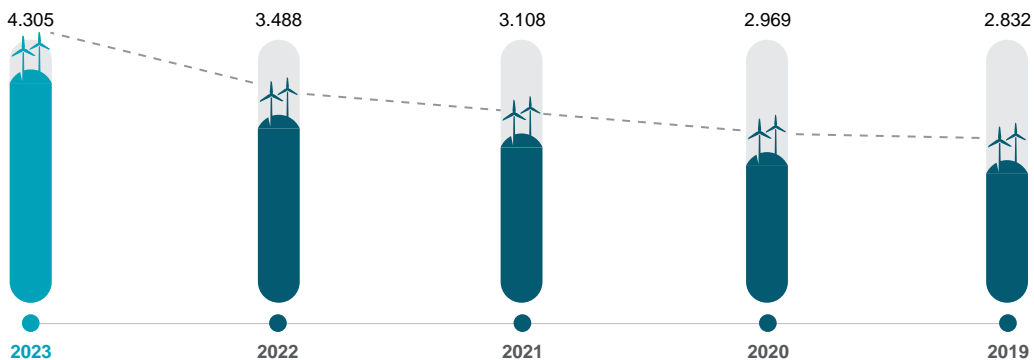
As of December 31, 2023, the Company had 4,305 employees which showed an increase of 23.42% when compared to the number of employees in 2022 that were 3,488 people. The increase in the number of PLN IP Services employees in 2023 was due to the addition of Specific Time Employee (TKWT).

Pertumbuhan jumlah pegawai PLN IP Services dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini:

The growth in the number of PLN IP Services employees in the last 5 (five) years can be seen in the following graph:

► Jumlah Karyawan 2019 - 2023

Number of Employees 2019 - 2023



► Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Composition of Employees Based on Gender

Jenis Kelamin	Tahun Year		Pertumbuhan (Penurunan) Increase (Decrease)		Gender
	2023	2022	Jumlah Number	Persentase Percentage	
Laki-Laki	4.018	3.270	748	22,87%	Male
Perempuan	287	218	69	31,65%	Female
Jumlah	4.305	3.488	817	23,42%	Total

► **Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian**
Composition of Employees Based on Employment Status

Status Kepegawaian	Tahun Year		Pertumbuhan (Penurunan) Increase (Decrease)		Employment Status
	2023	2022	Jumlah Number	Persentase Percentage	
Tugas Karya	61	64	(3)	(4,69%)	Work Assignment
Organik	2.783	2.807	(24)	(0,86%)	Organic
Tenaga Kerja Waktu Tertentu (TKWT)	1.461	617	844	136,79%	Specific Time Employee (TKWT)
Jumlah	4.305	3.488	817	23,42%	Total

► **Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**
Composition of Employees Based on Educational Level

Tingkat Pendidikan	Tahun Year		Pertumbuhan (Penurunan) Increase (Decrease)		Educational Level
	2023	2022	Jumlah Number	Persentase Percentage	
Strata 2 - Strata 3	22	14	8	57,14%	Master - Doctorate
Diploma 3 - Strata 1	1.447	993	454	45,72%	Diploma 3 – Bachelor
SMP- SLTA – Diploma	2.836	2.481	355	14,31%	Junior High – High School - Diploma
Jumlah	4.305	3.488	817	23,42%	Total

► **Komposisi Karyawan Berdasarkan Rentang Usia**
Composition of Employees Based on Age Range

Rentang Usia	Tahun Year		Pertumbuhan (Penurunan) Increase (Decrease)		Age Range
	2023	2022	Jumlah Number	Persentase Percentage	
18-30	2.620	2.169	451	20,79%	18-30
31-40	1.489	1.155	334	28,92%	31-40
41-50	169	128	41	32,03%	41-50
>50	27	36	(9)	(25,00%)	>50
Jumlah	4.305	3.488	817	23,42%	Total

► **Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi**
Composition of Employees Based on Organizational Level

Level Organisasi	Tahun Year		Pertumbuhan (Penurunan) Increase (Decrease)		Organizational Level
	2023	2022	Jumlah Number	Persentase Percentage	
Eksekutif	59	60	(1)	(1,67%)	Executive
Supervisor Atas	66	63	3	4,76%	Top Supervisor
Supervisor Dasar	229	212	17	8,02%	Bottom Supervisor
Staff Senior	934	806	128	15,88%	Senior Staff
Staf	3.014	2.344	670	28,58%	Staff
Non Staf	3	3	0	0,00%	Non Staff
Jumlah	4.305	3.488	817	23,42%	Total

► Komposisi Karyawan Berdasarkan Penempatan Kerja Composition of Employees Based on Work Placement

Penempatan Kerja	Tahun Year		Pertumbuhan (Penurunan) Increase (Decrease)		Work Placement
	2023	2022	Jumlah Number	Persentase Percentage	
Kantor Pusat	225	188	37	19,68%	Head Office
Jasa O&M	3.901	3.176	725	22,83%	O&M Services
Jasa <i>Repair</i> & Pemeliharaan (MRO)	98	67	31	46,27%	Repair & Maintenance (MRO) Services
Suplai Energi	81	57	24	42,11%	Energy Supply
Jumlah	4.305	3.488	817	23,42%	Total

PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

PLN IP Services merupakan perusahaan yang memberikan layanan dalam bidang pembangkitan ketenagalistrikan sehingga membutuhkan kompetensi keahlian dari para karyawan. Perusahaan terus berupaya memberikan motivasi kepada karyawan untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan seluruh karyawan baik dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kerja maupun untuk pengembangan potensi dan karir dari masing-masing karyawan. Perusahaan juga mendorong karyawan untuk berpikir terbuka dan positif serta membekali mereka dengan pemahaman tugas untuk mendukung kinerja Perusahaan secara berkelanjutan.

Beberapa kebijakan telah dikeluarkan untuk mendukung program pengembangan karir dan kompetensi pegawai sebagai bentuk komitmen akan keberlanjutan usaha, antara lain:

- Kebijakan tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan. berdasarkan Keputusan Direksi No. 29.K/CDB/IX/2016.
- Kebijakan tentang Keahlian Kunci dan Sertifikasi Profesi berdasarkan Keputusan Direksi No.31.K/CDB/IX/2016.
- Kebijakan tentang struktur profesi di lingkungan PT Cogindo DayaBersama berdasarkan Keputusan Direksi No.073.K/CDB/IX/2019.
- Perubahan Direktori Kompetensi pegawai PT Cogindo DayaBersama No. 076.K/CDB/IX/2020 tentang Direktori Kompetensi PT Cogindo DayaBersama.

IMPROVING THE QUALITY OF HUMAN CAPITAL

PLN IP Services is a company that provides services in the field of electricity generation hence it requires competency expertise from its employees. The Company continues to provide motivation to employees to increase insights and skills of all employees both in order to support the improvement of work quality and to develop the potential and career of each employee. The Company also encourages employees to think openly and positively and equips them with an understanding of their duties to support the company's performance in a sustainable manner.

Several policies have been issued to support career development programs and employee competencies as a form of commitment to business continuity, including:

- Policy regarding Education and Training Guidelines based on Decree of the Board of Directors No. 29.K/CDB/IX/2016.
- Policy on Key Expertise and Professional Certification based on Decree of the Board of Directors No. 31.K/CDB/IX/2016
- Policy regarding professional structure within PT Cogindo DayaBersama based on Decree of the Board of Directors No.073.K/CDB/IX/2019
- Changes to the Employee Competency Directory of PT Cogindo DayaBersama No. 076.K/CDB/IX/2020 on the Competency Directory of PT Cogindo DayaBersama.

Peningkatan kualitas SDM PLN IP Services dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

- Pendidikan dan Pelatihan Informal (Diklat)
- Sertifikasi
- Pemanfaatan PLN IP Services *Learning Center*
- Pendidikan Formal

Pendidikan dan Pelatihan Informal (Diklat)

Pengembangan SDM PLN IP Services dengan memberikan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensi yang berdasarkan analisa kebutuhan, hasil penilaian kinerja, *assessment* atau pengembangan karir. Perusahaan menggolongkan Diklat ke dalam 3 kategori program Diklat yaitu Diklat *Induction*, Diklat Keahlian dan Diklat Pengembangan.

1. Diklat *Induction*;

Pelatihan pengadaan (*Induction Training*) ditujukan bagi pegawai yang baru menduduki jabatannya. Program Diklat *Induction* terdiri dari Pembinaan Sikap Mental, Pengenalan Perusahaan dan Pembidangan (OJT selama 6 bulan) diberikan kepada seluruh pegawai baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengenalan tentang Unit Pembangkit dan sebagai pembekalan untuk Uji Sertifikasi Kompetensi O&M.

2. Diklat Keahlian;

Pegawai eksisting diberikan pelatihan keahlian untuk meningkatkan keterampilan (*skill*) pegawai guna mendukung kinerja di bidang tugasnya, ditujukan kepada Pegawai Staf sampai dengan Manajemen Atas. Pelatihan ini mengembangkan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai jabatan guna mencapai kinerja perusahaan dan menjembatani pemahaman akan standar industri yang terus berkembang, antara lain: sertifikasi, seminar, *training*, *workshop*, dan lainnya.

3. Diklat Pengembangan;

Pelatihan Pengembangan yang lebih berfokus pada persiapan kompetensi untuk tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang lebih tinggi. Pelatihan pengembangan ini termasuk: Pelatihan kepemimpinan, Penugasan untuk berbagai proyek, dsb.

Pelatihan pelepasan merupakan diklat yang diselenggarakan untuk memberikan bekal kepada Pegawai di dalam menjalani masa pensiunnya.

improving the quality of PLN IP Services's human capital is carried out in several ways:

- Informal Education and Training
- Certification
- Utilization of PLN IP Services Learning Center
- Formal Education

Informal Training and Education

Development of PLN IP Services's human capital by providing education and training in accordance with competencies based on needs analysis, performance assessment result, assessment or career development. The Company classifies training into 3 categories of education and training programs, namely induction training, expertise training and development training.

1. Induction Training;

Procurement training (Induction Training) is intended for employees who have just occupied their positions. The Induction Training Program consists of Development of Mental Attitudes, Company Introduction and Explanation (OJT for 6 months) given to all new employees with the aim of getting an introduction to the Generating Unit and as a provision for the O&M Competency Certification Test.

2. Skills Training;

Existing employees are given skills training to improve employee skills to support performance in their field of duty, aimed at Staff Employees up to Upper Management. This training develops competencies in carrying out duties and responsibilities according to position in order to achieve company performance and bridge an understanding of industry standards that continue to develop, including: certification, seminars, training, workshops, and others.

3. Development Training;

Development Training that focuses more on competency preparation for higher duties, responsibilities and authorities. This development training includes: Leadership training, Assignment for various projects, etc.

Discharge training is training held to provide employees with provisions for retirement.

Sebagaimana tahun sebelumnya, kegiatan perencanaan diklat keahlian dan pengembangan diawali dengan proses identifikasi *gap competencies* yang akan dijadikan dasar dalam menyusun program pengembangan kompetensi. Kegiatan *training* dan sertifikasi masih dilaksanakan secara *online training* dan *In House Training* (IHT) via *online* dengan protokol kesehatan pada unit kerja setempat.

As in the previous year, planning for training and development skills begins with the process of identifying gap competencies which will be used as the basis for compiling a competency development program. Training and certification activities are still implemented online and online In House Training (IHT) with health protocols in local work units.

Realisasi pelaksanaan diklat PLN IP Services pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

The realization of PLN IP Services training in 2023 as follows:

No.	Nama Pelatihan	Jumlah Total	Training Name
Induction			
1	Pengenalan Pembangkit	640	Generator Introduction
Operation, Maintenance, And MRO			
1.	<i>Actuator (Motorize, Hydraulic, & Pneumatic)</i>	4	Actuator (Motorize, Hydraulic, & Pneumatic)
2.	<i>Advanced Maintenance Management</i>	1	Advanced Maintenance Management
3.	<i>Advanced Partial Discharge Course</i>	1	Advanced Partial Discharge Course
4.	<i>Advanced Vibration Analysis</i>	3	Advanced Vibration Analysis
5.	<i>Agile Leadership</i>	5	Agile Leadership
6.	<i>Air Compressor (Theory & Practical)</i>	5	Air Compressor (Theory & Practical)
7.	Alat Bantu <i>Boiler</i> PLTU	1	PLTU Boiler Auxiliary Equipment
8.	Alat Berat & Mesin	2	Heavy Equipment & Engine
9.	<i>Alignment And Balancing</i>	11	Alignment And Balancing
10.	Analisa & Evaluasi Kondisi Bangunan Sipil Pembangkit	1	Analysis & Evaluation of Plant Civil Building Condition
11.	Analisa Gangguan Listrik Pembangkit	2	Power Plant Disturbance Analysis
12.	Analisa Kimia Air	1	Water Chemical Analysis
13.	Analisa Kimia Batubara	1	Coal Chemical Analysis
14.	Analisa Kinerja Operasi Sistem Bongkar Dan Penyaluran Batu Bara	11	Operation Performance Analysis of Coal Unloading and Delivering System
15.	Analisa Kualitas Batubara	7	Coal Quality Analysis
16.	Analisa Vibrasi & Balancing	7	Vibration & Balancing Analysis
17.	Analisis Boiler Water	6	Boiler Water Analysis
18.	Analisis Kimia Pembangkit	2	Plant Chemical Analysis
19.	<i>Analytical Creative Thinking</i>	2	Analytical Creative Thinking
20.	<i>Analytical Thinking</i>	2	Analytical Thinking
21.	<i>Ash Handling Maintenance & Troubleshooting</i>	2	Ash Handling Maintenance & Troubleshooting
22.	<i>Automatic Voltage Regulator : Operation & Maintenance</i>	1	Automatic Voltage Regulator : Operation & Maintenance
23.	<i>Balancing Rotating Machinery</i>	4	Balancing Rotating Machinery
24.	Bangunan Sipil Pembangkit	1	Civil Building Plant
25.	<i>Basic Instrumentation & Control System</i>	2	Basic Instrumentation & Control System
26.	<i>Basic Logic Sequence</i>	19	Basic Logic Sequence
27.	<i>Basic Mechanical EP</i>	2	Basic Mechanical EP
28.	<i>Basic Of Lubricant</i>	3	Basic Of Lubricant
29.	<i>Basic Of Lubricant Monitoring</i>	1	Basic Of Lubricant Monitoring
30.	<i>Basic Plc Siemens S7 1500</i>	2	Basic Plc Siemens S7 1500

No.	Nama Pelatihan	Jumlah Total	Training Name
31.	<i>Basic Vibration Analysis</i>	1	Basic Vibration Analysis
32.	<i>Belt Conveyor : Operation Maintenance & Troubleshooting</i>	3	Belt Conveyor : Operation Maintenance & Troubleshooting
33.	<i>Boiler Combustion</i>	2	Boiler Combustion
34.	<i>Boiler Operation Maintenance & Troubleshooting</i>	4	Boiler Operation Maintenance & Troubleshooting
35.	<i>Boiler System</i>	6	Boiler System
36.	<i>Building Maintenance</i>	3	Building Maintenance
37.	<i>Capacity Building Bidang Mperp (Coal Handling)</i>	47	Capacity Building Bidang Mperp (Coal Handling)
38.	<i>Coal & Ash Handling</i>	7	Coal & Ash Handling
39.	<i>Coal Handling And Self Combustion</i>	5	Coal Handling And Self Combustion
40.	<i>Coal Handling Area</i>	5	Coal Handling Area
41.	<i>Coal Handling Batubara</i>	4	Coal Handling Batubara
42.	<i>Coal Handling System & Troubleshooting</i>	7	Coal Handling System & Troubleshooting
43.	<i>Coal Quality Stockpile Management</i>	2	Coal Quality Stockpile Management
44.	<i>Coal Stockpile Management</i>	3	Coal Stockpile Management
45.	<i>Combustion Boiler</i>	2	Combustion Boiler
46.	<i>Compressor (Operation And Maintenance)</i>	3	Compressor (Operation And Maintenance)
47.	<i>Compressor Maintenance & Troubleshooting</i>	2	Compressor Maintenance & Troubleshooting
48.	<i>Control System For Turbin Generator</i>	3	Control System For Turbin Generator
49.	Dasar Korosi	2	Corrosion Basics
50.	Dasar Manajemen Bencana	12	Disaster Management Basics
51.	DCS (<i>Distributed Control System</i>) Abb Symphony Plus)	2	DCS (Distributed Control System) Abb Symphony Plus)
52.	DCS Dan Control	2	DCS Dan Control
53.	Deklarasi Kondisi & Indeks Kinerja Pembangkit (DKIKP)	29	Declaration of Plant Condition & Performance Index (DKIKP)
54.	<i>Diesel & Gas Engine Operating, Maintenance & Troubleshooting</i>	2	Diesel & Gas Engine Operating, Maintenance & Troubleshooting
55.	<i>Diesel Engine Failure Analysis</i>	1	Diesel Engine Failure Analysis
56.	Digitalisasi Pembangkit	1	Digitalization of Generation
57.	<i>Dissolved Gas Analysis</i>	2	Dissolved Gas Analysis
58.	<i>Distributed Control System (DCS)</i>	5	Distributed Control System (DCS)
59.	<i>Distributed Control System and Troubleshooting</i>	2	Distributed Control System and Troubleshooting
60.	Efisiensi Pembangkit Dan Termodinamika	2	Generation Efficiency and Thermodynamics
61.	Efisiensi Pengoperasian Pembangkit	4	Generation Operating Efficiency
62.	<i>Electric Actuator</i>	2	Electric Actuator
63.	<i>Electric Motor : Operation, Maintenance & Troubleshooting</i>	1	Electric Motor : Operation, Maintenance & Troubleshooting
64.	<i>Electrical : Troubleshooting & Maintenance AC/DC Electrical Motor Control</i>	2	Electrical : Troubleshooting & Maintenance AC/DC Electrical Motor Control
65.	<i>Electrical Circuit Breaker (Medium Voltage)</i>	1	Electrical Circuit Breaker (Medium Voltage)
66.	<i>Electrical Power System Analysis & Protection With ETAP</i>	3	Electrical Power System Analysis & Protection With ETAP
67.	Elektrik Mekanik	2	Electric Mechanical
68.	Enjiniring Instrumentasi & Kontrol Pembangkit	2	Generation Instrumentation & Control Engineering
69.	Evaluasi Dan Pengendalian Kinerja Pembangkit	2	Evaluation and Control of Generator Performance
70.	<i>Failure Defence Planning Untuk Keandalan Bop & Auxiliary & First Line Maintenance</i>	8	Failure Defense Planing for Bop & Auxiliary Reliability & First Line Maintenance
71.	<i>Field Balancing</i>	8	Field Balancing
72.	<i>First Line Maintenance</i>	10	First Line Maintenance

No.	Nama Pelatihan	Jumlah Total	Training Name
73.	<i>Fly Ash System & Supply Udara</i> PLTU Batubara	3	Fly Ash System & Air Supply of Coal Power Plant
74.	<i>Fortigate Firewall Security</i>	2	Fortigate Firewall Security
75.	<i>Generation Excitation : Maintenance & Troubleshooting</i>	1	Generation Excitation : Maintenance & Troubleshooting
76.	<i>Generator Governor Control System</i>	4	Generator Governor Control System
77.	<i>Generator System</i>	1	Generator System
78.	<i>Geothermal Reservoir Engineering</i>	1	Geothermal Reservoir Engineering
79.	<i>Hazard Identification Risk Assesment</i>	4	Hazard Identification Risk Assesment
80.	<i>Heavy Equipment Maintenance Management</i>	2	Heavy Equipment Maintenance Management
81.	<i>Hvac System & Plc Control</i>	1	Hvac System & Plc Control
82.	<i>Hydraulic &Pneumatic System</i>	7	Hydraulic &Pneumatic System
83.	<i>Hydrogen Plant</i>	12	Hydrogen Plant
84.	IHT Penanganan Gangguan Mov/Breaker 380/6Kv/Regu B (Simulator)	10	IHT of Mov/Breaker 380/6Kv/Regu B Disturbance Handling (Simulator)
85.	Imo Oprc (Oil Preparedness,Response & Cooperation Convention)	2	Imo Oprc (Oil Preparedness,Response & Cooperation Convention)
86.	<i>In House Training Alat Ndt</i>	8	In House Training Ndt Tools
87.	<i>Industrial Gearbox Repair</i>	2	Industrial Gearbox Repair
88.	Instrumen dan Kalibrasi	4	Instruments and Calibration
89.	<i>Instrumentation Electric & Control System</i>	13	Instrumentation Electric & Control System
90.	<i>Instrumentation Process Control</i>	2	Instrumentation Process Control
91.	Jaminan Mutu Hasil Pengujian	1	Quality Assurance of Test Results
92.	Jaringan Area Lokal Virtual (VLAN)	1	Virtual Local Area Network (VLAN)
93.	K3 Mekanik Ditempat Kerja	1	Mechanical OHS in the Workplace
94.	Kalibrasi & Instrumentasi	1	Calibration & Instrumentation
95.	Kalibrasi <i>Field Instrument & Parameter Field</i> Instrumen	2	Field Instrument Calibration & Field Instrument Parameters
96.	Kalibrasi Peralatan Laboratorium	2	Laboratory Equipment Calibration
97.	Keaneragaman Hayati	1	Biodiversity
98.	Konfigurasi Sophos & Identifikasi <i>Losses Bandwith</i> Jaringan	1	Sophos Configuration & Identification of Network Bandwidth Losses
99.	Konversi Motor Bensin Menjadi Motor Listrik	3	Sophos Configuration & Identification of Network Bandwidth Losses
100.	Kualitas Batubara	1	Coal Quality
101.	<i>Lean Six Sigma Fundamentals</i>	1	Lean Six Sigma Fundamentals
102.	Logistik Kimia	2	Chemical Logistics
103.	LOTO (<i>Lockout & Tagout</i>)	2	LOTO (Lockout & Tagout)
104.	<i>Lube Oil Turbin System,Generator, & Trafo</i> Proteksi	2	Lube Oil Turbin System,Generator, & Trafo Proteksi
105.	<i>Maintenance Management</i>	2	Maintenance Management
106.	Managemen Laboratorium Kimia	2	Chemistry Laboratory Management
107.	<i>Management</i> Evaluasi & Pengendalian Logistik	3	Logistics Evaluation & Control Management
108.	<i>Management Stockpile</i> Batubara	3	Coal Stockpile Management
109.	Manajemen Efisiensi Pembangkit Dan Termodinamika	2	Generator Efficiency Management and Thermodynamics
110.	Manajemen Laboratorium Kimia	2	Generator Efficiency Management and Thermodynamics
111.	Manajemen Lingkungan	3	Environmental Management
112.	Manajemen <i>Stockpile</i>	2	Stockpile Management
113.	<i>Mechanical Failure Analysis In Diesel Engine</i>	2	Mechanical Failure Analysis In Diesel Engine

No.	Nama Pelatihan	Jumlah Total	Training Name
114.	Mesin Bubut	3	Lathe Machine
115.	Metode Penyusunan HPS/Oe	3	HPS/Oe Preparation Method
116.	<i>Mooring Unmooring & Jetty Operation</i>	2	Mooring Unmooring & Jetty Operation
117.	<i>Non Destructive Test (NDT)</i>	3	Non Destructive Test (NDT)
118.	<i>Oh Mill & Boiler</i>	1	Oh Mill & Boiler
119.	<i>Oil Analisis Transformer</i>	2	Oil Analisis Transformer
120.	Operasi Boiler & Ash Handling	4	Boiler & Ash Handling Operations
121.	Operasi Boiler PLTU Batubara Dan Turbin Uap	1	Coal-fired Boiler and Steam Turbine Operations
122.	Operasi PLTU Dan Permasalahannya	3	PLTU Operation and Problems
123.	Operasi Turbin Uap	6	Steam Turbine Operation
124.	<i>Outage Management & Work Planning Control (WPC)</i>	2	Outage Management & Work Planning Control (WPC)
125.	Pelatihan K3	7	OHS Training
126.	Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3) Unit Timika	1	Occupational Safety and Health Committee (P2K3) Timika Unit
127.	<i>Partial Discharge</i>	3	Occupational Safety and Health Committee (P2K3) Timika Unit
128.	Pelatihan Analisa Kualitas Batu Bara	4	Coal Quality Analysis Training
129.	Pelatihan Kualitas Batubara PLTU Unit Lontar	3	Coal Quality Training for Lontar PLTU Unit
130.	Pelatihan Motor Listrik	1	Electric Motor Training
131.	Pelatihan Penanganan & Pencegahan Self-Combustion Batu Bara	9	Coal Self-Combustion Handling & Prevention Training
132.	Pelatihan Pengoperasian Peralatan Dam Control Center	4	Dam Control Center Equipment Operation Training
133.	Pemahaman Pelaksanaan Pengoperasian Sistem Turbin	4	Understanding of Turbine System Operation
134.	Pemanfaatan Fly Ash Botton Ash (FABA)	10	Utilization of Fly Ash Botton Ash (FABA)
135.	Pemantauan Kualitas Air PLTU	3	PLTU Water Quality Monitoring
136.	Pembinaan Dan Sertifikasi K3 Ship Unloader Kelas 1	6	Ship Unloader Class 1 OHS Coaching and Certification
137.	Pemeliharaan Alat Berat	1	Ship Unloader Class 1 OHS Coaching and Certification
138.	Pemeliharaan Instrumen Kontrol <i>Software</i> Pembangkit	1	Maintenance of Generating Software Control Instruments
139.	Pemeliharaan Kubikal 20Kv Gardu Induk	1	20Kv Substation Cubical Maintenance
140.	Pemeliharaan Listrik & Dc Power PLTU	2	Electrical Maintenance & Dc Power PLTU
141.	Pemeliharaan Main Boiler / BOHM	2	Main Boiler/BOHM Maintenance
142.	Pemeliharaan Peralatan <i>Coal Handling</i>	1	Main Boiler/BOHM Maintenance
143.	Pemeliharaan Pompa	1	Main Boiler/BOHM Maintenance
144.	Pemeliharaan Sistem DC Dan UPS Pembangkit	2	Maintenance of Generation DC and UPS Systems
145.	Pemeliharaan Trafo Pembangkit	3	Generator Transformer Maintenance
146.	Penanganan & Pencegahan Self-Combustion Batu Bara	8	Handling and Prevention of Self Combustion of Coal
147.	Penanganan Batubara Bersih dan Beku	1	Clean and Frozen Coal Handling
148.	Penanganan dan Pencegahan Self Combustion Batubara	8	Handling and Prevention of Coal Self Combustion
149.	Penanganan <i>Troubleshooting</i> Peralatan Utama & Peralatan Pendukung <i>Coal & Ash Handling System</i>	2	Troubleshooting of Main Equipment & Supporting Equipment Coal & Ash Handling System
150.	Penanggulangan Kebakaran <i>Low Rank Coal</i>	1	Low Rank Coal Fire Countermeasures
151.	Pengendalian Pencemaran Udara	1	Air Pollution Control
152.	Pengoperasian & Pemeliharaan Kompresor	2	Compressor Operation & Maintenance
153.	Pengoperasian & <i>Troubleshooting Hrsg</i>	2	Hrsg Operation & Troubleshooting

No.	Nama Pelatihan	Jumlah Total	Training Name
154.	Pengoperasian <i>Ash Handling</i>	8	Ash Handling Operation
155.	Pengoperasian <i>Auxiliary Island</i> PLTU	3	Operation of Auxiliary Island PLTU
156.	Pengoperasian <i>Boiler</i>	3	Boiler Operation
157.	Pengoperasian <i>Boiler & Auxiliary</i>	3	Boiler & Auxillary Operation
158.	Pengoperasian <i>Boiler Chain Grate</i>	4	Chain Grate Boiler Operation
159.	Pengoperasian <i>Cathodic Protection</i>	2	Cathodic Protection Operation
160.	Pengoperasian <i>Coal Handling System</i> PLTU Batubara	2	Coal Handling System Operation of Coal PLTU
161.	Pengoperasian Dan Pemeliharaan Pompa Industri	1	Operation and Maintenance of Industrial Pumps
162.	Pengoperasian <i>Hydrogen (H2) Plant Water Based</i>	5	Hydrogen (H2) Plant Water Based Operation
163.	Pengoperasian Kubikal 20 Kv	1	20 Kv Cubical Operation
164.	Pengoperasian Pembangkit	2	Generator Operation
165.	Pengoperasian Peralatan Alat Bantu Turbin Uap PLTU	5	PLTU Steam Turbine Auxiliary Equipment Operation
166.	Pengoperasian Peralatan Water Treatment Plant	2	Operation of Water Treatment Plant Equipment
167.	Pengoperasian PLTU CFB Troubleshooting	7	Operation of CFB PLTU Troubleshooting
168.	Pengoperasian Sistem Chlorination Plant	2	Chloranation Plant System Operation
169.	Pengoperasian Sistem Pelumas	7	Lubricant System Operation
170.	Pengoperasian <i>Troubleshooting</i> WTP Dan Kimia	4	WTP and Chemical Troubleshooting Operation
171.	Pengoperasian Turbin Dan Generator	3	Turbine and Generator Operation
172.	Pengoperasian <i>Water Treatment Plant</i> Untuk PLTU	4	Operation of Water Treatment Plant for PLTU
173.	Pengukuran Vibrasi Dengan Emerson	2	Vibration Measurement With Emerson
174.	Penyambungan <i>Belt Conveyor Hot Splicing & Cold Splicing (Fabric/Steel Cord)</i>	3	Conveyor Belt Splicing Hot Splicing & Cold Splicing (Cloth/Steel Cable)
175.	Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang	2	Preparation of HPS for the auction of goods
176.	Peraturan Perundangan Lingkungan Hidup	2	Environmental Legislation
177.	Perawatan Motor Listrik	2	Electric Motor Maintenance
178.	Perencanaan Sistem Pembangkit	4	Generation System Planning
179.	Personel Lab Berbasis SNI ISO/IEC 17025 : 2017	7	Lab Personnel Based on SNI ISO/IEC 17025: 2017
180.	PLC Siemens S7400	1	PLC Siemens S7400
181.	<i>Power Electrical Instalation System</i>	2	Power Electrical Instalation System
182.	<i>Power Plant Operation System</i>	3	Power Plant Operation System
183.	<i>Predictive Maintenance</i> Pembangkit	1	Predictive Maintenance of Power Plants
184.	<i>Preventive & Predictive Maintenance</i> Mesin Pembangkit	11	Preventive & Predictive Maintenance of Generating Machinery
185.	<i>Production & Operation Management</i>	1	Production & Operation Management
186.	<i>Programmable Logic Controller (PLC)</i>	12	Programmable Logic Controller (PLC)
187.	Proteksi Trafo	1	Transformer Protection
188.	Proteksi Trafo Generator	1	Generator Transformer Protection
189.	Proteksi Turbin & Generator Serta Troubleshooting	33	Turbine & Generator Protection and Troubleshooting
190.	Proteksi Turbin Generator Dan DKIKP	5	Turbine Generator and DKIKP Protection
191.	<i>Realibility Asset Management And Maintenance Strategy</i>	1	Realibility Asset Management And Maintenance Strategy
192.	Relay Proteksi Pembangkit	8	Generator Relay Protection
193.	<i>Reliability & Maintenance Best Practice</i>	3	Reliability & Maintenance Best Practice
194.	<i>Reliability Centered Spares</i>	1	Reliability Centered Spares
195.	<i>Reliability, Availability, And Maintainability Analysis</i>	1	Reliability, Availability, And Maintainability Analysis

No.	Nama Pelatihan	Jumlah Total	Training Name
196.	<i>Research And Development Management</i>	2	Research And Development Management
197.	<i>Reserve Osmosis System</i>	3	Reserve Osmosis System
198.	<i>Root Cause Failure Analysis (RCFA)</i>	2	Root Cause Failure Analysis (RCFA)
199.	<i>Rotating Equipment (Pompa & Kompresor)</i>	4	Rotating Equipment (Pump & Compressor)
200.	<i>Safety Leadership</i>	15	Safety Leadership
201.	<i>Safety Officer</i>	1	Safety Officer
202.	<i>Sampling, Preparasi Dan Analisa Kualitas Batu Bara</i>	3	Sampling, Preparation and Analysis of Coal Quality
203.	<i>Scada</i>	1	Scada
204.	<i>Self Combustion Batubara</i>	2	Coal Self Combustion
205.	<i>Sistem Generator Dan Auxiliary</i>	1	Generator and Auxiliary Systems
206.	<i>Sistem Hydraulic & Pneumatic</i>	2	Hydraulic & Pneumatic System
207.	<i>Sistem Kompresor & Pemeliharaan Pompa</i>	1	Compressor System & Pump Maintenance
208.	<i>Sistem Kontrol DCS & HMI</i>	2	DCS & HMI Control System
209.	<i>Sistem Kontrol Motor Listrik Unit Lontar</i>	3	Lontar Unit Electric Motor Control System
210.	<i>Sistem Kontrol Pembangkit</i>	3	Generator Control System
211.	<i>Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kinerja (SMK3)</i>	1	Performance Safety and Health Management System (SMK3)
212.	<i>Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja</i>	1	Occupational Health Safety Management System
213.	<i>Sistem Pelumas Turbin Uap</i>	4	Steam Turbine Lubricating System
214.	<i>Sistem Pelumasan Alat Berat</i>	1	Machine Lubrication System
215.	<i>Sistem Perencanaan Pemeliharaan Pembangkit</i>	2	Plant Maintenance Planning System
216.	<i>Sistem Proteksi</i>	4	Protection System
217.	<i>Software Testing Fundamentals</i>	1	Software Testing Fundamentals
218.	<i>Spesifikasi Teknis Peralatan Coal Handling</i>	1	Technical Specifications of Coal Handling Equipment
219.	<i>Steam Turbin Operation & Troubleshooting</i>	4	Steam Turbin Operation & Troubleshooting
220.	<i>Stockpile Management</i>	2	Stockpile Management
221.	<i>Stockpile Management & Crushing Plant Untuk Low Rank Coal (LRC)</i>	3	Stockpile & Crushing Plant Management for Low Rank Coal (LRC)
222.	<i>Stockpile Management Dan Fifo Batubara</i>	2	Stockpile Management and Coal Fifo
223.	<i>Strategi & Pengendalian Kualitas Air Boiler Drum</i>	2	Boiler Drum Water Quality Strategy & Control
224.	<i>Strategic Management</i>	1	Strategic Management
225.	<i>Supply Chain Management</i>	10	Supply Chain Management
226.	<i>System Coal & Ash Handling System</i>	4	System Coal & Ash Handling System
227.	<i>Tata Kelola Aset Pembangkitan Bidang Operasi (Operation Management)</i>	4	Operation Management of Generation Assets
228.	<i>Teknik Inpeksi K3</i>	12	OHS Inspection Technique
229.	<i>Teknik Membuat, Menstandarisasi, Dan Menggunakan Larutan</i>	3	Techniques for Making, Standardizing, and Using Solutions
230.	<i>Teknik Pengujian Kimia Dengan Spektrometri UV/VIS Berbasis Kompetensi</i>	3	Chemical Testing Techniques with Competency-Based UV/VIS Spectrometry
231.	<i>Teknik Sipil Dan Perencanaan</i>	2	Civil Engineering and Planning
232.	<i>Teknis Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan</i>	1	Technical First Aid in Accidents
233.	<i>Teori Pembakaran & Analisis Pembakaran</i>	2	Combustion Theory & Combustion Analysis
234.	<i>Thermography</i>	3	Thermography
235.	<i>Train Develop Others For Better Performance</i>	1	Train Develop Others For Better Performance
236.	<i>Training Medium Voltage (Power Circuit Breaker & Switchgear)</i>	1	Training Medium Voltage (Power Circuit Breaker & Switchgear)
237.	<i>Training Scada</i>	1	Training Scada

No.	Nama Pelatihan	Jumlah Total	Training Name
238.	<i>Tribologi & Predictive Maintenance</i>	2	Tribologi & Predictive Maintenance
239.	<i>Trouble Shooting Peralatan Utama & Peralatan Pendukung Coal & Ash Handling</i>	4	Trouble Shooting of Main Equipment & Supporting Equipment Coal & Ash Handling
240.	<i>Troubleshooting Coal Handling System</i>	2	Troubleshooting Coal Handling System
241.	<i>Troubleshooting Pembangkit PLTU</i>	5	PLTU Plant Troubleshooting
242.	<i>Turbin & Generator</i>	3	Turbin & Generator
243.	<i>Turbine Supervisory Instrumentation</i>	2	Turbine Supervisory Instrumentation
244.	<i>Turbine System</i>	1	Turbine System
245.	<i>Vibrasi, Alignment, & Balancing</i>	3	Vibrasi, Alignment, & Balancing
246.	<i>Water Treatment Plant</i>	19	Water Treatment Plant
247.	<i>Welding Argon</i>	2	Welding Argon
248.	<i>Welding Inspection & Quality Control</i>	1	Welding Inspection & Quality Control
249.	<i>Welding Inspector</i>	1	Welding Inspector
250.	<i>Welding Technology And Piping System</i>	7	Welding Technology And Piping System
251.	<i>Wiring Diagram</i>	1	Wiring Diagram
252.	<i>Work Planning And Controlling</i>	1	Work Planning And Controlling
Simulator			
1.	Simulator PLTD/PLTMG	59	Simulator PLTD/PLTMG
2.	Simulator PLTU	48	Simulator PLTU
Supporting			
1.	<i>Advance M. Excel 2013</i>	11	Advance M. Excel 2013
2.	<i>Akuntansi Dan Keuangan</i>	2	Accounting and Finance
3.	<i>Akuntansi Dan Keuangan Lanjutan</i>	2	Following Accounting and Finance
4.	<i>Akuntansi Pajak</i>	1	Tax Accounting
5.	<i>Aturan Pajak Terbaru, Perencanaan Pajak & Penanganan Perselisihan Pajak</i>	2	Latest Tax Rules, Tax Planning & Tax Dispute Handling
6.	<i>Autocad P & ID</i>	2	Autocad P & ID
7.	<i>Awareness ISO 27001:2022</i>	11	Awareness ISO 27001:2022
8.	<i>Awareness ISO 37001:2016</i>	22	Awareness ISO 37001:2016
9.	<i>Bahasa Inggris Kelas Advanced</i>	8	English Advanced Class
10.	<i>Bahasa Inggris Kelas Basic</i>	57	English Basic Class
11.	<i>Bahasa Inggris Kelas Upper</i>	33	English Upper Class
12.	<i>Basic Human Resource Management</i>	3	Basic Human Resource Management
13.	<i>Basic Microsoft Excel</i>	11	Basic Microsoft Excel
14.	<i>Bimtek Capacity Building</i>	3	Capacity Building Technical Assistance
15.	<i>Business Inteligence</i>	2	Business Inteligence
16.	<i>Budgeting</i>	2	Budgeting
17.	<i>Capacity Building</i>	176	Capacity Building
18.	<i>Cash Management</i>	3	Cash Management
19.	<i>Coaching Mentoring And Counseling</i>	1	Coaching Mentoring And Counseling
20.	<i>Communication Made Easy</i>	32	Communication Made Easy
21.	<i>Communication Skill</i>	15	Communication Skill
22.	<i>Create Accounting Transaksi & Estimasi Biaya</i>	2	Create Accounting Transactions & Cost Estimates
23.	<i>Dasar Pajak</i>	2	Tax Basis
24.	<i>Dasar-Dasar Keuangan Dan Akuntansi Dasar</i>	2	Fundamentals of Finance and Basic Accounting
25.	<i>Design Dan Tata Kelola Ruang</i>	1	Room Design and Management
26.	<i>Design Grafis</i>	11	Graphic Design
27.	<i>Design Grafis & Advertising</i>	2	Graphic Design & Advertising

No.	Nama Pelatihan	Jumlah Total	Training Name
28.	Diklat Dasar-Dasar Audit	1	Training on Audit Basics
29.	<i>Effective Business Communication</i>	6	Effective Business Communication
30.	<i>Effective Communication Skill</i>	4	Effective Communication Skill
31.	<i>Effective Negotiation Skill</i>	3	Effective Negotiation Skill
32.	<i>Empowering Leadership & Communication Skill</i>	1	Empowering Leadership & Communication Skill
33.	Evaluasi Struktur Organisasi	3	Organizational Structure Evaluation
34.	<i>Financial Modeling</i>	9	Financial Modeling
35.	<i>Financial Statement Analysis</i>	1	Financial Statement Analysis
36.	<i>General Affair Management</i>	1	General Affair Management
37.	<i>Higher Meaningful Living</i>	118	Higher Meaningful Living
38.	<i>Human Resource Management</i>	21	Human Resource Management
39.	<i>Indonesia Corporate Culture Day</i>	1	Indonesia Corporate Culture Day
40.	Internal Audit ISO/IEC 17025 : 2017	2	Internal Audit ISO/IEC 17025 : 2017
41.	<i>Inventory Dan Tata Kelola Gudang</i>	1	Inventory and Warehouse Governance
42.	<i>Inventory Management</i>	2	Inventory Management
43.	ISO 14001	2	ISO 14001
44.	ISO 26000 CSR	1	ISO 26000 CSR
45.	Kehumasan & Protokoler	2	Public Relations & Protocol
46.	<i>Knowledge Management</i>	8	Knowledge Management
47.	Komunikasi Dan Psikologi Audit	1	Communication and Audit Psychology
48.	<i>Leadership</i>	3	Leadership
49.	<i>Leadership & Troubleshooting Coal Handling System</i>	5	Leadership & Troubleshooting Coal Handling System
50.	<i>Leadership Skill For Supervisor & Manager</i>	8	Leadership Skill For Supervisor & Manager
51.	<i>LSM & Digital learning</i>	5	LSM & Digital learning
52.	<i>Management Development Program</i>	14	Management Development Program
53.	Manajemen Arsip Dan Dokumen Elektronik	1	Electronic Records and Document Management
54.	Manajemen Arsip Dan Tata Kelola Ruangan	1	Records Management and Room Management
55.	Manajemen Dan Pengendalian Dokumen Kontrak	1	Contract Document Management and Control
56.	Manajemen Fasilitas	1	Facility Management
57.	Manajemen Kesekretariatan & Sekretaris	5	Secretarial Management & Secretary
58.	Manajemen Keuangan	2	Financial Management
59.	Manajemen Risiko	1	Risk Management
60.	Manajemen SDM dan Administrasi Personalia	2	HC Management and Personnel Administration
61.	Manajemen Sumber Daya Manusia	4	Human Capital Management
62.	Manajemen <i>Working, Planing, Controlling</i> (WPC)	1	Working, Planning, Controlling (WPC) Management
63.	Mengelola Pertumbuhan Usaha Bagi UKM Mitra Binaan Program CSR	3	Managing Business Growth for SMEs Assisted by CSR Programs
64.	<i>Microsoft Excel For Basic To Advance</i>	5	Microsoft Excel For Basic To Advance
65.	<i>Negotiation Skill For Procurement</i>	3	Negotiation Skill For Procurement
66.	<i>Office Management</i>	2	Office Management
67.	Pelatihan Masa Persiapan Pensiun (Semangat Muda Berjwa Wirausaha)	2	Retirement Preparation Training (Young Spirit of Entrepreneurship)
68.	Pelatihan Pendidikan Mental dan Disiplin	84	Mental Education and Discipline Training
69.	Pengadaan Barang & Jasa	9	Procurement of Goods & Services
70.	Pengelolaan Anggaran Lanjutan	2	Advanced Budget Management
71.	Pengelolaan Pergudangan	2	Warehouse Management
72.	Pengembangan Kompetensi, Pengembangan Diri, Dan Orang Lain	1	Competency Development, Self-Development, and Others

No.	Nama Pelatihan	Jumlah Total	Training Name
73.	Perencanaan Anggaran	2	Budget Planning
74.	Perencanaan Dan Pengendalian Dokumen Kontrak	1	Contract Document Planning and Control
75.	Perpajakan Komprehensif <i>Driven Brevet A-B</i>	2	Driven Brevet A-B Comprehensive Taxation
76.	Perpajakan Untuk HRD	1	Taxation for HRD
77.	<i>Supervisor Development</i>	2	Supervisor Development
78.	Tata Kelola Gudang & Sparepart Management	2	Warehouse & Spare Parts Management
79.	Tata Laksana Pergudangan	1	Warehouse Management
80.	<i>Teamwork Building</i>	5	Teamwork Building
81.	<i>Train Develop Others For Better Performance</i>	1	Train Develop Others For Better Performance
82.	<i>Training Of Trainer</i>	51	Training Of Trainer
83.	<i>Warehouse & Inventory Control (Tools) Management</i>	2	Warehouse & Inventory Control (Tools) Management
84.	<i>Warehouse Management</i>	17	Warehouse Management
85.	<i>Warehouse Management System And Logistic</i>	1	Warehouse Management System And Logistic
86.	<i>Warehouse Officer Program</i>	2	Warehouse Officer Program

Sertifikasi Profesi O&M dan Sertifikasi Penunjang K3/SIO

Upaya peningkatan kualitas SDM Perusahaan dilakukan pula melalui upaya pengakuan kompetensi melalui sertifikasi profesi yaitu melalui Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan maupun sertifikasi Penunjang K3.

Adapun rekapitulasi kebutuhan pelaksanaan pemenuhan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sampai dengan Bulan Desember 2023

- Sertifikasi Profesi O&M (Pemenuhan Kebutuhan Unit Kerja)**
 Pada Bulan Desember 2023 pemenuhan sertifikasi O&M atau SKTTK menjadi 99,91%, hal ini dikarenakan ada perpindahan posisi dan belum memasuki masa 6 bulan untuk disertifikasi.
- Kebutuhan Pemenuhan Sertifikasi Personil Penunjang Pengembangan Usaha (IUJPTL)**
 Pada bulan Desember 2023 telah dipenuhi untuk sertifikasi kompetensi untuk pemenuhan ijin usaha pembangunan dan pemasangan unit Pembangkit (EPC) dengan keterangan sebagai berikut :

O&M Professional Certification and OHS/SIO Support Certification

Efforts to improve the quality of the Human Capital of the Company are also conducted by recognizing competence through professional certification, namely through Competency Certification of Electricity Engineering Personnel and OHS Supporting certification.

The recapitulation of the needs for the implementation of the fulfillment of the Electricity Engineering Competency Certification until December 2023

- O&M Professional Certification (Fulfillment of Work Unit Needs).**
 In December 2023, the fulfillment of O&M or SKTTK certification became 99.91%, this was due to a position transfer and had not entered the 6-month period to be certified.
- Certification Fulfillment Needs of Personnel Supporting Business Development (IUJPTL)**
 In December 2023, it was fulfilled for competency certification for the fulfillment of business licenses for the construction and installation of Power Plant units (EPC) with the following information:

Sertifikat Badan Usaha Business Entity Certificate	Jenis Pembangkitnya Type of Generation	Bidang Field	Sertifikasi Kompetensi Competency Certification	Status	
O&M	PLTU	Operasi Operation	PJT	Tersedia Available	
			TT	Tersedia Available	
		Pemeliharaan Maintenance	PJT	Tersedia Available	
			TT	Tersedia Available	
		PLTG	Operasi Operation	PJT	Tersedia Available
				TT	Tersedia Available
	Pemeliharaan Maintenance		PJT	Tersedia Available	
			TT	Tersedia Available	
	PLTGU		Operasi Operation	PJT	Tersedia Available
				TT	Tersedia Available
		Pemeliharaan Maintenance	PJT	Tersedia Available	
			TT	Tersedia Available	
		PLTP	Operasi Operation	PJT	Tersedia Available
				TT	Tersedia Available
	Pemeliharaan Maintenance		PJT	Tersedia Available	
			TT	Tersedia Available	
	PLTD		Operasi Operation	PJT	Tersedia Available
				TT	Tersedia Available
		Pemeliharaan Maintenance	PJT	Tersedia Available	
			TT	Tersedia Available	
		PLTA	Operasi Operation	PJT	Tersedia Available
				TT	Tersedia Available
	Pemeliharaan Maintenance		PJT	Tersedia Available	
			TT	Tersedia Available	
PLTMG	Operasi Operation		PJT	Tersedia Available	
			TT	Tersedia Available	
	Pemeliharaan Maintenance	PJT	Tersedia Available		
		TT	Tersedia Available		
	PLTS	Operasi Operation	PJT	Tersedia Available	
			TT	Tersedia Available	
Pemeliharaan Maintenance		PJT	Tersedia Available		
		TT	Tersedia Available		
EPC		PLTU	Operasi Operation	PJT	Tersedia Available
				TT	Tersedia Available
	Pemeliharaan Maintenance		PJT	Tersedia Available	
			TT	Tersedia Available	
	PLTG		Operasi Operation	PJT	Tersedia Available
				TT	Tersedia Available
		Pemeliharaan Maintenance	PJT	Tersedia Available	
			TT	Tersedia Available	
		PLTD	Operasi Operation	PJT	Tersedia Available
				TT	Tersedia Available
	Pemeliharaan Maintenance		PJT	Tersedia Available	
			TT	Tersedia Available	

Sertifikat Badan Usaha Business Entity Certificate	Jenis Pembangkitnya Type of Generation	Bidang Field	Sertifikasi Kompetensi Competency Certification	Status	
PLTA	Operasi Operation		PJT	Tersedia Available	
			TT	Tersedia Available	
	Pemeliharaan Maintenance		PJT	Tersedia Available	
			TT	Tersedia Available	
	PLTMG	Operasi Operation		PJT	Tersedia Available
				TT	Tersedia Available
Pemeliharaan Maintenance		PJT	Tersedia Available		
		TT	Tersedia Available		
PLTS	Operasi Operation		PJT	Tersedia Available	
			TT	Tersedia Available	
	Pemeliharaan Maintenance		PJT	Tersedia Available	
			TT	Tersedia Available	

• **Sertifikasi Penunjang K3**

Proses pelaksanaan sertifikasi penunjang K3 mengalami perubahan secara sistem dimana proses pelaksanaannya sebagian ada yang dapat dilakukan secara *online*, dan sebagian lagi masih dengan sistem *blended learning* (saat uji diwajibkan praktek). Proses pelaksanaan sertifikasi pada tahun 2023 diprioritaskan tetap dilakukan secara *online* kemudian jika tidak dimungkinkan maka akan dilakukan secara IHT pada unit kerjanya.

Berikut adalah rekapitulasi pelaksanaan pemenuhan sertifikasi penunjang K3 pada tahun 2023:

• **OHS Supporting Certification**

The process of implementing OHS supporting certification has undergone a systemic change where some of the implementation process can be done online, and some are still using a blended learning system (practice is required during the test). The process of implementing certification in 2023 was prioritized online, then if it was not possible, it will be carried out by IHT in the work unit.

The following is a recapitulation of the implementation of the fulfillment of OHS support certification in 2023:

No.	Unit	Nama Pelatihan Training Name	Jumlah Total	Training Name
1.	Adipala	Ahli K3 Umum	1	General OHS Expert
		Juru Las Kelas 2 SMAW	2	SMAW Class 2 Welder
		SIO : <i>Dump Truck</i>	1	SIO : Dump Truck
		SIO : Operator Alat Berat	2	SIO: Heavy Equipment Operator
		SIO : Operator <i>Ash Handling</i>	2	SIO: Ash Handling Operator
		SIO : Operator <i>Belt Conveyor</i>	7	SIO: Belt Conveyor Operator
		SIO : Operator <i>Dump Truck</i>	1	SIO: Dump Truck Operator
		SIO : Operator <i>Forklift</i> Kelas II	2	SIO: Forklift Operator Class II
		SIO : Operator <i>Stre</i>	2	SIO: Stre Operator
		Supervisor Perancah	2	Scaffolding Supervisor
		TKBT Tingkat II - Kemenaker RI	1	TKBT Level li - Ministry of Manpower RI
2.	Ambon	Ahli K3 Listrik	1	Electrical Safety Expert
		Juru Las Kelas 2 Smaw	1	SMAW Class 2 Welder
		K3 Operator <i>Overhead Crane</i> Kelas II	1	OHS Overhead Crane Operator Class II
		K3 Damkar Kelas D	2	Class D Firefighters OHS
		Petugas K3	1	OHS Supervisors

No.	Unit	Nama Pelatihan Training Name	Jumlah Total	Training Name
3.	Asam-Asam	Operator <i>Bulldozer</i>	4	Operator Bulldozer
		Operator <i>Dump Truck</i>	3	Operator Dumptruck
		Operator <i>Excavator</i>	4	Operator Excavator
		Operator <i>Stacker Reclaimer</i>	8	Operator Stacker Reclaimer
		Operator <i>Wheel Loader</i>	4	Operator Wheel Loader
4.	Bali	K3 Operator <i>Travelling Crane</i> Kelas 1	4	OHS Traveling Crane Operator Class 1
		Teknisi K3 Listrik	8	Electrical Safety Technician
5.	Barru	Ahli K3 Umum	1	General OHS Expert
		Operator K3 Excavator	4	Excavator OHS Operator
		Petugas P3K	4	First Aid Personnel
6.	BauBau	K3 Operator <i>Overhead Crane</i> Kelas II	1	OHS Overhead Crane Operator Class II
		Teknisi K3 Listrik	1	Electrical Safety Technician
7.	Berau	Ahli K3 Listrik	1	Electrical Safety Expert
		Ahli K3 Umum	2	General OHS Expert
8.	Biak	Ahli K3 Listrik	1	Electrical Safety Expert
		K3 Operator <i>Forklift</i> Kelas II	1	OHS Forklift Operator Class II
		Petugas P3K	1	First Aid Personnel
		Petugas Peran Pemadam Kebakaran Level D	1	Level D Firefighter Role Officer
		Refreshment Sertifikasi Ahli K3 Umum	1	General OHS Materials Expert Certification Refreshment
		Teknisi K3 Bidang Pesawat Tenaga & Produksi	1	Power & Production Aircraft Safety Technician
9.	BMPP Nusantara 1	Petugas P3K	1	First Aid Personnel
10.	Cilegon	K3 Operator <i>Forklift</i> Kelas II	3	OHS Forklift Operator Class II
		K3 Operator <i>Overhead Crane</i> Kelas II	2	OHS Overhead Crane Operator Class II
		K3 Teknisi Listrik	1	OHS Electrician
		Petugas K3 Bidang Kimia	6	Chemical Field Safety Officer
		Teknisi K3 Listrik	3	Electrical Safety Technician
11.	Grati	Ahli K3 Umum	1	General OHS Expert
		K3 Operator <i>Forklift</i> Kelas II	3	OHS Forklift Operator Class II
		K3 Operator <i>Overhead Crane</i> Kelas II	3	OHS Forklift Operator Class II
		K3 Pemadam Kebakaran Level D	3	OHS Firefighting Level D
		K3 Petugas Peran Kebakaran Kelas D	3	Class D Fire Role Officer OHS
		Petugas K3 Utama Ruang Terbatas	4	Confined Space Main Safety Officer
		Teknisi K3 Listrik	2	Electrical Safety Technician
		Tenaga Kerja Pada Ketinggian (TKPK) Tingkat 1	4	Manpower At Height (TKPK) Level 1
12.	Holtekamp	K3 Operator <i>Overhead Crane</i> Kelas III	2	OHS Overhead Crane Operator Class III
		K3 Pemadam Kebakaran Level D	6	Level D Firefighting OHS
13.	Jayapura	K3 Pemadam Kebakaran Level D	10	Level D Firefighting OHS
14.	Jeranjang	Ahli K3 Umum	1	General OHS Expert
		K3 Operator <i>Overhead Crane</i> Kelas II	1	OHS Overhead Crane Operator Class II
		Petugas K3 Bidang Kimia	2	Chemical Field Safety Officer
		Teknisi K3 Listrik	1	Electrical Safety Technician

No.	Unit	Nama Pelatihan Training Name	Jumlah Total	Training Name
15.	Kalbar 1	Ahli K3 Muda Lingkungan Kerja	1	Young Work Environment OHS Expert
		Damkar A	2	Damkar A
		Damkar Level A	2	Damkar Level A
		K3 Operator <i>Bulldozer</i>	6	OHS Bulldozer Operator
		K3 Operator <i>Bulldozer</i>	1	OHS Bulldozer Operator
		K3 Operator <i>Loader</i>	3	OHS Loader Operator
		K3 Overhead <i>Crane</i>	6	OHS Over Head Crane
		K3 Peran Kebakaran Paket C	3	OHS Fire Role Package C
		K3 Peran Kebakaran Paket D	6	OHS Fire Role Package D
		Petugas K3 Kimia	1	Chemical Safety Officer
		Petugas Peran Pemadam Kebakaran Level C	1	Level C Firefighter Role Officer
		Petugas Peran Pemadam Kebakaran Level D	1	Level D Firefighter Role Officer
		Tenaga Kerja Pada Ketinggian (TKPK) Tingkat 1	1	Labor at Height (TKPK) Level 1
		16.	Kamojang	Ahli K3 Muda
Ahli K3 Muda BNSP	6			Young OHS Expert Bnsp
Ahli K3 Umum	1			General OHS Expert
Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)	4			First Aid Officer (P3K)
17.	Kantor Pusat	Ahli K3U	2	OHSU Expert
		TKBT Tingkat II - Kemenaker RI	1	TKBT Level II - Ministry of Manpower RI
18.	Labuan	Ahli K3 Muda	2	Young OHS Expert
		Ahli K3 Umum	1	General OHS Expert
		K3 Pemadam Kebakaran Level D	4	Level D Firefighting OHS
		Operator K3 <i>Excavator</i>	4	Excavator OHS Operator
		Teknisi K3 Listrik	3	Electrical Safety Technician
19.	Labuhan Angin	Ahli K3 Umum	6	General OHS Expert
		Ahli K3 Umum	1	General AK3
		K3 Operator <i>Stacker Reclaimer</i>	5	OHS Operator Stacker Reclaimer
		K3 Ship Unloader Kelas I	4	OHS Ship Unloader Class I
		Operator K3 <i>Excavator</i> Unit Labuhan Angin	4	Excavator OHS Operator Labuhan Angin Unit
		Petugas K3 Kimia	4	Chemical Safety Officer
20.	Lontar	Ahli K3 Bejana Uap Tekan	1	Steam Pressure Vessel OHS Expert
		Ahli K3 Lingkungan Kerja	5	Work Environment OHS Expert
		Juru Las Kelas 1 SMAW	1	SMAW Class 1 Welder
		Juru Las Kelas 2 SMAW	2	SMAW Class 2 Welder
		K3 Operator Bulldozer	4	OHS Bulldozer Operator
		K3 Operator Forklift Kelas I	5	OHS Forklift Operator Class I
		K3 Pesawat Uap dan Bejana Tekan	3	OHS Steam and Pressure Vessels
		K3 Supervisi Perancah	2	OHS Scaffolding Supervision
		Operator K3 Umum	3	General OHS Operator
		Petugas K3 Kimia	4	Chemical Safety Officer
		Petugas P3K	1	First Aid Personnel
		Tenaga Kerja Bangunan Tingkat Tinggi (TKBT) Tingkat 2 Unit Lontar	2	High Level Building Labor (TKBT) Level 2 Unit Lontar
TKBT Tingkat II - Kemenaker Ri	2	TKBT Level II - Ministry of Manpower RI		

No.	Unit	Nama Pelatihan Training Name	Jumlah Total	Training Name
21.	Manokwari	Petugas P3K	1	First Aid Personnel
		Ahli K3 Listrik	1	Electrical Safety Expert
		Juru Las SMAW Kelas Iii	1	SMAW Welder Class III
22.	Merauke	K3 Operator Forklift Kelas Ii	1	OHS Forklift Operator Class II
		K3 Overhead Crane Kelas Iii	1	OHS Overhead Crane Class III
		K3 Pemadam Kebakaran Level D	1	Level D Firefighting OHS
		Petugas P3K	1	First Aid Personnel
23.	MPP Papua	Ahli K3 Muda	1	Young OHS Expert
		K3 Ahli Muda	1	OHS Young Experts
24.	Nabire	K3 Operator <i>Forklift</i> Kelas Ii	1	OHS Forklift Operator Class II
		Petugas P3K	1	First Aid Personnel
25.	Nias	Ahli K3 Listrik	2	Electrical Safety Expert
		Ahli K3 Umum	1	General OHS Expert
		Juru Las Kelas 2 SMAW	1	SMAW Class 2 Welder
		Teknisi K3 Listrik	1	Electrical Safety Technician
26.	Nusa Penida	Ahli K3 Listrik	1	Electrical Safety Expert
		Juru Las Kelas 1 SMAW	1	SMAW Class 1 Welder
		Operator K3 <i>Forklift</i> Kelas 2	2	OHS Forklift Operator Class 2
		TKBT Tingkat II	1	TKBT Level II
27.	OSU	AK3U Kemnaker RI	1	AK3U Ministry of Manpower RI
		Ahli K3 Listrik	1	Electrical Safety Expert
		K3 Operator <i>Forklift</i> Kelas II	2	OHS Forklift Operator Class II
28.	Pangkalan Susu	K3 Operator <i>Loader</i>	2	OHS Loader Operator
		Operator Belt <i>Conveyor</i>	12	Operator Belt Conveyor
		Operator K3 <i>Ship Unloader</i> Kelas 1	6	Ship Unloader OHS Operator Class 1
		Petugas P3K	2	First Aid Personnel
		Ahli K3 Listrik	1	Electrical Safety Expert
		Juru Las Kelas 2 SMAW	3	SMAW Class 2 Welder
		K3 Operator <i>Belt Conveyor</i>	6	OHS Belt Conveyor Operator
		K3 Operator <i>Dump Truck</i>	4	OHS Dump Truck Operator
29.	Pelabuhan Ratu	K3 Operator <i>Forklift</i>	1	OHS Forklift Operator
		K3 Operator <i>Loader</i>	5	OHS Loader Operator
		K3 Operator <i>Ship Unloader</i>	1	OHS Operator Ship Unloader
		K3 Operator <i>Stackreclaimer</i>	4	OHS Operator Stackreclaimer
		K3 Ship <i>Unloader</i> Kelas I	3	OHS Ship Unloader Class I
		Petugas K3 Kimia	6	Chemical Safety Officer
		K3 Operator <i>Forklift</i> Kelas II	1	OHS Operator Forklift Class II
		Petugas Peran Pemadam Kebakaran Level D	11	Level D Firefighter Role Officer
32.	Sanggau	Juru Las Kelas 2 SMAW	1	SMAW Class 2 Welder
		K3 Operator <i>Overhead Crane</i> Kelas II	1	OHS Operator Overhead Crane Class Ii
		Petugas Peran Pemadam Kebakaran Level D	10	Level D Firefighter Role Officer
		Teknisi K3 Listrik	1	Electrical Safety Technician

No.	Unit	Nama Pelatihan Training Name	Jumlah Total	Training Name
33.	Semarang	Ahli K3 Umum	1	General OHS Expert
		K3 Teknisi Bekerja Pada Bangunan Tinggi (TKBT) Tingkat II	2	OHS Technician Working On Tall Buildings (TKBT) Level II
		Petugas K3 Kimia	4	Chemical Safety Officer
		Petugas K3 Utama Ruang Terbatas	2	Confined Space Main Safety Officer
		Petugas P3K	5	First Aid Personnel
		Petugas Peran Pemadam Kebakaran Level D	4	Level D Firefighter Role Officer
		Tenaga Kerja Bangunan Tinggi (TKBT) Tingkat II	6	High-Rise Building Labor (TKBT) Level II
		Tenaga Kerja Bangunan Tinggi Tingkat II	1	High-Rise Building Labor Level II
		TKBT Tingkat II	1	TKBT Level II
34.	Sintang	Ahli K3 Listrik	1	Electrical Safety Expert
		K3 Operator <i>Overhead Crane</i> Kelas II	4	OHS Operator Overhead Crane Class II
		Operator K3 Pesawat Uap Kelas I	9	Steamship OHS Operator Class I
		Petugas K3 Bidang Kimia	1	Chemical Field Safety Officer
		Petugas P3K	4	First Aid Personnel
		Teknisi K3 Listrik	1	Electrical Safety Technician
35.	Sorong	K3 Damkar Kelas D	2	Class D Firefighters
		Petugas P3K	1	First Aid Personnel
		Refreshment Sertifikasi Ahli K3 Umum	1	General OHS Materials Expert Certification Refreshment
36.	Suralaya 1-7	K3 Confined Space Madya	2	OHS Confined Space Madya
		Operator K3 Bulldozer	6	OHS Bulldozer Operator
		Teknisi K3 Listrik	1	Electrical OHS Technician
		Tenaga Kerja pada Ketinggian (TKPK)	3	Worker at Heights
		K3 Operator Forklift	2	Operator OHS Forklift
		K3 Juru Las Kelas 2	2	Class 2 Welder OHS
		K3 Operator <i>Belt Conveyor</i>	7	OHS Belt Conveyor Operators
		K3 Operator <i>Overhead Crane</i> Kelas III	1	OHS Operator Overhead Crane Class III
		K3 Pemadam Kebakaran Level D	8	Level D Firefighting OHS
		K3 Teknisi Listrik	2	OHS Electrical Technician
		Operator K3 <i>Bulldozer</i>	2	OHS Bulldozer Operator
		Operator K3 <i>Dump Truck</i>	2	Operator OHS Dumptruck
		Petugas K3	2	OHS Personnel
		Petugas P3K	2	First Aid Personnel
		Teknisi K3 Bidang Pesawat Angkat dan Angkut	1	Lift And Transport Aircraft Safety Technician
		K3 Operator <i>Overhead Crane</i> Kelas III	1	OHS Operator Overhead Crane C III
Petugas K3	1	OHS Personnel		
Teknisi K3 Listrik	1	Electrical Safety Technician		
37.	Tenau	Ahli K3 Kimia	1	Chemical OHS Expert
		K3 Operator <i>Forklift</i>	1	Forklift Operator OHS
		K3 Operator <i>Forklift</i> Kelas II	1	OHS Operator Forklift Class II
		K3 Operator <i>Overhead Crane</i> Kelas III	2	OHS Operator Overhead Crane Class III
		K3 Pemadam Kebakaran Level D	3	Level D Firefighting OHS
		Petugas P3K	2	First Aid Personnel
		Teknisi K3 Listrik	1	Electrical Safety Technician

No.	Unit	Nama Pelatihan Training Name	Jumlah Total	Training Name
38.	Timika	K3 Pemadam Kebakaran Level D	3	Level D Firefighting OHS
		Petugas P3K	2	First Aid Personnel
		Teknisi K3 Listrik	1	Electrical Safety Technician
39.	Ulumbu	Ahli K3 Listrik	2	Electrical Safety Expert
		Juru Las Kelas III	1	Class II Welder
		Juru Las SMAW Kelas I	2	SMAW Class II Welder
		K3 Operator <i>Overhead Crane</i> Kelas II	2	OHS Operator Overhead Crane Class II
		K3 Pemadam Kebakaran Level D	2	Level D Firefighting OHS
		Pengawas K3 Migas	1	Oil and Gas Safety Supervisor
		Petugas P3K	2	First Aid Personnel

- Selain sertifikasi O&M dan K3, CDB telah memiliki beberapa Pegawai tersertifikasi profesi keahlian baik Nasional atau Internasional. Berikut adalah realisasi pelaksanaan sertifikasi profesi keahlian pegawai PT CDB sampai dengan Desember 2023.

In addition to O&M and K3 certifications, CDB has several employees who are certified in professional skills either nationally or internationally. The following is the realization of the implementation of professional certification of employee expertise PT CDB until December 2023.

No.	Nama Sertifikasi	Skala Scale	Jumlah Total	Certification Name
MRO and O&M				
1.	<i>International Welding Engineer (IWE)</i>	Internasional International	1	International Welding Engineer (IWE)
2.	<i>Vibration Analysis Category I</i>	Internasional International	2	Vibration Analysis Category I
3.	<i>Vibration Analysis Category II</i>	Internasional International	6	Vibration Analysis Category II
4.	<i>Vibration Analysis Category III</i>	Internasional International	1	Vibration Analysis Category III
5.	<i>Infrared Thermography Level I</i>	Internasional International	2	Infrared Thermography Level I
6.	<i>Infrared Thermography Level II</i>	Internasional International	2	Infrared Thermography Level II
7.	<i>Basic Offshore Safety Induction an Emergency Training (BOSIET)</i>	Internasional International	5	Basic Offshore Safety Induction an Emergency Training (BOSIET)
8.	<i>Machine Lubricant Analyst Category II</i>	Internasional International	1	Machine Lubricant Analyst Category II
9.	Calibration Technician	Internasional International	2	Calibration Technician
10.	API 936 Refractory	Internasional International	1	API 936 Refractory
11.	<i>Integrated Solar Photovoltaic (PV) System Designer (TUV)</i>	Internasional International	1	Integrated Solar Photovoltaic (PV) System Designer (TUV)
12.	Pipe Fitter	Internasional International	4	Pipe Fitter
13.	ICML MLA (<i>Management Lubricant</i>) Level 1	Internasional International	2	ICML MLA (Management Lubricant) Level 1
14.	NDT Level 1 UT MT PT	Nasional National	14	NDT Level 1 UT MT PT
15.	NDT Level 2 MT PT	Nasional National	6	NDT Level 2 MT PT
16.	NDT Level 2 UT	Nasional National	1	NDT Level 2 UT

No.	Nama Sertifikasi	Skala Scale	Jumlah Total	Certification Name
17.	H2S Migas	Nasional National	15	H2S Migas
18.	<i>Contractor Safety Management System</i>	Nasional National	35	Contractor Safety Management System
19.	<i>Balancing Rotating Machinery</i>	Nasional National	1	Balancing Rotating Machinery
20.	Manajer Energi	Nasional National	3	Energy Manager
21.	Pengawas Instrumentasi	Nasional National	1	Instrumentation Supervisor
22.	Teknisi Instrumentasi Tingkat 1	Nasional National	7	Instrumentation Technician Level 1
23.	<i>Blasting Coating Operator Muda</i>	Nasional National	1	Junior Blasting Coating Operator
24.	<i>Cathodic Protection Tester Level 1</i>	Nasional National	1	Cathodic Protection Tester Level 1
25.	<i>Remote Pilot Drone</i>	Nasional National	3	Remote Pilot Drone
26.	<i>Welding Inspector</i>	Nasional National	6	Welding Inspector
27.	<i>Air Compressor Atlas Copco</i>	Nasional National	17	Air Compressor Atlas Copco
28.	<i>Life Cycle Assessment</i>	Nasional National	6	Life Cycle Assessment
29.	Pengawas Operasional Pertama	Nasional National	3	First Operations Supervisor
30.	Pengawas Operasional Madya	Nasional National	2	Associate Operations Supervisor
31.	Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Limbah B3 (PLB3)	Nasional National	23	Monitoring and Analysis of Hazardous Waste Management (PLB3)
32.	Penanggung Jawab Operasional Pengelolaan Air Limbah (POPAL)	Nasional National	41	Person in Charge of Waste Water Management Operations (POPAL)
33.	Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara (POIPPU)	Nasional National	12	Person in Charge of Air Pollution Control Installation Operations (POIPPU)
34.	Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA)	Nasional National	14	Person in Charge of Water Pollution Control (PPPA)
35.	Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU)	Nasional National	21	Person in Charge of Air Pollution Control (PPPU)
36.	Pengelolaan Lingkungan Hidup PPU & POIPPU	Nasional National	3	Environmental Management PPU & POIPPU
37.	Penanggung Jawab Pencemaran Air Limbah (PPPAL)	Nasional National	3	Person in Charge of Wastewater Pollution (PPPAL)
38.	Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara (POPPU)	Nasional National	5	Person in Charge of Air Pollution Control Installation Operations (POPPU)
39.	Pengawas Operasional Pertama (POP) Pada Pertambangan	Nasional National	3	First Operational Supervisor (POP) in Mining
40.	Auditor ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan	Nasional National	17	ISO 14001:2015 Environmental Management System Auditor
41.	Penghitungan Nilai Daur Hidup (BNSP LCA Level Manajer)	Nasional National	1	Calculation of Life Cycle Value (BNSP LCA Level Manager)
42.	Penghitungan Nilai Daur Hidup (BNSP LCA Level Operator)	Nasional National	2	Calculation of Life Cycle Value (BNSP LCA Level Operator)
43.	Sertifikasi Petugas Pengambil Contoh Uji Batubara	Nasional National	2	Certification of Coal Test Samplers
44.	SKTTK Teknik Instrumentasi Migas	Nasional National	2	SKTTK Oil and Gas Instrumentation Engineering
45.	SKTTK Teknik Listrik Migas	Nasional National	4	SKTTK Oil and Gas Electricity Engineering

No.	Nama Sertifikasi	Skala Scale	Jumlah Total	Certification Name
Supporting				
1.	<i>GRI Standard Certification</i>	Internasional International	1	GRI Standard Certification
2.	<i>Certified International Professional Negotiator</i>	Internasional International	4	Certified International Professional Negotiator
3.	<i>Certified International Procurement Professional (CIPP)</i>	Internasional International	2	Certified International Procurement Professional (CIPP)
4.	<i>Certified International Supply Chain Professional (CISCP)</i>	Internasional International	2	Certified International Supply Chain Professional (CISCP)
5.	<i>Certified International Project Manager (CIPM)</i>	Internasional International	2	Certified International Project Manager (CIPM)
6.	<i>Certified Risk Management Officer (CRMO)</i>	Internasional International	3	Certified Risk Management Officer (CRMO)
7.	<i>Qualified Risk Management Officer (QRMO)</i>	Internasional International	2	Qualified Risk Management Officer (QRMO)
8.	<i>Project Management Profesional</i>	Internasional International	1	Project Management Profesional
9.	<i>Asset Management</i>	Internasional International	9	Asset Management
10.	<i>Certified Industrial Relation Manager (CIRM)</i>	Nasional National	1	Certified Industrial Relation Manager (CIRM)
11.	<i>HR Staff Administration</i>	Nasional National	12	HR Staff Administration
12.	<i>Human Resource Supervisor BNSP</i>	Nasional National	2	Human Resource Supervisor BNSP
13.	<i>Audit Operasional & Asesmen</i>	Nasional National	2	Operational Audit & Assessment
14.	<i>Supply Chain Management</i>	Nasional National	5	Supply Chain Management
15.	<i>Supervisor Sumber Daya Manusia</i>	Nasional National	13	Human Capital Supervisor
16.	<i>Dasar-Dasar Audit</i>	Nasional National	1	Audit Basics
17.	<i>Certified Human Resource Staff</i>	Nasional National	7	Certified Human Resource Staff
18.	<i>Audit Internal 2 Akuntansi dan Keuangan (Auditor Madya)</i>	Nasional National	1	Internal Audit 2 Accounting and Finance (Associate Auditor)
19.	<i>Contract Management Specialist</i>	Nasional National	9	Contract Management Specialist
20.	<i>Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP)</i>	Nasional National	1	Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP)
21.	<i>Certified Organization Development Practitioner (CODP)</i>	Nasional National	2	Certified Organization Development Practitioner (CODP)
22.	<i>Barang/Jasa Pemerintah</i>	Nasional National	13	Government Goods/Services
23.	<i>Certified Remuneration Manager</i>	Nasional National	1	Certified Remuneration Manager
24.	<i>Certified Talent Manager</i>	Nasional National	1	Certified Talent Manager
25.	<i>Cisa Exam Guide & Exam Information System Audit & Control Association</i>	Nasional National	1	Cisa Exam Guide & Exam Information System Audit & Control Association
26.	<i>Cyber Security</i>	Nasional National	2	Cyber Security
27.	<i>Digital Marketing</i>	Nasional National	5	Digital Marketing
28.	<i>Learning Development Manager</i>	Nasional National	1	Learning Development Manager
29.	<i>Profesi Manajemen Risiko</i>	Nasional National	2	Risk Management Profession

No.	Nama Sertifikasi	Skala Scale	Jumlah Total	Certification Name
30.	<i>Project Management</i>	Nasional National	20	Project Management
31.	<i>HR Staff</i>	Nasional National	2	HR Staff
32.	<i>Procurement Officer</i>	Nasional National	6	Procurement Officer
33.	<i>Remote Pilot Casr 107</i>	Nasional National	1	Remote Pilot Casr 107
34.	<i>Sales Manager</i>	Nasional National	4	Sales Manager

Pemanfaatan PLN IP Services *Learning Center*

PLN IP Services *Learning Center* merupakan fasilitas tempat training/pelatihan yang dimiliki oleh Perusahaan dan terletak di Kantor pusat PT PLN Indonesia Power Services. Sebagian besar pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dilangsungkan di Ruang Sinergi dan Ruang Simulator Gedung Pusat Pengembangan Jasa O&M.

PLN IP Services berupaya meningkatkan teknologi yang menunjang kompetensi bagi para karyawannya yang berguna untuk menciptakan efisiensi dalam proses pelatihan dengan menyediakan PLN IP Services *Simulator Room*. Simulator yang dimiliki oleh Perusahaan sangat menunjang berbagai kebutuhan pelatihan terkait pembangkitan secara lebih akurat dan efisien. Proses pembelajaran seakan nyata sehingga kemampuan untuk mengatasi masalah dapat teruji dengan lebih baik, berbagai kendala yang biasa dihadapi di lapangan dapat dipelajari dan diantisipasi.

Biaya Pelatihan

Selama tahun 2023, Perusahaan telah melaksanakan berbagai program peningkatan kompetensi seperti sertifikasi, seminar, lokakarya, dan pelatihan bagi para karyawan. Anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan SDM pada tahun ini mencapai Rp22,5 miliar. Jumlah karyawan yang berpartisipasi dalam pelatihan dan pengembangan kemampuan mencapai 4.289 orang.

Utilization of PLN IP Services *Learning Center*

PLN IP Services *Learning Center* is training facility owned by the Company and is located at the head office of PT PLN Indonesia Power Services. Most of education and training takes place in the Synergy Room and Simulator Room of the O&M Service Development Center Building.

PLN IP Services seeks to improve technology that supports competence for its employees which is useful for creating efficiency in the training process by providing the PLN IP Services *Simulator Room*. The simulator owned by the Company greatly supports various training needs related to generation in a more accurate and efficient manner. The learning process seems real hence the ability to solve problems can be tested better, various obstacles commonly encountered in the field can be studied and anticipated.

Training Cost

During the year, the Company has implemented several competency improvement programs such as certifications, seminars, workshops, and training for employees. The budget allocated for HC development this year reached Rp22.5 billion. The number of employees who participated in training and skills development reached 4,289 people.

Teknologi Informasi

Information Technology

PLN IP Services sangat menyadari, teknologi informasi merupakan faktor utama yang menunjang jalannya usaha Perusahaan. Karena itu, PLN IP Services harus memastikan bahwa Perusahaan memiliki tim yang terbaik dan kuat untuk menyokong pertumbuhan bisnis dan senantiasa berinovasi terhadap teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan bisnis Perusahaan dan berkomitmen untuk terus meningkatkan peran teknologi informasi dalam setiap operasional Perusahaan.

DEPARTEMEN SISTEM INFORMASI

Tugas Pokok:

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis, menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja strategis, mengelola sumber daya dan kompetensi, menerapkan GCG dan *cost effectiveness*, mengelola K3 dan risiko, melakukan inovasi dan perbaikan berkesinambungan serta melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan di bidang kerja Sistem Informasi.

Fungsi:

- Perencanaan dan pengembangan strategi sistem dan teknologi informasi sesuai kebutuhan perusahaan;
- Penetapan peran information teknologi Perusahaan (kebijakan, fungsi, *value*);
- Penyediaan master plan IT sebagai *guideline* dalam pendayagunaan sistem informasi dan pengembangannya;
- Perencanaan kebutuhan sumber daya teknologi informasi (SDM, *software*, data, *hardware*);
- Pengembangan teknologi informasi (data sistem informasi, aplikasi, infrastruktur dan sistem keamanan);
- Perancangan implementasi serta pemeliharaan sistem informasi perusahaan yang terintegrasi yang mampu mendukung upaya perusahaan dalam rangka meningkatkan kinerja;

PLN IP Services is well aware that information technology is the main factor that supports the Company's business operations. Therefore, PLN IP Services must ensure that the Company has the best and strongest team to support business growth and constantly innovate information technology according to the Company's business needs and is committed to continuously increasing the role of information technology in each of the Company's operations.

INFORMATION SYSTEM DEPARTMENT

Main Task:

Formulate and implement policies and technical standardization, develop and implement strategic work plans and programs, manage resources and competencies, implement GCG and cost effectiveness, manage OSH and risk, implement continuous innovation and improvement as well as coordinate with stakeholders in the field of Information System.

Function:

- Planning and development of information technology and system strategies according to corporate needs;
- Determination of the role of the Company's information technology (policies, functions, values);
- Provision of an IT master plan as a guideline in the utilization of information system and its development;
- Planning for information technology resources requirements (HC, software, data, hardware);
- Development of information technology (information system data, application, infrastructure and security system);
- Designing the implementation and maintenance of an integrated company information system capable of supporting the company's efforts to improve performance;

- Pengelolaan *database system* perusahaan berbasis teknologi informasi di dalamnya adalah infrastruktur *knowledge center* Perusahaan;
- Pengelolaan kegiatan identifikasi dan analisis risiko teknologi informasi;
- Pengelolaan *Data Center* dan *Disaster Recovery Center*.

FUNGSIONAL AHLI

Tugas Pokok:

Melakukan kajian atas kinerja Direktorat dan merekomendasikan program-program perbaikannya.

Fungsi:

- Monitoring dan evaluasi secara komprehensif atas efektivitas organisasi, sistem manajemen, proses bisnis, risiko dan program mitigasi serta pencapaian target kinerja Direktorat;
- Pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan aplikasi untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis Direktorat;
- Pemecahan permasalahan pada bidang fungsi Direktorat melalui pendekatan akademis;
- Pendokumentasian konten *knowledge management* pada bidang fungsi Direktorat berupa aspek teknis operasional, aspek pendukung operasional seperti *organization motivation*, *organization environment*, *organization capacity*, aspek teknis produksi, proses internal bisnis dll dalam rangka peningkatan kinerja Perusahaan;
- Pelaksanaan tugas-tugas tertentu sesuai keahlian dan fungsi Direktorat terkait.
- Pelaksanaan tugas keanggotaan dalam tim.

- Information technology-based corporate database system management which includes the Company's knowledge center infrastructure;
- Management of information technology risk identification and analysis activities;
- Management of Data Center and Disaster Recovery Center.

FUNCTIONAL EXPERTS

Main Task:

Reviewing the performance of the Directorate and recommending improvement programs.

Function:

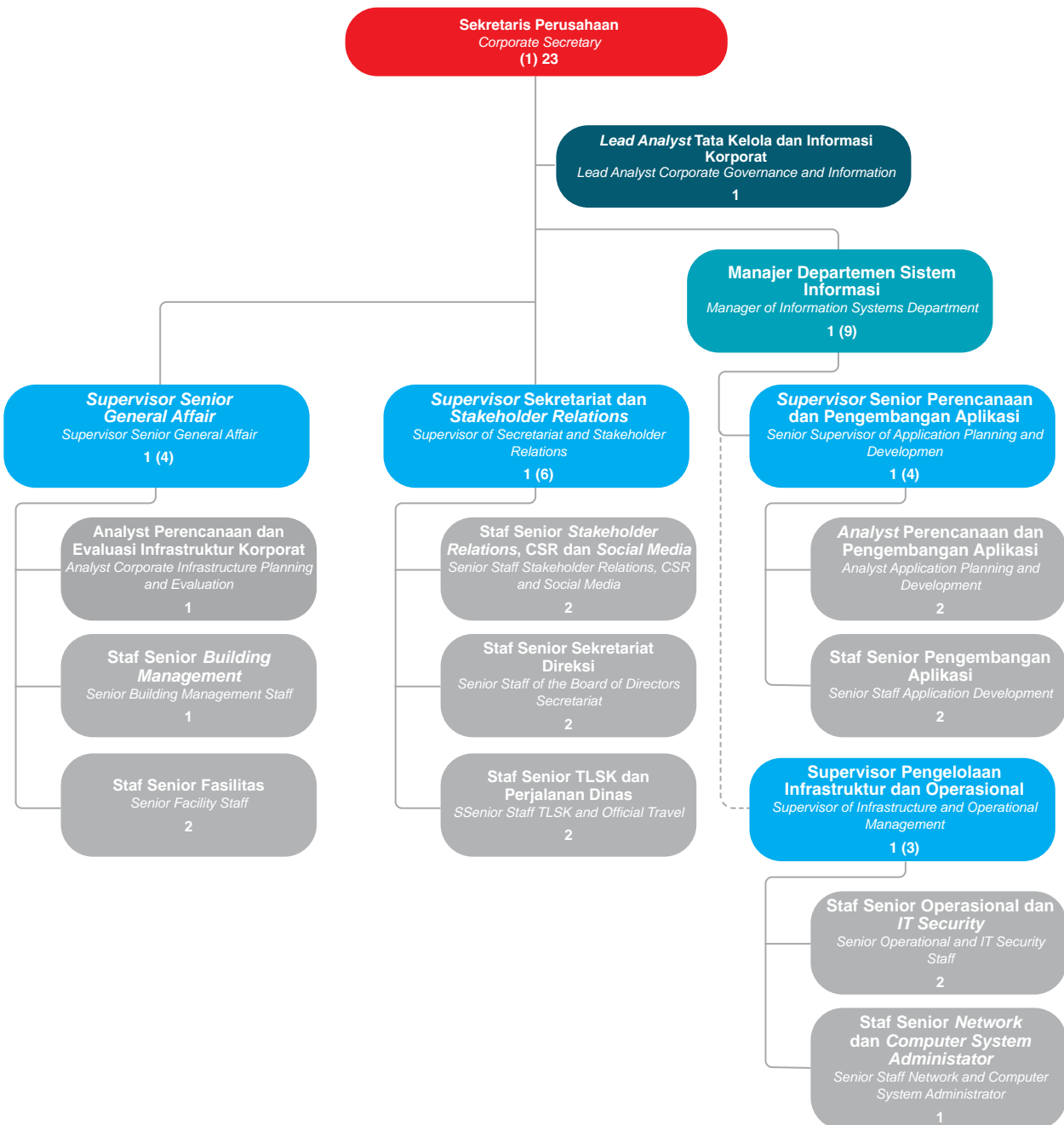
- Comprehensive monitoring and evaluation of organizational effectiveness, management system, business process, risk and mitigation program and achievement of Directorate performance target;
- Utilization of science, technology and applications to produce strategic development steps for the Directorate;
- Solving problems in the functional areas of the Directorate through an academic approach;
- Documentation of knowledge management content in the Directorate's functional areas in the form of operational technical aspects, operational supporting aspects such as organization motivation, organization environment, organization capacity, production technical aspects, internal business process etc. in order to improve the Company's performance;
- Implementation of certain tasks in accordance with the expertise and functions of the relevant Directorate.
- Implementation of membership duties in the team.

Struktur Organisasi Departemen Sistem Informasi

Organizational Structure of Information System Department

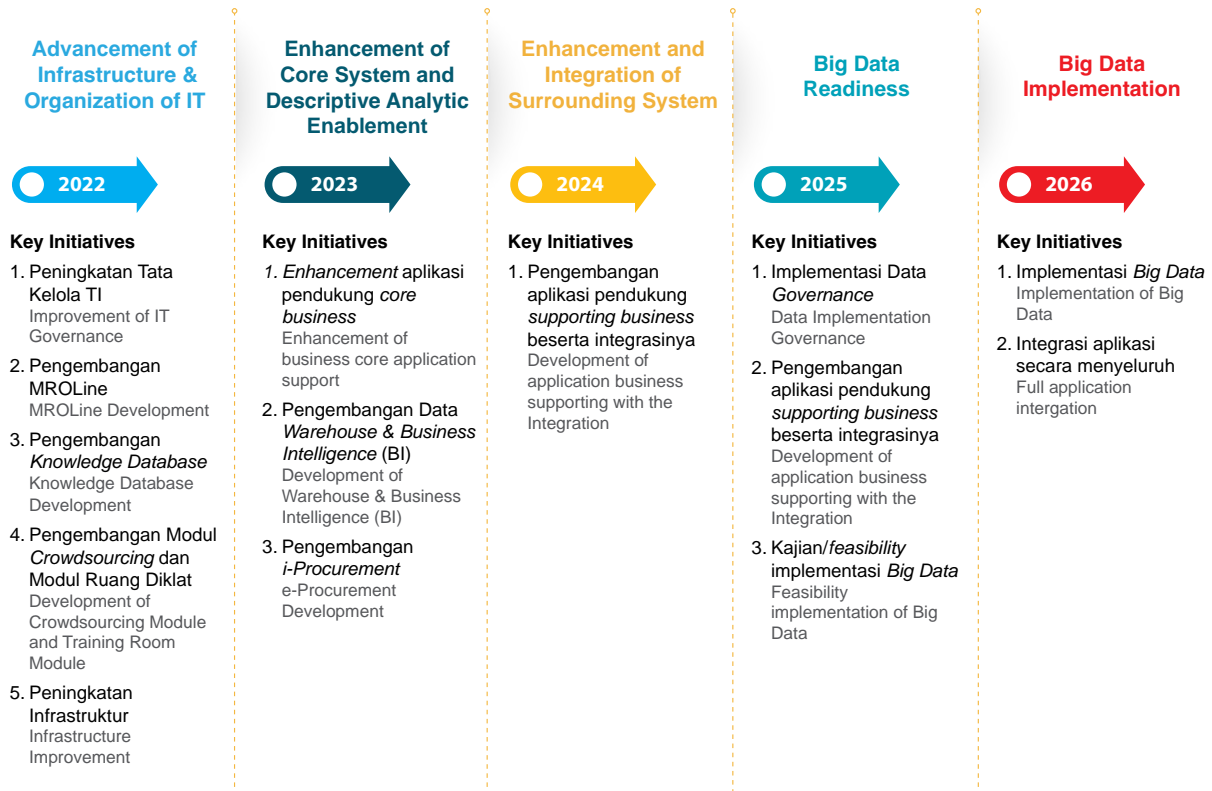
Berdasarkan Keputusan Direksi No.021.K/CDB/IV/2022 tanggal 01 April 2022 berikut merupakan Struktur Organisasi Departemen Sistem Informasi pada tahun 2022.

Based on the Decree of the Board of Directors No.021.K/CDB/IV/2022 dated April 1, 2022, the following is the Organizational Structure of the Information System Department in 2022.



Roadmap Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Infrastructure Roadmap of Information Technology and Communication



Struktur Tata Kelola dan Manajemen TI Cogindo

IT Governance and Management Structure of Cogindo

Sebagai organ pendukung bisnis Perusahaan, TI memerlukan pengelolaan dengan perencanaan yang terstruktur. Untuk menjamin terlaksananya tata kelola TI secara baik, lengkap dan matang, maka Departemen Sistem Informasi harus mempunyai aktivitas yang mencakup seluruh proses TI.

MASTER PLAN TI

Sebagai bentuk komitmen terhadap pengembangan TI, Perusahaan telah menyusun *Master Plan* Teknologi Informasi sebagai pedoman dalam menjalankan program Teknologi Informasi. *Master Plan* disusun agar

As a supporting organ of the Company's business, IT requires management with a structured plan. To ensure the implementation of good, complete and mature IT governance, the Information System Department must have activities that cover all IT processes.

IT MASTER PLAN

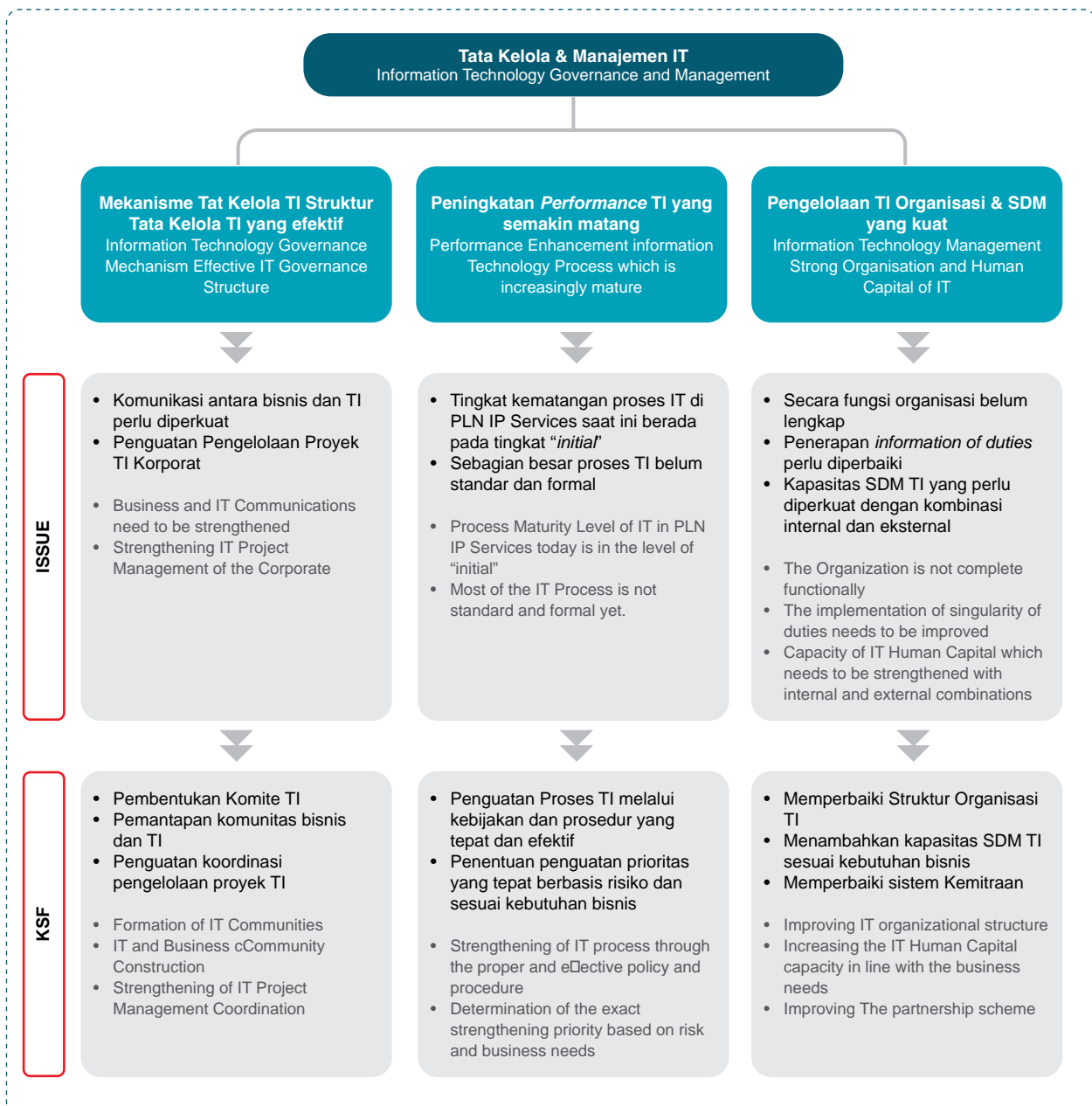
As a form of commitment to IT development, the Company has prepared an Information Technology Master Plan as a guideline for implementing the Information Technology program. Master plan is prepared hence

pelaksanaan kegiatan pengelolaan TI Perusahaan lebih terstruktur, terpercaya, aman dan akurat.

the implementation of the Company's IT management activities is more structured, reliable, safe and accurate.

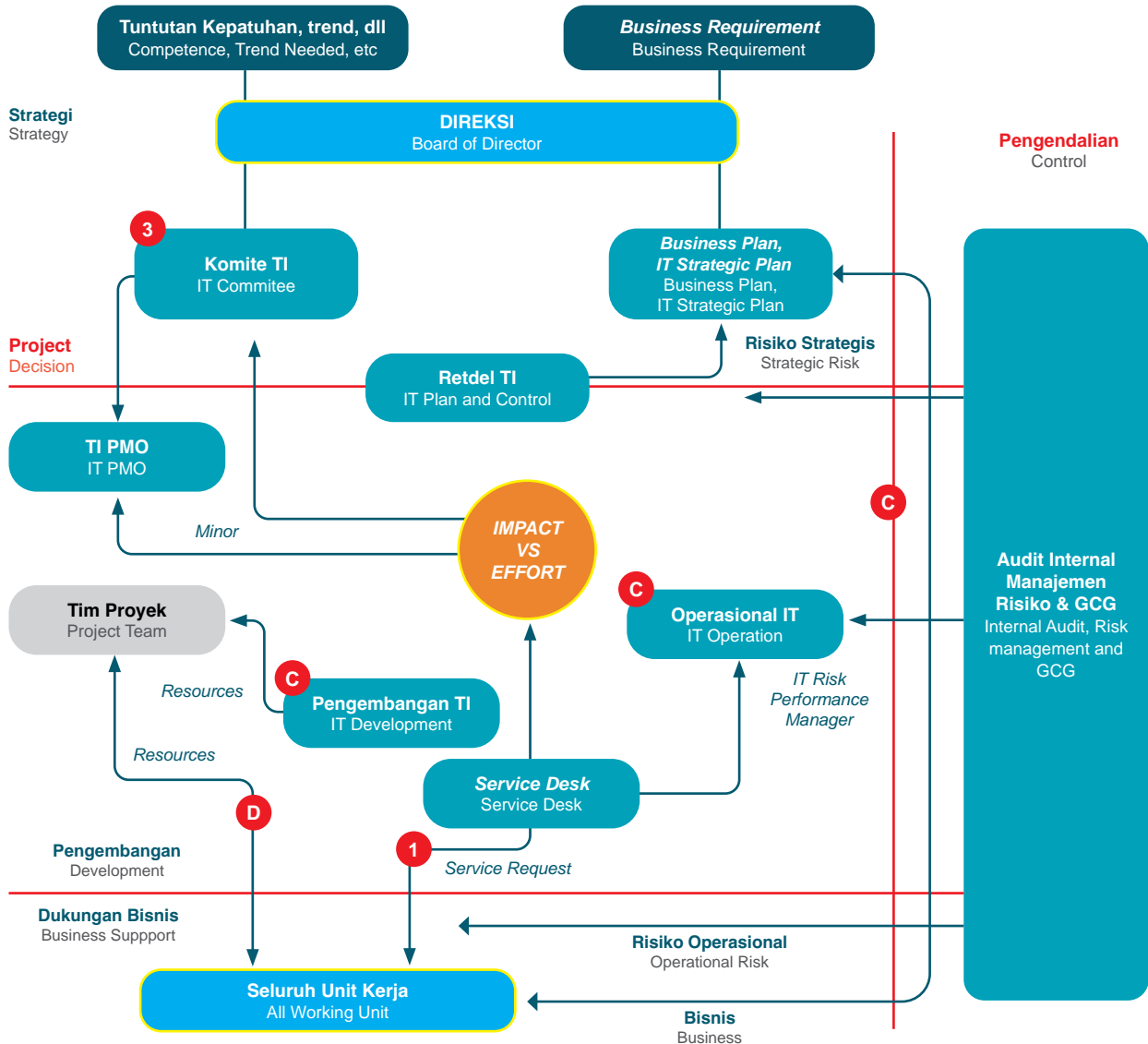
Kebijakan mengenai *Master Plan* TI ini ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 029.K/CDB/XII/2017. Penyusunan *Master Plan* TI merupakan penggambaran rencana jangka panjang akan kondisi tata kelola dan manajemen ICT PLN IP Services sejak tahun 2018 hingga tahun 2023 untuk mencapai keselarasan pelaksanaan sistem teknologi informasi dalam mendukung visi dan misi Perusahaan.

The policy regarding the IT master plan is stipulated in the Decree of the Board of Directors Number 029.K/CDB/XII/2017. The IT master plan is a long-term plan for the condition of PLN IP Services ICT governance and management from 2018 to 2023 to achieve harmony in the implementation of the information technology system in supporting the vision and mission of the Company.



TATA KELOLA TI

Secara garis besar pelaksanaan tata kelola TI PLN IP Services tergambar pada:



IT GOVERNANCE

In general, the implementation of PLN IP Services's IT governance is illustrated in:

Tata kelola dan manajemen TI Perusahaan sebagaimana dijelaskan dalam bagan *Master Plan* mencakup 3 inisiatif yaitu:

- Mekanisme dan struktur tata kelola TI yang efektif
- Memastikan pengelolaan TI yang sejalan dengan kepentingan utama dalam organisasi
- Peningkatan performa proses TI yang semakin matang *Monitoring* penilaian ICR (*Information Capital Readiness*) dengan menggunakan *framework* COBIT 4 berdasarkan kontrak *management* PT PLN Indonesia Power Services dengan induk perusahaan tahun 2023
- Organisasi dan SDM TI yang kuat
- Pemenuhan SDM sesuai dengan STO dan Pelatihan SDM TI dalam memenuhi gap kompetensi pada jabatan.

Corporate IT governance and management as described in the *Master Plan* chart includes 3 initiatives:

- Effective IT governance mechanism and structure
- Ensuring IT management is in line with the main interests of the organization
- Improving the performance of increasingly mature IT processes *Monitoring* the ICR (*Information Capital Readiness*) assessment using the COBIT 4 framework based on the management contract of PT PLN Indonesia Power Services with the parent company in 2023
- Strong IT organization and human capital
- Fulfillment of HC in accordance with STO and IT HC Training in fulfilling competency gap in corporate positions.

Program Kinerja TI Tahun 2023

IT Performance Program In 2023

Pencapaian kinerja Divisi Teknologi Informasi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut: Information Technology Division performance achievements in 2023 were:

No.	Program Programs	Uraian Description	Target Target	Realisasi Realization
I	Program Kerja Non - Rutin Non-Routine Work Activity			
I.1.	Investasi Penguatan Infrastruktur IT Pendukung Bisnis Perusahaan Berbasis Industri 4.0 Strengthening IT Infrastructure Investment Support the Company Business Industry Based 4.0			
I.1.1	Tidak ada Investasi pada Tahun 2023 There is no Investment in 2023			
I.1.	Non Investasi Non-Investment			
I.1.1	Persiapan ISO 27001 PLN IP Services di Kantor Pusat Preparation of ISO 27001 PLN IP Services in Head Office	Melakukan persiapan dokumen keamanan informasi melalui pendekatan ISO 27001:2015 Preparing security information document through the ISO 27001:2015	TW II	1. Perencanaan (Terlaksana) 2. RPB (Terlaksana) 3. Pengadaan (Terlaksana) 4. <i>Kick Off Meeting</i> (Terlaksana) 1. Planning (Discreet) 2. RPB (Discreet) 3. Procurement (Discreet) 4. Kick-Off Meeting (Discreet)
I.2.3	Pengadaan <i>Penetration Testing</i> Testing Penetration Procurement	Melakukan <i>Penetration Testing</i> Infrastruktur <i>Security Cogindo</i> Conducted Testing Penetration of Security Infrastructure of Cogindo	TW IV	Sudah dijalankan Implemented
I.2.	Pengembangan Aplikasi Bisnis Cogindo Development of Cogindo Business Application			
I.2.1	Pengembangan Aplikasi <i>Project Financing</i> Development of Financing Project Application	<i>Project Financing</i> Financing Project	TW I	1. RPB (Terlaksana) 2. Pengadaan (Terlaksana) 3. <i>Development</i> (Terlaksana) 4. <i>Go Live</i> (Terlaksana) 5. Sudah Terlaksana 1. RPB (Discreet) 2. Procurement (Discreet) 3. Development (Discreet) 4. Go Live (Discreet) 5. Implemented (Discreet)
I.2.2	Implementasi aplikasi CRM Implementation of CRM application	Pembuatan aplikasi CRM untuk mendukung Kinerja <i>sales</i> Creating the CRM application to supporting sales performance	TW II	Sudah terlaksana (100%) Implemented (100%)
I.2.3	Implementasi Whatsapp Bisnis API Implementation of API Business Whatsapp	Implementasi Whatsapp Bisnis API Implementation of API Business Whatsapp	TW II	Sudah terlaksana (100%) Implemented (100%)
I.2.4	Pengembangan aplikasi <i>i-morning</i> Development of i-morning application	<i>Maintenance</i> aplikasi <i>i-morning</i> Maintenance of i-morning application	TW II	1. RPB (Terlaksana) 2. Pengadaan (Terlaksana) 3. Terkontrak (Terlaksana) 1. RPB (Discreet) 2. Procurement (Discreet) 3. Contracted (Discreet)

No.	Program Programs	Uraian Description	Target Target	Realisasi Realization
I.2.5	Pengembangan Aplikasi GCG Development of GCG Application	Pengembangan Aplikasi Application Development	TW III	Sebagai sub modul <i>i-Morning</i> (Terlaksana) As a <i>i-Morning</i> sub module (Discreet)
I.2.6	Integrasi aplikasi <i>College</i> dan <i>Colext</i> Integration of <i>College</i> and <i>Colext</i> Application	Melakukan integrasi antara aplikasi <i>college</i> dan <i>colex</i> Integrating among <i>college</i> and <i>colex</i> application	TW III	Sudah terlaksana Implemented
I.2.7	Implementasi aplikasi BG & <i>I-Track</i> Implementation of BG & <i>I-Track</i> Application	Ratifikasi aplikasi PIP Ratification of PIP application	TW II	1. Perencanaan (Terlaksana) 2. <i>Kick Off Meeting</i> (Terlaksana) 3. <i>Development</i> (Terlaksana) 4. <i>Review</i> (Terlaksana) 5. <i>Customization</i> (Terlaksana) 6. UAT(Terlaksana) 7. <i>Go Ilve</i> (Pending) 1. Planning (Discreet) 2. Kick-Off Meeting (Discreet) 3. Development (Discreet) 4. Review (Discreet) 5. Customization (Discreet) 6. UAT (Discreet) 7. Go Live (Pending)
I.2.8	Pengembangan Aplikasi EBS (<i>Electronic Business</i>) Development of EBS Application (<i>Electronic Business</i>)	Melakukan penyempurnaan Module <i>Project Management</i> Untuk <i>Sales-Order Customer</i> dan integrasi dengan Aplikasi ERP Conduct the refinement of Management Project Module for <i>Sales-Order-Customer</i> and integrated with ERP Application	TW II	1. RPB (Terlaksana) 2. Pengadaan (Terlaksana) 3. Terkontrak (Terlaksana) 4. <i>Development</i> Integrasi (Terlaksana) 5. UAT (Terlaksana) 6. <i>Go Live</i> (Terlaksana) 1. RPB (Discreet) 2. Procurement (Discreet) 3. Contracted (Discreet) 4. Integration Development (Discreet) 5. UAT (Discreet) 6. Go Live (Discreet)
Program Kerja Rutin Routine Work Activity				
II.1	Infrastruktur Infrastructure			
II.1.1	Pengadaan <i>Renewal</i> Jasa Layanan Internet dan IPVPN Kantor Pusat Procurement of Internet Renewal Services and IPVPN of Head Office	<i>Renewal</i> Jasa Layanan Internet dan IPVPN Kantor Pusat Internet Renewal Services and IPVPN of Head Office	Maret March	Sudah Terlaksana tertuang dalam Surat Keputusan No.087/SPK/01/CDB/2023 tanggal 20 Januari 2023 Has been Implemented as stated in Decree No.087/SPK/01/CDB/2023 on January 20, 2023
II.1.2	Pengadaan Jasa layanan Internet IP transit Link 1 Kantor Pusat PT PLN Indonesia Power Services Procurement of Internet IP Services transit Link 1 Head Office of PT PLN Indonesia Power Services			Sudah Terlaksana tertuang dalam Surat Keputusan No.374.4/SPK/01/CDB/2022/MTI tanggal 29 Desember 2022 Has been Implemented as stated in Decree No.374.4/SPK/01/CDB/2022/MTI on December 29, 2023

No.	Program Programs	Uraian Description	Target Target	Realisasi Realization
II.1.3	Pengadaan Jasa layanan Internet IP transit Link 2 Kantor Pusat PT PLN Indonesia Power Services Procurement of Internet IP Services transit Link 2 Head Office of PT PLN Indonesia Power Services	-	-	Sudah Terlaksana tertuang dalam Surat Keputusan No. 019/SPK/01/CDB/2023 tanggal 18 Januari 2023 Has been Implemented as stated in Decree No. 019/SPK/01/CDB/2023 on January 18, 2023
II.1.4	Pengadaan Layanan Vitel Unit PLTD Tenau Procurement of Vitel Services Tenau PLTD Unit	-	-	Sudah Terlaksana tertuang dalam Surat Keputusan No.047/SPK/01/CDB/2023 tanggal 03 Februari 2023 Has been Implemented as stated in Decree No.047/SPK/01/CDB/2023 on February 03, 2023
II.1.5	Pengadaan Layanan Internet Tenau Procurement of Tenau Internet Services	-	-	Sudah Terlaksana tertuang dalam Surat Keputusan No.377.1/SPK/CDB/2022/ICON+ tanggal 30 Desember 2022 Has been Implemented as stated in Decree No.377.1/SPK/CDB/2022/ICON+ on December 30, 2023
II.1.6	Pengadaan Layanan Internet Nusa Penida Procurement of Nusa Penida Internet Services	-	-	Sudah Terlaksana tertuang dalam Surat Keputusan No.096/SPK/01/CDB/2023 tanggal 20 Januari 2023 Has been Implemented as stated in Decree No.096/SPK/01/CDB/2023 on January 20, 2023
II.1.7	Pengadaan <i>Renewal IP Public</i> dan ASN Cogindo Procurement of Renewal Public IP and State Civil Servant of Cogindo	<i>Renewal IP Public & ASN Cogindo</i> Renewal Public IP and State Civil Servant of Cogindo	Juli July	Sudah Terlaksana pada tanggal 14 Agustus 2023 Has been Implemented on August 14, 2023
II.1.8	Pengadaan <i>Renewal Lisensi Email Security/ Mail Gateway</i> Procurement of Renewal Security Email License/ Mail Gateway	<i>Renewal lisensi email security</i> Renewal Security Email License	November November	Sudah Terlaksana Implemented
II.1.9	Pengadaan <i>Renewal Firewall & Bandwidth Management</i> Procurement of Renewal Firewall & Bandwidth Management	<i>Renewal ATS Firewall & Bandwidth Management</i> Renewal ATS Firewall & Bandwidth Management	November November	Belum dijalankan, dikarenakan perubahan anggaran Not yet implemented, due to Articles of Association
II.1.10	Pengadaan <i>Renewal WAN Optimizer</i> Procurement of Renewal Wan Optimizer	<i>Renewal/ATS WAN Optimizer KP dan Batakan</i> Renewal Wan Optimizer KP and Batakan	November November	Belum dijalankan, dikarenakan perubahan anggaran Not yet implemented, due to Articles of Association
II.1.10	Pengadaan <i>Renewal WAN Optimizer</i> Procurement of Renewal Wan Optimizer	<i>Renewal/ATS WAN Optimizer KP dan Batakan</i> Renewal Wan Optimizer KP and Batakan	November November	Belum dijalankan, dikarenakan perubahan anggaran Not yet implemented, due to Articles of Association
II.1.10	Pengadaan <i>Renewal WAN Optimizer</i> Procurement of Renewal Wan Optimizer	<i>Renewal/ATS WAN Optimizer KP dan Batakan</i> Renewal Wan Optimizer KP and Batakan	November November	Belum dijalankan, dikarenakan perubahan anggaran Not yet implemented, due to Articles of Association
II.1.11	Pengadaan <i>Renewal Nimble Storage</i> Procurement of Renewal Nimble Storage	<i>Renewal/ATS Nimble Storage</i> Renewal ATS Nimble Storage	Juli July	Belum dijalankan, dikarenakan perubahan anggaran Not yet implemented, due to Articles of Association

No.	Program Programs	Uraian Description	Target Target	Realisasi Realization
II.1.12	Pengadaan <i>Renewal RMA Network & Server</i>	<i>Renewal SmartNet dan RMA Network & Server</i> Perangkat Kantor Pusat	Juli	Belum dijalankan, dikarenakan perubahan anggaran
	Procurement of Renewal RMA Network & Server	Smartnet Renewal and RMA Network & Device Server of Head Office	July	Not yet implemented, due to Articles of Association
II.1.13	Pengadaan Jasa Sewa Laptop PT PLN Indonesia Power Services Tahun 2023	Sewa Laptop Korporat	Januari	Sudah Terlaksana tertuang dalam Surat Keputusan No.011.PJ/01/CDB/2023 tanggal 20 Januari 2023
	Procurement of Laptop Rent Services of PT PLN Indonesia Power Services	Corporate Rent Laptop	January	Has been Implemented as stated in Decree No.011.PJ/01/CDB/2023 on January 20, 2023
II.1.14	Pengadaan Sewa Laptop PT PLN Indonesia Power Services Unit Jayapura, Nabire dan Bontang	Sewa Laptop Unit Jayapura, Nabire dan Bontang	Januari	Sudah Terlaksana tertuang dalam Surat Keputusan No.011.PJ/01/CDB/2023 tanggal 20 Januari 2023
	Procurement of Laptop Rent Services of PT PLN Indonesia Power Services Jayapura, Nabire, and Bontang Units	Rent Laptop of Jayapura, Nabire, and Bontang Units	January	Has been Implemented as stated in Decree No.011.PJ/01/CDB/2023 on January 20, 2023
II.1.15	Pengadaan Jasa Sewa Laptop PT Cogindo DayaBersama Tahun 2023	Sewa Laptop Korporat	Januari	Sudah Terlaksana tertuang dalam Surat Keputusan No.011.PJ/01/CDB/2023 tanggal 20 Januari 2023
	Procurement of Laptop Rent Services of PT PLN Indonesia Power Services 2023	Corporate Rent Laptop	January	Has been Implemented as stated in Decree No.011.PJ/01/CDB/2023 on January 20, 2023
II.2	Software			
II.2.1	<i>Renewal Antivirus Korporat</i> Renewal of Corporate Antivirus	<i>Renewal Lisensi Antivirus Korporat (End Point)</i> Renewal of Corporate Antivirus License (End Point)	Juni June	Sudah Terlaksana tertuang dalam Surat Keputusan No.012/SPBL/01/CDB/2023 tanggal 19 Januari 2023 Has been Implemented as stated in Decree No.012/SPBL/01/CDB/2023 on January 19, 2023
II.2.2	<i>Renewal Backup Server Software</i>	<i>Renewal License Backup Server Software</i>	Juli	Belum dijalankan, dikarenakan perubahan anggaran
	Renewal of Software Server Backup	Renewal License Backup Server Software	July	Not yet implemented, due to Articles of Association
II.2.3	<i>Renewal License JWPlayer</i>	<i>Renewal License JWPlayer</i>	Juli	Sudah Terlaksana
	Renewal of JWPlayer License	Renewal of JWPlayer License	July	Implemented
II.2.4	<i>Renewal Lisensi BPM Online</i>	<i>Renewal ATS Lisensi Aplikasi e-Bisnis PLN IP Services (BPM Online)</i>	Agustus	Sudah Terlaksana
	Renewal of Online BPM License	Renewal of ATS License for PLN IP Services e-Business Application (BPM Online)	August	Implemented
II.2.5	Penambahan & <i>Renewal Lisensi Software Korporat</i>	Penambahan lisensi Windows, Ms Office, Ms Visio dan Ms. Project dan <i>Renewal Adobe Acrobat DC</i>	Juni	Sudah Terlaksana
	Addition & Renewal of Corporate Software License	Addition of Windows, Microsoft Office, Microsoft Visio, and Microsoft Project licenses and Renewal of Adobe Acrobat DC	June	Implemented
II.2.6	<i>Renewal lisensi Virtualisasi Software</i>	<i>Renewal ATS Software Virtualisasi (VMware)</i>	Oktober	Belum dijalankan, dikarenakan perubahan anggaran
	Purchase of Office 365 License	Renewal of ATS Virtualization Software (VMware)	October	Not yet implemented, due to Articles of Association

No.	Program Programs	Uraian Description	Target Target	Realisasi Realization
II.2.7	Pembelian lisensi Office 365	Pembelian dan <i>renewal license</i> Office 365 (260 User)	April	Sudah Terlaksana tertuang dalam Surat Keputusan No.221/SPB/01/CDB/2023 tanggal 17 April 2023
	Procurement of Renewal Public IP and State Civil Servant of Cogindo	Purchase and renewal of Office 365 license (260 users)	April	Has been Implemented as stated in Decree No.221/SPB/01/CDB/2023 on April 17, 2023
II.2.8	Pengadaan <i>Renewal</i> Lisensi SSL <i>Certificate</i>	<i>Renewal</i> SSL <i>Certificate</i> PT PLN Indonesia Power Services *.plnipservices.co.id	Oktober	Sudah Terlaksana
	Procurement of Renewal SSL Certificate License	Renewal of SSL Certificate of PT Cogindo DayaBersama *.cogindo.co.id	October	Implemented
II.2.9	<i>Renewal</i> domain & ssl mroline(.id,.com)	<i>Renewal</i> SSL <i>Certificate</i> MROline	Agustus	Sudah Terlaksana
	Renewal of mroline domain & ssl (.id.com)	Renewal MROline SLL Certificate	August	Implemented
II.2.10	<i>Renewal</i> License Zoom (adminCollege 1,2,3)	-	Agustus	Sudah Terlaksana
	Renewal of Zoom License (adminColleger 1,2,3)		August	Implemented
II.3	Maintenance			
II.3.1	Pengadaan Jasa <i>Maintenance Services</i> Infrastruktur Server Pendukung Layanan IT Kantor Pusat PT PLN Indonesia Power Services	<i>Maintenance Support</i> untuk Hypervisor dan Produk Microsoft (AD, DNS, DFS, Exchange, Printer Server)	Maret March	Sudah Terlaksana tertuang dalam Surat Keputusan No.012/SPBL/01/CDB/2023 tanggal 19 Januari 2023
	Procurement of Maintenance Services Supporting Server Infrastructure of IT Services Head Office of PT PLN Indonesia Power Services	Maintenance Support to Hypervisor and Microsoft Product (AD, DNS, DFS, Exchange, Printer Server)		Has been Implemented as stated in Decree No.012/SPBL/01/CDB/2023 on January 19, 2023
II.3.2	Pengadaan Jasa <i>Maintenance Services</i> Infrastruktur <i>Network</i> Pendukung Layanan IT Kantor Pusat PT PLN Indonesia Power Services	<i>Maintenance Support</i> untuk <i>Network</i> Kantor Pusat	Maret	Sudah Terlaksana tertuang dalam Surat Keputusan No.181/SPK/01/CDB/2023 tanggal 29 Maret 2023
	Procurement of Maintenance Services Supporting Network Infrastructure of IT Services Head Office of PT PLN Indonesia Power Services	Maintenance Support for Head Office's Network	March	Has been Implemented as stated in Decree No.181/SPK/01/CDB/2023 on March 29, 2023
II.3.3	Pengadaan <i>Maintenance Services</i> Aplikasi <i>Manpower Planning</i>	<i>Maintenance Local Support</i> Untuk Aplikasi <i>Manpower Planning</i>	Juli	Sudah Terlaksana
	Procurement of Manpower Planning Application Maintenance Services	Maintenance of Local Support for Manpower Planning Application	July	Implemented
II.3.4	Pengadaan <i>Maintenance Services</i> Aplikasi Maximo	<i>Maintenance Local Support</i> Untuk Aplikasi Maximo	April	Sudah Terlaksana
	Procurement of Maximo Application Maintenance Services	Maintenance of Local Support for Maximo Application	April	Implemented
II.3.5	Pengadaan <i>Maintenance Services</i> Aplikasi Creatio	<i>Maintenance Local Support</i> Untuk Aplikasi EBS Korporat	Agustus	Sudah Terlaksana
	Procurement of Creation Application Maintenance Services	Maintenance of Local Support for Corporate EBS Application	August	Implemented
II.3.6	Pengadaan <i>Maintenance</i> Aplikasi <i>College</i>	<i>Maintenance</i> Aplikasi <i>College</i>	Juli	Belum dijalankan, dikarenakan perubahan anggaran
	Procurement of College Application Maintenance	Maintenance of College Application	July	Not yet implemented, due to Articles of Association

Penelitian dan Pengembangan

Research and Development

PLN IP Services memiliki Program Kompetisi Karya Inovasi yang merupakan perlombaan/kompetisi antar pegawai dalam membuat *tools/peralatan*, mekanisme, prosedur, atau sistem baru yang merupakan perbaikan dari suatu proses kerja sebelumnya sehingga proses kerja tersebut menjadi lebih efektif, efisien, dan *profitable*.

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi implementasi ide perbaikan atau *improvement* proses kerja pegawai PLN IP Services, dan Perusahaan juga memberikan *reward* bagi pegawai yang berprestasi melalui Program Seleksi Pegawai Teladan.

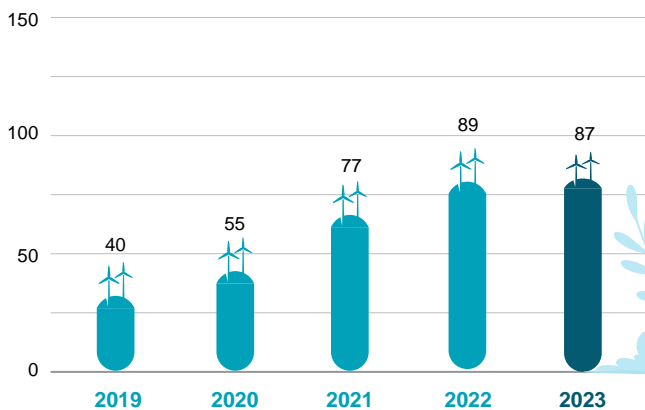
Keikutsertaan pegawai dalam kompetisi karya inovasi setiap tahun selalu antusias dan mendapat respon positif, meskipun pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan jumlah inovasi 2,25% dibandingkan tahun sebelumnya. Tren jumlah inovasi perusahaan dari tahun 2019 hingga 2023 dapat dilihat pada grafik berikut:

PLN IP Services has an Innovation Work Competition Program which is a competition between employees in making new tools/equipment, mechanism, procedure or system which is an improvement from previous work process hence it becomes more effective, efficient and profitable.

This program aims to facilitate the implementation of ideas for improving the work process of PLN IP Services, and the Company employees as well as providing rewards for employees who excel through the Exemplary Employee Selection Program.

Employee participation in the innovation competition is always enthusiastic and receives positive feedback every year, although in 2023 there was a slight decrease in the number of innovations by 2.25% compared to the previous year. The trend in the number of company innovations from 2019 to 2023 can be seen in the following graph:

► **Jumlah Inovasi**
Number of Innovations



Inovasi yang di ikutkan terdiri dari beberapa kategori sebagai berikut:

- *Non Technical Supporting Aplikasi*
- *Non Technical Supporting Manajemen*
- *Pembangkit*
- *Technical Supporting*

Innovations included consist of the following categories:

- Non Technical Supporting Application
- Non Technical Supporting Management
- Generator
- Technical Support

Pengembangan Kompetensi

Competency Development

PLN IP Services memberikan program peningkatan kompetensi bagi karyawan untuk meningkatkan keahlian dan kualitas kinerja karyawan dengan pelatihan/ pendidikan/seminar, agar memiliki keahlian untuk bersaing dalam industri ketenagalistrikan.

Berikut program peningkatan kompetensi dan sertifikasi yang dilaksanakan Departemen Sistem Informasi sepanjang tahun 2023:

PLN IP Services provides competency improvement program for employees to improve their skills and quality of performance through training/education/seminars, hence they have the skills to compete in the electricity industry.

Following are the competency and certification improvement programs implemented by the Information System Department throughout 2023:

No.	Nama Name	Materi Pendidikan/ Pelatihan/Seminar Education/Training/ Seminar Materials	Penyelenggara Organizer	Waktu dan Tempat Time and place
1.	Myrul Dwi Prasetyo	Bahasa Inggris Kelas <i>Basic</i> English Basic Class	PT PLN IP Services	Online September 2023 - Mei 2024 September 2023 - May 2024
2.	Myrul Dwi Prasetyo	Awareness IS 27001:2022	Sentral Sistem Consulting Central System Consulting	Jakarta 26 Juli 2023 July 26, 2023
3.	Muhammad Rafly Al Farizi	Awareness IS 27001:2022	Sentral Sistem Consulting Central System Consulting	Jakarta 26 Juli 2023 July 26, 2023
4.	Muhammad Rafly Al Farizi	Bahasa Inggris Kelas <i>Basic</i> English Basic Class	PT PLN IP Services	-
5.	Mochammad Iqbal	Bahasa Inggris Kelas <i>Basic</i> English Basic Class	PT PLN IP Services	-
6.	Mochammad Iqbal	Awareness IS 27001:2022	Sentral Sistem Consulting Central System Consulting	Jakarta 26 Juli 2023 July 26, 2023
7.	Muhammad Fikri Adli	Awareness IS 27001:2022	Sentral Sistem Consulting Central System Consulting	Jakarta 26 Juli 2023 July 26, 2023
8.	Muhammad Fikri Adli	Bahasa Inggris Kelas <i>Basic</i> English Basic Class	PT PLN IP Services	-
9.	Izzudin Abdul Hasib	Bahasa Inggris Kelas <i>Basic</i> English Basic Class	PT PLN IP Services	-
10.	Vidya Dharma	Bahasa Inggris Kelas <i>Basic</i> English Basic Class	PT PLN IP Services	Online September 2023 - Mei 2024 September 2023 - May 2024
11.	Vidya Dharma	Awareness IS 27001:2022	Sentral Sistem Consulting Central System Consulting	Jakarta 26 Juli 2023 July 26, 2023
12.	Muhammad Fikri Adli	CISA Exam Guide & Exam Information System Audit & Control Association	Brainmatics Indonesia Cendikia	02-06 Oktober 2023 October 02-06, 2023
13.	Izzudin Abdul Hasib	Cyber Security	Widya Adijaya Nusantara	11-14 Oktober 2023 October 11-14, 2023
14.	Myrul Dwi Prasetyo	Cyber Security	Widya Adijaya Nusantara	11-14 Oktober 2023 October 11-14, 2023
15.	Muhammad Rafly Al Farizi	Cyber Security	Widya Adijaya Nusantara	11-14 Oktober 2023 October 11-14, 2023

Rencana Pengembangan TI 2023

IT Development Plan In 2023

Sebagai salah satu langkah dalam mendukung Misi perusahaan yaitu “Menyediakan Solusi Energi Yang Terbaik, Terkini, & Terintegrasi” departemen STI akan melakukan *roll over IT Master Plan 2018 – 2021* agar tetap sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selain itu departemen STI dalam meningkatkan kualitas layanan memiliki tagline “*Make IT Simple*” yang terbagi dalam:

OPERASIONAL IT

Supporting

Memberikan pelayanan dalam permasalahan awal yang dihadapi pegawai terkait perangkat kerja IT ataupun aplikasi IT. Penggunaan aplikasi dalam pelaporan pengaduan yang tersentralisasi “*Service Desk*” menjadi salah satu *tools* yang memberikan kemudahan terhadap pegawai dalam melakukan pengaduan layanan.

Infrastruktur

Teknologi *Hyper Converged* Infrastruktur (HCI) dalam memvirtualisasi semua elemen sistem *hardware* konvensional. Manfaat yang didapatkan dari penggunaan teknologi ini diantaranya adalah :

- *Lower Cost*
- *Flexibility and Scale*
- *Work load consolidation*
- *Data Protection*
- *Automated Infrastructure*

IT GOVERNANCE

Dalam melakukan *monitoring* tata kelola IT yang sesuai dengan Visi dan Misi perusahaan Dept IT menggunakan ICR turunan dari Induk perusahaan, dan menggunakan pendekatan 2P (*Process* dan *People*) dalam penerapannya.

Proses

Proses tata kelola IT yang berdasarkan kepada ICR turunan dari induk perusahaan adalah sebagai berikut:

As one of the steps in supporting the company's Mission, namely “Providing the Best, Latest, & Integrated Energy Solutions”, the STI department will roll over the 2018-2021 IT Master Plan to keep it in line with company needs. In addition, the STI department has a tagline “Make IT Simple” in improving service quality which is divided into:

IT OPERATIONS

Supporting

Providing service for initial problems faced by employees related to IT work tools or IT applications. Application usage in reporting complaints that are centralized “*Service Desk*” is one of the tools that makes it easy for employees to make service complaints.

Infrastructure

Hyper Converged Infrastructure (HCI) technology in virtualizing all elements of conventional hardware system. The benefits of using this technology include:

- *Lower Cost*
- *Flexibility and Scale*
- *Workload consolidation*
- *Data Protection*
- *Automated Infrastructure*

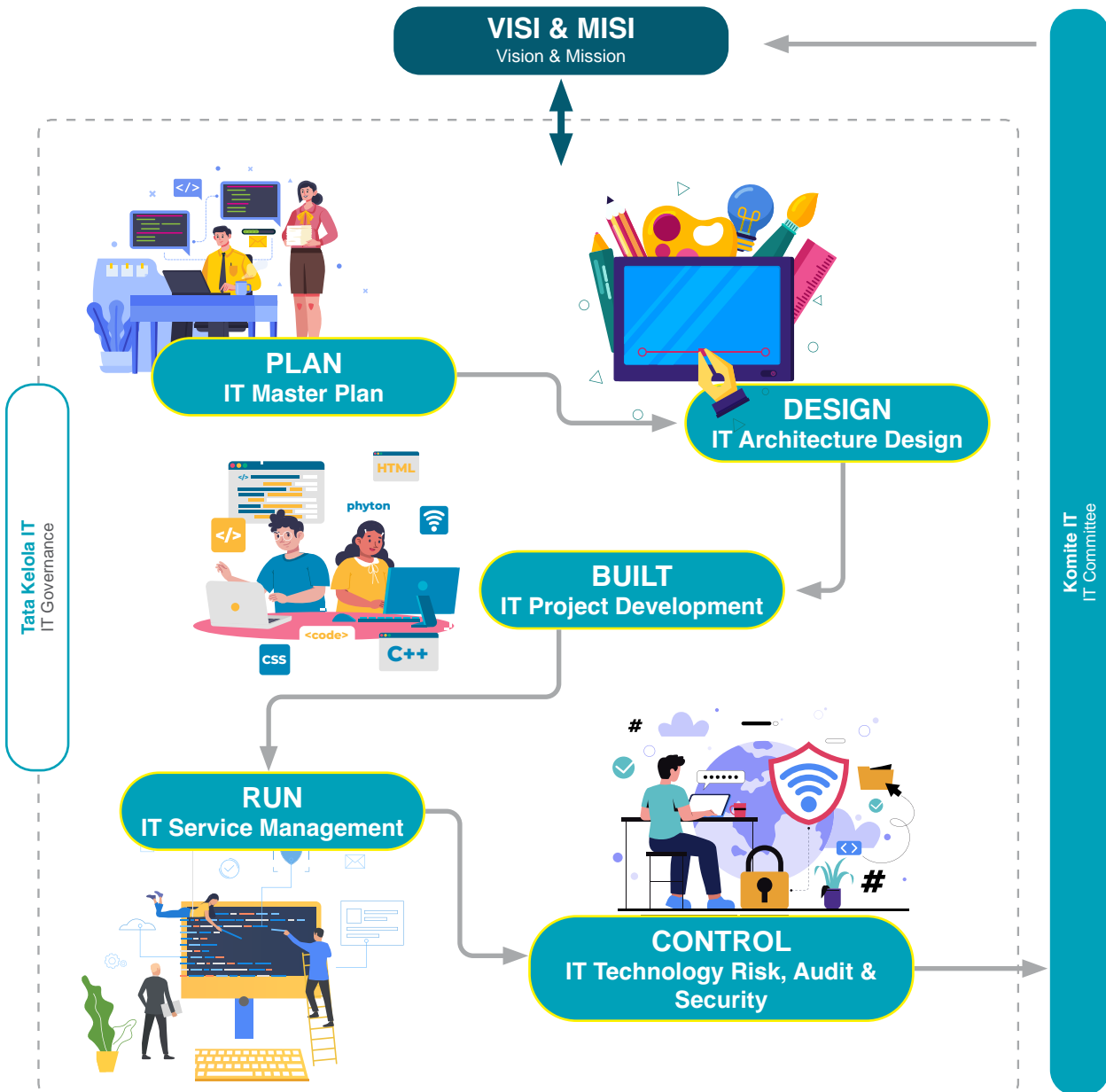
IT GOVERNANCE

In monitoring IT governance in accordance with the company's Vision and Mission, the IT Dept. uses ICR derived from the parent company, and uses the 2P (*Process* and *People*) approach in its implementation

Process

Process of IT governance based on ICR derivatives from the parent company are as follows:

Proses Tata Kelola Governance Process



People

Dalam penerapan proses tata kelola *IT people* yang terlibat berdasarkan dengan struktur Organisasi pada departemen IT dan dibagi berdasarkan masing-masing *jobdesk* yang dimiliki.

IT DIGITAL TRANSFORMATION

Digital Transformation dalam mendukung IT 4.0 pada Perusahaan dengan penerapan penggunaan aplikasi untuk membantu proses kerja yang terbagi dalam:

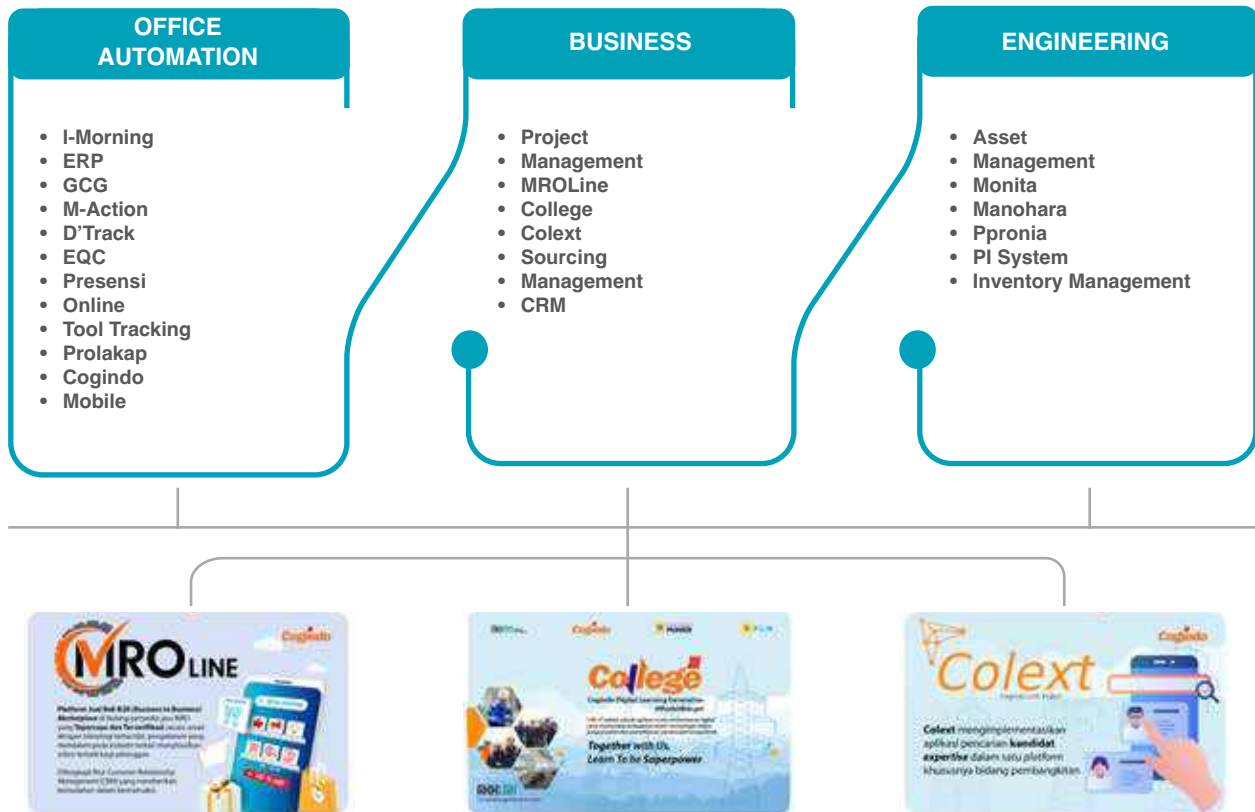
People

In implementing the IT governance process the people involved are based on the Organizational structure of the IT department and are divided based on each job desk they have.

IT DIGITAL TRANSFORMATION

Digital Transformation in support of IT 4.0 in the Company with the implementation of application usage to assist work process which divided into:

Aplikasi Perusahaan Company Application



Untuk mendukung percepatan dalam peningkatan kualitas pelayanan IT, Perusahaan melakukan berbagai langkah, di antaranya:

1. Mencapai target index penilaian 3.50 pada ICR (*Information Capital Readiness*) pada tahun 2023
2. Perencanaan implementasi DRC (*Disaster Recovery Center*) dan DRP (*Disaster Recovery Plan*) pada data center Perusahaan
3. Penambahan Peran *Digital Transformation* pada Departemen IT
4. Implementasi ISO 27001 terkait *Information Security Management*

Selain meningkatkan standar pelayanan departemen IT turut berkontribusi dalam pencarian pendapatan bagi Perusahaan salah satunya dengan menjadi Implementor infrastruktur maupun aplikasi terhadap *customer*. Beberapa *project* yang sudah dilakukan diantaranya adalah:

To support the acceleration in improving the quality of IT services, the Company has taken various steps, including:

1. Reached the target rating index of 3,50 on ICR (*Information Capital Readiness*) in 2023
2. Planning for the implementation of the DRC (*Disaster Recovery Center*) and DRP (*Disaster Recovery Plan*) in the Company's data center
3. Adding the Role of Digital Transformation in the IT Department
4. Implementation of ISO 27001 related to Information Security Management.

In addition to improving service standards, the IT department also contributes to revenue generation for the Company, one of which is by becoming an implementer of infrastructure and application for customers. Some of the projects that have been carried out include:

Implementasi REOC di luar PLN Group

Dalam tahun 2023 departemen IT berhasil menjadi implementor REOC Non PLN Group. Hal ini tentu menjadi salah satu pencapaian bagi departemen IT dalam pengembangan bisnis yang terkait dengan teknologi, sehingga akan tercipta peluang untuk melakukan pelebaran dari departemen IT yang saat ini fokus terhadap melakukan pelayanan terhadap pegawai menjadi bisnis *IT solutions*.

Implementation of REOC outside the PLN Group

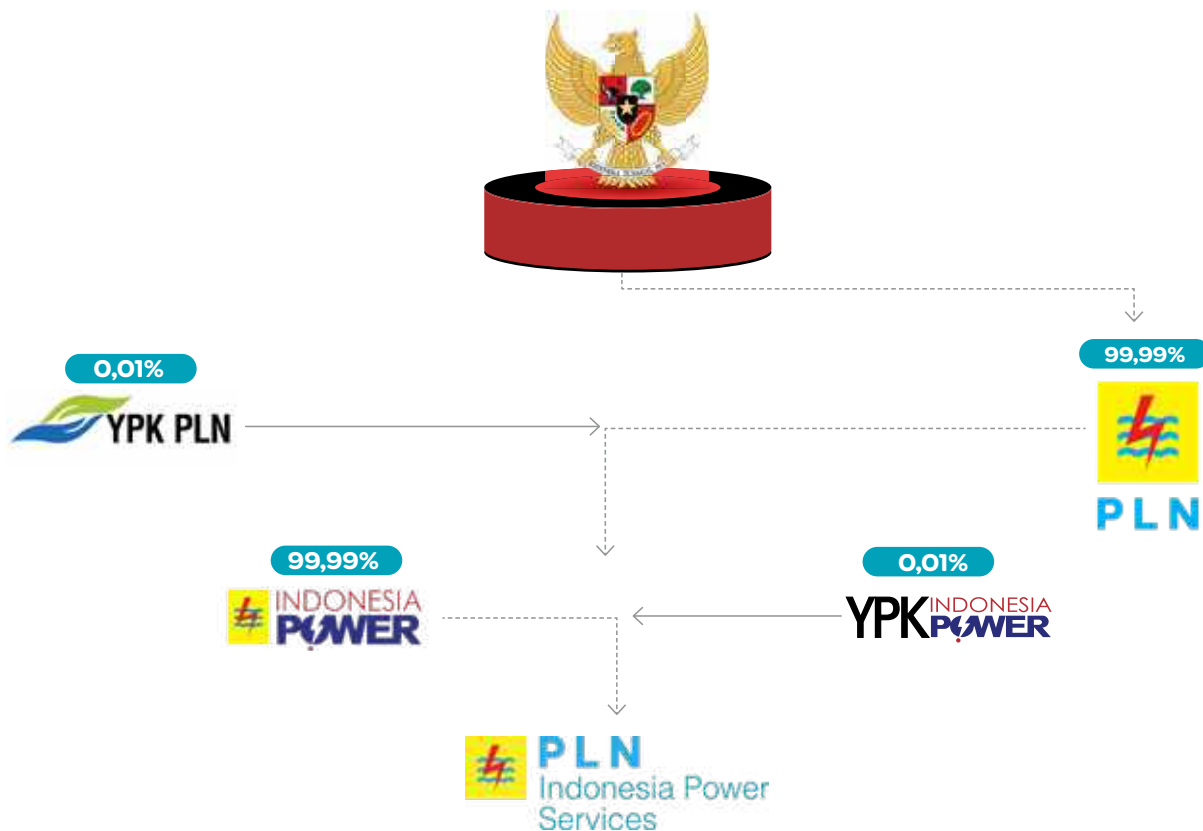
In 2023 the IT department succeeds in becoming the implementer of the Non PLN Group REOC. This is certainly one of the achievements for the IT department in business development related to technology, hence opportunities will be created to widen the IT department which is currently focused on providing services to employees to become an IT business solutions.

Struktur dan Komposisi Pemegang Saham

Shareholders Structure and Composition

► Struktur Pemegang Saham

Shareholders Structure



► Komposisi Pemegang Saham Shareholders Composition

Pemegang Saham Shareholders	1 Januari 2023 January 1, 2023		31 Desember 2023 December 31, 2023	
	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase Kepemilikan Saham Share Ownership Percentage	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase Kepemilikan Saham Share Ownership Percentage
Kepemilikan di atas 5% Ownership above 5%				
PT PLN Indonesia Power	514.866.770	99,99%	514.866.770	99,99%
Kepemilikan kurang dari 5% Ownership less than 5%				
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Pegawai PT PLN Indonesia Power	1.000	0,01%	1.000	0,01%
Kepemilikan Masyarakat Public Shareholder	-	-	-	-
Jumlah Total	514.867.770	100,00%	514867770	100,00%

► Kepemilikan Saham Berdasarkan Klasifikasi Institusi Shares Ownership Based on Institutional Classification

Pemegang Saham Shareholder	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase Kepemilikan Saham Share Ownership Percentage
Institusi Lokal Local Institutions		
PT PLN Indonesia Power	514.866.770	99,99%
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Pegawai PT PLN Indonesia Power	1.000	0,01%
Individu Lokal Local Individuals		
	-	-
Institusi Asing Foreign Institutions		
	-	-
Individu Asing Foreign Individuals		
	-	-
Jumlah Total	514.867.770	100,00%

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, PLN IP Services tidak mengalami perubahan atas saham yang ditempatkan.

In the last 3 (three) years, there were no changes on the shares placed by PLN IP Services.

Kepemilikan Saham Langsung dan Tidak Langsung oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Direct and Indirect Share Ownership by the Board of Commissioners and Directors

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT PLN Indonesia Power Services tidak ada yang memiliki saham Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

None of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT PLN Indonesia Power Services owns shares of the Company either directly or indirectly.

PROFIL PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

PT PLN Indonesia Power merupakan salah satu anak Perusahaan PT PLN (Persero) yang didirikan pada tanggal 3 Oktober 1995 dengan nama PT PLN Pembangkitan Jawa Bali I (PT PJB I). Pada tanggal 8 Oktober 2000, PT PJB I berganti nama menjadi Indonesia Power sebagai penegasan atas tujuan Perusahaan untuk menjadi Perusahaan pembangkit tenaga listrik independen yang berorientasi bisnis murni.

Kegiatan utama bisnis Perusahaan saat ini yakni fokus sebagai penyedia tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik dan sebagai penyedia jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik yang mengoperasikan pembangkit yang tersebar di Indonesia. Selain mengelola Unit Pembangkit, PT PLN Indonesia Power memiliki 5 Anak Perusahaan, 2 Perusahaan Patungan (*Joint Venture Company*), 1 Perusahaan Asosiasi, 3 Cucu Perusahaan (Afiliasi dari Anak Perusahaan) untuk mendukung strategi dan proses Bisnis Perusahaan.

PROFILE OF CONTROLLING SHAREHOLDERS

PT PLN Indonesia Power is a subsidiary of PT PLN (Persero) which was established on October 3, 1995 under the name PT PLN Pembangkitan Jawa Bali I (PT PJB I). On October 8, 2000, PT PJB I changed its name to Indonesia Power as an affirmation of the Company's objective to become a pure business-oriented independent power company.

The main business activity of the Company at this time is to focus as a provider of electric power through power generation and as a provider of operation and maintenance services for power plants that operate power plants spread across Indonesia. In addition to managing Generating Units, PT PLN Indonesia Power has 5 Subsidiaries, 2 Joint Venture Companies, 1 Associated Company, and 3 Affiliates of Subsidiaries to support the Company's business strategy and processes.



PT PLN Indonesia Power



Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta Selatan,
Indonesia
Telp (+62-21) 5267666
Fax (+62-21) 5252623

Kepemilikan Ownership	PT PLN : 99,99%	YPK PLN : 0,01%
Total Aset 2023 Total Assets 2023	Rp197.191.394.496.720	
Bidang Usaha Business Fields	<i>Subholding</i> perusahaan pembangkit listrik Subholding power generation company	
Status Operasi Operational Status	Beroperasi Operating	

Entitas Anak dan Asosiasi

Subsidiaries and Associated Entity

Hingga 31 Desember 2023, Perusahaan tidak memiliki entitas anak maupun entitas asosiasi. Namun, Perusahaan memiliki dua perusahaan ventura bersama yaitu PT Energi Prima Nusantara dan PT Maxpower Cogindo Batam.

As of December 31, 2023, the Company does not have any subsidiaries or associates. However, the Company has two joint venture companies, namely PT Energi Prima Nusantara and PT Maxpower Cogindo Batam.



PT Energi Prima Nusantara



Jl. Minangkabau Raya No. 28 B. Kelurahan Pasar Manggis
Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12970

Kepemilikan Ownership	YPK IP : 99%	PT PLN Indonesia Power Services : 0,01%
Total Aset 2023 Total Assets 2023	Rp151.172.302.737	
Bidang Usaha Business Fields	Pertambangan Energi, Jasa, Angkutan dan Perdagangan Umum Energy Mining, Services, Transportation and General Trading	
Status Operasi Operational Status	Beroperasi sejak tahun 2001 Operating since 2001	



PT Maxpower Cogindo Batam



Jl Jend. Sudirman, Komplek PLN Batam GI Sei Balo,
Sukajadi, Batam Kota.

Kepemilikan Ownership	PT Maxpower Indonesia: 70%	PT PLN Indonesia Power Services: 30%
Total Aset 2023 Total Assets 2023	USD28.010.275	
Bidang Usaha Business Fields	Ketenagalistrikan Electric Power	
Status Operasi Operational Status	Beroperasi sejak 12 April 2022 Operating since April 12, 2022	

Struktur Grup Perusahaan

Corporate Group Structure



Kronologis Pencatatan Saham

Chronology of Share Listing

Hingga akhir tahun 2023, PLN IP Services belum pernah mencatatkan saham di bursa saham, sehingga tidak ada informasi terkait kronologis pencatatan saham, jenis tindakan korporasi (*corporate action*), perubahan jumlah saham, maupun nama bursa saham.

Until the end of 2023, PLN IP Services has never listed its shares on the stock exchange, so there is no information regarding the chronology of share listing, types of corporate action, changes in the number of shares, or the name of stock exchange.

Kronologis Pencatatan Efek Lainnya

Chronology of Other Securities Listing

Hingga akhir tahun 2023, PLN IP Services belum pernah mencatatkan efek lainnya di Bursa Efek, sehingga tidak ada informasi terkait kronologis pencatatan, jenis tindakan korporasi, perubahan jumlah efek, nama bursa maupun peringkat efek.

Until the end of 2023, PLN IP Services has never listed other securities on the Stock Exchange, so there is no information related to the chronology of listing, types of corporate action, changes in the number of securities, exchange name or securities rating.

Kantor Akuntan Publik

Public Accounting Firm

Sebagai salah satu implementasi prinsip GCG adalah transparansi, maka Perusahaan menyediakan informasi keuangan yang berkualitas melalui jasa Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Per-01/MBU/2011 Pasal 31 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara. Fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan Perusahaan dilakukan dengan melaksanakan pemeriksaan Audit Eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

KAP sebagai organ eksternal berhak memberikan opini terkait kesesuaian penyajian laporan keuangan Perusahaan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Keberadaan akuntan publik juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik sebagai lembaga profesional yang mendukung Pemerintah mewujudkan perekonomian yang sehat dan efisien.

For transparency as one principle of the GCG implementation, the Company provides quality financial information through the services of Public Accounting Firm and Public Accountant in Financial Services activities as stipulated in the Regulation of Minister of SOEs Per-01/MBU/2011 Article 31 on the Implementation of Good Corporate Governance in State Owned Enterprises. The function of independent supervision of the Company's financial aspects is carried out by External Audit examination conducted by a Public Accounting Firm (KAP).

KAP as an external organ has the right to provide opinions regarding the suitability of the presentation of the Company's financial statements against the Financial Accounting Standards (SAK) that apply in Indonesia. The existence of public accountant is also regulated in Government Regulation no. 20 of 2015 on the Practice of Public Accountant and Regulation of Minister of Finance Number: 17/PMK.01/2008 on Public Accountant Services as professional institution that supports the Government in realizing a sound and efficient economy.

PROSES PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK

Penunjukan KAP bagi PLN IP Services dilakukan oleh Pemegang Saham Utama yaitu PT PLN Indonesia Power. Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, Auditor Eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan dan terbebas dari pengaruh Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas, maupun Direksi atau pihak yang berkepentingan lainnya.

AKUNTAN PUBLIK TAHUN 2020-2023

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2015 tanggal 3 April 2015 tentang Praktik Akuntan Publik Pasal 11 yang menyebutkan bahwa pemberi jasa audit umum atas Laporan Keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (Lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik.

Adapun Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan Publik, alamat, biaya dan jenis jasa, tahun penugasan dan Izin KAP yang mengaudit Laporan Keuangan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

APPOINTMENT PROCESS OF PUBLIC ACCOUNTANT

KAP appointment for PLN IP Services is carried out by the Major Shareholder, PT PLN Indonesia Power. To guarantee the independence and quality of audit results, the appointed External Auditor may not have conflict of interest with the Company and is free from the influence of the Board of Commissioners/Supervisory Board, or the Board of Directors or other interested parties.

PUBLIC ACCOUNTANT IN 2020-2023

As stated in the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 20 of 2015 April 3, 2015 on the Practice of Public Accountant Article 11 which states that the general audit service provider of the Financial Statements of an entity is conducted by a KAP for maximum of 5 (five) consecutive financial years and by a Public Accountant.

As for the Public Accounting Firm, Name of the Public Accountant, address, fee and type of service, year of assignment and KAP Permit to audit the Financial Statements for the last 5 years can be seen in the table below:

Periode Penugasan Assignment Period	Nama dan Alamat KAP Name and Address of KAP	Nama Akuntan Name of Accountant	Jenis Jasa yang Diberikan Types of services provided	Opini Audit Audit Opinion	Biaya (Rp Miliar)* Fee (in Billion)*
2023	Nama : Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PwC Indonesia) Alamat : Gedung WTC 3 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta, Indonesia, 12920	Firman Sababalat	Audit umum atas Laporan Keuangan Tahunan General audit of Annual Financial Statements	Wajar dalam semua hal yang material Fair in all material respects	46,62
	Name : Rintis, Jumadi, Rianto & Partners (PwC Indonesia) Address : WTC 3 Building Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta, Indonesia, 12920	Firman Sababalat	Ruang lingkup Audit Kepatuhan & Audit Evaluasi Kinerja. Compliance Audit & Performance Evaluation Audit.	Wajar dalam semua hal yang material Fair in all material respects	0,31
2022	Nama : Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia) Alamat : Gedung WTC 3 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta, Indonesia, 12920 Name : Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (PwC Indonesia) Address: WTC 3 Building Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta, Indonesia, 12920	Daniel Kohar	Audit umum atas Laporan Keuangan Tahunan General Audit of Annual Financial Statements	Wajar dalam semua hal yang material Fair in all material respects	37,46

Periode Penugasan Assignment Period	Nama dan Alamat KAP Name and Address of KAP	Nama Akuntan Name of Accountant	Jenis Jasa yang Diberikan Types of services provided	Opini Audit Audit Opinion	Biaya (Rp Miliar)* Fee (in Billion)*
2021	<p>Nama : Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia)</p> <p>Alamat : Gedung WTC 3 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta, Indonesia, 12920</p> <p>Name: Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (PwC Indonesia)</p> <p>Address: WTC 3 Building Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta, Indonesia, 12920</p>	Daniel Kohar	Audit umum atas Laporan Keuangan Tahunan	Wajar dalam semua hal yang material	35,05
2020	<p>Nama : Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia)</p> <p>Alamat : Gedung WTC 3 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta, Indonesia, 12920</p> <p>Name: Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (PwC Indonesia)</p> <p>Address: WTC 3 Building Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta, Indonesia, 12920</p>	Yanto	Audit umum atas Laporan Keuangan Tahunan	Wajar Tanpa Pengecualian	27,50

* Angka yang tertera merupakan total keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh PT PLN (Persero) sebagai *Holding*, untuk penugasan jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik PT PLN serta seluruh perusahaan yang tergabung dalam PLN Group.

* The figures shown are the total costs incurred by PT PLN (Persero) as Holding, for the assignment of a Public Accountant and the Public Accounting Firm of PT PLN and all companies that are members of the PLN Group

JASA LAIN DAN BIAYA

KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia) tidak memberikan jasa non audit.

Pada periode tahun 2023 selain jasa audit Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dijelaskan diatas, KAP juga memberikan jasa audit lain yaitu audit evaluasi kinerja dan audit kepatuhan dengan biaya sebesar Rp305.250.000.

Koordinasi Auditor Eksternal dan Komite Audit

Komunikasi dan koordinasi yang dilakukan antara Kantor Akuntan Publik, Komite Audit dan Manajemen untuk dapat meminimalisir kendala-kendala yang terjadi selama proses audit berlangsung. Agar proses audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan dan selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan, secara rutin dilakukan pertemuan-pertemuan yang membahas beberapa permasalahan penting yang signifikan.

OTHER SERVICES AND FEES

KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia) does not provide non-audit services.

In 2023, apart from auditing the Annual Financial Statements as described above, KAP also provides other audit services, namely performance evaluation audit and compliance audit with a fee of Rp305,250,000.

Coordination of External Auditor and Audit Committee

Communication and coordination is carried out between Public Accounting Firm, Audit Committee and Management in order to minimize the constraints that occur during the audit process. In order for audit process to comply with the Professional Standard for Accountant as well as work agreements and scope of the audit that has been determined and completed according to a predetermined time target, meetings are regularly held to discuss several important significant issues.

Lembaga/Profesi Penunjang

Supporting Institutions/Professions



AKUNTAN PUBLIK
Public Accountant

Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto & Partners

Alamat Address	WTC 3 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta, Indonesia, 12920 Telp : (021) 5099 2901 Email : alfadi.marlay@pwc.co.id
Jasa yang diberikan Services provided	Jasa General Audit, Audit Evaluasi Kinerja, Audit Kepatuhan General Audit Services, Performance Evaluation Audit, Compliance Audit
Biaya Fee	Audit umum atas Laporan Keuangan Tahunan: Untuk penugasan jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik PT PLN serta seluruh perusahaan yang tergabung dalam PLN Group. General Audit of Annual Financial Statements: For the assignment of a Public Accountant and the Public Accounting Firm of PT PLN and all companies that are members of the PLN Group. Jasa Lainnya: Other Services: Rp305.250.000.
Periode Penugasan Assignment Period	2023



LEMBAGA SERTIFIKASI
Certification Agency

Bureau Veritas Certification

Alamat Address	A-Point Bina Sentra Jl. Gatot Subroto No.8, RT.8/RW.8, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12870 Telp : (021) 29069411 Email : yenny.agustiyani@bureauveritas.com
Jasa yang diberikan Services provided	Jasa Sertifikasi Certification Services
Biaya Fee	Rp97.236.000
Periode Penugasan Assignment Period	2023



**LEMBAGA
SERTIFIKASI
KETENAGALISTRIKAN**

Electricity Certification
Agency

PT Teknik Energi Utama

Alamat
Address

Jl. Duren Tiga Selatan, RT.14/RW.2
Duren Tiga, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12760
Telp : (021) 27533094
Email : sekretariat@teu.co.id



NOTARIS

Notary

Shahreza Annaz S.H. M.Kn

Alamat
Address

Jl. Hang Lekir 9 No.1, RT.5/RW.6
Gunung, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12120
Telp : (021) 7221077
Email : notarinas@gmail.com



ASOSIASI

Association

HAKIT (Himpunan Ahli Pembangkit Tenaga Listrik Indonesia) LPL - HAKIT

Alamat
Address

Graha Induk KUD Lantai Dasar
Jln. Warung Buncit Raya No. 18-20.
Jakarta Selatan 12510
Telp : (021)27531389
Email : faratika.nuraini@hakit.org

Situs Web Perusahaan Company Website

Teknologi Informasi saat ini berperan sangat penting dalam penyebaran informasi secara cepat dan luas. *Website/* Situs web merupakan salah satu media komunikasi yang efektif antara Perusahaan dengan pemegang saham serta pemangku kepentingan. Situs web dapat membantu pemasaran produk dan layanan Perusahaan.

Sebagai bagian dari keterbukaan informasi, Perusahaan senantiasa memperbarui situs web secara berkala, agar seluruh pemangku kepentingan dapat memperoleh berbagai informasi terkini tentang Perusahaan dan produk-produknya. Pada tahun 2023, tampilan situs web Perusahaan mengalami perubahan dengan tampilan yang lebih informatif. Penyajian dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris akan memudahkan Perusahaan berkiprah secara internasional.

Situs web juga dikelola dengan tujuan yang jelas dan menyajikan informasi tentang Perusahaan antara lain:

Information Technology currently plays a very important role in disseminating information quickly and widely. Website is one of the effective communication media between the Company and its shareholders and stakeholders. The website can help in marketing the Company's products and services.

As part of information disclosure, the Company regularly updates its website, hence all stakeholders can obtain latest information about the Company and its products. In 2023, the appearance of the Company's website changed with a more informative appearance. Presentation in two languages, Indonesian and English, will make it easier for the Company to take part internationally.

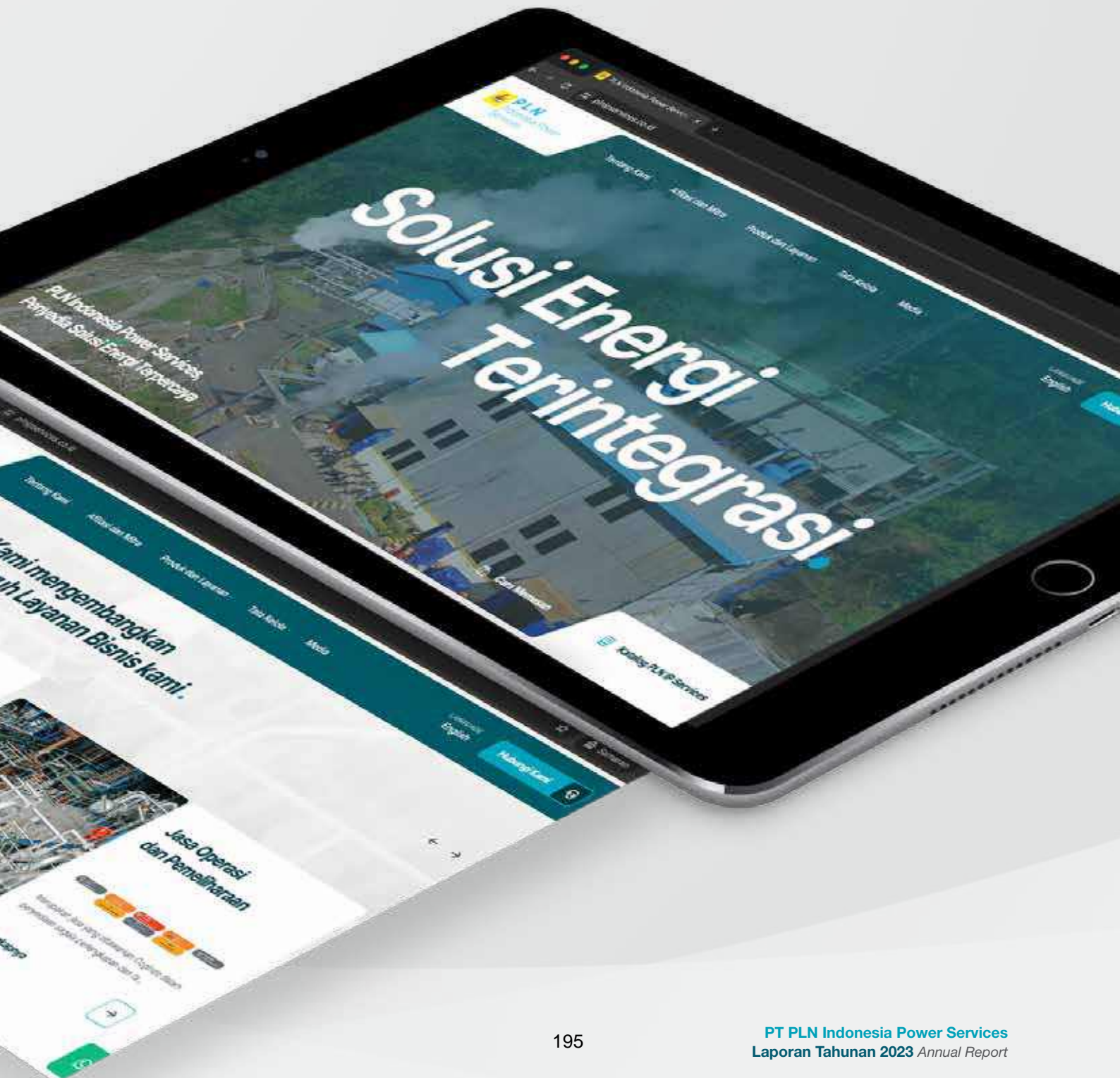
Website is also managed with clear objectives and provides information about the Company, including:

No.	Cakupan Informasi Scope of Information	Ketersediaan di Situs Web PLN IP Services Availability on PLN IP Services Website	Keterangan Description
1.	Profil Perusahaan Company Profile	√	Memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengenal Perusahaan lebih dekat dan mengetahui apa saja yang ada di dalam perusahaan. Provides information to the public to know the Company more closely and know about the company.
2.	Profil Dewan Komisaris dan Direksi Profiles of the Board of Commissioners and Board of Directors	√	Memberikan informasi singkat pengurus Perusahaan. Provides brief information about the management of the Company.
3.	Struktur Organisasi Organizational Structure	√	Memberikan gambaran Struktur Organisasi Perusahaan dalam rangka penyesuaian proses bisnis guna menciptakan fleksibilitas dan mewujudkan kinerja unggul. Provides an overview of the Organization Structure of the Company to align business processes in order to create flexibility and realize excellent performance.
4.	Informasi Produk dan Jasa Layanan Information on Products and Services	√	Menyediakan berbagai informasi produk dan jasa dalam bidang ketenagalistrikan, perindustrian, jasa dan perdagangan. Provides several information of the product and services in the field of electricity, industry, services and trade.



Melalui situs web resmi Perusahaan yang beralamat di <https://www.plnipervices.co.id>. PLN IP Services berkomitmen untuk memberikan informasi mengenai kinerja terkini secara tepat dan akurat.

Through the Company's official website which is located at <https://www.plnipervices.co.id>. PLN IP Services is committed to providing timely and accurate information regarding the latest performance.



No.	Cakupan Informasi Scope of Information	Ketersediaan di Situs Web PLN IP Services Availability on PLN IP Services Website	Keterangan Description
5.	<p>Penghargaan dan Sertifikasi</p> <p>Awards and Certifications</p>	√	<p>Memberikan berbagai informasi terkait penghargaan dan sertifikasi yang didapatkan di sektor bidang usaha yang dijalankan Perusahaan.</p> <p>Provides several information related to awards and certification received in the field of business conducted by the Company.</p>
6.	<p>Tata Kelola Perusahaan</p> <p>Corporate Governance</p>	√	<p>Menyampaikan beberapa informasi penting terkait penerapan Tata Kelola Perusahaan (Governansi Korporat) seperti Laporan Perusahaan, Sistem Anti Penyuapan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Governansi Korporat, Pelaporan Pelanggaran, dan Tata Kelola Manajemen Risiko.</p> <p>Provides several key information related to Corporate Governance, such as Company Report, Anti-Bribery System, Occupational Health and Safety (OHS), Corporate Governance, Whistleblowing, and Risk Management Governance.</p>
7.	<p>Informasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan</p> <p>Information on Social Activities</p>	√	<p>Memberikan <i>update</i> terbaru terkait dengan kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh Perusahaan.</p> <p>Provides the newest updates related to the social activities conducted by the Company.</p>
8.	<p>Artikel Berita, Dokumentasi Video, Foto dan Keterangan Pers</p> <p>News Articles, Video Documentation, Photos and Press Releases</p>	√	<p>Memberikan layanan publikasi terkait berita, dokumentasi, video, foto, dan keterangan pers yang bisa diakses oleh masyarakat umum.</p> <p>Provides publication services related to news, documentation, videos, photos, and press releases which can be accessed by the public.</p>
9.	<p>Peluang Karier</p> <p>Career Opportunities</p>	√	<p>Memberikan peluang kepada talenta-talenta terbaik Indonesia untuk bergabung dan memulai karir bersama Perusahaan.</p> <p>Provides opportunities for the brightest Indonesian talents to join and start a career with the company.</p>
10.	<p>Kontak</p> <p>Contact</p>	√	<p>Masyarakat dapat bertanya atau menyampaikan kritik dan saran kepada PLN IP Services melalui kontak dan sarana yang telah disediakan oleh Perusahaan.</p> <p>The public may ask questions or convey criticism and suggestions to PLN IP Services via the contacts and facilities provided by the Company.</p>





04 ◀

Analisa dan Pembahasan Manajemen

*Management Discussion
and Analysis*

Tinjauan Makroekonomi dan Industri

Macroeconomic and Industrial Review

TINJAUAN MAKROEKONOMI GLOBAL DAN NASIONAL 2023

Tahun 2023 menjadi tahun yang penuh tantangan sekaligus peluang bagi perekonomian Indonesia. Meskipun dihadapkan pada berbagai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang solid, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,05%. Hal ini tercermin dari Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp20.892,4 triliun, dan PDB per kapita mencapai Rp75,0 juta atau setara dengan 4.919,7 Dolar AS. Pencapaian ini menunjukkan progres positif dalam perkembangan ekonomi nasional meskipun dihadapkan pada tantangan global seperti inflasi, perubahan iklim, konflik geopolitik, dan perlambatan ekonomi di beberapa negara.

Kontribusi utama terhadap pertumbuhan ekonomi ini berasal dari konsumsi domestik yang kuat dan kinerja perdagangan internasional yang baik. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023, Pendapatan Negara dan Hibah meningkat menjadi Rp2.774,30 triliun, naik sebesar 5,25% dari tahun sebelumnya. Penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Hibah memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan fiskal. APBN 2023 berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai sasaran pembangunan, meredam dampak gejolak ekonomi global, dan memastikan kesejahteraan masyarakat.

Stabilitas nilai tukar Rupiah juga merupakan faktor kunci dalam stabilitas ekonomi. Bank Indonesia mencatat Rupiah menguat 2% pada akhir 2023 dibandingkan dengan akhir 2022. Stabilitas ini memberikan dampak positif dalam mengendalikan inflasi impor dan mendukung stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Inflasi Harga Konsumen (IHK) pada Desember 2023 mencapai 2,61% yoy, menurun dari 5,51% yoy pada tahun sebelumnya. Penurunan inflasi ini dipengaruhi oleh kebijakan moneter

GLOBAL MACROECONOMIC AND NATIONAL OVERVIEW 2023

2023 become a year full of challenges and opportunities for the Indonesian economy. Despite several global economic uncertainties, Indonesia was able to achieve solid economic growth, with economic growth reaching 5.05%. This is reflected in the Gross Domestic Product (GDP) of Rp20,892.4 trillion, and GDP per capita reaching Rp75.0 million or equivalent to 4,919.7 US Dollars. This achievement shows positive progress in national economic development despite global challenges such as inflation, climate change, geopolitical conflicts, and economic slowdown in several countries.

The main contribution to this economic growth from strong domestic consumption and good international trade performance. In the 2023 State Budget, State Revenues and Grants increased to Rp2,774.30 trillion, up by 5.25% from the previous year. Tax revenue, non-tax revenue, and grants play an important role in maintaining fiscal balance. The 2023 State Budget serves as an instrument to achieve development goals, reduce the impact of global economic turmoil, and ensure public welfare.

The stability of the Rupiah exchange rate is also a key factor in economic stability. Bank Indonesia recorded the Rupiah strengthened by 2% by the end of 2023 compared to the end of 2022. This stability positively impact in controlling imported inflation and supporting overall economic stability. Consumer Price Inflation (CPI) in December 2023 reached 2.61% yoy, down from 5.51% yoy in the previous year. This decrease in inflation was influenced by Bank Indonesia's pro-stability monetary

pro-stabilitas Bank Indonesia dan kerjasama erat antara Bank Indonesia, Pemerintah Pusat, dan Daerah. Inflasi inti tetap rendah pada 1,80% yoy tahun 2023, dipengaruhi oleh inflasi impor yang rendah, ekspektasi inflasi yang terkendali, dan kapasitas ekonomi yang responsif terhadap permintaan domestik.

Namun, dinamika ekonomi dunia yang berubah cepat membawa sejumlah tantangan pada prospek perekonomian Indonesia. Ketidakpastian geopolitik seperti konflik Rusia-Ukraina mempengaruhi pasokan energi dan pangan global serta meningkatkan ketidakpastian di pasar keuangan. Ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok juga membawa dampak pada ekspor dan impor Indonesia. Penurunan volume perdagangan global menciptakan tantangan eksternal bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya dalam sektor perdagangan. Ketegangan di Timur Tengah dan cuaca ekstrem di berbagai belahan dunia turut memperparah situasi ekonomi global.

Pemulihan ekonomi global masih berjalan lambat dan tidak merata akibat dampak pandemi COVID-19 yang berkepanjangan serta ketegangan geopolitik di berbagai wilayah. Kondisi ini mendorong fragmentasi ekonomi yang memperparah disrupsi rantai pasokan global, membatasi arus perdagangan dan investasi, serta menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi. Laporan *World Economic Outlook* edisi Januari 2024 dari *International Monetary Fund* (IMF) mengungkapkan bahwa aktivitas ekonomi global masih jauh dari level sebelum pandemi, terutama di negara-negara *emerging market*, dengan ketimpangan ekonomi yang semakin melebar antar wilayah. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global melambat dari 3,5% pada tahun 2022 menjadi 3,1% pada tahun 2023 dan diproyeksikan tetap di angka 3,1% pada tahun 2024.

Kebijakan pengetatan moneter masih diterapkan untuk mengendalikan tekanan inflasi yang masih tinggi. Meskipun tren inflasi global menunjukkan penurunan, angkanya masih berada di atas target bank sentral negara-negara maju. Berdasarkan kondisi ini, strategi kebijakan moneter "*higher for longer*" masih akan berlanjut. Aktivitas manufaktur masih terpengaruh oleh harga komoditas di pasar internasional yang tumbuh relatif lambat dibandingkan tahun sebelumnya.

policy and close cooperation between Bank Indonesia, Central and Local Governments. Core inflation remains low at 1.80% yoy in 2023, influenced by low imported inflation, manageable inflation expectations, and economic capacity responsive to domestic demand.

However, the fast-changing dynamics of the world economy bring several challenges to Indonesia's economic prospect. Geopolitical uncertainties such as the Russia-Ukraine conflict affect global energy and food supplies and increase uncertainty in financial markets. Trade tensions between the United States and China also have an impact on Indonesia's exports and imports. The decrease in global trade volume creates external challenges for Indonesia's economic growth, particularly in the trade sector. Tensions in the Middle East and extreme weather in several parts of the world also exacerbated the global economic situation.

The global economic recovery remains slow and uneven due to the prolonged impact of the COVID-19 pandemic and geopolitical tensions in several regions. These conditions are driving economic fragmentation that exacerbates global supply chain disruptions, restricts trade and investment flows, and lowers economic growth prospects. The January 2024 edition of the *World Economic Outlook* report from the *International Monetary Fund* (IMF) reveals that global economic activity is still far from pre-pandemic levels, especially in emerging market countries, with economic inequality widening between regions. The IMF expects global economic growth to slow from 3.5% in 2022 to 3.1% in 2023 and is projected to remain at 3.1% in 2024.

Monetary tightening policies are still being implemented to control high inflationary pressures. Although the global inflation trend shows a decrease, the figure is still above the target of developed countries' central banks. Based on this condition, the "higher for longer" monetary policy strategy will continue. Manufacturing activities are still affected by commodity prices in the international market which grew relatively slowly compared to the previous year.

Di sisi lain, perekonomian Indonesia tetap tumbuh dengan baik, didukung oleh permintaan domestik yang kuat. Bank Indonesia mencatat bahwa konsumsi rumah tangga dan investasi terus tumbuh sejalan dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat dan berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN). Perkembangan positif ini dikonfirmasi oleh berbagai indikator utama hingga Desember 2023, seperti keyakinan konsumen, penjualan eceran, dan *Purchasing Managers' Index* (PMI) Manufaktur. Kinerja ekspor Indonesia menunjukkan perbaikan, seiring dengan peningkatan permintaan dari beberapa mitra dagang utama seperti Cina dan Vietnam.

Pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh sektor perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, serta konstruksi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 mencapai 5,05%, dibandingkan dengan 5,31% pada tahun 2022. Nilai tukar Rupiah semakin menguat seiring dengan meredanya ketidakpastian pasar keuangan global. Pada Desember 2023, nilai tukar Rupiah menguat rata-rata sebesar 0,56% dibandingkan dengan November 2023. Secara *Year on Year*, nilai tukar Rupiah menguat 0,98% pada akhir tahun 2023 dibandingkan akhir tahun 2022. Penguatan ini didorong oleh kebijakan stabilisasi Bank Indonesia, masuknya aliran portofolio asing, menariknya imbal hasil aset keuangan domestik, serta prospek ekonomi yang tetap positif.

Perekonomian Indonesia tetap stabil di tengah tantangan global, didukung oleh peningkatan mobilitas dan pariwisata, aktivitas produksi yang solid, dan daya beli yang terjaga. Mitra dagang utama Indonesia, seperti Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat, meskipun mengalami perlambatan, tetap menunjukkan pertumbuhan ekonomi positif pada triwulan ketiga tahun 2023. Penurunan harga komoditas seperti minyak kelapa sawit (CPO), nikel, dan batubara mempengaruhi kinerja ekspor, namun sektor domestik mampu menyeimbangkan dampak tersebut.

Sektor pengadaan listrik dan gas memainkan peran vital dalam perekonomian Indonesia. Pada tahun 2023, PDB sektor pengadaan listrik dan gas atas dasar harga berlaku mencapai Rp218,2 triliun, meningkat sebesar 6,60% dari Rp204,7 triliun pada tahun 2022. Dilihat dari dasar harga konstan 2010, PDB sektor ini mencapai Rp128,5 triliun, meningkat sebesar 4,90% dari Rp122,5 triliun

In addition, the Indonesian economy continued to grow well, supported by strong domestic demand. Bank Indonesia recorded that household consumption and investment continued to grow in line with rising public confidence and the continued completion of National Strategic Projects ("PSN"). This positive development was confirmed by several key indicators until December 2023, such as consumer confidence, retail sales, and Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI). Indonesia's export performance showed improvement, along with increased demand from several key trading partners such as China and Vietnam.

Economic growth was mainly driven by the wholesale and retail trade, processing industry, and construction sectors. The Central Bureau of Statistics ("BPS") recorded that economic growth in 2023 reached 5.05%, compared to 5.31% in 2022. The Rupiah exchange rate has further strengthened in line with the easing of global financial market uncertainty. In December 2023, the Rupiah exchange rate strengthened by 0.56% on average compared to November 2023. Year on Year, the Rupiah exchange rate strengthened by 0.98% at the end of 2023 compared to the end of 2022. This strengthening is driven by Bank Indonesia's stabilization policy, inflow of foreign portfolio flows, attractive yields on domestic financial assets, and a positive economic prospect.

Indonesia's economy remained stable amid global challenges, supported by increased mobility and tourism, solid production activity, and maintained purchasing power. Indonesia's major trading partners, such as China, India, Japan, South Korea, and the United States, despite experiencing a slowdown, continued to show positive economic growth in the third quarter of 2023. The decrease in commodity prices such as palm oil (CPO), nickel, and coal affected export performance, but the domestic sector was able to balance the impact.

The electricity and gas procurement sector plays a vital role in the Indonesian economy. In 2023, the GDP of the electricity and gas procurement sector at current prices reached Rp218.2 trillion, an increase of 6.60% from Rp204.7 trillion in 2022. At constant 2010 prices, the sector's GDP reached Rp128.5 trillion, an increase of 4.90% from Rp122.5 trillion in 2022. The growth rate of the

pada tahun 2022. Laju pertumbuhan sektor pengadaan listrik dan gas atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2023 mencapai 4,91%, menurun sebesar 1,70% dari 6,61% pada tahun 2022. Meskipun ada penurunan laju pertumbuhan, distribusi PDB sektor pengadaan listrik dan gas tetap stabil di 1,04%, sama seperti tahun 2022.

Perekonomian Indonesia pada tahun 2023 berhasil menghadapi tantangan global dengan baik, terlihat dari pertumbuhan yang positif di berbagai sektor. Kebijakan ekonomi yang responsif, aktivitas produksi yang kuat, dan persiapan pemilu yang intensif menjadi faktor penopang pertumbuhan. Sektor pengadaan listrik dan gas, meskipun mengalami penurunan laju pertumbuhan, tetap menunjukkan kontribusi signifikan terhadap PDB nasional.

PT PLN Indonesia Power Services (PLN IP Services) dapat memanfaatkan informasi ini untuk perencanaan strategis dan pengembangan bisnis di masa depan. Dengan memahami tren dan dinamika dalam sektor ini, Perusahaan dapat lebih siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang untuk pertumbuhan berkelanjutan. Melalui strategi yang tepat, PLN IP Services dapat terus berkontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih baik.

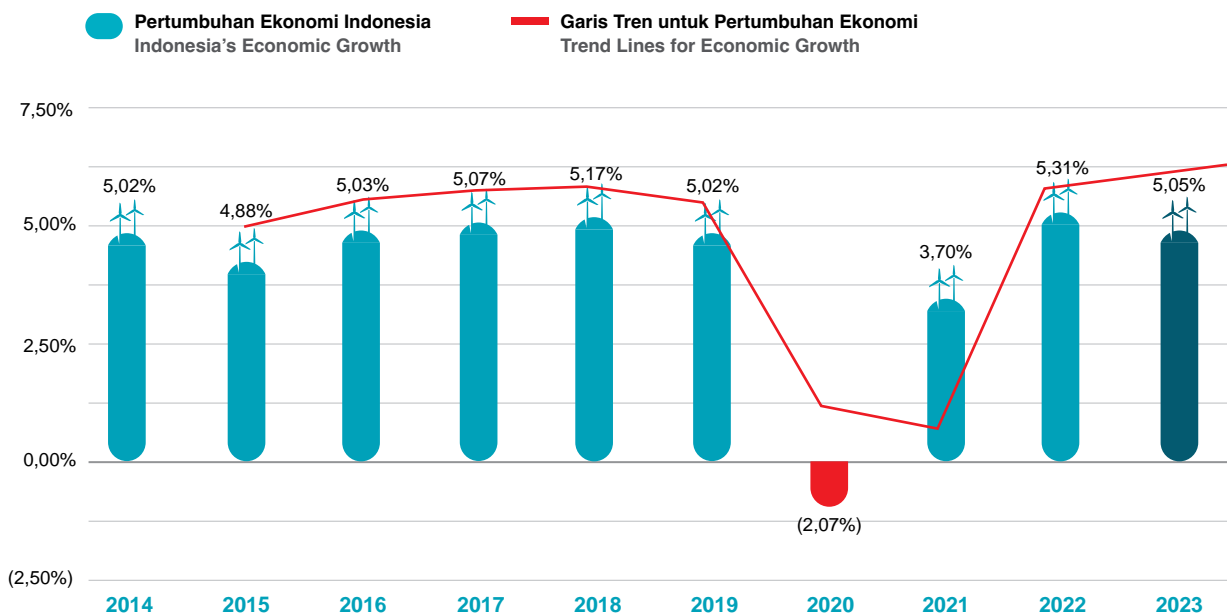
electricity and gas procurement sector at constant 2010 prices in 2023 reached 4.91%, a decrease of 1.70% from 6.61% in 2022. Despite the decrease in growth rate, the GDP distribution of the electricity and gas procurement sector remained stable at 1.04%, the same as in 2022.

The Indonesian economy in 2023 managed to encounter global challenges well, as seen from positive growth in various sectors. Responsive economic policies, robust production activity, and intensive election preparations were the factors supporting growth. The electricity and gas procurement sector, although experiencing a decrease in growth rate, still showed a significant contribution to national GDP.

PT PLN Indonesia Power Services (PLN IP Services) can utilize this information for strategic planning and future business development. By understanding the trends and dynamics in the sector, the Company can be better prepared encounter challenges and capitalize on opportunities for sustainable growth. Through the right strategy, PLN IP Services can continue to contribute to the development of a better Indonesian economy.

► **Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dalam 10 Tahun Terakhir** Indonesia's Economic Growth in the Last 10 Years

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)
Source: Statistics Indonesia (BPS)



TINJAUAN INDUSTRI KETENAGALISTRIKAN 2023

Industri ketenagalistrikan di Indonesia merupakan sektor yang sangat vital bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Dengan didukung oleh berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum, sektor ini terus mengalami perkembangan yang signifikan. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tren penjualan listrik dan jumlah pelanggan listrik di Indonesia menunjukkan pergerakan yang positif pada tahun 2023.

Tren penjualan listrik dan pertumbuhan pelanggan pada tahun 2023, industri listrik Indonesia mencatat peningkatan penjualan listrik yang signifikan. Penjualan listrik meningkat menjadi 285,23 TWh dari 270,82 TWh pada tahun 2022, menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,32% atau 14,41 TWh. Pertumbuhan ini mencerminkan strategi pemerintah yang efektif dalam memenuhi permintaan listrik yang terus meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan populasi. Peningkatan jumlah pelanggan listrik juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperluas akses listrik ke seluruh pelosok negeri.

Ditjen Ketenagalistrikan ESDM memiliki target ambisius untuk mencapai rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik 100%. Meski demikian, hingga akhir tahun 2023, masih terdapat 185.662 rumah tangga di 140 desa yang belum teraliri listrik, dengan mayoritas desa tersebut berada di Pulau Papua. Upaya mencapai target ini menghadapi tantangan geografis yang signifikan, mengingat kondisi topografi yang beragam di Indonesia.

Untuk mewujudkan 100% rasio elektrifikasi, pemerintah telah merencanakan kebutuhan sumber daya dari sisi jaringan, pembangkit, dan biaya investasi. Dibutuhkan biaya sebesar Rp22,08 triliun hingga tahun 2025, dengan alokasi 75,66% untuk perluasan jaringan listrik. Di wilayah yang sulit dijangkau, seperti Papua, pemerintah juga menganggarkan Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL) dan Stasiun Pengisian Energi Listrik (SPEL) untuk memastikan akses listrik yang merata.

ELECTRICITY INDUSTRY OVERVIEW 2023

The electricity industry in Indonesia is a vital sector for economic and social development. Supported by political, economic, social, technological, environmental, and legal aspects, the sector continues to experience significant growth. Based on data from the Directorate General of Electricity of the Ministry of Energy and Mineral Resources (“ESDM”), the trend of electricity sales and the number of electricity customers in Indonesia shows a positive movement in 2023.

Electricity sales trends and customer growth In 2023, Indonesia’s electricity industry recorded a significant increase in electricity sales. Electricity sales increased to 285.23 TWh from 270.82 TWh in 2022, representing a growth of 5.32% or 14.41 TWh. This growth reflects the government’s effective strategy in meeting the growing demand for electricity in line with economic development and population growth. The increase in the number of electricity customers also aligns with the government’s efforts to expand access to electricity to all corners of the country.

The Directorate General of Electricity of ESDM has ambitious targets to achieve a 100% electrification ratio and a 100% electrified village ratio. However, by the end of 2023, 185,662 households in 140 villages remain unelectrified, with the majority of these villages located in Papua Island. Achieving this target encounters significant geographical challenges, given Indonesia’s diverse topography.

To realize a 100% electrification ratio, the government has planned the resource requirements in terms of network, generation, and investment costs. Rp22.08 trillion is needed until 2025, with 75.66% allocated for grid expansion. In hard-to-reach areas, such as Papua, the government has also budgeted for Electric Power Distribution Equipment (“APDAL”) and Electric Energy Charging Stations (“SPEL”) to ensure equitable access to electricity.

Realisasi konsumsi listrik perkapita di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 1.337 kWh/kapita, memenuhi target yang telah direncanakan. Hal ini menunjukkan peningkatan kualitas dan kuantitas elektrifikasi di Indonesia. Selaras dengan target *Net Zero Emission* pada tahun 2060, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan demand listrik yang moderat sebesar 4.500 kWh/kapita, dengan 88% berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT) dan 12% dari energi fosil dan *Carbon Capture and Storage* (CCS).

Salah satu langkah strategis dalam mencapai target elektrifikasi dan transisi energi adalah implementasi *Supergrid*. *Supergrid* diharapkan mampu meningkatkan interkoneksi energi antar pulau dan mengatasi ketidakseimbangan bauran energi di Indonesia. Dengan adanya *Supergrid*, distribusi energi akan lebih efisien dan andal, mendukung pertumbuhan industri dan kesejahteraan masyarakat.

Kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk BUMN seperti Perusahaan Listrik Negara (PLN), BUMD, swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat, menjadi kunci dalam mewujudkan target elektrifikasi. PLN, sebagai prioritas pertama Pemegang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) di Indonesia, memainkan peran sentral dalam penyediaan listrik. Namun, partisipasi berbagai pihak juga diharapkan dapat mempercepat pencapaian target elektrifikasi dan meningkatkan pemerataan akses listrik di daerah-daerah yang belum teraliri listrik.

Industri ketenagalistrikan Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan tren positif dengan peningkatan penjualan dan jumlah pelanggan listrik. Upaya pemerintah untuk mencapai rasio elektrifikasi dan desa berlistrik 100% menghadapi tantangan geografis, namun dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan, target ini diharapkan dapat tercapai. Implementasi *Supergrid* dan fokus pada energi terbarukan juga menjadi langkah penting dalam mendukung transisi energi dan mencapai target *Net Zero Emission* pada tahun 2060. PT PLN Indonesia Power Services (PLN IP Services), sebagai bagian dari ekosistem ketenagalistrikan, diharapkan terus berkontribusi dalam upaya ini untuk mewujudkan industri listrik yang andal, berkelanjutan, dan inklusif di Indonesia.

The realization of electricity consumption per capita in Indonesia in 2023 reached 1,337 kWh/capita, fulfilling the planned target. This shows an improvement in the quality and quantity of electrification in Indonesia. In line with the Net Zero Emission target by 2060, the government projects a moderate growth in electricity demand of 4,500 kWh/capita, with 88% coming from Renewable Energy (RE) and 12% from fossil energy and Carbon Capture and Storage (CCS).

One of the strategic initiatives to achieve electrification and energy transition targets is the implementation of Supergrid. Supergrid is expected to improve energy interconnection between islands and manage the imbalance of the energy mix in Indonesia. With Supergrid, energy distribution will be more efficient and reliable, supporting industrial growth and community welfare.

Collaboration from all stakeholders, including SOEs such as Perusahaan Listrik Negara (PLN), ROEs, the private sector, cooperatives, and self-help communities, is key in realizing the electrification target. PLN, as the priority Electricity Supply Business Holder (“IUPTL”) in Indonesia, plays a vital role in providing electricity. However, the participation of various parties is also expected to accelerate the achievement of the electrification target and increase equitable access to electricity in areas not yet electrified.

Indonesia’s electricity industry in 2023 is showing a positive trend with increasing sales and the number of electricity customers. The government’s efforts to achieve a 100% electrification ratio and electrified villages encounter geographical challenges, but with careful planning and collaboration from various stakeholders, these targets are expected to be achieved. The implementation of Supergrid and the focus on renewable energy are also important steps in supporting the energy transition and achieving the Net Zero Emission target by 2060. PT PLN Indonesia Power Services (PLN IP Services), as part of the electricity ecosystem, is expected to continue contributing to this effort to realize a reliable, sustainable, and inclusive electricity industry in Indonesia.

Tinjauan Operasi per Segmen

Operational Performance Overview by Segment

PT PLN Indonesia Power Services, sebagai anak perusahaan dari PT PLN Indonesia Power, telah menunjukkan kinerja yang kuat dalam penyediaan tenaga listrik dan jasa pemeliharaan pembangkit. Dalam operasinya, perusahaan membagi segmen usahanya menjadi tiga bagian utama: jasa Penyediaan Energi, Jasa *Operation and Maintenance* (O&M), Jasa *Maintenance, Repair & Overhaul* (MRO).

Kontribusi segmen terhadap kinerja keuangan Perusahaan disajikan pada tabel-tabel di bawah ini:

PT PLN Indonesia Power Services, as a subsidiary of PT PLN Indonesia Power, has shown strong performance in power supply and plant maintenance services. In its operations, the company divides its business segments into three main parts: Energy Supply services, Operation and Maintenance (O&M) services, Maintenance, and Repair & Overhaul (MRO) services.

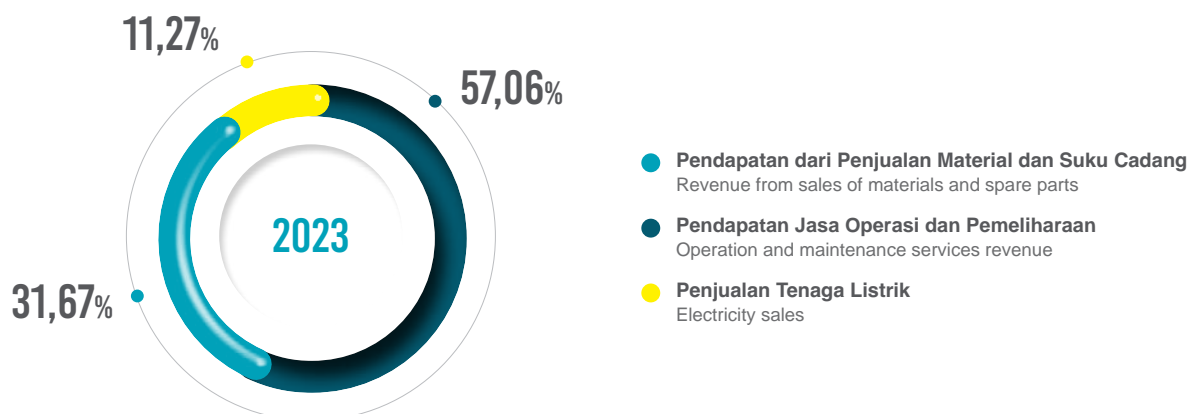
Segment contributions to the Company's financial performance are presented in the tables below:

► **Tabel Kinerja Segmen Usaha Perusahaan**
Table of Company's Business Segment Performance

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan/ (Penurunan) Increase/ (Decrease)		Description
			Rp	%	
Pendapatan dari Penjualan Material dan Suku Cadang	509.128	942.906	(433.778)	(46,00%)	Revenue from sales of materials and spare parts
Pendapatan Jasa Operasi dan Pemeliharaan	917.384	652.933	264.451	40,50%	Operation and maintenance services revenue
Penjualan Tenaga Listrik	181.141	156.627	24.514	15,65%	Electricity sales
Jumlah Pendapatan Usaha	1.607.653	1.752.466	(144.813)	(8,26%)	Total Revenue

Dalam juta Rupiah | In Rupiah million

► **Pie Chart Kontribusi Penjualan Per-Segmen**
Sales Contribution Per-Segment Pie Chart



SEGMENT PENYEDIAAN ENERGI

PT PLN Indonesia Power Services terus berupaya untuk meningkatkan kinerja pembangkitan energi listrik guna memenuhi kebutuhan tenaga listrik PLN dan mendukung stabilitas pasokan energi listrik nasional. Penyediaan tenaga listrik dilakukan melalui pembangkitan energi listrik dari pembangkit yang dimiliki Perusahaan, yaitu PLTD Tenau dan PLTD Nusa Penida.

Produksi Tenaga Listrik

PLN IP Services telah berupaya untuk meningkatkan jumlah produksi listrik. Perhitungan Produksi Listrik dapat digambarkan menggunakan *Capacity Factor* (CF) dan jumlah tenaga listrik yang dihasilkan (GWh).

► **Tabel CF Pembangkit Listrik (%)**
Table of Power Plant CF (%)

Unit Pembangkit	2023	2022	Pertumbuhan Growth	Generation Unit
KORPORAT	55,53	49,07	13,16%	CORPORATE
TENAU	54	54	-	TENAU
NUSA PENIDA	62,32	67,46	(7,62%)	NUSA PENIDA

Pada tahun 2023, CF untuk produksi listrik korporat mencapai 55,53%, meningkat signifikan sebesar 13,16% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 49,07%. Peningkatan ini mencerminkan efisiensi dan peningkatan kinerja operasional PLN IP Services secara keseluruhan.

Sepanjang periode Januari hingga Desember 2023, CF untuk produksi Tenau tetap konsisten pada angka yang sama yaitu, 54%.

Pembangkit listrik Nusa Penida mengalami penurunan CF dari 67,46% pada tahun 2022 menjadi 62,32% pada tahun 2023, turun sebesar 7,62%. Meskipun demikian, CF Nusa Penida mendekati target yang ditetapkan sebesar 65%, menunjukkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan efisiensi produksi.

► **Tabel Produksi Listrik (GWh)**
Table of Electricity Production (GWh)

Unit Pembangkit	2023	2022	Pertumbuhan Growth	Generation Unit
KORPORAT	265,10	191,21	38,64%	CORPORATE
TENAU	210,50	140,33	50%	TENAU
NUSA PENIDA	54,60	49,91	9,40%	NUSA PENIDA

ENERGY SUPPLY SEGMENT

PT PLN Indonesia Power Services continues to strive to improve the performance of electrical energy generation to meet PLN's electricity needs and support the stability of the national electricity supply. The provision of electricity is conducted through the generation of electrical energy from the Company's power plants, namely PLTD Tenau and PLTD Nusa Penida.

Electricity Production

PLN IP Services has strived to increase the amount of electricity production. Electricity Production Calculation can be described using Capacity Factor (CF) and the amount of electricity produced (GWh).

In 2023, CF for corporate electricity production reached 55.53%, a significant increase of 13.16% compared to 2022 of 49.07%. This increase reflects the efficiency and improved operational performance of PLN IP Services as a whole.

Throughout the January to December 2023 period, CF for Tenau's production remains consistent at the same rate of 54%.

Nusa Penida power plant experienced a decrease in CF from 67.46% in 2022 to 62.32% in 2023, a decrease of 7.62%. Nevertheless, Nusa Penida's CF is close to the set target of 65%, showing continuous efforts to improve production efficiency.

Penjualan Tenaga Listrik

Pada tahun 2023, penjualan tenaga listrik mencapai total 265,10 GWh, mengalami peningkatan sebesar 38,64% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 191,21 GWh. Peningkatan yang signifikan ini mencerminkan hasil dari upaya peningkatan kinerja di masing-masing unit pembangkit.

Realisasi produksi energi listrik dari unit pembangkit Tenau mencapai 210,50 GWh sepanjang tahun 2023. Angka ini mencerminkan peningkatan yang signifikan sebesar 48,97% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Penjualan energi listrik dari unit pembangkit Nusa Penida mencapai 54,60 GWh sepanjang tahun 2023. Ini merupakan peningkatan sebesar 9,40% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022.

Kinerja Operasi Pembangkit Listrik

Keberhasilan operasional pembangkit listrik ditentukan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi produksi dan penjualan tenaga listrik. Tingkat keandalan pembangkit sangat dipengaruhi oleh pemantauan yang cermat dan pemeliharaan yang efektif. Faktor-faktor ini sangat penting untuk memastikan ketersediaan dan efisiensi pembangkit dalam menyediakan tenaga listrik yang stabil dan andal.

1. Faktor Ketersediaan

Faktor ketersediaan mesin pembangkit diukur berdasarkan dua indikator utama, yaitu :

a. *Equivalent Availability Factor (EAF)*

Equivalent Availability Factor (EAF) menunjukkan tingkat kesiapan suatu pembangkit untuk beroperasi dalam menghasilkan tenaga listrik. Nilai EAF digunakan untuk menilai faktor ketersediaan pembangkit untuk beroperasi dengan Daya Mampu Netto (DMN) pada periode tertentu. Semakin tinggi nilai EAF, semakin baik tingkat kesiapan pembangkit.

Realisasi kinerja *Equivalent Availability Factor (EAF)* Korporat yang terdiri dari Unit PLTD Nusa Penida dan PLTD Tenau periode Januari s/d Desember 2023 adalah 96,09% dengan pencapaian sebesar 110,60% dari target sebesar 86,88%.

Electricity Sales

In 2023, electric power sales totaled 265.10 GWh, an increase of 38.64% compared to the previous year of 191.21 GWh. This significant increase reflects the results of performance improvement efforts in each generating unit.

Realized electrical energy production from the Tenau generating unit reached 210.50 GWh throughout 2023. This figure reflects a significant increase of 48.97% compared to the previous year.

Sales of electrical energy from the Nusa Penida generating unit reached 54.60 GWh throughout 2023. This represents an increase of 9.40% compared to the same period in 2022.

Power Plant Operation Performance

The successful operation of a power plant is determined by various factors that affect the production and sale of electricity. The level of plant reliability is greatly influenced by careful monitoring and effective maintenance. These factors are critical to ensure the availability and efficiency of the plant in providing stable and reliable power.

1. Availability Factor

The availability factor of generating machinery is measured based on two main indicators, namely :

a. *Equivalent Availability Factor (EAF)*

Equivalent Availability Factor (EAF) shows the level of readiness of a plant to operate in producing electricity. The EAF value is used to assess the plant's availability factor to operate with Net Capable Power ("DMN") at a certain period. The higher the EAF value, the better the readiness level of the plant.

The realization of the Corporate *Equivalent Availability Factor (EAF)* performance consisting of the Nusa Penida PLTD Unit and Tenau PLTD for the period January to December 2023 was 96.09% with an achievement of 110.60% of the target of 86.88%.

► **Tabel EAF Pembangkit Listrik (%)**
Table of Power Plant EAF (%)

Unit Pembangkit	2023	2022	Pertumbuhan Growth	Generation Unit
KORPORAT	96,09	98,27	(2,22%)	CORPORATE
TENAU	93,71	97,12	(3,51%)	TENAU
NUSA PENIDA	98,46	99,75	(1,29%)	NUSA PENIDA

b. Scheduled Outage Factor (SOF)

Scheduled Outage Factor (SOF) digunakan untuk mengukur tingkat keluarnya pembangkit dari sistem karena pemeliharaan yang telah direncanakan, yaitu *Planned Outage Hour* dan *Maintenance Outage Hour*. Semakin rendah nilai SOF, semakin optimal pembangkit dalam melakukan pemeliharaan yang telah direncanakan.

b. Scheduled Outage Factor (SOF)

Scheduled Outage Factor (SOF) used to measure the level of plant outage from the system due to planned maintenance, namely *Planned Outage Hour* and *Maintenance Outage Hour*. The lower the SOF value, the more optimal the plant is in performing planned maintenance.

► **Tabel SOF Pembangkit Listrik (%)**
Table of Power Plant SOF (%)

Unit Pembangkit	2023	2022	Pertumbuhan Growth	Generation Unit
KORPORAT	3,35	1,11	201,80%	CORPORATE
TENAU	5,46	2,46	121,95%	TENAU
NUSA PENIDA	1,00	0,2	400%	NUSA PENIDA

2. Faktor Gangguan

Untuk mengetahui gangguan mesin pembangkit diukur berdasarkan indikator *Equivalent Forced Outage Rate (EFOR)*.

Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) untuk mengukur tingkat mesin pembangkit keluar paksa atau ketidaksiapan unit untuk beroperasi karena gangguan. Semakin rendah nilai EFOR menunjukkan keandalan unit pembangkit lebih baik dan dapat mengatasi gangguan lebih cepat.

Realisasi pencapaian *Equivalent Forced Outage Rate (EFOR)* Korporat yang terdiri dari Unit PLTD Nusa Penida dan PLTD Tenau. Periode Januari s/d Desember 2023 adalah 0,91% dengan pencapaian sebesar 166,88% dari target sebesar 2,26%.

2. Disruption Factor

To determine the disruption of the generating machine, it is measured based on the *Equivalent Forced Outage Rate (EFOR)* indicator.

Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) to measure the level of forced outage or unpreparedness of the generating unit to operate due to interference. The lower the EFOR value, the better the reliability of the generating unit and the faster it can overcome disruptions.

The realization of the achievement of the Corporate *Equivalent Forced Outage Rate (EFOR)* consisting of the Nusa Penida PLTD Unit and Tenau PLTD. The period January to December 2023 is 0.91% with an achievement of 166.88% of the target of 2.26%.

► **Tabel EFOR (%)**
Table of EFOR (%)

Indikator	2023	2022	Pertumbuhan Growth	Indicator
KORPORAT	0,75	0,32	134,38%	EAF CORPORATE
TENAU	1,32	0,81	62,96%	EAF TENAU
NUSA PENIDA	0,34	0,07	385,71%	EAF NUSA PENIDA

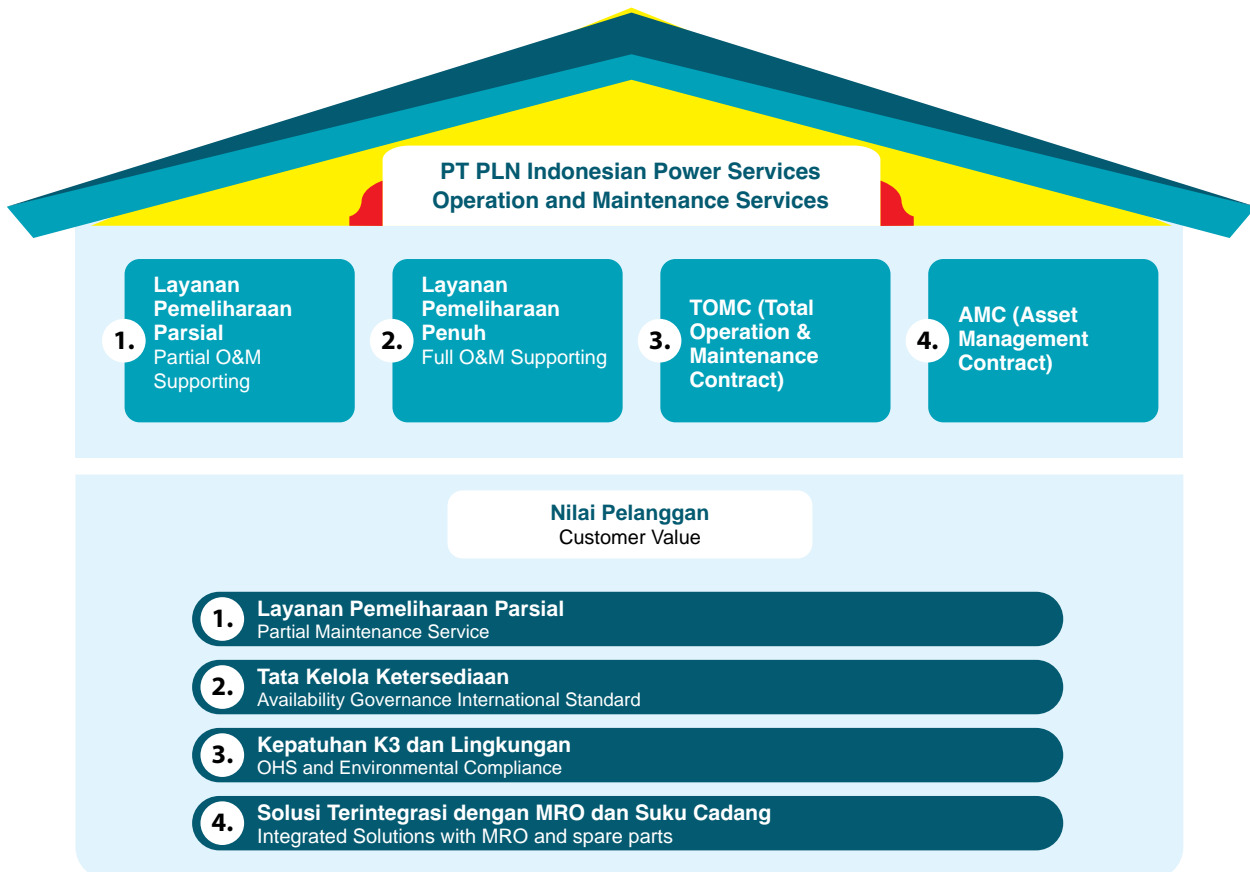
SEGMENT JASA OPERATION AND MAINTENANCE (O&M)

PT PLN Indonesia Power Services, atau lebih dikenal sebagai PLN IP Services, memiliki pengalaman yang luas dalam mengelola operasi dan pemeliharaan (O&M) berbagai jenis pembangkit listrik di seluruh Indonesia. Dengan mengelola total 42 unit pembangkit listrik, PLN IP Services telah menjadi pemimpin dalam layanan O&M untuk berbagai jenis pembangkit, termasuk PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap), PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas), PLTGU (Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap), PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi), PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air), dan PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel).

OPERATIONS AND MAINTENANCE (O&M) SERVICE SEGMENT

PT PLN Indonesia Power Services, also known as PLN IP Services, has extensive experience in managing the operations and maintenance (O&M) of various types of power plants throughout Indonesia. By managing a total of 42 power plant units, PLN IP Services has become a leader in O&M services for various types of power plants, including coal-fired power plants (PLTU), gas power plants (PLTG), combined cycle power plants (PLTGU), geothermal power plants (PLTP), hydroelectric power plants (PLTA), and diesel power plants (PLTD).

Skema Layanan O&M PLN IP Services
PLN IP Services O&M Service Scheme



Pada Tahun 2023 Produksi Jasa O&M tidak termasuk dalam KPI Korporat, dan terdiri dari PLTU Sanggau, PLTP Ulumbu, PLTU Sintang dan PLTU Holtekamp. Adapun kinerja unit Pembangkit Jasa *Operation and Maintenance* (O&M) yaitu :

In 2023 O&M Service Production is not included in the Corporate KPI and consists of Sanggau PLTU, Ulumbu PLTP, Sintang PLTU, and Holtekamp PLTU. The performance of the Operation and Maintenance (O&M) Services Plant unit is:

► **Tabel Unit Pembangkit Jasa O&M (GWh)**
Table of O&M Service Generating Units (GWh)

Unit Pembangkit	2023	2022	Pertumbuhan Growth	Generation Unit
Sintang	128,98	136,89	(5,78%)	Sintang
Sanggau	96,20	75,73	27,03%	Sanggau
Holtekamp	55,04	59,99	(8,25%)	Holtekamp
Ulumbu	57,42	55,29	3,85%	Ulumbu
Jumlah Produksi Listrik Jasa O&M	282,60	327,90	(13,82%)	Total Electricity Production of O&M Services

Berdasarkan Unit Pembangkit Jasa O&M (GWh), terlihat adanya fluktuasi dalam produksi listrik dari tahun 2022 ke 2023 di beberapa unit pembangkit. Total produksi listrik jasa O&M mengalami penurunan sebesar 13,82%, dari 327,90 GWh pada tahun 2022 menjadi 282,60 GWh pada tahun 2023.

Based on the O&M Service Generating Unit (GWh), there are fluctuations in electricity production from 2022 to 2023 in several generating units. Total O&M service electricity production decreased by 13.82%, from 327.90 GWh in 2022 to 282.60 GWh in 2023.

Unit Pembangkit Sintang mengalami penurunan produksi sebesar 5,78%, dari 136,89 GWh pada tahun 2022 menjadi 128,98 GWh pada tahun 2023. Sebaliknya, Unit Pembangkit Sanggau menunjukkan peningkatan produksi sebesar 27,03%, dari 75,73 GWh menjadi 96,20 GWh. Di sisi lain, produksi listrik di Unit Pembangkit Holtekamp menurun sebesar 8,25%, dari 59,99 GWh menjadi 55,04 GWh, sementara Unit Pembangkit Ulumbu mencatat peningkatan produksi sebesar 3,85%, dari 55,29 GWh menjadi 57,42 GWh.

The Sintang Generating Unit experienced a 5.78% decrease in production, from 136.89 GWh in 2022 to 128.98 GWh in 2023. In contrast, the Sanggau Generating Unit showed an increase in production of 27.03%, from 75.73 GWh to 96.20 GWh. Meanwhile, electricity production at the Holtekamp Generating Unit decreased by 8.25%, from 59.99 GWh to 55.04 GWh, while the Ulumbu Generating Unit recorded an increase in production of 3.85%, from 55.29 GWh to 57.42 GWh.

Secara keseluruhan, penurunan produksi listrik jasa O&M pada tahun 2023 sebagian besar dipengaruhi oleh pemeliharaan terencana pada beberapa unit pembangkit. Kegiatan pemeliharaan seperti *overhaul* sangat penting untuk memastikan keandalan dan efisiensi jangka panjang dari unit pembangkit, meskipun dapat menyebabkan penurunan produksi sementara.

Overall, the decrease in electricity production of O&M services in 2023 is mostly influenced by planned maintenance on some generating units. Maintenance activities such as overhauls are crucial to ensure the long-term reliability and efficiency of generating units, although they may cause a temporary decrease in production.

SEGMENT GAS DIESEL ENGINE SERVICES

Segmen *Gas Diesel Engine Services* berfokus pada pemeliharaan dan operasional mesin-mesin diesel berbahan bakar gas. Layanan ini mencakup instalasi, perawatan rutin, serta perbaikan dan peningkatan kinerja mesin diesel yang digunakan untuk pembangkit listrik.

GAS DIESEL ENGINE SERVICES SEGMENT

The Gas Diesel Engine Services segment focuses on the maintenance and operation of gas-fueled diesel engines. These services include installation, routine maintenance, and repair and performance enhancement of diesel engines used for power generation. These engines are

Mesin ini sering digunakan di daerah-daerah terpencil yang memerlukan sumber energi listrik yang handal.

Keunggulan segmen ini adalah efisiensi bahan bakar dan emisi yang lebih rendah dibandingkan mesin diesel konvensional. Layanan ini juga melibatkan pelatihan teknisi lokal untuk memastikan mesin-mesin tersebut selalu terawat dengan baik.

Dengan adanya Segmen *Gas Diesel Engine Services*, diharapkan kebutuhan energi dapat terpenuhi dengan cara yang lebih ramah lingkungan dan mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah. Segmen ini membantu meningkatkan keandalan dan efisiensi pembangkit listrik, yang pada akhirnya membantu menstabilkan pasokan listrik dan mendukung pembangunan infrastruktur energi.

Pada bidang usaha *Gas Diesel Engine Services*, pekerjaan penyediaan sparepart dan jasa yang sudah terkontrak sampai dengan akhir tahun 2023 dapat terlihat pada tabel berikut:

often used in remote areas that require a reliable source of electrical energy.

The advantages of this segment are fuel efficiency and lower emissions compared to conventional diesel engines. The service also involves training local technicians to ensure the machines are always well maintained.

With the Gas Diesel Engine Services segment, it is expected that energy needs can be met in a more environmentally friendly way and support economic growth in various regions. This segment helps improve the reliability and efficiency of power plants, ultimately helping to stabilize electricity supply and support energy infrastructure development.

In the Gas Diesel Engine Services business area, the work of providing spare parts and services that have been contracted until the end of 2023 can be seen in the following table:

No.	Pelanggan Customer	Unit	Jangka Waktu Pekerjaan Term of Work
1.	PT. Indonesia Power	PLTDG Pesanggaran	Januari 2023 - November 2023 January 2023 - November 2023
		PLTD Legon Bajak	Januari 2023 - Agustus 2023 January 2023 - August 2023
		PLTMG MPP Sorong	Januari 2023 - April 2023 January 2023 - April 2023
		PLTMG Manokwari	Januari 2023 - Maret 2023 January 2023 - March 2023
		PLTMG Nabire	Juli 2023 - September 2023 July 2023 - September 2023
		MPP Papua	Februari 2023 - Juni 2024 February 2023 - June 2024
		PLTG Sei Gelam	April 2023 - Desember 2023 April 2023 - December 2023
		PLTD Tello	Mei 2023 - Juni 2023 May 2023 - June 2023
		PLTA Saguling	April 2023 - Desember 2023 April 2023 - December 2023
		PLTP Ulubelu	Agustus 2023 - Desember 2023 August 2023 - December 2023
		PLTG Borang	September 2023 September 2023
		PLTMG Biak	November 2023 November 2023
		PLTMG Merauke	September 2023 - Oktober 2023 September 2023 - October 2023
		PLTGU Lombok Peaker	November 2023 - Desember 2023 November 2023 - December 2023
2.	PT PLN IP Mrica PGU	PLTP Ulumbu	Juli 2023 - Desember 2023 July 2023 - December 2023
		PLTP Kamojang	Juli 2023 - November 2023 July 2023 - November 2023
		PLTA PB Soedirman	Juni 2023 - September 2023 June 2023 - September 2023

No.	Pelanggan Customer	Unit	Jangka Waktu Pekerjaan Term of Work
3.	PT PLN IP Kamojang POMU	PLTA Timo	Juli 2023 - Agustus 2023 July 2023 - August 2023
		PLTGU Priok	Juli 2023 - Desember 2023 July 2023 - December 2023
		PLTA Kedungombo	Juni 2023 - Agustus 2023 June 2023 - August 2023
		PLTA Jelok	Agustus 2023 - Oktober 2023 August 2023 - October 2023
4.	PT. Pembangkit Jawa Bali (PJB)	PLTMG Arun	Januari 2023 - Juni 2023 January 2023 - June 2023
5.	PT. PLN Sektor Pekanbaru	PLTMG Balai Pungut Duri	Januari 2023 - Desember 2023 January 2023 - December 2023
6.	PT PLN IP Semarang PGU	PTGU Semarang	Agustus 2023 August 2023
7.	PT. PLN IP Grati POMU	PLTU Grati	Juni 2023 - Agustus 2023 June 2023 - August 2023
8.	PT PLN IP Cilegon PGU	PLTGU Cilegon	Juni 2023 - Desember 2023 June 2023 - December 2023
9.	PT PLN IP UPDK Jambi	PLTG Payo Selincah	Agustus 2023 - Oktober 2023 August 2023 - October 2023
10.	ITH	PLTS Aisin	September 2023 - April 2024 September 2023 - April 2024
11.	PT PLN IP UPDK Mahakam	PLTD Sentawar	September 2023 - Februari 2024 September 2023 - February 2024
12.	PT Star Energy	PLTP Gunung Salak	Oktober 2023 - Desember 2023 October 2023 - December 2023
13.	PT PLN IP UPDK Bengkulu	PLTA Musi	Desember 2023 December 2023

SEGMENT MAINTENANCE REPAIR OVERHAUL (MRO)

Segmen *Maintenance Repair Overhaul* (MRO) berfokus pada pemeliharaan, perbaikan, dan *overhaul* (perombakan menyeluruh) peralatan dan mesin industri. Layanan MRO mencakup pemeriksaan rutin, perbaikan kerusakan, penggantian suku cadang, dan peningkatan kinerja mesin agar tetap beroperasi dengan efisien dan andal. Segmen ini sangat penting untuk memastikan mesin dan peralatan industri selalu dalam kondisi optimal, meminimalkan *downtime*, dan memperpanjang umur operasional mesin.

Pada tahun ini, segmen MRO kami terus menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberikan layanan yang komprehensif dan berkualitas tinggi untuk mendukung operasional dan keandalan unit pembangkit. Berikut adalah berbagai layanan MRO yang kami sediakan:

MAINTENANCE REPAIR OVERHAUL (MRO) SEGMENT

The Maintenance Repair Overhaul (MRO) segment focuses on the maintenance, repair, and comprehensive overhaul of industrial equipment and machinery. MRO services include routine inspections, repair of damages, replacement of parts, and performance enhancements to ensure machines operate efficiently and reliably. This segment is crucial for keeping industrial machinery in optimal condition, minimizing downtime, and extending the operational lifespan of the equipment.

This year, our MRO segment continued to show a strong commitment to providing comprehensive and high-quality services to support the operation and reliability of generating units. Below are the various MRO services that we provide:

- **Layanan Modifikasi, Rehabilitasi, dan Relokasi**

Kami menawarkan layanan yang mencakup pembongkaran, relokasi, perbaikan, instalasi, modifikasi, dan pengujian komisi yang diasuransikan. Dengan tim profesional berpengalaman, kami memastikan bahwa setiap proyek diselesaikan dengan standar tertinggi dan sesuai dengan kebutuhan spesifik pelanggan.

- **Engineering, Procurement, & Construction (EPC)**

Dalam upaya meningkatkan kinerja dan efisiensi unit pembangkit, kami menyediakan layanan teknik, pengadaan, dan konstruksi dengan harga yang kompetitif. Tim EPC kami berfokus pada peningkatan semua unit pembangkit, memastikan bahwa setiap *upgrade* dilakukan secara efisien dan efektif.

- **Pemeliharaan Berkala / Overhaul**

PLN IP Services memberikan layanan pemeliharaan berkala yang mencakup inspeksi menyeluruh serta pemeliharaan mekanikal, elektrikal, dan instrumen & kontrol. Kami memastikan bahwa setiap unit pembangkit tetap dalam kondisi optimal melalui program pemeliharaan yang sistematis dan terjadwal.

- **Kontrak Pemeliharaan Total**

Layanan pemeliharaan total untuk unit pembangkit meliputi penyediaan suku cadang OEM/non-OEM, bahan habis pakai, peralatan umum, layanan pemeliharaan peralatan, layanan pemeliharaan rutin, serta layanan prediktif dan preventif dalam satu paket untuk periode tertentu. Kontrak ini dirancang untuk memberikan ketenangan pikiran bagi pelanggan dengan memastikan ketersediaan dan keandalan unit pembangkit secara konsisten.

- **Pemecahan Masalah (Troubleshooting)**

Pemecahan masalah di berbagai area unit pembangkit dilakukan oleh ahli profesional dan bersertifikat. Layanan ini mencakup masalah dalam pemantauan, instrumen, analisis getaran, dan inspeksi lapangan. Kami berkomitmen untuk memberikan solusi cepat dan tepat untuk setiap tantangan operasional yang dihadapi.

- **Modification, Rehabilitation, and Relocation Services**

We offer services that include demolition, relocation, repair, installation, modification, and insured commissioning. With a team of experienced professionals, we ensure that every project is completed to the highest standards and according to the specific needs of the customer.

- **Engineering, Procurement, & Construction (EPC)**

To improve the performance and efficiency of generating units, we provide engineering, procurement, and construction services at competitive prices. Our EPC team focuses on upgrading all generating units, ensuring that each upgrade is conducted efficiently and effectively.

- **Periodic Maintenance / Overhaul**

PLN IP Services provides periodic maintenance services that include thorough inspections and mechanical, electrical, and instrument & control maintenance. We ensure that each generating unit remains in optimal condition through a systematic and scheduled maintenance program.

- **Total Maintenance Contract**

Total maintenance services for generating units include the provision of OEM/non-OEM spare parts, consumables, general equipment, equipment maintenance services, routine maintenance services, as well as predictive and preventive services in one package for a specified period. This contract is designed to provide peace of mind for the customer by ensuring consistent availability and reliability of the generating unit.

- **Troubleshooting**

Troubleshooting in different areas of the generating unit is conducted by professional and certified experts. This service covers problems in monitoring, instruments, vibration analysis, and field inspections. We are committed to providing quick and appropriate solutions to any operational challenges encountered.

- **Perbaikan dan Pemulihan (*Breakdown/Recovery Corrective*)**

Ketika unit pembangkit mengalami masalah, PLN IP Services menyediakan solusi melalui program inspeksi dan pemulihan. Layanan ini memastikan bahwa unit kembali beroperasi dengan cepat dan aman, meminimalkan waktu henti yang dapat mempengaruhi kinerja keseluruhan.

- **Repair, Reverse Engineering, Repowering & Retrofit**

Paket layanan kami meliputi retrofit, rekondisi, *reverse engineering*, dan perbaikan lainnya pada unit pembangkit. Dengan pendekatan inovatif dan teknik terbaru, kami memastikan bahwa setiap unit dapat beroperasi dengan efisiensi dan keandalan yang lebih tinggi.

Layanan MRO tersebut dikelompokkan ke dalam 3 bidang usaha yaitu MRO *Repair*, MRO *Overhaul*, dan MRO-VO. Adapun informasi terkait progres pekerjaan unit MRO yang sudah terkontrak pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

MRO – Repair

Pada bidang usaha MRO-*Repair*, pekerjaan yang sudah terkontrak dengan 5 Mitra sampai dengan akhir tahun 2023 sebanyak 64 kontrak. Untuk rinciannya dapat terlihat pada tabel berikut:

- **Breakdown and Recovery Corrective**

When generating units experience problems, PLN IP Services provides solutions through inspection and recovery programs. These services ensure the unit is returned to operation quickly and safely, minimizing downtime that could affect overall performance.

- **Repair, Reverse Engineering, Repowering & Retrofit**

Our service packages include retrofitting, reconditioning, reverse engineering, and other repairs to generating units. With innovative approaches and the latest techniques, we ensure every unit can operate with higher efficiency and reliability.

MRO Services mapped in the 3 fields namely MRO Repair, MRO Overhaul, and MRO-VO. As for the information related to work progress unit of MRO that contracted in 2023 is as follows:

MPO - Repair

In the MRO- Repair business field, the work that has been contracted with 5 Partners until the end of 2023 is 64 contracts. The details can be seen in the following table:

No.	Mitra Partner	Pelanggan Customer
1.	PT. TAKA TURBOMACHINERY INDONESIA	IP Lontar OMU IP UJP Pangkalan Susu IP Kamojang POMU IP Mrica PGU IP Labuan OMU IP Barru OMU IP Pel. Ratu OMU IP Sanggau OMU IP MSU IP Cilegon OMU PT. CDB IP Adipala OMU IP Suralaya OMU / BSR IP Berau PT. Poeser Indonesia PT. IP Jambi Payo selincah

No.	Mitra Partner	Pelanggan Customer
Jumlah I Total		16
2.	PT. SINAR SAKTI MATRA NUSANTARA	IP Pns. OMU IP Kamojang POMU IP Suralaya OMU/BSR IP Grati OMU IP Lontar OMU IP Labuan OMU IP Pel. Ratu OMU IP Adipala OMU IP Jeranjang OMU IP Barru OMU IP Priok PGU IP Semarang PGU IP Cilegon PGU IP Suralaya PGU / SLA IP MSU IP Holtekemp PT. CDB PT. Indo Ridlatama IRP
Jumlah I Total		18
3.	KSO COGINDO VARLEY	IP PLTU SURALAYA OMU IP PLTU BANTEN 2 LABUAN OMU MSU PRO POMU IP LONTAR IP LABUHAN ANGIN PLTU Adipala PLTG 04 Pesanggaran IP Mrica PLTU Barru UPK Teluk Sirih PLTGU CLG JPR CDB
Jumlah I Total		14

No.	Mitra Partner	Pelanggan Customer
4.	KSO COGINDO ANDALAN	IP LONTAR IP Adipala MSU IP Barru Jeranjang Suralaya OMU IP Semarang IRP JPR IP Priok Cilegon PGU PLTU Berau PLTU Tanjung Balai Karimun PLTU Pangkalan Susu
Jumlah Total		14
5.	Konsorsium Cogindo KLES	IP PLTGU SEMARANG IP PLTU ADIPALA
Jumlah Total		2
Grand Total		64

MRO – Overhaul

Realisasi pekerjaan yang sudah terkontrak sebanyak 28 kontrak dengan PLN Group dan 4 kontrak dengan Non PLN Group. Adapun informasi terkait Progres pekerjaan *overhaul* yang sudah terkontrak pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

MRO – Overhaul

The realization of the contracted work is 28 contracts with PLN Group and 4 contracts with Non PLN Group. The information related to the progress of overhaul work that has been contracted in 2023 is as follows:

No.	Unit	No.	Unit
PLN Group			
1.	Kantor Pusat IP IP Head Office	15.	Mrica PGU
2.	Labuhan Angin PGU	16.	Sanggau PGU
3.	Pangkalan Susu PGU	17.	PLTU Bengkayang
4.	UPDK Kepulauan Riau	18.	PLTU Asam Asam
5.	PLTU Teluk Sirih	19.	PLTU Sintang
6.	PLTU Ombilin	20.	Berau PGU
7.	Banten 1 Suralaya PGU	21.	Barru OMU
8.	Banten 2 Labuan PGU	22.	Jeranjang OMU
9.	Banten 3 Lontar PGU	23.	Holtekamp OMU
10.	Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu PGU	24.	PLTGU Priok
11.	Kamojang PGU	25.	PLN UPKH Medan
12.	PT PLN (Persero) Flores	26.	PLN NTB
13.	PLTU Jawa Tengah 2 Adipala	27.	Semarang PGU
14.	Maintenance Service Unit (MSU)	28.	Bali PGU
Subtotal : 28			

No.	Unit	No.	Unit
Non PLN Group			
1.	Kantor Pusat IP IP Head Office	3.	Mrica PGU
2.	Labuhan Angin PGU	4.	Sanggau PGU
Subtotal : 4			

MRO-VO

Realisasi pekerjaan MRO-VO yang sudah terkontrak sebanyak 57 kontrak dengan unit kerja sebagai berikut:

MRO-VO

Realization of MRO-VO work that has been contracted is 57 contracts with work units as follows:

No.	Unit	No.	Unit
1.	KANTOR PUSAT PLN IP PLN IP Head Office	22.	PLTU CIREBON POWER
2.	PERTAMINA EP CEPU	23.	PLTU HOLTEKAMP
3.	PLTA KOTO PANJANG	24.	PLTU ITP TARJUN
4.	PLTA MRICA	25.	PLTU JERANJANG
5.	PLTA SAGULING	26.	PLTU KALBAR 1
6.	PLTA TULIS	27.	PLTU LABUAN
7.	PLTD NUSA PENIDA	28.	PLTU LABUHAN ANGIN
8.	PLTG PAYO SELINCAH	29.	PLTU LONTAR
9.	PLTGU CILEGON	30.	PLTU MUARA JAWA
10.	PLTGU GRATI	31.	PLTU PANGKALAN SUSU
11.	PLTGU PRIOK	32.	PLTU PELABUHAN RATU
12.	PLTGU SEMARANG	33.	PLTU PUNAGAYA
13.	PLTM CILAKI	34.	PLTU SANGGAU
14.	PLTP ULUBELU	35.	PLTU SINTANG
15.	PLTP ULUMBU	36.	PLTU SURALAYA
16.	PLTP WAYANG WINDU	37.	PLTU TANJUNG BALAI KARIMUN
17.	PLTU ADIPALA	38.	PLTU TELUK SIRIH
18.	PLTU ASAM ASAM	39.	PT ANTAM
19.	PLTU BANTEN 1 SURALAYA	40.	PT GEO DIPA ENERGI
20.	PLTU BARRU	41.	PT GMF AERO ASIA
21.	PLTU BERAU	42.	PT MCTN
43.	TANJUNG JATI B	51.	PLTA TIMO
44.	MSU	52.	PLTA JELOK
45.	PLTD SENTAWAR	53.	PERTAMINA EP KLAMONO
46.	PLTG BORANG	54.	PLTP GUNUNG SALAK
47.	PLTDG BALI	55.	EVNNS - VIETNAM
48.	PLTD LEGON	56.	PLTU TAYAN - ICA
49.	PLTU HOLTEKAMP	57.	PLTMG MPP JAYAPURA 50 MW
50.	PLN GEOTHERMAL		
Grand Total : 57			

PROFITABILITAS PER SEGMENT

PLN IP Services mencatat pendapatan usaha yang dihasilkan dari 3 bidang usaha yaitu:

- Pendapatan dari penjualan material dan suku cadang
- Pendapatan jasa operasi dan pemeliharaan
- Penjualan tenaga listrik

Pada tahun 2023, kontribusi terbesar pendapatan Perusahaan adalah dari bidang usaha Jasa operasi dan pemeliharaan menyumbang 57,06% sedangkan pendapatan dari penjualan material dan suku cadang serta penjualan tenaga listrik masing-masing berkontribusi sebesar 31,67% dan 11,27%.

PROFITABILITY BY SEGMENT

PLN IP Services recorded operating income generated from 3 business fields, namely:

- Revenue from sales of materials and spare parts
- Revenue from operations and maintenance services
- Sales of electricity

In 2023, the largest contribution to the Company's revenue was from the operation and maintenance services business, contributing 57.06%, while revenue from the sale of materials and spare parts and the sale of electricity respectively contributed 31.67% and 11.27%.

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan/ (Penurunan) Increase/ (Decrease)		Description
			Rp	%	
Pendapatan dari penjualan material dan suku cadang	509.128	942.906	(433.778)	(46,00%)	Revenue from sales of materials and spare parts
Pendapatan jasa operasi dan pemeliharaan	917.384	652.933	264.451	40,50%	Operation and maintenance services revenue
Penjualan tenaga listrik	181.141	156.627	24.514	15,65%	Electricity sales
Jumlah Pendapatan Usaha	1.607.653	1.752.466	(144.813)	(8,26%)	Total Revenue
Beban Pokok Pendapatan	1.371.525	1.438.402	(66.877)	(4,65%)	Cost of Revenue
Laba Bruto	236.128	314.064	(77.936)	(24,82%)	Gross Profit

Dalam juta Rupiah | In Rupiah million



Tinjauan Keuangan

Financial Review

Tinjauan keuangan yang diuraikan berikut mengacu kepada Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini. Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan dan mendapat opini menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT PLN Indonesia Power Services tanggal 31 Desember 2023 untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

The financial review described below refers to the Financial Statements for the year ending December 31, 2023 presented in this Annual Report. The Financial Statements have been audited by the Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan and received an opinion of present fairly, in all material respects, the financial positions of PT PLN Indonesia Power Services as of December 31, 2023 for the year ended on that date, in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia.

POSISI KEUANGAN

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan/ (Penurunan) Increase/ (Decrease)		Description
			Rp	%	
Aset	1.117.351	1.199.643	(82.292)	(6,86%)	Assets
Liabilitas	218.264	312.752	(94.488)	(30,21%)	Liabilities
Ekuitas	899.087	886.891	12.196	1,38%	Equity

Dalam juta Rupiah | In Rupiah million

Pada 31 Desember 2023 pencapaian realisasi aset adalah sebesar 89,94% dari RKAP 2023. Pencapaian ekuitas dan liabilitas masing-masing sebesar 94,29% dan 75,56% atas RKAP.

ASET

Sampai dengan akhir tahun 2023, total aset Perusahaan tercatat sebesar Rp1,12 triliun, mengalami penurunan 6,86% dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp1,20 triliun. Hal ini terjadi karena adanya penurunan pada jumlah aset lancar dan jumlah aset tidak lancar yang masing-masing turun 3,65% dan 13,23%. Pada tahun 2023, komposisi total aset terdiri dari 68,75% aset lancar dan 31,25% aset tidak lancar.

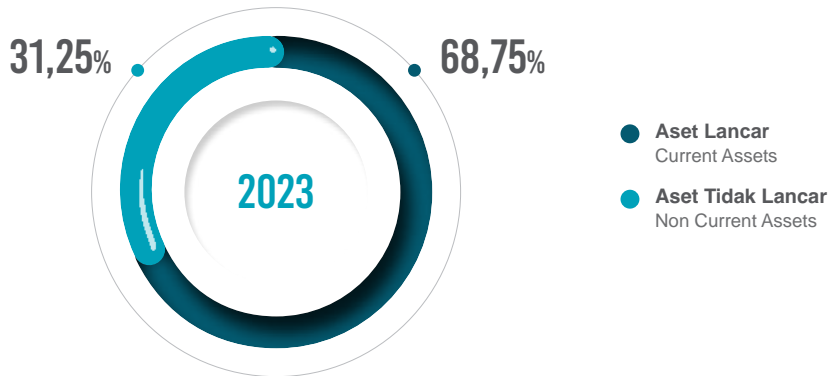
FINANCIAL POSITIONS

On December 31, 2023, the achievement of asset realization reached 89.94% of the 2023 RKAP (Annual Work Plan and Budget). Equity and liabilities achieved 94.29% and 75.56%, respectively, of the RKAP.

ASSETS

As of the end of 2023, the Company's total assets was Rp1.12 trillion, reflecting a decrease of 6.86% compared to Rp1.20 trillion recorded in 2022. This happened due to a decrease in total current assets and total non-current assets, respectively by 3.65% and 13.23%. In 2023, the composition of total assets consisted of 68.75% current assets and 31.25% non-current assets.

► **Komposisi Aset**
Assets Composition



Aset Lancar

Pada tahun 2023, aset lancar mengalami penurunan 3,65% dari Rp797,31 miliar di tahun 2022 menjadi Rp768,23 miliar di tahun 2023.

Current Assets

In 2023, current assets experienced a decrease of 3.65%, from Rp797.31 billion in 2022 to Rp768.23 billion in 2023.

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan/ (Penurunan) Increase/ (Decrease)		Description
			Rp	%	
Kas dan Setara Kas	227.025	259.449	(32.424)	(12,50%)	Cash and Cash Equivalents
Deposito berjangka	2.500	-	2.500	100%	Time Deposits
Kas yang dibatasi penggunaannya - bagian lancar	22.900	-	22.900	100%	Restricted cash - current portion
Piutang Usaha	408.483	464.792	(56.309)	(12,11%)	Trade Receivables
Piutang Lain-lain	4.581	7.606	(3.025)	(39,77%)	Other receivables
Persediaan	15.649	9.348	6.301	67,40%	Inventories
Pajak Dibayar di Muka – bagian lancar	70.906	39.034	31.872	81,65%	Prepaid Taxes - current portion
Biaya Dibayar di Muka dan Uang Muka – bagian lancar	9.475	14.525	(5.050)	(34,77%)	Prepaid Expenses and Advances - current portion
Aset Lancar Lainnya	6.711	2.551	4.160	163,07%	Other Current Assets
Jumlah Aset Lancar	768.230	797.305	(29.075)	(3,65%)	Total Current Assets

Dalam Juta Rupiah | In Million Rupiah

Penurunan jumlah aset lancar pada tahun 2023 dipengaruhi oleh:

- **Kas dan Setara Kas**

Sampai dengan akhir tahun 2023, nilai kas dan setara kas tercatat sebesar Rp227,03 miliar mengalami penurunan 12,50% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp259,45 miliar. Penurunan ini terjadi karena berkurangnya jumlah kas di bank dalam mata uang Rupiah yang tersimpan di PT Bank Mandiri (Persero), pada mata uang asing Dollar Amerika Serikat dan Dinar Kuwait juga terjadi penurunan yang signifikan.

The decline in the amount of current assets in 2023 was influenced by:

- **Cash and Cash Equivalents**

As of the end of 2023, the value of cash and cash equivalents was Rp227.03 billion a decrease of 12.50% from the previous year's Rp259.45 billion. This decline was due to a reduction in the amount of cash in Rupiah held at PT Bank Mandiri (Persero), as well as significant decreases in US Dollar and Kuwaiti Dinar balances.

- **Piutang Usaha**

Pada tahun 2023, Perusahaan mencatatkan piutang usaha sebesar Rp408,48 miliar, jumlah ini turun 12,11% dari tahun sebelumnya yang tercatat Rp464,79 miliar. Hal ini terjadi karena terdapat penurunan piutang usaha pada pihak berelasi dan pihak ketiga.

- **Piutang Lain-lain**

Piutang lain-lain pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp4,58 miliar, nilai ini turun 39,77% atau setara Rp3,03 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp7,61 miliar.

- **Biaya Dibayar DI Muka dan Uang Muka - Bagian Lancar**

Sampai dengan akhir tahun 2023, jumlah biaya dibayar di muka dan uang muka (bagian lancar) tercatat sebesar Rp9,48 miliar, turun 34,77% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp14,53 miliar.

- **Trade Receivable**

In 2023, the Company recorded trade receivable was Rp408.48 billion, which represents a decrease of 12.11% from Rp464.79 billion in the previous year. This happened due to a decrease in trade receivables from related parties and third parties.

- **Other Receivables**

In 2023, other receivables was Rp4.58 billion, marking a decrease of 39.77% or Rp3.03 billion compared to the previous year's Rp7.61 billion.

- **Prepaid Expenses and Advances - Current Portion**

As of the end of 2023, the total prepaid expenses and advances (current portion) was Rp9.48 billion, reflecting a decrease of 34.77% from Rp14.53 billion recorded in the previous year.

Aset Tidak Lancar

Aset Tidak Lancar PLN IP Services pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp349,12 miliar, mengalami penurunan 13,23% dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp402,34 miliar.

Non-Current Assets

Non-Current Assets of PLN IP Services in 2023 amounted to Rp349.12 billion, experiencing a 13.23% decrease compared to Rp402.34 billion in 2022.

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan/ (Penurunan) Increase/ (Decrease)		Description
			Rp	%	
Kas yang Dibatasi Penggunaannya - bagian tidak lancar	2.083	-	2.083	100%	Restricted Cash - non current portion
Piutang dari Ventura Bersama	22.826	17.559	5.267	30,00%	Receivables from a Joint Venture
Pajak Dibayar di Muka - bagian tidak lancar	78.110	86.445	(8.335)	(9,64%)	Prepaid Taxes - non current portion
Biaya Dibayar di Muka dan Uang Muka - bagian tidak lancar	-	3.244	(3.244)	100%	Prepaid Expenses and Advances - non current portion
Aset Tetap	188.370	254.767	(66.397)	(26,06%)	Fixed Assets
Aset Hak Guna	12.784	12.679	105	0,83%	Right of Use Assets
Investasi pada Ventura Bersama	11.057	9.521	1.536	16,13%	Investment in Joint Venture
Aset Pajak Tangguhan	20.795	8.662	12.133	140,07%	Deferred Tax Assets
Aset tidak lancar lainnya	13.096	9.461	3.635	38,42%	Other Non-Current Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar	349.121	402.338	(53.217)	(13,23%)	Total Non-Current Assets

Dalam Juta Rupiah | In Million Rupiah

Penurunan jumlah aset tidak lancar pada tahun 2023 dipengaruhi oleh:

- **Pajak Dibayar di Muka - Bagian Tidak Lancar**
 Pada tahun 2023, pajak dibayar di muka (bagian tidak lancar) mengalami penurunan 9,64% atau setara dengan Rp8,33 miliar dari tahun 2022 yang tercatat Rp86,45 miliar menjadi Rp78,11 miliar pada tahun 2023. Penurunan ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah pajak dibayar di muka untuk bagian lancar sebagai pengurang dari jumlah pajak dibayar di muka.
- **Biaya Dibayar di Muka dan Uang Muka - Bagian Tidak Lancar**
 Pada tahun 2023, tidak terdapat pencatatan biaya dibayar di muka dan uang (bagian tidak lancar) dimana pada tahun 2022 jumlah biaya dibayar di muka dan uang muka (bagian tidak lancar) tercatat sebesar Rp3,24 miliar.
- **Aset Tetap**
 Jumlah aset tetap pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp188,37 miliar, jumlah ini mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 26,06% atau setara Rp66,40 miliar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp254,77 miliar. Penurunan ini terjadi karena adanya peningkatan pada penyusutan instalasi dan mesin pembangkit serta akumulasi depresiasi aset tetap. Instalasi dan mesin pembangkit diasuransikan kepada PT Asuransi Perisai Listrik Nasional terhadap risiko kerusakan dan kemungkinan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp281,40 miliar.

LIABILITAS

Sampai dengan akhir tahun 2023, Perusahaan mencatatkan jumlah liabilitas sebesar Rp218,26 miliar. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp94,49 miliar atau turun 30,21% dari tahun sebelumnya yang tercatat Rp312,75 miliar. Komposisi liabilitas Perusahaan pada tahun 2023 terdiri dari 79% liabilitas jangka pendek dan 21% liabilitas jangka panjang.

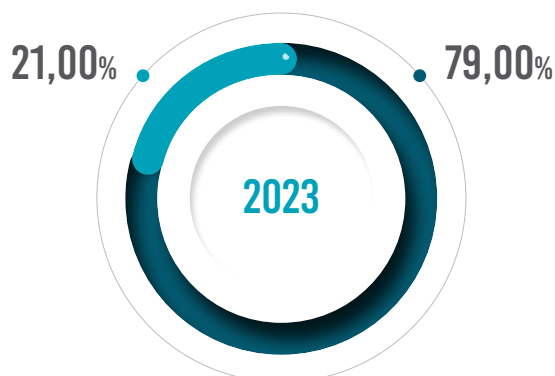
The decline in the amount of non-current assets in 2023 was influenced by:

- **Prepaid Taxes - Non-Current Portion**
 In 2023, prepaid taxes (non-current portion) decreased by 9.64% or Rp8.33 billion from Rp86.45 billion in 2022 to Rp78.11 billion in 2023. This decrease was due to an increase in prepaid taxes for the current portion offsetting the non-current portion.
- **Prepaid Expenses and Advances - Non-Current Portion**
 There were no recorded prepaid expenses and advances (non-current portion) in 2023, whereas in 2022, it was Rp3.24 billion.
- **Fixed Assets**
 The total fixed assets in 2023 was Rp188.37 billion, showing a significant decrease of 26.06% or Rp66.40 billion compared to Rp254.77 billion in the previous year. This decrease was due to increased depreciation of installation and power generation machinery, along with accumulated depreciation of fixed assets. The installation and power generation machinery are insured with PT Asuransi Perisai Listrik Nasional against the risk of damage and other potential risks, with an insured of Rp281.40 billion.

LIABILITIES

As of the end of 2023, the Company recorded total liabilities was Rp218.26 billion. This represents a decrease of Rp94.49 billion or 30.21% from Rp312.75 billion recorded in the previous year. The composition of the Company's liabilities in 2023 consisted of 79% short-term liabilities and 21% long-term liabilities.

► **Komposisi Liabilitas**
Liabilities Composition



- **Jumlah Liabilitas Jangka Pendek**
Total Current Liabilities
- **Jumlah Liabilitas Jangka Panjang**
Non-Current Liabilities

Liabilitas Jangka Pendek

Pada akhir tahun 2023, jumlah Liabilitas Jangka Pendek Perusahaan tercatat Rp172,43 miliar turun 37,78% dari tahun 2022 sebesar Rp277,14 miliar.

Current Liabilities

At the end of 2023, the Company's short-term liabilities were Rp172.43 billion, a decrease of 37.78% from Rp277.14 billion in 2022.

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan/ (Penurunan) Increase/ (Decrease)		Description
			Rp	%	
Utang Usaha	42.577	82.180	(39.603)	(48,19%)	Trade Payable
Utang Lain-lain	1.976	2.539	(563)	(22,17%)	Other Payables
Utang Pajak:					Tax Debt:
Pajak Penghasilan Badan	9.996	2.654	7.342	276,64%	Corporate Income Tax
Pajak lain-lain	14.144	28.565	(14.421)	(50,48%)	Other Taxes
Biaya Masih Harus Dibayar	64.951	134.680	(69.729)	(51,77%)	Accrued Expenses
Liabilitas Imbalan Kerja - jangka pendek	31.791	18.857	12.934	68,59%	Short term Employee Benefits Liabilities
Liabilitas Sewa – jangka pendek	6.993	7.664	(671)	(8,76%)	Lease Liabilities - Current Portion
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	172.428	277.139	(104.711)	(37,78%)	Total Non-Current Assets

Dalam Juta Rupiah | In Million Rupiah

Faktor yang mendorong penurunan tersebut adalah sebagai berikut:

- **Utang Usaha**
Utang usaha Perusahaan pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp42,58 miliar, mengalami penurunan 48,19% dari tahun sebelumnya yang tercatat Rp82,18 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya utang usaha pihak ketiga yang digunakan untuk pembelian bahan bakar, barang dan jasa.

The factors driving this decrease were as follows:

- **Trade Payables**
Trade payables were Rp42.58 billion in 2023, experiencing a 48.19% decrease from Rp82.18 billion in the previous year. This decline was attributed to reduced trade payables to third parties used for the purchase of fuel, goods, and services.

- **Utang Lain-lain**

Pada tahun 2023, Perusahaan mencatatkan utang lain-lain sebesar Rp1,98 miliar, jumlah tersebut turun 22,17% dari tahun sebelumnya yang tercatat Rp2,54 miliar.

- **Utang Pajak Lainnya**

Utang pajak lainnya pada tahun 2023 mengalami penurunan 50,48% dari Rp28,57 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp14,14 miliar pada tahun 2023. Penurunan ini dipengaruhi oleh penurunan pada pajak Pasal 21 dimana pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp9,16 miliar menjadi Rp6,85 miliar pada tahun 2023.

- **Biaya yang Masih Harus Dibayar**

Biaya yang masih harus dibayar oleh Perusahaan pada tahun 2023 sebesar Rp64,95 miliar atau mengalami penurunan 51,77% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp134,68 miliar. Penurunan ini diakibatkan oleh menurunnya jumlah biaya yang masih harus dibayar untuk biaya material, jasa pendukung, perbaikan dan pemeliharaan, pendidikan dan pelatihan, serta biaya lain-lain.

- **Liabilitas Sewa - Jangka Pendek**

Pada tahun 2023, liabilitas sewa (jangka pendek) tercatat sebesar Rp6,99 miliar, turun 8,76% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp7,66 miliar. Penurunan ini terjadi karena turunnya utang sewa yang digunakan untuk tempat berdirinya koperasi karyawan PLN IP Services.

Liabilitas Jangka Panjang

Pada tahun 2023, PLN IP Services mencatatkan peningkatan liabilitas jangka panjang sebesar 28,71% dari Rp35,61 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp45,84 miliar pada tahun 2023. Peningkatan ini terutama karena adanya penambahan liabilitas imbalan pascakerja untuk program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetap. Program pensiun ini memberikan imbalan pensiun yang ditentukan berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan.

- **Other Payables**

In 2023, the Company recorded other payables was Rp1.98 billion, which represents a decrease of 22.17% from Rp2.54 billion in the previous year.

- **Other Tax Payables**

Other tax payables in 2023 decreased by 50.48% from Rp28.57 billion in 2022 to Rp14.14 billion in 2023. This decrease was influenced by a decline in Article 21 taxes, which amounted to Rp9.16 billion in 2022 and decreased to Rp6.85 billion in 2023.

- **Accrued Expenses**

Accrued expenses for the Company in 2023 was Rp64.95 billion, marking a decrease of 51.77% from Rp134.68 billion in the previous year. This decrease was due to reduced amounts of accrued expenses for materials, support services, repairs and maintenance, education and training, and other miscellaneous expenses.

- **Lease Liabilities - Current Portion**

In 2023, lease liabilities - current portion was Rp6.99 billion, down 8.76% from Rp7.66 billion in the previous year. This decrease occurred due to a reduction in lease liabilities used for the location of the PLN IP Services employee cooperative.

Non-Current Liabilities

In 2023, PLN IP Services recorded a 28.71% increase in long-term liabilities from Rp35.61 billion in 2022 to Rp45.84 billion in 2023. This increase was primarily due to the addition of post-employment benefit liabilities for the defined benefit pension plan for all permanent employees. The pension plan provides retirement benefits based on employees' basic pensionable earnings and length of service.

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan/ (Penurunan) Increase/ (Decrease)		Description
			Rp	%	
Liabilitas Sewa - jangka panjang	5.209	5.566	(357)	(6,41%)	Lease Liabilities - Non Current Portion
Liabilitas Imbalan Pascakerja	40.627	30.047	10.580	35,21%	Post-Employment Benefit Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	45.836	35.613	10.223	28,71%	Total Non-Current Liabilities

Dalam Juta Rupiah | In Million Rupiah

EKUITAS

Total ekuitas pada akhir tahun 2023 tercatat sebesar Rp899,09 miliar, meningkat 1,38% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp886,89 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh naiknya Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar 6,74% dari tahun sebelumnya yang tercatat Rp190,97 miliar menjadi Rp203,84 miliar pada tahun 2023.

Komposisi ekuitas perusahaan pada tahun 2023 meliputi modal saham sebesar Rp514,87 miliar dan tambahan modal disetor sebesar Rp23,72 miliar, yang tetap stabil dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu, penghasilan komprehensif lainnya mengalami penurunan sebesar Rp673 juta atau 33,63%, mencerminkan dampak dari faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi laporan keuangan.

EQUITY

As of the end of 2023, total equity was Rp899.09 billion, reflecting an increase of 1.38% from Rp886.89 billion recorded in the previous year. This increase was primarily driven by a rise in retained earnings, which increased by 6.74% from Rp190.97 billion in the previous year to Rp203.84 billion in 2023.

The composition of the company's equity in 2023 includes share capital of Rp514.87 billion and additional paid-in capital of Rp23.72 billion, which remained stable compared to the previous year. Additionally, other comprehensive income decreased by Rp673 million or 33.63%, reflecting the impact of external factors affecting the financial statements.

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan/ (Penurunan) Increase/ (Decrease)		Description
			Rp	%	
Modal Saham	514.868	514.868	-	-	Capital Stock
Tambahan Modal Disetor	23.719	23.719	-	-	Additional paid - In Capital Retained Earnings
Saldo Laba					Retained Earning
Ditentukan Penggunaannya	159.332	159.332	-	-	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	203.842	190.973	12.869	6,74%	Non-Appropriated
Penghasilan Komprehensif Lain	(2.674)	(2.001)	(673)	33,63%	Other Comprehensive Income
Total Ekuitas	899.087	886.891	12.196	1,38%	Total Equity

Dalam Juta Rupiah | In Million Rupiah

Laporan Laba (Rugi)

Statement of Profit (Loss)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan/ (Penurunan) Increase/ (Decrease)		Description
			Rp	%	
PENDAPATAN USAHA	1.607.653	1.752.466	(144.813)	(8,26%)	OPERATING REVENUES
Beban pokok pendapatan	(1.371.525)	(1.438.402)	66.877	(4,65%)	Cost of revenue
LABA BRUTO	236.128	314.064	(77.936)	(24,82%)	GROSS PROFIT
Beban Umum dan Administrasi	(91.269)	(85.464)	(5.805)	6,79%	General and Administrative Expenses
Beban Lain-lain - Bersih	(13.759)	(15.662)	1.903	(12,15%)	Others Expenses - Net
LABA USAHA	131.100	212.938	(81.838)	(38,43%)	OPERATING INCOME
Penghasilan Keuangan	5.567	4.868	699	14,36%	Financial Income
Biaya Keuangan	(922)	(1.143)	221	(19,34%)	Financial Costs
(Kerugian)/Keuntungan selisih kurs - bersih	(178)	2.493	(2.671)	(107,14%)	(Loss)/Gain on Foreign exchange - net
Bagian Laba Bersih pada Ventura Bersama	1.585	121	1.464	1.209,92%	Share of Net Income in Joint Ventures
LABA SEBELUM PAJAK	137.152	219.277	(82.125)	(37,45%)	PROFIT BEFORE TAX
Beban pajak penghasilan	(46.055)	(62.822)	16.767	(26,69%)	Income Tax Expense
LABA TAHUN BERJALAN	91.097	156.455	(65.358)	(41,77%)	PROFIT FOR THE YEAR
(Rugi)/Penghasilan Komprehensif Lain					Other Comprehensive (Loss)/Income
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:					Items that will be reclassified to profit or loss:
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(49)	1.166	(1.215)	(104,20%)	Foreign exchange differences on translation of financial statements
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					Items that will not be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pascakerja	(800)	2.270	(3.070)	(135,24%)	Remeasurement of employee benefit obligation
Pajak penghasilan terkait	176	(499)	675	(135,27%)	Income tax related
(Rugi)/Penghasilan Komprehensif Lain, Setelah Pajak	(673)	2.937	(3.610)	(122,91%)	Other Comprehensive (Loss)/Income, net of tax
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	90.424	159.392	(68.968)	(43,27%)	Total Comprehensive Income For The Year

Dalam Juta Rupiah | In Million Rupiah

Pendapatan Usaha

Jumlah pendapatan usaha yang diperoleh Perusahaan pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp1,61 triliun, mengalami penurunan 8,26% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp1,75 triliun. Meskipun terdapat peningkatan pada Pendapatan jasa operasi dan pemeliharaan serta penjualan listrik, namun pada penjualan material dan suku cadang mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 46% atau setara dengan Rp433,78 miliar yang mempengaruhi penurunan pendapatan secara keseluruhan.

Revenues

The company's total operating revenue for 2023 was Rp1.61 trillion, marking a decrease of 8.26% from Rp1.75 trillion recorded in the previous year. Despite increases in revenue from operation and maintenance services and electricity sales, there was a significant 46% decrease in revenue from material and spare parts sales, was Rp433.78 billion. This decline had an impact on the overall revenue decrease.

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan/ (Penurunan) Increase/ (Decrease)		Description
			Rp	%	
Pendapatan dari penjualan material dan suku cadang	509.128	942.906	(433.778)	(46,00%)	Revenue from Sales of Materials and Spare Parts
Pendapatan jasa operasi dan pemeliharaan	917.384	652.933	264.451	40,50%	Operating and Maintenance Service Income
Penjualan tenaga listrik	181.141	156.627	24.514	15,65%	Electricity Sales
Jumlah Pendapatan Usaha	1.607.653	1.752.466	(144.813)	(8,26%)	Total Operating Revenues

Dalam Juta Rupiah | In Million Rupiah

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan Perusahaan sampai dengan akhir tahun 2023 tercatat sebesar Rp1,37 miliar, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan beban usaha pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp1,44 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pada beban perbaikan dan pemeliharaan serta beban bahan bakar dan minyak pelumas, sejalan dengan turunnya pendapatan usaha Perusahaan.

Cost of Revenues

The company's cost of revenues as of the end of 2023 was Rp1.37 billion, showing a decrease compared to cost of revenues in 2022 of Rp1.44 billion. This decrease was due to reductions in repair and maintenance expenses, as well as fuel and lubricant expenses, in line with the decline in the company's revenue.

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan/ (Penurunan) Increase/ (Decrease)		Description
			Rp	%	
Perbaikan dan pemeliharaan	702.850	982.847	(279.997)	(28,49%)	Repair and Maintenance
Gaji dan tunjangan	479.217	355.991	123.226	34,61%	Salaries and Allowances
Pemakaian suku cadang	97.345	9.020	88.325	979,21%	Sparepart usage
Penyusutan	80.691	78.323	2.368	3,02%	Depreciation
Bahan bakar dan minyak pelumas	11.422	12.221	(799)	(6,54%)	Fuel and Lubricant
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	1.371.525	1.438.402	(66.877)	(4,65%)	Total Cost of Revenue

Dalam Juta Rupiah | In Million Rupiah

Laba Tahun Berjalan

Pada tahun 2023, jumlah laba bersih tahun berjalan yang diperoleh Perusahaan tercatat sebesar Rp91,10 miliar, turun 41,77% dari tahun sebelumnya yang tercatat Rp156,46 miliar. Penurunan ini sejalan dengan turunnya pendapatan usaha selama tahun 2023.

(Rugi)/Penghasilan Komprehensif Lain

Pada tahun 2023, Perusahaan mencatat rugi komprehensif lain sebesar Rp637 juta, jumlah ini mengalami penurunan 122,91% dari tahun sebelumnya yang mencatatkan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp2,94 miliar. Penurunan ini dipengaruhi oleh adanya selisih kurs yang rugi Rp49 juta serta adanya pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja yang rugi Rp800 juta.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Pada tahun 2023 Perusahaan mencatat jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan sebesar Rp90,42 miliar, turun 43,27% dari tahun sebelumnya yang tercatat Rp159,39 miliar.

Profit For The Year

In 2023, the company recorded a net income of Rp91.10 billion, which decreased by 41.77% from Rp156.46 billion in the previous year. This decline is in line with the decrease in operating revenue during 2023.

Other Comprehensive (Loss)/ Income

In 2023, the company reported other comprehensive loss of Rp637 million, representing a decrease of 122.91% from other comprehensive income of Rp2.94 billion in the previous year. This decrease was influenced by a foreign exchange loss of Rp49 million and a loss from remeasurement of post-employment benefit liabilities of Rp800 million.

Total Comprehensive Income for the Year

In 2023, the company recorded total comprehensive income for the year of Rp90.42 billion, which decreased by 43.27% from Rp159.39 billion in the previous year.

Laporan Arus Kas

Statement of Cash Flows

Pada tahun 2023, perusahaan mencatat penurunan arus kas dibandingkan dengan tahun 2022. Arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan semuanya menunjukkan tren penurunan, dimana hal ini mempengaruhi penurunan pada kas dan setara kas sebesar 12,50%. Secara keseluruhan, kondisi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menjaga likuiditas dan efisiensi operasional sepanjang tahun.

Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi menurun sebesar 61,35%, sementara arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi dan pendanaan juga menunjukkan penurunan yang cukup signifikan masing-masing sebesar 47,24% dan 45,44%.

In 2023, the company recorded a decrease in cash flow compared to 2022. Cash flows from operating, investing, and financing activities all showed declining trends, leading to a 12.50% reduction in cash and cash equivalents. Overall, this condition reflects the challenges the company faced in maintaining liquidity and operational efficiency throughout the year.

Net cash flow generated from operating activities decreased by 61.35%, while cash flows used in investing and financing activities also saw significant declines of 47.24% and 45.44%, respectively.

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan/ (Penurunan) Increase/ (Decrease)		Description
			Rp	%	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	78.271	202.523	(124.252)	(61,35%)	Cash Flow from Operating Activities
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(24.177)	(45.821)	21.644	(47,24%)	Cash Flow from Investing Activities
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	(86.518)	(158.571)	72.053	(45,44%)	Cash Flow from Financing Activities
Penurunan Bersih Kas dan Setara Kas	(32.424)	(1.883)	(30.541)	1.621,93%	Net Decrease in Cash and Cash Equivalents
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	259.449	261.332	(1.883)	(0,72%)	Cash and Cash Equivalents at the Beginning of Year
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	227.025	259.449	(32.424)	(12,50%)	Cash and Cash Equivalents at the end of Year

Dalam juta Rupiah | In Rupiah million

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas yang diperoleh dari Aktivitas Operasi pada tahun 2023 tercatat turun 61,35% dari Rp202,52 miliar di tahun 2022 menjadi Rp78,27 miliar di tahun 2023. Penurunan ini sejalan dengan turunnya pendapatan usaha yang diperoleh Perusahaan selama 2023, selain itu penurunan ini juga disebabkan peningkatan pada arus kas yang digunakan untuk pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada karyawan, serta penempatan kas yang dibatasi penggunaannya untuk jaminan pelaksanaan operasional.

CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES

Cash flow from operating activities in 2023 decreased by 61.35% from Rp202.52 billion in 2022 to Rp78.27 billion in 2023. This decline corresponds with the decrease in the Company's operating income during 2023. Additionally, the decrease was also influenced by increased cash outflows for payments to suppliers, employee compensation, and restricted cash placements used as operational guarantees.

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan/ (Penurunan) Increase/ (Decrease)		Description
			Rp	%	
Penerimaan dari pelanggan	1.668.398	1.666.822	1.576	0,09%	Receipt from customers
Pembayaran kepada pemasok	(1.053.370)	(1.016.720)	(36.650)	3,60%	Payments to suppliers
Pembayaran kepada karyawan	(508.170)	(384.904)	(123.266)	32,03%	Payments to employees
Pembayaran pajak penghasilan badan	(50.670)	(65.057)	14.387	(22,11%)	Payment of corporate income tax
Penerimaan pengembalian pajak	39.421	-	39.421	100%	Receipts of tax refunds
Penerimaan penghasilan keuangan	8.567	3.525	5.042	143,04%	Receipt of finance income
Penempatan kas yang dibatasi penggunaannya untuk jaminan pelaksanaan	(24.983)	-	(24.983)	(100%)	Placement of restricted cash for performance bonds
Pembayaran beban keuangan	(922)	(1.143)	221	(19,34%)	Payment of financial expenses
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	78.271	202.523	(124.252)	(61,35%)	Net Cash Generated from Operating Activities

Dalam Juta Rupiah | In Million Rupiah

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Kas yang digunakan untuk Aktivitas Investasi pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp24,18 miliar, turun 47,24% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp45,82 miliar. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan pada perolehan aset tetap sebesar 62,38%.

Adanya Penerimaan atas pembayaran piutang dari ventura bersama sebesar Rp14,95 miliar juga turut mempengaruhi penurunan pada Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi.

CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES

Cash used in investing activities in 2023 was Rp24.18 billion, marking a decrease of 47.24% compared to Rp45.82 billion in the previous year. This decrease was primarily due to a 62.38% decline in the acquisition of fixed assets.

Furthermore, receiving payments on receivables from joint ventures was Rp14.95 billion also contributed to the decrease in net cash used in investing activities.

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan/ (Penurunan) Increase/ (Decrease)		Description
			Rp	%	
Perolehan aset tetap	(17.236)	(45.821)	28.585	(62,38%)	Acquisition of fixed assets
Penempatan deposito berjangka	(2.500)	-	(2.500)	(100%)	Placements of time deposits
Penambahan piutang dari ventura bersama	(19.397)	-	(19.397)	(100%)	Additions of receivables from a joint venture
Penerimaan atas pembayaran piutang dari ventura bersama	14.956	-	14.956	100%	Receipt for payments of receivables from a joint venture
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(24.177)	(45.821)	21.644	(47,24%)	Net Cash Used for Investing Activities

Dalam Juta Rupiah | In Million Rupiah

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus Kas yang digunakan untuk Aktivitas Pendanaan sampai dengan akhir tahun 2023 tercatat Rp86,52 miliar, turun 45,44% dibandingkan tahun 2022 yang tercatat Rp158,57 miliar. Hal ini disebabkan oleh turunnya pembayaran dividen kepada pemegang saham sebesar 46,16% serta turunnya pembayaran liabilitas sewa sebesar 37,49%.

Pengurangan pembayaran dividen menunjukkan upaya perusahaan untuk menyimpan lebih banyak kas guna menjaga likuiditas dan mengatasi tantangan operasional. Pengurangan pembayaran liabilitas sewa juga mencerminkan efisiensi yang diperoleh dari renegotiasi kondisi sewa atau pengurangan jumlah aset yang disewa.

CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES

Cash used in financing activities as of the end of 2023 was Rp86.52 billion, down 45.44% from Rp158.57 billion in 2022. This decrease was primarily due to a 46.16% decrease in dividend payments to shareholders and a 37.49% decrease in lease liability payments.

The reduction in dividend payments indicates the company's efforts to conserve more cash to maintain liquidity and address operational challenges. The decrease in lease liability payments also reflects efficiency gained from lease renegotiations or reductions in leased asset quantities.

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan/ (Penurunan) Increase/ (Decrease)		Description
			Rp	%	
Pembayaran dividen	(78.228)	(145.309)	67.081	(46,16%)	Dividend payment
Pembayaran liabilitas sewa	(8.290)	(13.262)	4.972	(37,49%)	Payment of lease liabilities
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(86.518)	(158.571)	72.053	(45,44%)	Net Cash Used for Financing Activities

Dalam Juta Rupiah | In Million Rupiah

Rasio Keuangan Utama

Key Financial Ratio

Uraian	2023	2022	Description
Rasio Likuiditas			Liquidity Ratio
Rasio Kas	1,32	0,94	Cash Ratio
Rasio Cepat	4,36	2,84	Quick Ratio
Rasio Lancar	4,46	2,88	Current Ratio
Rasio Solvabilitas			Solvency Ratio
Rasio Utang terhadap Aset (DAR)	0,20	0,26	Debt to Assets Ratio (DAR)
Rasio Utang terhadap Ekuitas (DER)	0,24	0,35	Debt to Equity Ratio (DER)
Rasio Profitabilitas (%)			Profitability Ratio (%)
Tingkat Pengembalian Aset (ROA)	8,15%	13,04%	Return on Assets (ROA)
Tingkat Pengembalian Ekuitas (ROE)	10,13%	17,64%	Return on Equity (ROE)
Margin Laba Bersih	5,67%	8,93%	Net Profit Margin
Kolektibilitas Piutang			Accounts Receivable
<i>Receivables Turnover</i> (kali)	3,68	4,17	Receivables Turnover (times)
<i>Collection Period</i> (hari)	99	88	Collection Period (days)

Kemampuan Membayar Utang

Solvability

Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya tercermin dalam beberapa rasio keuangan kunci. Pada tahun 2023, terdapat beberapa perubahan positif dalam rasio likuiditas dan solvabilitas perusahaan yang menunjukkan peningkatan kapasitas untuk membayar utang.

The company's ability to meet its short-term and long-term obligations is reflected in several key financial ratios. In 2023, there were several positive changes in the company's liquidity and solvency ratios, indicating an improved capacity to repay debt.

RASIO LIKUIDITAS

1. Rasio Kas

Rasio kas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan kas yang tersedia. Pada tahun 2023, rasio kas meningkat menjadi 1,32 dari 0,94 pada tahun 2022. Ini mengindikasikan peningkatan likuiditas kas perusahaan, yang berarti perusahaan lebih mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan kas yang tersedia dibandingkan tahun sebelumnya.

LIQUIDITY RATIO

1. Cash Ratio

The cash ratio indicates the company's ability to pay short-term obligations with available cash. In 2023, the cash ratio increased to 1.32 from 0.94 in 2022. This indicates an improvement in the company's cash liquidity, meaning the company is better able to meet its short-term obligations with available cash compared to the previous year.

2. Rasio Cepat

Rasio cepat memperhitungkan aset lancar yang paling likuid, kecuali persediaan. Kenaikan dari 2,84 pada tahun 2022 menjadi 4,36 pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek tanpa harus mengandalkan penjualan persediaan.

2. Quick Ratio

The quick ratio considers the most liquid current assets, excluding inventory. The increase from 2.84 in 2022 to 4.36 in 2023 shows a significant improvement in the company's ability to pay short-term debt without relying on inventory sales.

3. Rasio Lancar

Rasio lancar mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan seluruh aset lancar. Peningkatan dari 2,88 pada tahun 2022 menjadi 4,46 pada tahun 2023 mengindikasikan bahwa perusahaan telah meningkatkan kapasitasnya untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang dimiliki.

3. Current Ratio

The current ratio measures the company's ability to meet short-term obligations with all current assets. The increase from 2.88 in 2022 to 4.46 in 2023 indicates that the company has improved its capacity to pay short-term obligations with its current assets.

RASIO SOLVABILITAS

1. Rasio Utang terhadap Aset (DAR)

Penurunan rasio DAR dari 0,26 pada tahun 2022 menjadi 0,20 pada tahun 2023 menunjukkan bahwa proporsi utang terhadap total aset perusahaan telah

SOLVENCY RATIO

1. Debt to Assets Ratio (DAR)

The decrease in the DAR from 0.26 in 2022 to 0.20 in 2023 shows that the proportion of debt to the company's total assets has decreased. This means

menurun. Artinya, perusahaan sekarang memiliki lebih sedikit utang dibandingkan dengan asetnya, yang berkontribusi pada peningkatan solvabilitas perusahaan.

2. Rasio Utang terhadap Ekuitas (DER)

Penurunan rasio DER dari 0,35 pada tahun 2022 menjadi 0,24 pada tahun 2023 menunjukkan bahwa perusahaan telah mengurangi ketergantungan pada utang dan lebih banyak menggunakan ekuitas untuk mendanai kegiatan operasionalnya. Ini merupakan indikator positif dari perspektif solvabilitas, menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam posisi keuangan yang lebih kuat dan lebih stabil.

Secara keseluruhan, peningkatan dalam rasio likuiditas dan penurunan dalam rasio solvabilitas menunjukkan bahwa perusahaan telah memperbaiki kemampuannya untuk membayar utang. Hal ini mencerminkan manajemen keuangan yang efektif dan strategi yang berhasil dalam mengelola kewajiban dan sumber daya perusahaan.

the company now has less debt compared to its assets, contributing to improved solvency.

2. Debt to Equity Ratio (DER)

The decrease in the DER from 0.35 in 2022 to 0.24 in 2023 indicates that the company has reduced its reliance on debt and is using more equity to finance its operations. This is a positive indicator from a solvency perspective, showing that the company is in a stronger and more stable financial position.

Overall, the improvement in liquidity ratios and the decrease in solvency ratios indicate that the company has enhanced its ability to repay debt. This reflects effective financial management and successful strategies in managing the company's obligations and resources.

Kolektibilitas Piutang

Receivables Collectibility

Perusahaan menggunakan Periode Penagihan Rata-rata dan Rasio Perputaran Piutang untuk mengetahui kemampuan Perusahaan dalam menagih piutang. Nilai Periode Penagihan yang kecil mencerminkan semakin cepat Perusahaan dapat menagih piutang dan tingkat Perputaran Piutang mencerminkan tingkat efisiensi modal Perusahaan.

Penurunan *Receivables Turnover* dari 4,17 kali pada tahun 2022 menjadi 3,68 kali pada tahun 2023 menunjukkan bahwa perusahaan kurang mampu mengumpulkan piutangnya dalam setahun. Ini mengindikasikan penurunan dalam proses penagihan piutang, yang berarti perusahaan kurang efektif dalam mengelola piutangnya.

Peningkatan *Collection Period* dari 88 hari pada tahun 2022 menjadi 99 hari pada tahun 2023 menunjukkan bahwa perusahaan membutuhkan waktu lebih lama untuk menagih piutangnya.

The company uses the Average Collection Period and Receivables Turnover Ratio to assess its ability to collect receivables. A shorter Collection Period reflects the company's ability to collect receivables more quickly, and the Receivables Turnover ratio indicates the efficiency of the company's capital utilization.

The decrease in Receivables Turnover from 4.17 times in 2022 to 3.68 times in 2023 shows the company is less able to collect its receivables in a year. This indicates a decrease in the receivables collection process, which means the company is less effective in managing its receivables.

The increase in Collection Period from 88 days in 2022 to 99 days in 2023 indicates the company takes longer to collect its receivables.

Struktur Modal dan Kebijakan Struktur Modal

Capital Structure and Capital Structure Policy

KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR PERMODALAN

Kebijakan Perusahaan adalah untuk mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar. Hingga akhir tahun 2023, tidak terdapat perubahan pada struktur modal Perusahaan.

DASAR PEMILIHAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Pengelolaan modal Perusahaan untuk memastikan terpeliharanya rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham. Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi, namun Perusahaan tetap menjaga keseimbangan antara ekuitas dan utang secara berkala dan memastikan bahwa seluruh rasio keuangan sudah sesuai.

RINCIAN STRUKTUR MODAL

Struktur modal Perusahaan per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

The Company's policy is to maintain a sound capital structure to secure access to funding at a reasonable cost. Until the end of 2023, there have been no changes to the Company's capital structure.

BASIS FOR SELECTION OF MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

Management of the Company's capital to ensure the maintenance of sound capital ratio to support the business and maximize returns for shareholders. The Company manages the capital structure and makes adjustment, based on changes in economic condition, but the Company still maintains a balance between equity and debt on a regular basis and ensures that all financial ratios are appropriate.

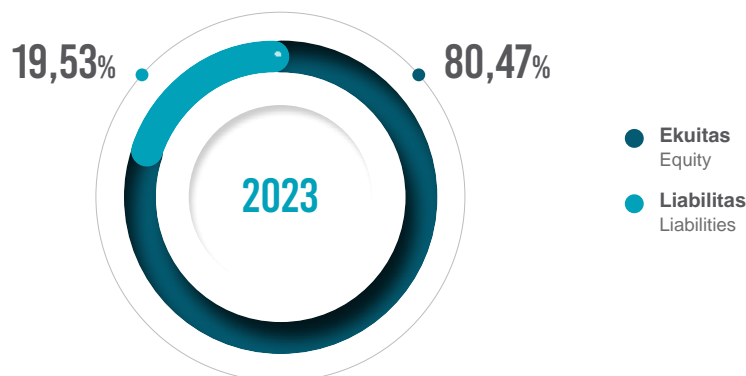
DETAILS ON CAPITAL STRUCTURE

The Company's capital structure as of December 31, 2023 can be explained in the following table:

Uraian	2023		2022		Description
	Rp	%	Rp	%	
Jumlah Liabilitas	218.264	19,53%	312.752	26,07%	Total Liabilities
Ekuitas	899.087	80,47%	886.891	73,93%	Equity
Total Liabilitas dan Ekuitas	1.117.351	100%	1.199.643	100%	Total Liabilities and Equity
Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Ekuitas		24,28%		35,26%	Ratio of Total Liabilities to Equity

Dalam juta Rupiah | In Rupiah million

► **Grafik Liabilitas**
Graph of Liabilities



Struktur modal Perusahaan pada tahun 2023 terdiri dari Liabilitas sebesar Rp218,26 miliar, lebih rendah dibandingkan tahun 2022. Selain itu struktur modal yang dibiayai dari Ekuitas sebesar Rp899,09 miliar yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Komposisi permodalan Perusahaan pada tahun 2023 yaitu terdiri dari 19,53% liabilitas dan 80,47% ekuitas dengan Rasio Utang terhadap Ekuitas sebesar 24,28%.

MEKANISME REVIEW STRUKTUR MODAL

Direksi Perusahaan secara berkala melakukan tinjauan struktur permodalan. Sebagai bagian dari tinjauan ini, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

Perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya modal sehingga dapat memaksimalkan nilai Perusahaan. Oleh karena itu, kebijakan Grup dalam mencari pendanaan akan selalu memperhitungkan risiko keuangan yang mungkin timbul di masa depan.

TINGKAT LIKUIDITAS PERUSAHAAN

Perusahaan senantiasa melakukan monitoring terhadap rasio likuiditas, rasio ini mengindikasikan kemampuan Perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi rasio likuiditas maka struktur modal akan semakin optimal. Pada tahun 2023, tingkat rasio utang terhadap ekuitas Perusahaan sebesar 24,28% atau menurun 31,16% dari tahun sebelumnya yang sebesar 35,26%.

The Company's capital structure in 2023 consists of Liabilities of Rp218.26 billion, lower than in 2022. In addition, the capital structure financed from Equity amounted to Rp899.09 billion, higher than in 2022. The Company's capital composition in 2023 consists of 19.53% liabilities and 80.47% equity with a Debt to Equity Ratio of 24.28%.

CAPITAL STRUCTURE REVIEW MECHANISM

The Board of Directors of the Company periodically conducts a review of the capital structure. As part of this review, the Board of Directors considers the cost of capital and the associated risks.

The Company strives to minimize the cost of capital to maximize the value of the Company. Therefore, the Group's policy in raising funds will always consider the financial risks that may arise in the future.

LIQUIDITY LEVEL OF THE COMPANY

The Company always monitors the liquidity ratio, this ratio indicates the ability of the Company to pay off its short-term obligations. The higher the liquidity ratio, the more optimal the capital structure. In 2023, the Company's debt to equity ratio was 24.28% or decreased by 31.16% from the previous year which amounted to 35.26%.

Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal

Material Bonds for Capital Investment

PT PLN Indonesia Power Services tidak memiliki ikatan yang material untuk investasi barang modal pada tahun 2023 sehingga tidak dapat menyajikan informasi tentang jenis, nilai, tujuan, sumber dana, denominasi, maupun rencana atas investasi barang modal.

PT PLN Indonesia Power Services has no material commitments for capital goods investment in 2023, so it cannot provide information about the type, value, purpose, source of funds, denomination, or plans for capital goods investment.

Ikatan Material Tahun 2023

Material Bond of 2023

Berikut adalah uraian mengenai ikatan material dan kontinjensi yang dilakukan oleh Perusahaan pada tahun 2023:

Below is a description of the material commitments, including bonds and contingencies, undertaken by the Company in the year 2023:

1. **PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat**

Perusahaan dan PLN menandatangani amandemen perjanjian terkait kapasitas pengadaan dan pengoperasian sewa mesin genset MFO sebesar 20 MW di Pringgabaya Lombok Timur dan Jeranjang melalui perjanjian No. 009.Amd/BBC1-CDB/XII/2021. Pada 23 Juni 2023, perjanjian tersebut diperpanjang hingga 30 April 2024.

1. **PT PLN (Persero) West Nusa Tenggara Region**

The Company and PLN signed an amendment agreement regarding the procurement and operational lease capacity of MFO genset machines totaling 20 MW in Pringgabaya, East Lombok, and Jeranjang through Agreement No. 009.Amd/BBC1-CDB/XII/2021. On June 23, 2023, this agreement was extended until April 30, 2024.

2. **Ministry of Electricity and Water State of Kuwait**

Pada tahun 2021, Perusahaan mengadakan Perjanjian No. MEW/MW/5620-2020/2021 tanggal 15 April 2021 dengan *Ministry of Electricity and Water State of Kuwait* mengenai Pengadaan Jasa Penunjang Operasi dan Pemeliharaan (O&M) untuk jaringan pembangkit listrik di Kuwait. Perjanjian ini berlaku selama 36 bulan efektif sejak 16 Mei 2021 dan hingga tanggal penyelesaian laporan keuangan, perjanjian ini masih dalam proses perpanjangan.

2. **Ministry of Electricity and Water State of Kuwait**

In 2021, the Company entered into Agreement No. MEW/MW/5620-2020/2021 dated April 15, 2021, with the Ministry of Electricity and Water State of Kuwait for the provision of Operation and Maintenance (O&M) support services for the power generation network in Kuwait. The agreement has a duration of 36 months effective from May 16, 2021, and as of the financial reporting completion date, the agreement is still under renewal process.

3. National Alliances for Projects Company for General Trading W.L.L (NAPCO)

Pada tahun 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan NAPCO pada tanggal 17 Februari 2020, menunjuk NAPCO sebagai agen lokal eksklusif untuk mengerjakan proyek di Kuwait. Perjanjian ini telah diamandemen beberapa kali, terakhir diperpanjang hingga 17 Februari 2025.

4. PT PLN Indonesia Power

- Pada tanggal 10 Agustus 2018, Perusahaan mengadakan perjanjian No. 330.PJ/061/IP/2018 dengan PT PLN Indonesia Power mengenai penyediaan tenaga listrik kapasitas neto 10 MW di Nusa Penida, Bali. Perjanjian ini telah diamandemen beberapa kali, terakhir diperpanjang hingga 28 Februari 2028. Dalam perjanjian ini, Perusahaan akan menerima pembayaran sesuai formula yang ditentukan.

- Pada tanggal 28 Oktober 2014, Perusahaan mengadakan Perjanjian No. 147.PJ/061/IP/2014 dengan PT PLN Indonesia Power untuk Pengadaan Jasa O&M di Jawa, meliputi Labuan, Suralaya, Lontar, Pelabuhan Ratu, dan Adipala. Perjanjian ini telah diamandemen beberapa kali, terakhir diperpanjang hingga 31 Desember 2024. Pembayaran jasa O&M berdasarkan formula yang ditentukan.

- Pada tanggal 9 September 2014, Perusahaan mengadakan Perjanjian No. 115.PJ/061/IP/2014 dengan PT PLN Indonesia Power untuk Pengadaan Jasa O&M di luar Jawa, meliputi Sanggau, Ulumbu, Barru, Jeranjang, dan Pangkalan Susu. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2024, dengan pembayaran jasa O&M berdasarkan formula yang ditentukan.

5. Kerja Sama Operasi dengan PT ISS Indonesia

Perusahaan mengadakan Perjanjian Kerja Sama Operasi dengan PT ISS Indonesia melalui perjanjian No. 001.2/SPRCDB/XII/2018 pada tanggal 28 Desember 2018 dan adendumnya mengenai penyediaan jasa pembersihan industri. Perjanjian ini berlaku dari 18 Desember 2017 hingga 31 Desember 2024.

3. National Alliances for Projects Company for General Trading W.L.L (NAPCO)

In 2020, the Company entered into an agreement on February 17, 2020, with NAPCO where the Company appointed NAPCO as the exclusive local agent to execute projects in Kuwait. This agreement has been amended several times, with the latest extension effective until February 17, 2025.

4. PT PLN Indonesia Power

- On August 10, 2018, the Company entered into Agreement No. 330.PJ/061/IP/2018 with PT PLN Indonesia Power for the provision of 10 MW net capacity electricity in Nusa Penida, Bali. This agreement has been amended several times, most recently extended until February 28, 2028. Under this agreement, the Company will receive payments based on a predetermined formula.

- On October 28, 2014, the Company entered into Agreement No. 147.PJ/061/IP/2014 with PT PLN Indonesia Power for the provision of O&M services in Java, covering Labuan, Suralaya, Lontar, Pelabuhan Ratu, and Adipala. This agreement has been amended several times, most recently extended until December 31, 2024. Payments for O&M services are based on a predetermined formula.

- On September 9, 2014, the Company entered into Agreement No. 115.PJ/061/IP/2014 with PT PLN Indonesia Power for the provision of O&M services outside Java, covering Sanggau, Ulumbu, Barru, Jeranjang, and Pangkalan Susu. This agreement is valid until December 31, 2024, with payments for O&M services based on a predetermined formula.

5. Operational Cooperation with PT ISS Indonesia

The Company entered into Operational Cooperation Agreement with PT ISS Indonesia through Agreement No. 001.2/SPRCDB/XII/2018 on December 28, 2018, and its addendum regarding industrial cleaning services. This agreement is effective from December 18, 2017, until December 31, 2024.

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>6. Kerja Sama Operasi dengan PT Andalan Fluid System
Perusahaan mengadakan Perjanjian Kerja Sama Operasi dengan PT Andalan Fluid System melalui perjanjian No. 017.PJ/BCCDB/XII/2017 pada tanggal 18 Desember 2017 dan adendumnya mengenai pemeliharaan dan perbaikan peralatan turbin pembangkit listrik. Perjanjian ini berlaku dari 18 Desember 2017 hingga 18 Desember 2027.</p> | <p>6. Operational Cooperation with PT Andalan Fluid System
The Company entered into Operational Cooperation Agreement with PT Andalan Fluid System through Agreement No. 017.PJ/BCCDB/XII/2017 on December 18, 2017, and its addendum regarding maintenance and repair of power turbine equipment. This agreement is effective from December 18, 2017, until December 18, 2027.</p> |
| <p>7. Kerja Sama Operasi dengan PT Taka Turbomachinery Indonesia
Perusahaan mengadakan Perjanjian Kerja Sama Operasi dengan PT Taka Turbomachinery Indonesia melalui perjanjian No. 011.PJ/PKR-CDB/10/2017 pada tanggal 2 Oktober 2017 dan adendumnya mengenai pemeliharaan dan perbaikan peralatan turbin pembangkit listrik. Perjanjian ini berlaku dari 2 Oktober 2017 hingga 3 Oktober 2025.</p> | <p>7. Operational Cooperation with PT Taka Turbomachinery Indonesia
The Company entered into Operational Cooperation Agreement with PT Taka Turbomachinery Indonesia through Agreement No. 011.PJ/PKR-CDB/10/2017 on October 2, 2017, and its addendum regarding maintenance and repair of power turbine equipment. This agreement is effective from October 2, 2017, until October 3, 2025.</p> |
| <p>8. Kerja Sama Operasi dengan PT Sinar Sakti Matra Nusantara
Perusahaan mengadakan Perjanjian Kerja Sama Operasi dengan PT Sinar Sakti Matra Nusantara melalui perjanjian No. 015.PJ/BBC-CDB/XII/2017 pada tanggal 12 Desember 2017 dan adendumnya mengenai pemeliharaan dan perbaikan peralatan turbin pembangkit listrik. Perjanjian ini berlaku dari 12 Desember 2017 hingga 12 Desember 2027.</p> | <p>8. Operational Cooperation with PT Sinar Sakti Matra Nusantara
The Company entered into Operational Cooperation Agreement with PT Sinar Sakti Matra Nusantara through Agreement No. 015.PJ/BBC-CDB/XII/2017 on December 12, 2017, and its addendum regarding maintenance and repair of power turbine equipment. This agreement is effective from December 12, 2017, until December 12, 2027.</p> |
| <p>9. Kerja Sama Operasi dengan PT Varley Indonesia
Perusahaan mengadakan Perjanjian Kerja Sama Operasi dengan PT Varley Indonesia melalui perjanjian No. 002.PJ/BCCDB/I/2018 pada tanggal 29 Januari 2018 dan adendumnya mengenai pemeliharaan dan perbaikan peralatan turbin pembangkit listrik. Perjanjian ini berlaku dari 29 Januari 2018 hingga 1 Desember 2025.</p> | <p>9. Operational Cooperation with PT Varley Indonesia
The Company entered into Operational Cooperation Agreement with PT Varley Indonesia through Agreement No. 002.PJ/BCCDB/I/2018 on January 29, 2018, and its addendum regarding maintenance and repair of power turbine equipment. This agreement is effective from January 29, 2018, until December 1, 2025.</p> |
| <p>10. Perjanjian Konsorsium dengan PT Maxpower Indonesia
Pada tanggal 28 November 2019, Perusahaan mengadakan perjanjian konsorsium No. 008.PJ/BBC-CDB/XI/2019 dengan PT Maxpower Indonesia mengenai kerja sama dalam Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Baloi kapasitas 30 MW yang berlokasi di Tanjung Baloi, Batam. Perjanjian ini berlaku selama 15 tahun dan akan berakhir sesuai dengan ketentuan dan syarat yang tercantum di dalam perjanjian ini.</p> | <p>10. Consortium Agreement with PT Maxpower Indonesia
On November 28, 2019, the Company entered into Consortium Agreement No. 008.PJ/BBC-CDB/XI/2019 with PT Maxpower Indonesia for cooperation in the Gas Engine Power Plant (PLTMG) Project Baloi with a capacity of 30 MW located in Tanjung Baloi, Batam. This agreement is valid for 15 years and will terminate according to the terms and conditions stipulated in the agreement.</p> |

Investasi Barang Modal yang Drealisasikan pada Tahun Buku Terakhir

Capital Goods Investment Realized in the Fiscal Year

JENIS DAN NILAI INVESTASI BARANG MODAL

Investasi dalam bentuk barang dan modal merupakan hal penting yang dilakukan untuk menunjang pengembangan kegiatan usaha dan investasi. PLN IP Services menerapkan kecermatan dan kehati-hatian dalam melakukan investasi, seiring dengan pengembangan Perusahaan menuju perusahaan energi kelas dunia.

TYPES AND VALUE OF CAPITAL GOODS INVESTMENT

Investment in capital goods is essential for supporting the development of business activities and investments. PLN IP Services applies careful and prudent investment practices in line with its goal of becoming a world-class energy company.

Jenis Barang Modal	2023	2022	Type of Capital Goods
Tanah	-	-	Land
Bangunan Umum dan Prasarana	-	-	Public Buildings and Infrastructure
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	-	-	Data processing and telecommunications equipment
Perlengkapan umum	7	2.344	General equipment
Instalasi dan Mesin Pembangkit	7.536	43.477	Generator Installation and Machinery
Jumlah	7.543	45.821	Total

Dalam juta Rupiah | in Rupiah million

Pada tahun 2023, nilai investasi barang modal Bank tercatat sebesar Rp7,54 miliar, mengalami penurunan 83,54% atau sebesar Rp38,28 miliar jika dibandingkan tahun 2022 yang tercatat Rp45,82 miliar, penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya investasi barang modal dalam kategori perlengkapan umum serta Instalasi dan mesin pembangkit.

In 2023, the value of the Bank's capital goods investment was recorded at Rp7.54 billion, a decrease of 83.54% or Rp38.28 billion compared to 2022, which was recorded at Rp45.82 billion. This decline was mainly due to a reduction in investments in the general equipment and installations and power generation machinery.

TUJUAN INVESTASI BARANG MODAL

Tujuan dari investasi barang modal adalah untuk mendukung operasional Perusahaan dengan mengakuisisi aset hak-guna serta memaksimalkan nilai Perusahaan dengan mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko terkait. PLN IP Services melakukan investasi barang modal untuk membeli aset tetap atau menambah nilai aset tetap yang diharapkan dapat memberikan manfaat di masa depan, serta memenuhi kebutuhan operasional yang sejalan dengan ekspansi bisnis berkelanjutan. Investasi ini difokuskan pada pengembangan proyek-proyek strategis yang dimiliki oleh Perusahaan.

CAPITAL INVESTMENT OBJECTIVES

The purpose of capital goods investment is to support the Company's operations by acquiring right-of-use assets and maximizing the Company's value by considering capital costs and associated risks. PLN IP Services invests in capital goods to purchase fixed assets or enhance the value of existing fixed assets, which are expected to provide future benefits and meet the operational needs in line with sustainable business expansion. These investments are focused on development to support the Company's strategic projects.



SUMBER DANA YANG DIHARAPKAN UNTUK MEMENUHI IKATAN TERSEBUT

PLN IP Services melakukan investasi dalam bentuk barang modal menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil usaha. Selain itu, pembiayaan investasi barang modal mengutamakan sumber dana dalam mata uang Rupiah. Manajemen berpendapat bahwa dampak dari fluktuasi mata uang asing tidak berpengaruh signifikan terhadap komitmen investasi barang modal.

Perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya modal guna memaksimalkan nilai Perusahaan. Oleh karena itu, kebijakan dalam mencari pendanaan selalu memperhitungkan risiko keuangan yang mungkin timbul di masa depan. Manajemen berpendapat bahwa nilai buku dari aset dan liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2023 diperkirakan sama dengan nilai wajarnya.

EXPECTED FUNDING SOURCES TO FULFILL COMMITMENTS

PLN IP Services invests in capital goods using funds derived from its business operations. Additionally, the financing of capital goods investments prioritizes sources of funds in Indonesian Rupiah. Management believes that the impact of foreign currency fluctuations does not significantly affect the commitments for capital goods investments

The company strives to minimize capital costs to maximize its value. Therefore, the policy in seeking funding always considers potential financial risks that may arise in the future. Management believes that the book value of financial assets and liabilities as of December 31, 2023, approximates their fair value.

Perlindungan Risiko terhadap Mata Uang Asing Risk Protection Against Foreign Currency

PT PLN Indonesia Power Services memahami pentingnya mengelola risiko yang terkait dengan fluktuasi nilai tukar mata uang asing terhadap nilai Rupiah. Pada tahun 2023, perusahaan telah menerapkan strategi perlindungan untuk mengurangi dampak potensial dari fluktuasi nilai tukar mata uang terhadap keuangan Perusahaan.

Adapun mata uang asing yang relevan dalam operasional perusahaan termasuk Dolar Amerika (US\$), Euro (EUR), dan Dinar Kuwait (KWD). Perusahaan memantau perubahan kurs mata uang ini secara teratur untuk memahami implikasi keuangan yang mungkin timbul.

Strategi Perlindungan

PT PLN Indonesia Power Services mengadopsi berbagai strategi perlindungan, termasuk penggunaan kontrak *forward* dan opsi mata uang, untuk mengamankan nilai tukar mata uang pada tingkat yang dapat diterima. Tujuan utamanya adalah melindungi nilai keuangan perusahaan dari fluktuasi nilai tukar yang tidak terduga.

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Pembiayaan dan sebagian besar pengeluaran operasional dilakukan dalam mata uang Rupiah, yang secara tidak langsung memberikan perlindungan alami terhadap eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Oleh karena itu, manajemen yakin bahwa Perusahaan tidak memiliki eksposur yang signifikan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

Komitmen terhadap Kebijakan

Manajemen perusahaan berkomitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi strategi perlindungan mata uang asing yang ada, dengan memperhatikan perubahan kondisi pasar. Pendekatan ini mendukung upaya perusahaan dalam meminimalkan risiko keuangan yang mungkin timbul akibat perubahan nilai tukar mata uang.

PT PLN Indonesia Power Services understands the importance of managing risks associated with fluctuations in foreign exchange rates against the Indonesian Rupiah. In 2023, the Company implemented risk mitigation strategies to reduce potential impacts of currency fluctuations on its financial health.

Relevant foreign currencies in the company's operations include the US Dollar (US\$), Euro (EUR), and Kuwaiti Dinar (KWD). The company regularly monitors changes in these exchange rates to understand their financial implications.

Risk Management Strategies

PT PLN Indonesia Power Services adopts various risk management strategies, including the use of forward contracts and currency options, to secure exchange rates at acceptable levels. The primary goal is to protect the company's financial assets from unexpected fluctuations in exchange rates.

Foreign Exchange Risk

Most of the company's financing and operational expenditures are conducted in Indonesian Rupiah, indirectly providing a natural hedge against exposure to foreign exchange rate fluctuations. Therefore, management is confident that the company does not have significant exposure to fluctuations in foreign exchange rates.

Commitment to Policy

Company management is committed to continuously monitoring and evaluating existing foreign exchange risk management strategies, taking into account changing market conditions. This approach supports the company's efforts to minimize financial risks arising from fluctuations in exchange rates.

Mata Uang Asing	Kurs Rupiah Increase/ Decrease		Foreign currency
	2023 (Rp penuh) (Rp full)	2022 (Rp penuh) (Rp full)	
Dolar Amerika (US\$)	15.439	15.592	US Dolar (US\$)
Euro (EUR)	17.140	16.713	Euro (EUR)
Dinar Kuwait (KWD)	50.220	51.350	Dinar Kuwait (KWD)

Perbandingan Target dan Realisasi, Serta Proyeksi Satu Tahun ke Depan

Comparison of Targets and Realizations, and Projections for the Next Year

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI

Setiap tahun, PLN IP Services berkomitmen untuk mengukur dan mengevaluasi pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023, perusahaan telah menghadapi berbagai dinamika eksternal dan internal yang mempengaruhi kinerja finansialnya. Berikut adalah perbandingan antara target yang ditetapkan dan pencapaian yang berhasil, serta proyeksi untuk tahun mendatang.

COMPARISON OF TARGET AND REALIZATION

Every year, PLN IP Services is committed to measuring and evaluating its achievements against the set targets. In 2023, the company faced various external and internal dynamics that influenced its financial performance. Here is the comparison between the set targets and the achieved results, along with projections for the upcoming year.

Mata Uang Asing	Target RKAP 2023 2023 RKAP Target	Realisasi 2023 2023 Realization	Realisasi 2022 2022 Realization	Pencapaian RKAP RKAP Achievement	Pertumbuhan (Penurunan) Growth (Decrease)	Foreign currency
	a	b	c	b/a	(b-c)/c	
Pendapatan Usaha	2.216.465	1.607.653	1.752.466	72,53%	(8,26%)	Operating Revenues
Beban Usaha	1.855.805	1.462.795	1.523.866	78,82%	(4,01%)	Operating Expenses
Laba Usaha	360.660	144.858	212.938	40,16%	(31,97%)	Operating Profit
Laba Tahun Berjalan	248.155	91.097	156.455	36,71%	(41,77%)	Profit for the Year
Aset	1.242.334	1.117.351	1.199.643	89,94%	(6,86%)	Assets
Liabilitas	288.844	218.264	312.752	75,56%	(30,21%)	Liabilities
Ekuitas	953.490	899.087	886.891	94,29%	1,38%	Equity

Dalam Juta Rupiah | In Million Rupiah

Pada tahun 2023, PLN IP Services berhasil mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp1,61 triliun atau 72,53% dari RKAP, nilai tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,75 triliun. Meskipun terdapat peningkatan pada Pendapatan jasa operasi dan pemeliharaan serta penjualan listrik, namun pada penjualan material dan suku cadang mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 35,69% atau setara dengan Rp336,53 miliar yang mempengaruhi penurunan pendapatan secara keseluruhan.

In 2023, PLN IP Services successfully recorded operating revenues of Rp1.61 trillion, which was 72.53% of the RKAP target. This figure experienced a decline from the previous year's Rp1.75 trillion. Despite increases in revenue from operating and maintenance services as well as electricity sales, there was a significant decrease of 35.69% in sales of materials and spare parts, of Rp336.53 billion, which affected the overall revenue decline.

PROYEKSI SATU TAHUN KE DEPAN

Adapun target yang telah ditetapkan oleh perusahaan untuk tahun 2024 mendatang adalah berikut:

ONE-YEAR FORWARD PROJECTION

The targets set by the company for the upcoming year 2024 are as follows:

► **Tabel Proyeksi Satu Tahun ke Depan**
Table of Projection for the Next Year

Uraian	Target RKAP 2024 2024 RKAP Target	Description
Pendapatan Usaha	1.945.448	Operating Revenues
Beban Usaha	1.751.306	Operating Expenses
Laba Usaha	194.142	Operating Profit
Laba Tahun Berjalan	115.989	Profit for the Year
Aset	1.214.863	Assets
Liabilitas	374.578	Liabilities
Ekuitas	840.285	Equity

Dalam juta Rupiah | in Rupiah million

Proyeksi Kebijakan Dividen ke Depan

Kebijakan dividen ke depan mengacu pada keputusan RUPS yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan.

Dividend Policy Projection

Future dividend policy will refer to GMS resolutions, based on applicable and relevant laws and regulations.

Kebijakan dan Pembagian Dividen

Dividend Policy and Distribution

KEBIJAKAN DIVIDEN

Kebijakan dividen perusahaan mengikuti peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sesuai dengan undang-undang ini, perusahaan wajib menyetor sebagian laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan hingga mencapai minimal 20% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor. Pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Kronologis Pembagian Dividen

Berdasarkan Surat PLN Indonesia Power No. 3914/MNJ.01.02/PLNIP010000/2023-R tertanggal 5 September 2023, para pemegang saham menyetujui pembayaran dividen tunai untuk tahun buku 2022 sebesar Rp78,23 miliar, yang seluruhnya telah dibayarkan dengan 3 (tiga) tahap pembayaran dividen yaitu pada tanggal 30 Oktober, 29 November, dan 21 Desember tahun 2023. Pembayaran dengan 3 (tiga) tahap ini dikarenakan Perusahaan berusaha mengoptimalkan arus kas yang dapat dimaksimalkan untuk pembiayaan operasional jangka pendek lainnya.

DIVIDEND POLICY

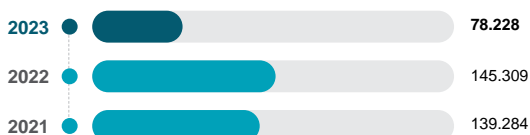
The company's dividend policy adheres to prevailing regulations under Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies. According to this law, the company is required to set aside a certain amount of net profit each fiscal year for reserves until the reserve balance reaches at least 20% of the total issued and paid-up capital. Dividend distribution is carried out based on decisions made at the General Meeting of Shareholders (RUPS).

Chronology of Dividend Distribution

Based on PLN Indonesia Power Letter No. 3914/MNJ.01.02/PLNIP010000/2023-R on September 5, 2023, the shareholders approved the payment of cash dividends for fiscal year 2022 of Rp78.23 billion, all of which have been paid in 3 (three) dividend payment phases on October 30, November 29, and December 21, 2023. This 3 (three) phase payment is because the Company is trying to optimize cash flow to be maximized for other short-term operational financing.

Jenis Barang Modal	Tahun Buku 2022 2022 Fiscal Year	Tahun Buku 2021 2021 Fiscal Year	Tahun Buku 2020 2020 Fiscal Year	Type of Capital Goods
Laba Bersih Tahun Sebelumnya (Rp Juta)	156.455	145.309	139.284	Previous Year's Net Profit (Rp Million)
Jumlah Dividen (Rp Juta)	78.228	145.309	139.284	Total Dividend (Rp Million)
Dividen per Saham (Rp)	151,94	282,22	270,5	Dividend per Share (Rp)
Payout Ratio (%)	50,00%	100%	100%	Payout Ratio (%)
Tanggal Pengumuman	5 September 2023 September 5, 2023	5 Agustus 2022 August 5, 2022	23 Desember 2021 December 23, 2021	Announcement Date
Tanggal Pembayaran	30 Oktober 2023 29 November 2023 21 Desember 2023 October 30, 2023 November 29, 2023 December 21, 2023	22 Agustus 2022 August 22, 2022	28 Desember 2021 December 28, 2021	Payment Date

► Jumlah Dividen yang Dibagikan Total of Appropriated Dividend



Dalam juta Rupiah
In Rupiah million

Kontribusi kepada Negara

Contribution to the State

Sebagai wujud kontribusi Perusahaan pada kemajuan bangsa dan negara, PLN IP Services telah melakukan kewajiban dalam pembayaran pajak kepada negara, baik PPh Karyawan, PPh Badan, PPN Masa dan PBB. Selain itu juga tidak terdapat keterlambatan penyampaian dokumen kewajiban perpajakan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dan bulanan, serta tidak terdapat keterlambatan penyampaian dokumen kewajiban pada lembaga regulator.

Setoran pajak pada tahun 2023 sejumlah Rp24,14 miliar dengan rincian adalah sebagai berikut:

To contribute to the progress of the nation, PLN IP Services has fulfilled its obligations by paying taxes to the state, including Employee Income Tax (PPh), Corporate Income Tax (PPh Badan), Value Added Tax (PPN), and Land and Building Tax (PBB). Additionally, there were no delays in submitting the required tax documents such as Annual and Monthly Tax Returns (SPT), nor were there any delays in submitting documents to regulatory bodies.

The tax payments in 2023 was Rp24.14 billion, detailed as follows:

Jenis Pajak	2023	2022	Type of Taxes
PPh Pasal 21	9.996	2.654	Income Tax Article 21
Pajak Lainnya:			Other Taxes
PPN	4.952	18.697	PPN
Pasal 4 (2)	723	85	Article 4 (2)
Pasal 21	6.847	9.161	Article 21
Pasal 23	1.621	621	Article 23
Pasal 26	1	1	Article 26
Jumlah	24.140	31.219	Total

Dalam Juta Rupiah | In Million Rupiah

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Realization of the Use of Public Offering Proceeds

Hingga 31 Desember 2023, PT PLN Indonesia Power Services belum menjadi perusahaan terbuka (*go public*) atau belum melakukan Penawaran Umum di Bursa Efek, dengan demikian tidak terdapat informasi mengenai total perolehan dana, rencana dan rincian penggunaan dana, saldo dana dan tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas perubahan penggunaan dana.

As of December 31, 2023, PT PLN Indonesia Power Services has not yet become a publicly traded company (*gone public*) or conducted an Initial Public Offering (IPO) on any Stock Exchange, hence there is no information available regarding total funds raised, plans and details of fund usage, fund balances, and the date of approval at the General Meeting of Shareholders (RUPS) regarding changes in fund usage.

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Realization of the Use of Public Offering Proceeds

Beberapa peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan antara lain adalah:

Akta Notaris No 02 tanggal 05 Januari 2024 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Cogindo DayaBersama. Notaris: Shahreza Annaz, S.H., M.Kn.

Agenda :

1. Perubahan Data Pemegang Saham Perusahaan sesuai ketentuan Pasal 32 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perusahaan.
2. Pengangkatan Direksi, Penggantian Direksi dan Penggantian Dewan Komisaris Perusahaan.

Keputusan :

1. Modal ditempatkan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perusahaan telah ditempatkan dan diambil bagian oleh para pemegang saham:
 - a. PT PLN Indonesia Power sebanyak 514.867.769 (lima ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp514.867.769.000 (lima ratus empat belas milyar delapan ratus 15 enampuluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah).
 - b. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN Indonesia Power sebanyak 1 (satu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah). Atau seluruhnya berjumlah 514.867.770 (lima ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh) saham dengan - nilai nominal seluruhnya sebesar Rp514.867.770.000 (lima ratus empat belas milyar delapan ratus enampuluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu Rupiah).

Some of the events that occurred after the reporting period include:

Notarial Deed No. 02 dated January 05, 2024, concerning the Declaration of Shareholders of PT Cogindo DayaBersama. Notary: Shahreza Annaz, S.H., M.Kn.

Agenda:

1. Changes in the Shareholders Data of the Company according to Article 32 paragraph 1 letter a of the Articles of Association of the Company.
2. Appointment of Board of Directors, Replacement of Board of Directors, and Replacement of Board of Commissioners of the Company.

Decision:

1. The issued capital of the Company as referred to in Article 4 Paragraph 2 of the Articles of Association of the Company has been issued and subscribed by the shareholders:
 - a. PT PLN Indonesia Power as many as 514,867,769 (five hundred fourteen million eight hundred sixty-seven thousand seven hundred sixty-nine) shares, with an aggregate nominal value of Rp514,867,769,000 (five hundred fourteen billion eight hundred fifteen sixty-seven million seven hundred sixty-nine thousand Rupiah).
 - b. PT PLN Indonesia Power Education and Welfare Foundation as much as 1 (one) share, with a total nominal value of Rp1,000 (one thousand rupiah). Or a total of 514,867,770 (five hundred fourteen million eight hundred sixty-seven thousand seven hundred seventy) shares with - a total nominal value of Rp514,867,770,000 (five hundred fourteen billion eight hundred sixty-seven million seven hundred seventy thousand Rupiah).

2. Pemegang Saham dengan ini menegaskan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan menjadi sebagai berikut :

Susunan Direksi Perusahaan :

Direktur Utama : Hari Cahyono
 Direktur SDM : Imam Adi Prihantoro

 Direktur Bisnis : Kukuh Pambudi
 Direktur Operasi : Mulyadi
 Direktur Keuangan : Hari Muhardani Nasution

Susunan Dewan Komisaris Perusahaan :

Komisaris Utama : Khusnul Mubien

 Komisaris : 1. Julita Indah
 2. Masykuri Abdillah
 Komisaris Independen : 1. Sunandar
 2. Fredy Eko Prasetyo T

2. The Shareholders hereby reaffirm the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as follows:

Composition of the Board of Directors of the Company:

President Director : Hari Cahyono
 Director of Human Capital : Imam Adi Prihantoro
 Director of Business : Kukuh Pambudi
 Director of Operation : Mulyadi
 Director of Finance : Hari Muhardani Nasution

Composition of the Board of Directors of the Company:

President Commissioner : Khusnul Mubien
 Commissioner : 1. Julita Indah
 2. Masykuri Abdillah
 Independent Commissioner : 1. Sunandar
 2. Fredy Eko Prasetyo T

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Cogindo DayaBersama Nomor. 08 Tanggal 19 April 2024 mengenai perubahan Anggaran Dasar PT Cogindo DayaBersama dalam rangka rebranding Perusahaan melalui perubahan Nama dan Logo Korporat yang semula bernama PT Cogindo DayaBersama berubah menjadi PT PLN Indonesia Power Services. Perubahan tersebut efektif berlaku sejak tanggal 2 Mei 2024 dan telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0025785.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT PLN Indonesia Power Services.

DAMPAK TERHADAP INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL

Perubahan yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan ini memiliki dampak signifikan pada struktur kepemilikan saham, manajemen perusahaan, dan identitas korporat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, stabilitas, dan daya saing perusahaan di pasar.

Based on the Deed of Shareholders Resolution of PT Cogindo DayaBersama No. 08 Dated April 19, 2024, concerning the amendment of the Articles of Association of PT Cogindo DayaBersama in the context of rebranding the Company through changes in the Corporate Name and Logo which was originally named PT Cogindo DayaBersama changed to PT PLN Indonesia Power Services. The changes are effective as of May 2, 2024, and approved based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights Number AHU-0025785.AH.01.02.Tahun 2024 dated May 2, 2024, concerning Approval of Amendments to the Articles of Association of PT PLN Indonesia Power Services Limited Liability Company.

IMPACT ON INFORMATION AND MATERIAL FACTS

The changes that occurred after the accountant's report date have significant impacts on the ownership structure, company management, and corporate identity. These changes are expected to enhance transparency, stability, and the company's competitiveness in the market.

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, Restrukturisasi Utang/Modal

Material Information Regarding Investment, Expansion, Divestment, Merger/Consolidation, Acquisition, Debt/Capital Restructuring

Keterangan Description	Penjelasan Explanation
Informasi Investasi	Tidak terdapat kegiatan investasi sehingga tidak ada informasi terkait tujuan, nilai atau jumlah transaksi, sumber dana, dari hasil kegiatan investasi pada tahun 2023.
Information on Investment	There are no investment activities so there is no information related to the purpose, value or amount of transactions, source of funds, from the results of investment activities in 2023.
Informasi Ekspansi	Tidak terdapat kegiatan ekspansi sehingga tidak ada informasi terkait tujuan, nilai atau jumlah transaksi, sumber dana, dari hasil kegiatan ekspansi pada tahun 2023.
Information on Expansion	There are no Information on Expansion activities so there is no information related to the purpose, value or amount of transactions, source of funds, from the results of Information on Expansion activities in 2023.
Informasi Divestasi	Tidak terdapat kegiatan divestasi sehingga tidak ada informasi terkait tujuan, nilai atau jumlah transaksi, sumber dana, dari hasil kegiatan divestasi pada tahun 2023.
Information on Divestment	There are no Information on Divestment activities so there is no information related to the purpose, value or amount of transactions, source of funds, from the results of Information on Divestment activities in 2023.
Informasi Akuisisi	Tidak terdapat kegiatan akuisisi sehingga tidak ada informasi terkait tujuan, nilai atau jumlah transaksi, sumber dana, dari hasil kegiatan akuisisi pada tahun 2023.
Information on Acquisition	There are no Information on Acquisition activities so there is no information related to the purpose, value or amount of transactions, source of funds, from the results of Information on Acquisition activities in 2023.
Informasi Restrukturisasi Utang atau Modal	Tidak terdapat kegiatan restrukturisasi utang atau modal sehingga tidak ada informasi terkait tujuan, nilai atau jumlah transaksi, sumber dana, dari hasil kegiatan ekspansi pada tahun 2023.
Information on Debt and/or Capital Restructuring	There are no Information on Debt and/or Capital Restructuring activities so there is no information related to the purpose, value or amount of transactions, source of funds, from the results of Information on Debt and/or Capital Restructuring activities in 2023.

Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan/atau Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan

Management Stock Ownership Program (MSOP) and/or Employee Stock Ownership Program (ESOP)

Hingga akhir tahun 2023, perusahaan belum memiliki kebijakan kompensasi jangka panjang berbasis kinerja untuk manajemen atau karyawan, seperti *Management Stock Ownership Program (MSOP)* atau *Employee Stock Ownership Program (ESOP)*. Oleh karena itu, tidak ada informasi terkait jumlah saham atau opsi, jangka waktu pelaksanaan, persyaratan yang berhak, atau harga pelaksanaan.

As of the end of 2023, the company does not have a long-term performance-based compensation policy for management or employees, such as a *Management Stock Ownership Program (MSOP)* or *Employee Stock Ownership Program (ESOP)*. Therefore, there is no information on the number of shares or options, the implementation period, eligibility requirements, or the exercise price.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Berelasi

Material Transaction Information Containing Conflict of Interest and/or Transactions with Affiliated Parties

Perusahaan menjalankan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam PSAK No. 7, Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. Hal ini mencerminkan komitmen kami untuk menjaga transparansi dan integritas dalam setiap hubungan bisnis internal yang melibatkan pihak terkait, dengan tujuan memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan yang disetujui pemegang saham independen harus menyertakan tanggal RUPS dalam pengungkapan. Pada tahun 2023, tidak ada transaksi benturan kepentingan di Perusahaan. Benturan kepentingan terjadi saat kepentingan ekonomi perusahaan berbeda dengan kepentingan pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama, yang dapat merugikan perusahaan.

TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan dan entitas anak (entitas pelapor):

1. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - Memiliki pengaruh signifikan atas pelapor atau entitas pelapor; atau
 - Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

The company conducts transactions with related parties in accordance with the guidelines set forth in PSAK No. 7, Disclosure of Related Parties. This reflects our commitment to maintaining transparency and integrity in every internal business relationship involving related parties, with the aim of ensuring compliance with applicable accounting standards.

TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICT OF INTEREST

Affiliate and/or conflict of interest transactions approved by independent shareholders must include the date of the General Meeting of Shareholders (GMS) in the disclosure. In 2023, there were no conflict of interest transactions in the Company. Conflict of interest occurs when the company's economic interests differ from the personal interests of members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or major shareholders, which can be detrimental to the company.

TRANSACTIONS WITH AFFILIATED/RELATED PARTIES

Related parties are person or entity related to the Company and its subsidiaries (reporting entities):

1. A person or close family member has relationship with the reporting entity if the person:
 - Has control or joint control over the reporting entity;
 - Has significant influence over the reporter or reporting entity; or
 - Are key management personnel of the reporting entity or parent entity of the reporting entity.
2. An entity is related to the reporting entity if it fulfills one of the following:

- Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
 - Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura Bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura Bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam poin 1; atau
 - Orang yang diidentifikasi dalam poin 1 :
 - memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas),
 - Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.
3. Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam laporan keuangan Perusahaan.

- The entity and the reporting entity are members of the same business group (meaning that each parent subsidiary and subsequent subsidiary are related to each other);
 - One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a business group, of which the other entity is a member);
 - The two entities are joint ventures of the same third party;
 - One entity is a joint venture of the third entity and the other entity is an associate of the third entity;
 - The entity is a post-employment benefit plan for employee benefits from a reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is the entity administering the program, then the sponsoring entity is also related to the reporting entity;
 - Entity that is controlled or jointly controlled by the person identified in point 1; or
 - Person identified in point 1 :
 - has significant influence over the entity or key management personnel of the entity (or a parent of the entity),
 - he entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.
3. Government-related entities are entities that are controlled, jointly controlled, or influenced by the government. Government refers to government, government agencies and similar bodies whether local, national or international.

All transactions conducted with related parties, whether or not carried out with the same terms and conditions as those carried out with third parties, are disclosed in the Company's financial statements.

KEWAJARAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI

PLN IP Services meyakini bahwa semua transaksi tetap dalam batas yang wajar sesuai dengan PSAK Nomor 7 (Revisi 2010) tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. Oleh karena itu, PLN IP Services melakukan transaksi dengan pihak yang berelasi secara adil dan wajar sesuai dengan kebijakan dan persyaratan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

NAMA DAN SIFAT HUBUNGAN BERELASI

Nama Pihak Berelasi Name of Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan kas di bank dan kas yang dibatasi penggunaannya Placement of cash in bank and restricted cash
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan kas di bank, deposito berjangka/kas yang dibatasi penggunaannya Placement of cash in bank, time deposits and restricted cash
PT PLN (Persero)	Pemegang saham utama The ultimate parent entity	Transaksi pendapatan atas penjualan material dan suku cadang dan penjualan tenaga listrik Revenue from sales of material and spare parts and sales of electricity.
PLN Indonesia Power	Pemegang saham Perusahaan Shareholders of the Company	Transaksi pendapatan jasa operasi dan pemeliharaan, penjualan material dan suku cadang Revenue from operation and maintenance services and sales of material and spare parts
YPK Indonesia Power	Pemegang saham Perusahaan Shareholders of the Company	Penyertaan modal Paid-in capital
PT PLN Nusantara Power	Entitas anak dari PT PLN (Persero) Subsidiary of PT PLN (Persero)	Transaksi pendapatan dari penjualan material dan suku cadang Revenue from sales of material and spare parts
PT Indonesia Comnet Plus	Entitas anak dari PT PLN (Persero) Subsidiary of PT PLN (Persero)	Utang usaha Trade payables
PT Indo Ridlatama Power	Di bawah entitas sepengendali Under common control entity	Transaksi pendapatan atas penjualan material dan suku cadang Revenue from sales of material and spare parts
PT PLN Indonesia Geothermal	Di bawah entitas sepengendali Under common control entity	Transaksi pendapatan atas penjualan material dan suku cadang Revenue from sales of material and spare parts
PT Artha Daya Coalindo	Di bawah entitas sepengendali Under common control entity	Transaksi pendapatan atas penjualan material dan suku cadang Revenue from sales of material and spare parts
PT GCL Indo Tenaga	Di bawah entitas sepengendali Under common control entity	Transaksi pendapatan dari penjualan material dan suku cadang Revenue from sales of material and spare parts
PT Maxpower Cogindo Batam	Ventura bersama Joint venture	Pemberian pinjaman kepada ventura bersama Loans to a joint venture

REALISASI TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan sebagai berikut:

FAIRNESS FOR THE TRANSACTION

PLN IP Services believes that all transactions remain within reasonable limits as per PSAK No. 7 (Revised 2010) regarding Disclosure of Related Parties. Therefore, PLN IP Services conducts transactions with related parties fairly and reasonably in accordance with the policies and terms agreed upon by both parties..

NAME AND NATURE OF RELATIONSHIP

REALIZATION OF RELATED PARTY TRANSACTIONS

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes as follows:

Uraian	2023		2022		Description
Kas dan setara kas	216.669	10,97%	206.632	9,56%	Cash and cash equivalents
Deposito berjangka	2.500	0,13%	-	-	Time deposits
Kas yang dibatasi penggunaannya	24.983	1,26%	-	-	Restricted cash
Piutang usaha	327.641	16,59%	378.780	17,52%	Trade receivables
Piutang lain-lain	-	-	33	0,002%	Other receivables
Piutang dari ventura bersama	22.826	1,16%	17.559	0,81%	Receivables from a joint venture
Jasa operasi dan pemeliharaan	747.544	37,85%	565.314	26,15%	Operation and maintenance services
Penjualan material dan suku cadang	449.029	22,74%	837.098	38,72%	Sales of material and spare parts
Penjualan tenaga listrik	180.822	9,16%	156.300	7,23%	Sales of electricity
Pendapatan bunga	3.000	0,15%	-	-	Interest income
Jumlah	1.975.014	100%	2.161.716	100%	Total

Dalam Juta Rupiah | In Million Rupiah

TUJUAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Tujuan utama dilakukannya transaksi dengan pihak berelasi secara umum adalah salah satu bentuk dukungan kepada kelancaran bisnis Perusahaan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan berkelanjutan.

PEMENUHAN PERATURAN DAN KETENTUAN TERKAIT

Mekanisme *review* atas transaksi dengan pihak berelasi telah melalui proses audit baik yang dilakukan oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Hal ini adalah sebagai upaya untuk memastikan tingkat kewajaran transaksi dan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

KETERLIBATAN ORGAN PERUSAHAAN DALAM PROSES *REVIEW* TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Mekanisme *review* atas transaksi dengan pihak berelasi dilakukan melalui proses audit, baik oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Dalam proses audit tersebut, Perusahaan melibatkan Organ Perusahaan diantaranya Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan beberapa Divisi yang terkait.

PURPOSE OF RELATED PARTY TRANSACTIONS

The main purpose of transactions with related parties in general is a form of support for the smooth running of the Company's business to generate business income and carried out regularly, repeatedly, and continuously.

FULFILLMENT OF RELEVANT RULES AND CONDITIONS

The review mechanism for transactions with related parties has gone through an audit process both by internal auditors and external auditor. This is an effort to ensure the level of fairness of transactions and compliance with generally accepted accounting standards in Indonesia.

INVOLVEMENT OF COMPANY ORGANS IN THE REVIEW PROCESS OF RELATED PARTY TRANSACTIONS

The review mechanism for transactions with related parties is conducted through an audit process, both by internal and external auditors. In the audit process, the Company involves the Company Organs including the Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, and several related Divisions.

Dewan Komisaris dan Komite Audit berperan dalam memberikan arahan dan masukan kepada Direksi agar transaksi dengan pihak berelasi dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*). Direksi memastikan seluruh transaksi dengan pihak berelasi di sepanjang tahun 2023, telah melalui prosedur yang memadai dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*). Informasi lebih rinci terkait transaksi pihak berelasi telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan pada Catatan 25.

The Board of Commissioners and Audit Committee play a role in providing direction and input to the Board of Directors so transactions with related parties can be conducted according to the arms-length principle. The Board of Directors ensures that all transactions with associated parties throughout 2023 went through adequate procedures and were performed according to generally accepted business practices and in compliance with the arms-length principle. More detailed information regarding related party transactions has been disclosed in the Company's Consolidated Financial Statements in Note 25.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berdampak Terhadap Perusahaan

Changes to Regulations that Impact on the Company

PT PLN Indonesia Power Services berkomitmen untuk menjalankan operasionalnya sesuai dengan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam upaya mematuhi ketentuan tersebut, perusahaan secara rutin melakukan peninjauan terhadap peraturan baru maupun perubahan peraturan yang ada.

PT PLN Indonesia Power Services is committed to operating in compliance with all applicable laws and regulations. To ensure this compliance, the company regularly reviews newly issued regulations as well as any amendments to existing ones.

Pada tahun 2023, tidak terdapat peraturan baru maupun perubahan peraturan yang memberikan dampak signifikan terhadap operasional perusahaan.

In 2023, there were no new regulations or amendments that had a significant impact on the company's operations.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Changes in Accounting Policy



Penerapan dari amandemen ini mengacu pada standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2023 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan pada tahun berjalan:

- Amandemen PSAK No. 1, “Penyajian Laporan Keuangan - Pengungkapan Kebijakan Akuntansi”
- Amandemen PSAK No. 16, “Aset Tetap - Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan”
- Amandemen PSAK No. 25, “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan - Definisi Estimasi Akuntansi”
- Amandemen PSAK No. 46, “Pajak Penghasilan - Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal”
- Amandemen PSAK No. 46, “Pajak Penghasilan - Reformasi Pajak Internasional - Ketentuan Model Pilar Dua”

The implementation of this amendment refers to accounting standards which are effective from January 1, 2023 did not result in substantial changes to the Company’s accounting policies and had no material effect on the amounts reported in the financial statements for the current year:

- Amendment to SFAS No. 1, “Presentation of Financial Statements - Disclosure of Accounting Policies”
- Amendment to SFAS No. 16, “Property, Plant and Equipment - Proceeds before Intended Use”
- Amendment to SFAS No. 25, “Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors - Definition of Accounting Estimates”
- Amendments to SFAS No. 46, “Income Taxes - Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction”
- Amendment to SFAS No. 46, “Income Taxes - International Tax Reform - Pillar Two Model Rules”

Aspek Pemasaran

Marketing Aspect

STRATEGI PEMASARAN

Dalam peta bisnis solusi energi, PLN IP Services memiliki kompetensi inti dalam operasi pemeliharaan, pembangkit, dan pengembangan. Oleh karena itu, strategi pemasaran PLN IP Services juga melibatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), teknologi, produktivitas, kinerja, dan pertumbuhan operasional perusahaan. Dengan terus mengembangkan jasa operasi dan pemeliharaan (O&M), manufaktur dan retail, EPC (*Engineering, Procurement, and Construction*), serta layanan energi, PLN IP Services berusaha menjaga posisi dominannya dalam industri ketenagalistrikan di Indonesia. Selain itu, PLN IP Services juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi yang efektif dan ramah lingkungan, sehingga meminimalisir dampak negatif operasional terhadap lingkungan.

PANGSA PASAR

PT PLN Indonesia Power Services memainkan peran penting dalam memperkuat infrastruktur ketenagalistrikan Indonesia, sejalan dengan kebijakan sektor ESDM yang difokuskan pada pembangunan energi berkelanjutan dan berkeadilan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta pengembangan industri. Hingga akhir tahun 2023, PLN IP Services terus mendapatkan kepercayaan dari perusahaan induk, PT PLN Indonesia Power, untuk mendukung pelaksanaan bisnisnya dan berperan aktif dalam semua misi strategis "SOLID" PLN Group.

Dalam konteks pangsa pasar, PLN menguasai pasar konsumen listrik di Indonesia dengan jumlah pelanggan mencapai 89,1 juta hingga akhir tahun 2023. Sebagai anak perusahaan dari PLN IP, PLN IP Services juga memiliki akses ke pangsa pasar ini, menggarisbawahi posisinya sebagai penyedia layanan utama dalam bidang operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas terpasang pembangkit listrik menjadi 85,1 GW pada tahun 2023, serta proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang

MARKETING STRATEGY

In the energy solution business map, PLN IP Services has core competency in maintenance, generation, and development operations. Therefore, the marketing strategy of PLN IP Services also covered quality improvement of human capital, technology, productivity, performance, and operational growth of the Company. With continuous development of operation services and maintenance (O&M), manufacture and retail, EPC (Engineering, Procurement, and Construction), and energy services, PLN IP Services strives to maintain its dominant position in the electricity industry in Indonesia. In addition, PLN IP Services also support the objectives of sustainable development with optimizing technology utilization that is effective and environmentally friendly, although minimizing operational negative impact to the environment.

MARKET SHARE

PT PLN Indonesia Power Services plays an important role in strengthening Indonesia's electricity infrastructure, in line with ESDM sector policies focused on sustainable and equitable energy development to support economic growth and industrial development. Until the end of 2023, PLN IP Services continues to earn the trust of its holding company, PT PLN Indonesia Power, to support its business execution and play an active role in all of PLN Group's "SOLID" strategic missions.

In terms of market share, PLN dominates the electricity consumer market in Indonesia with 89.1 million customers by the end of 2023. As a subsidiary of PLN IP, PLN IP Services also has access to this market share, underscoring its position as a key service provider in the field of power plant operations and maintenance. The government's policy to increase the installed capacity of power plants to 85.1 GW by 2023, and the electricity infrastructure projects targeted to add 27 GW of power plants, provide great opportunities for PLN IP Services to

ditargetkan untuk menambah 27 GW pembangkit listrik, memberikan peluang besar bagi PLN IP Services untuk memperluas pasar dan meningkatkan kontribusinya dalam proyek-proyek besar ini.

Selain pasar domestik, posisi demografi Indonesia yang strategis juga membuka peluang bagi PLN IP Services untuk mengembangkan pasar di luar negeri. Kesempatan ini memungkinkan PLN IP Services untuk mengeksplorasi peluang pasar internasional, sekaligus memperkuat posisinya di luar PLN Group. Dengan fokus pada pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), PLN IP Services berkontribusi dalam mewujudkan keadilan sosial di bidang energi, menyediakan energi terbarukan dengan harga terjangkau, dan menjalankan operasi yang ramah lingkungan.

expand its market and increase its contribution in these large projects.

In addition to the domestic market, Indonesia's strategic demographic position also opens up opportunities for PLN IP Services to develop overseas markets. This opportunity allows PLN IP Services to explore international market opportunities while strengthening its position outside the PLN Group. With a focus on the development of new and renewable energy (EBT), PLN IP Services contributes to realizing social justice in the energy sector, providing renewable energy at affordable prices, and running environmentally friendly operations.

Prospek dan Kelangsungan Usaha

Prospects and Business Continuity

PROSPEK USAHA 2024

Prospek ekonomi global untuk tahun 2024 diprediksi akan tetap stagnan, dengan IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,1%, sedangkan Bank Indonesia menurunkan proyeksinya menjadi 2,8%. Faktor-faktor yang mempengaruhi prediksi ini termasuk ketegangan geopolitik yang berlanjut, perlambatan ekonomi di beberapa negara seperti Tiongkok, dan tingginya suku bunga dan imbal hasil obligasi di negara maju.

Meskipun demikian, Indonesia diproyeksikan tetap memiliki ketahanan ekonomi yang baik terhadap ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi yang telah terbukti tangguh dalam menghadapi risiko global menjadi dasar kuat bagi pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024. Diharapkan bahwa konsumsi baik swasta maupun pemerintah serta investasi akan terus meningkat sejalan dengan kepercayaan masyarakat yang kuat, serta kelanjutan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). Kestabilan politik yang dihasilkan dari Pemilihan Umum tahun 2024 diharapkan akan memperkuat stabilitas ekonomi, sosial, dan politik nasional.

BUSINESS PROSPECT 2024

The global economic prospect for 2024 is predicted to remain stagnant, with the IMF projecting world economic growth of 3.1%, while Bank Indonesia lowered its projection to 2.8%. Factors influencing these predictions include continued geopolitical tensions, economic slowdown in some countries such as China, and high interest rates and bond yields in developed countries.

Nevertheless, Indonesia is projected to remain economically resilient to global uncertainties. Economic growth has proven to be resilient in the face of global risks as a strong basis for achieving the economic growth target of Indonesia in 2024. It is expected that both private and government consumption and investment will continue to increase in line with solid public confidence, and the continued development of National Strategic Projects ("PSN"). Political stability resulting from the 2024 General Election is expected to strengthen national economic, social, and political stability.

Dalam konteks data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 mencapai 5,05%, dengan tingkat inflasi sebesar 2,61%, dan suku bunga sebesar 6,00%. Untuk tahun berikutnya, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,2%, dengan tingkat inflasi 2,86%, dan suku bunga sebesar 6,7%.

Dengan demikian, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 akan meningkat dalam kisaran 4,7-5,5%. Prediksi positif ini didukung oleh kinerja baik Neraca Pembayaran Indonesia yang diproyeksikan terus membaik, didukung oleh aliran modal asing yang terus masuk sejalan dengan prospek perekonomian domestik yang membaik, serta prediksi tetap rendahnya defisit transaksi berjalan pada tahun 2024, berkisar antara 0,1% hingga 0,9% dari PDB.

Berdasarkan kajian IEA, Indonesia memerlukan hampir tiga kali lipat investasi energi pada tahun 2030 dari tingkat saat ini, dengan tambahan investasi sekitar 8 miliar Dolar AS per tahun. Investasi ini diperlukan untuk mendukung pengembangan infrastruktur energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), tenaga angin, dan sumber energi terbarukan lainnya. PT PLN Indonesia Power Services (PLN IP Services), sebagai Perusahaan yang berperan dalam sektor ketenagalistrikan, harus siap untuk berpartisipasi dalam peluang investasi ini. Melalui investasi yang tepat, PLN IP Services dapat memperkuat posisinya dalam pasar energi terbarukan yang berkembang.

Sekjen Kementerian ESDM mengungkapkan bahwa transisi energi tidak hanya menggeser pemanfaatan energi menuju energi bersih, tetapi juga menyebabkan transformasi ekonomi yang signifikan. Pemanfaatan energi terbarukan akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja dibandingkan dengan pembangkit listrik berbasis fosil. Hal ini membuka peluang besar bagi penciptaan lapangan kerja baru di sektor energi terbarukan. PLN IP Services dapat memanfaatkan perubahan ini dengan meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia dan berinvestasi dalam pelatihan tenaga kerja untuk mengisi kebutuhan di sektor energi terbarukan.

In the context of data obtained from the Ministry of Finance and Bank Indonesia, economic growth in Indonesia for 2023 reached 5.05%, with an inflation rate of 2.61%, and an interest rate of 6.00%. For the following year, in the 2024 State Budget, Indonesia's economic growth is projected to reach 5.2%, with an inflation rate of 2.86%, and an interest rate of 6.7%.

Therefore, Bank Indonesia estimates Indonesia's economic growth in 2024 will increase in the range of 4.7-5.5%. This positive prediction is supported by the good performance of Indonesia's Balance of Payments which is projected to continue to improve, supported by foreign capital inflows in line with the improved domestic economic outlook, and the prediction of a low current account deficit in 2024, ranging from 0.1% to 0.9% of GDP.

According to an IEA study, Indonesia will need to nearly triple its energy investment by 2030 from current levels, with an additional investment of around US\$8 billion per year. This investment is needed to support the development of renewable energy infrastructure, such as solar power plants (PLTS), wind power, and other renewable energy sources. PT PLN Indonesia Power Services (PLN IP Services), as a Company with a role in the power sector, must be ready to participate in this investment opportunity. Through the right investments, PLN IP Services can strengthen its position in the growing renewable energy market.

The Secretary General of the Ministry of Energy and Mineral Resources revealed that energy transition not only shifts energy utilization towards clean energy but also causes significant economic transformation. The utilization of renewable energy will require more manpower compared to fossil-based power plants. This provides a great opportunity for the creation of new jobs in the renewable energy sector. PLN IP Services can capitalize on these changes by improving human capital capabilities and investing in workforce training to fill the needs in the renewable energy sector.





PLN IP Services berkomitmen untuk memberikan kontribusi signifikan dalam sektor energi, baik di dalam negeri maupun di kancah Internasional.

PLN IP Services is committed to contributing significantly to the energy sector, both domestically and internationally

Dalam upaya mendukung percepatan pengembangan energi terbarukan, Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Nomor 103 Tahun 2023 tentang Pemberian Dukungan Fiskal Melalui Kerangka Pendanaan dan Pembiayaan dalam Rangka Percepatan Transisi Energi di Sektor Ketenagalistrikan. Peraturan ini, yang mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2023, menjadi landasan bagi pemerintah untuk menyediakan pendanaan dan dukungan keuangan bagi proyek-proyek energi terbarukan. Bentuk dukungan ini termasuk pengakhiran waktu operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan pengembangan pembangkit energi terbarukan sebagai penggantinya. PLN IP Services dapat memanfaatkan kebijakan ini untuk memperoleh pendanaan dan dukungan fiskal dalam proyek-proyek energi terbarukan yang direncanakan.

Kementerian ESDM memproyeksikan bahwa kebutuhan listrik dalam negeri akan meningkat sebesar 3,6% hingga 4,2% pada tahun 2024, mencapai sekitar 283,12 TWh. Peningkatan ini mengindikasikan adanya kebutuhan tambahan pembangkit dan infrastruktur penyediaan tenaga listrik. PLN IP Services harus siap untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas pembangkit listrik guna memenuhi permintaan yang meningkat ini.

To support the acceleration of renewable energy development, the Minister of Finance has issued Regulation No. 103 2023 on the Provision of Fiscal Support through the Funding and Financing Framework in the Framework of Accelerating the Energy Transition in the Electricity Sector. This regulation, which took effect on October 13, 2023, provides the foundation for the government to provide funding and financial support for renewable energy projects. This form of support includes the retirement of coal-fired power plants (“PLTU”) and the development of renewable energy plants to replace them. PLN IP Services can utilize this policy to obtain funding and fiscal support for its planned renewable energy projects.

The Ministry of Energy and Mineral Resources projects that domestic electricity demand will increase by 3.6% to 4.2% by 2024, reaching approximately 283.12 TWh. This increase indicates the need for additional power generation and power supply infrastructure. PLN IP Services must be prepared to develop and increase power generation capacity to meet this increased demand.

Prospek usaha industri ketenagalistrikan di Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan potensi yang besar seiring dengan komitmen pemerintah terhadap transisi energi dan mitigasi perubahan iklim. PLN IP Services memiliki peluang untuk berinvestasi dalam pengembangan energi terbarukan, memanfaatkan dukungan fiskal dari pemerintah, serta berpartisipasi dalam transformasi tenaga kerja yang diperlukan untuk era energi bersih.

Pada tahun 2024, PLN IP Services menetapkan sasaran utama untuk menjadi penyedia solusi energi terpercaya dengan target laba sebesar Rp308 miliar dan pendapatan usaha mencapai Rp3,09 triliun. Total kapasitas yang dikelola diproyeksikan sebesar 20.245 gigawatt, dengan pendapatan komprehensif mencapai Rp83.176 miliar. Pendapatan dari portfolio MRO ditargetkan sebesar Rp1 miliar dan ekspansi ke enam portfolio di luar negeri diharapkan dapat tercapai.

PLN IP Services berupaya mencapai skor *Customer Satisfaction Index* (CSI) 84. Dalam hal inovasi dan kelincahan, target *maturity Innovation Capability Rate* (ICR) ditetapkan pada angka 4.3. Untuk mencapai keunggulan modal manusia, *maturity Human Capital Readiness* (HCR) dan *Organizational Capability Readiness* (OCR) diharapkan mencapai angka 4.5. Upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja mencakup pemenuhan kapasitas SDM, percepatan peningkatan kompetensi dalam bidang O&M (*Operation & Maintenance*), MRO (*Maintenance, Repair, and Overhaul*), EBT (Energi Baru Terbarukan), dan industri non-pembangkitan, serta pemenuhan kompetensi inti untuk bisnis *Beyond kWh*. Selain itu, sosialisasi transisi HSH juga menjadi fokus utama.

Untuk memperluas jangkauan global, PLN IP Services menargetkan proyek di Kuwait yang mencakup jaringan distribusi listrik O&M. Di Vietnam, kerja sama di bidang pengoperasian, pemeliharaan, *overhaul*, perbaikan, jasa *engineering*, dan *reverse engineering* komponen pembangkit listrik sedang berlangsung. Penasihat lapangan teknis untuk Quang Ninh dan Pha Lai juga merupakan bagian dari proyek ini. Kontrak kursus pelatihan *Major Overhaul* Turbin Gas MHI-701D 100,75 MW dengan institusi pendidikan diproyeksikan terlaksana pada Mei 2024. Target berikutnya adalah penawaran O&M *Coal & Ash Handling Fu Ang* yang diproyeksikan pada Juli 2024.

The business prospect of the electricity industry in Indonesia in 2023 shows great potential in line with the government's commitment to energy transition and climate change mitigation. PLN IP Services has the opportunity to invest in renewable energy development, capitalize on fiscal support from the government, and participate in the workforce transformation required for the clean energy era.

In 2024, PLN IP Services set a key goal to become a trusted energy solutions provider with a profit target of Rp308 billion and operating revenue reaching Rp3.09 trillion. Total managed capacity is projected at 20,245 gigawatts, with comprehensive revenue reaching Rp83,176 billion. Revenue from the MRO portfolio is targeted at Rp1 billion and expansion to six overseas portfolios is expected.

PLN IP Services strives to achieve a Customer Satisfaction Index (CSI) score of 84. In terms of innovation and agility, the Innovation Capability Rate (ICR) maturity target is set at 4.3. To achieve human capital excellence, the maturity of Human Capital Readiness (HCR) and Organizational Capability Readiness (OCR) is expected to reach 4.5. Efforts to improve manpower competencies include fulfilling HC capacity, accelerating competency improvement in O&M (Operation & Maintenance), MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul), EBT (New Renewable Energy), and non-generation industries, as well as fulfilling core competencies for Beyond kWh business. In addition, socialization of the HSH transition is also a major focus.

To expand its global reach, PLN IP Services is targeting a project in Kuwait covering the power distribution network O&M. In Vietnam, cooperation in the fields of operation, maintenance, overhaul, repair, engineering services, and reverse engineering of power plant components is underway. Technical field advisors for Quang Ninh and Pha Lai are also part of this project. The 100.75 MW MHI-701D Gas Turbine Major Overhaul training course contract with educational institutions is projected to be implemented in May 2024. The next target is Fu Ang Coal & Ash Handling O&M bidding projected in July 2024.

Dengan dukungan kebijakan pemerintah, proyeksi pertumbuhan ekonomi yang positif, dan adopsi Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang sedang berlangsung, PLN IP Services memiliki peluang besar untuk berperan sebagai pionir dalam transisi energi di Indonesia. Proyeksi peningkatan kebutuhan listrik dan pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan memberikan dasar yang kuat bagi perusahaan untuk terus berkembang. PLN IP Services berkomitmen untuk memberikan kontribusi signifikan dalam sektor energi, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. Dengan berbagai proyeksi dan sasaran ini, Perusahaan siap memainkan peran kunci dalam memenuhi kebutuhan energi yang semakin meningkat. Upaya ini sejalan dengan kontribusi perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

PLN IP Services mampu memenuhi seluruh kewajiban, baik keuangan maupun non-keuangan, tanpa hambatan signifikan. Kelangsungan usaha ini didukung oleh opini auditor independen dari KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan dengan AP Firman Sababalat, CPA, yang menyatakan bahwa laporan keuangan Tahun Buku 2023 “wajar dalam semua hal yang material” (Laporan Nomor 00288/2.1457/AU.1/02/1789-1/1/VII/2004).

Asumsi Kelangsungan Usaha

PLN IP Services mengasumsikan kelangsungan usaha berdasarkan kemampuan memenuhi kewajiban keuangan dan non-keuangan tanpa hambatan. Dukungan kuat dari PT Indonesia Power dan opini “wajar dalam semua hal yang material” dari auditor independen atas laporan keuangan 2023 menunjukkan kondisi keuangan yang sehat.

Perusahaan juga memiliki sumber pendapatan yang stabil dan terus berkembang, didukung oleh manajemen yang berpengalaman dan kompeten dalam mengelola operasional. Analisis terhadap kondisi pasar menunjukkan prospek yang positif bagi industri tempat perusahaan beroperasi. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, PLN IP Services yakin bahwa kelangsungan usaha dapat terjaga dengan baik, memastikan stabilitas dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan.

With government policy support, positive economic growth projections, and the ongoing adoption of the National Electricity General Plan (“RUKN”), PLN IP Services has a great opportunity to play a pioneering role in Indonesia’s energy transition. The projected increase in electricity demand and continued infrastructure development provide a solid foundation for the company to continue to grow. PLN IP Services is committed to contributing significantly to the energy sector, both domestically and internationally. With these various projections and goals, the Company is ready to play a key role in meeting the increasing energy needs. This effort is in line with the company’s contribution to environmental sustainability and inclusive economic growth.

BUSINESS CONTINUITY INFORMATION

PLN IP Services is able to fulfill all obligations, both financial and non-financial, without significant hindrance. This continuity is supported by the independent auditor’s opinion from KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, with AP Firman Sababalat, CPA, stating that the 2023 Financial Year report is “fair in all material respects” (Report Number 00288/2.1457/AU.1/02/1789-1/1/VII/2004).

Going Concern Assumptions

PLN IP Services assumes its going concern based on its ability to meet financial and non-financial obligations without hindrance. Strong support from PT Indonesia Power and the “fair in all material respects” opinion from independent auditors on the 2023 financial statements indicate a healthy financial condition.

The company also has stable and growing revenue sources, supported by experienced and competent management. Market analysis shows a positive outlook for the industry in which the company operates. Considering all these factors, PLN IP Services is confident that its going concern is well-maintained, ensuring long-term stability and growth.



MHO SERVICES
PT. COGINDO DATA BERKAMA

05 ◀

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance



Pendahuluan

Introduction

PRINSIP DASAR GOVERNANSI KORPORAT

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan landasan PLN IP Services agar terbentuknya sistem, struktur dan budaya pengelolaan Perusahaan yang bersih dari praktik-praktik yang mungkin merugikan Perusahaan. Prinsip *Good Corporate Governance* diimplementasikan Perusahaan berdasarkan prinsip Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*) dan Kewajaran (*Fairness*). Prinsip yang diterapkan oleh Perusahaan tersebut ditujukan untuk menjamin hak-hak Pemegang Saham, Pemangku Kepentingan serta pemenuhannya.

Penerapan kelima prinsip dasar diharapkan agar dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran organisasi mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh Insan PLN IP Services secara konsisten.

- Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
- Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

CORPORATE GOVERNANCE BASIC PRINCIPLES

The implementation of Good Corporate Governance is the foundation of PLN IP Services to establish a system, structure, and culture of Company management that is free from practices that may harm the Company. The principles of Good Corporate Governance are implemented by the Company based on the principles of Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness. The principles applied by the Company are intended to ensure the rights of Shareholders, Stakeholders, and their fulfillment.

The implementation of the five basic principles is expected to be understood and implemented by all levels of the organization starting from the Board of Commissioners, Board of Directors, and PLN IP Services people consistently.

- Transparency, namely openness in conducting the decision-making process and openness in disclosing material and relevant information about the company;
- Accountability, namely the clarity of functions, implementation and accountability of the Organ so that the management of the company is implemented effectively;
- Responsibility, namely conformity in the management of the company to laws and regulations and sound corporate principles;
- Independency, namely a situation where the company is managed professionally without conflict of interest and influence/pressure from any party that is not following laws and regulations and sound corporate principles;
- Fairness, namely justice and equality in fulfilling the rights of stakeholders arising from agreements and laws and regulations.



► Implementasi Prinsip GCG PT PLN Indonesia Power Services
Implementation of GCG Principles PT PLN Indonesia Power Services

Prinsip GCG GCG Principles	Penjelasan Description	Implementasi Implementation
Transparansi	Prinsip transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan. Perusahaan akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah keterbukaan informasi yang berlaku bagi Perusahaan. Transparansi juga mencakup hal-hal yang relevan dengan informasi yang dibutuhkan oleh publik berkaitan dengan produk dan aktivitas operasional Perusahaan yang secara potensial dapat mempengaruhi perilaku Pemangku Kepentingan.	Melaksanakan aktivitas keterbukaan informasi melalui pemenuhan kewajiban pelaporan kepada Pemegang Saham, dan melalui pelaporan keuangan dan melalui media komunikasi resmi.
Transparency	The principle of transparency is openness in implementing the decision making process and openness in disclosing material and relevant information about the Company. The Company shall comply with laws and regulations governing information disclosure issues applicable to the Company. Transparency also includes matters relevant to the information required by the public in relation to the Company's products and operational activities that potentially influence stakeholder behavior.	Information disclosure activity through responsible reporting compliance to the Shareholders as well as financial reporting and through other official communication media.
Akuntabilitas	Prinsip akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimiliki seseorang atau satuan kerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan Perusahaan. Akuntabilitas ini meliputi penjelasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang, pelaporan atas pelaksanaan tugas dan wewenang, serta pertanggungjawaban atas aktivitas dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut.	Memiliki struktur tata kelola perusahaan yakni organ utama yang saling menunjang terciptanya pelaksanaan tugas yang transparan dan independen. Perusahaan juga telah melengkapi pedoman-pedoman yang berfungsi untuk menjadi panduan penerapan tata kelola perusahaan.
Accountability	The principle of accountability is the clarity of functions, implementation and accountability of the Company's Organs which enable the Company's management effectively implemented. Accountability relates to the execution of duties and authorities owned by a person or work unit in carrying out the responsibilities imposed by the Company. This accountability includes explanations of the performance of duties and authorities, reporting on the execution of duties and authorities, and accountability for activities in performing these duties and authorities.	Having a corporate governance structure which is the main organ to support implementation of transparent and independent practices. The Company also has manuals as corporate governance implementation guidelines.

Prinsip GCG GCG Principles	Penjelasan Description	Implementasi Implementation
<p>Pertanggungjawaban</p> <p>Responsibility</p>	<p>Prinsip pertanggungjawaban yaitu kesesuaian dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.</p> <p>The principle of accountability is the suitability in the management of the Company with the prevailing laws and regulations and the principles of sound corporations.</p>	<p>Menerapkan mekanisme tata kelola perusahaan yang bersifat <i>cross check</i> untuk memastikan responsibilitas dari masing-masing fungsi struktur tata kelola perusahaan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebaik-baiknya tanpa benturan kepentingan dan intervensi.</p> <p>Conducting a corporate governance cross check mechanism is to ensure the responsibilities of each function of the corporate governance structure in their duty and responsibility without conflict of interest and intervention.</p>
<p>Kemandirian</p> <p>Independency</p>	<p>Prinsip kemandirian yaitu keadaan di mana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.</p> <p>The principle of independence is the Company professionally managed without conflict of interest and influence/pressure from any parties which is containing dissension with the prevailing laws, regulations and sound corporate principles.</p>	<p>Perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan ataupun intervensi dan dominasi dari pihak manapun.</p> <p>The Company is managed professionally without conflict of interest and intervention from any party.</p>
<p>Kewajaran</p> <p>Fairness</p>	<p>Prinsip kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>The principle of fairness is justice and equality in fulfilling the rights of stakeholders arising under the applicable laws and regulations.</p>	<p>Perusahaan menerapkan kesetaraan kepada segenap Pemangku Kepentingan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>The Company implements fairness principle to all stakeholders in accordance with prevailing law and regulation.</p>

KOMITMEN DAN DASAR PENERAPAN GOVERNANSI KORPORAT

Sebagai Perusahaan yang telah berkembang pesat dan menyebar hampir di seluruh wilayah kepulauan Indonesia, PLN IP Services meyakini penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) merupakan salah satu Indikator penting bagi Pemegang Saham untuk dapat menilai kinerja Perusahaan dan meyakini bahwa Perusahaan telah dikelola dengan baik dan tepat serta diyakini mampu untuk melindungi kepentingan para Pemegang Saham.

Penerapan ini sangat penting dalam menghadapi persaingan usaha serta iklim bisnis yang semakin kompetitif, guna meningkatkan kepercayaan para stakeholders sesuai dengan visi dan misi Perusahaan.

PLN IP Services berkomitmen secara penuh untuk menjalankan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi kepentingan para pemegang

COMMITMENT AND BASIS OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

As a Company that has grown rapidly and spread across almost all parts of Indonesian archipelago, PLN IP Services believes that the implementation of Good Corporate Governance (GCG) is important indicator for Shareholders to be able to assess the Company's performance and to be convinced that the Company has been managed properly, good, and appropriate as well as believed to be able to protect the interests of Shareholders.

This implementation is very important in facing business competition and an increasingly competitive business climate, in order to increase stakeholders' trust in accordance with the Company's vision and mission.

PLN IP Services is fully committed to conducting and implementing GCG principles as a basis for creating sustainable added value for the benefit of shareholders, society in general, and various other stakeholders

saham, masyarakat secara luas, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya (pegawai, konsumen, regulator, mitra kerja, dan lain-lain) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Dasar Penerapan *Good Corporate Governance*

Dalam menerapkan praktik GCG, Perusahaan mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan, dengan uraian sebagai berikut:

- Anggaran Dasar Perusahaan;
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT);
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 Tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/ MBU/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER 02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/ MBU/06/2020 Tanggal 26 Juni 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/ MBU/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/ MBU/04/2021 Tanggal 13 April 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/ MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-11/MBU/07/2021 Tanggal 30 Juli 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;

(employees, consumers, regulators, business partners, etc.) both in the short and long term.

Basis of Good Corporate Governance Implementation

In implementing GCG practices, the Company refers to several laws and regulations, with the following descriptions:

- Articles of Association of the Company
- Law of Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies;
- Law of the Republic of Indonesia No. 19 Year 2003 on State-Owned Enterprises (SOEs);
- Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-02/MBU/02/2015 Dated February 17, 2015, concerning Requirements and Procedures for the Appointment and Discharge of Members of the Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises as amended by Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-10/ MBU/2020 concerning Amendments to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER 02/MBU/02/2015 concerning Requirements and Procedures for the Appointment and Discharge of Members of the Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises;
- Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-04/ MBU/06/2020 Dated June 26, 2020, concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-03/ MBU/2012 concerning Guidelines for the Appointment of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of Subsidiaries of State-Owned Enterprises;
- Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-06/ MBU/04/2021 Dated April 13, 2021, concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-12/ MBU/2012 concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises;
- Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-11/MBU/07/2021 Dated July 30, 2021, concerning Requirements and Procedures for the Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of State-Owned Enterprises;

- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
- Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-09/MBU/2012 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises as amended by Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 dated March 3, 2023, on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

Komitmen Penerapan *Good Corporate Governance*

Dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik, PLN IP Services mengacu kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Maka dari itu sebagai bentuk penerapan *corporate citizenship*, Perusahaan sangat memperhatikan penerapan GCG secara terintegrasi dan sistematis dengan berbagai langkah konkret antara lain:

- Menyusun Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Lingkungan PT Cogindo DayaBersama melalui Keputusan Direksi Nomor: 082.2.K/CDB/XI/2020.
- Senantiasa mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku .
- Memiliki rumusan visi dan misi yang senantiasa disesuaikan dengan kondisi ekonomi, politik dan sosial.
- Memiliki pedoman kode etik dan mematuhi budaya Akhlak BUMN.
- Menerapkan pedoman/board manual/ tata laksana kerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
- Secara berkala menilai penerapan GCG yang telah dilakukan setiap tahunnya dan melakukan peninjauan ulang untuk melakukan peningkatan di tahun berikutnya.
- Pengesahan Rencana Kerja Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2021 oleh Pembina GCG.
- Melaksanakan surveillance ISO 37001:2016.
- Menerbitkan SK Direksi No. 028.1.1.K/CDB/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Tata Kelola Anti Penyuapan.

Commitment of Implementation *Good Corporate Governance*

In implementing good corporate governance, PLN IP Services refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-09/MBU/2012 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises as amended by the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 dated March 3, 2023, concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

Therefore, as a form of corporate citizenship implementation, the Company pays close attention to the implementation of GCG in an integrated and systematic manner with various concrete steps including:

- Preparation for Guidelines of Good Corporate Governance within PT Cogindo DayaBersama through the Decree of the Board of Directors Number: 082.2.K/CDB/XI/2020.
- Always comply with applicable laws and regulations.
- Formulate vision and mission that is adaptable to economic, political and social conditions.
- Code of ethics guidelines and SOEs morals culture.
- Guidelines/board manuals/work procedures for the Board of Commissioners and the Board of Directors.
- Periodically assess the implementation of GCG that has been carried out every year and conduct a review to make improvements in the following year.
- Ratification of the 2021 Good Corporate Governance (GCG) Implementation Work Plan by GCG Board.
- Obtained ISO 37001:2016 certification.
- Issuance of Decree of the Board of Directors No. 028.1.1.K/CDB/VI/2021 dated June 14, 2021 on Anti-Bribery Governance.

- Penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen COC seluruh Pegawai CDB.
- Menerbitkan SK Direksi No 047.1.K/CDB/VII/2022 tentang Pedoman Laporan LHKPN di Lingkungan PT Cogindo Daya Bersama.

- Signing of COC Integrity Pact and Commitment of all CDB Employees.
- Decree of the Board of Directors No 047.1.K/CDB/VII/2022 on Guidelines for LHKPN Report within PT Cogindo Daya Bersama.

TUJUAN PENERAPAN GCG

PLN IP Services berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Tujuan dari penerapan dan pengembangan GCG berdasarkan peraturan tersebut antara lain:

- Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN.
- Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Perum.
- Mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN
- Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional
- Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

OBJECTIVES OF GCG IMPLEMENTATION

PLN IP Services is committed to implementing GCG principles consistently and continuously as regulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-09/MBU/2012 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises as amended by the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 dated March 3, 2023, concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. The objectives of GCG implementation and development based on these regulations include:

- To optimize SOEs value, hence the Company have strong competitiveness, both nationally and internationally, and be able to maintain existence and sustainability to achieve the aims and objectives of SOEs.
- To encourage the management of SOEs in professional, efficient, and effective manner, as well as functions empowerment and increasing the independence of Persero Organs/Perum Organs.
- To encourage Persero Organs/Perum Organs in making decisions and carrying out actions based on high moral values and compliance with laws and regulations, as well as awareness of SOEs' social responsibility towards Stakeholders and environmental sustainability around SOEs.
- Increase the contribution of SOEs in national economy
- To improve conducive climate for the development of national investment.

GCG Roadmap 2019 - 2024

BUILDING GCG PLATFORM

- Skor GCG: 97,01
- Integrasi GCG dalam SMT 100%
- 90% Pegawai memahami CoC, WBS dan tindak lanjutnya, jenis gratifikasi
- GCG Score: 97,01
- Integration of GCG in SMT 100%
- 90% employees comprehending CoC, WBS and following up, type of gratification.

GCG CULTURE

- Skor GCG: 90
- Sertifikasi ISO 37001
- Penyusunan Bribery Risk Assessment pada setiap bidang
- 90% Pegawai berkomitmen untuk melaksanakan GCG
- GCG Score: 90
- ISO 37001 Certification
- Preparation of Bribery Risk Assessment in each field
- 90% Employees committed to implementing GCG

CORPORATE CITIZENSHIP (2)

- Skor GCG: 91,3
- Kepatuhan: 100%
- SMAP: 3 Unit
- Keputusan BOD/BOC: 100%
- D'GCG: Integrated D'GCG
- External GCG Assessment
- GCG Score: 91,3
- Compliance: 100%
- SMAP: 3 Units
- BOD/BOC Decision: 100%
- D'GCG: Integrated D'GCG
- External GCG Assessment

2019

2021

2022

2024

2020

GCG CULTURE

- Skor GCG: 91
- Kepatuhan (GRC): 100%
- SMAP: 2 Unit
- Keputusan BOD/BOC: 90%
- D'GCG: 1 Fitur
- Training BOD/BOC: 1x
- Training Pengelola: 1x
- GCG Score: 91
- Compliance (GRC): 100%
- SMAP: 2 Units
- BOD/BOC Decision
- D'GCG: 1 Feature
- BOD/BOC Training: 1x
- Manager Training: 1x

2023

STRENGTHEN GCG PLATFORM

- Skor GCG: 89,581
- Review Integrasi GCG dalam SMT
- Penyusunan Mekanisme Laporan
- 86% Pegawai berkomitmen untuk melaksanakan GCG
- Tersedianya Pelaporan Pengaduan Online
- Aplikasi GCG Pro
- GCG Score: 89,581
- Review of GCG Integration in SMT
- Preparation of Reporting Mechanism
- 86% Employees are committed to implementing GCG
- Availability of Online Complaint Reporting
- GCG Pro Application

CORPORATE CITIZENSHIP (1)

- Skor GCG: 91,2
- Kepatuhan: 100%
- SMAP: 2 Unit
- Keputusan BOD/BOC: 100%
- D'GCG: Hp Based
- Training BOD/BOC: 1x
- Integrated Program Corporate dengan ESG
- GCG Score: 91,2
- Compliance: 100%
- SMAP: 2 Units
- BOD/BOC Decision: 100%
- D'GCG: HP Based
- BOD/BOC Training: 1x
- Integrated Corporate Program with ESG

Pada tahun 2023, Perusahaan menindaklanjuti *roadmap* tahun sebelumnya yaitu mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik menjadi budaya dengan beberapa target yaitu :

1. Hasil *Assessment GCG Score* pada angka 91,20
2. Kepatuhan melalui budaya GRC dalam setiap bidang terlaksana 100%
3. Keputusan BOC dan BOD terlaksana dan ditindaklanjuti dengan target terlaksana 90%
4. Terimplementasinya aplikasi D'GCG (Pro – GCG) sebanyak 1 fitur
5. Terlaksananya *Training BOD dan BOC* sebanyak 1 kali.
6. Terlaksananya *Training Pengelola* sebanyak 1 kali.

KERANGKA GOVERNANSI KORPORAT

Kerangka penerapan tata kelola di PLN IP Services secara umum terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome* dimana ketiga hal tersebut mampu menjamin efektivitas dalam penerapan GCG Perusahaan.

Governance structure terdiri dari organ dan infrastruktur tata kelola Perusahaan. Organ tersebut meliputi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, unit dan satuan kerja Perusahaan. Adapun infrastruktur tata kelola terdiri dari kebijakan dan prosedur, tugas dan fungsi masing-masing organ, dan evaluasi tata kelola.

Governance process bersinggungan dengan proses implementasi Tata Kelola yang Baik demi menghasilkan *governance outcome* yang diinginkan.

Governance outcome merupakan gambaran hasil pelaksanaan *governance process* yang dijalankan oleh *governance structure*. *Governance outcome* ditunjukkan melalui berbagai pencapaian Perusahaan atas kinerja perusahaan secara keseluruhan, baik kinerja keuangan, operasional, maupun penghargaan yang diraih.

In 2023 the Company was followed up the previous year's roadmap, namely implementing good corporate governance into a culture with several targets, namely:

1. Result of the GCG Score Assessment at 91,20
2. Compliance through GRC culture in every field was implemented 100%
3. BOD and BOC decisions were implemented and followed up with a target of 90% implementation
4. Implementation of D'GCG (Pro - GCG) application with 1 feature
5. Implementation of BOD and BOC Training 1 time.
6. Implementation of Management Training 1 time

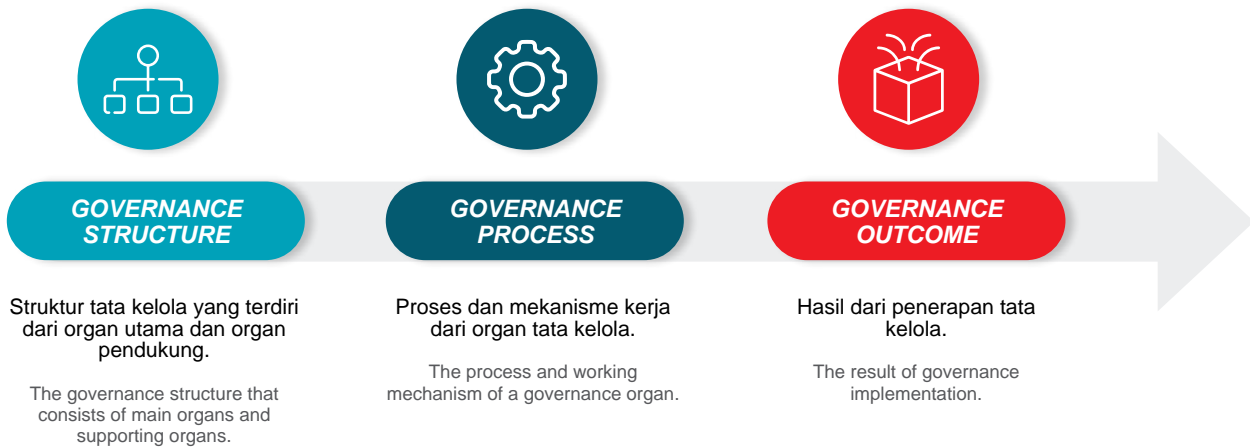
CORPORATE GOVERNANCE FRAMEWORK

The framework for implementing governance at PLN IP Services is generally divided into 3 (three) parts: *Governance Structure*, *Governance Process* and *Governance Outcome* where these three things are able to guarantee effectiveness in implementing the Company's GCG.

Governance structure consists of the Company's governance organs and infrastructure. These organs include the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, units and work units of the Company. The governance infrastructure consists of policies and procedures, duties and functions of each organ, as well as evaluation of governance.

Governance process intersects with the process of Good Governance implementation in order to produce the desired *governance outcome*.

Governance outcome is an overview of the result of the implementation of the governance process by the governance structure. *Governance outcome* is shown through the Company's various achievements on overall company performance, both financial, operational and award-winning performance.



GOVERNANCE STRUCTURE

Struktur tata kelola yang terdiri dari organ utama dan organ pendukung.

The governance structure that consists of main organs and supporting organs.



GOVERNANCE PROCESS

Proses dan mekanisme kerja dari organ tata kelola.

The process and working mechanism of a governance organ.



GOVERNANCE OUTCOME

Hasil dari penerapan tata kelola.

The result of governance implementation.

- Organ Utama
- Organ Pendukung
- Infrastruktur
- Main Organs
- Supporting Organs
- Infrastructure

- Pemenuhan hak Pemegang Saham
- Pemenuhan hak Pemangku Kepentingan
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
- Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan
- Fulfilment of Shareholders' rights
- Fulfilment of Stakeholders' rights
- Implementation of duties and responsibilities
- Transparency of the Company's financial and non-financial conditions

- Memaksimalkan nilai Perusahaan.
- Meningkatkan daya saing Perusahaan.
- Mendorong pengelolaan Perusahaan secara transparan dan efisien.
- Mendorong organ Perusahaan agar menjalankan bisnis dengan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.
- Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antar organ Perusahaan.
- Mendorong kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan.
- Meningkatkan kepercayaan pasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
- Maximize the value of the Company.
- Increase the competitiveness of the Company.
- Encourage the management of the Company transparently and efficiently.
- Encourage the organs of the Company to conduct business based on high moral values and compliance with legislation.
- Control and direct the relationship between the Company's organs.
- Encourage awareness of corporate social responsibility towards Stakeholders.
- Increase market confidence to encourage national economic growth.

STRUKTUR GOVERNANSI KORPORAT

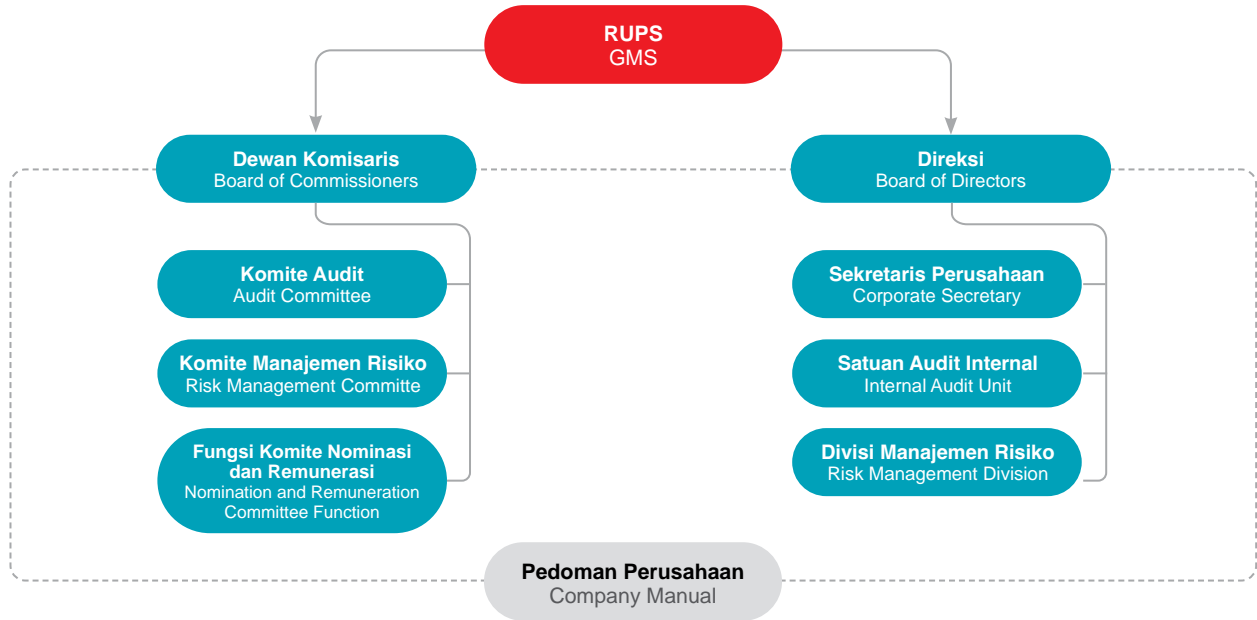
PLN IP Services merupakan perusahaan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan memiliki struktur tata kelola sebagai organ perusahaan yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap organ memiliki peran penting dalam penerapan GCG serta melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing demi kepentingan Perusahaan.

STRUCTURE OF CORPORATE GOVERNANCE

PLN IP Services is a company formed under the Law of Republic of Indonesia Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies (UU PT) and has a governance structure as a corporate organ consisting of General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners and the Board of Directors. In accordance with the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations, each organ has an important role in implementing GCG and carrying out their respective functions, duties and responsibilities for the benefit of the Company.

RUPS merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi bagi Pemegang Saham. Dewan Komisaris melakukan fungsi pengawasan atas jalannya Perusahaan dengan dibantu komite-komite yang dibentuk, dan Direksi melakukan fungsi pengurusan Perusahaan dengan didukung fungsi-fungsi dalam manajemen.

The GMS is the highest decision-making forum for Shareholders. The Board of Commissioners perform supervisory function of the Company with the assistance of established committees, and the Board of Directors perform the management function of the Company supported by management functions.



SOFT STRUCTURE GOVERNANSI KORPORAT

Dalam rangka mendukung implementasi struktur, dan mekanisme (proses) tata kelola perusahaan, PLN IP Services telah memiliki *soft structure* berupa berbagai kebijakan, pedoman atau prosedur pelaksanaan kegiatan operasional yang disusun sejalan dengan visi, misi, dan nilai-nilai Perusahaan dan secara berkala meninjau kembali perangkat pendukung yang telah ada untuk disesuaikan dengan perkembangan usaha dan best practices GCG yang berlaku.

Soft structure GCG yang dimiliki antara lain:

SOFT STRUCTURE OF CORPORATE GOVERNANCE

In order to support the implementation of structure and mechanism (process) of corporate governance, PLN IP Services has soft structure in the form of various policies, guidelines or procedures for operational activities implementation that are prepared in line with vision, mission, and values of the Company and periodically review the existing of supporting tools to be adapted to business developments and applicable GCG best practices.

Soft structure of GCG include:

Jenis Pedoman Type of Guidelines	Keterangan Description
Anggaran Dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akta pendirian No. 25 th 2008 2. Akta pendirian No. 9 th 2022 3. Akta perubahan wewenang direksi No. 8 th 2018 4. Akta penambahan bidang usaha No. 26 th 2020 5. Akta penambahan saham IP ke CDB No. 27 th. 2014 6. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Cogindo DayaBersama No.15 tanggal 12 April 2023
Articles of Association	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deed of establishment No. 25, 2008 2. Establishment Deed No. 9, 2022 3. Deed of change of authority of the board of directors No. 8, 2018 4. Deed of addition of business fields No. 26, 2020 5. Deed of addition of IP shares to CDB No. 27, 2014 6. Deed of Amendment of the Articles of Association of PT Cogindo DayaBersama No.15 dated April 12, 2023

Jenis Pedoman Type of Guidelines	Keterangan Description
Pedoman Penerapan GCG Guidelines of GCG Implementation	Surat Keputusan Direksi Nomor: 082.2.K/CDB/XI/2020 tanggal 25 November 2020 Decree of the Board of Directors Number: 082.2.K/CDB/XI/2020 dated November 25, 2020
Board Manual/Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris Board Manual/Guidelines and Rules of the Board of Commissioners	Surat Keputusan Bersama No. 053.K/CDB/X/2021 dan No. 004.K/DEKOM-CDB/2021 tanggal 22 Oktober 2021 Joint Decree No. 053.K/CDB/X/2021 and 004.K/DEKOM-CDB/2021 dated October 22, 2021
Pedoman Komite Audit Guidelines of Audit Committee	Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No.328.K/CDB/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 Joint Decree of the Board of Commissioners and Board of Directors No.328.K/CDB/XII/2014 dated December 15, 2014
Pedoman Komite Manajemen Risiko Guidelines of Audit Committee	Piagam Komite Manajemen Risiko tanggal 26 Oktober 2023 Risk Management Committee dated October 26, 2023
Piagam Audit Internal Internal Audit Charter	Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No.016.K/CDB/III/2022 dan No. 001.K/DEKOM-CDB/2022 tanggal 14 Maret 2022 Joint Decree of the Board of Commissioners and Board of Directors No.016.K/CDB/III/2022 and No. 001.K/DEKOM-CDB/2022 dated March 14, 2022
Kebijakan Manajemen Risiko Guidelines of Risk Management	Surat Keputusan Direksi Nomor: 162.K/CDB/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Kebijakan Pedoman Umum Manajemen Risiko Terintegrasi PT Cogindo DayaBersama. Joint Decree of the Board of Directors Number: 162.K/CDB/X/2023 dated October 31, 2023, regarding the General Guidelines Policy for Integrated Risk Management of PT Cogindo DayaBersama.
Pedoman Kode Etik/ Budaya Perusahaan Guidelines of Code of Ethics/ Corporate Culture	Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor: 027.K/CDB/VI/2021 dan Nomor: 03.K/DEKOM-CDB/2021 tentang Pedoman Budaya Perusahaan Joint Decrees of the Board of Commissioners and Board of Directors Number: 027.K/ CDB/VI/2021 and Number: 03.K/DEKOM-CDB/2021 on Guidelines for Corporate Culture
Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) Violation Reporting System Guidelines (WBS)	Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris dengan Nomor 079.K/CDB/XII/2019 dan Nomor 004.K/DEKOM-CDB/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran PT Cogindo DayaBersama pada tanggal 9 Desember 2019 yang telah diperbarui dalam Surat Edaran Direksi No. 021/ED/CDB/XI/2021 tanggal 18 November 2021 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Pengaduan Pelanggaran. Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners with Number 079.K/CDB/XII/2019 and Number 004.K/DEKOM-CDB/2019 on Guidelines for Managing PT Cogindo DayaBersama Violation Complaints on December 9, 2019 which has been updated in Circular of the Board of Directors No. . 021/ED/CDB/XI/2021 dated November 18, 2021 on Procedures for Handling Reporting of Violation Complaints
Pedoman Penerimaan, Pemberian Hadiah/Cinderamata & Hiburan (Entertainment) Guidelines for Accepting, Giving Gifts/ Souvenirs & Entertainment	Surat Keputusan Direksi Nomor. 059.K/CDB/IX/2019 tanggal 2 Oktober 2019. Decree of the Board of Directors Number. 059.K/CDB/IX/2019 dated October 2, 2019.
Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan Guidelines for Anti-Bribery Management System	SK Direksi No. 028.1.1.K/CDB/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Tata Kelola Anti Penyuapan. Decree of the Board of Directors No. 028.1.1.K/CDB/VI/2021 dated June 14, 2021 on Anti- Bribery Governance.
Pedoman LHKPN LHKPN Guidelines	No 047.1.K/CDB/VII/2022 tentang Pedoman Laporan LHKPN di Lingkungan PT Cogindo DayaBersama No 047.1.K/CDB/VII/2022 on Guidelines for LHKPN Report within PT Cogindo DayaBersama
Pedoman Pengendalian Gratifikasi Gratification Control Guidelines	No. 059.K/CDB/IX/2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi No. 059.K/CDB/IX/2019 concerning Gratification Control Guidelines

IMPLEMENTASI GCG PLN IP SERVICES

Penerapan GCG Perusahaan dimulai dengan kesadaran (*awareness*) bahwa praktik GCG sangat penting diterapkan guna mengoptimalkan nilai Perusahaan dan meningkatkan kepercayaan *Stakeholders* dan *Shareholders* serta mewujudkan bisnis yang berkelanjutan di masa mendatang. GCG merupakan proses yang berkesinambungan dan berkelanjutan, karena itu dibutuhkan komitmen yang penuh dalam penerapannya. Upaya peningkatan penerapan Tata Kelola Perusahaan terus dikembangkan dengan didukung oleh struktur tata kelola perusahaan yang baik dari segi Organ Perusahaan maupun kebijakan yang sejalan dengan nilai-nilai Perusahaan dengan memperhatikan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, maupun karyawan guna terciptanya Tata Kelola Perusahaan yang berkelanjutan.

Implementasi GCG secara umum diformulasikan dalam bentuk revitalisasi proses bisnis, serta kegiatan lain yang diwujudkan dalam beberapa aktivitas, antara lain:

1. Menata ulang struktur organisasi Perusahaan agar sesuai dengan *best practices* GCG untuk meningkatkan kinerja Perusahaan.
2. Menyusun pedoman dan kebijakan baru
3. Menyempurnakan pedoman dan berbagai kebijakan yang telah ada secara berkala
4. Melakukan *self assessment* dan menindaklanjuti hasil evaluasi maupun rekomendasi yang diberikan
5. Membangun iklim budaya kerja yang etis dan bertanggung jawab seperti menyusun kebijakan gratifikasi dan anti korupsi
6. Melakukan sosialisasi penerapan GCG setiap bulannya.

Penetapan Standar Kualitas GCG

Kualitas GCG Perusahaan senantiasa terus dilakukan dengan menyempurnakan struktur, proses dan mekanisme tata kelola yang berlaku di Perusahaan. Berbagai proses mulai dari rekrutmen, sistem pengendalian internal, pengelolaan risiko, evaluasi kinerja, pengambilan keputusan sampai dengan sistem *reward* dan *punishment* telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip GCG.

GCG IMPLEMENTATION OF PLN IP SERVICES

GCG implementation of the Company's begins with the awareness that GCG practices are very important to conduct in order to optimize the value of the Company and increase the trust of Stakeholders and Shareholders as well as create a sustainable business in the future. GCG is continuous and sustainable process, therefore full commitment is required in its implementation. Efforts to improve the implementation of Corporate Governance continue to be developed supported by a good corporate governance structure in terms of Company Organs and policies that are in line with the Company's values by taking into account the roles and responsibilities of the Board of Commissioners, Board of Directors and employees in order to create sustainable Corporate Governance .

GCG implementation is generally formulated in the form of business process revitalization, as well as other activities that are manifested in several activities, including:

1. Rearranging the Company's organizational structure to comply with GCG best practices to improve the Company's performance
2. Developing new guidelines and policies
3. Improving existing guidelines and policies on a regular basis
4. Conducting self-assessment and follow up on evaluation results and recommendations provided
5. Building an ethical and responsible work culture climate such as compiling gratuity and anti-corruption policies
6. Conducting socialization of GCG implementation every month.

Determination of GCG Quality Standards

The quality of the Company's GCG is continuously carried out by improving the structures, processes and governance mechanisms that apply in the Company. Various processes ranging from recruitment, internal control system, risk management, performance evaluation, decision making to the reward and punishment system have been adapted to GCG principles.

Assessment juga dilaksanakan secara berkala untuk semakin meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG. PLN IP Services juga senantiasa melakukan perbaikan dan berusaha untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil dari *self assessment* yang dilakukan secara independen.

Sosialisasi GCG

PLN IP Services senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan nilai perusahaan, kinerja keuangan dan kepercayaan publik serta para pemangku kepentingan. Kegiatan sosialisasi GCG merupakan salah satu dari upaya tersebut untuk memberikan pemahaman kepada karyawan tentang penerapan tata kelola Perusahaan yang baik serta sejauh mana implementasi GCG di PLN IP Services telah dilaksanakan. Berbagai informasi dan kebijakan terkait GCG yang dimiliki oleh Perusahaan antara lain; Pedoman GCG, *Board Manual*, *Code of Conduct*, Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System - WBS*) dan Pedoman Penerimaan, Pemberian Hadiah/Cinderamata & Hiburan (*Entertainment*), dan Pedoman Pengendalian Gratifikasi seluruhnya diinformasikan melalui *website*, *email* korporat, media sosial dan *whatsapp group*. Bahkan Perusahaan juga membuat *standing banner* yang dapat ditemui di beberapa tempat di dalam kantor dan tempat kerja.

PLN IP Services secara khusus memberikan *quiz* GCG yang dilakukan berkala setiap bulannya sebagai salah satu bentuk internalisasi GCG kepada Pegawai Perusahaan. Hal ini bertujuan agar seluruh karyawan memahami dan menerapkan lima prinsip GCG dalam kegiatan sehari-hari, terlebih dalam pengambilan keputusan harus didasarkan pada nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bentuk sosialisasi lainnya yang dilakukan oleh Perusahaan adalah melakukan *survey* baik kepada karyawan maupun mitra bisnis antara lain:

1. Survey Pemahaman GCG kepada seluruh Pegawai
2. Survey Persepsi Dewan Komisaris dan Direksi
3. Survey Perilaku Etis Pelanggan
4. Survey Perilaku Etis Vendor

Assessment also carried out periodically to further improve the quality of GCG implementation. PLN IP Services also always makes improvements and to follow up on recommendations from the results of self-assessment that was carried out independently.

GCG Socialization

PLN IP Services is always committed to increasing corporate value, financial performance and trust of the public and stakeholders. GCG socialisation activity is one of efforts to provide employees with an understanding of the implementation of good corporate governance and the extent to which GCG implementation has been carried out at PLN IP Services. Various information and policies related to GCG owned by the Company, among others; GCG Guidelines, Board Manual, Code of Conduct, Guidelines for Complaint Management of Violation (Whistleblowing System - WBS) and Guidelines for Acceptance, Giving Gift/Souvenir & Entertainment, and Gratification Control Guideline all of which informed through website, corporate email, social media and WhatsApp group. The Company even made standing banners that can be found in several places in the office and workplace.

PLN IP Services specifically provides a GCG quiz which is conducted periodically every month as a form of GCG internalisation for employees. It is intended that all employees understand and apply the five principles of GCG in their daily activities, especially when making decisions based on high moral values and compliance with applicable laws and regulations.

Other form of socialisation is conducting survey for both employees and business partners, including:

1. GCG Understanding Survey for all employees
2. Perception Survey of the Board of Commissioners and Board of Directors
3. Customer Ethical Behaviour Survey
4. Vendor Ethical Behaviour Survey



Sepanjang tahun 2023, PLN IP Services telah melakukan sosialisasi GCG melalui :

1. Quiz GCG yang dilaksanakan setiap bulan kepada seluruh tingkatan karyawan.
2. Sosialisasi GCG, Gratifikasi dan *Whistleblowing System* melalui grup Whatsapp Group, instagram dan *broadcast* email korporat yang dilakukan 3 (tiga) kali dalam setiap bulan.
3. Sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang dilakukan melalui *e-Learning College*.
4. Sosialisasi secara tatap muka melalui *coffee morning* atau *workshop*.

Pada setiap akhir tahun, Perusahaan melalui tim terkait melaksanakan survei dan evaluasi atas efektivitas penerapan sosialisasi GCG. Hal tersebut dilakukan Perusahaan bertujuan untuk:

1. Mengetahui seberapa efektif sosialisasi yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 terkait pemahaman SMAP, *Fraud*, *Conflict of Interest*, WBS, dan *Code of Conduct* melalui program SMART TUESDAY.
2. Sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan *awareness* SMAP kepada seluruh pegawai.
3. Untuk mengetahui tingkat pemahaman pegawai tentang implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang telah dilaksanakan di tahun 2023.
4. Mendukung kinerja penerapan implementasi SMAP.

Throughout 2023, PLN IP Services has conducted GCG socialization through :

1. GCG Quiz is conducted every month for all levels of employees.
2. Socialization of GCG, Gratification, and Whistleblowing System through Whatsapp Group, Instagram, and corporate email broadcasts conducted 3 (three) times a month.
3. Socialization of Anti-Bribery Management System conducted through e-Learning College.
4. Face to face socialization by coffee morning or workshop.

At the end of each year, the Company through the relevant team conducts a survey and evaluation of the effectiveness of the implementation of GCG socialization. This is done by the Company with the aim of:

1. Know how effective the socialization implemented during 2023 related to the understanding of SMAP, *Fraud*, *Conflict of Interest*, WBS, and *Code of Conduct* through the SMART TUESDAY program.
2. As an evaluation material in increasing SMAP awareness to all employees.
3. To determine the level of employee understanding of the implementation of the Anti-Bribery Management System ("SMAP") implemented in 2023.
4. To support the performance of SMAP implementation.

Penilaian Penerapan Governansi Korporat

Assessment of The Implementation of Corporate Governance

Penerapan GCG di lingkungan PLN IP Services mengalami perkembangan yang sangat berarti setiap tahunnya. Struktur, organ dan mekanisme tata kelola yang diterapkan Perusahaan telah sesuai dengan berbagai standar dan *best practices* penerapan tata kelola baik yang berlaku di Indonesia maupun di dunia internasional.

Di tahun 2023, PLN IP Services juga masih terus berupaya untuk menyempurnakan penerapan tata kelola dan melakukan penilaian terhadap penerapan GCG secara berkala. Langkah ini dilakukan agar Perusahaan dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas terkait kelebihan dan kekurangan dalam penerapan GCG di lingkungan Perusahaan.

PELAKSANAAN PENILAIAN GCG

Sebagai tindak lanjut dari awareness dan untuk mengukur kualitas penerapan *Good Corporate Governance*, maka PLN IP Services melaksanakan asesmen setiap tahun baik yang dilakukan oleh Asesor Independen maupun secara *self-assessment*. Pada akhir tahun 2023, Perusahaan melakukan *self assessment* GCG yang dilakukan oleh Tim *Self Assessment* Internal yang telah ditunjuk oleh Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 1519.DIRUT/000/IV/2024 tanggal 1 April 2024 untuk periode penilaian dari 1 Januari – 31 Desember 2023.

Proses *Self-Assessment* tersebut masih mengacu pada parameter-parameter yang diatur dalam Surat Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor 16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*). Sebagai anak perusahaan BUMN, Perusahaan mengacu dan patuh terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Sebagaimana diketahui ketentuan Surat Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor 16/S.MBU/2012 telah diubah oleh Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal

GCG implementation within PLN IP Services has experienced significant development every year. The structure, organs and governance mechanism implemented by the Company comply with various standards and best practices for good governance implementation in Indonesia and abroad.

In 2023, PLN IP Services also continued to strive to improve its governance implementation and conducted regular GCG assessment. This step was taken so that the Company can obtain a clearer picture regarding the advantages and disadvantages of GCG implementation within the Company.

IMPLEMENTATION OF GCG ASSESSMENT

As a follow-up to the awareness and to measure the quality of the implementation of Good Corporate Governance, PLN IP Services conducts an assessment annually either conducted by an Independent Assessor or by self-assessment. At the end of 2023, the Company conducted a GCG self-assessment conducted by the Internal Self Assessment Team appointed by the Company based on the Board of Directors Decree No. 1519.DIRUT/000/IV/2024 dated April 1, 2024, for the assessment period from January 1 - December 31, 2023.

The Self-Assessment process still refers to the parameters stipulated in the Decree of the Secretary of the Minister of SOEs Number 16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance. As a subsidiary of SOE, the Company refers and complies with the regulations issued by the Ministry of State-Owned Enterprises. As known, the provisions of the Decree of the Secretary of the Minister of SOEs Number 16/S.MBU/2012 has been amended by the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 dated March 3, 2023, concerning

3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dimana ketentuan tersebut belum menyertakan parameter penilaian. Pada saat *self-assessment*, Perusahaan masih menggunakan parameter peraturan yang lama, diantaranya adalah:

Parameter tersebut mencakup 6 (enam) aspek *governance* yaitu:

- Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan
- Pemegang Saham dan RUPS
- Dewan Komisaris
- Direksi
- Pengungkapan Informasi dan Transparansi
- Aspek Lainnya.

HASIL PENILAIAN PENERAPAN GCG

Perusahaan melakukan penilaian terhadap penerapan tata kelola untuk mengetahui kualitas dan kesesuaiannya. Penilaian proses tata kelola bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan tata kelola yang baik dan didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur yang dimiliki sehingga menghasilkan hasil (*outcome*) yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan.

Hasil penilaian nantinya akan menjadi bahan refleksi untuk melakukan perbaikan praktik GCG di masa mendatang. Perbaikan ini dapat dilakukan dalam Perusahaan dan pemutakhiran struktural maupun kebijakan yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kinerja operasional maupun keuangan yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, etika bisnis, dan praktik bisnis terbaik.

Asesmen yang dilakukan pada tahun 2023 menghasilkan saran dan rekomendasi yang dipenuhi dalam upaya melakukan evaluasi dan memaksimalkan praktik terbaik GCG di PLN IP Services. Hasil implementasi GCG PLN IP Services secara keseluruhan akan dipublikasikan melalui website Perusahaan, Laporan Tahunan serta rilis media yang dapat diakses oleh seluruh *Stakeholders*.

Proses penilaian penerapan GCG mencakup evaluasi atas pengembangan penerapan GCG yang telah dilakukan selama 2023 dengan melihat *Area of Improvement (Aoi)* atas hasil *self-assessment* GCG di tahun sebelumnya.

Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, which provisions do not include assessment parameters. At the time of self-assessment, the Company still used the parameters of the old regulation, including:

These parameters include 6 (six) governance aspects, namely:

- Commitment to the Implementation of Sustainable Good Corporate Governance
- Shareholders and GMS
- Board of Commissioners
- Board of Directors
- Information Disclosure and Transparency
- Other Aspects.

ASSESSMENT RESULT OF GCG

Implementation The Company evaluates the implementation of corporate governance to determine its quality and suitability. Appraisal of governance process aims to assess the effectiveness of good corporate governance process and is supported by adequacy of structure and infrastructure so as to produce result (*outcome*) that is in accordance with expectations of Stakeholders.

Assessment results will later become material for reflection to improve GCG practices in the future. These improvements can be made within the Company and structural as well as policy updates are expected to have a positive impact on operational and financial performance in line with applicable laws and regulations, business ethics and best business practices.

Assessment in 2023 resulted in suggestions and recommendations that were fulfilled in an effort to evaluate and maximise GCG best practices at PLN IP Services. Results of PLN IP Services's GCG implementation as a whole will be published on the Company's website, Annual Report and media release that can be accessed by all Stakeholders.

The GCG assessment process includes an evaluation of development of GCG implementation that has been carried out in 2023 by looking at the Area of Improvement (Aoi) on the results of GCG self-assessment in previous year.

Pelaksanaan *self-assessment* GCG Tahun 2023 telah diverifikasi dengan perolehan nilai sebesar 91,90 atau 91,90% dari total nilai maksimal yaitu sebesar 100,00 atau 100%. Nilai yang diperoleh menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0,19 poin bila dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya yaitu 91,71.

Secara keseluruhan hasil *self-assessment* implementasi GCG PT PLN Indonesia Power Services periode Tahun 2023 mendapatkan predikat “Sangat Baik”, dengan rincian sebagai berikut:

The implementation of the 2022 GCG self-assessment has been verified with a score of 91.71. of the total maximum score of 100.00 which is equivalent to 91.71%. The value obtained shows an increase of 0.64 points when compared to the previous year of 91.07.

Overall, the result of PT PLN Indonesia Power Services’s self-assessment of GCG for the 2023 period received “Very Good” rating, with following details:

Aspek Pengujian / Indikator Parameter Test Aspect/Parameter Indicator	Bobot Weight	Capaian Tahun 2023 Achievement 2023		Penjelasan Description
		Skor Score	Capaian % Achievement %	
I Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	7,00	6,89	98,37	Sangat Baik Very Good
II Pemegang Saham dan RUPS/ Pemilik Modal Shareholders and GMS/ Capital Owner	9,00	8,70	96,64	Sangat Baik Very Good
III Dewan Komisaris Board of Commissioners	35,00	33,38	95,37	Sangat Baik Very Good
IV Direksi Board of Directors	35,00	33,15	94,72	Sangat Baik Very Good
V Pengungkapan Informasi dan Transparansi Disclosure of Information and Transparency	9,00	6,66	74,05	Cukup Baik Good Enough
VI Aspek Lainnya Another Aspect	5,00	3,13	62,50	Cukup Baik Good Enough
Skor Keseluruhan Total Score	100,00	91,90	91,90	Sangat Baik Very Good

Rekomendasi dan Saran *Self Assessment* GCG PT PLN Indonesia Power Services Tahun 2023

Dari hasil self assessment yang dilakukan oleh Tim Asesmen GCG PT PLN Indonesia Power Services tahun 2023 didapatkan beberapa *Areas of Improvement* (AoI) yang dapat menjadi perhatian Perusahaan sebagai bahan untuk meningkatkan setiap masing-masing aspek dari hasil *assessment* implementasi GCG PT PLN Indonesia Power Services. *Area of Improvement* yang didapatkan adalah sebagai berikut:

Recommendations and Suggestions of GCG Self Assessment of PT PLN Indonesia Power Services for the Year of 2023

From the results of the self-assessment conducted by the GCG Assessment Team of PT PLN Indonesia Power Services in 2023, several Areas of Improvement (AoI) obtained which can be the Company’s attention as material to improve each aspect of the results of the assessment of PT PLN Indonesia Power Services’s GCG implementation. The Areas of Improvement obtained are as follows:

No.	Aspek Penilaian Assessment Aspect	Area of Improvement
I	<p>Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan</p> <p>Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance</p>	<p>Perusahaan memiliki Pedoman Perilaku yang dimutakhirkan di tahun 2021 dan merupakan turunan <i>Core Values</i> AKHLAK yang kurang sesuai dengan pemenuhan parameter <i>Assessment</i> GCG. Perusahaan perlu untuk memisahkan antara nilai-nilai Perusahaan AKHLAK dengan Pedoman Perilaku sesuai dengan Pedoman <i>Assessment</i> GCG.</p> <p>The Company has a Code of Conduct that was updated in 2021 and is a derivative of the AKHLAK Core Values which is not in line with the fulfillment of the GCG Assessment parameters. The Company needs to separate the AKHLAK Company values from the Code of Conduct in accordance with the GCG Assessment Guidelines.</p>
II	<p>Pemegang Saham dan RUPS/ Pemilik Modal</p> <p>Shareholders and GMS/ Capital Owner</p>	<ol style="list-style-type: none"> Mengatur dan menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris yang boleh dipegang oleh seorang Dewan Komisaris. Belum ada sistem/pedoman penilaian kinerja Direksi yang memuat sekurang-kurangnya Indikator Kinerja Utama dan Kriteria Keberhasilan untuk penilaian Direksi secara individu. Belum ada Kontrak Manajemen yang disahkan/ditetujui oleh Pemegang Saham/RUPS/ Pemilik Modal untuk Kontrak Manajemen memuat target kinerja individu. <ol style="list-style-type: none"> Regulate and determine the maximum number of Board of Commissioners positions that may be held by a Board of Commissioners. There is no performance assessment system/guidelines for the Board of Directors that contains at least Key Performance Indicators and Success Criteria for individual assessment of the Board of Directors. There is no Management Contract authorized/approved by Shareholders/GMS/Capital Owners for Management Contracts including individual performance targets.
III	<p>Dewan Komisaris/Dewan Pengawas</p> <p>Board of Commissioners/ Supervisory Board</p>	<ol style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat kepada kebijakan dan pelaksanaan sistem teknologi informasi. Belum adanya telaah dari Dewan Komisaris terkait kebijakan pengadaan barang dan jasa beserta pelaksanaannya. Belum ada uraian hasil penilaian kinerja Direksi secara individu dalam laporan pengawasan Dewan Komisaris ke Pemegang Saham secara berkala maupun tahunan. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas belum menyampaikan Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas belum disetujui oleh RUPS setiap tahun. Adanya pembahasan/evaluasi atas hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris berikut dengan Komite dibawah Dewan Komisaris dan pembahasan dilakukan dalam media rapat dan didokumentasikan dalam risalah rapat. Ketua Komite dibawah Dewan Komisaris/Dewan Pengawas merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. <ol style="list-style-type: none"> The Board of Commissioners/Supervisory Board supervises and advises on the policy and implementation of the information technology system. There is no review from the Board of Commissioners regarding the procurement of goods and services policy and its implementation. There is no description of the results of the individual performance assessment of the Board of Directors in the Board of Commissioners' supervisory report to the Shareholders on a regular or annual basis. The Board of Commissioners/Supervisory Board has not submitted the Performance Achievement Indicators of the Board of Commissioners/Supervisory Board. The Performance Achievement Indicators of the Board of Commissioners/Supervisory Board have not been approved by the GMS every year. There is a discussion/evaluation of the results of the performance assessment of the Board of Commissioners along with the Committee under the Board of Commissioners and the discussion is conducted in the meeting media and documented in the minutes of the meeting. The Chairman of the Committee under the Board of Commissioners/Supervisory Board is a member of the Board of Commissioners/Supervisory Board.

No.	Aspek Penilaian Assessment Aspect	Area of Improvement
IV	Direksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP proses bisnis inti belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten dan masih terdapat penyimpangan sebagaimana dimuat dalam Laporan Hasil Audit. 2. Pengadaan menggunakan <i>e-Proc</i> melaksanakan program kemitraan dengan usaha kecil. 3. Menerbitkan <i>Internal Control Report</i> mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. Suatu pernyataan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan memelihara suatu struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan keuangan yang memadai. b. Suatu penilaian atas efektivitas struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan keuangan pada akhir tahun buku Perusahaan. 4. Ada kebijakan tentang pembinaan usaha kecil. 5. Ada indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pengelolaan PKBL atau CSR atau TJSL. 6. Pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan dapat direalisasikan pelaksanaannya. 7. Perusahaan memiliki rencana kerja untuk melaksanakan program kemitraan dengan usaha kecil. 8. Tersedia anggaran mengenai rencana kerja untuk melaksanakan program kemitraan dengan usaha kecil. 9. Adanya pelaksanaan kegiatan kemitraan sesuai dengan rencana yang ditetapkan realisasi pelaksanaannya. 10. Tidak ada tambahan tunggakan pengembalian dana kemitraan yang dipinjamkan kepada usaha kecil. 11. Ada indikator keberhasilan pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan. 12. Ada evaluasi atas pencapaian indikator keberhasilan dengan target-targetnya. 13. SPI/Fungsi Audit Internal dianjurkan untuk melakukan penilaian atas program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal secara keseluruhan. 14. Tingkat objektivitas dan transparansi yang memadai dalam penempatan karyawan pada setiap level jabatan. 15. Laporan kinerja teknologi informasi (termasuk hasil audit TI) dapat disampaikan kepada Dewan Komisaris. 16. Kebijakan remunerasi disempurnakan secara berkala dan disosialisasikan serta dipahami oleh seluruh karyawan. 17. Perusahaan mendefinisikan masalah keluhan pelanggan secara tertulis serta mengimplementasikan tindakan untuk mengatasi penyebab masalah dari keluhan pelanggan. 18. Adanya laporan proses pelaksanaan Tindak Lanjut hasil CSI (<i>Customer Satisfaction Index</i>) dan dilaporkan kepada Direksi.
	Board of Directors	<ol style="list-style-type: none"> 1. Core business process SOPs have not been fully implemented consistently and there are still irregularities as stated in the Audit Report. 2. Procurement using <i>e-Proc</i> implementing partnership programs with small businesses. 3. Issuing Internal Control Report includes: <ol style="list-style-type: none"> a. A statement that management is responsible for establishing and maintaining an adequate internal control structure and financial reporting procedures. b. An assessment of the effectiveness of the internal control structure and financial reporting procedures at the end of the Company's financial year. 4. There is a policy on small business development. 5. There are performance indicators to measure the success of PKBL or CSR or TJSL management. 6. The implementation of social responsibility activities is according to the established plan and can be realized. 7. The company has a work plan to implement partnership programs with small businesses. 8. There is a budget for the work plan to implement partnership programs with small businesses. 9. Implementation of partnership activities is according to the plan and can be realized. 10. There are no additional arrears of repayment of partnership funds loaned to small businesses. 11. There are indicators of successful implementation of corporate social responsibility. 12. There is an evaluation of the achievement of success indicators against targets. 13. SPI / Internal Audit function is encouraged to assess the quality assurance program and the overall improvement of the Internal Audit Function. 14. Adequate level of objectivity and transparency in the placement of employees at each position level. 15. Information technology performance reports (including IT audit results) may be submitted to the Board of Commissioners. 16. Remuneration policies are regularly refined and socialized and understood by all employees. 17. The company defines customer complaint issues in writing and implements actions to address the causes of customer complaints. 18. There is a report on the process of implementing the follow-up of CSI (<i>Customer Satisfaction Index</i>) results and reported to the Board of Directors.

No.	Aspek Penilaian Assessment Aspect	Area of Improvement
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Disclosure of Information and Transparency	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi masih tergabung dalam Komite Risiko. 2. Perusahaan menang dalam <i>Annual Report Award</i> (ARA) 3. Perusahaan berpartisipasi dalam <i>CSR Award</i> dan berupaya mendapatkan penghargaan dalam ajang tersebut. <ol style="list-style-type: none"> 1. The Nomination and Remuneration Committee function is still incorporated in the Risk Committee. 2. Company wins Annual Report Award (ARA) 3. The Company participated in the CSR Award and sought to be recognized in the event.
VI	Aspek Lainnya Another Aspect	<p>Pengurus Perusahaan menjadi pembicara di acara-acara seminar atau <i>workshop</i> yang mengatasnamakan Perusahaan.</p> <p>The Company's management becomes a speaker at seminars or workshops on behalf of the Company.</p>

Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun Sebelumnya

Perusahaan juga telah melakukan *monitoring* atas tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian penerapan GCG tahun sebelumnya sebagai berikut:

Follow-up on Previous Year's Recommendation

The company has also monitored the follow-up on recommendations from previous year's GCG assessment results as follows:

No.	Kriteria Criteria	Rekomendasi Tahun 2022 Recommendations in 2022	Tindak Lanjut oleh Manajemen Followed Up by Management
1	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan. Commitment to the Implementation of Sustainable Good Corporate Governance	Perusahaan memiliki Pedoman Perilaku yang dimutakhirkan di tahun 2021 dan merupakan turunan AKHLAK yang kurang sesuai dengan Pemenuhan parameter <i>Assessment</i> GCG. Perusahaan perlu untuk memisahkan antara nilai – nilai perusahaan AKHLAK dengan Pedoman Perilaku sesuai dengan Pedoman <i>Assessment</i> GCG. The Company has a Code of Conduct which was updated in 2021 and is derivative of AKHLAK which is not in line with Fulfilment of GCG Assessment parameters. The Company needs to separate AKHLAK's corporate values from the Code of Conduct in accordance with the GCG Assessment Guidelines.	Tindak Lanjut sedang dalam proses review Pedoman Perilaku yang dipisahkan dengan Peraturan Direksi terkait Budaya Follow-up is in the process of reviewing the Code of Conduct that is separated from the Board of Directors Regulation related to Culture
2	Pemegang Saham dan RUPS/ Pemilik Modal Shareholders and GMS/ Capital Owner	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatur dan menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris yang boleh di pegang oleh seorang Dewan Komisaris. 2. Perusahaan menyiapkan pedoman penyusunan RJPP yang disahkan Pemilik/RUPS/Pemilik Modal <ol style="list-style-type: none"> 1. Regulate and determine the maximum number of positions for the Board of Commissioners that may be held by a Commissioner. 2. The Company prepares guidelines for RJPP which are approved by the Owner/GMS/Capital Owner. 	Sudah disampaikan hasil improvementnya kepada Pemegang Saham dan sedang dalam proses tindak lanjut Improvement results delivered to Shareholders and are in the process of being followed up.

No.	Kriteria Criteria	Rekomendasi Tahun 2022 Recommendations in 2022	Tindak Lanjut oleh Manajemen Followed Up by Management
3	<p>Dewan Komisaris/Dewan Pengawas</p> <p>Board of Commissioners/ Supervisory Board</p>	<ol style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan sistem teknologi informasi. Ada laporan pengangkatan Ketua maupun anggota Komite kepada RUPS/Pemilik, ditemukan pada <i>assessment</i> 2022 pengangkatan ketua komite risiko belum dilaporkan kepada RUPS/Pemilik. Menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi secara kolegal dan individu kepada RUPS/Pemilik Modal dalam laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara semesteran dan tahunan Mengirimkan surat dan memonitoring penyampaian KPI Dewan Komisaris terhadap pemegang saham. Ketua Komite Pengawas adalah bagian dari Dewan Komite Piagam Manajemen Risiko perlu untuk dilakukan peninjauan dan dimutakhirkan secara berkala. <ol style="list-style-type: none"> The Board of Commissioners/Supervisory Board supervises and provides advice on policies and implementation of information technology systems. There is a report on the appointment of the Chairman and members of the Committee to the GMS/Owner. It was found in the 2022 assessment that the appointment of the chairman of the risk committee had not been reported to the GMS/Owner. Delivering results of performance assessment of the Board of Directors collegially and individually to the GMS/Capital Owners in the semiannual and annual report on the supervisory duties of the Board of Commissioners/Supervisory Board Send letters and monitor the delivery of the Board of Commissioners' KPIs to shareholders. Chairman of the Supervisory Committee is part of the Committee Board The Risk Management Charter needs to be reviewed and updated periodically 	<ol style="list-style-type: none"> Sudah dimasukkan dalam RKA 2024 Disampaikan kepada Pemegang Saham Menjadi perbaikan di tahun 2024 dan sudah ditindaklanjuti Menjadi perbaikan di tahun 2024 dan sudah ditindaklanjuti Menjadi perbaikan di tahun 2024 dan sudah ditindaklanjuti Menjadi perbaikan di tahun 2024 dan sudah ditindaklanjuti <ol style="list-style-type: none"> Already included in RKA 2024 Delivered to Shareholders Improvement in 2024 and has been followed up Improvement in 2024 and has been acted upon Improvement in 2024 and has been followed up Improvement in 2024 and has been followed up
4	<p>Direksi</p> <p>Board of Directors</p>	<ol style="list-style-type: none"> SOP proses bisnis inti belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten dan masih terdapat penyimpangan sebagaimana dimuat dalam Laporan Hasil Audit. Melakukan pemenuhan jabatan yang kosong pada setiap level jabatan dalam organisasi perusahaan. Perusahaan menerapkan TI sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengadaan menggunakan <i>E-Proc</i> (Aplikasi pengadaan). <ol style="list-style-type: none"> SOP for core business processes has not been fully implemented consistently and there are still deviations as contained in the Audit Report. Fulfilling vacant positions at each position level within the company organization. The Company implements IT according to the company's needs. Procurement using E-Proc (procurement application). 	<p>Point 1 - 12 Menjadi perbaikan dan ditindaklanjuti di tahun 2024</p> <p>Point 1 - 12 Improvement and follow up in 2024</p>

No.	Kriteria Criteria	Rekomendasi Tahun 2022 Recommendations in 2022	Tindak Lanjut oleh Manajemen Followed Up by Management
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Menerbitkan <i>Internal Control Report</i> mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. Suatu pernyataan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan memelihara suatu struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan keuangan yang memadai. b. Suatu penilaian atas efektivitas struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan keuangan pada akhir tahun buku perusahaan. 6. Melengkapi kebijakan CSR tentang pembinaan usaha kecil menjadi aspek yang disinergikan dengan PT Indonesia Power. 7. Melaksanakan program kemitraan dengan usaha kecil. 8. Memiliki ukuran-ukuran atau indikator kinerja kunci yang berkaitan dengan CSR. 9. Menetapkan indikator keberhasilan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. 10. Staf Auditor Internal memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan dengan mendapatkan sertifikasi profesi yang tepat dengan jenjang jabatan dalam Fungsi Auditor Internal 11. Kepala SPI/Fungsi Audit Internal melaksanakan program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal, yang mencakup seluruh aspek dari aktivitas fungsi pengawasan intern. 12. SPI/Fungsi Audit Internal dianjurkan untuk melakukan penilaian atas program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal secara keseluruhan. 	
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Publish Internal Control Report including: <ol style="list-style-type: none"> a. Statement that management is responsible for establishing and maintaining an adequate internal control structure and financial reporting procedure. b. An assessment of the effectiveness of the internal control structure and financial reporting procedures at the end of the company's financial year. 6. Complementing the CSR policy regarding small business development is an aspect that is synergized with PT Indonesia Power. 7. Implement partnership programs with small businesses. 8. Have key performance measures or indicators related to CSR. 9. Establish indicators of successful implementation of corporate social responsibility. 10. Internal Auditor staff have the necessary knowledge and expertise to obtain the appropriate professional certification with a position level in the Internal Auditor Function 11. The Head of SPI/Internal Audit Function implements a quality assurance program and internal audit function improvement, which covers all aspects of the internal control function activities. 12. It is recommended that SPI/Internal Audit Function evaluate the quality assurance program and improve the Internal Audit Function as a whole 	
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan menang dalam <i>Annual Report Award</i> (ARA) 2. Perusahaan berpartisipasi dalam <i>CSR Award</i> dan berupaya mendapatkan penghargaan dalam ajang tersebut. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi perbaikan di tahun 2024 dan mengikuti ARA di tahun 2024 2. Menjadi perbaikan dan ditindaklanjuti di 2024
	Disclosure of Information and Transparency	<ol style="list-style-type: none"> 1. The Company won the Annual Report Award (ARA) 2. The Company participates in the CSR Award and strives to get an award in the event. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Improvement in 2024 and follow up with ARA in 2024 2. Improvement and followed up in 2024
6	Aspek Lainnya	Pengurus Perusahaan menjadi pembicara di acara-acara seminar atau <i>workshop</i> yang mengatasnamakan perusahaan.	Menjadi perbaikan dan akan ditindaklanjuti di tahun 2024
	Another Aspect	The Company's Management become speaker at seminars or workshops on behalf of the company.	Improvement and will be followed up in 2024

Highlight Aktivitas Penerapan Governansi Korporat Tahun 2023

Pada Tahun 2023 PLN IP Services mendapatkan arahan dari PT Indonesia Power untuk menerapkan 13 Program Kepatuhan Terintegrasi PLN Group diantaranya 13 program tersebut adalah :

1. Komitmen dan *Role Model*
2. Kedalam dan keluasan implementasi SMAP
3. Infrastruktur pendukung implementasi SMAP
4. *Awareness*, Pendidikan dan Pelatihan
5. Kecukupan Peraturan SMAP
6. *Fraud Risk Assessment*, Pengendalian Keuangan dan Non Keuangan
7. Uji Kelayakan dan Pengendalian Anti Penyuapan
8. Pengendalian Gratifikasi
9. Sistem Pengelolaan *Whistle Blowing System* (WBS)
10. Pengelolaan LHKPN
11. Pemantauan, pengukuran analisa dan Evaluasi Kinerja Anti Penyuapan (*Performance Evaluation*)
12. Standarisasi Kajian Kepatuhan dalam Rangka implementasi GRC pada Pengambilan Keputusan Direksi
13. Isu Kepatuhan terhadap regulasi

Adapun untuk tahun 2023, PLN IP Services melakukan pemetaan / *mapping* yang sudah dilakukan di Perusahaan dan PLN IP memberikan masukan serta arahan secara bertahap dalam pengimplementasian 13 Program Kepatuhan terintegrasi dapat berjalan di tahun 2024.

Highlight Aktivitas Penerapan Governansi Korporat Tahun 2023

Pada Tahun 2023 PLN IP Services mendapatkan arahan dari PT Indonesia Power untuk menerapkan 13 Program Kepatuhan Terintegrasi PLN Group diantaranya 13 program tersebut adalah :

1. Komitmen dan *Role Model*
2. Kedalam dan keluasan implementasi SMAP
3. Infrastruktur pendukung implementasi SMAP
4. *Awareness*, Pendidikan dan Pelatihan
5. Kecukupan Peraturan SMAP
6. *Fraud Risk Assessment*, Pengendalian Keuangan dan Non Keuangan
7. Uji Kelayakan dan Pengendalian Anti Penyuapan
8. Pengendalian Gratifikasi
9. Sistem Pengelolaan *Whistle Blowing System* (WBS)
10. Pengelolaan LHKPN
11. Pemantauan, pengukuran analisa dan Evaluasi Kinerja Anti Penyuapan (*Performance Evaluation*)
12. Standarisasi Kajian Kepatuhan dalam Rangka implementasi GRC pada Pengambilan Keputusan Direksi
13. Isu Kepatuhan terhadap regulasi

Adapun untuk tahun 2023, PLN IP Services melakukan pemetaan / *mapping* yang sudah dilakukan di Perusahaan dan PLN IP memberikan masukan serta arahan secara bertahap dalam pengimplementasian 13 Program Kepatuhan terintegrasi dapat berjalan di tahun 2024.

Tingkat Kesehatan Perusahaan

The Company's Soundness Level

Mengacu Keputusan RUPS Pengesahan RKAP 2017 tanggal 23 Januari 2019, bahwa RUPS menyetujui dan mengesahkan *Key Performance Indicator* (KPI) PT PLN Indonesia Power Services Tahun 2019, mencakup 5 perspektif KPI berbasis *Balanced scorecard* sesuai Kontrak Manajemen yang meliputi:

1. Fokus Pelanggan;
2. Efektifitas Produk dan Proses;
3. Fokus tenaga kerja, Keuangan dan Pasar dan Kepemimpinan;
4. Tata kelola, dan
5. Tanggung jawab kemasyarakatan.

Dengan penggolongan berdasarkan nilai KPI Perusahaan mengacu pada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN.

Nilai KPI Perusahaan pada Tahun 2023 mencapai 100,51 dan tingkat kesehatan Perusahaan masuk dalam klasifikasi SEHAT dengan nilai AAA.

Referring to the GMS Decision of 2017 RKAP Approval dated January 23, 2019, the GMS approved and ratified PT PLN Indonesia Power Services's Key Performance Indicator (KPI) for 2019, including 5 KPI perspectives based on the Balanced score card according to the Management Contract which includes:

1. Focus on Customer;
2. Effectiveness of Product and Process;
3. Focus on workforce, Finance and Market as well as Leadership;
4. Governance, and
5. Community responsibility.

With classification based on the Company's KPI value referring to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002 on the Assessment of the Soundness Level of SOEs.

The Company's KPI value in 2023 reached 100.51 and the Company's soundness level was included in the HEALTH classification with an AAA value.

No.	Indikator Kinerja Performance Indicator	Nilai % Value %
		2023
1	Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction	17,10
2	Efektifitas Produk dan Proses Effectiveness of Product and Process	28,48
3	Fokus Tenaga Kerja Focus on Workforce	15,34
4	Keuangan dan Pasar Finance and Market	34,35
5	Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Masyarakat Leadership, Governance and Community Responsibility	5,24
Jumlah Total		100,51

Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan forum pengambil keputusan bagi pemegang saham, yang dalam struktur GCG mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. RUPS merupakan wadah bagi para Pemegang Saham untuk dapat menggunakan haknya dalam mengemukakan pendapat dan memperoleh informasi yang berkaitan dengan Perusahaan sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perusahaan serta memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

Tata cara dan prosedur pelaksanaan RUPS yang diselenggarakan mengacu pada:

1. Anggaran Dasar Perusahaan.
2. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.

JENIS RUPS

Di dalam Anggaran Dasar telah dijelaskan adanya 2 (dua) jenis RUPS Perusahaan yaitu:

RUPS Tahunan

RUPS ini dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku. Agenda utama RUPS Tahunan terdiri dari pengajuan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan dari Direksi untuk disahkan dan disetujui oleh Pemegang Saham, melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun depan, memutuskan penggunaan laba, mengangkat atau memberhentikan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dan memutuskan hal-hal lain yang diperlukan.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is a decision-making forum for shareholders, which in GCG structure have authority that is not given to the Board of Directors or the Board of Commissioners in accordance with statutory provisions and the Articles of Association. The GMS is a forum for Shareholders to be able to exercise their rights in expressing opinions and obtaining information relating to the Company as long as it relates to meeting agenda and does not conflict with the interests of the Company and takes into account the provisions of the Company's Articles of Association and laws and regulations.

Procedures for GMS implementation refers to:

- Articles of Association of the Company.
- Law no. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.
- Law no. 19 of 2003 on State Owned Enterprises.

Regulation of the State Minister for State-Owned Enterprises Number: PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

TYPES OF GMS

The Articles of Association have explained that there are 2 (two) types of GMS in the Company, namely:

Annual GMS

The GMS is held no later than 6 (six) months after the end of the financial year. The main agenda of the Annual GMS consists of submitting Financial Statements and Annual Report from the Board of Directors to be ratified and approved by the Shareholders, appointing Public Accounting Firm for next year, deciding on the use of profit, appointing or dismissing members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners and deciding on other required matters.

RUPS Luar Biasa

Pelaksanaan RUPS Luar biasa dapat diselenggarakan kapan saja sesuai keperluan Perusahaan oleh Direksi ataupun Dewan Komisaris, atas permintaan dari Pemegang Saham.

WEWENANG RUPS

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan.

Wewenang RUPS antara lain adalah :

1. Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi
2. Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar
3. Memberikan persetujuan atas Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Perusahaan,
4. Menetapkan alokasi penggunaan laba,
5. Menunjuk dan menetapkan biaya jasa akuntan publik,
6. Menetapkan jumlah dan jenis kompensasi serta fasilitas pengurus
7. Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perusahaan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et discharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya masing-masing.
8. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menentukan dan membayar dividen final.
9. Mengambil keputusan-keputusan menyangkut struktur organisasi misalnya perubahan Anggaran Dasar, penggabungan, peleburan, pemisahan, pembubaran dan likuidasi Perusahaan. Mengangkat dan/atau mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
10. Memutuskan remunerasi yakni: penetapan gaji, tunjangan lain serta honorarium Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan.
11. Memberi persetujuan terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Extraordinary GMS

The implementation of an Extraordinary GMS can be held at any time according to the needs of the Company by the Board of Directors or the Board of Commissioners, at the request of Shareholders.

GMS AUTHORITY

The GMS has authorities that are not granted to the Board of Directors or the Board of Commissioners, within boundaries specified in Law 40 of 2007 on Limited Liability Companies and/or the Company's articles of association.

Authorities of the GMS include:

1. Evaluating the performance of the Board of Commissioners and Board of Directors
2. Approve changes to the Articles of Association
3. Give approval to the Report of the Board of Directors, Supervisory Report of the Board of Commissioners and Financial Statements of the Company,
4. Determine allocation of the use of profits,
5. Appoint and determine fees for public accountant services,
6. Determine the amount and type of compensation and management facilities
7. Approve the Annual Report including Financial Statements of the Company and Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners and granted release and discharge (*acquit et discharge*) to members of the Board of Directors and Board of Commissioners for their respective management and supervisory action.
8. Authorize the Board of Directors to determine and pay the final dividend.
9. Make decisions regarding organizational structure, for example changes to the Articles of Association, merger, consolidation, separation, dissolution and liquidation of the Company. Appoint and/or change the composition of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.
10. Decide on remuneration, namely: determination of salary, other allowances and honorarium for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
11. Approve transaction that contain conflict of interest.

12. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

12. Authorize the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm (KAP) by taking into account recommendations of the Audit Committee.

TATA CARA PENYELENGGARAAN RUPS

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Rapat akan dipimpin oleh seorang Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perusahaan.
3. Ketentuan mengenai Kuorum Rapat diatur pada Anggaran Dasar
4. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
5. Setelah selesai membicarakan setiap acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan acara Rapat yang dibicarakan;
6. Yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat hanyalah para pemegang saham Perusahaan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan sehari sebelum tanggal Pemanggilan RUPS.
7. Pertanyaan:
 - Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang telah dibagikan. Petugas akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh penanya, yang mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan
 - Setelah penanya mengajukan pertanyaan melalui formulir, Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi.
 - Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan acara Rapat.

PROCEDURES FOR ORGANIZING GMS

1. The Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred as "Meeting") will be held in Indonesian.
2. The meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Company's Board of Commissioners.
3. Provisions regarding the meeting quorum are regulated in the Articles of Association
4. All Meeting agendas are discussed on an ongoing basis.
5. After discussing each meeting agenda, the Chair of the Meeting will provide an opportunity for shareholders or their proxies to ask questions, opinions, proposals or suggestions before voting on matters related to the discussed of Meeting agenda;
6. Those entitled to ask questions and/or opinions at the Meeting are only the Company's shareholders or their legal proxies whose names are recorded in the Company's Shareholders Register the day before the date of the GMS Invitation.
7. Questions
 - Shareholders who wish to ask questions are welcome to raise their hands and fill out question form that have been distributed. Officers will collect the form that has been filled out by questioner, which includes name, number of shares owned or represented and questions asked
 - After the questioner submits question via the form, the Chair of the Meeting will answer or respond to it.
 - Questions to be answered are questions directly related to the Meeting agenda.

8. Hak Suara:

- Hanya para pemegang saham Perusahaan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan satu hari sebelum tanggal Panggilan atau kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.
- Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

9. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

INFORMASI MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

Pemegang Saham utama dan pengendali PLN IP Services adalah PT Indonesia Power, dengan kepemilikan saham sebesar 99,99 % dari total saham Perusahaan. Informasi lebih detail terkait kepemilikan saham dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan terkait struktur dan komposisi pemegang saham.

Pemegang Saham tidak mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pemegang Saham sebagai pemilik modal, memiliki hak dan tanggung jawab atas Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan. Pemegang Saham sebagai pemilik Perusahaan memiliki kepentingan terhadap peningkatan keuntungan Perusahaan, peningkatan nilai Perusahaan dan bagaimana Perusahaan dikelola.

HAK PEMEGANG SAHAM DALAM RUPS

Dalam bab III PERMEN BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011, dijelaskan hak-hak dari pemegang saham/pemilik modal sebagai berikut:

1. Hak pemegang saham/pemilik modal yang harus dilindungi, antara lain adalah:
 - a. menghadiri dan memberikan suara dalam suatu RUPS, khusus bagi pemegang saham Persero, dengan ketentuan satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara;

8. Voting Rights

- Only the shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company one day before the date of the Summons or their proxies are entitled to cast vote.
- Each share entitles its holder to cast 1 (one) vote.

9. Meeting decisions are made by way of deliberation to reach consensus, if deliberation for consensus is not reached, then the GMS will hold a vote.

INFORMATION REGARDING MAJOR AND CONTROLLING SHAREHOLDER

The main and controlling shareholder of PLN IP Services is PT Indonesia Power, with share ownership of 99.99% of total shares of the Company. More detailed information regarding share ownership can be seen in the Company Profile section regarding structure and composition of shareholders.

Shareholders do not interfere with the Company's operational activities which the responsibility of the Board of Directors in accordance with provisions of the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.

Shareholders as owners of capital, have rights and responsibilities for the Company in accordance with the Company's Articles of Association and laws and regulations. Shareholders as owners of the Company have interest in increasing the Company's profit, increasing the value of the Company and how the Company is managed.

RIGHTS OF SHAREHOLDERS IN GMS

In chapter III PERMEN BUMN Number: PER-01/MBU/2011, the rights of shareholders/capital owners are explained as follows:

1. The rights of shareholders/capital owners that shall be protected include:
 - a. attend and vote in GMS, specifically for Persero shareholders, provided that one share entitles the holder to cast one vote;

- a. mengambil keputusan tertinggi pada Perum, khusus bagi pemilik modal Perum;
 - b. memperoleh informasi material mengenai BUMN, secara tepat waktu, terukur, dan teratur;
 - c. menerima pembagian dari keuntungan BUMN yang diperuntukkan bagi pemegang saham/pemilik modal dalam bentuk dividen, dan sisa kekayaan hasil likuidasi, sebanding dengan jumlah saham/modal yang dimilikinya;
 - d. hak lainnya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.
2. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, adalah pemegang saham yang memiliki hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 3. Hak Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d, berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang yang mengatur perseroan terbatas.
- b. make the highest decision on Perum, specifically for owners of Perum capital;
 - c. obtain material information regarding SOEs, in a timely, measurable and regular manner;
 - d. receive a share of SOEs profits allocated to shareholders/capital owners in the form of dividend, and the remaining assets resulting from liquidation, in proportion to the number of shares/capital owned;
 - e. other rights based on articles of association as well as laws and regulations.
2. Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders are shareholders who have the rights referred to in paragraph (1).
 3. The rights of Shareholders as referred to in paragraph (1) letter a and d, apply as long as they are not regulated otherwise in the laws governing limited liability companies.

TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM DALAM RUPS

Pemegang Saham melalui RUPS memiliki tanggung jawab untuk:

1. Memberikan persetujuan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
2. Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan, Laporan Kinerja dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.

PENYELENGGARAAN RUPS TAHUN 2023

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan melaksanakan 2 (dua) kali Rapat Umum Pemegang Saham yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Laporan Pertanggungjawaban Tahunan (LPT) Tahun Buku 2022 dilaksanakan pada 26 Juni 2023 dan Rapat Umum Pemegang Saham Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dilaksanakan pada 31 Januari 2023. Selain kedua rapat tersebut, Pemegang saham Perusahaan juga mengambil 3 (tiga) keputusan tanpa menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik. Sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perusahaan bahwa pengambilan keputusan diluar rapat mempunyai kekuatan yang sama dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik.

RESPONSIBILITIES OF SHAREHOLDERS IN GMS

Shareholders through the GMS have responsibility to:

1. Give approval and ratify the Company's Work Plan and Budget (RKAP).
2. Approve the Annual Report and ratified the Financial Statements, Performance Report and Supervisory Report of the Board of Commissioners.

HOLDING OF GMS IN 2023

Throughout 2023, the Company held 2 (two) General Meeting of Shareholders, namely General Meeting of Shareholders Annual Accountability Report 2022 held on June 26, 2023 and General Meeting Of Shareholders Company Work Plan And Budget (RKAP) held on January 31, 2023. Besides these two meetings, Shareholders of the Company made 3 (three) decisions without holding the General Meeting of Shareholders physically. As stated in the Articles of Association of the Company, the decision making outside the meeting has the same authority as the General Meeting of Shareholders physically.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pada tanggal 26 Juni 2023, Perusahaan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 di Ruang Rapat Serbaguna (RSG) PT PLN Indonesia Power, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan dan juga diselenggarakan daring (*video conference/teleconference*) melalui platform zoom.

Di Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 telah dibuat beberapa keputusan yang agendanya sudah diberitahukan secara tertulis sebelum penyelenggaraan RUPS Tahunan berlangsung. Keputusan RUPS Tahunan tersebut tertuang dan disahkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 16 yang dibuat dihadapan Shahreza Annaz, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Berikut adalah agenda dan keputusan yang diambil dalam rapat:

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

On June 26, 2023, the Company held the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2022 at the Multipurpose Meeting Room (RSG) PT PLN Indonesia Power, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, South Jakarta and also held online (*video conference/teleconference*) through the zoom platform.

In the Annual General Meeting of Shareholders Financial Year 2022 has made several decisions that the agendas were informed in writing before the hold of Annual GMS. The Annual GMS stated and ratified in the Deed of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No.16 made before Shahreza Annaz, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta. The following are the agenda and decisions made at the meeting:

No.	Agenda Agenda	Keputusan Decision	Realisasi Realization
1.	Persetujuan dan Pengesahan Laporan Perusahaan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) termasuk Laporan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).	<ol style="list-style-type: none"> RUPS menyetujui dan menerima Laporan Tahunan mengenai adanya keadaan dan jalannya Perusahaan selama Tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang terdiri atas Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan. RUPS menyetujui dan menerima Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua). RUPS mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang memuat Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas beserta penjelasannya dalam laporan keuangan komersial dan fiskal yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan Rekan (<i>Pricewaterhousecoopers</i>) dengan pendapat "Wajar dalam Semua Hal yang Material" sebagaimana dimaksud dalam laporannya Nomor 01107/2.1025/AU.1/02/1130-2/1/VI/2023 tanggal 22-06-2023 (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh tiga). RUPS memberikan pembebasan sepenuhnya (<i>Volledig Acquit Et De Charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas pengurusan dan pengawasan sesuai dengan tanggung jawab dan tindakan dalam bidang masing-masing yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sepanjang tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta termuat dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan Rekan (<i>Pricewaterhousecoopers</i>). Pengesahan dan Pembebasan tanggung jawab tersebut tidak melepaskan tanggung jawab hukum terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris apabila Laporan yang diungkapkan tersebut terbukti melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan/atau ternyata dikemudian hari terbukti adanya tindakan yang menyimpang dan/atau merugikan Perusahaan. 	Keputusan langsung terealisasi

No.	Agenda Agenda	Keputusan Decision	Realisasi Realization
	Approval and Ratification of the Report of the Company for the financial year 2022 (two thousand twenty-two), including the Board of Commissioners Supervisory Report of the financial year 2022 (two thousand twenty-two), and to release and discharge of all responsibilities (volledig acquit et de charge) to all Board members for the management and supervision of the financial year 2022 (two thousand twenty-two).	<ol style="list-style-type: none"> The GMS approved and accepted the Annual Report on the condition and operation of the Company during the Financial Year 2022 (two thousand twenty-two) consisting of the Financial Report, Performance Evaluation Report, and Compliance Report. The GMS approved and accepted the Report on the Implementation of Supervisory Duties of the Board of Commissioners during the Financial Year 2022 (two thousand twenty-two). The GMS ratified the Financial Statements of the Company for the Financial Year 2022 (two thousand twenty-two) containing the Statements of Financial Position, Statements of Comprehensive Income, Statements of Cash Flows, and Statements of Changes in Equity along with their explanations in the commercial and fiscal financial statements audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis, and Partners (Pricewaterhousecoopers) with the opinion "Reasonable in All Material Matters" as referred to in its report number 01107/2.1025/AU.1./02/1130-2/1/VI/2023 dated 06-22-2023 (June twenty-two, two thousand twenty-three) The GMS granted a full release (Volledig Acquit Et De Charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision in line with the responsibilities and actions in their respective fields conducted during the Financial Year 2022 (two thousand twenty-two) as long as such actions are not contrary to the prevailing laws and regulations and are contained in the Financial Statements audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis, and Partners (Pricewaterhousecoopers). The ratification and release of responsibility do not relieve the legal responsibility of the Board of Directors and/or Board of Commissioners if the disclosed report is proven to violate the applicable legal provisions and procedures and/or it is proven in the future that there are actions that deviate and/or disadvantage the Company. 	Decision realized immediately
2.	<p>Penetapan Penggunaan Laba Bersih</p> <p>Determination of the Use of Net Income</p>	<p>RUPS memberi kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan penggunaan Laba Bersih Perusahaan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sesuai surat usulan Direksi Perusahaan No.2263.DIRUT/000/VI/2023-R tanggal 23-06-2023 (dua puluh tiga Juni dua ribu dua puluh tiga).</p> <p>The GMS authorized the majority Shareholders to determine the use of the Net Income of the Company for Financial Year 2022 (two thousand twenty-two) following the proposal letter of the Board of Directors of the Company No.2263. DIRUT/000/VI/2023-R dated 06-23-2023 (June twenty-three, two thousand twenty-three).</p>	<p>Keputusan langsung terealisasi</p> <p>Decision realized immediately</p>
3.	<p>Penetapan Tantiem Tahun Buku 2022 dan Remunerasi Tahun Buku 2022 Bagi Direksi dan Komisaris, Serta Bonus Karyawan.</p> <p>Determination of Tantiem for the Financial Year 2022 and Remuneration for the Financial Year 2022 for the Board of Directors and Board of Commissioners, and Employee Bonuses.</p>	<p>RUPS menetapkan Tantiem Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan Remunerasi Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta Bonus Gaji karyawan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sesuai surat usulan Direksi Perusahaan kepada Pemegang saham Nomor.2264.DIRUT/000/VI/2023-R tanggal 23-06-2023 (dua puluh tiga Juni dua ribu dua puluh tiga).</p> <p>The GMS determined the Tantiem for Financial Year 2022 (two thousand twenty-two) and Remuneration for Financial Year 2023 (two thousand twenty-three) for the Board of Directors and Board of Commissioners as well as Salary Bonus for employees for Financial Year 2022 (two thousand twenty-two) following the letter proposed by the Board of Directors to the shareholders No.2264.DIRUT/000/VI/2023-R dated 06-23-2023 (June twenty-three, two thousand twenty-three).</p>	<p>Keputusan langsung terealisasi</p> <p>Decision realized immediately</p>
4.	<p>Penetapan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Perusahaan Tahun Buku 2023.</p> <p>Appointment of Public Accountant Firm to Audit the Report of the Company for the Financial Year 2023.</p>	<p>RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sesuai surat usulan Direksi Perusahaan Nomor. 2265/000/VI/2023-R tanggal 23-06-2023 (dua puluh tiga Juni dua ribu dua puluh tiga).</p> <p>The GMS authorized the Majority Shareholders to determine the Public Accounting Firm for the Audit of the Financial Statements of the Company for the Financial Year 2023 (two thousand twenty-three) following the proposal letter of the Board of Directors of the Company No.2265/000/VI/2023-R dated 06-23-2023 (June twenty-three, two thousand twenty-three).</p>	<p>Keputusan langsung terealisasi</p> <p>Decision realized immediately</p>

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)

Perusahaan melaksanakan RUPS RKAP pada tanggal 31 Januari 2023 yang dilakukan dan dihadiri secara tatap muka di Ruang Rapat Serbaguna (RSG) PT PLN Indonesia Power, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan dan juga diselenggarakan daring (*video conference/teleconference*) melalui platform zoom.

Keputusan yang diambil dalam RUPS tersebut tertuang dan disahkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 04 yang dibuat dihadapan Shahreza Annaz, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Berikut adalah agenda dan keputusan yang diambil dalam rapat:

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS COMPANY WORK PLAN AND BUDGET (RKAP)

The Company held the RKAP GMS on January 31, 2023 conducted and attended in person at the Multipurpose Meeting Room (RSG) PT PLN Indonesia Power, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, South Jakarta and also held online (*video conference/teleconference*) through the zoom platform.

The decisions made in the GMS are stated and legalized in the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 04 made before Shahreza Annaz, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta. The following are the agenda and decisions made at the meeting:

No.	Agenda Agenda	Keputusan Decision	Realisasi Realization
1.	RUPS menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) Perusahaan tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga)	Setelah menilai RKAP Perusahaan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang diajukan oleh Direksi dan dilakukan pembahasan serta memperhatikan pendapat dan saran Dewan Komisaris, maka RUPS memutuskan menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan target Laba Bersih sebesar Rp249,961 Miliar (dua ratus empat puluh sembilan koma sembilan ratus enam puluh satu Miliar Rupiah), Neraca dan Investasi.	Keputusan langsung terealisasi
	The GMS approved and ratified the Work Plan and Budget (RKAP) of the Company for the year 2023 (two thousand twenty-three).	Buku RKAP Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah mengakomodir masukan-masukan dalam pembahasan RUPS RKAP Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tanggal 31-01-2023 (tiga puluh satu Januari dua ribu dua puluh tiga) dan telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris, diserahkan kepada Pemegang Saham selambat-lambatnya tanggal 28-02-2023 (dua puluh delapan Februari dua ribu dua puluh tiga) beserta Akta Notaris. After assessing the Work and Budget Plan (RKAP) of the Company for the Financial Year 2023 (two thousand twenty-three) proposed by the Board of Directors and discussing and considering the opinions and suggestions of the Board of Commissioners, the GMS decided to approve and ratify the Work and Budget Plan (RKAP) for the Year 2023 (two thousand twenty-three) with a Net Profit target of Rp249.961 Billion (two hundred forty-nine point nine hundred sixty-one Billion Rupiah), Balance Sheet and Investment.	Decision realized immediately
		The RKAP Year 2023 (two thousand twenty-three) which has accommodated inputs in the discussion of the GMS of RKAP Year 2023 (two thousand twenty-three) on 01-31-2023 (January thirty-one two thousand twenty-three) and approved by the Board of Directors and the Board of Commissioners, submitted to the Shareholders no later than 02-28-2023 (February twenty-eight two thousand twenty-three) along with the Notarial Deed.	

No.	Agenda Agenda	Keputusan Decision	Realisasi Realization
2.	RUPS menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen/Key Performance Indicator (KPI) Perusahaan tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga)	a. RUPS menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen/Key Performance Indicator (KPI) Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) b. Kontrak Manajemen/Key Performance Indicator (KPI) Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Perusahaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah tersebut.	Keputusan langsung terealisasi
	The GMS approved and ratified the Management Contract/Key Performance Indicator (KPI) of the Company for the year 2023 (two thousand twenty-three).	a. The GMS approved and ratified the Management Contract/Key Performance Indicator (KPI) Year 2023 (two thousand twenty-three). b. The Management Contract/Key Performance Indicator (KPI) Year 2023 (two thousand twenty-three) of the Company is an integral part of these Minutes.	Decision realized immediately

KEPUTUSAN PEMEGANG RAPAT SECARA SINGKULER

Pada tahun 2023, Perusahaan juga membuat keputusan secara sirkuler tanpa menyelenggarakan rapat secara fisik. Pemegang saham telah memberikan persetujuan secara tertulis dan menandatangani keputusan-keputusan yang diambil dalam agenda yang diajukan. Keputusan yang diambil dengan cara tersebut mempunyai keputusan tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS yaitu sah dan mengikat mengenai segala hal yang diputuskan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 25 ayat (10) Anggaran Dasar Perusahaan.

Rapat Umum Pemegang Saham Anggaran Dasar

Pada tanggal 12 April 2023, Perusahaan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Anggaran Dasar yang dihadiri oleh seluruh Pemegang Saham Perusahaan untuk memutuskan beberapa keputusan yang sudah diberitahukan secara tertulis sebelum penyelenggaraan RUPS. Keputusan RUPS tersebut tertuang dan disahkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 15 yang dibuat dihadapan Shahreza Annaz, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Berikut adalah keputusan yang diambil dalam rapat:

No.	Keputusan Decision	Realisasi Realization
1.	Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Pasal 3 ayat (2) tentang Kegiatan Usaha Perusahaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan tersebut.	Keputusan langsung terealisasi
	Approve the amendment to Article 3 paragraph (2) of the Articles of Association regarding the Business Activities of the Company as set out in the attachment to the decision.	Decision realized immediately

DECISIONS OF THE HOLDERS OF THE MEETING BY CIRCULAR MEETING

In 2023, the Company also made circular decisions without holding a physical meeting. Shareholders have given written approval and signed the resolutions adopted in the proposed agenda. Decisions taken in this manner have the same force as decisions taken legally in a GMS, namely valid and binding regarding all matters decided as stipulated in Article 20 paragraph (5) and Article 25 paragraph (10) of the Articles of Association of the Company.

General Meeting Of Shareholders of The Articles of Association

On April 12, 2023, the Company held a General Meeting of Shareholders of the Articles of Association attended by all Shareholders of the Company to decide on several decisions that had been informed in writing before the GMS. The decisions of the GMS are stated and legalized in the Deed of Minutes of the General Meeting of Shareholders No. 15 made before Shahreza Annaz, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta. The following are the decisions made at the meeting:

No.	Keputusan Decision	Realisasi Realization
2.	<p>Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Pasal 11 ayat 8.</p> <p>SEMULA: Direksi dapat memutuskan kegiatan-kegiatan dengan nilai per transaksi sebesar maksimal 5% (lima persen) dari ekuitas Perusahaan berdasarkan pada tahun buku terakhir yang telah diaudit, termasuk kegiatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengadakan transaksi, kontrak, perjanjian, kesepakatan dan/atau kerjasama dengan pihak lain; Penerbitan Standby Letter of Credit/SLBC, Letter of Credit/LC yang timbul karena transaksi bisnis; Menerima atau memberikan pinjaman yang tidak bersifat operasional; Menerima pinjaman jangka pendek dari bank atau lembaga keuangan lain. <p>MENJADI: Direksi dapat memutuskan kegiatan-kegiatan dengan nilai per transaksi sebesar maksimal 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perusahaan berdasarkan pada tahun buku terakhir yang telah diaudit, termasuk kegiatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengadakan transaksi, kontrak, perjanjian, kesepakatan dan/atau kerjasama dengan pihak lain; Penerbitan Standby Letter of Credit/SLBC, Letter of Credit/LC yang timbul karena transaksi bisnis; Menerima atau memberikan pinjaman yang tidak bersifat operasional; Menerima pinjaman jangka pendek dari bank atau lembaga keuangan lain. 	Keputusan langsung terealisasi
	<p>Approve the amendment to Article 11 paragraph 8 of the Articles of Association.</p> <p>INITIALLY: The Board of Directors may decide on activities with a value per transaction of a maximum of 5% (five percent) of the equity of the Company based on the last audited financial year, including the following activities:</p> <ol style="list-style-type: none"> Conducting transactions, contracts, agreements, deals, and/or cooperation with other parties; Issuance of Standby Letter of Credit/SLBC, Letter of Credit/LC arising from business transactions; Receive or provide loans that are not operational in nature; Receiving short-term loans from banks or other financial institutions. <p>BECAME: The Board of Directors may decide on activities with a value per transaction of a maximum of 20% (twenty percent) of the equity of the Company based on the last audited financial year, including the following activities:</p> <ol style="list-style-type: none"> Conducting transactions, contracts, agreements, deals, and/or cooperation with other parties; Issuance of Standby Letter of Credit/SLBC, Letter of Credit/LC arising from business transactions; Receive or provide loans that are not operational in nature; Receiving short-term loans from banks or other financial institutions. 	Decision realized immediately
3.	<p>Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Pasal 11 ayat 9.</p> <p>SEMULA: Direksi dapat memutuskan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 pasal ini setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris tanpa harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan nilai per transaksi yang melebihi batasan dalam ayat 8 pasal ini sampai dengan maksimal 15% (lima belas persen) dari ekuitas Perusahaan berdasarkan pada tahun buku terakhir yang telah diaudit.</p> <p>MENJADI: Direksi dapat memutuskan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 pasal ini setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris tanpa harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan nilai per transaksi yang melebihi batasan dalam ayat 8 pasal ini sampai dengan maksimal 40% (empat puluh persen) dari ekuitas Perusahaan berdasarkan pada tahun buku terakhir yang telah diaudit.</p>	Keputusan langsung terealisasi
	<p>Approve the amendment to Article 11 paragraph 9 of the Articles of Association.</p> <p>INITIALLY: The Board of Directors may decide on the activities as referred to in paragraph 8 of this article after obtaining approval from the Board of Commissioners without having to obtain approval from the General Meeting of Shareholders with the value per transaction exceeding the limit in paragraph 8 of this article up to a maximum of 15% (fifteen percent) of the equity of the Company based on the last audited financial year.</p> <p>BECAME: The Board of Directors may decide on the activities as referred to in paragraph 8 of this article after obtaining approval from the Board of Commissioners without having to obtain approval from the General Meeting of Shareholders with the value per transaction exceeding the limit in paragraph 8 of this article up to a maximum of 40% (fourty percent) of the equity of the Company based on the last audited financial year.</p>	Decision realized immediately

No.	Keputusan Decision	Realisasi Realization
4.	<p>Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Pasal 11 ayat 12 huruf a.</p> <p>SEMULA: Perbuatan/tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 8, ayat 9, dan ayat 10 huruf a sampai dengan e pasal ini yang melebihi batasan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 9.</p> <p>MENJADI: Perbuatan/tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 8, ayat 9, dan ayat 10 huruf a sampai dengan e pasal ini yang melebihi batasan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 9, kecuali transaksi Perusahaan dengan PT Indonesia Power atau penugasan dari pemegang saham dengan persetujuan dari Dewan Komisaris tanpa harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>Approve the amendment to Article 11 paragraph 12 letters a the Articles of Association.</p> <p>INITIALLY: Actions of the Board of Directors as referred to in paragraph 8, paragraph 9, and paragraph 10 letters a through e of this article that exceed the value limit as referred to in paragraph 9.</p> <p>BECAME: Actions of the Board of Directors as referred to in paragraph 8, paragraph 9, and paragraph 10 letters a through e of this article that exceed the value limit as referred to in paragraph 9, except for the transaction of the Company with PT Indonesia Power or assignments from shareholders with the approval of the Board of Commissioners without having to obtain approval from the General Meeting of Shareholders.</p>	<p>Keputusan langsung terealisasi</p> <p>Decision realized immediately</p>
5.	<p>Menugaskan Perusahaan untuk menyusun prosedur dan/atau tata kelola terkait mekanisme persetujuan kelayakan proyek atau pekerjaan sehubungan dengan adanya perubahan anggaran Dasar terkait Batasan kewenangan dalam rangka memenuhi prinsip Four Eyes Principle termasuk dan tidak terbatas pada pembentukan tim evaluasi dan verifikasi atas setiap proyek yang akan dieksekusi oleh Perusahaan serta dilaporkan kepada pemegang saham.</p> <p>Assigning the Company to develop procedures and/or governance related to the approval mechanism of project or work feasibility in connection with the amendment of the Articles of Association related to the limitation of authority to fulfill the Four Eyes Principle including and not limited to the establishment of an evaluation and verification team for each project to be implemented by the Company and reported to the shareholders.</p>	<p>Keputusan langsung terealisasi</p> <p>Decision realized immediately</p>

Keputusan-keputusan lainnya tertuang dalam Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Cogindo DayaBersama No.02 tanggal 8 Februari 2023 dan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Cogindo DayaBersama No.25 tanggal 29 September 2023. Berikut merupakan keputusan yang diambil pada tahun 2023:

Other decisions are stated in PT Cogindo DayaBersama's Shareholders Decree No.02 on February 8, 2023 and PT Cogindo DayaBersama's Shareholders Decree No.25 on September 29, 2023. The following are the decisions taken in 2023:

► Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Cogindo DayaBersama No.02 tanggal 8 Februari 2023

PT Cogindo DayaBersama Shareholder Decision Statement No.02 February 8, 2023

No.	Keputusan Decision	Keterangan Description
1.	<p>Menyatakan bahwa seluruh Pemegang Saham dengan suara bulat memutuskan untuk:</p> <p>Memberhentikan dengan segala hormat Nyonya Susiana Mutia dari jabatan Komisaris Utama Perusahaan dari segala tugas dan tanggung jawabnya disertai dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut oleh karenanya Pemegang Saham juga memberikan pelunasan dan pembebasan (<i>acquit et de charge</i>) kepada yang bersangkutan sejauh Tindakan yang bersangkutan tercermin/ternyata dalam Laporan Tahunan/Perhitungan Tahunan Perusahaan yang disetujui/disahkan oleh Rapat Pemegang Saham Perusahaan;</p> <p>Stated that all Shareholders unanimously decided to:</p> <p>To honorably dismiss Mrs. Susiana Mutia from the position of President Commissioner of the Company from all duties and responsibilities along with gratitude for all contributions of energy and thought during her tenure, therefore the Shareholders also grant release and discharge (<i>acquit et de charge</i>) to her to the extent that her actions are reflected in the Annual Report/Annual Accounts of the Company approved/separated by the Shareholders' Meeting of the Company;</p>	<p>Keputusan langsung terealisasi</p> <p>Decision realized immediately</p>

No.	Keputusan Decision	Keterangan Description
2.	<p>Memberhentikan dengan segala hormat Tuan Zaenal Mustofa dari jabatan Komisaris Independen Perusahaan dari segala tugas dan tanggung jawabnya disertai dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut oleh karenanya Pemegang Saham juga memberikan pelunasan dan pembebasan (<i>acquit et de charge</i>) kepada yang bersangkutan sejauh Tindakan yang bersangkutan tercermin/ternyata dalam Laporan Tahunan/Perhitungan Tahunan Perusahaan yang disetujui/disahkan oleh Rapat Pemegang Saham Perusahaan;</p> <p>To honorably dismiss Mr. Zaenal Mustofa from the position of Independent Commissioner of the Company from all duties and responsibilities along with gratitude for all contributions of energy and thought during his tenure in the position, therefore the Shareholders also grant release and discharge (<i>acquit et de charge</i>) to him to the extent that his actions are reflected in the Annual Report/Annual Accounts of the Company approved/separated by the Shareholders' Meeting of the Company;</p>	<p>Keputusan langsung terealisasi</p> <p>Decision realized immediately</p>
3.	<p>Mengangkat dan menetapkan:</p> <p>a. Tuan Khusnul Mubien sebagai Komisaris Utama; b. Tuan Sunandar sebagai Komisaris Independen;</p> <p>dengan tugas, kewenangan dan hak serta tanggung jawab yang melekat pada jabatan tersebut sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan Perubahannya, dengan masa jabatan 1 (satu) periode jabatan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perusahaan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan;</p> <p>Appointed and determined:</p> <p>a. Mr. Khusnul Mubien as President Commissioner; b. Mr. Sunandar as Independent Commissioner;</p> <p>with duties, authorities and rights, and responsibilities attached to the position according to the provisions in the Articles of Association of the Company and its Amendments, with a term of office of 1 (one) period of office as referred to in the Articles of Association of the Company without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time according to the provisions of the Articles of Association of the Company;</p>	<p>Keputusan langsung terealisasi</p> <p>Decision realized immediately</p>
4.	<p>Untuk menghindari keragu-raguan, Pemegang Saham dengan ini menegaskan kembali susunan anggota Dewan Komisaris Perusahaan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Dewan Komisaris:</p> <p>a. Komisaris Utama : Tuan Khusnul Mubien, b. Komisaris : Tuan Masykuri Abdillah, c. Komisaris: Tuan M. Mursid d. Komisaris Independen : Tuan Sunandar</p> <p>For the avoidance of doubt, the Shareholders hereby reaffirm the composition of the Board of Commissioners of the Company as follows:</p> <p>Board of Commissioners:</p> <p>a. President Commissioner: Mr. Khusnul Mubien, b. Commissioner: Mr. Masykuri Abdillah, c. Commissioner: Mr. M. Mursid d. Independent Commissioner: Mr. Sunandar</p>	<p>Keputusan langsung terealisasi</p> <p>Decision realized immediately</p>
5.	<p>Keputusan tersebut berlaku efektif sejak tanggal 01-02-2023 (satu Februari dua ribu dua puluh tiga) dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya.</p> <p>The decision shall be effective as of 02-01-2023 (February one, two thousand twenty-three) provided that if in the future there is any mistake in it, the necessary corrections will be made.</p>	<p>Keputusan langsung terealisasi</p> <p>Decision realized immediately</p>

► **Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Cogindo DayaBersama No.25 tanggal 29 September 2023**

PT Cogindo DayaBersama Shareholder Decision Statement No.25 dated 29 September 2023

No.	Keputusan Decision	Keterangan Description
1.	<p>Mengangkat dan menetapkan Tuan Fredy Eko Prasetyo T sebagai Komisaris Independen Perusahaan dengan tugas, kewenangan, dan hak serta tanggungjawab yang melekat pada jabatan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan Perubahannya, dengan masa jabatan 1 (satu) periode jabatan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perusahaan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan;</p> <p>To appoint and determine Mr. Fredy Eko Prasetyo T as Independent Commissioner of the Company with duties, authorities, and rights and responsibilities attached to the position according to the provisions in the Articles of Association of the Company and its Amendments, with a term of office of 1 (one) period as referred to in the Articles of Association of the Company without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time according to the provisions of the Articles of Association of the Company;</p>	<p>Keputusan langsung terealisasi</p> <p>Decision realized immediately</p>
2.	<p>Untuk menghindari keragu-raguan, Pemegang Saham dengan ini menegaskan kembali susunan anggota Dewan Komisaris Perusahaan menjadi sebagai berikut:</p> <p>a. Komisaris Utama : Tuan Khusnul Mubien b. Komisaris : Tuan Masykuri Abdillah c. Komisaris : Tuan Muhammad Mursid d. Komisaris Independen : Tuan Sunandar e. Komisaris Independen : Tuan Fredy Eko Prasetyo T.</p> <p>For the avoidance of doubt, the Shareholders hereby reaffirm the composition of the Board of Commissioners of the Company as follows:</p> <p>a. President Commissioner: Mr. Khusnul Mubien b. Commissioner : Mr. Masykuri Abdillah c. Commissioner : Mr. Muhammad Mursid d. Independent Commissioner : Mr. Sunandar e. Independent Commissioner : Mr. Fredy Eko Prasetyo T.</p>	<p>Keputusan langsung terealisasi</p> <p>Decision realized immediately</p>
3.	<p>Keputusan ini berlaku efektif sejak ditandatangani keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya</p> <p>This decision shall be effective upon the signing of this decision provided that if in the future there is any mistake in it, the necessary corrections will be made.</p>	<p>Keputusan langsung terealisasi</p> <p>Decision realized immediately</p>

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN 2022

RUPS RKAP

Pada tanggal 29 Januari 2022, Perusahaan melangsungkan RUPS RKAP melalui video conference/zoom meeting. RUPS dibuka oleh Komisaris Utama CDB dan menyerahkan Pimpinan Rapat kepada Pemegang Saham Mayoritas yang dikuasakan kepada Direktur Keuangan Ibu Endang Astharanti dan dihadiri oleh Kuasa Pemegang Saham 1 PT Indonesia Power, Pemegang Saham 2 yaitu YPK (Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan) PT Indonesia Power, Dewan Komisaris, Direksi, Sekretaris Dekom, Komite Audit dan Komite Risiko PT PLN Indonesia Power Services.

IMPLEMENTATION OF THE 2022 ANNUAL GMS

RUPS RKAP

On January 29, 2022, the Company held a RKAP GMS via video conference/zoom meeting. The GMS was opened by the President Commissioner of CDB and handed over the Chairman of the Meeting to the Majority Shareholders who were authorized by the Director of Finance Mrs. Endang Astharanti and attended by the Attorney for Shareholder 1 PT Indonesia Power, Shareholder 2 namely YPK (Education and Welfare Foundation) PT Indonesia Power, Board of Commissioners, Board of Directors, Secretary of the Board of Commissioners, Audit Committee and Risk Committee of PT PLN Indonesia Power Services.

RUPS membahas 2 (dua) agenda dan menghasilkan 2 keputusan sebagai berikut :

1. RUPS menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2022.
2. RUPS menyetujui dan menetapkan Kontrak Manajemen Tahun 2022 antara Direksi, Dekom dengan Pemegang Saham Perusahaan.

RUPS Tahunan

Selain itu, Perusahaan melangsungkan RUPS Persetujuan Laporan tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2022 RUPS dipimpin oleh Tuan Bagus Setiawan. Rapat dilangsungkan melalui media *Video Conference Zoom Meeting* dengan dihadiri oleh Kuasa Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan organ pendukung Dewan Komisaris serta Direksi.

Seluruh hasil keputusan yang diambil telah disahkan dalam Akta Notaris No. 01 tanggal 12 Juli 2022, Notaris Devi Yunanda, S.H., M.Kn. Keputusan RUPS Tahunan 2022 adalah sebagai berikut:

The GMS discussed 2 (two) agendas and produced 2 decisions as follows:

1. The GMS approved and ratified the Company's Work Plan and Budget for the 2022 Fiscal Year.
2. The GMS approved and determined the 2022 Management Contract between the Board of Directors, Board of Commissioners and the Company's Shareholders.

Annual GMS

In addition, the Company held GMS for Annual Report Approval and Ratification of the 2022 Financial Statements in Jakarta on June 30, 2022 The GMS was chaired by Mr. Bagus Setiawan. The meeting was held through Video Conference Zoom Meeting media and was attended by the Proxy of Shareholders, the Board of Commissioners, the Board of Directors and the supporting organs of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

All resolutions taken have been ratified in Notarial Deed No. 01 dated July 12, 2022, Notary Devi Yunanda, S.H., M.Kn. The 2022 Annual GMS resolutions are as follows:

No.	Keputusan Decision	Realisasi Keputusan Rapat Realization of Meeting Decisions
1.	<p>Menyetujui, menerima dan mengesahkan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perusahaan selama tahun buku 2021 yang terdiri dari Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan.</p> <p>Approved, accepted and ratified the Annual Report regarding the condition and operations of the Company during the 2021 financial year which consists of Financial Statements, Performance Evaluation Report and Compliance Report.</p>	<p>Keputusan langsung terealisasi</p> <p>Decision realized immediately</p>
2.	<p>Menyetujui dan menerima Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun 2021.</p> <p>Approved and accepted Implementation Report of Supervisory Duty of the Board of Commissioners for 2021.</p>	<p>Keputusan langsung terealisasi</p> <p>Decision realized immediately</p>
3.	<p>Memberikan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas pengurusan dan pengawasan sesuai dengan tanggung jawab dan tindakan dalam bidang masing-masing yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021.</p> <p>Granted full release to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for management and supervision in accordance with responsibilities and actions in their respective fields that have been carried out during the 2021 Financial Year.</p>	<p>Keputusan langsung terealisasi</p> <p>Decision realized immediately</p>
4.	<p>Memberi kuasa sepenuhnya kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2021.</p> <p>Authorized the Majority Shareholder to determine the Use of Net Profit for the 2021 Financial Year.</p>	<p>Keputusan langsung terealisasi</p> <p>Decision realized immediately</p>

No.	Keputusan Decision	Realisasi Keputusan Rapat Realization of Meeting Decisions
5.	<p>Memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Tantiem Tahun Buku 2021 dan Remunerasi Tahun Buku 2022 bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta Bonus bagi Karyawan untuk Tahun Buku 2021.</p> <p>Authorized the majority Shareholder to determine Tantiem for the 2021 Financial Year and Remuneration for the 2022 Financial Year for the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as Bonus for Employees for the 2021 Financial Year.</p>	<p>Keputusan langsung terealisasi</p> <p>Decision realized immediately</p>
6.	<p>Memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan untuk Tahun Buku 2022.</p> <p>Authorized the majority Shareholder to determine the Appointment of Public Accounting Firm as an auditor to audit the Company's Financial Statements, Performance Evaluation Report and Compliance Report for the 2022 Financial Year.</p>	<p>Keputusan langsung terealisasi</p> <p>Decision realized immediately</p>

RUPS Sirkuler

RUPS yang berikutnya merupakan RUPS yang diselenggarakan secara Sirkuler disahkan Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih., S.H dalam Surat Keputusan Pemegang Saham No. 008.K/010/RUPS-CDB/2022 tanggal 27 Juni 2022 dengan keputusan sebagai berikut:

Circular GMS

The next GMS is a GMS which is held circularly, approved by Notary Siti Pertiwi Henny Singgih., S.H in the Decree of Shareholders No. 008.K/010/RUPS-CDB/2022 dated June 27, 2022 with the following decision:

No.	Keputusan Decision	Realisasi Keputusan Rapat Realization of Meeting Decisions
1.	<p>Memberhentikan dengan segala hormat Sdr. Herry Nugraha dari jabatan Komisaris Utama Perusahaan sejak tanggal 26 Desember 2021 dari segala tugas dan tanggung jawabnya disertai dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut oleh karenanya Pemegang Saham juga memberikan pelunasan dan pembebasan (<i>acquit et discharge</i>) kepada yang bersangkutan sejauh tindakan yang bersangkutan tercermin/ ternyata dalam Laporan Tahunan/Perhitungan Tahunan Perusahaan yang disetujui/disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan.</p> <p>Honorably dismissed Mr. Herry Nugraha from the position of President Commissioner of the Company since December 26, 2021 from all his duties and responsibilities with appreciation for all contributions of energy and thoughts while holding this position, therefore the Shareholders also provide repayment and release (<i>acquit et discharge</i>) to the one concerned as far as actions concerned reflected/apparent to be in the Company's Annual Report/Annual Calculation which approved/ratified by the General Meeting of Shareholders of the Company.</p>	<p>Keputusan langsung terealisasi</p> <p>Decision realized immediately</p>
2.	<p>Memberhentikan dengan segala hormat Sdri. Susiana Mutia dari jabatan Komisaris Perusahaan dari segala tugas dan tanggung jawabnya disertai dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut dan oleh karenanya Pemegang Saham juga memberikan pelunasan dan pembebasan (<i>acquit et discharge</i>) kepada yang bersangkutan sejauh tindakan yang bersangkutan tercermin/ternyata dalam Laporan Tahunan/Perhitungan Tahunan Perusahaan yang disetujui/disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan.</p> <p>Honorably dismissed Ms. Susiana Mutia from the position of Commissioner of the Company from all her duties and responsibilities with appreciation for all contributions of energy and thoughts while holding the position and therefore the Shareholders also provide repayment and release (<i>acquit et discharge</i>) to the one concerned as far as actions concerned are reflected/apparent to be in the Company's Annual Report/Annual Calculation which approved/ratified by the Company's General Meeting of Shareholders.</p>	<p>Keputusan langsung terealisasi</p> <p>Decision realized immediately</p>

No.	Keputusan Decision	Realisasi Keputusan Rapat Realization of Meeting Decisions
3.	<p>Mengangkat dan menetapkan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sdri. Susiana Mutia sebagai Komisaris Utama • Sdr. Masykuri Abdillah sebagai Komisaris <p>Dengan tugas, kewenangan dan hak serta tanggungjawab yang melekat pada jabatan tersebut sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan Perubahannya, dengan masa jabatan 1 (satu) periode jabatan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perusahaan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu waktu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.</p> <p>Appointed and assigned;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ms. Susiana Mutia as President Commissioner • Mr. Masykuri Abdillah as Commissioner <p>With duties, authorities and rights and responsibilities attached to the position in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association and its Amendment, with a term of office of 1 (one) term of office as referred to in the Company's Articles of Association without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss it at any time according to with the provisions of the Company's Articles of Association</p>	<p>Keputusan langsung terealisasi</p> <p>Decision realized immediately</p>
4	<p>Memberhentikan dengan segala hormat Sdr. Adi Rekno dari jabatan Direktur Operasi Perusahaan dari segala tugas dan tanggung jawabnya disertai dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut dan oleh karenanya Pemegang Saham juga memberikan pelunasan dan pembebasan (<i>acquit et decharge</i>) kepada yang bersangkutan sejauh tindakan yang bersangkutan tercermin/ternyata dalam Laporan Tahunan/Perhitungan Tahunan Perusahaan yang disetujui/disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan.</p> <p>Honorably dismissed Mr. Adi Rekno from the position of Director of Operations of the Company from all his duties and responsibilities with appreciation for all contributions of energy and thoughts while holding the position and therefore the Shareholders also provide repayment and discharge (<i>acquit et decharge</i>) to the one concerned as far as actions concerned reflected/apparent in the Company's Annual Report/Annual Calculation which approved/ratified by the Company's General Meeting of Shareholders.</p>	<p>Keputusan langsung terealisasi</p> <p>Decision realized immediately</p>
5	<p>Mengangkat dan menetapkan Sdr. Mulyadi sebagai Direktur Operasi Perusahaan dengan tugas, kewenangan dan hak serta tanggungjawab yang melekat pada jabatan tersebut sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan Perubahannya, dengan masa jabatan 1 (satu) periode jabatan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perusahaan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu waktu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.</p> <p>Appointed and assigned Mr. Mulyadi as Director of Operations of the Company with duties, authorities and rights and responsibilities attached to the position in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association and Amendments, with a tenure of 1 (one) term of office as referred in the Company's Articles of Association without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to terminate at any time in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.</p>	<p>Keputusan langsung terealisasi</p> <p>Decision realized immediately</p>

No.	Keputusan Decision	Realisasi Keputusan Rapat Realization of Meeting Decisions
6	<p>Untuk menghindari keragu-raguan, Pemegang Saham dengan ini menegaskan kembali susunan anggota Dewan Komisaris Perusahaan menjadi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sdr. Susiana Mutia sebagai Komisaris Utama • Sdr. Masykuri Abdillah sebagai Komisaris • Sdr. M. Mursid sebagai Komisaris • Sdr. Zaenal Mustofa sebagai Komisaris Independen <p>To avoid doubts, Shareholders hereby reaffirm the composition of members of the Company's Board of Commissioners as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ms. Susiana Mutia as President Commissioner • Mr. Masykuri Abdillah as Commissioner • Mr. M. Mursid as Commissioner • Mr. Zaenal Mustofa as Independent Commissioner 	<p>Keputusan langsung terealisasi</p> <p>Decision realized immediately</p>
7	<p>Untuk menghindari keragu-raguan, Pemegang Saham dengan ini menegaskan kembali susunan anggota Dewan Direksi Perusahaan menjadi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sdr. Ade Hendratno sebagai Direktur Utama • Sdr. R. Triyono Budi P sebagai Direktur Sumber Daya Manusia • Sdr. Kukuh Pambudi sebagai Direktur Bisnis • Sdr. Mulyadi sebagai Direktur Operasi • Sdr. Hari Muhardani Nasution sebagai Direktur Keuangan <p>To avoid doubts, Shareholders hereby reaffirm the composition of members of the Company's Board of Directors as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mr. Ade Hendratno as President Director • Mr. R. Triyono Budi P as Director of Human Capital • Mr. Kukuh Pambudi as Director of Business • Mr. Mulyadi as Director of Operations • Mr. Hari Muhardani Nasution as Director of Finance 	<p>Keputusan langsung terealisasi</p> <p>Decision realized immediately</p>

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, memberi nasihat kepada Direksi, serta memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola terselenggara dalam setiap kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Menteri BUMN PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN.
3. Anggaran Dasar Perusahaan

PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS

Pedoman kerja merupakan acuan tata tertib dan tata laksana Dewan Komisaris dalam melakukan tugas, wewenang, tanggung jawab dan kewajibannya menjalankan Perusahaan. Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman Kerja sebagai panduan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang tertuang di dalam Surat Keputusan Bersama No.053.K/CDB/X/2021 dan No.004.K/DEKOM-CDB/2021 tanggal 22 Oktober 2021.

Pedoman berisikan tentang :

1. Persyaratan anggota Dewan Komisaris
2. Komposisi dan masa jabatan
3. Program pengenalan dan pembelajaran Dewan Komisaris
4. Penyusunan rencana kerja
5. Penyusunan KPI/ pencapaian kinerja
6. Tanggung jawab
7. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris
8. Wewenang, Etika dan Hak Dewan Komisaris

The Board of Commissioners is a company organ that has duties and responsibilities of carrying out general and/or specific supervision in accordance with the Articles of Association, providing advice to the Board of Directors, and ensuring that the implementation of the governance principles is implemented in every business activity at all levels of the organization.

LEGAL BASIS

1. Law no. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.
2. Regulation of the Minister of SOEs PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012 on Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs.
3. Articles of Association of the Company.

WORK GUIDELINES FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

Work guidelines is a reference for the rules and procedures of the Board of Commissioners in conducting their duties, authorities, responsibilities and obligations to run the Company. The Board of Commissioners has a Board Manual as a guidance in carrying out their duties and responsibilities stated therein Joint Decree No.053.K/CDB/X/2021 and No.004.K/DEKOM-CDB/2021 dated 22 October 2021.

The guidelines contains:

1. Requirements for members of the Board of Commissioners
2. Composition and term of office
3. Board of Commissioners introduction and learning program
4. Preparation of work plans
5. Preparation of KPI/performance achievement
6. Responsibility
7. Duties and Obligations of the Board of Commissioners
8. Authorities, Ethics and Rights of the Board of Commissioners

9. Rapat
10. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris
11. Pelaporan
12. Sekretaris Dewan Komisaris

KRITERIA DAN PROSES PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No.053.K/CDB/X/2021 dan No.004.K/DEKOM-CDB/2021 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Cogindo DayaBersama, persyaratannya antara lain adalah:

1. Yang dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum
2. Memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan suatu masalah secara memadai;
3. Memiliki kemampuan untuk membahas permasalahan tanpa campur tangan manajemen.
4. Mampu bekerja sama sebagai Anggota Dewan Komisaris.
5. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha Perusahaan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota Dewan Komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan
7. Dewan Komisaris memenuhi persyaratan khusus yaitu kompetensi dan hal-hal lain yang dipersyaratkan bagi Anggota Dewan Komisaris sesuai kompleksitas Perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.
8. Mempunyai latar belakang dan/atau pengetahuan sekurang-kurangnya di bidang akuntan dan keuangan.

9. Meeting
10. Committees under the Board of Commissioners
11. Reporting
12. Secretary to the Board of Commissioners

CRITERIA AND PROCESS FOR THE APPOINTMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Members of the Board of Commissioners are individuals who fulfill the requirements as stated in the Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors No.053.K/CDB/X/2021 dan No.004.K/DEKOM-CDB/2021 concerning the Board Manual of PT Cogindo DayaBersama, the requirements include:

1. Those who can be appointed as Member of the Board of Commissioners are individuals who are capable of carrying out legal actions
2. Have the ability to consider a problem adequately;
3. Have the ability to discuss issues without management intervention.
4. Able to work together as a Member of the Board of Commissioners.
5. The appointment of members of the Board of Commissioners is implemented by considering integrity, dedication, understanding of the Company's management issues related to one of management functions, having adequate knowledge in the field of the Company's business, and being able to provide sufficient time to do their duties as well as other requirements based on laws and regulations.
6. Members of the Board of Commissioners shall be professional, namely with integrity and have the ability so that they can carry out their functions properly, including ensuring that the Board of Directors has paid attention to the interests of all stakeholders
7. The Board of Commissioners fulfill special requirements, namely competence and other matters required for Members of the Board of Commissioners according to the complexity of the Company while still paying attention to effectiveness in decision making.
8. Have background and/or knowledge of at least accounting and finance

SUSUNAN DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Di dalam Board Manual dinyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui prosedur pencalonan, seleksi serta pengangkatan tersendiri yang ditetapkan oleh RUPS. Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.

Pada tahun 2023, komposisi Dewan Komisaris mengalami 2 (dua) kali perubahan sebagaimana merujuk kepada Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Cogindo DayaBersama No.02 tanggal 8 Februari 2023 dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.25 tanggal 29 September 2023.

Perubahan pertama terjadi pada tanggal 8 Februari 2023, RUPS memberhentikan dengan hormat Ibu Susiana Mutia dan Bapak Zaenal Mustofa untuk kemudian mengangkat Bapak Khusnul Mubien sebagai Komisaris Utama dan Bapak Sunandar sebagai Komisaris Independen. Berikut adalah komposisi Dewan Komisaris setelah perubahan:

STRUCTURE AND COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board Manual states that members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS through separate nomination, selection and appointment procedures determined by the GMS. The composition of the Board of Commissioners shall enable effective, precise and fast decision-making, and be able to act independently.

In 2023, the composition of the Board of Commissioners experienced 2 (two) changes as referred to in the Deed of Shareholders Decisions Statement of PT Cogindo DayaBersama No.02 dated February 8, 2023 and Deed of Shareholders Decisions Statement No.25 dated September 29, 2023.

The first change occurred on February 8, 2023, the GMS honorably dismissed Mrs. Susiana Mutia and Mr. Zaenal Mustofa and then appointed Mr. Khusnul Mubien as President Commissioner and Mr. Sunandar as Independent Commissioner. The following is the composition of the Board of Commissioners after the changes:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Masa Jabatan Term of Office
Khusnul Mubien	Komisaris Utama	Diangkat sebagai Komisaris Utama berdasarkan Surat Keputusan RUPS 001.K/010/RUPS-CDB/2023 tgl 20 Januari 2023	2023-2026
	President Commissioner	Appointed as a President Commissioner based on Decree of the GMS 001.K/010/RUPS-CDB/2023 dated January 20, 2023	
Julita Indah	Komisaris	Surat Keputusan RUPS Sirkuler No.011.K/010/RUPS-CDB/2021 Tanggal 19 Agustus 2021.	2023-sekarang
	Commissioner	Decree of Circular GMS No.011.K/010/RUPSCDB/2021 Dated August 19, 2021	2023-present
Masykuri Abdillah	Komisaris	Diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Surat Keputusan RUPS Sirkuler No.008.K/010/RUPS-CDB/2022 Tanggal 27 Juni 2022	2021-2024
	Commissioner	Appointed as a Commissioner based on Decree of Circular GMS No.008.K/010/RUPS-CDB/2022 Dated June 27, 2022	
Sunandar	Komisaris Independen	Diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan Surat Keputusan RUPS 001.K/010/RUPS-CDB/2023 tgl 20 Januari 2023	2023-2026
	Independent Commissioner	Appointed as a Independent Commissioner based on Decree of the GMS 001.K/010/RUPS-CDB/2023 dated January 20, 2023	

Perubahan kedua terjadi pada tanggal 29 September 2023, RUPS memutuskan untuk mengangkat dan menetapkan Bapak Fredy Eko Prasetyo T sebagai Komisaris Independen Perusahaan dengan masa jabatan 1 (satu) periode jabatan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan. Komposisi Dewan Komisaris Perusahaan menjadi sebagai berikut:

The second change occurred on September 29, 2023, the GMS decided to appoint and appoint Mr. Fredy Eko Prasetyo T as Independent Commissioner of the Company with a term of office of 1 (one) term of office without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time in accordance with the provisions of the Articles of Association. Company. The composition of the Company's Board of Commissioners is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Masa Jabatan Term of Office
Khusnul Mubien	Komisaris Utama	Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Cogindo DayaBersama No.02 tanggal 8 Februari 2023	2023-2026
	President Commissioner	Deed of Decision of Shareholders of PT Cogindo DayaBersama No.02 dated February 8, 2023	
Muhammad Mursid	Komisaris	Surat Keputusan RUPS Sirkuler No.011.K/010/RUPS-CDB/2021 Tanggal 19 Agustus 2021.	2021-2024
	Commissioner	Decree of Circular GMS No.011.K/010/RUPSCDB/2021 Dated August 19, 2021	
Sunandar	Komisaris Independen	Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Cogindo DayaBersama No.02 tanggal 8 Februari 2023	2023-2026
	Independent Commissioner	Deed of Decision of Shareholders of PT Cogindo DayaBersama No.02 dated February 8, 2023	
Fredy Eko Prasetyo T	Komisaris Independen	Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.25 tanggal 29 September 2023.	2023-2026
	Independent Commissioner	Appointed as a Independent Commissioner based on Decree of the GMS 001.K/010/RUPS-CDB/2023 dated January 20, 2023	
Masykuri Abdillah	Komisaris	Surat Keputusan RUPS RKAP No. 001.K/010/RUPS-CDB/2023 Tanggal 20 Januari 2023	2023-2026
	Commissioner	RKAP GMS Decision Letter No. 001.K/010/RUPSCDB/2023 Dated January 20, 2023	

KOMISARIS INDEPENDEN

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara, menyebutkan bahwa setiap perusahaan harus memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

INDEPENDENT COMMISSIONER

Regulation of the State Minister for State-Owned Enterprises Number: PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, states that each company shall have an Independent Commissioner of at least 30% of total members of the Board of Commissioners.

Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who do not have financial, management, share ownership and/or kinship with member of the Board of Directors, other member of the Board of Commissioners and/or controlling shareholder, or relationship with the Company that may affect the person's ability to act independently.

Hingga akhir tahun 2023, Komisaris Independen PT PLN IP Services mengalami 2 kali perubahan dimana Bapak Zaenal Mustofa diberhentikan dari jabatannya dan digantikan oleh Bapak Sunandar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Cogindo DayaBersama No.02 tanggal 8 Februari 2023. Dan pada tanggal 29 September 2023, Komisaris Independen Perusahaan kembali mengalami perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.25 tanggal 29 September 2023 dengan diangkatnya Bapak Fredy Eko Prasetyo sebagai Komisaris Independen.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Komisaris Independen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tidak bekerja rangkap sebagai Direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan yang bersangkutan;
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;
3. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perusahaan;
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Pernyataan Tentang Independensi Komisaris Independen

Bapak Sunandar dan Bapak Fredy Prasetyo T sebagai Komisaris Independen Perusahaan telah menandatangani Pakta Integritas pada tanggal 2 Februari 2023 dan 25 September 2023 untuk kemudian dikirimkan kepada Pemegang Saham.

MASA JABATAN

Masa jabatan seorang anggota Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah tanggal pengangkatannya, namun tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan para Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu.

Until the end of 2023, the Independent Commissioner of PT PLN IP Services underwent 2 changes where Mr Zaenal Mustofa was dismissed from his position and replaced by Mr Sunandar based on the Deed of PT Cogindo DayaBersama Shareholder Decision Statement No.02 dated 8 February 2023. And on 29 September 2023, the Company's Independent Commissioner underwent another change based on the Deed of Shareholder Decree No.25 dated 29 September 2023 with the appointment of Mr. Fredy Eko Prasetyo as Independent Commissioner.

Criteria for Determining Independent Commissioner

Independent Commissioner shall meet the following requirements:

1. Not working concurrently as a Director in another company affiliated with the company concerned
2. Does not have shares either directly or indirectly in the Company;
3. Has no affiliation with the Company, member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors or major shareholder of the Company;
4. Has no direct or indirect business relationship with the Company's business activities.

Statement of Independence of Independent Commissioner

Mr. Sunandar and Mr. Fredy Prasetyo T as Independent Commissioners of the Company, they both have signed the Integrity Pact on February 2, 2023 and September 25, 2023 for further to be sent to Shareholders.

TERM OF OFFICE

The term of office of member of the Board of Commissioners starts from the closing or the date determined by the GMS that appointed him/her and ends at the closing of the 3rd (third) Annual GMS after the date of his/her appointment, but does not reduce the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss Members of the Board of Commissioners at any time.

Setelah masa jabatannya berakhir, Anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Ketentuan ini juga berlaku untuk Komisaris Independen yang diangkat sesuai keputusan RUPS.

Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris diatur sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

1. Masa jabatan berakhir
2. Mengundurkan diri
3. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya
4. Meninggal dunia
5. Diberhentikan berdasarkan RUPS
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perusahaan.

Pada akhir masa jabatannya Dewan Komisaris harus membuat laporan yang disebut Memori Akhir Jabatan yang merupakan dokumen penting dalam Program Pengenalan Dewan Komisaris.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perusahaan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh hari) sebelum tanggal pengunduran dirinya dan Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu yang sama setelah diterimanya Surat Pengunduran Diri, untuk menindaklanjuti masalah tersebut atau bila tidak, pengunduran diri akan dianggap sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar.

After their term of office ends, Members of the Board of Commissioners may be reappointed by the GMS for 1 (one) term of office. This provision also applies to Independent Commissioner who appointed pursuant to a GMS resolution.

Dismissal of members of the Board of Commissioners is regulated in accordance with the Company's Articles of Association and the term of office of members of the Board of Commissioners ends when:

1. The term of office ends
2. Resigned
3. No longer fulfills the requirements as a member of the Board of Commissioners based on the Articles of Association and other laws and regulations
4. Passed away
5. Dismissed based on the GMS
6. Members of the Board of Commissioners may be dismissed by the GMS based on other reasons deemed appropriate by the GMS for the interest and objective of the Company.

At the end of their term of office, the Board of Commissioners shall make a report called Memorandum of Term of Service which is an important document in the Board of Commissioners Introduction Program.

MECHANISM OF RESIGNATION AND DISMISSAL OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

A member of the Board of Commissioners has right to resign before his/her term of office ends by notifying in writing regarding his/her intention to the Company with copies to Shareholders, Board of Directors and other members of the Board of Commissioners at least 30 (thirty days) prior to the date of his/her resignation and the Company is required to hold a GMS within the same period after receipt of resignation letter, to follow up on the matter or otherwise, the resignation will be considered valid without requiring the approval of the GMS.

Before the resignation becomes effective, the relevant Board of Commissioners is still obliged to complete its duties and responsibilities in accordance with the Articles of Association.

TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertanggung jawab melakukan tugas pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perusahaan.

Board Manual menyebutkan bahwa tugas dan kewajiban Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penasihat, yaitu:

Tugas

1. Meneliti dan menelaah serta menandatangani dalam rangka memberikan persetujuan atau pengesahan atas rencana jangka panjang Perusahaan dan rencana kerja dan anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
2. Menyetujui kebijakan anti penyuapan bersama dengan Direksi
3. Memantau dan memastikan strategi dan kebijakan anti penyuapan organisasi sejalan dengan *Good Corporate Governance* dan telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
4. Memastikan kebutuhan sumber daya yang cukup dan tepat yang diperlukan untuk penerapan sistem manajemen anti penyuapan.
5. Melakukan peninjauan informasi dari penerapan sistem manajemen anti penyuapan dan GCG pada saat Tinjauan Dewan Komisaris Bersama dengan Direksi dan tim FKAP.
6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan
7. Memastikan bahwa dalam laporan tahunan Perusahaan telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat Internal maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perusahaan.
8. Memberikan keputusan atas usulan Direksi yang berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya usulan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi.

DUTIES, OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITIES

The Board of Commissioners is Company Organ that responsible for carrying out supervisory duties in general and/or specifically as well as providing advice to the Board of Directors in running the Company.

The Board Manual states that the duties and responsibilities of the Board of Commissioners in implementing the supervisory and advisory functions are:

Duties

1. Examining and reviewing as well as signing in order to give approval or ratification of the Company's long-term plans and work plans and the Company's budget prepared by the Board of Directors, in accordance with the provisions of the Articles of Association.
2. Approve the anti-bribery policy together with the Board of Directors
3. Monitor and ensures that the organization's anti-bribery strategy and policies are in line with Good Corporate Governance and have been implemented effectively and sustainably.
4. Ensures the need for sufficient and appropriate resources required for the implementation of the anti-bribery management system.
5. Reviewing information on the implementation of the anti-bribery management system and GCG during the Review by the Board of Commissioners with the Board of Directors and the FKAP team.
6. Research and review the periodic reports and annual report prepared by the Board of Directors and sign the annual report.
7. Ensure that the Company's annual report contains information regarding identity, main jobs, positions of the Board of Commissioners in other companies, including meetings held in one financial year (internal meetings and joint meetings with the Board of Directors), as well as honorarium, facilities, and/or other benefits received from the Company.
8. Make decision on the proposal of the Board of Directors which based on the provisions of the Articles of Association requires the approval of the Board of Commissioners, within 14 (fourteen) working days after receiving the proposal or explanation and complete documents from the Board of Directors.

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>9. Memberikan tanggapan tertulis atas perbuatan Direksi yang berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar memerlukan tanggapan tertulis Dewan Komisaris, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi.</p> <p>10. Memberikan pengawasan dan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis; • Pengadaan Barang dan Jasa serta pelaksanaannya; • Kebijakan Mutu dan pelayanan; • Pengelolaan Anak Perusahaan; • Teknologi Informasi; • Sumber Daya Manusia (SDM); • Akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK); • Pelaksanaan perjanjian dengan pihak ketiga; • Kebijakan dan pelaksanaan <i>Health, Safety, Security, Environment (HSSE) and Anti Bribery</i>. | <p>9. Provide written response to the actions of the Board of Directors which, based on the provisions of the Articles of Association, require a written response from the Board of Commissioners, within 14 (fourteen) working days from receipt of the request or explanation and complete documents from the Board of Directors.</p> <p>10. Provide oversight and direction to the Board of Directors on the implementation of the Company's plans and policies regarding:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Important matters regarding changes in the business environment; • Procurement of goods and services and their implementation; • Quality and service policy; • Subsidiary Management; • Information Technology; • Human Capital (HC); • Accounting and preparation of Financial Statements in accordance with generally accepted accounting standards in Indonesia (SAK); • Implementation of agreement with third parties; • Health, Safety, Security, Environment (HSSE) and Anti Bribery policies and implementation. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Selain tugas-tugas tersebut diatas, Dewan Komisaris juga memiliki tugas antara lain:

1. Pelaksanaan Tugas berkaitan dengan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Pemberian persetujuan/tanggapan/pendapat Dewan Komisaris terhadap rancangan RJPP.
3. Pemberian persetujuan/tanggapan/pendapat Dewan Komisaris terhadap rancangan RKAP.
4. Tugas Pengawasan Terkait Kepatuhan Direksi Sesuai RKAP dan/atau RJPP.
5. Pengawasan terhadap Pengelolaan Manajemen Risiko.
6. Pengawasan terhadap Pengadaan barang dan jasa.
7. Memberikan arahan Kebijakan Mutu dan Pelayanan.
8. Mengawasi dan memantau Kepatuhan Perusahaan terhadap perjanjian dengan Pihak Ke-3.
9. Pengawasan Terkait Gejala Menurunnya Kinerja Perusahaan.
10. Mengawasi dan memberikan nasehat kepada Direksi atas Sistem Pengendalian Internal
11. Pengawasan Terkait Kebijakan Pengelolaan Anak Perusahaan/ Perusahaan Patungan.

In addition to the duties mentioned above, the Board of Commissioners also has the following duties:

1. Implementation of Duties related to the General Meeting of Shareholders.
2. Giving approval/response/opinion of the Board of Commissioners for the RJPP draft.
3. Giving approval/response/opinion of the Board of Commissioners for the RKAP draft.
4. Supervisory Duties Related to the Compliance of the Board of Directors According to RKAP and/or RJPP.
5. Supervision of Risk Management Management.
6. Supervision of the procurement of goods and services.
7. Provide direction on Quality and Service Policy.
8. Supervise and monitor the Company's compliance with agreement with third parties.
9. Supervision Regarding Symptom of Declining Company Performance.
10. Supervise and provide advice to the Board of Directors on the Internal Control System.
11. Supervision Related to Subsidiary/Joint Company Management Policy.

12. Memantau efektivitas pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Kewajiban

1. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta bertindak profesional.
2. Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan.
3. Perusahaan termasuk pelaksanaan rencana jangka panjang Perusahaan, rencana kerja dan anggaran Perusahaan serta ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak/golongan tertentu.
5. Menyusun pembagian tugas antar anggota Dewan Komisaris.
6. Meneliti dan menelaah serta menandatangani rencana jangka panjang Perusahaan dan rencana kerja dan anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.
7. Menyusun program kerja tahunan Dewan Komisaris dan dimasukkan dalam rencana kerja dan anggaran Perusahaan.
8. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.
9. Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan yang bersangkutan dan Perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.
10. Mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) penunjukan Auditor Eksternal yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perusahaan.
11. Memantau efektivitas praktek *Good Corporate Governance* antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala antara Dewan Komisaris dengan Direksi untuk membahas implementasi *Good Corporate Governance*.
12. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

12. Monitoring the effectiveness of the implementation of Good Corporate Governance.

Obligation

1. Comply with the provisions of the laws and regulations, the Articles of Association and resolutions of the GMS and act professionally.
2. Carry out supervisory duties on the policies of the Board of Directors in carrying out management.
3. The Company includes the implementation of the Company's long-term plan, the Company's work plan and budget as well as the provisions of the Articles of Association and the resolutions of the GMS and the applicable laws and regulations.
4. Provide advice to the Board of Directors in carrying out the management of the Company and not intended for the benefit of certain parties/groups.
5. Arrange division of duties between members of the Board of Commissioners.
6. Research and review and sign off on the Company's long-term plan and the Company's work plan and budget prepared by the Board of Directors in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.
7. Prepare the annual work program of the Board of Commissioners and include it in the Company's work plan and budget.
8. Research and review the periodic reports and annual reports prepared by the Board of Directors and sign the annual report.
9. Report to the Company regarding their and/or family's share ownership in the Company concerned and other Companies, including any changes.
10. Propose to the General Meeting of Shareholders (GMS) the appointment of an External Auditor who will conduct an examination of the Company's books.
11. Monitoring the effectiveness of Good Corporate Governance practices, among others by holding regular meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors to discuss the implementation of Good Corporate Governance.
12. Carry out other obligations in the context of supervisory and advisory duties, as long as they do not conflict with laws and regulations, the Articles of Association and/or GMS decisions.

Tanggung Jawab

Setiap Anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) Anggota Dewan Komisaris atau lebih, maka tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap Anggota Dewan Komisaris. Termasuk dalam perbuatan bersalah atau lalai antara lain:

1. Tidak melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan dengan itikad baik;
2. Tidak melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian;
3. Mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan Direksi yang menyebabkan terjadinya kerugian;
4. Tidak memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

HAK DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Hak Dewan Komisaris

Hak Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh akses atas informasi Perusahaan secara tepat waktu dan lengkap
2. Meminta penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan kepada Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan.
3. Meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perusahaan, atau membentuk Komite Audit sesuai kebutuhan.
4. Untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dapat mengangkat Sekretaris atas beban Perusahaan.
5. Anggota Dewan diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
6. Mendapatkan fasilitas Perusahaan sesuai dengan hasil penetapan RUPS

Responsibilities

Each Member of the Board of Commissioners is personally responsible for the Company's losses if the person concerned is guilty or negligent in carrying out his/her duties. In the event that the Board of Commissioners consists of 2 (two) Members of the Board of Commissioners or more, then the responsibility applies jointly for each Member of the Board of Commissioners. Acts of guilt or negligence include:

1. Does not supervise the management of the Company in good faith;
2. Does not supervise the management of the Company based on the principle of prudence;
3. Having direct or indirect personal interest in the actions of the Board of Directors which caused losses;
4. Not giving advice to the Board of Directors to prevent the loss from arising or continuing.

RIGHTS AND AUTHORITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Rights of the Board of Commissioners

The rights of the Board of Commissioners are as follows:

1. Obtain access to Company information in a timely and complete manner
2. Asking for explanation of all matters that are asked of the Board of Directors regarding all issues related to the management of the Company.
3. Request the help of experts in carrying out their duties for a limited period of time at the expense of the Company, or form the Audit Committee as needed.
4. To assist in fulfilling their duties, the Board of Commissioners may appoint a Secretary at the expense of the Company.
5. Members of the Board are given honorarium and post-service compensation benefits/facilities, the type and amount of which is determined by the GMS by taking into account the applicable provisions.
6. Obtain the Company's facilities in accordance with the resolutions of the GMS

7. Menerima tantiem pada saat Perusahaan menunjukkan peningkatan kinerja yang ditunjukkan dengan pelampauan target yang harus dicapai meskipun belum mempunyai saldo laba yang positif, maka Perusahaan dapat memberikan tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta bonus untuk karyawan sepanjang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

7. Receive tantiem when the Company shows an increase in performance as indicated by exceeding the targets that must be achieved even though it does not yet have a positive profit balance, the Company can provide tantiem for members of the Board of Directors and Board of Commissioners as well as bonus for employees as long as they have been budgeted and calculated as expenses.

Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berwenang untuk menyetujui atau menolak secara tertulis dalam hal:

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perusahaan.
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan.
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan.
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
6. Mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu.
7. Memberhentikan sementara Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
8. Membentuk Komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu.
10. Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

Authorities of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners has the authority to approve or reject in writing in matters as follows:

1. To looking at books, letters and other documents, examining cash for verification purpose as well as other securities and check the assets of the Company.
2. Entering the grounds, buildings and offices used by the Company.
3. Request an explanation from the Board of Directors and/or other officials regarding all issues related to the management of the Company.
4. Know all policies and actions that have been and will be carried out by the Board of Directors.
5. Requesting the Board of Directors and/or other officials under the Board of Directors with the knowledge of the Board of Directors to attend the meetings of the Board of Commissioners.
6. Appoint the Secretary to the Board of Commissioners, if deemed necessary.
7. Temporarily dismiss Member of the Board of Directors in accordance with the provisions of the Articles of Association.
8. Establish committees other than the Audit Committee, if deemed necessary by taking into account the Company's capabilities.
9. Use experts for certain matters and within a certain period of time at the expense of the Company, if deemed necessary.
10. Carry out management actions of the Company under certain conditions for a certain period of time in accordance with the provisions of this Articles of Association.
11. Attending Board of Directors meetings and provide views on matters discussed.
12. Carry out other supervisory authorities as long as they do not conflict with laws and regulations, the articles of association, and/or GMS resolutions.

Pembagian Tugas Dewan Komisaris

Pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisaris dilakukan melalui:

1. Ketentuan yang mengatur tentang kewajiban Dewan Komisaris untuk melakukan pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris;
2. Penetapan Dewan Komisaris tentang pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris;
3. Pembagian tugas mencakup seluruh bidang tugas Direksi;
4. Penugasan anggota Dewan Komisaris sebagai ketua/wakil/anggota Komite Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas.

Dewan Komisaris PLN IP Services melakukan kesepakatan untuk membagi tugas sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Pembagian tugas Dewan Komisaris yang ditandatangani pada tanggal 30 November 2023, dengan detail pembagian tugas sebagai berikut:

Division of Duties of the Board of Commissioners

The division of duties among members of the Board of Commissioners is carried out through:

1. Provision governing the obligations of the Board of Commissioners to conduct the division of duties among members of the Board of Commissioners;
2. Determination of the Board of Commissioners regarding the division of duties among members of the Board of Commissioners;
3. Division of duties covers all areas of the duties of the Board of Directors;
4. Assignment of members of the Board of Commissioners as chairman/deputy/member of the Committee of the Board of Commissioners/ Supervisory Board.

The Board of Commissioners of PLN IP Services made an agreement to divide the duties as stated in the Minutes of the Agreement on the Division of duties of the Board of Commissioners signed on November 30, 2023, with details of the division of duties as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Fokus Pengawasan Supervision Focus	Pembagian Pengawasan per Direktorat Supervision Division per Directorate
Khusnul Mubien	Komisaris Utama President Commissioner	Keseluruhan Bidang Overall Field	Seluruh Direktorat All Directorate
Masykuri Abdillah	Komisaris Commissioner	<ul style="list-style-type: none"> • SDM dan Organisasi • Nominasi dan Remunerasi <ul style="list-style-type: none"> • Human Capital and Organization • Nomination and Remuneration 	Direktorat SDM Directorate of Human Capital
Sunandar	Komisaris Commissioner	Keuangan Finance	Direktorat Keuangan Directorate of Finance
Muhammad Mursid	Komisaris Commissioner	Manajemen Risiko Risk Management	Direktorat Operasi Directorate of Operation
Fredy Eko Prasetyo T	Komisaris Independen Independent Commissioner	<ul style="list-style-type: none"> • Audit • <i>Good Corporate Governance</i> <ul style="list-style-type: none"> • Audit • Good Corporate Governance 	Direktorat Niaga Directorate of Commerce

Tanggapan Dewan Komisaris dan Progres Tindak Lanjutnya

Board of Commissioners response and Follow-Up Progress

No.	Tanggapan Dewan Komisaris Board of Commissioners Response	Progress Tindak Lanjut Follow-Up Progress	Persentase Percentage (%)
1.	a. Direksi Perusahaan agar memastikan seluruh eksekusi pekerjaan yang direncanakan pada tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. The Board of Directors of the Company to ensure all of the work execution that planned in 2023 can be completed properly.	Laporan PBR dan Kinerja bulan September 2023 LBR Report and September 2023 Performance	100
	b. Direksi Perusahaan agar menjaga dan meningkatkan kepuasan pelanggan untuk dapat meyakinkan pelanggan dalam kerjasama jangka panjang. The Board of Directors of the Company to maintain and improve the customer satisfaction to be able to convince customers in the long-term cooperation.	Proses pengadaan konsultan CSI/ review kuesioner Process of procurement CSI consultant questionnaire review	100
	c. Direksi Perusahaan agar memastikan seluruh usaha yang dijalankan sudah sesuai dengan regulasi (nasional dan internasional). The Board of Directors of the Company ensure all of the business that being run is aligned with regulation (national and international).	Dilakukan monitoring kepatuhan dan sesuai dengan regulasi nasional dan internasional Conducted monitoring compliance and according to national and international regulations	100
	d. Direksi Perusahaan agar menyiapkan mitigasi risiko untuk seluruh program kerja RKAP 2023. The Board of Directors of the Company to prepare the risks mitigation to all work programs of RKAP 2023.	Evaluasi mitigasi profil risiko korporat 2023 Evaluation of corporate risk profile mitigation 2023	100
2.	a. Direksi Perusahaan agar menyusun langkah strategis dalam pengendalian HPP masing-masing proyek. The Board of Directors of the Company to compile the strategic initiative in COGS control in each project.	Monitoring pengendalian BPP per Desember 2023 Monitoring of BPP control as of December 2023	100
	b. Direksi Perusahaan agar melakukan monitoring dan menyusun langkah-langkah untuk meminimalisir potensi denda pajak dan dikonsultasikan secara berkala dengan Komite dan Dewan Komisaris The Board of Directors of the Company to monitor and compile the steps to minimize tax penalty potential and periodically consulted with the Committee and the Board of Commissioners	Rekonsiliasi pendapatan usaha dengan penerbitan faktur pajak bulan Desember 2023 Reconciliation of business income with tax invoice issuance in December 2023	100
	c. Direksi perseroan agar menyusun langkah strategis dalam menyiapkan pembiayaan proyek. The Board of Directors of the Company to compile the initiative strategic in preparing project finance.	MoU sudah tersedia, hanya menunggu project yang akan dibiayai MoU is already available, just waiting for the project to be financed	100
3.	a. Direksi Perusahaan agar menyusun langkah strategis untuk menyiapkan tenaga kerja baru dalam memenuhi peluang pengembangan bisnis PT PLN Indonesia Power Services. The Board of Directors of the Company to compile a strategic initiative to prepare new workers in fulfilling the business development opportunity of PT PLN Indonesia Power Services.	Tersedianya pemenuhan SDM eksternal berkelanjutan (Kebutuhan SDM Eksternal Vs Realisasi). Availability of sustainable external HC fulfillment (External HC Needs Vs Realization).	100

No.	Tanggapan Dewan Komisaris Board of Commissioners Response	Progress Tindak Lanjut Follow-Up Progress	Persentase Percentage (%)
	<p>b. Direksi perseroan agar memetakan, mengoptimalkan dan menyiapkan talent personilnya terutama yang memiliki ekspertise khusus agar siap memenuhi pengembangan bisnis PT PLN Indonesia Power Services yang makin luas.</p> <p>The Board of Directors of the Company to mapping, optimizing, and preparing its personnel talents, especially with special expertise, to be able to fulfill the expanding business development of PT PLN Indonesia Power Services.</p>	<p>Tersedianya program kerja : Penetapan kandidat <i>expertise</i>, telah dilakukan program mengajar dan <i>sharing session</i> ke eksternal level nasional bekerjasama dengan PII</p> <p><i>Individual Development Plan</i> telah tersedia, Penyusunan <i>timeline program expert (specialist/generalist)</i>, Pelaksanaan program pembicara ke eksternal sebagai specialist, Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi untuk <i>generalist</i> dan <i>specialist</i> dan draft kebijakan sistem penghargaan ekspertise selesai dan sedang dalam proses review pada Departemen penyusun kebijakan sistem SDM.</p> <p>Availability of work program: Determination of expertise candidates, teaching programs and sharing sessions to external national level in collaboration with PII.</p> <p>Individual Development Plan is in place, timeline of expert program (specialist/generalist), implementation of external speaker program as specialist, implementation of training and certification for generalist and specialist and the draft policy of expert reward system is completed and is in the process of review at the Human Capital system policy drafting department.</p>	100
	<p>c. Direksi perseroan agar memetakan potensi kemitraan yang kredibel dalam rangka memenuhi pengembangan bisnis PT PLN Indonesia Power Services yang semakin luas.</p> <p>The Board of Directors of the Company to map potential credible partnerships to fulfill the expanding business development of PT PLN Indonesia Power Services.</p>	<p><i>Mapping</i> terhadap calon - calon mitra strategis</p> <p>Mapping of potential strategic partners</p>	100
4.	<p>a. Direksi Perusahaan agar melaksanakan program strategis utama yang memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian target kinerja termasuk target pendapatan dengan monitoring dan evaluasi secara ketat.</p> <p>The Board of Directors of the Company to implement key strategic programs that have a direct contribution to the achievement of performance targets including revenue targets with strict monitoring and evaluation.</p>	<p>Melakukan <i>update dashboard monitoring</i> program kerja Utama sesuai Solid per Desember 2023</p> <p>Update the monitoring dashboard of the Main work program according to Solid as of December 2023</p>	100
	<p>b. Direksi Perusahaan agar memetakan potensi proyek tambahan selama periode tahun berjalan yang mendukung pencapaian RKAP 2023 dan merencanakan strategi implementasinya serta dilaporkan secara periodik kepada Dewan Komisaris.</p> <p>The Board of Directors of the Company to map potential additional projects during the current year period that support the achievement of RKAP 2023 and plan its implementation strategy and report periodically to the Board of Commissioners.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keikutsertaan PLN IP Services dalam <i>tender project - project</i> investasi IP 2. Melakukan kunjungan ke unit-unit HSH sebagai peluang untuk mendapatkan pendapatan dari bisnis HSH 3. Procurement List SKK Migas 4. Keikutsertaan PLN IP Services dalam <i>tender oil and gas</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Participation of PLN IP Services in project tenders - IP investment projects 2. Conducting visits to HSH units as an opportunity to gain revenue from HSH business. 3. Procurement List SKK Migas 4. Participation of PLN IP Services in oil and gas tenders 	100
	<p>c. Direksi Perusahaan agar berupaya menciptakan <i>value creation</i> dari produk jasa eksisting dan produk jasa baru.</p> <p>The Board of Directors of the Company strive for value creation from existing and new service products.</p>	<p>Penyusunan skema bisnis dan pencarian mitra strategis</p> <p>Business scheme development and strategic partner search</p>	100

No.	Tanggapan Dewan Komisaris Board of Commissioners Response	Progress Tindak Lanjut Follow-Up Progress	Persentase Percentage (%)
5.	<p>a. Direksi Perusahaan agar berupaya untuk mengembangkan layanan usaha di bidang industri <i>oil & gas – mining</i>.</p> <p>The Board of Directors of the Company to develop the business development in the field of oil & gas-mining industry.</p>	<p>1. PLN IP Services telah mendapatkan 3 project di <i>Oil & Gas</i> dan 1 di <i>Mining</i></p> <p>2. PLN IP Services telah mendapatkan salah satu perijinan untuk mendukung keikutsertaan tender di SKK Migas yaitu SKUP Migas terkait pekerjaan Jasa O&M</p> <p>1. PLN IP Services has secured 3 projects in Oil & Gas and 1 in Mining.</p> <p>2. PLN IP Services has obtained one of the licenses to support the participation of tenders at SKK Migas, namely SKUP Migas related to O&M Services work.</p>	100
	<p>b. Direksi Perusahaan agar berupaya mengembangkan sistem digitalisasi untuk seluruh proses bisnisnya dan secara berkala dilaporkan kepada Dewan Komisaris atas seluruh progress pengembangannya.</p> <p>The Board of Directors of the Company developed a digitization system for all business processes and reported periodically to the Board of Commissioners as of development progress.</p>	<p>1. Pengisian katalog sudah dilakukan oleh PIC terkait.</p> <p>2. Pemasaran MROline dilakukan melalui media instagram MROline.</p> <p>1. Catalog filling has been conducted by the relevant PIC.</p> <p>2. MROline marketing is conducted through MROline Instagram media.</p>	100
6.	<p>Direksi Perusahaan agar melaksanakan seluruh mitigasi risiko strategis perusahaan dimonitor secara ketat dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris secara berkala.</p> <p>The Board of Directors of the Company to implement all strategic risk mitigation of the company is closely monitored and reported periodically to the Board of Commissioners.</p>	<p>Tersedia form <i>monitoring</i> sasaran dan program kerja utama sesuai SOLID (Rencana Mitigasi Profil Risiko Korporat 2023)</p> <p>Forum monitoring key objectives and work programs under SOLID in place (Corporate Risk Profile Mitigation Plan 2023)</p>	100
7.	<p>Direksi Perusahaan agar memaksimalkan fungsi pengendalian internal dalam semua aspek serta memastikan terpenuhinya GCG, <i>compliance</i>, kesesuaian terhadap peraturan, serta kelengkapan <i>Standard Operation Procedure</i>.</p> <p>The Board of Directors of the Company to maximize the internal control function in all aspects and ensure the fulfillment of GCG, compliance, conformity to regulations, and the completeness of the Standard Operation Procedure.</p>	<p>Pengendalian internal dalam semua aspek telah dilakukan untuk pencapaian bulan September 2023</p> <p>Internal controls in all aspects are in place for September 2023 achievements</p>	100
8.	<p>Direksi Perusahaan agar memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dan memastikan peningkatan budaya K3L pada seluruh kegiatan di lingkungan perusahaan.</p> <p>The Board of Directors of the Company to ensure the implementation of health protocols and ensure the improvement of OHSE culture in all activities within the company.</p>	<p>1. <i>Monitoring</i> dan pelaporan laporan kinerja bulan September 2023.</p> <p>2. Sudah dilakukan sosialisasi <i>awareness</i> K3</p> <p>3. Safety Induction melalui aplikasi <i>College</i></p> <p>1. Monitoring and reporting of performance report in September 2023.</p> <p>2. OHS awareness socialization has been conducted</p> <p>3. Safety Induction through the College application</p>	100
9.	<p>Direksi Perusahaan agar memastikan <i>sustainability business</i> melalui <i>strategic partnership</i> dan berkolaborasi dengan Pihak Eksternal untuk membuka peluang-peluang bisnis baru yang dapat mendukung pencapaian target jangka panjang perusahaan.</p> <p>The Board of Directors of the Company to ensure business sustainability through strategic partnerships and collaboration with external parties to open new business opportunities that can support the achievement of the long-term targets of the Company.</p>	<p>1. Konsolidasi dengan pembina DIV - IT PLN IP</p> <p>2. Pengisian produk aplikasi MRO-Line</p> <p>3. Setup aplikasi CRM pada <i>website</i> MROline</p> <p>4. Pengadaan lisensi power BI dan perangkat pendukung</p> <p>5. Implementasi kerjasama KSO/JO dengan <i>workshop</i> eksternal sesuai dengan kontrak kerjasama KSO/JO"</p> <p>1. Consolidation with DIV advisor - IT PLN IP</p> <p>2. MRO-Line application product filling</p> <p>3. CRM application setup on the MROline website</p> <p>4. Procurement of power BI licenses and supporting devices</p> <p>5. Implementation of KSO/JO cooperation with external workshops in according with the KSO/JO cooperation contract"</p>	100

► **Keputusan Dewan Komisaris Tahun 2023**

Board of Commissioners Decision 2023

No.	Tanggal Date	Nomor Surat Keputusan Letter Number Decision	Perihal Events
1.	2 Januari 2023 January 2, 2023	001.K/DEKOM-CDB/2023	Pembentukan Komite Audit Dewan Komisaris PT Cogindo DayaBersama Establishment of the Audit Committee of the Board of Commissioners of PT Cogindo DayaBersama
2.	24 November 2023 November 24, 2023	002.K/DEKOM-CDB/2023	Pembentukan Komite Audit Dewan Komisaris PT Cogindo DayaBersama Establishment of the Audit Committee of the Board of Commissioners of PT Cogindo DayaBersama
3.	30 November 2023 November 30, 2023	003.K/DEKOM-CDB/2023	Penetapan Pelaksana Direktur Utama Appointment of Acting President Director

PROGRAM PENGENALAN DEWAN KOMISARIS

Program Pengenalan kepada Dewan Komisaris yang baru diangkat bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai Perusahaan, agar dapat memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Dewan Komisaris dan proses bisnis Perusahaan yang dilaksanakan oleh Direksi, sehingga dapat bekerja selaras dengan Organ Perusahaan lainnya. Kebijakan program ini tercantum dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris No. 004.K/DEKOM-CDB/2021. Komisaris Utama bertanggung jawab atas pelaksanaan program pengenalan bagi Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat, dengan pemberian materi program pengenalan antara lain:

1. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* oleh Perusahaan (termasuk penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 di Perusahaan).
2. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, resiko dan berbagai masalah strategis lainnya.
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta Anggaran Dasar.

Pada tahun 2023, Perusahaan melaksanakan program pengenalan Perusahaan untuk anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat yaitu Bapak Khusnul Mubien dan Bapak Sunandar yang dilangsungkan pada tanggal 8 Maret 2023 dan Bapak Fredy Eko Prasetyo pada tanggal 26 September 2023.

INDUCTION PROGRAM FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Induction Program for the newly appointed Board of Commissioners aims to provide knowledge about the Company, in order to understand the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and the Company's business processes carried out by the Board of Directors and to be able to work in harmony with other Company Organs. This program policy is listed in the Board of Commissioners Work Guidelines No. 004.K/DEKOM-CDB/2021. The President Commissioner is responsible for implementing the induction program for newly appointed members of the Board of Commissioners, by providing induction program materials including as follows:

1. Implementation of *Good Corporate Governance* by the Company (including the implementation of the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System in the Company).
2. An overview of the Company in terms of objective, nature, scope of activities, financial and operational performance, strategy, short and long term business plans, competitive position, risk and various other strategic issues
3. Information relating to delegated authority, internal and external audit, internal control system and policies, including the Audit Committee
4. Information regarding the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as the Articles of Association.

In 2023, the Company conducted an introduction program for the newly appointed members of the Board of Commissioners, namely Mr. Khusnul Mubien and Mr. Sunandar, held on March 8, 2023, and Mr. Fredy Eko Prasetyo on September 26, 2023.

PROGRAM PEMBELAJARAN BERKELANJUTAN DEWAN KOMISARIS

Perusahaan memfasilitasi program peningkatan kapabilitas bagi Anggota Dewan Komisaris, agar dapat memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari aktivitas bisnis Perusahaan, dan pengetahuan-pengetahuan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Hal tersebut telah diatur dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris Nomor: 004.K/DEKOM-CDB/2021. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak menentukan program pelatihan untuk kemudian mempresentasikan materi pelatihan yang telah didapat kepada anggota Dewan Komisaris lainnya.

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah mengikuti program pelatihan sebagai berikut:

CONTINUING LEARNING PROGRAM FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

The company facilitates a capability building program for members of the Board of Commissioners, hence they are able to update information on latest developments in the Company's business activities, and other knowledge related to the implementation of the duties of the Board of Commissioners. This has been regulated in the Work Guidelines for the Board of Commissioners Number: 004.K/DEKOM-CDB/2021. Each member of the Board of Commissioners has the right to determine the training program to then present the training material that has been obtained to other members of the Board of Commissioners.

Throughout 2023, the Board of Commissioners has attended the following training programs:

Nama Name	Jenis Pelatihan Training Type	Penyelenggara Organizer	Waktu Time	Tempat Venue
Khusnul Mubien	Undangan Induction Training Dekom Baru CDB Invitation of Introduction Training of New Board of Commissioners CDB	Management CDB	8 Maret 2023 March 8, 2023	R. Rapat Professional It. 7 Professional Meeting Room 7 th floor
	Into the unknown : Charting the Future Agenda Into the unknown : Charting the Future Agenda	CRMS	7-8 Desember 2023 December 7-8, 2023	R. Rapat Professional It. 7 Professional Meeting Room 7 th floor
Sunandar	Undangan Induction Training Dekom Baru CDB Invitation of Introduction Training of New Board of Commissioners CDB	Management CDB	8 Maret 2023 March 8, 2023	R. Rapat Professional It. 7 Professional Meeting Room 7 th floor
	Pelaksanaan Sertifikasi QRGP Implementation of QRGP Certification	CRMS	17 November 2023 November 17, 2023	R. Rapat Professional It. 7 Professional Meeting Room 7 th floor
	Into the unknown : Charting the Future Agenda Into the unknown : Charting the Future Agenda	CRMS	7-8 Desember 2023 December 7-8, 2023	R. Rapat Professional It. 7 Professional Meeting Room 7 th floor
Fredy Eko Prasetyo T	Undangan Induction Training Dekom Baru CDB Invitation of Introduction Training of New Board of Commissioners CDB	Management CDB	26 September 2023 September 26, 2023	R. Rapat Professional It. 7 Professional Meeting Room 7 th floor
	Pelaksanaan Sertifikasi QRGP Implementation of QRGP Certification	CRMS	17 November 2023 November 17, 2023	R. Rapat Professional It. 7 Professional Meeting Room 7 th floor
	Into the unknown : Charting the Future Agenda Into the unknown : Charting the Future Agenda	CRMS	7-8 Desember 2023 December 7-8, 2023	R. Rapat Professional It. 7 Professional Meeting Room 7 th floor
Muhammad Mursid	Into the unknown : Charting the Future Agenda Into the unknown : Charting the Future Agenda	CRMS	7-8 Desember 2023 December 7-8, 2023	R. Rapat Professional It. 7 Professional Meeting Room 7 th floor

PENILAIAN KINERJA KOMITE-KOMITE YANG BERADA DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah membentuk 2 (dua) komite yaitu:

1. Komite Audit
2. Komite Manajemen Risiko

Penilaian kinerja atas kedua komite tersebut dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, pada setiap 1 (satu) tahun dan akhir masa jabatan. Hal ini dilakukan sebagai dasar pemberhentian atau pengangkatan kembali untuk masa jabatan berikutnya. Pada tahun 2023, capaian Kinerja Komite Audit sebesar 100 % dan Komite Manajemen Risiko sebesar 100%. Penghitungan capaian KPI masing-masing Komite Penunjang Dewan Komisaris tercantum dalam Laporan Tahunan ini pada bagian Komite Penunjang Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menilai bahwa kinerja Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko sangat baik dan menganggap saran dan rekomendasi yang diberikan telah sesuai dengan ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dan telah melaksanakan rapat masing-masing sebanyak 12 kali.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

To enhance the role of the Board of Commissioners in conducting its supervisory function, the Board of Commissioners has established 2 (two) committees, namely:

1. Audit Committee
2. Risk Management Committee

The performance assessment of the two committees is conducted by the Board of Commissioners based on the implementation of duties and responsibilities, every 1 (one) year and the end of the term of office. This is conducted as a basis for dismissal or reappointment for the next term of office. In 2023, the performance of the Audit Committee is 100% and the Risk Management Committee is 100%. The calculation of the KPI achievements of each of the Board of Commissioners Supporting Committees is included in this Annual Report in the Board of Commissioners Supporting Committees section. The Board of Commissioners considers the performance of the Audit Committee and Risk Management Committee to be excellent and considers that the advice and recommendations provided are in line with the scope of their duties and responsibilities and have conducted 12 meetings each.

Direksi

The Board of Directors

Direksi merupakan pelaksana dan penanggung jawab atas pengurusan kepentingan Perusahaan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas pengambilan keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya, namun pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama untuk menciptakan pengelolaan yang efektif dan mencapai hasil yang optimal.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas.
2. Peraturan Menteri BUMN PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN.
3. Anggaran Dasar Perusahaan

PEDOMAN KERJA DIREKSI

Pedoman Kerja Direksi (*Board Manual*) merupakan acuan tata laksana atas tugas dan tanggung jawab Direksi. Pedoman kerja Direksi diperbarui pada tanggal 22 Oktober 2021 dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 053.K/CDB/X/2021.

Pedoman Kerja Direksi mengatur tata tertib dalam pelaksanaan tugasnya antara lain:

1. Persyaratan, Komposisi dan Masa Jabatan Direksi
2. Pemberhentian dan Hak Pembelaan Diri Anggota Direksi
3. Program Pengenalan dan Pembelajaran bagi Direksi
4. Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang, Hak dan Kewajiban

The Board of Directors is the executor and person in charge in managing the interests of the Company in accordance with the stated objectives and represent the company both inside and outside the court in accordance with the provisions of the Articles of Association.

Each member of the Board of Directors can conduct decision-making duty in accordance with the division of duties and authorities, but the implementation of duties by each member of the Board of Directors remains a shared responsibility to create effective management and achieve optimal result.

LEGAL BASIS

1. Law no. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.
2. Regulation of the Minister of SOEs PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012 on Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs.
3. Articles of Association of the Company.

WORK GUIDELINES FOR THE BOARD OF DIRECTORS

Work Guidelines (*Board Manual*) of the Board of Directors is a reference for the management of duties and responsibilities of the Board of Directors. Work guidelines of the Board of Directors updated on October 22, 2021 in the Joint Decree of the Board of Commissioners and Board of Directors No. 053.K/CDB/X/2021

Work Guidelines of the Board of Directors regulate the rules of conduct in the fulfillment of their duties, including:

1. Requirements, Composition and Term of Office of the Board of Directors
2. Dismissal and Right to Self-Defense of Members of the Board of Directors
3. Introduction and Learning Program for the Board of Directors
4. Duties, Responsibilities, Authorities, Rights and Obligations

5. Etika Jabatan
6. Etika Berusaha dan Anti Korupsi
7. Hubungan dengan Stakeholder dan pihak eksternal
8. Penetapan Kebijakan
9. Pembagian Tugas Direksi
10. Rapat Direksi
11. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Direksi

12. Sekretaris Perusahaan

KRITERIA DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN DIREKSI

Di dalam Pedoman telah disebutkan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon Anggota Direksi ditetapkan di dalam Anggaran Dasar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis Perusahaan.

Yang dapat diangkat menjadi Anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

1. Dinyatakan pailit;
2. Menjadi Anggota Direksi atau Anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit; atau
3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Persyaratan lain sebagai anggota Direksi adalah:

1. Memiliki keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundangan;
2. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu:
 - Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;
 - Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara;
 - Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
 - Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengurus dan/atau calon/anggota legislatif; dan atau

5. Position Ethics
6. Business Ethics and Anti-Corruption
7. Relationship with Stakeholders and external parties.
8. Determination of Policy
9. Division of Duties of the Board of Directors
10. Meeting of the Board of Directors
11. Reporting and Accountability of the Board of Directors

12. Corporate Secretary

CRITERIA AND REQUIREMENTS FOR MEMBERSHIP OF THE BOARD OF DIRECTORS

In the Guidelines it has been stated that the requirements that shall be met by a candidate for Member of the Board of Directors are stipulated in the Company's Articles of Association in accordance with applicable laws and regulations and adapted to the needs and nature of the Company's business.

Those who can be appointed as Members of the Board of Directors are individuals who are capable of fulfilling legal actions, unless within 5 (five) years prior to their appointment:

1. Declared bankrupt;
2. Being a member of the Board of Directors or a member of the Board of Directors who is found guilty of causing a company to be declared bankrupt; or
3. Convicted of committing a crime that is detrimental to state finance and/or related to financial sector.

Other requirements as members of the Board of Directors are:

1. Have expertise, experience and other requirements based on laws and regulations;
2. Member of the Board of Directors are prohibited from holding multiple positions as mentioned below, namely:
 - Member of the Board of Directors in State Owned Enterprise, Regional Owned Enterprise, Private Owned Enterprise;
 - Member of the Board of Commissioners/Supervisory Board in a State-Owned Enterprise;
 - Other structural and functional position in central and/or regional government agency/institution;
 - Other positions in accordance with the provisions of laws and regulations, administrator and/or candidate/member of the legislature; and or

- Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

- Other positions that may cause a conflict of interest.

Susunan dan Komposisi Direksi

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan dipimpin oleh Direktur Utama. Pada tahun 2023, komposisi Direksi tidak mengalami perubahan. Maka, komposisi Direksi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Masa Jabatan Term of Office
Ade Hendratno	Direktur Utama President Director	Surat Keputusan RUPS Sirkuler No. 011.K/010/RUPS-CDB/2021 tanggal 19 Agustus 2021. Decree of the Circular GMS No. 011.K/010/RUPS-CDB/2021 dated August 19, 2021.	2021-2024
R. Triyono Budi P	Direktur Sumber Daya Manusia Director of Human Capital	Surat Keputusan RUPS Sirkuler No. 011.K/010/RUPS-CDB/2021 tanggal 19 Agustus 2021. Decree of the Circular GMS No. 011.K/010/RUPS-CDB/2021 dated August 19, 2021.	2021-2024
Kukuh Pambudi	Direktur Bisnis Director of Business	Surat Keputusan RUPS Sirkuler No. 011.K/010/RUPS-CDB/2021 tanggal 19 Agustus 2021. Decree of the Circular GMS No. 011.K/010/RUPS-CDB/2021 dated August 19, 2021.	2021-2024
Mulyadi	Direktur Operasi Director of Operations	Surat Keputusan RUPS Sirkuler No. 008.K/010/RUPS-CDB/2022 tanggal 27 Juni 2022. Decree of the Circular GMS No. 008.K/010/GMSCDB/2022 dated June 27, 2022.	2022-2025
Hari Muhandani Nasution	Direktur Keuangan Director of Finance	Surat Keputusan RUPS Sirkuler No. 011.K/010/RUPS-CDB/2021 tanggal 19 Agustus 2021. Decree of the Circular GMS No. 011.K/010/RUPS-CDB/2021 dated August 19, 2021.	2021-2024

Masa Jabatan

Masa jabatan Direksi ditentukan oleh Pemegang Saham dalam RUPS yaitu selama 3 tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.

Jabatan Anggota Direksi akan berakhir jika:

1. Meninggal Dunia
2. Masa jabatan berakhir
3. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan

Structure and Composition of the Board of Directors

Members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders and are chaired by the President Director. In 2023, the composition of the Board of Directors has not changed. Therefore, the composition of the Board of Directors as of December 31, 2023 is as follows:

Term of Office

The term of office of the Board of Directors is determined by the Shareholders at the GMS, namely for 3 years without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.

The position of a Member of the Board of Directors will end if:

1. Passed away
2. The term of office ends
3. Dismissed based on the resolution of the General Meeting of Shareholders
4. No longer fulfills the requirements as a member of the Board of Directors based on the provisions of the Articles of Association and laws and regulations

Apabila seorang Anggota Direksi berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan Anggota Direksi yang digantikannya demikian juga halnya bila terdapat penambahan Anggota Direksi, maka masa jabatan Anggota Direksi tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Anggota Direksi lainnya yang telah ada.

Pada akhir masa jabatannya Direksi harus membuat laporan yang disebut Memori Akhir Jabatan yang memuat secara lengkap informasi mengenai masalah penting yang dihadapi dan keputusan yang diambil, langkah-langkah yang telah diambil serta proyeksi kondisi Perusahaan di masa yang akan datang.

Memori Akhir Jabatan dibuat oleh masing-masing Anggota Direksi sesuai dengan lingkup bidang yang menjadi tanggung jawabnya sedangkan Memori Akhir Jabatan Direktur Utama mencakup seluruh bidang secara terintegrasi. Memori Akhir Jabatan disampaikan oleh Direksi yang telah selesai masa jabatannya kepada Direksi yang baru pada saat serah terima jabatan sebagai dokumen penting dalam Program Pengenalan Direksi.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Seorang Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perusahaan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perusahaan lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya dan berkewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS.

PENILAIAN KELAYAKAN DAN KEPATUTAN DIREKSI

Sebelum diangkat dan ditetapkan sebagai anggota Direksi, setiap calon anggota Direksi harus lulus dalam uji kelayakan dan kepatutan dan mendapatkan persetujuan dari PT Indonesia Power. Per 31 Desember 2023, seluruh anggota Direksi telah mendapat persetujuan dari PT Indonesia Power.

If a member of the Board of Directors resign or dismissed before his/her term of office ends, the term of office of the replacement is the remaining term of office of the member of the Board of Directors he/she replaced. Likewise, if there is an additional member of the Board of Directors, then the term of office of the member of the Board of Directors will end simultaneously with the end of the term of office of the other member of the Board of Directors who has existed.

At the end of their term of office, the Board of Directors shall make a report called End of Service Memorandum which contains complete information regarding important issues faced and resolutions taken, steps taken and projections of the Company's condition in the future.

End of Service Memorandum is conveyed by the Board of Directors who have finished their term of office to the new Board of Directors at the time of handover as an important document in the Board of Directors Induction Program.

MECHANISM OF RESIGNATION AND DISMISSAL OF THE BOARD OF DIRECTORS

Member of the Board of Directors has right to resign from his/her position by notifying in writing regarding his/her intention to the Company with copies to the Shareholders, the Board of Commissioners and other members of the Board of Directors of the Company no later than 30 (thirty) days before the date of his/her resignation and is obliged to convey accountability for his/her actions that have not yet been accepted by the GMS.

FIT AND PROPER TEST OF THE BOARD OF DIRECTORS

Prior to being appointed as a member of the Board of Directors, each prospective member of the Board of Directors shall pass the fit and proper test and obtain approval from PT Indonesia Power. As of December 31, 2023, all members of the Board of Directors have received approval from PT Indonesia Power.

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Date
Ade Hendratno	Direktur Utama President Director	28 Maret 2022 March 28, 2022
R. Triyono Budi P	Direktur Sumber Daya Manusia Director of Human Capital	28 Maret 2022 March 28, 2022
Kukuh Pambudi	Direktur Bisnis Director of Business	28 Maret 2022 March 28, 2022
Mulyadi	Direktur Operasi Director of Operations	21 Juli 2022 July 21, 2022
Hari Muhandani Nasution	Direktur Keuangan Director of Finance	28 Maret 2022 March 28, 2022

TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Tugas

Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan dan bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Tugas terkait Rapat Umum Pemegang Saham

Dalam hubungannya dengan Pemegang Saham, Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS serta dokumen-dokumen terkait dengan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan berupa laporan kegiatan Perusahaan termasuk laporan keuangan baik dalam bentuk Laporan Tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala, serta dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang dokumen Perusahaan;
3. Menandatangani Laporan Tahunan, dalam hal Anggota Direksi tidak menandatangani Laporan Tahunan, maka harus disebutkan alasannya.

DUTIES, OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

Duties

The Board of Directors as an organ of the company has collegial duties and responsibilities in managing the company and is tasked with carrying out all actions related to the management of the Company for the benefit of the Company and in accordance with the aims and objectives of the Company and representing the Company both inside and outside the Court on all matters and all events with boundaries as stipulated in laws and regulations, Articles of Association and/or GMS Resolutions.

Duties related to the General Meeting of Shareholders

In relation to Shareholders, the Board of Directors has the following duties and responsibilities:

1. Obligated to organize and keep the Register of Shareholders, Special List, Minutes of the GMS and documents related to the GMS in accordance with the provisions of laws and regulations;
2. Provide accountability and all information regarding the condition and operation of the Company in the form of reports on the Company's activities including financial statements both in the form of Annual Report and in the form of periodic reports, as well as the Company's financial documents as referred to in the Law on Company document;
3. Sign the Annual Report, in the event that a Member of the Board of Directors does not sign the Annual Report, the reason shall be stated.

4. Memanggil dan menyelenggarakan RUPS Tahunan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
 5. Mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar luas/nasional di wilayah Republik Indonesia mengenai pembuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perusahaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan pembuatan hukum tersebut.
 6. Mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar luas/nasional di wilayah Republik Indonesia mengenai rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan perubahan badan hukum Perusahaan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.
 7. Menyediakan bahan RUPS kepada Pemegang Saham secara cuma-cuma.
 8. Menyediakan akses serta penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS agar dapat melaksanakan berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
 9. Memberikan Risalah RUPS jika diminta oleh Pemegang Saham.
 10. Meminta persetujuan RUPS jika akan dilakukan perubahan Anggaran Dasar.
 11. Memastikan pelaksanaan keputusan yang dibuat dalam RUPS.
4. Summon and convene the Annual GMS in accordance with the procedures stipulated in the Articles of Association and laws and regulations.
 5. Announce in 2 (two) daily newspapers in the Indonesian language which are published and circulated widely/nationally in the territory of the Republic of Indonesia regarding legal action to transfer or make as collateral for debt or release rights over the Company's assets no later than 30 (thirty) days from the date of since the legal act was carried out.
 6. Announce in 2 (two) daily newspapers in the Indonesian language which are published and circulated widely/nationally in the territory of the Republic of Indonesia regarding the planned merger, consolidation, acquisition, separation and change of legal entity of the Company no later than 14 (fourteen) days prior to the call for the GMS.
 7. Provide GMS materials to Shareholders free of charge.
 8. Provide access as well as complete explanation and accurate information regarding the implementation of the GMS so that it can be implemented based on the Articles of Association and laws and regulations.
 9. Provide Minutes of GMS if requested by Shareholders.
 10. Request approval from the GMS if amendment to the Articles of Association is to be made.
 11. Ensuring the implementation of resolutions made at the GMS.

Tugas terkait dengan Dewan Komisaris

Dalam hubungan dengan Dewan Komisaris, tugas dan kewajiban Direksi adalah:

1. Melaporkan pelaksanaan rencana jangka panjang dan rencana tahunan Perusahaan serta hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaannya
2. Memastikan bahwa Dewan Komisaris memperoleh informasi yang akurat dan cukup yang memungkinkan Dewan Komisaris melakukan tugasnya mengawasi kinerja Perusahaan, termasuk informasi mengenai rekomendasi dari Auditor Internal. Mekanisme penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dilakukan melalui media antara lain;

Duties related to the Board of Commissioners

In relation to the Board of Commissioners, the duties and responsibilities of the Board of Directors are:

1. Reporting on the implementation of the Company's long-term plan and annual plan and the obstacles encountered in its implementation
2. Ensuring that the Board of Commissioners obtains accurate and sufficient information to enable the Board of Commissioners to fulfill its duties of supervising the Company's performance, including information regarding recommendations from the Internal Auditor. The mechanism for conveying information to the Board of Commissioners is implemented via media, including;

- Rapat Konsultatif Dewan Komisaris – Direksi, Laporan secara berkala maupun Surat dari Direksi.
- Untuk penyampaian informasi yang bersifat segera dapat disampaikan melalui komunikasi langsung (tatap muka dan melalui telepon) maupun melalui media elektronik antara lain; email, pesan singkat dan media lainnya.
- Penggunaan media komunikasi sebagaimana dimaksud pada no. 2 dan 3 disesuaikan dengan tingkat kerahasiaan informasi yang akan disampaikan.
- Menghadiri rapat Dewan Komisaris jika diminta dan memberikan informasi sebagaimana dibutuhkan mengenai kondisi aktual Perusahaan.
- Board of Commissioners – Board of Directors Consultative Meeting, Periodic Report and Letter from the Board of Directors.
- Immediate delivery of information can be delivered through direct communication (face to face and by telephone) or through electronic media, including; e-mail, short messages and other media.
- The use of communication media as referred to in no. 2 and 3 adjusted to the level of confidentiality of the information to be conveyed.
- Attending meeting of the Board of Commissioners when requested and provide information as needed regarding actual condition of the Company.

Tugas terkait dengan Manajemen Risiko

1. Menyusun kebijakan manajemen risiko yang memuat: kerangka, tahapan pelaksanaan manajemen risiko, pelaporan risiko dan penanganannya. Kebijakan Manajemen Risiko disosialisasikan kepada seluruh karyawan Perusahaan;
2. Memiliki fungsi yang bertugas melaksanakan program manajemen risiko Terdapat rencana kerja Perusahaan untuk menerapkan kebijakan Manajemen Risiko;
3. Melakukan sosialisasi Kebijakan manajemen risiko kepada seluruh karyawan Perusahaan;
4. Menyusun rencana kerja Perusahaan untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko;
5. Melaksanakan program manajemen risiko (program manajemen risiko antara lain mencakup identifikasi dan penanganan risiko pada proses bisnis, proyek maupun usulan tindakan Perusahaan yang harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan/ atau RUPS);
6. Melaksanakan pemantauan terhadap program manajemen risiko;
7. Melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris.

Duties related to Risk Management

1. Develop a risk management policy that includes: framework, stages of risk management implementation, risk reporting and handling. The Risk Management Policy is socialized to all employees of the Company;
2. Has a function in charge of implementing a risk management program. There is a Company work plan to implement Risk Management policy;
3. Socialization of risk management policy to all employees of the Company;
4. Prepare the Company's work plan to implement risk management policy;
5. Conducting risk management program (including identifying and managing risks in business processes, projects and proposed actions of the Company which shall obtain approval from the Board of Commissioners and/or GMS);
6. Implement monitoring of the risk management program;
7. Reporting the implementation of risk management to the Board of Commissioners.

Tugas terkait dengan Perencanaan Strategis dan Evaluasi Kinerja Perusahaan

1. Menetapkan visi, misi dan nilai-nilai Perusahaan.
2. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
3. Menyiapkan rencana pengembangan Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan termasuk rencana-rencana lain yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perusahaan untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham guna mendapatkan pengesahan RUPS.
4. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).
5. Menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai penjabaran rencana tahunan dari RJPP.
6. Mengembangkan manajemen produksi yang berorientasi kepada pasar dengan tetap melaksanakan kewajiban Perusahaan
7. Mengembangkan manajemen niaga dan pengembangan usaha yang ditujukan pada peningkatan aset Perusahaan.
8. Mengembangkan sistem manajemen berdasarkan kinerja (*Performance Management*).
9. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya.
10. Mengembangkan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi.
11. Menetapkan remunerasi bagi pegawai untuk memastikan kondisi kesejahteraan yang baik sesuai dengan kemampuan Perusahaan.
12. Mengupayakan tercapainya target-target jangka pendek yang tercantum dalam RKAP.
13. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan audit Internal dan audit eksternal (KAP).

Selain itu, Direksi juga memiliki tugas lain terkait dengan Anak Perusahaan (*Subsidiary Governance*) dan/atau Perusahaan Patungan serta menjalankan tugas dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Duties related to Strategic Planning and Corporate Performance Evaluation

1. Define the vision, mission and values of the Company.
2. Seeking and guarantee the implementation of the Company's business and activities in accordance with the aims and objectives and business activities.
3. Prepare the Company's development plan, Work Plan and Company Budget including other plans related to the implementation of the Company's business and activities to be submitted to the Board of Commissioners and Shareholders in order to obtain approval from the GMS.
4. Prepare the Company's Long Term Plan (RJPP).
5. Prepare the Company's Work Plan and Budget (RKAP) as an elaboration of the annual plan from the RJPP.
6. Developing market-oriented production management while continuing to carry out the Company's obligations.
7. Developing trade management and business development aimed at increasing the Company's assets.
8. Developing management system based on performance (*Performance Management*).
9. Prepare the organizational structure of the Company complete with details of its duties.
10. Prepare competency-based human capital management.
11. Determine remuneration for employees to ensure good welfare conditions in accordance with the Company's capabilities.
12. Strive to achieve short-term targets listed in the RKAP.
13. Follow up the results of internal audit and external audit (KAP).

In addition, the Board of Directors also has other duties related to Subsidiary Governance and/or Joint Venture Companies and conduct other duties and obligations in accordance with the provisions stipulated in the Articles of Association and determined by the General Meeting of Shareholders based on laws and regulations.

Kewajiban

Anggota Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Perusahaan dan menyiapkan rancangan Rencana Jangka Panjang (RJP) bersama dengan Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan RUPS. Selain RJP, Direksi juga berkewajiban menyiapkan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Tanggung Jawab

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar. Setiap Anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan. Dalam hal Direksi terdiri dari 2 (dua) Anggota Direksi atau lebih, maka tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap Anggota Direksi.

HAK DAN WEWENANG

Hak-hak Direksi

1. Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan, termasuk memberikan informasi kepada publik.
2. Melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan serta mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan atau pihak lain dengan Perusahaan dengan pembatasan-pembatasan tertentu yang telah ditetapkan.
3. Menetapkan kebijakan dalam memimpin dan mengurus Perusahaan.
4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan RUPS.
5. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Obligation

Members of the Board of Directors shall devote their full energy, thought and attention to the duties, obligations and achievement of the Company's goals and prepare a draft Long Term Plan (RJP) together with the Board of Commissioners to obtain approval from the GMS. In addition to the RJP, the Board of Directors is also obliged to prepare a draft Company Work Plan and Budget (RKAP).

Responsibility

The Board of Directors is fully responsible for managing the Company for the interests and objectives of the Company and for representing the Company both inside and outside the court in accordance with the provisions of the Articles of Association. Each member of the Board of Directors is personally fully responsible for the Company's losses if the person concerned is guilty or negligent in carrying out his duties for the interests and business of the Company. In the event that the Board of Directors consists of 2 (two) or more members of the Board of Directors, then this responsibility applies jointly and severally to each member of the Board of Directors.

RIGHTS AND AUTHORITIES

Rights of the Board of Directors

1. Represent the Company inside and outside of the court, including providing information to the public.
2. Conducting all actions and deeds both regarding management as well as regarding ownership and binding the Company with other parties and or other parties with the Company with certain predetermined boundaries.
3. Establish policies in leading and managing the Company.
4. Regulate the provisions regarding the Company's employment including determination of salary, pension or old age benefits as well as other income for the Company's employees based on the applicable laws and regulations and resolutions of the GMS.
5. Appoint and dismiss the Company's employees based on the Company's employment regulation and applicable laws and regulations.

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>6. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang Anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perusahaan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain.</p> <p>7. Menjalankan tindakan-tindakan lain, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan ketetapan RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>8. Menghapuskan Aset Perusahaan yang tidak produktif sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh RUPS yang selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam RUPS.</p> <p>9. Menerima gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya, termasuk santunan purna jabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS.</p> <p>10. Menerima tantiem apabila Perusahaan menunjukkan peningkatan kinerja yang ditunjukkan dengan pelampauan target yang harus dicapai meskipun belum mempunyai saldo laba yang positif.</p> <p>11. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi berhak memperoleh perlindungan hukum yang menjadi biaya Perusahaan.</p> | <p>6. Regulate the transfer of authorities of the Board of Directors to represent the Company inside and outside the court to a person or several members of the Board of Directors specifically appointed for that purpose or to one or several employees of the Company either individually or jointly or to other persons or entities.</p> <p>7. Carry out other actions, both regarding management and ownership, in accordance with the provisions stipulated in the Articles of Association and stipulation of the GMS in accordance with the applicable laws and regulations.</p> <p>8. Eliminate unproductive Company Assets up to a certain value determined by the GMS which is then reported and accounted for in the GMS.</p> <p>9. Receive salary and other facilities and/or benefits, including post-employment benefits, the amount of which is determined by the GMS.</p> <p>10. Receive bonus if the Company shows an increase in performance as indicated by exceeding targets that shall be achieved even though it does not yet have a positive profit balance.</p> <p>11. In conducting their duties, the Board of Directors has the right to obtain legal protection at the expense of the Company.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Wewenang

Secara umum, Direksi memiliki wewenang kolektif yang dapat dilimpahkan kepada masing-masing Anggota Direksi untuk hal-hal khusus. Namun demikian, pelimpahan wewenang hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat operasional. Adapun untuk hal-hal yang bersifat strategis, kewenangan sepenuhnya tetap berada pada Direksi dan tidak dapat dilimpahkan sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

1. Memutuskan kegiatan-kegiatan dengan nilai per transaksi sebesar maksimal 5% (lima persen) dari ekuitas Perusahaan didasarkan pada tahun buku terakhir yang telah diaudit, termasuk kegiatan sebagai berikut:
 - Mengadakan transaksi, kontrak, perjanjian, kesepakatan dan/atau kerjasama dengan pihak lain;
 - Menerbitkan *Standby Letter of Credit* (SBLC) dan *Letter of Credit* (LC) yang timbul karena transaksi bisnis;
 - Menerima atau memberikan pinjaman yang tidak bersifat operasional;

Authorities

In general, the Board of Directors has collective authority which can be delegated to each member of the Board of Directors for special matters. However, the delegation of authority can only be carried out on operational matters. As for strategic matters, full authority remains with the Board of Directors and cannot be delegated as stipulated in the Company's Articles of Association.

1. Decide on activities with a maximum per transaction value of 5% (five percent) of the Company's equity based on the last audited financial year, including the following activities:
 - Enter into transactions, contracts, agreements, and/or collaborations with other parties;
 - Issuing *Standby Letter of Credit* (SBLC) and *Letter of Credit* (LC) arising from business transactions;
 - Receive or provide non-operational loans;

- Menerima pinjaman jangka pendek dari bank atau lembaga keuangan lain.
2. Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;

- Receive short-term loans from banks or other financial institutions.
2. Establish and adjust the organizational structure 1 (one) level below the Board of Directors after obtaining approval from the Board of Commissioners;

PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Pembagian tugas Direksi ditetapkan oleh RUPS, namun wewenang tersebut dapat dilimpahkan oleh RUPS kepada Dewan Komisaris. Uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. SK No.020.K/CDB/IV/2022 tanggal 01 April 2022 tentang Struktur Organisasi PT Cogindo DayaBersama dimana ruang lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi yaitu sebagai berikut:

DIVISION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

The division of duties for the Board of Directors is determined by the GMS, but this authority can be delegated by the GMS to the Board of Commissioners. The description of the duties and responsibilities of each Board of Directors is regulated in the Decree of the Board of Directors No. SK No.020.K/CDB/IV/2022 dated April 1, 2022 on the Organizational Structure of PT Cogindo DayaBersama where the scope of duties and responsibilities of each Board of Directors is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas Field of Duties
Ade Hendratno	Direktur Utama President Director	Menetapkan arah, kebijakan dan strategi perusahaan jangka panjang dan jangka pendek serta menjaga agar pengelolaan Perusahaan berjalan sesuai dengan arah, kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan. Establish long-term and short-term direction, policies and strategies of the company and ensure that the management of the Company goes according to the directions, policies and strategies that have been set.
R. Triyono Budi P	Direktur Sumber Daya Manusia Director of Human Capital	Menerjemahkan kebijakan dan strategi Perusahaan di bidang SDM dan sistem informasi ke dalam proses bisnis, prosedur dan aturan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan perencanaan SDM, pengembangan organisasi, pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan hubungan industrial, pengelolaan budaya perusahaan, manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, mengelola kegiatan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan standar kompetensi Perusahaan, serta melakukan koordinasi sesuai fungsi utama dengan pihak internal dan eksternal dalam pengelolaan kegiatan perusahaan. Translate Company policies and strategies in the field of HC and information system into business processes, procedures and rules, carry out guidance and supervision of HC planning activities, organizational development, management and development of human capital, management of industrial relation, management of corporate culture, change management, management knowledge, managing activities and coordinating the implementation of education and training on the Company's competency standards, as well as coordinate according to the main function with internal and external parties in managing company activities.
Kukuh Pambudi	Direktur Bisnis Director of Business	Menetapkan kebijakan dan strategi Perusahaan ke dalam proses bisnis, prosedur dan aturan pada fungsi pengembangan produk dan layanan baru, perluasan pasar produk dan layanan eksisting, peningkatan lingkup dan maturitas bisnis pada produk dan layanan eksisting, pengelolaan portofolio bisnis perusahaan, pengelolaan hubungan dan kepuasan pelanggan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pengembangan bisnis dan <i>Customer Relationship Management</i> , perencanaan proyek bisnis perusahaan, gas dan <i>diesel engine services</i> termasuk rencana investasi Perusahaan dan jenis produk Perusahaan serta melakukan koordinasi sesuai dengan fungsi utama dengan pihak internal dan eksternal dalam pengelolaan kegiatan perusahaan. Establish Company policies and strategies into business processes, procedures and rules for the function of developing new products and services, expanding the market for existing products and services, increasing the scope and maturity of business on existing products and services, managing the company's business portfolio, managing customer relationship and satisfaction, carry out guidance and supervision of the implementation of business development activities and Customer Relationship Management, planning company business projects, gas and diesel engine services including the Company's investment plans and types of Company products and coordinate according to the main function with internal and external parties in managing company activities.

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas Field of Duties
Mulyadi	Direktur Operasi Director of Operations	<p>Menerjemahkan kebijakan dan strategi Perusahaan ke dalam proses bisnis, prosedur dan aturan pada fungsi <i>asset management</i>, penyediaan jasa operasi dan pemeliharaan, pelayanan engineering dan inovasi, jasa repair dan pemeliharaan, melaksanakan pembinaan kepatuhan K3 dan Lingkungan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan <i>asset management</i>, jasa operasi pemeliharaan, kegiatan layanan <i>engineering</i>, perencanaan energi, manajemen energi, <i>settlement</i>, transaksi energi, serta hubungan pelanggan serta melakukan koordinasi sesuai dengan fungsi utama dengan pihak internal dan eksternal.</p> <p>Translate the Company policies and strategies into business processes, procedures and rules on the asset management function, providing operations and maintenance services, engineering and innovation services, repair and maintenance services, carrying out OSH and Environmental compliance coaching, carrying out coaching and supervision of the implementation of asset management, maintenance operation services, engineering service activities, energy planning, energy management, settlement, energy transactions, and customer relations as well as coordinate according to the main function with internal and external parties.</p>
Hari Muhardani Nasution	Direktur Keuangan Director of Finance	<p>Menerjemahkan kebijakan dan strategi Perusahaan di bidang keuangan, risiko dan kinerja korporat ke dalam proses bisnis, prosedur dan aturan; melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan anggaran, <i>treasury</i>, perpajakan, akuntansi, asuransi, pengembangan strategi perusahaan (RJPP), pengelolaan risiko, kinerja perusahaan, penyusunan proses bisnis, pengembangan sistem manajemen korporasi dan sistem manajemen terpadu serta melakukan koordinasi sesuai fungsi utama dengan pihak internal dan eksternal dalam pengelolaan kegiatan perusahaan.</p> <p>Translate Company policies and strategies in the areas of finance, risk and corporate performance into business processes, procedures and rules; carry out guidance and supervision of budget, treasury, taxation, accounting, insurance, corporate strategy development (RJPP), risk management, company performance, preparation of business processes, development of corporate management system and integrated management system as well as coordinate according to the main function with internal and external parties in the management of company activities.</p>

KEPUTUSAN, REKOMENDASI DAN PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI

Selama tahun 2023, Direksi melaksanakan *site visit* ke unit-unit kerjanya. Direksi melakukan kunjungan sebanyak 26 kali dalam satu tahun dengan rincian sebagai berikut :

RECOMMENDATION AND IMPLEMENTATION OF DUTIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

During 2023, the Board of Directors conducted site visits to its working units. The Board of Directors conducted 26 site visits in one year with the following details:

No.	Tanggal Date	Direksi The Board of Directors	Jabatan Position	Uraian Description
1.	01-04 Februari 2023 February 01-04, 2023	Mulyadi	Direktur Operasi Director of Operation	Direktur Operasi melakukan kunjungan ke PLTU Labuan Angin, PT PLN (Persero) Belawan & Nias Director of Operations visited Labuan Angin PLTU, PT PLN (Persero) Belawan & Nias
2.	01-03 Februari 2023 February 01-03, 2023	R. Triyono Budi P	Direktur SDM Director of Human Capital	Direktur SDM melakukan kunjungan ke PLTU Sumsel 8 Director of Human Capital visited Sumsel 8 PLTU
3.	08-12 Februari 2023 February 08-12, 2023	Hari Muhardani Nasution	Direktur Keuangan Director of Finance	Direktur Keuangan melakukan kunjungan ke PLTU Ombilin, PLTU Teluk Sirih & UPDK Bukittinggi Director of Finance visited Ombilin PLTU, Teluk Sirih PLTU & Bukittinggi UPDK.
4.	08-10 Februari 2023 February 08-10, 2023	R. Triyono Budi P	Direktur SDM Director of Human Capital	Direktur SDM melakukan kunjungan ke PLTU Ombilin, PLTU Teluk Sirih & UPDK Bukittinggi Director of Human Capital visited Ombilin PLTU, Teluk Sirih PLTU & UPDK Bukittinggi
5.	08-10 Februari 2023 February 08-10, 2023	Kukuh Pambudi	Direktur Bisnis Director of Business	Direktur Bisnis melakukan kunjungan ke UPDK Mahakam Director of Business visited UPDK Mahakam

No.	Tanggal Date	Direksi The Board of Directors	Jabatan Position	Uraian Description
6.	15-19 Februari 2023 February 08-10, 2023	Ade Hendratno	Direktur Utama President Director	Direktur Utama melakukan kunjungan ke PLTU Adipala President Director visited Adipala PLTU
7.	22-24 Februari 2023 February 22-24, 2023	Mulyadi	Direktur Operasi Director of Operation	Direktur Operasi melakukan kunjungan ke UPDK Barito & PT PLN (Persero) UPK Asam-Asam Director of Operations visited Barito UPDK & PT PLN (Persero) Asam-Asam UPK
8.	13-14 April 2023 April 13-14, 2023	Ade Hendratno	Direktur Utama President Director	Direktur Utama melakukan kunjungan ke PLTD Tenau President Director visited Tenau PLTD
9.	13-14 April 2023 April 13-14, 2023	Mulyadi	Direktur Operasi Director of Operation	Direktur Operasi melakukan kunjungan ke PLTU Jeranjang Director of Operations visited Jeranjang PLTU
10.	08 Mei 2023 May 08, 2023	Ade Hendratno	Direktur Utama President Director	Direktur Utama melakukan kunjungan ke PLTU Banten 2 Labuan PGU President Director visited Banten 2 Labuan PGU PLTU
11.	17-18 Mei 2023 May 17-18, 2023	Kukuh Pambudi	Direktur Bisnis Director of Business	Direktur Bisnis melakukan kunjungan ke UPDK pulau Riau (pri) Director of Business visited Riau island UPDK (pri)
12.	29-31 Mei 2023 May 29-31, 2023	Mulyadi	Direktur Operasi Director of Operation	Direktur Operasi melakukan kunjungan ke PLTU Pangkalan Susu Director of Operations visited the Pangkalan Susu power plant
13.	05-06 Juni 2023 June 05-06, 2023	Kukuh Pambudi	Direktur Bisnis Director of Business	Direktur Bisnis melakukan kunjungan ke UPDK Bengkulu Director of Business visited Bengkulu UPDK
14.	07 Juni 2023 June 07, 2023	Ade Hendratno	Direktur Utama President Director	Direktur Utama melakukan kunjungan ke PLTP Kamojang POMU President Director visited Kamojang POMU PLTP
15.	04-08 Juli 2023 July 04-08, 2023	Mulyadi	Direktur Operasi Director of Operation	Direktur Operasi melakukan kunjungan ke PLTD Nusa Penida Director of Operations visited Nusa Penida PLTD
16.	13-14 Juli 2023 July 13-14, 2023	Kukuh Pambudi	Direktur Bisnis Director of Business	Direktur Bisnis melakukan kunjungan ke PLTU Pelabuhan Ratu Director of Business visited Pelabuhan Ratu PLTU
17.	25 Juli 2023 July 25, 2023	Kukuh Pambudi	Direktur Bisnis Director of Business	Direktur Bisnis melakukan kunjungan ke PLTU Suralaya Director of Business visited Suralaya PLTU
18.	31 Juli-02 Agustus 2023 July 31- August 02, 2023	R. Triyono Budi P	Direktur SDM Director of Human Capital	Direktur SDM melakukan kunjungan ke PLTU Kalbar 1 Director of Human Capital visited Kalbar 1 PLTU
19.	30 Agustus-01 September 2023 August 30-01 September, 2023	Kukuh Pambudi	Direktur Bisnis Director of Business	Direktur Bisnis melakukan kunjungan ke UPDK Barito dan UPK Asam-Asam Director of Business visited Barito UPDK and Asam-Asam UPK
20.	11-12 September 2023 September 11-12, 2023	Mulyadi	Direktur Operasi Director of Operation	Direktur Operasi melakukan kunjungan ke BMPP Ambon Director of Operations visited Ambon BMPP
21.	14-17 September 2023 September 14-17, 2023	R. Triyono Budi P	Direktur SDM Director of Human Capital	Direktur SDM melakukan kunjungan ke UPDK Kepulauan Riau Director of Human Capital visited Riau Islands UPDK
22.	22-30 Oktober 2023 October 22-30, 2023	Mulyadi	Direktur Operasi Director of Operation	Direktur Operasi melakukan kunjungan ke UPDK Tello Director of Operations visited Tello UPDK
23.	30 Oktober-02 November 2023 October 30-November 02, 2023	Kukuh Pambudi	Direktur Bisnis Director of Business	Direktur Bisnis melakukan kunjungan ke UPDK Tello Director of Business visited Tello UPDK
24.	02-08 November 2023 November 02-08, 2023	Mulyadi	Direktur Operasi Director of Operation	Direktur Operasi melakukan kunjungan ke PLTD Tello Director of Operations visited Tello PLTD
25.	06-08 November 2023 November 06-08, 2023	Kukuh Pambudi	Direktur Bisnis Director of Business	Direktur Bisnis melakukan kunjungan ke PLTD Tello Director of Business visited Tello PLTD
26.	24 November 2023 November 24, 2023	Kukuh Pambudi	Direktur Bisnis Director of Business	Direktur Bisnis melakukan kunjungan ke PLTA Mrica Director of Business visited Mrica PLTA

Pada tahun 2023, Direksi PT PLN Indonesia Power Services telah mengeluarkan 90 Surat Keputusan yang berkaitan dengan bisnis perusahaan sebagai berikut:

In 2023, the Board of Directors of PT PLN Indonesia Power Services has issued 90 Decrees relating to the business of the company as follows:

No.	Tanggal Date	Nomor Urut Sequence Number	Perihal Subject
1.	2 Januari 2023 January 2, 2023	001.K/CDB/I/2023	Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Aplikasi, Implementasi & Persiapan Asesmen <i>Business Excellence Framework</i> (BEF) Formation of Application Document Preparation Team, Implementation & Preparation for Business Excellence Framework (BEF) Assessment
2.	2 Januari 2023 January 2, 2023	002.K/CDB/I/2023	Inspeksi Motor Area BOP Adipala (<i>Additional Oh BOP Area</i>). Adipala BOP Area Motor Inspection (Additional Oh Bop Area).
3.	2 Januari 2023 January 2, 2023	003.K/CDB/I/2023	Bagan Susunan Jabatan dan Formasi Jabatan Unit Jasa Operasi Pemeliharaan PLTU Kalbar I Position Structure Chart and Position Formation of Kalbar I PLTU Maintenance Operation Services Unit
4.	2 Januari 2023 January 2, 2023	004.K/CDB/I/2023	Tim Penyusunan Laporan Tahunan (<i>Annual Report</i>) PT Cogindo DayaBersama Tahun 2023 Annual Report Preparation Team of PT Cogindo DayaBersama 2023
5.	2 Januari 2023 January 2, 2023	005.K/CDB/I/2023	Penetapan Penghargaan Kecelakaan Nihil (<i>Zero Accident</i>) Di Lingkungan PT Cogindo DayaBersama Tahun 2022 Establishment of Zero Accident Award within PT Cogindo DayaBersama in 2022
6.	2 Januari 2023 January 2, 2023	005.1.K/CDB/I/2023	Tim <i>Self-Assessment</i> Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) PT Cogindo Dayabersama Tahun 2022 Self-Assessment Implementation Team of Good Corporate Governance (GCG) PT Cogindo Dayabersama 2022
7.	2 Januari 2023 January 2, 2023	005.2.K/CDB/I/2023	Pedoman Pelaksanaan Bisnis <i>Stockist</i> Stockist Business Implementation Guidelines
8.	3 Januari 2023 January 3, 2023	005.3.K/CDB/I/2023	Tim Pelaksana Kegiatan Implementasi Pengadaan <i>Renewal Lisensi Software Reliance Program (SRP) PI System</i> PT Indonesia Power Tahun 2023 Implementation Team for The Procurement of Software License Renewal Reliance Program (SRP) PI System PT Indonesia Power In 2023
9.	5 Januari 2023 January 5, 2023	006.K/CDB/I/2023	Tim Inventarisasi <i>Tools</i> PT Cogindo Dayabersama Tahun 2023 PT Cogindo Dayabersama Tools Inventory Team 2023
10.	17 Januari 2023 January 17, 2023	009.K/CDB/I/2023	Pengadaan Jasa Major Inspeksi MSM Procurement of Major MSM Inspection Services
11.	30 Januari 2023 January 30, 2023	010.K/CDB/I/2023	Pekerjaan Jasa <i>Rework HPH & Chain Grate Unit 2</i> PLTU Sintang OMU Rework Service Work HPH & Chain Grate Unit 2 Sintang OMU PLTU
12.	2 Februari 2023 February 2, 2023	011.K/CDB/II/2023	Tim Penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2023 - 2027 Company Long-Term Plan (Rjpp) Preparation Team 2023 - 2027
13.	6 Februari 2023 February 6, 2023	012.K/CDB/II/2023	Uraian Jabatan Pegawai Kantor Pusat CDB CDB Head Office Employee Job Description
14.	15 Februari 2023 February 15, 2023	015.K/CDB/II/2023	Tim Review dan Penyempurnaan Struktur Organisasi CDB 2023 CDB Organizational Structure Review and Refinement Team 2023
15.	21 Februari 2023 February 21, 2023	018.K/CDB/II/2023	Tim Pelaksana <i>Overhaul Pulverizer Mill</i> PLTU Kalbar-1 2x100 MW Implementation Team For Pulverizer Mill Overhaul Of 2x100 Mw Kalbar-1 Pltu
16.	27 Februari 2023 February 27, 2023	021.K/CDB/II/2023	Jasa Penggantian <i>Barrel dan Seal/BFPT A</i> PLTU Banten 1 Suralaya Barrel and Seal Replacement Services BFPT A Banten 1 Suralaya PLTU
17.	27 Februari 2023 February 27, 2023	022.K/CDB/II/2023	Pembentukan Tim Kesiapan AMC PLTU Kalbar 1 Establishment of AMC Readiness Team for the Kalbar 1 PLTU
18.	1 Maret 2023 March 1, 2023	023.K/CDB/III/2023	Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Sistem Katalog di Lingkungan PT Cogindo DayaBersama Implementation Guidelines for the Use of the Catalog System within PT Cogindo DayaBersama
19.	5 Maret 2023 March 5, 2023	024.K/CDB/III/2023	Pedoman Pelaksanaan <i>Sponsorship</i> di Lingkungan PT Cogindo Dayabersama Guidelines for The Implementation of Sponsorship Within PT Cogindo Dayabersama
20.	6 Maret 2023 March 6, 2023	026.K/CDB/III/2023	Panitia Penyelenggara Acara Hut Ke-25 PT Cogindo Dayabersama PT Cogindo Dayabersama 25 th Anniversary Event Organizing Committee
21.	6 Maret 2023 March 6, 2023	027.K/CDB/III/2023	Penetapan Penggunaan Pakaian Dinas Determination of the Use of Office Clothing
22.	27 Maret 2023 March 27, 2023	036.K/CDB/III/2023	Jasa <i>Overhaul Simple Inspection (SI) B-T-G Unit 1 dan 2</i> PLTU Sanggau Simple Inspection (SI) Overhaul Services B-T-G Unit 1 and 2 Sanggau PLTU

No.	Tanggal Date	Nomor Urut Sequence Number	Perihal Subject
23.	27 Maret 2023 March 27, 2023	037.K/CDB/III/2023	Pembentukan Tim Agen Perubahan Establishment of a Change Agent Team
24.	28 Maret 2023 March 28, 2023	039.K/CDB/III/2023	Pembentukan Tim Siaga Gangguan Unit Establishment of Unit Disturbance Standby Team
25.	26 April 2023 April 26, 2023	045.K/CDB/IV/2023	Jasa Tenaga Bantu Kapitalisir <i>Overhaul</i> 24000 Jam PLTMG Sorong Unit 1,2,3,4,5, Pltmg Biak, Pltmg Timika, Pltmg Manokwari Unit 1,2 24000 Hours Capitalization Overhaul Services of Sorong PLTMG Unit 1,2,3,4,5, Biak PLTMG, Timika PLTMG, Manokwari PLTMG Unit 1,2
26.	26 April 2023 April 26, 2023	046.K/CDB/IV/2023	2023 OTG MO PLTD #2 - Pekerjaan Major <i>Overhaul</i> PLTD 2023 OTG MO PLTD #2 - PLTD Major Overhaul Work
27.	2 Mei 2023 May 2, 2023	052.K/CDB/V/2023	Perubahan Susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Changes in The Composition of The Occupational Safety and Health Supervisory Committee (P2K3)
28.	2 Mei 2023 May 2, 2023	053.K/CDB/V/2023	Kebijakan Khusus Pencegahan dan Penanggulangan Hiv/Aids Di Tempat Kerja Special Policy for Prevention and Control of HIV/Aids in The Workplace
29.	4 Mei 2023 May 4, 2023	057.K/CDB/V/2023	Pedoman Pembentukan Tim Siaga KTT Asean Guidelines for The Establishment of The Asean Summit Standby Team
30.	10 Mei 2023 May 10, 2023	064.K/CDB/V/2023	Jasa <i>Major Overhaul</i> 72.000 Jam <i>Ship Unloader</i> 1 PLTU Jabar 2 Pelabuhan Ratu PGU Major Overhaul Service 72,000 Hours Ship Unloader 1 Jabar 2 PLTU of Ratu Port PGU
31.	15 Mei 2023 May 15, 2023	067.K/CDB/V/2023	Kebijakan Khusus Kawasan Bebas Asap Rokok Smoke-Free Area Special Policy
32.	19 Mei 2023 May 19, 2023	070.K/CDB/V/2023	Pedoman Pembentukan Tim Klaim Asuransi Guidelines for The Establishment of an Insurance Claims Team
33.	23 Mei 2023 May 23, 2023	074.K/CDB/V/2023	Tim Penghapusan Aset Asset Write-Off Team
34.	23 Mei 2023 May 23, 2023	075.K/CDB/V/2023	Pengadaan Jasa <i>Time Based Maintenance</i> 32000 Jam PLTMG Sei Gelam 8 Unit Procurement of Time Based Maintenance Services 32000 Hours Sei Gelam PLTMG 8 Units
35.	30 Mei 2023 May 30, 2023	075.1.K/CDB/V/2023	Pengawasan Mutu Barang /Jasa Pada PT Cogindo DayaBersama Quality Control of Goods/Services at PT Cogindo DayaBersama
36.	5 Juni 2023 June 5, 2023	076.K/CDB/VI/2023	Tim Pelaksanaan PM-24K PLTMG Nias Implementation Team of PM-24K Nias PLTMG
37.	13 Juni 2023 June 13, 2023	082.K/CDB/VI/2023	Tim <i>Assesment</i> Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan Occupational Safety and Health Management System (SMK3) and ISO 14001:2015 Environmental Management System Assessment Team
38.	19 Juni 2023 June 19, 2023	084.K/CDB/VI/2023	Pengadaan dan Pemasangan Motor CWP Unit 4 MI Unit 4 PLTP Ulumbu Procurement and Installation of CWP Motor Unit 4 MI Unit 4 Ulumbu PLTP
39.	20 Juni 2023 June 20, 2023	086.K/CDB/VI/2023	Tim Pelaksana PM 36K PLTD Nusa Penida Implementation Team of PM 36K Nusa Penida PLTD
40.	21 Juni 2023 June 21, 2023	088.K/CDB/VI/2023	Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Cogindo Dayabersama Guidelines for The Procurement of Goods/Services within PT Cogindo Dayabersama
41.	22 Juni 2023 June 22, 2023	090.K/CDB/VI/2023	Penetapan Penilaian Kinerja SMT 2 2022 Determination Performance assessment of Semester 2 2022
42.	5 Juli 2023 July 5, 2023	091.K/CDB/VII/2023	TIM PEMUTAKHIRAN PEDOMAN KEBIJAKAN (SK) POLICY GUIDELINE UPDATING TEAM (SK)
43.	5 Juli 2023 July 5, 2023	092.K/CDB/VII/2023	Tim Penyusunan <i>Roadmap</i> ESG (<i>Environment, Social, & Governance</i>) Tahun 2024-2028 ESG (Environment, Social, & Governance) Roadmap Preparation Team 2024-2028
44.	7 Juli 2023 July 7, 2023	093.K/CDB/VII/2023	Tim Penyusunan Materi TOP GRC <i>Award</i> PT Cogindo DayaBersama Tahun 2023 Team of Material Preparation of TOP GRC Award PT Cogindo DayaBersama 2023
45.	3 Juli 2023 July 3, 2023	094.K/CDB/VII/2023	Tim Penarikan dan Penghapusan Aset Tetap PT Cogindo DayaBersama PT Cogindo DayaBersama Fixed Asset Withdrawal and Removal Team
46.	21 Juli 2023 July 21, 2023	095.K/CDB/VII/2023	Pedoman Penyusunan dan Pemantauan Implementasi Rencana Jangka Panjang (RJP) PT Cogindo Dayabersama Guidelines for Preparing and Monitoring the Implementation of The Long-Term Plan (RJP) PT Cogindo Dayabersama

No.	Tanggal Date	Nomor Urut Sequence Number	Perihal Subject
47.	24 Juli 2023 July 24, 2023	096.K/CDB/VII/2023	Jasa <i>Overhaul Ash Handling</i> Sistem Unit 2 PLTU Pelabuhan Ratu Tahun 2023 Overhaul Service of Ash Handling System Unit 2 of Pelabuhan Ratu PLTU in 2023
48.	24 Juli 2023 July 24, 2023	097.K/CDB/VII/2023	Tentang Bagan Susunan Jabatan dan Formasi Jabatan Unit Jasa dan Operasi PLTU Holtekamp Regarding Position Structure Chart and Position Formation of Holtekamp PLTU Services and Operations Unit
49.	24 Juli 2023 July 24, 2023	099.K/CDB/VII/2023	Tim Pelaksana Kegiatan Implementasi Pengadaan <i>Hardware</i> dan <i>Software PI System</i> Untuk Pengembangan Infrastruktur REOC Implementation Team for The Procurement of Hardware and Software PI System for REOC Infrastructure Development
50.	24 Juli 2023 July 24, 2023	099.1.K/CDB/VII/2023	Kebijakan Keberlanjutan Perusahaan (<i>Corporate Sustainability Policy</i>) berbasis Lingkungan (<i>Environmental</i>), Sosial (<i>Social</i>) dan Tata Kelola (<i>Governance</i>) di Lingkungan PT Cogindo Dayabersama Corporate Sustainability Policy Based on Environmental, Social, and Governance in PT Cogindo Dayabersama Environment
51.	2 Agustus 2023 August 2, 2023	101.K/CDB/VIII/2023	Tentang Bagan Susunan Jabatan dan Formasi Jabatan Unit Jasa Operasi dan Pemeliharaan PLTGU & PLTU Semarang Regarding Position Structure Chart and Position Formation of Operation and Maintenance Services Unit of Semarang PLTGU & PLTU.
52.	1 Agustus 2023 August 1, 2023	101.1.K/CDB/VIII/2023	Penunjukan Penanggung Jawaban Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) Dilingkungan PT Cogindo Daya Bersama Appointment of Person in Charge of Good Corporate Governance within PT Cogindo Daya Bersama
53.	1 Agustus 2023 August 1, 2023	101.2.K/CDB/VIII/2023	Pembentukan Tim Pelaksana Jasa Pendukung Pemeliharaan Dalam Kegiatan Major <i>Overhaul</i> CT-3 Establishment of Maintenance Support Services Implementation Team in CT-3 Major Overhaul Activities
54.	8 Agustus 2023 August 8, 2023	102.K/CDB/VIII/2023	Kebijakan Khusus Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya Di Tempat Kerja Special Policy on Prevention and Countermeasures for Abuse of Narcotics, Psychotropic Substances and Other Addictive Substances in the Workplace
55.	7 Agustus 2023 August 7, 2023	104.K/CDB/VIII/2023	TIM Pelaksana untuk Kegiatan Pekerjaan Pelaksanaan Jasa 2023 ENG RCBM Jasa <i>Adjustment Hanger HP Economizer</i> HRSG 2.3 PLN Indonesia Power Semarang PGU Implementation Team for Work Activities Implementation Services 2023 ENG RCBM Adjustment Services Hanger HP Economizer HRSG 2.3 PLN Indonesia Power Semarang PGU
56.	8 Agustus 2023 August 8, 2023	106.K/CDB/VIII/2023	SK Pedoman Pemutakhiran Kebijakan Perusahaan Decree on Guidelines for Updating Company Policies
57.	18 Agustus 2023 August 18, 2023	107.K/CDB/VIII/2023	Implementasi Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Cogindo Dayabersama Implementation of Goods/Services Procurement Guidelines within PT Cogindo Dayabersama
58.	22 Agustus 2023 August 22, 2023	109.K/CDB/VIII/2023	SK Tim untuk Jasa <i>Overhaul Simple Inspection</i> (SI) Unit 1 PLTU Sintang Decree of Team for Simple Inspection (SI) Overhaul Services Unit 1 Sintang PLTU
59.	1 September 2023 September 1, 2023	117.K/CDB/IX/2023	Tim Pelaksana Kegiatan Pemeliharaan Jasa <i>Simple Inspection Plus Recovery Generator Unit #2</i> PLTP Ulumbu Implementation Team for Maintenance Services of Simple Inspection Plus Recovery Generator Unit #2 Ulumbu PLTP
60.	4 September 2023 September 4, 2023	118.K/CDB/IX/2023	J23EPR-019 ME Unit#2 EP - Jasa <i>Overhaul</i> 14000 Jam <i>Bottom Ash System & Fly Ash System</i> Tahun 2023 J23EPR-019 ME Unit#2 EP - Overhaul Service 14000 Hours Bottom Ash System & Fly Ash System In 2023
61.	7 September 2023 September 7, 2023	121.K/CDB/IX/2023	Tim Pelaksana Kegiatan OH Standar-Investasi-Jasa Borongan Penunjang Pemeliharaan Periodik <i>Overhaul Combustion Inspection</i> GT 4.2 Tahun 2023 Activity Implementation Team OH Standard-Investment-Brokerage Services Supporting Periodic Maintenance Overhaul Combustion Inspection GT 4.2 2023
62.	8 September 2023 September 8, 2023	122.K/CDB/IX/2023	Jasa Tenaga Bantu OH Peralatan Utama Unit 2 PLTP Kamojang Auxiliary Personnel Services OH Main Equipment Unit 2 of The Kamojang Power Plant
63.	14 September 2023 September 14, 2023	126.K/CDB/IX/2023	Jasa <i>Overhaul Emergency Diesel Generator</i> PLTA PBS Tahun 2023 Overhaul Services for Emergency Diesel Generator PLTA PBS in 2023

No.	Tanggal Date	Nomor Urut Sequence Number	Perihal Subject
64.	15 September 2023 September 15, 2023	127.K/CDB/IX/2023	Tim Pelaksana Kegiatan Implementasi <i>Technical Field Advisor</i> (TFA-1) dan <i>Technical Field Advisor</i> (TFA-2) <i>North Power Service Joint Stock Company - Vietnam</i> Implementation of Activity Team of Technical Field Advisor (TFA-1) and Technical Field Advisor (TFA-2) North Power Service Joint Stock Company - Vietnam
65.	21 September 2023 September 21, 2023	131.K/CDB/IX/2023	Penetapan Pegawai Teladan Tingkat Korporat PT Cogindo Dayabersama dan Penghargaan bagi Pemenang Determination of PT Cogindo Dayabersama Corporate Level Exemplary Employees and Awards for Winners
66.	4 Oktober 2023 October 4, 2023	141.K/CDB/X/2023	Komite Pengelola Anak Perusahaan, Perusahaan Patungan dan Perusahaan Asosiasi PT Cogindo DayaBersama Management Committee of Subsidiaries, Joint Ventures and Associated Companies PT Cogindo DayaBersama
67.	6 Oktober 2023 October 6, 2023	143.K/CDB/X/2023	Penunjukan Internal Auditor ISO 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi Appointment of Internal Auditor ISO 27001 Information Security Management System
68.	6 Oktober 2023 October 6, 2023	144.K/CDB/X/2023	Tim Pelaksana PM 24K <i>Air Compressor</i> 4-K-02A PT KPI RU VII KASIM Implementation Team PM 24K Air Compressor 4-K-02A PT KPI RU VII KASIM
69.	6 Oktober 2023 October 6, 2023	145.K/CDB/X/2023	Pembentukan Tim Pelaksanaan Pekerjaan Penambahan Mesin Pembangkit Sewa Dengan Kapasitas Daya Mampu Netto (DMN) 25 MW di Sistem Sulbagsel Establishment of the Implementation Team for the Addition of Rental Generating Machines with a Net Capable Capacity (DMN) of 25 MW in the Sulbagsel System
70.	23 Oktober 2023 October 23, 2023	155.K/CDB/X/2023	Pekerjaan Jasa Pekerjaan Temuan <i>Overhaul</i> Energi Primer PLTU Lontar Unit 2 Tahun 2023 Primary Energy Overhaul Service Work of Lontar PLTU Unit 2 in 2023
71.	24 Oktober 2023 October 24, 2023	157.K/CDB/X/2023	Perubahan Tim Implementasi Cogindo <i>Management System</i> (CMS) Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ISO 45001 Sistem Manajemen Anti Penyuaapan ISO 37001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001 Change of Implementation Team Cogindo Management System (CMS) Quality Management System ISO 9001 Environmental Management System SIO 14001 Occupational Safety and Health Management System ISO 45001 Anti-bribery Management System ISO 37001 Information Security Management System ISO 27001
72.	25 Oktober 2023 October 25, 2023	158.K/CDB/X/2023	Update Kebijakan Keamanan Sistem Informasi Information System Security Policy Update
73.	27 Oktober 2023 October 27, 2023	160.K/CDB/X/2023	Kegiatan Pekerjaan Penggantian <i>Hanger</i> dan <i>Setting Line Steam Aux Boiler</i> serta <i>Line Drain</i> WCT PLTU Jateng 2 Adipala PGU Hanger Replacement Work Activities and Setting Aux Boiler Steam Line and Drain Line WCT PLTU Jateng 2 Adipala PGU
74.	31 Oktober 2023 October 31, 2023	162.K/CDB/X/2023	SK PEDOMAN UMUM MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI PT COGINDO DAYABERSAMA GENERAL GUIDELINES FOR INTEGRATED RISK MANAGEMENT PT COGINDO DAYABERSAMA
75.	31 Oktober 2023 October 31, 2023	162.1.K/CDB/X/2023	Pekerjaan Jasa <i>Overhaul Gearbox Conveyor Line B</i> Conveyor Line B Gearbox Overhaul Service Work
76.	1 November 2023 November 1, 2023	163.K/CDB/XI/2023	Kewenangan Atas Transaksi Keuangan di Kantor Pusat Authority over Financial Transactions at Head Office
77.	6 November 2023 November 6, 2023	166.K/CDB/XI/2023	Jasa <i>Annual Inspection Coal Handling</i> PLTU Jerajang Omu Tahun 2023 Annual Inspection Coal Handling Services for Jerajang Omu PLTU in 2023
78.	8 November 2023 November 8, 2023	168.K/CDB/XI/2023	Tim Implementasi Transformasi Digital SDM Human Capital Digital Transformation Implementation Team
79.	13 November 2023 November 13, 2023	171.K/CDB/XI/2023	Perubahan Tim Penanggulangan Keadaan Darurat PT Cogindo Dayabersama Changes of The Emergency Management Team of PT Cogindo Dayabersama
80.	14 November 2023 November 14, 2023	172.K/CDB/XI/2023	Tim Implementasi Program " <i>Good Housekeeping</i> " Berbasis 5R Program Implementation Team "Good Housekeeping" 5R-Based
81.	17 November 2023 November 17, 2023	175.K/CDB/XI/2023	Komite Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan PT Cogindo Dayabersama Committee for The Preparation of The Company's Annual Working Plan and Budget (RKAP) PT Cogindo Dayabersama
82.	21 November 2023 November 21, 2023	177.K/CDB/XI/2023	Pekerjaan Jasa <i>Overhaul Stre Area EP</i> Dan <i>Underground</i> EP Area And Underground Stre Overhaul Service Work

No.	Tanggal Date	Nomor Urut Sequence Number	Perihal Subject
83.	24 November 2023 November 24, 2023	180.K/CDB/XI/2023	Pekerjaan Jasa <i>Supporting Engine Removal Unit 2</i> PLTG Sambera. Supporting Engine Removal Service Work Unit 2 Sambera PLTG.
84.	27 November 2023 November 27, 2023	181.K/CDB/XI/2023	SK Tim Inventarisasi Aset PT Cogindo DayaBersama Tahun 2023 Decree of Asset Inventory Team of PT Cogindo DayaBersama 2023
85.	21 Desember 2023 December 21, 2023	197.K/CDB/XII/2023	SK Tim Implementasi GCG Decree of GCG Implementation Team
86.	27 Desember 2023 December 27, 2023	198.K/CDB/XII/2023	Penetapan penilaian kinerja smt 1 2023 Determination of performance assessment of Semester 1 2023

PROGRAM PENGENALAN DIREKSI

Di dalam pedoman kerja Direksi No:053.K/CDB/X/2021, disebutkan bahwa pada saat awal pengangkatan anggota baru Direksi wajib dilakukan program pengenalan dan pembelajaran. Pada tahun 2023 program ini tidak dilaksanakan karena tidak terdapat anggota Direksi baru.

Program Pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke unit usaha dan program lain sesuai kebutuhan. Hal ini bertujuan agar Direksi baru dapat bekerja secara selaras dengan organ Perusahaan lainnya.

Program Pengenalan diberikan langsung oleh Direktur Utama sebagai penanggung jawab dengan pemberian materi sebagaimana disebutkan dalam board manual antara lain:

- Pelaksanaan *Good Corporate Governance* oleh Perusahaan (termasuk penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016).
- Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya
- Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit
- Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta Anggaran Dasar.

INDUCTION PROGRAM OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors' Guidelines No:053.K/CDB/X/2021 states that at the initial appointment of a new member of the Board of Directors, an induction and learning program shall be carried out. In 2023, this program was not implemented because there were no new members of the Board of Directors.

The Induction Program can be in the form of presentations, meetings, visits to business units and other programs as needed. Such a program is required so that the new Directors can work in harmony with other Company organs.

Induction Program is implemented directly by the President Director as the person in charge by providing material as stated in the manual board including:

- Implementation of *Good Corporate Governance* by the Company (including the implementation of the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System).
- An overview of the Company in terms of objective, nature, scope of activities, financial and operational performance, strategy, short and long term business plans, competitive position, risk and various other strategic issues
- Information relating to delegated authority, internal and external audit, internal control system and policy, including the Audit Committee
- Information regarding duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors as well as the Articles of Association.

PROGRAM PEMBELAJARAN BERKELANJUTAN DIREKSI

Perusahaan menyertakan anggota Direksi dalam Program Pengembangan Pengetahuan sebagai bagian dari program peningkatan kompetensi bagi tiap Anggota Direksi. Hal ini telah tertuang dalam Pedoman kerja Direksi Nomor: 053.K/CDB/X/2021, yang bertujuan untuk senantiasa mengembangkan pengetahuan Anggota Direksi agar selalu sesuai dengan perkembangan kebutuhan Perusahaan.

Anggota Direksi mengikuti pelatihan yang berkesinambungan untuk memastikan wawasan profesional, kompetensi, dan kemampuan kepemimpinan mereka dapat berkembang selaras dengan perkembangan industri terkini dalam bidangnya masing-masing. Selain itu Direksi yang mengikuti Program Pengembangan Pengetahuan harus mempresentasikan kepada anggota Direksi lainnya.

Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab untuk membuat laporan tentang pelaksanaan Program Pengembangan Pengetahuan dan membandingkannya dengan rencana tahunan dan laporan tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

Program pelatihan yang dihadiri oleh anggota Direksi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

CONTINUING LEARNING PROGRAM OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Company includes members of the Board of Directors in the Knowledge Development Program as part of the competency improvement program for each member of the Board of Directors. This has been stated in the Work Guidelines for the Board of Directors Number: 053.K/CDB/X/2021, which aims to constantly develop the knowledge of members of the Board of Directors, hence they are always in line with the development needs of the Company.

Members of the Board of Directors attend continuous training to ensure that their professional insights, competencies and leadership skills can develop in line with the latest industry developments in their respective fields. In addition, Board of Directors participating in the Knowledge Development Program shall make presentation to other members of the Board of Directors.

Corporate Secretary is responsible for preparing a report on the implementation of the Knowledge Development Program and comparing it with the annual plan, also the report is submitted to the Board of Commissioners and the Board of Directors.

The training programs attended by members of the Board of Directors in 2023 are as follows:

Nama Name	Jenis Pelatihan Training Type	Penyelenggara Organizer	Waktu Time	Tempat Venue
Ade Hendratno	Undangan PRA RAKERNAS PLN Indonesia Power Tahun 2023 FGD Day 1: Strategi dan <i>Progress Procurement</i> Program Investasi 2023 FGD Day 2: <i>Revenue Beyond</i> kWh FGD Day 3: <i>Corporate Value Creation Pasca</i> HSH	PT PLN Indonesia Power	14 Februari 2023	R. Serba Guna Lt. 2 IP KP
	Invitation to PRA RAKERNAS PLN Indonesia Power 2023 FGD Day 1: Strategy and Progress of Procurement Investment Program 2023 FGD Day 2: Revenue Beyond kWh FGD Day 3: Corporate Value Creation Post HSH		February 14, 2023	Multipurpose Room 2nd floor IP KP
	Undangan FGD <i>Outage Management Workshop Capability</i>	Direktorat Operasi, CDB	14-16 Maret 2023	Hotel Grand Dafam Bandung
	Invitation of FGD <i>Outage Management Workshop Capability</i>	Directorate of Operations, CDB	March 14-16, 2023	Grand Dafam Bandung Hotel

Nama Name	Jenis Pelatihan Training Type	Penyelenggara Organizer	Waktu Time	Tempat Venue
	Undangan Seminar Nasional <i>on Integrated Strategic Asset Management</i>	MKI	27 September 2023	Ra Suite Simatupang
	Invitation to National Seminar on Integrated Strategic Asset Management		September 27, 2023	
	<i>Launching & Talkshow Energy Transition Conference & Exhibition 2023</i>	Dewan Energi Nasional (DEN)	3 Oktober 2023	Kantor Dewan Energi Nasional, Gedung Widjajono Partowidagdo, Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 49 Jakarta
	Launching & Talkshow Energy Transition Conference & Exhibition 2023	The National Energy Board (DEN)	October 3, 2023	National Energy Board Office, Widjajono Partowidagdo Building, Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 49 Jakarta
	Into the unknown : Charting the Future Agenda Into the unknown : Charting the Future Agenda	CRMS	7-8 Desember 2023 December 7-8, 2023	R. Rapat Professional It. 7 Professional Meeting Room 7 th floor
Kukuh Pambudi	Undangan PRA RAKERNAS PLN Indonesia Power Tahun 2023 FGD Day 1: Strategi dan <i>Progress Procurement Program Investasi 2023</i> FGD Day 2: <i>Revenue Beyond kWh</i> FGD Day 3: <i>Corporate Value Creation Pasca HSH</i>	PT PLN Indonesia Power	14 Februari 2023	R. Serba Guna It. 2 IP KP
	Invitation to PRA RAKERNAS PLN Indonesia Power 2023 FGD Day 1: Strategy and Progress of Procurement Investment Program 2023 FGD Day 2: Revenue Beyond kWh FGD Day 3: Corporate Value Creation Post HSH		February 14, 2023	Multipurpose Room 2nd floor IP KP
	<i>Into the unknown : Charting the Future Agenda</i> Into the unknown : Charting the Future Agenda	CRMS	7-8 Desember 2023 December 7-8, 2023	R. Rapat Professional It. 7 Professional Meeting Room 7 th floor
Hari Muhandani Nasution	<i>Into the unknown : Charting the Future Agenda</i> Into the unknown : Charting the Future Agenda	CRMS	7-8 Desember 2023 December 7-8, 2023	R. Rapat Professional It. 7 Professional Meeting Room 7 th floor
R. Triyono Budi P	<i>Into the unknown : Charting the Future Agenda</i> Into the unknown : Charting the Future Agenda	CRMS	7-8 Desember 2023 December 7-8, 2023	R. Rapat Professional It. 7 Professional Meeting Room 7 th floor
Mulyadi	Workshop Strategi Pencapaian <i>Program Derivative Business</i>	Direktorat Operasi, CDB	14-16 Maret 2023	Hotel Grand Dafam Bandung
	Workshop on Achievement Strategy of Derivative Business Program	Directorate of Operations, CDB	March 14-16, 2023	Grand Dafam Bandung Hotel
	Permohonan Sebagai Narasumber <i>Talkshow di INARI</i>	Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi	22 September 2023	Main Stage KST Soekarno Cibinong Science Center BRIN
	Application as a Speaker for Talk Show at INARI	Ministry of Energy and Mineral Resources, Directorate General of New, Renewable Energy and Energy Conservation	September 22, 2023	

Nama Name	Jenis Pelatihan Training Type	Penyelenggara Organizer	Waktu Time	Tempat Venue
	Undangan Seminar Nasional <i>on Integrated Strategic Asset Management</i>	MKI	27 September 2023	Ra Suite Simatupang
	Invitation to National Seminar on Integrated Strategic Asset Management		September 27, 2023	
	<i>Launching & Talkshow Energy Transition Conference & Exhibition 2023</i>	Dewan Energi Nasional (DEN)	3 Oktober 2023	Kantor Dewan Energi Nasional, Gedung Widjajono Partowidagdo, Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 49 Jakarta
	Launching & Talkshow Energy Transition Conference & Exhibition 2023	The National Energy Board (DEN)	October 3, 2023	National Energy Board Office, Widjajono Partowidagdo Building, Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 49 Jakarta

PENILAIAN KINERJA UNIT KERJA YANG BERADA DI BAWAH DIREKSI

Direksi tidak memiliki komite khusus yang membantu dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam rangka mendukung kelancaran tugas Direksi, Direksi dapat dibantu oleh organ pendukung, terdiri dari:

1. Sekretaris Perusahaan
2. Ketua Satuan Audit Internal

Evaluasi kinerja bagi unit yang berada di bawah Direksi dilakukan berdasarkan realisasi pelaksanaan tugas, saran dan rekomendasi yang diberikan. Penilaian dilakukan secara self assessment terhadap realisasi pelaksanaan tugas, saran dan rekomendasi yang diberikan.

Pada tahun 2023, Direksi memberikan penilaian sangat baik dan sangat mengapresiasi pelaksanaan program-program kerja terkait tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan dan Satuan Audit Internal.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF WORK UNIT UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors has no special committee to assist in carrying out their duties. In order to support the smooth implementation of the Board of Directors' duties, the Board of Directors may be assisted by supporting organs, consisting of:

1. Corporate Secretary
2. Head of the Internal Audit Unit

Performance evaluation for units under the Board of Directors is carried out based on the realization of the implementation of duties, suggestions and recommendations provided. Self-assessment conducted for the realization of the implementation of duties, suggestions and recommendations provided.

In 2023, the Board of Directors gave a very good assessment and really appreciates the implementation of work programs related to the duties and responsibilities of the Corporate Secretary and the Internal Audit Unit.

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Meetings of The Board of Commissioners and The Board of Directors

KEBIJAKAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sebagai bagian pelaksanaan tugas dan tanggungjawab, Dewan Komisaris dan Direksi wajib melaksanakan rapat agar meningkatkan efektivitas pengelolaan Perusahaan dan memudahkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kinerja operasional dan keuangan Perusahaan. Dewan Komisaris wajib melaksanakan rapat secara internal maupun rapat bersama dengan Direksi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Cogindo DayaBersama Nomor: 053.K/CDB/X/2021 dan Nomor: 004.K/DEKOM-CDB/2021 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Cogindo DayaBersama. Didalam *Board Manual* tersebut diatur mengenai kuorum dan etika rapat, mekanisme dan prosedur penyelenggaraan rapat, daftar hadir dan notulensi rapat Dewan Komisaris dan Direksi.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya sekali tiap-tiap bulan yang terdiri dari Rapat Internal Dewan Komisaris yang hanya dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi dengan dipimpin oleh Komisaris Utama. Seluruh keputusan Rapat Dewan Komisaris ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai kesepakatan maka keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak.

Sekretaris Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk menyusun dan mendistribusikan agenda serta membantu mengatur dan mempersiapkan rapat, menyiapkan dan memberikan agenda rapat dan materi diskusi.

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris melangsungkan 5 kali rapat antar anggota Dewan Komisaris.

POLICY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

As part of the implementation of duties and responsibilities, the Board of Commissioners and the Board of Directors are required to hold meetings to improve the effectiveness of the management of the Company and facilitate decision-making related to the operational and financial performance of the Company. The Board of Commissioners is required to conduct internal meetings as well as joint meetings with the Board of Directors as stipulated in the Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT Cogindo DayaBersama Number: 053.K/CDB/X/2021 and Number: 004.K/DEKOM-CDB/2021 concerning the Board Manual of PT Cogindo DayaBersama. The Board Manual regulates the quorum and ethics of meetings, the mechanism and procedures for organizing meetings, attendance lists, and minutes of meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors.

MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners holds a meeting at least once every month which consists of an Internal Meeting of the Board of Commissioners attended only by Members of the Board of Commissioners and Meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors led by President Commissioner. All decisions of the Meeting of the Board of Commissioners are determined by deliberation to reach a consensus, if no agreement is reached then the decision is determined by a majority vote.

Secretary to the Board of Commissioners is responsible for preparing and distributing agendas as well as helping organise and prepare meetings, preparing as well as distributing meeting agendas and discussion materials.

Throughout 2023, the Board of Commissioners held 5 meetings between members of the Board of Commissioners.

Berikut rincian frekuensi kehadiran dan agenda rapat Dewan Komisaris:

The following details the frequency of attendance and meeting agenda of the Board of Commissioners:

► Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Frequency of Meetings and Attendance Level of Board of Commissioners Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Training	Kehadiran Attendance	Persentase Percentage
Susiana Mutia*	Komisaris Utama President Commissioner	1	1	100%
Khusnul Mubien	Komisaris Utama President Commissioner	4	4	100%
Muhammad Mursid	Komisaris Commissioner	5	5	100%
Zaenal Mustofa*	Komisaris Independen Independent Commissioner	1	1	100%
Sunandar	Komisaris Independen Independent Commissioner	4	4	100%
Masykuri Abdillah	Komisaris Commissioner	5	2	40%
Fredy Eko Prasetyo**	Komisaris Commissioner	2	2	100%

* Sudah tidak menjabat sejak 8 Februari 2023 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Cogindo DayaBersama No.02
No longer served since February 8, 2023 based on the Deed of Shareholders Decision Statement of PT Cogindo DayaBersama No.02

**Baru menjabat pada tanggal 29 September 2023 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Cogindo DayaBersama No.25.
Took office on September 29, 2023 based on the Deed of Shareholders Decision Statement of PT Cogindo DayaBersama No.25.

► Agenda Rapat Dewan Komisaris

The Board of Commissioners Meeting Agenda

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda
1.	27 Januari 2023 January 27, 2023	Tanggapan DEKOM untuk RUPS RKAP 2023. Board of Commissioners' response to the 2023 RKAP GMS.
2.	8 Maret 2023 March 8, 2023	KPI DEKOM Board of Commissioners' KPI
3.	23 Juni 2023 June 23, 2023	Tanggapan DEKOM pada RUPS LPT 2022 Board of Commissioners' response to the GMS LPT 2022
4.	24 November 2023 November 24, 2023	1. Progress AOI GCG 2. Pembagian Tugas DEKOM 3. Anggota Komite Audit 1. AOI GCG Progress 2. Division of Duties of the Board of Commissioners 3. Audit Committee Member
5.	28 November 2023 November 28, 2023	Masa Jabatan Direktur Utama CDB Term of Office President Director of CDB

RAPAT DIREKSI

Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi. Keputusan-keputusan yang mengikat dapat diambil di luar Rapat Direksi, sepanjang keputusan itu disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh Anggota Direksi.

Direksi memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan rapat minimal sebulan sekali dan risalah rapat akan dibuat oleh Sekretaris Perusahaan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi untuk kemudian diarsipkan.

MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS

Meeting of the Board of Directors is a meeting held by the Board of Directors. Binding decisions can be taken outside the meeting of the Board of Directors, as long as the decision is approved in writing and signed by all members of the Board of Directors.

The Board of Directors has an obligation to hold a meeting at least once a month and the minutes of the meeting will be prepared by the Corporate Secretary and signed by all members of the Board of Directors to be archived.

Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis atau juga dapat dilakukan melalui media elektronik seperti sms, email dan telepon namun tidak menggugurkan ketentuan untuk melakukan panggilan rapat secara tertulis, oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perusahaan dan disampaikan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

Summoning for Board of Directors meetings are made in writing or can also be made through electronic media such as sms, email and telephone but do not cancel the provisions for making written meeting calls, by members of the Board of Directors who are entitled to represent the Company and submitted within a period of at least 3 (three) days before the meeting is held or in a shorter time if it is urgent, excluding the date of the summons and the date of the meeting.

Sepanjang tahun 2023, Direksi melangsungkan rapat Direksi sebanyak 39 kali dengan agenda dan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

Throughout 2023, the Board of Directors held 39 Board of Directors meetings with the following agenda and frequency of Decision:

► Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Rapat Direksi

Frequency of Meetings and Attendance Level of the Board of Directors' Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Training	Kehadiran Attendance	Persentase Percentage
Ade Hendratno	Direktur Utama President Director	39	39	100%
R. Triyono Budi P	Direktur Sumber Daya Manusia Director of Human Capital	39	39	100%
Kukuh Pambudi	Direktur Bisnis Director of Business	39	38	97%
Mulyadi	Direktur Operasi Director of Operations	39	39	100%
Hari Muhandani Nasution	Direktur Keuangan Director of Finance	39	38	97%

► Agenda Rapat Direksi

The Board of Directors Meeting Agenda

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda
1.	17 Januari 2023 January 17, 2023	Usulan Remunerasi Pegawai Employee Remuneration Proposal
2.	25 Januari 2023 January 25, 2023	Pembahasan Materi RUPS RKAP 2023 CDB Discussion of GMS Material RKAP 2023 CDB
3.	02 Februari 2023 February 02, 2023	Usulan Remunerasi Pegawai Employee Remuneration Proposal
4.	28 Februari 2023 February 28, 2023	Usulan <i>Executives Development Program</i> Executives Development Program Proposal
5.	7 Maret 2023 March 7, 2023	Kontrak FGC FGC Contract
6.	14 Maret 2023 March 14, 2023	1. Laporan Kinerja s.d Februari 2023 2. Usulan Perubahan SK Pengadaan 1. Performance Report until February 2023 2. Proposed Changes to Procurement Decree
7.	21 Maret 2023 March 21, 2023	1. Usulan Perubahan Project Allowance 2. Remunerasi Pegawai 1. Proposed Changes to Project Allowance 2. Employee Remuneration
8.	04 April 2023 April 04, 2023	<i>Project maintenance For Sabiya 2 Power Generations & Water Distillations Plant</i>
9.	17 April 2023 April 17, 2023	1. <i>Notional Pooling PT PLN (Persero)</i> 2. <i>Project Maintenance for Sabiya 2 Power Generation & Water Distillations Plant</i>

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda
10.	18 April 2023 April 18, 2023	1. Ketentuan Pegawai Tugas Karya 2. Usulan Kantor Administrasi Jasa O&M PLTMG Baloi di Batam 1. Conditions of Employment 2. Proposed Administration Office for O&M Services of Baloi MHP in Batam
11.	9 Mei 2023 May 9, 2023	1. Laporan Kinerja Perusahaan s.d April 2023 2. Laporan Pendanaan IMBT 3. Laporan <i>Whistleblowing System</i> 4. Laporan Kegiatan HUT CDB Ke-25 1. Company Performance Report until April 2023 2. IMBT Funding Report 3. Whistle Blowing System Report 4. CDB 25 th Anniversary Activity Report
12.	22 Mei 2023 May 22, 2023	1. Materi RUPS LPT Tahun Buku 2022 PT CDB 2. Laporan Progress Benchmark 1. Materials for the AGM of PT CDB for the 2022 Financial Year 2. Progress Report Benchmark
13.	9 Juni 2023 June 9, 2023	1. Laporan <i>Assessment</i> GCG Tahun 2022 2. Laporan Audit Keuangan, Kinerja & Kepatuhan Tahun 2022 3. Laporan HUT Ke-25 CDB 1. GCG Assessment Report 2022 2. Financial, Performance & Compliance Audit Report 2022 3. CDB 25 th Anniversary Report
14.	17 Juni 2023 June 17, 2023	1. Materi RUPS LPT Tahun Buku 2022 PT CDB 2. Layanan DRUPS Pertamina EP Cepu Zone 14 Papua Field 1. Material of GMS of PT CDB for Financial Year 2022 2. DRUPS Pertamina EP Cepu Zone 14 Papua Field Service
15.	22 Juni 2023 June 22, 2023	Materi RUPS LPT Tahun Buku 2022 PT CDB: 1. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun 2022 2. Persetujuan Tantiem Tahun Buku 2022 dan Penghasilan Tahun Buku 2023 Bagi Direksi dan Komisaris serta Bonus Karyawan Tahun Buku 2022 3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2023 Material of GMS of PT CDB for the fiscal year 2022: 1. Determination of the Use of Net Income in 2022 2. Approval of Tantiem for Financial Year 2022 and Income for Financial Year 2023 for Directors and Commissioners and Employee Bonus for Financial Year 2022 3. Determination of Public Accountant Firm to Audit the Company's Financial Statements for the Financial Year 2023
16.	27 Juni 2023 June 27, 2023	1. Penilaian Kinerja Pegawai 2. Perubahan Struktur Organisasi 1. Employee Performance Appraisal 2. Changes in Organizational Structure
17.	10 Juli 2023 July 10, 2023	Remunerasi Pegawai Employee Remuneration
18.	25 Juli 2023 July 25, 2023	1. Pembahasan Materi RADEKOM Kinerja Juni 2023 dan Tinjauan Review Management 2. Tinjauan Sistem Manajemen Terintegrasi 3. Komersialisasi Konversi Motor Listrik 1. Discussion of BOC Meetings Materials June 2023 Performance and Review Management Review 2. Integrated Management System Review 3. Electric Motor Conversion Commercialization
19.	28 Juli 2023 July 28, 2023	1. Laporan Tindak Lanjut Tender <i>Electric Motor 109</i> 2. Laporan <i>Project EPCC dan O&M Gas Engine Power Plant 2X18 MW</i> Pertamina Hulu Rokan 1. Electric Motor 109 Tender Follow-up Report 2. Project Report EPCC and O&M Gas Engine Power Plant 2X18 MW Pertamina Hulu Rokan
20.	14 Agustus 2023 August 14, 2023	1. Kerjasama Skema Bisnis AISIN-ITH-CDB 2. KSO Varley dan Andalan 1. AISIN-ITH-CDB Business Scheme Cooperation 2. KSO Varley and Andalan

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda
21.	18 Agustus 2023 August 18, 2023	1. <i>Top GRC Award</i> 2. Keputusan RUPS MCB 1. Top GRC Award 2. MCB GMS Resolution
22.	29 Agustus 2023 August 28, 2023	Laporan Kinerja Bulan Juli 2023 July 2023 Performance Report
23.	08 September 2023 September 08, 2023	Remunerasi Pegawai Employee Remuneration
24.	12 September 2023 September 12, 2023	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Megadaya Tangguh Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Megadaya Tangguh
25.	25 September 2023 September 25, 2023	1. Pembahasan Materi RADEKOM Kinerja Bulan Agustus & Prognosa 2023 2. Laporan <i>Special Purposes Company</i> (SPC) PT Megadaya Tangguh (MDT) 3. Pengadaan PLTS di PT AIIA dan PT ADSMIN Kerjasama dengan ITH 4. Usulan Refinancing PT MCB 1. Discussion of BOD Meetings Materials August Performance & 2023 Prognosis 2. Special Purposes Company (SPC) Report of PT Megadaya Tangguh (MDT) 3. Procurement of PLTS at PT AIIA and PT ADSMIN in Cooperation with ITH 4. Proposed Refinancing of PT MCB
26.	27 September 2023 September 27, 2023	Remunerasi Pegawai Employee Remuneration
27.	9 Oktober 2023 October 9, 2023	Pemenuhan SDM Perbantuan/Penugasan Fulfillment of HC Assistance/Assignment
28.	17 Oktober 2023 October 17, 2023	1. Laporan Keuangan PT CDB 2. Usulan <i>Employee Gathering</i> 3. Laporan Kinerja s.d September 2023 1. PT CDB Financial Report 2. Proposed Employee Gathering 3. Performance Report up to September 2023
29.	27 Oktober 2023 October 27, 2023	1. Usulan STO 2. Usulan Pengurus PT MCB 3. Project Kuwait 1. STO Proposal 2. PT MCB Management Proposal 3. Project Kuwait
30.	31 Oktober 2023 October 31, 2023	RKAP Tahun 2024 RKAP 2024
31.	14 November 2023 November 14, 2023	1. Sistem Manajemen Terintegrasi 2. Laporan Kinerja s.d Oktober 2023 3. Usulan STO CDB 1. Integrated Management System 2. Performance Report up to October 2023 3. STO CDB Proposal
32.	22 November 2023 November 22, 2023	1. Laporan Kinerja s.d Oktober 2023 2. Proposal <i>Pilot Project Portfolio OH</i> 3. Investasi Genset dan <i>New Project Hydrogen Refueling Station</i> (HRS) 1. Performance Report up to October 2023 2. Pilot Project Portfolio Proposal OH 3. Investment in Genset and New Project Hydrogen Refueling Station (HRS)
33.	27 November 2023 November 27, 2023	Laporan Hasil <i>Review Materi PRA RUPS MCB</i> MCB GMS PRA Material Review Report
34.	5 Desember 2023 December 5, 2023	Laporan Materi Hasil PRA RUPS MCB MCB GMS PRA Material Report
35.	11 Desember 2023 December 11, 2023	Laporan Hasil Rapat Pembahasan Usulan RKAP 2024 AP PT PLN IP Report on the Meeting Results of the Discussion of the Proposed RKAP 2024 AP PT PLN IP
36.	13 Desember 2023 December 13, 2023	Usulan RKAP Tahun 2024 Proposed RKAP 2024
37.	19 Desember 2023 December 19, 2023	Laporan Kinerja s.d November 2023 Performance Report up to November 2023
38.	26 Desember 2023 December 26, 2023	Evaluasi Kinerja Pegawai Performance Evaluation of Employee
39.	28 Desember 2023 December 28, 2023	<i>Joint Operation</i> (JO) KSO CDB-ISS Joint Operation (JO) KSO CDB-ISS

RAPAT GABUNGAN

Rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri Direksi diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan berlangsung secara intensif dan transparan dalam rangka membahas laporan-laporan berkala dari Direksi dan/atau untuk membahas suatu permasalahan, memberikan tanggapan, catatan dan nasehat.

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat konsultatif bersama Direksi sebanyak 11 kali. Pelaksanaan rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris sekaligus Direksi dan Sekretaris Dewan Komisaris yang bertugas untuk membuat/mempersiapkan dokumen risalah rapat dan disimpan sebagai arsip.

Berikut rincian frekuensi kehadiran dan agenda rapat Dewan Komisaris:

JOINT MEETING

Meetings of the Board of Commissioners attended by the Board of Directors are held as needed and take place in an intensive and transparent manner in order to discuss periodic reports from the Board of Directors and/or to discuss an issue, providing feedback, notes and advice.

Throughout 2023, the Board of Commissioners held 11 consultative meetings with the Board of Directors. The meetings were attended by the Board of Commissioners as well as the Board of Directors and Secretary to the Board of Commissioners whose job is to prepare the minutes of meetings and keep them as archives.

The following details the frequency of attendance and meeting agenda of the Board of Commissioners:

► Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Rapat Gabungan

Frequency of Meetings and Attendance Level of Joint Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Training	Kehadiran Attendance	Persentase Percentage
Dewan Komisaris The Board of Commissioners				
Khusnul Mubien**	Komisaris Utama President Commissioner	10	10	100%
Susiana Mutia*	Komisaris Utama President Commissioner	1	1	100%
Muhammad Mursid	Komisaris Commissioner	11	11	100%
Zaenal Mustofa*	Komisaris Independen Independent Commissioner	1	1	100%
Masykuri Abdillah	Komisaris Commissioner	11	11	100%
Sunandar**	Komisaris Independen Independent Commissioner	10	10	100%
Fredy Eko Prasetyo T***	Komisaris Commissioner	4	4	100%
Direksi The Board of Directors				
Ade Hendratno	Direktur Utama President Director	11	11	100%
R. Triyono Budi P	Direktur Sumber Daya Manusia Director of Human Capital	11	11	100%
Kukuh Pambudi	Direktur Bisnis Director of Business	11	10	95%
Mulyadi	Direktur Operasi Director of Operations	11	11	100%
Hari Muhardani Nasution	Direktur Keuangan Director of Finance	11	11	100%

* Sudah tidak menjabat sejak 8 Februari 2023 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Cogindo DayaBersama No.02
No longer served since February 8, 2023 based on the Deed of Shareholders Decision Statement of PT Cogindo DayaBersama No.02

**Baru menjabat pada 8 Februari 2023 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Cogindo DayaBersama No.02.
Took office on February 8, 2023 based on the Deed of Shareholders Decision Statement of PT Cogindo DayaBersama No.02.

***Baru menjabat pada tanggal 29 September 2023 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Cogindo DayaBersama No.25.
Took office on September 29, 2023 based on the Deed of Shareholders Decision Statement of PT Cogindo DayaBersama No.25.

► **Agenda Rapat Gabungan**
Joint Meeting Agenda

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda
1.	27 Januari 2023 January 27, 2023	Materi RUPS RKAP 2023 GMS Material RKAP 2023
2.	20 Maret 2023 March 20, 2023	Laporan Kinerja s.d Februari 2023 Performance Report until February 2023
3.	19 Mei 2023 May 19, 2023	Laporan Kinerja s.d April 2023 Performance Report until April 2023
4.	23 Juni 2023 June 23, 2023	1. Materi RUPS LPT Tahun Buku 2022 PT Cogindo DayaBersama 2. <i>Closing</i> Audit Laporan Keuangan, Laporan Kinerja dan Laporan Kepatuhan dengan Price Waterhouse Cooper (PWC) 1. Material of GMS of PT Cogindo DayaBersama for Financial Year 2022 2. Closing Audit of Financial Statements, Performance Reports and Compliance Reports with Price Waterhouse
5.	27 Juli 2023 July 27, 2023	Laporan Kinerja Semester I tahun 2023 Performance Report Semester 1 2023
6.	2 Agustus 2023 August 2, 2023	1. <i>Review Management</i> 2. DRUPS
7.	31 Agustus 2023 August 31, 2023	Laporan Kinerja s.d Juli 2023 Performance Report until July 2023
8.	26 September 2023 September 26, 2023	Laporan Kinerja s.d Agustus 2023 Performance Report until August 2023
9.	26 Oktober 2023 October 26, 2023	Laporan Kinerja s.d September 2023 Performance Report until September 2023
10.	28 November 2023 November 28, 2023	Laporan Kinerja s.d Oktober 2023 Performance Report until October 2023
11.	20 Desember 2023 December 20, 2023	Laporan Kinerja s.d November 2023 Performance Report until November 2023

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS

Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat sampai pada saat rapat tersebut diselenggarakan dan dihadiri oleh pemegang saham Perusahaan. Berikut kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi pada rapat:

Attendance of the Board of Commissioners and Board of Directors at The GMS

The Annual GMS of Fiscal Year 2022 was attended by the Board of Commissioners and the Board of Directors who served until the meeting was held and attended by the shareholders of the Company. The following attendance of the Board of Commissioners and Board of Directors at the meeting:

Nama Name	Jabatan Position
Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Khusnul Mubien	Komisaris Commissioner
Masykuri Abdillah	Komisaris Independen Independent Commissioner
Muhammad Mursid	Komisaris Commissioner
Sunandar	Komisaris Independen Independent Commissioner
Direksi Board of Directors	
Ade Hendratno	Direktur Utama President Director
R. Triyono Budi P	Direktur Sumber Daya Manusia Director of Human Capital

Nama Name	Jabatan Position
Kukuh Pambudi	Direktur Bisnis Director of Business
Mulyadi	Direktur Operasi Director of Operation
Hari Muhardani Nasution	Direktur Keuangan Director of Finance

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

Pelaksanaan RUPS RKAP tahun 2023 dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat sampai pada saat Rapat tersebut diselenggarakan dan dihadiri oleh pemegang saham Perusahaan. Berikut kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi pada rapat:

Attendance of the Board of Commissioners and Board of Directors

The RKAP GMS 2023 was attended by the Board of Commissioners and Board of Directors who served until the Meeting was held and attended by the shareholders of the Company. The following attendance of the Board of Commissioners and Board of Directors at the meeting:

Nama Name	Jabatan Position
Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Susiana Mutia	Komisaris Commissioner
Masykuri Abdillah	Komisaris Commissioner
Muhammad Mursid	Komisaris Commissioner
Zaenal Mustofa	Komisaris Independen Independent Commissioner
Direksi Board of Directors	
Ade Hendratno	Direktur Utama President Director
R. Triyono Budi P	Direktur Sumber Daya Manusia Director of Human Capital
Kukuh Pambudi	Direktur Bisnis Director of Business
Mulyadi	Direktur Operasi Director of Operation
Hari Muhardani Nasution	Direktur Keuangan Director of Finance

Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi

Working Relationship of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Dalam rangka terciptanya hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi yang harmonis guna mendukung pencapaian kinerja Perusahaan, diperlukan adanya persamaan persepsi dan komunikasi antara keduanya yang senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam arti bahwa Dewan Komisaris dan Direksi sebagai jabatan kolektif yang merepresentasikan keseluruhan anggota-anggotanya sehingga setiap hubungan kerja antara Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi harus diketahui oleh Anggota yang lain.

Penjelasan mengenai hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi PT PLN Indonesia Power Services dijelaskan secara rinci dalam *board manual* yang ditandatangani bersama pada tanggal 24 Juni 2019.

Hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris menghormati tanggung jawab dan wewenang Direksi dalam mengelola Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar Perusahaan.
2. Direksi menghormati tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kebijakan pengelolaan Perusahaan.
3. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan yang bersifat formal kelembagaan, dalam arti senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggung jawabkan.
4. Hubungan kerja yang bersifat informal dapat dilakukan oleh masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi, namun tidak dapat dipakai sebagai kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan.

In order to create a harmonious working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors to support the achievement of the Company's performance, it is necessary to have an equal perception and communication between the two which is always based on a standard mechanism or correspondence which can be accounted for in the sense that the Board of Commissioners and the Board of Directors are collective position that represent all of its members, hence every working relationship between Members of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors shall be known by other Members.

An explanation of the working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT PLN Indonesia Power Services is explained in detail in the board manual which was jointly signed on June 24, 2019.

The working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors shall apply the following principles:

1. The Board of Commissioners respect the responsibility and authority of the Board of Directors in managing the Company as stipulated in the laws and regulations and the Company's Articles of Association.
2. The Board of Directors respect the responsibility and authority of the Board of Commissioners to supervise and provide advice on the Company's management policies.
3. Every working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is a formal institutional relationship, in the sense that it is always based on a standard mechanism or correspondence that can be accounted for.
4. Informal working relationship can be implemented by each Member of the Board of Commissioners and Member of the Board of Directors, but cannot be used as an accountable policy.



5. Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi Perusahaan secara akurat, memenuhi syarat kecukupan dan tepat waktu.
 6. Direksi bertanggungjawab atas akurasi, kecukupan dan ketepatan waktu penyampaian informasi Perusahaan kepada Dewan Komisaris.
 7. Dewan Komisaris dan Direksi menyepakati hubungan kerja antara organ Komisaris dan organ Direksi.
5. The Board of Commissioners has right to obtain Company information accurately, meets the adequacy and timely requirements.
 6. The Board of Directors is responsible for the accuracy, adequacy and timeliness of submitting Company information to the Board of Commissioners.
 7. The Board of Commissioners and the Board of Directors agree on a working relationship between organs of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Nomination of The Board of Directors and Commissioners

KEBIJAKAN NOMINASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Anggota Direksi merupakan perwakilan dari PT Indonesia Power yang berfungsi sebagai pengelola perusahaan sedangkan Dewan Komisaris merupakan perwakilan yang berfungsi dalam menjalankan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Peraturan terkait nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris tercantum dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh induk perusahaan dalam Keputusan Direksi Nomor: 118.K/010/IP/2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Anak Perusahaan, Perusahaan Patungan dan Perusahaan Asosiasi PT Indonesia Power.

Prosedur Nominasi Direksi

Pengusulan calon Direksi didasarkan pada ketentuan Anggaran Dasar yang berlaku di PLN IP Services berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, perilaku dan dedikasi untuk mengembangkan usaha dalam rangka kemajuan Perusahaan.

Mekanisme pemilihan antara lain dilakukan dengan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh tim penguji sesuai kriteria penilaian Direksi yang ditetapkan dalam ketentuan, serta dinyatakan memenuhi persyaratan jabatan oleh Komite Jabatan PT Indonesia Power. Untuk kemudian memperoleh rekomendasi atau tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris PT Indonesia Power dan disetujui dalam RUPS PT Indonesia Power.

Prosedur Nominasi Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris diangkat dari perwakilan Pemegang Saham maupun pihak independen yang memiliki integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan dan memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

NOMINATION POLICY FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Members of the Board of Directors are representatives of PT Indonesia Power who function as company managers while the Board of Commissioners is a representative whose function is to carry out supervision and provide advice to the Board of Directors. Regulations regarding nominations for the Board of Directors and Board of Commissioners are listed in the policies issued by the parent company in the Decree of the Board of Directors Number: 118.K/010/IP/2021 Concerning Guidelines for Managing Subsidiaries, Joint Ventures and Associated Companies of PT Indonesia Power.

Board of Directors Nomination Procedure

Proposals for candidates for the Board of Directors are based on the provisions of the Articles of Association that apply at PLN IP Services based on considerations of expertise, integrity, leadership, experience, behavior and dedication to develop the business in the context of Company's progress.

The selection mechanism, among others, is carried out by a fit and proper test by the team of examiners in accordance with the Board of Directors' assessment criteria set out in the provisions, and declared fulfilling the position requirements by the Position Committee of PT Indonesia Power. To then obtain a written recommendation or response from the Board of Commissioners of PT Indonesia Power and approved at the GMS of PT Indonesia Power.

Board of Commissioners Nomination Procedure

Members of the Board of Commissioners are appointed from representatives of Shareholders and independent parties who have integrity, dedication, understand company management issues and have adequate knowledge in the business sector, and can provide sufficient time to carry out their duties.

Mekanisme pengangkatan dan penetapan Dewan Komisaris mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Pengusulan anggota Dewan Komisaris harus mendapatkan rekomendasi/tanggapan tertulis oleh Dewan Komisaris PT Indonesia Power dan disetujui oleh RUPS PT Indonesia Power terlebih dahulu sebelum ditetapkan dalam RUPS PLN IP Services.

Sebagai perwakilan dari induk perusahaan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris diwajibkan untuk menandatangani Kontrak Manajemen atau menyepakati *Key Performance Indicator*.

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dan Direksi berhak mendapatkan sejumlah remunerasi dan fasilitas lainnya termasuk santunan purna jabatan ataupun tantiem. Kebijakan pemberian remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu kepada keputusan dari Pemegang Saham sebagaimana ditetapkan dalam RUPS dengan memperhatikan hasil kajian yang dilakukan oleh Perusahaan.

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh Pemegang Saham melalui mekanisme RUPS memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/06/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

The mechanism for the appointment and determination of the Board of Commissioners follows the provisions as stipulated in the Articles of Association. Proposals for members of the Board of Commissioners shall obtain a written recommendation/response from the Board of Commissioners of PT Indonesia Power and be approved by the PT Indonesia Power GMS prior to being determined in the GMS of PLN IP Services.

As representatives of the parent company, members of the Board of Directors and Board of Commissioners are required to sign a Management Contract or agree on a Key Performance Indicator.

REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

In conducting their duties and responsibilities, the Board of Commissioners and the Board of Directors are entitled to a certain amount of remuneration and other facilities including retirement benefits or tantiem. The policy of providing remuneration and other facilities for the Board of Commissioners and Board of Directors refers to the decision of the Shareholders as outlined in the GMS by considering the results of the study conducted by the Company.

Policy of Remuneration of The Board of Commissioners and Board of Directors

The Remuneration Policy of the Board of Commissioners and Board of Directors is set by the Shareholders through the GMS mechanism, considering the provisions of the Articles of Association and laws and regulations, including:

1. Regulation of the Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014 dated March 10, 2014, concerning Guidelines for Determining the Income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of SOEs.
2. Regulation of the Minister of SOEs No. PER-02/MBU/06/2016 dated June 20, 2016, concerning Amendments to Regulation of the Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of SOEs.

3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/06/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.
4. Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/06/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.
5. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/05/2019 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.
3. Regulation of the Minister of SOEs No. PER-01/MBU/06/2017 dated June 19, 2017, concerning the Second Amendment to Regulation of the Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of SOEs.
4. SOE Minister Regulation No. PER-06/MBU/06/2018 dated June 4, 2018, concerning the Third Amendment to SOE Minister Regulation No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of SOEs.
5. Regulation of the Minister of SOEs No. PER-01/MBU/05/2019 on the Fourth Amendment to Regulation of the Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014 on Guidelines for Determining the Income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of SOEs.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh Pemegang Saham melalui mekanisme RUPS memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas.

Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi, dalam hal ini gaji Direktur Utama sebagai variabel utama, ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa faktor di bawah ini:

1. Pencapaian target.
2. Pendapatan Perusahaan.
3. Aktiva Perusahaan.
4. Kondisi, tingkat kesehatan dan kemampuan keuangan Perusahaan.
5. Tingkat inflasi.
6. Faktor-faktor lain yang relevan (*merit system*), termasuk termasuk tingkat penghasilan yang berlaku umum dalam industri sejenis;
7. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Procedure Determination of Remuneration Of The Board Of Commissioners And Board Of Directors

The Remuneration Policy of the Board of Commissioners and Board of Directors is determined by the Shareholders through the GMS mechanism, considering the provisions of the Articles of Association and laws and regulations as mentioned above.

Indicators for Determining the Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors

The amount of remuneration for the Board of Commissioners and Directors, in this case the President Director's salary as the main variable, is determined by considering several factors below:

1. Target achievement.
2. Company revenue.
3. Company assets.
4. The condition, level of health and financial capability of the Company.
5. Inflation rate.
6. Other relevant factors (*merit system*), including generally accepted income levels in similar industries;
7. Must not conflict with laws and regulations.

Pemberian remunerasi bagi Dewan komisaris dan Direksi PT PLN Indonesia Power Services mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/05/2019 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN. Komponen remunerasi untuk setiap anggota Dewan Komisaris terdiri dari gaji, tunjangan, fasilitas, dan tantiem.

Sesuai Peraturan tersebut gaji Direksi menjadi variabel utama sebagai perhitungan besaran gaji/ honorarium bagi Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Lainnya.

- Direktur Utama : Berdasarkan Keputusan Menteri dan menjadi Acuan Utama (100%)
- Direktur SDM : Sebesar 90% dari gaji Direktur Utama
- Direksi Lainnya : Sebesar 85% dari gaji Direktur Utama
- Komisaris Utama : Sebesar 45% dari gaji Direktur Utama
- Komisaris Lainnya : Sebesar 90% dari gaji Komisaris Utama.

STRUKTUR REMUNERASI

Dewan Komisaris dan Direksi menerima remunerasi tetap dan tidak tetap. Sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-13/MBU/09/2021, struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan terdiri dari:

- Gaji/Honorarium
- Tunjangan
- Fasilitas kesehatan, komunikasi dan
- lainnya Tantiem/Insentif Kinerja.

The provision of remuneration for the Board of Commissioners and Directors of PT PLN Indonesia Power Services refers to the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-01/MBU/05/2019 concerning the Fourth Amendment to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of SOEs. The remuneration component for each member of the Board of Commissioners consists of salary, allowances, facilities, and tantiem.

According to the Regulation, the salary of the Board of Directors is the main variable in calculating the amount of salary/honorarium for the Board of Commissioners and other members of the Board of Directors.

- President Director: Based on Ministerial Decree and becomes the Main Reference (100%)
- Director of Human Capital: 90% of the salary of the President Director
- Other Directors: 85% of the salary of the President Director
- President Commissioner : 45% of the salary of the President Director
- Other Commissioners : 90% of the salary of the President Commissioner.

REMUNERATION STRUCTURE

The Board of Commissioners and the Board of Directors receive fixed and variable remuneration. In accordance with the Minister of SOEs Regulation Number: PER-13/MBU/09/2021 as amended by the Minister of SOEs Regulation No. PER-01/MBU/05/2019, the remuneration structure for the Company's Board of Commissioners and the Board of Directors consists of:

- Salary/Honorarium
- Benefits
- Health, communication and other facilities
- Tantiem/Performance Incentive.

Jenis Penghasilan Income Type	Direksi Board of Directors	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Keterangan Note
Honorarium			
Honorarium	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Utama : Berdasarkan Keputusan Menteri dan menjadi Acuan Utama (100%) Direktur SDM : Sebesar 90% dari gaji Direktur Utama Direksi Lainnya : Sebesar 85% dari gaji Direktur Utama 	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Utama : Sebesar 45% dari gaji Direktur Utama Komisaris Lainnya : Sebesar 90% dari gaji Komisaris Utama 	Sesuai Permen BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021
	<ul style="list-style-type: none"> President Director: Based on Ministerial Decree and become Main Reference (100%) Director of Human Capital: 90% of the salary of the President Director Other Directors: 85% of the President Director's salary 	<ul style="list-style-type: none"> President Commissioner: 45% of the salary of the President Director Other Commissioners: 90% of the President Commissioner's salary 	According to SOEs Ministerial Regulation Number PER-13/MBU/09/2021
Tunjangan			
Allowance			
Tunjangan Hari Raya	1 (satu) kali honorarium	1 (satu) kali honorarium	Sesuai Permen BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021
Holiday Allowance	1 (one) time honorarium	1 (one) time honorarium	In accordance to SOEs Ministerial Regulation Number PER-13/MBU/09/2021
Asuransi Purna Jabatan	Premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 25% dari gaji dalam 1 tahun	Premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 25% dari gaji dalam 1 tahun	Sesuai Permen BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021
Post-Employment Insurance	The premium borne by the company is 25% of salary in 1 year	The premium borne by the company is 25% of salary in 1 year	In accordance to SOEs Ministerial Regulation Number PER-13/MBU/09/2021
Tunjangan Transportasi	20% dari honorarium per bulan	20% dari honorarium per bulan	Sesuai Permen BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021
Transportation Allowance	20% of the monthly honorarium	20% of the monthly honorarium	In accordance to SOEs Ministerial Regulation Number PER-13/MBU/09/2021
Fasilitas			
Facility			
Fasilitas Kesehatan	Dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (<i>at cost</i>)	Dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (<i>at cost</i>)	Sesuai Permen BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021
Medical Facility	In the form of health insurance or reimbursement of medical expense (<i>at cost</i>)	In the form of health insurance or reimbursement of medical expense (<i>at cost</i>)	In accordance to SOEs Ministerial Regulation Number PER-13/MBU/09/2021
Fasilitas Bantuan Hukum	Sebesar Pemakaian (<i>at cost</i>)	Sebesar Pemakaian (<i>at cost</i>)	Sesuai Permen BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021
Legal Aid Facility	Amount of Use (<i>at cost</i>)	Amount of Use (<i>at cost</i>)	In accordance to SOEs Ministerial Regulation Number PER-13/MBU/09/2021
Tantiem	Penetapan tantiem sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN dengan mempertimbangkan peningkatan kinerja dan kemampuan perusahaan dan diberikan dalam bentuk tunai		
Tantiem	Tantiem is determined in accordance with the SOEs Ministerial Regulation by taking into account increase in the company's performance and capabilities and is given in cash		

JUMLAH NOMINAL/KOMPONEN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Besaran remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2023 masing-masing adalah Rp2.632.161.610 dan Rp8.397.867.104, telah sesuai dengan struktur remunerasi dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor 13/MBU/09/2021.

TOTAL NOMINAL/REMUNERATION COMPONENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

The amount of remuneration received by the Board of Commissioners and Board of Directors in 2023 was Rp2,632,161,610 and Rp8,397,867,104 million, respectively, in accordance with the remuneration structure in the Minister of SOEs Regulation Number 13/MBU/09/2021.

Independensi dan Transparansi Dewan Komisaris dan Direksi

Independence and Transparency of the Board of Commissioners and Board of Directors

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi yang dapat mempengaruhi pertimbangan pribadi dan/atau menyingkirkan profesionalisme dan integritas Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas, sehingga berimplikasi pada pencapaian kinerja dan citra Perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena hal tersebut, Perusahaan telah menyusun Pedoman Benturan Kepentingan PT PLN Indonesia Power Services yang dicantumkan dalam *board manual*.

Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya, anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib menjaga independensi dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan, baik untuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongan tertentu.

Peraturan yang ditetapkan baik bagi anggota Direksi maupun Dewan Komisaris untuk menghindari benturan kepentingan yaitu:

1. Dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan.
2. Harus mengungkapkan kepada Perusahaan semua kepemilikan sahamnya, baik saham Perusahaan maupun saham Perusahaan lain yang selanjutnya akan dicatat di dalam Daftar Khusus.

CONFLICT OF INTEREST MANAGEMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Conflict of interest is a condition that can affect personal judgment and/or undermine professionalism and integrity of the Board of Commissioners and the Board of Directors in carrying out their duties, thus having implications for achieving the performance and image of the Company in the long term. Because of this, the Company has prepared a Conflict of Interest Guideline for PT PLN Indonesia Power Services which included in the board manual.

In fulfilling their functions, duties and responsibilities, members of the Board of Commissioners and Board of Directors shall maintain independence and avoid any form of conflict of interest, whether for personal and group interests.

The rules set for both members of the Board of Directors and the Board of Commissioners to avoid conflict of interest are:

1. It is prohibited to conduct transactions that have a conflict of interest.
2. Shall disclose to the Company all of its shareholdings, both the Company's shares and other Company's shares which will then be recorded in the Special Register.

3. Wajib melakukan pengungkapan dalam hal terjadi benturan kepentingan, dan Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hal tersebut.
 4. Dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan, Direksi maupun Dewan komisaris tidak boleh dipengaruhi oleh pihak lain yang dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang dan pengambilan keputusan yang tidak tepat. Keputusan diambil semata-mata untuk kepentingan terbaik Perusahaan dan bukan untuk kepentingan pribadi.
3. Required to make disclosures in the event of a conflict of interest, and Members of the Board of Commissioners concerned may not involve themselves in the decision-making process related to this matter.
 4. In carrying out their duties and making decisions, the Board of Directors and the Board of Commissioners shall not be influenced by other parties which can lead to abuse of authority and inappropriate decision-making. Decisions are taken solely for the best interests of the Company and not for personal gain.

Selain memiliki pedoman, Perusahaan juga mewajibkan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk menandatangani Surat Pernyataan komitmen dan daftar khusus yang dimiliki.

In addition to having guidelines, the Company also requires all members of the Board of Commissioners and Board of Directors to sign a Statement of Commitment and a special register.

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Penandatanganan Pernyataan Komitmen Signing Date of Statement of Commitment
Susiana Mutia	Komisaris Utama President Commissioner	12 Januari 2023 January 12, 2023
Khusnul Mubien	Komisaris Utama President Commissioner	25 September 2023 September 25, 2023
Muhammad Mursid	Komisaris Commissioner	2 Maret 2023 March 2, 2023
Sunandar	Komisaris Commissioner	25 September 2023 September 25, 2023
Zaenal Mustofa	Komisaris Independen Independent Commissioner	28 Maret 2022 & 21 Juli 2022 March 28, 2022 & July 21, 2022
Fredy Eko Prasetyo T	Komisaris Independen Independent Commissioner	25 September 2023 September 25, 2023
Masykuri Abdillah	Komisaris Commissioner	25 September 2023 September 25, 2023
Ade Hendratno	Direktur Utama President Director	25 September 2023 September 25, 2023
R. Triyono Budi P	Direktur Sumber Daya Manusia Director of Human Capital	25 September 2023 September 25, 2023
Kukuh Pambudi	Direktur Bisnis Director of Business	25 September 2023 September 25, 2023
Mulyadi	Direktur Operasi Director of Operations	25 September 2023 September 25, 2023
Hari Muhardani Nasution	Direktur Keuangan Director of Finance	25 September 2023 September 25, 2023

Kebijakan Mengenai Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris Dan Direksi

Policy Regarding Diversity in The Composition of The Board of Commissioners and Board of Directors

Perusahaan menganggap keberagaman keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi sebagai bagian penting dari Tata Kelola Perusahaan. Hal tersebut termasuk beragam pengalaman, latar belakang pendidikan, dan kesetaraan *gender*. Ini merupakan hal positif yang diperlukan untuk proses pengambilan sebuah keputusan.

The Company considers the membership diversity of the Board of Commissioners and the Board of Directors as an important part of Corporate Governance. This includes diverse experiences, educational backgrounds, and gender equality. This is a positive thing that is needed for the process of making a decision.

Penilaian Perusahaan akan perlunya keberagaman komposisi memberikan alternatif pemecahan masalah dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih objektif dan komprehensif, dengan mempertimbangkan unsur keberagaman dari bidang keilmuan, kompetensi, usia, keahlian, pengalaman kerja, dan gender agar paradigma dalam pengambilan keputusan menjadi lebih luas.

The Company's assessment of the need for diversity in composition provides alternative solution to problem and encourages more objective and comprehensive decision-making, taking into account elements of diversity in scientific field, competence, age, expertise, work experience, and gender so that the paradigm in decision-making becomes broader.

Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi PT PLN Indonesia Power Services yang menjabat pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

The diversity of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT PLN Indonesia Power Services who served in 2023 can be seen in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Kelamin Gender	Usia Age	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Professional Experience	Keahlian Expertise
Dewan Komisaris Board of Commissioners						
Susiana Mutia	Komisaris Utama	Wanita	54 tahun	S1 Ekonomi Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat EVP Pengendalian Kinerja Korporat PT PLN (Persero) 	Ahli dalam bidang ekonomi dan administrasi
	President Commissioner	Female		Bachelor's Degree of Corporate Economics	<ul style="list-style-type: none"> General Manager of PT PLN (Persero) West Sumatra Region PT PLN (Persero) Corporate Performance Control EVP 	Expert in economics and administration
Muhammad Mursid	Komisaris	Pria	56 tahun	S1 Mesin	Kepala Divisi Energi Primer dan Settlement II	Ahli dalam bidang teknik mesin
	Commissioner	Male	56 years old	Bachelor's Degree in Mechanical Engineering	Head of Primary Energy and Settlement II Division	Expert in mechanical engineering
Zaenal Mustofa	Komisaris Independen	Pria	59 tahun	S1 Mesin	Kepala Satuan Riset Inovasi dan Engineering General Manager Unit Bisnis Pemeliharaan	Ahli dalam bidang riset inovasi dan teknik mesin
	Independent Commissioner	Male	59 years old	Bachelor's Degree in Mechanical Engineering	Head of Innovation and Engineering Research Unit General Manager of Maintenance Business Unit	Expert in innovation research and mechanical engineering

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Kelamin Gender	Usia Age	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Professional Experience	Keahlian Expertise
Masykuri Abdillah	Komisaris Commissioner	Pria	53 tahun 53 years old	S3 Doctorate Degree	Dosen/guru besar dan Direktur Sekolah Pascasarjana (SPs) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Lecturer/professor and Director of the Postgraduate School (SPs) of UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Ahli dalam bidang SDM dan Keuangan Expert in HC and Finance
Direksi Board of Directors						
Ade Hendratno	Direktur Utama President Director	Pria Male	51 tahun 51 years old	Sarjana Mesin/ Diploma Teknik Instrumen Bachelor of Mechanical/ Instrument Engineering Diploma	Kepala Divisi TalentaKepala Divisi Sistem SDM dan Manajemen Perubahan Head of Talent DivisionHead of HC System and Change Management Division	Ahli dalam bidang pembangkit listrik dan manajemen SDM Expert in power generation and HC management
R. Triyono Budi P	Direktur Sumber Daya Manusia Director of Human Capital	Pria Male	53 tahun 53 years old	Magister Bidang Mesin Master of Engineering	Ahli Senior Perencanaan dan Peningkatan Mutu dan Kinerja Eksekutif Senior Bidang Operasi Pembangkit KP TK KE IRP Senior Planning and Quality and Performance Improvement ExpertSenior Executive for Generator Operations of KP TK KE IRP	Ahli dalam bidang perencanaan dan operasi pembangkit listrik Expert in power plant planning and operation
Kukuh Pambudi	Direktur Bisnis Director of Business	Pria Male	46 tahun 46 years old	S1 Elektro/ Listrik Bachelor of Electrical Engineering	<ul style="list-style-type: none"> • <i>General Manager</i> PLTU Pangkalan Susu Operation dan <i>Maintenance Services Unit</i> • <i>General Manager</i> PLTU Jawa Tengah 2 Adipala <i>Operation and Maintenance Services Unit</i> • General Manager of PLTU Pangkalan Susu Operation and Maintenance Service Unit • General Manager of PLTU Jawa Tengah 2 Adipala Operation and Maintenance Service Unit 	Ahli dalam bidang pembangkit listrik Expert in power generation
Mulyadi	Direktur Operasi Director of Operations	Pria Male	48 tahun 48 years old	S2 Manajemen Master of Management	<i>General Manager of Semarang Power Generation Unit and Senior Analyst Of Power Generation</i> PT Indonesia Power General Manager of Semarang Power Generation Unit and Senior Analyst Of Power Generation PT Indonesia Power	Ahli dalam bidang Operasi Expert in Operations
Hari Muhardani Nasution	Direktur Keuangan Director of Finance	Pria Male	46 tahun 46 years old	S2 Hukum Master of Laws	Ahli Litigasi dan Advokasi Eksekutif Bidang Keuangan Litigation and Advocacy ExpertExecutive for Finance	Ahli dalam bidang keuangan dan hukum Expert in finance and law

Pengungkapan Hubungan Afiliasi Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali

Disclosure of Affiliated Relationship Between Members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Major and/or Controlling Shareholders

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan, tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali, dapat dilihat dalam tabel berikut:

AFFILIATE RELATIONSHIP OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

All members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors have no financial relationship and kinship with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors and Controlling Shareholders, as can be seen in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship With						Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship With					
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Shareholders	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Susiana Mutia	Komisaris Utama President Commissioner		√		√		√		√		√		√
Muhammad Mursid	Komisaris Commissioner		√		√		√		√		√		√
Zaenal Mstofa	Komisaris Independen Independent Commissioner		√		√		√		√		√		√
Masykuri Abdillah	Komisaris Commissioner		√		√		√		√		√		√
Ade Hendratno	Direktur Utama President Director		√		√		√		√		√		√
R. Triyono Budi P	Direktur Sumber Daya Manusia Director of Human Capital		√		√		√		√		√		√
Kukuh Pambudi	Direktur Bisnis Director of Business		√		√		√		√		√		√
Mulyadi	Direktur Operasi Director of Operations		√		√		√		√		√		√
Hari Muhardani Nasution	Direktur Keuangan Director of Finance		√		√		√		√		√		√

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Performance Assessment of The Board of Commissioners and Board of Directors

Dewan Komisaris telah melakukan penilaian kinerja Direksi secara individual dan kolegal melalui laporan triwulan dan Rapat gabungan bersama Dewan Komisaris. Sedangkan penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh pemegang saham Perusahaan, berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama atau *Key Performance Indicators* (KPI) Dewan Komisaris yang termuat dalam Kontrak Manajemen antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham.

Sepanjang tahun 2023, penyelenggaraan rapat Direksi, Dewan Komisaris dan rapat gabungan sebagai salah satu penilaian kinerja adalah sebagai berikut:

The Board of Commissioners has assessed the performance of the Board of Directors individually and collegially through quarterly reports and joint meetings with the Board of Commissioners. While the performance assessment of the Board of Commissioners is carried out by the Company's shareholders, based on the achievement of the Board of Commissioners' Key Performance Indicators (KPI) contained in the Management Contract between the Board of Commissioners and the Shareholders.

Throughout 2023 the holding of meetings of the Board of Directors, Board of Commissioners, and joint meetings as one of the performance appraisals is as follows:

No.	Jenis Rapat	Frekuensi Frequency	Type of Meeting
1.	Rapat Direksi dan Dewan Komisaris	11	Meeting of the Board of Directors and Board of Commissioners
2.	Rapat Dewan Komisaris	5	Meeting of the Board of Commissioners
3.	Rapat Komite Audit	12	Meeting of Audit Committee
4.	Rapat Komite Manajemen Risiko	28	Meeting of Risk Management Committee

PENILAIAN KINERJA OLEH RUPS

Pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dimana RUPS akan memberikan pelunasan dan pembebasan (*acquit et decharge*) tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas pengurusan yang telah dijalankan selama satu periode kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

Pada RUPS laporan pertanggungjawaban tanggal 26 Juni 2023, seluruh Pemegang Saham dengan suara bulat menilai baik atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi PT PLN Indonesia Power Services yang tercermin dari tindakan dan laporan tahunan/perhitungan tahunan Perusahaan yang disetujui/disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk kemudian memberikan pelunasan dan pembebasan (*acquit et decharge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

PERFORMANCE ASSESSMENT BY GMS

Performance assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors is carried out at the General Meeting of Shareholders where the GMS will provide full release and discharge (*acquit et decharge*) of responsibility to the Board of Directors for the management that has been carried out for one period to the Board of Commissioners and Board of Directors.

At the GMS of accountability report dated June 26, 2023, all Shareholders unanimously appraised the performance of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT PLN Indonesia Power Services as reflected in the approved actions and annual report/annual calculation of the Company/ratified by the General Meeting of Shareholders to then grant release and discharge (*acquit et decharge*) to the Board of Commissioners and the Board of Directors.

PENILAIAN KINERJA BERDASARKAN ASSESSMENT GCG ASPEK DEWAN KOMISARIS

Self-assessment GCG juga turut berperan dalam penilaian kinerja yang menggunakan kriteria berdasarkan standar alat uji Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) pada BUMN.

Self-Assessment implementasi *Good Corporate Governance* PT PLN Indonesia Power Services telah dilaksanakan di akhir tahun 2023, yang bertujuan untuk menilai implementasi *Good Corporate Governance* pada Perusahaan, meliputi 6 (enam) aspek pokok salah satunya adalah aspek Dewan Komisaris dan Direksi.

ASPEK PENILAIAN DEWAN KOMISARIS

Skor capaian pada aspek penilaian Dewan Komisaris adalah sebesar 33,38 dari nilai maksimal sebesar 35 atau 95,37%. Aspek penilaian Dewan Komisaris mendapat predikat “Sangat Baik” dengan rincian dan penjabaran nilai sebagai berikut:

PERFORMANCE ASSESSMENT BASED ON GCG ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

GCG self-assessment also plays a role in performance appraisal using criteria based on standard test tools of Decree of the Secretary of the Minister of SOEs Number: SK-16/S.MBU/2012 on Indicator/Parameter for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in SOEs.

Self-Assessment of PT PLN Indonesia Power Services’s Good Corporate Governance implementation has been carried out at the end of 2023, which aim to assess the implementation of Good Corporate Governance in the Company, covering 6 (six) main aspects, one of which is the aspect of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

ASSESSMENT ASPECT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Achievement score on the assessment aspect of the Board of Commissioners is 33,38 from a maximum value of 35 or 95.37%. Assessment aspect of the Board of Commissioners received “Very Good” predicate with details and description of the values as follows:

No.	Aspek Penilaian Dewan Komisaris Assessment Aspect of the Board of Commissioners	Bobot Weight	Tingkat Capaian Achievement Level	Skor Score
1.	Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan. The Board of Commissioners carries out training/learning programs on an ongoing basis.	1,348	1,348	100,000
2.	Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. The Board of Commissioners carries out a clear division of duties, authorities and responsibilities and determines the factors needed to support the implementation of the duties of the Board of Commissioners.	2,127	2,127	100,000
3.	Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi. The Board of Commissioners gives approval for the draft of RJPP and RKAP submitted by the Board of Directors.	2,904	2,904	100,000
4.	Dewan Komisaris memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kewajiban Perusahaan. The Board of Commissioners provides direction to the Board of Directors regarding the implementation of the Company's plans and obligations.	9,593	8,610	89,753
5.	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan. The Board of Commissioners supervise the Board of Directors on the implementation of the Company's plans and policies.	6,479	6,479	100,000
6.	Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan. The Board of Commissioners supervise the implementation of the subsidiary/joint venture management policies.	1,504	1,504	100,000

No.	Aspek Penilaian Dewan Komisaris Assessment Aspect of the Board of Commissioners	Bobot Weight	Tingkat Capaian Achievement Level	Skor Score
7.	Dewan Komisaris berperan dalam pencalonan Anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegal) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi. The Board of Commissioners plays a role in nominating members of the Board of Directors, assess the performance of the Board of Directors (individual and collegial) and propose performance bonus/incentive according to applicable regulations and considers the performance of the Board of Directors.	2,438	2,257	92,555
8.	Dewan Komisaris melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya. The Board of Commissioners takes action on potential conflict of interest that concern him/her.	0,571	0,571	100,000
9.	Dewan Komisaris memantau dan memastikan bahwa praktikTata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. The Board of Commissioners monitor and ensure that the Good Corporate Governance practices are implemented effectively and sustainably.	1,659	1,322	79,687
10.	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang efektif dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. The Board of Commissioners organize effective Board of Commissioners meetings and attends Board of Commissioners meetings in accordance with statutory provisions.	1,349	1,349	100,000
11.	Dewan Komisaris memiliki Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris. The Board of Commissioners has Secretary to the Board of Commissioners to support the secretarial duties of the Board of Commissioners.	2,593	2,593	100,000
12.	Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris yang efektif. The Board of Commissioners has an effective Board of Commissioners Committee.	2,438	2,317	95,055
Jumlah Total		35,00	33,38	95,37

ASPEK PENILAIAN DIREKSI

Pada aspek penilaian Direksi pencapaian skor tahun 2023 adalah sebesar 95,37% terdapat peningkatan 0,37% dibanding tahun 2022 yaitu 95% dan mendapat predikat “Sangat Baik”. Pencapaian skor dan tingkat capaian sebagai berikut:

ASSESSMENT ASPECT OF THE BOARD OF DIRECTORS

In the assessment aspect of the Board of Directors, the score for 2023 is 95.37% there is an increase of 0.37% compared to 2022 of 95% and received a “Very Good” predicate. Achievement score and achievement level are as follows:

No.	Aspek Penilaian Direksi Assessment Aspect of the Board of Directors	Bobot Weight	Tingkat Capaian Achievement Level	Skor Score
1.	Direksi melaksanakan program pelatihan/ pembelajaran secara berkelanjutan. The Board of Directors implement training/learning programs on an ongoing basis.	1,089	1,089	100,000
2.	Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas. The Board of Directors perform a clear division of duties/functions, authorities and responsibilities.	1,867	1,828	97,916
3.	Direksi menyusun perencanaan Perusahaan. The Board of Directors prepares the Company's plans.	4,044	3,881	95,964
4.	Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja Perusahaan. The Board of Directors plays a role in fulfilling the Company's performance targets.	8,089	7,671	94,832

No.	Aspek Penilaian Direksi Assessment Aspect of the Board of Directors	Bobot Weight	Tingkat Capaian Achievement Level	Skor Score
5.	Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan. The Board of Directors exercise operational and financial control over the implementation of the Company's plans and policies.	3,266	3,110	95,236
6.	Direksi melaksanakan pengurusan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar. The Board of Directors carries out the management of the Company in accordance with the applicable laws and regulations and the Articles of Association.	0,778	0,778	100,000
7.	Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi Perusahaan dan stakeholders. The Board of Directors conducts value-added relationship for the Company and stakeholders.	6,689	5,639	84,299
8.	Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan Anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi. The Board of Directors monitor and manage potential conflict of interest for Members of the Board of Directors and management under the Board of Directors.	1,089	1,089	100,000
9.	Direksi memastikan Perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tepat waktu. The Board of Directors ensure that the Company carries out information and communication disclosure in accordance with applicable laws and regulations and submit information to the Board of Commissioners and Shareholders in a timely manner.	1,089	1,089	100,000
10.	Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. The Board of Directors organize meetings of the Board of Directors and attends Board of Commissioners meetings in accordance with statutory provisions.	1,556	1,556	100,000
11.	Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas oleh Direksi. The Board of Directors shall conduct quality internal supervision by the Board of Directors.	1,711	1,688	98,638
12.	Direksi menyelenggarakan fungsi Sekretaris Perusahaan yang berkualitas dan efektif. The Board of Directors performs the function of a qualified and effective Corporate Secretary.	1,711	1,711	100,000
13.	Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan Perundang-undangan. The Board of Directors organize Annual GMS and other GMS in accordance with laws and regulations.	2,022	2,022	100,000
Jumlah Total		35,00	33,15	94,72

PENILAIAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI BERDASARKAN KEY PERFORMANCE INDICATOR

Landasan penilaian kinerja Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dijabarkan dalam *Key Performance Indicators* (KPI) Manajemen dan menjadi suatu Kontrak Manajemen antara Pemegang saham dengan Dewan Komisaris Perusahaan. Target-target yang telah disepakati bersama tertuang dalam Kontrak Manajemen berdasarkan *Key Performance Indicators* (KPI) mencakup aspek finansial dan operasional Perusahaan.

ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS BASED ON KEY PERFORMANCE INDICATORS

The basis for the performance assessment of members of the Board of Commissioners and Board of Directors is outlined in the Management Key Performance Indicators (KPI) and becomes a Management Contract between the shareholders and the Board of Commissioners of the Company. The mutually agreed targets set out in the Management Contract based on Key Performance Indicators (KPIs) cover the financial and operational aspects of the Company.

Hasil Penilaian Kinerja Berdasarkan Key Performance Indicator

Pada tahun 2023 telah diperoleh hasil penilaian skor KPI sebagai berikut:

Performance Assessment Results Based on Key Performance Indicators

In 2023, the results of the KPI score assessment have been obtained as follows:

No.	Indikator Kinerja Performance Indicator		Satuan Unit	Bobot Weight	Target Tahun 2023 2023 Target	Desember December	
					SM 2	Target	Realisasi Realization
I FOKUS PELANGGAN				16			
1.1	Equivalent Forced Outage Rate (EFOR)	🔴			2,26	2,26	0,75
1.1.1	EFOR Nusa Penida	🔴	%	5	2,10	2,10	0,62
1.1.2	EFOR Tenau	🔴	%	5	2,52	2,52	1,32
1.2	Kepuasan pelanggan bisnis jasa O&M	🟢	%	6	84	84,00	85,41
II EFEKTIVITAS PRODUK DAN PROSES				26			
2.1	Equivalent Availability Factor (EAF)	🟢			86,88	86,88	96,09
2.1.2	EAF Nusa Penida	🟢	%	5	86,67	86,67	98,46
2.1.3	EAF Tenau	🟢	%	5	87,08	87,08	93,71
2.2	Penambahan Bisnis Baru Di Luar PLN Group	🟢	Jumlah Total	8	6	6	17
2.3	Penambahan Bisnis Baru Di Luar Negeri	🟢	Jumlah Total	8	2	2	3
III FOKUS TENAGA KERJA				15			
3.1	HCR	🟢	%	5	100,00	100,00	100,00
3.2	OCR	🟢	%	5	100,00	100,00	100,00
3.3	Produktifitas Pegawai	🟢	Rp Juta/ Pegawai Rp Million/ Employee	5	407	407	4,64
IV KEUANGAN DAN PASAR				38			
4.1	Laba bersih	🟢	Rp Milyar Rp Trillion	10	249,00	249,00	164,75
4.2	Penagihan						
	a. Penagihan IP	🔴	Hari Day	5	30	30	26
	b. Penagihan NON IP	🔴	Hari Day	5	60	60	8
4.3	Pendapatan Beyond kWh	🟢	Rp Milyar Rp Trillion	7	274,95	274,95	193,78
4.4	Sinergi antar Anak Perusahaan	🟢	Rp Milyar Rp Trillion	8	40,00	40	206,51
4.5	Penyerapan Investasi	🟢	Rp Milyar Rp Trillion	3	19,62	19,62	19,62
V KEPEMIMPINAN, TATA KELOLA DAN TANGGUNG JAWAB KEMASYARAKATAN				5			
5.1	Maturity Manajemen Risiko	🟢	Level	5	3,32	3,32	3,48
5.2	Compliance (GCG, CSR, Safety, Security & Environment, SPI, Reporting)	🟢	Nilai pengurang max -5		Max -5		
Total				100			

	Pencapaian Achievement	Nilai		Keterangan Description	Performance Indicator
		17,10	CUSTOMER FOCUS		
			●	Tercapai Achieved	Equivalent Forced Outage Rate (EFOR)
110,00%	5,50		●	Tercapai Achieved	EFOR Nusa Penida
110,00%	5,50		●	Tercapai Achieved	EFOR Tenau
110,00%	6,10				O&M service business customer satisfaction
		28,48	PRODUCT AND PROCESS EFFECTIVENESS		
					Equivalent Availability Factor (EAF)
110,00%	5,50		●	Tercapai Achieved	EAF Nusa Penida
107,61%	5,38		●	Tercapai Achieved	EAF Tenau
110,00%	8,80		●	Tercapai Achieved	Addition of New Business Outside PLN Group
110,00%	8,80		●	Tercapai Achieved	Addition of New Business Overseas
		15,34	WORKFORCE FOCUS		
100,00%	5,00		●		HCR
108,00%	5,39		●	Tercapai Achieved	OCR
96,75%	4,94		●	Tercapai Achieved	Employee Productivity
		34,35	FINANCE AND MARKETS		
66,16%	6,62		●	Perlu Peningkatan Need Improvement	Net profit
					Billing
110,00%	5,50		●	Tercapai Achieved	IP Billing
110,00%	5,50		●	Tercapai Achieved	NON IP Billing
70,48%	4,93		●	Perlu Peningkatan Need Improvement	Beyond kWh revenue
110,00%	8,80		●	Tercapai Achieved	Synergy between Subsidiaries
100,00%	3,00		●	Tercapai Achieved	Investment Absorption
		5,24	LEADERSHIP, GOVERNANCE, AND COMMUNITY RESPONSIBILITY		
104,82%	5,24		●	Tercapai Achieved	Maturity Manajemen Risiko
					Compliance (GCG, CSR, Safety, Security & Environment, SPI, Reporting)
		100,51	Total		

Sekretaris Dewan Komisaris

Secretary to The Board of Commissioners

Sekretaris Dewan Komisaris merupakan organ pendukung Dewan Komisaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris untuk membantu kelancaran pekerjaan dan memberikan dukungan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Sekretaris Dewan Komisaris mempunyai fungsi untuk memberikan dukungan administratif dan kesekretariatan kepada Dewan Komisaris guna memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris.

Tugas Sekretaris Dewan Komisaris antara lain:

1. Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam lingkungan Dewan Komisaris.
2. Mengkoordinir penyediaan informasi yang dibutuhkan Dewan Komisaris, seperti laporan berkala dari Direksi (Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Tahunan, Laporan Hasil Pemeriksaan SPI) serta laporan/informasi lainnya mengenai Perusahaan.
3. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyiapan dan pengiriman undangan, penyampaian materi rapat serta pembuatan risalah rapat.
4. Mengadministrasikan risalah rapat dan dokumen Dewan Komisaris lainnya serta mengirimkan hasil-hasil keputusan rapat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

1. Mengatur pertemuan internal/rapat Dewan Komisaris, pertemuan dengan Direksi dan /atau pertemuan dengan Pemegang Saham.
2. Menyelenggarakan kegiatan dibidang kesekretariatan dalam lingkungan Dewan Komisaris.

Secretary to the Board of Commissioners is a supporting organ for the Board of Commissioners who is appointed and dismissed by the Board of Commissioners to assist in the seamless running of work and to provide support to the Board of Commissioners in carrying out its duties and functions.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Secretary to the Board of Commissioners has function of providing administrative and secretarial support to the Board of Commissioners in order to facilitate the implementation of the duties of the Board of Commissioners.

Duties of Secretary to the Board of Commissioners include:

1. Organizing secretarial activities within the Board of Commissioners.
2. Coordinating the provision of information needed by the Board of Commissioners, such as periodic reports from the Board of Directors (Monthly Reports, Quarterly Reports, Annual Report, Result of SPI Inspection Report) as well as other reports/information regarding the Company.
3. Organizing meetings of the Board of Commissioners, including but not limited to prepare and send invitation, submit meeting materials and prepare minutes of meetings.
4. Administer the minutes of meetings and other documents of the Board of Commissioners and send the results of the meeting decision to interested parties.

IMPLEMENTATION OF DUTIES OF THE SECRETARY TO THE BOARD OF COMMISSIONERS

1. Organizing internal meetings of the Board of Commissioners, meetings with the Board of Directors and/or meetings with Shareholders.
2. Conducting secretarial activities within the Board of Commissioners.

3. Mengkoordinir penyediaan informasi yang dibutuhkan Dewan Komisaris seperti laporan berkala dari Direksi (Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Tahunan, Laporan Hasil Audit Internal) serta laporan/informasi lainnya mengenai perusahaan).
4. Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris termasuk tetapi tidak terbatas pada penyiapan dan pengiriman undangan, penyampaian materi rapat serta pembuatan risalah rapat.
5. Mengadministrasikan risalah rapat dan dokumen Dewan Komisaris lainnya serta mengirimkan hasil – hasil keputusan rapat kepada pihak – pihak yang berkepentingan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Sekretaris Dewan Komisaris mempunyai fungsi untuk memberikan dukungan administratif dan kesekretariatan kepada Dewan Komisaris guna memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris.

Tugas Sekretaris Dewan Komisaris antara lain:

1. Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam lingkungan Dewan Komisaris.
2. Mengkoordinir penyediaan informasi yang dibutuhkan Dewan Komisaris, seperti laporan berkala dari Direksi (Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Tahunan, Laporan Hasil Pemeriksaan SPI) serta laporan/informasi lainnya mengenai Perusahaan.
3. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyiapan dan pengiriman undangan, penyampaian materi rapat serta pembuatan risalah rapat.
4. Mengadministrasikan risalah rapat dan dokumen Dewan Komisaris lainnya serta mengirimkan hasil-hasil keputusan rapat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

1. Mengatur pertemuan internal/rapat Dewan Komisari, pertemuan dengan Direksi dan /atau pertemuan dengan Pemegang Saham.

3. Coordinating the provision of information needed by the Board of Commissioners such as periodic reports from the Board of Directors (Monthly Report, Quarterly Report, Annual Report, Internal Audit Result Report) as well as other reports/information regarding the company).
4. Organizing meetings of the Board of Commissioners including but not limited to preparing and send invitations, delivering meeting materials and preparing minutes of meetings.
5. Administering the minutes of meetings and other documents of the Board of Commissioners and send the results of the meeting decisions to interested parties.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Secretary to the Board of Commissioners has function of providing administrative and secretarial support to the Board of Commissioners in order to facilitate the implementation of the duties of the Board of Commissioners.

Duties of Secretary to the Board of Commissioners include:

1. Organizing secretarial activities within the Board of Commissioners.
2. Coordinating the provision of information needed by the Board of Commissioners, such as periodic reports from the Board of Directors (Monthly Reports, Quarterly Reports, Annual Report, Result of SPI Inspection Report) as well as other reports/information regarding the Company.
3. Organizing meetings of the Board of Commissioners, including but not limited to prepare and send invitation, submit meeting materials and prepare minutes of meetings.
4. Administer the minutes of meetings and other documents of the Board of Commissioners and send the results of the meeting decision to interested parties.

IMPLEMENTATION OF DUTIES OF THE SECRETARY TO THE BOARD OF COMMISSIONERS

1. Organizing internal meetings of the Board of Commissioners, meetings with the Board of Directors and/or meetings with Shareholders.

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 2. Menyelenggarakan kegiatan bidang kesekretariatan dalam lingkungan Dewan Komisaris. 3. Mengkoordinir penyediaan informasi yang dibutuhkan Dewan Komisaris seperti laporan berkala dari Direksi (Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Tahunan, Laporan Hasil Audit Internal) serta laporan/informasi lainnya mengenai perusahaan). 4. Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris termasuk tetapi tidak terbatas pada penyiapan dan pengiriman undangan, penyampaian materi rapat serta pembuatan risalah rapat. 5. Mengadministrasikan risalah rapat dan dokumen Dewan Komisaris lainnya serta mengirimkan hasil – hasil keputusan rapat kepada pihak – pihak yang berkepentingan. | <ol style="list-style-type: none"> 2. Conducting secretarial activities within the Board of Commissioners. 3. Coordinating the provision of information needed by the Board of Commissioners such as periodic reports from the Board of Directors (Monthly Report, Quarterly Report, Annual Report, Internal Audit Result Report) as well as other reports/information regarding the company). 4. Organizing meetings of the Board of Commissioners including but not limited to preparing and send invitations, delivering meeting materials and preparing minutes of meetings. 5. Administering the minutes of meetings and other documents of the Board of Commissioners and send the results of the meeting decisions to interested parties. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

► **Profil Sekretaris Dewan Komisaris**

Profile of Secretary to The Board of Commissioners



Aswindo
Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of the Board of Commissioners

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Usia | Age
38 tahun per 31 Desember 2023
38 years old as of December 31st, 2023

Domisili | Domicile
Banten
Banten

Periode | Period
2019 - Sekarang
2019 - Present

Dasar Hukum Pengangkatan
Legal Basis of Appointment

SK DEKOM Nomor 001.K/DEKOM-CDB/2019 Tanggal 15 Maret 2019
SK DEKOM Number 001.K/DEKOM-CDB/2019 Dated March 15, 2019

Riwayat Pendidikan
Educational Background

S1 Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret Surakarta (2008)
Bachelor of Civil Engineering from Sebelas Maret University, Surakarta (2008)

Riwayat Pekerjaan
Professional Experience

- *Manager of Contract and Customer Relation II*, PT Indonesia Power (2019)
- *Manajer Komersial dan Hubungan Pelanggan II*, PT Indonesia Power (2017-2019)
- *Manajer Komersial dan Hubungan Pelanggan II*, PT Indonesia Power (2017)
- *Ahli Madya Pengembangan Bisnis Jasa Pembangkitan*, PT Cogindo DayaBersama (2015)
- *Manager of Contract and Customer Relations II*, PT Indonesia Power (2019)
- *Commercial Manager and Customer Relations II*, PT Indonesia Power (2017-2019)
- *Commercial Manager and Customer Relations II*, PT Indonesia Power (2017)
- *Associate Expert in Generation Service Business Development*, PT Cogindo DayaBersama (2015)

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

Tidak Ada
None

Sertifikasi
Certification

Tidak Ada
None

Komite Audit

Audit Committee

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam memastikan bahwa sistem pengendalian internal Perusahaan telah berfungsi secara efisien dan efektif serta pelaksanaan praktik *Good Corporate Governance* di dalam Perusahaan.

Pembentukan Komite Audit PLN IP Services sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012.
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

PEDOMAN KERJA/PIAGAM KOMITE AUDIT

Piagam Komite Audit merupakan acuan tata laksana tugas bagi anggota Komite yang mengatur akan keberadaan, kedudukan, kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Komite sebagai panduan dalam menjalankan tugasnya. Piagam Komite Audit telah disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No.328.K/CDB/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014.

Audit Committee is a committee formed by the Board of Commissioners to assist the implementation of the duties and functions of the Board of Commissioners in ensuring that the Company's internal control system functions efficiently and effectively and implements *Good Corporate Governance* practices within the Company.

The establishment of the Audit Committee of PLN IP Services is in accordance with the Regulation of the State Minister for State-Owned Enterprises Number: PER-12/MBU/2012 on Supporting Organs for the Board of Commissioners/Supervisory Board for State-Owned Enterprises.

LEGAL BASIS

1. Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies.
2. Law number 19 of 2003 on State Owned Enterprises.
3. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-01/MBU/2011 on the Implementation of *Good Corporate Governance* in State-Owned Enterprises as last amended by Number: PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012.
4. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012 on Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

WORK GUIDELINES/CHARTER OF THE AUDIT COMMITTEE

Audit Committee Charter is a reference for the implementation of tasks for members of the Committee which regulates the existence, position, authorities, duties and responsibilities of the Committee as a guide in carrying out their duties. Audit Committee Charter was ratified by the Board of Commissioners and Board of Directors in the Joint Decree of the Board of Commissioners and Board of Directors No.328.K/CDB/XII/2014 dated December 15, 2014.

Piagam (*Charter*) Komite Audit mengatur mengenai:

1. Fungsi dan tugas pokok Komite Audit;
2. Anggota dan organisasi Komite Audit;
3. Kode etik Komite Audit;
4. Rapat Komite Audit;
5. Masa jabatan Komite Audit
6. Honorarium dan pembebanan biaya.

KRITERIA ANGGOTA KOMITE AUDIT

Kriteria bagi anggota Komite Audit antara lain harus bebas dari segala potensi benturan kepentingan yang dapat mengganggu independensi dan obyektivitas pendapatnya atas permasalahan yang dihadapi, bersifat independen dan tidak memiliki rangkap jabatan di dalam dan di luar Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertindak independen dalam setiap pengambilan keputusan.

Persyaratan lainnya :

1. Memiliki integritas yang baik serta pengetahuan dan pengalaman kerja yang cukup di bidang audit serta bidang lainnya yang dipandang perlu sehingga dapat melaksanakan fungsi secara optimal.
2. Tidak memiliki kepentingan dan hubungan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan.
3. Mampu bekerjasama dan berkomunikasi secara efektif dan memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan tugasnya.
4. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
5. Anggota Komite Audit yang berasal dari luar Perusahaan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
6. Anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap sebagai:
 - Anggota Dewan Komisaris pada BUMN/perusahaan lain.
 - Sekretaris/staf Sekretariat Dewan Komisaris/perusahaan lain.
 - Anggota Komite lain pada perusahaan dan/atau
 - Anggota Komite pada BUMN/perusahaan lain.

Audit Committee Charter regulates:

1. Main functions and duties of the Audit Committee;
2. Members and organization of the Audit Committee;
3. Code of ethics of the Audit Committee;
4. Meetings of the Audit Committee;
5. Term of office of the Audit Committee
6. Honorarium and fees.

CRITERIA FOR MEMBERS OF THE AUDIT COMMITTEE

Criteria for members of the Audit Committee, among others, shall be free from any potential conflict of interest that can interfere with the independence and objectivity of their opinions on the problems they face, are independent and do not have multiple positions inside and outside the Company which can affect their ability to act independently in every decision making.

Other requirements :

1. Have good integrity as well as sufficient knowledge and work experience in the field of audit and other fields deemed necessary so that they can implement their functions optimally.
2. Do not have personal interest and relationship that can have negative impact and conflict of interest on the Company.
3. Able to cooperate and communicate effectively and have strong commitment in carrying out their duties.
4. Can provide sufficient time to complete the duties.
5. Member of the Audit Committee who come from outside the Company do not have blood and kinship ties to the third degree either in a straight line or sideways with member of the Board of Commissioners and member of the Board of Directors.
6. Member of the Audit Committee who are not member of the Board of Commissioners may not concurrently serve as:
 - Member of the Board of Commissioners in SOEs/other companies.
 - Secretary/staff of the Secretariat of the Board of Commissioners/other companies.
 - Other Committee members in the company and/or
 - Committee member at SOEs/other companies.

Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan dan salah seorang lainnya harus memahami industri dilingkungan Perusahaan.

SUSUNAN, JUMLAH, KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN KOMITE AUDIT

Anggota Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang anggota Dewan Komisaris, dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota lainnya yang berasal dari luar Perusahaan dengan masa jabatan yang diberikan tidak akan melebihi masa jabatan anggota Dewan Komisaris.

Pada tahun 2023, terdapat perubahan anggota Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002.K/DEKOM-CDB/2023 tanggal 24 November 2023 tentang Pembentukan Komite Audit Dewan Komisaris PT Cogindo DayaBersama. Maka, sampai dengan 31 Desember 2023 komposisi anggota Komite Audit menjadi:

One member of the Audit Committee must have an educational background in accounting or finance and another must understand the industry within the Company.

STRUCTURE, NUMBER, COMPOSITION AND BASIS OF APPOINTMENT OF THE AUDIT COMMITTEE

Members of the Audit Committee consist of at least one member of the Board of Commissioners, and at least 3 (three) other members from outside the Company whose term of office will not exceed the term of office of members of the Board of Commissioners.

In 2023, there were changes the member of the Audit Committee based on the Decree of the Board of Commissioners No. 002.K/DEKOM-CDB/2023 on November 24, 2023, concerning the establishment of the Audit Committee the Board of Commissioners of PT Cogindo DayaBersama. Then, as of December 31, 2023, the composition of member of the Audit Committee is:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Keahlian Expertise	Keterangan Description
Andri Yunaldi	Ketua	Diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 002.K/DEKOM-CDB/2023	2023-2024	Manajemen SDM, Investasi dan Risiko Perusahaan	Pihak Independen
	Chairman	Appointed based on the Decree of the Board of Commissioners No. 002.K/DEKOM-CDB/2023		HC Management, Investment and Corporate Risk	Independent Party
Fredy Eko Prasetyo T.	Anggota	Diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 002.K/DEKOM-CDB/2023	2023-2024	Ilmu Sosial dan Politik	Anggota Dewan Komisaris
	Member	Appointed based on the Decree of the Board of Commissioners No. 002.K/DEKOM-CDB/2023		Social and Politic Sciences	Member of the Board of Commissioners
Imam Subakti	Anggota	Diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 002.K/DEKOM-CDB/2023	2023-2024	Elektronika	Penugasan
	Member	Appointed based on the Decree of the Board of Commissioners No. 002.K/DEKOM-CDB/2023		Electrical Engineering	Assignment

INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE AUDIT

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan terkait independensi antara lain:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan;
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;
3. Tidak mempunyai hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi;
4. Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dengan melakukan penelaahan atas hasil pemeriksaan oleh Auditor Internal dan Auditor Eksternal termasuk memantau pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan Perusahaan dengan tugas pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Menelaah program audit tahunan yang disusun Auditor Internal dan Auditor Eksternal.
- b. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor Internal dan Auditor Eksternal.
- c. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai tindak lanjut temuan audit, termasuk temuan signifikan yang belum ditindak lanjuti secara tuntas.
- d. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan.
- e. Perusahaan seperti Laporan Keuangan, Proyeksi dan Informasi Keuangan lainnya.
- f. Memberikan saran kepada Manajemen melalui Dewan Komisaris mengenai berbagai hal yang dapat meningkatkan kelancaran dan efektivitas proses audit.
- g. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai perubahan dan penyempurnaan Piagam Komite Audit. Mengevaluasi hasil pemantauan Auditor Internal atas tindak lanjut hasil audit dan menelaah kecukupan sumber daya serta kualifikasi tenaga Auditor Internal.

INDEPENDENCE OF THE AUDIT COMMITTEE

All members of the Audit Committee have met the requirements related to independence, including:

1. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the Company's activities;
2. Does not have shares either directly or indirectly in the Company;
3. Does not have financial or family relationship with members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors;
4. Not serving as administrator of political party, officials and government.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Audit Committee is tasked with assisting the Board of Commissioners in performing its supervisory duties by reviewing the results of examinations by the Internal Auditor and External Auditor including monitoring the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in the management of the Company with its main duties as follows:

- a. Review the annual audit program prepared by the Internal Auditor and External Auditor.
- b. Review the adequacy of audits conducted by the Internal Auditor and External Auditor.
- c. Provide input to the Board of Commissioners on follow-up of audit findings, including significant findings that have not been followed up.
- d. Review the financial information that will be issued by the Company such as Financial Statements, Projections and other Financial Information.
- e. Provide advice to Management through the Board of Commissioners on matters that can improve the smoothness and effectiveness of the audit process.
- f. Provide input to the Board of Commissioners on changes and improvements to the Audit Committee Charter.
- g. Evaluate the results of the Internal Auditor's monitoring of follow-up audit results and review the adequacy of resources and qualifications of Internal Auditor personnel.

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>h. Bersama tim seleksi memilih Auditor Eksternal yang akan melakukan audit dan mengusulkan agar dilakukan penggantian Auditor Eksternal apabila yang sedang bertugas dinilai tidak kompeten.</p> <p>i. Memantau pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dan melakukan evaluasi hasil assesment berkala atas penerapan GCG guna memastikan prinsip-prinsip GCG diterapkan dalam pengelolaan Perusahaan oleh organ Perusahaan termasuk organ pendukungnya.</p> <p>j. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi tentang penyempurnaan sistem dan kelengkapan GCG Perusahaan terutama berkenaan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Tata Kelola Perusahaan (<i>GCG Code</i>) • Pedoman Etika Perusahaan (<i>Code of Conduct</i>) • <i>Statement of Corporate Intent</i> (SCI) • Tata laksana kerja Direksi dan Dewan Komisaris (<i>Board Manual</i>) • <i>Road Map</i> dan laporan tentang pelaksanaan GCG sebagai bagian dari Laporan Tahunan di Perusahaan. <p>k. Membuat laporan tertulis dan memberikan paparan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan penugasan yang disertai dengan rekomendasi dari Komite secara terpisah yang khusus ditujukan kepada Dewan Komisaris.</p> | <p>h. Together with the selection team, select the External Auditor who will conduct the audit and propose a replacement for the External Auditor if the current one is considered incompetent.</p> <p>i. Monitor the implementation of Good Corporate Governance (GCG) and evaluate the results of periodic assessments of GCG implementation to ensure GCG principles are applied in the management of the Company by the organs of the Company including its supporting organs.</p> <p>j. Evaluate and provide recommendations on improving the system and completeness of the Company's COG, especially with regard to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guidelines for Corporate Governance (GCG Mode) • Code of Conduct • Statement of Corporate Intent (SCI) • Board of Directors and Board of Commissioners work procedures (Board Manual) • Road Map and report on GCG implementation as part of the Annual Report of the Company. <p>k. Make a written report and provide a presentation to the Board of Commissioners on each implementation of the assignment accompanied by recommendations from the Committee specifically addressed to the Board of Commissioners.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

RAPAT KOMITE AUDIT

Sepanjang tahun 2023, Komite Audit PLN IP Services telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan daftar kehadiran dan agenda sebagai berikut:

► Frekuensi Kehadiran

Attendance Frequency

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Attendance	Persentase Percentage
Andri Yunaldi	Ketua Chairman	12	12	100%
Rahmat Lubis	Anggota Member	12	12	100%
Fredy Eko Prasetyo T*	Anggota Member	2	2	100%
Imam Subakti*	Anggota Member	2	2	100%

*Menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak 24 November 2023 | Served as Members of the Audit Committee since November 24, 2023

MEETING OF THE AUDIT COMMITTEE

Throughout 2023, the Audit Committee of PLN IP Services has held 12 (twelve) meetings with the following attendance list and agenda:

► **Agenda Rapat**
Meeting Agenda

No.	Tanggal Date	Mata Acara Agenda
1.	25 Januari 2023 January 25, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian Hasil Audit Bidang K3L 2. <i>Knowledge Sharing</i> dari Ketua Komite Audit Dekom <ol style="list-style-type: none"> 1. Submission of OHSE Audit Results 2. Knowledge Sharing from the Chairman of the Audit Committee of the Board of Commissioners
2.	28 Februari 2023 February 28, 2023	Laporan Hasil Audit Sintang dan Pangkalan Susu Sintang and Pangkalan Susu Audit Report
3.	29 Maret 2023 March 29, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit PLTU Sanggau 2. Laporan Hasil Audit PTLMG Baubau <ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Report of PLTU Sanggau 2. Audit Report of PTLMG Baubau
4.	14 April 2023 April 14, 2023	Laporan Hasil Audit PLTMG Ambon Peaker 30 MW Audit Report of 30 MW Ambon Peaker PLTMG
5.	31 Mei 2023 May 31, 2023	Laporan Hasil Audit Jasa O&M PLTU Pelabuhan Ratu dan Sub Unit Audit Report on O&M Services of PLTU Ratu Harbor and Subunits
6.	27 Juni 2023 June 27, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Jasa O&M PLTU Labuan 2. Laporan Hasil Audit PLTD Nusa Penida 3. Hasil <i>Assessment</i> GCG Tahun 2022 4. Laporan WBS <ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Report of O&M Services of Labuan PLTU 2. Audit Report of Nusa Penida PLTD 3. GCG Assessment Result in 2022 4. WBS Report
7.	26 Juli 2023 July 26, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan <i>Monitoring</i> Tindak Lanjut AOI dan Rekomendasi Audit 2. Laporan Hasil Audit Unit PLTD Nusa Penida <ol style="list-style-type: none"> 1. AOI Follow-up Monitoring Report and Audit Recommendations 2. Nusa Penida PLTD Unit Audit Report
8.	31 Agustus 2023 August 31, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak Lanjut Arahan Komite Audit 2. <i>Monitoring</i> Rekomendasi AOI 3. Hasil Audit PLTMG Timika 4. Hasil Audit PLTMG Manokwari <ol style="list-style-type: none"> 1. Follow-up of Audit Committee Direction 2. Monitoring AOI Recommendations 3. Audit Result of MHP Timika 4. Audit Result of MHP Manokwari
9.	25 September 2023 September 25, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak Lanjut Arahan Komite Audit 2. <i>Monitoring</i> Rekomendasi AOI 3. Laporan Hasil Audit Unit PLTU Lontar, PLTD Senayan, PLTGU Priok <ol style="list-style-type: none"> 1. Follow-up of Audit Committee Directives 2. Monitoring AOI Recommendations 3. Audit Report of Lontar PLTU Unit, Senayan PLTD, Priok PLTGU
10.	30 Oktober 2023 October 30, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak Lanjut Arahan Komite Audit 2. <i>Monitoring</i> Rekomendasi AOI 3. Laporan Hasil Audit Unit PLTU Adipala & Sub Unit (PLTA Mrica & PLTGU Semarang) <ol style="list-style-type: none"> 1. Follow-up of Audit Committee Direction 2. Monitoring AOI Recommendations 3. Audit Report of Adipala PLTU Unit & Sub Unit (PLTA Mrica & PLTGU Semarang)
11.	29 November 2023 November 29, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak Lanjut Arahan Komite Audit 2. <i>Monitoring</i> Rekomendasi AOI 3. Laporan Hasil Audit Unit PLTMG Merauke 4. Laporan Hasil Audit Unit PLTMG Sorong <ol style="list-style-type: none"> 1. Follow-up of Audit Committee Direction 2. Monitoring AOI Recommendations 3. Audit Report of Merauke PLTMG Unit 4. Audit Report of Sorong PLTMG Unit

No.	Tanggal Date	Mata Acara Agenda
12.	19 Desember 2023	<ol style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Arahan Komite Audit Monitoring Rekomendasi AOI Laporan Hasil Audit PLTG Ulumbu Laporan Hasil Audit PLTD Tenau Program Kerja Audit Tahun 2024
	December 19, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Follow-up of Audit Committee Direction Monitoring AOI Recommendation Audit Report of Ulumbu PLTG Audit Report of Tenau PLTD Audit Work Program 2024

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT

Perusahaan menyertakan anggota Komite Audit untuk mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan keahlian dan kompetensi masing-masing anggota sebagaimana tertuang dalam Piagam Komite Audit (*Board Charter*).

PELAKSANAAN TUGAS TAHUN 2023

- Komite Audit telah melaksanakan rapat secara internal antar anggota komite sebanyak 12 (dua belas) kali.
- Melakukan penyusunan program kerja komite Audit tahun Anggaran 2024.
- Melaksanakan pelatihan anggota Komite Audit untuk pembinaan dan peningkatan kompetensi.
- Melakukan review terhadap *Board Manual* Komite Audit untuk tahun 2023.
- Melaporkan hasil untuk adanya pelaporan gratifikasi/WBS setiap semester kepada pemegang saham.
- Melakukan penilaian GCG secara *self assessment* bersama Tim *Assessment* dan melaporkan hasil kepada Dewan Komisaris.
- Komite Audit juga melakukan *monitoring* untuk *Area of Improvement* (AOI) sebagai hasil rekomendasi dari penilaian sendiri GCG Perusahaan.
-

KEBIJAKAN DAN BESARAN REMUNERASI BAGI KOMITE AUDIT

Anggota Komite Audit yang bukan Komisaris diberikan honorarium berdasarkan penetapan Dewan Komisaris PT PLN Indonesia Power Services.

COMPETENCY DEVELOPMENT OF THE AUDIT COMMITTEE

The Company gives members of the Audit Committee to participate in education and/or training with the aim of improving the skills and competence of each member as stated in the Audit Committee Charter (*Board Charter*).

IMPLEMENTATION OF DUTIES IN 2023

- The Audit Committee has conducted internal meetings between committee members 12 (twelve) times.
- Prepared the Audit committee work program for the 2024 Fiscal Year.
- Carried out training for members of the Audit Committee for coaching and competency improvement.
- Conducted a review of the Audit Committee's Maluan Board for 2023.
- Reported findings and follow-up for reporting gratuities/WBS every semester to shareholders.
- Conducted self-assessment of GCG with the Assessment Team and reported the results to the Board of Commissioners.
- The Audit Committee also monitors the Area of Improvement (AOI) as result of recommendations from the Company's GCG self-assessment.

POLICY AND AMOUNT OF REMUNERATION FOR THE AUDIT COMMITTEE

Members of the Audit Committee who are not Board of Commissioners are given an honorarium based on the determination of the Board of Commissioners of PT PLN Indonesia Power Services.

PENILAIAN KINERJA KOMITE AUDIT

Kinerja Komite Audit dievaluasi oleh Dewan Komisaris setiap akhir tahun berdasarkan realisasi pelaksanaan tugas, Jumlah dan kajian analisis serta rekomendasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Komite Audit. Penilaian kinerja Komite Audit tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam laporan Komite Audit. Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan anggota Komite Audit untuk periode jabatan berikutnya.

Untuk penilaian kinerja Komite Audit pada tahun 2023, Dewan Komisaris menilai Komite audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE AUDIT COMMITTEE

The performance of the Audit Committee is evaluated by the Board of Commissioners at the end of each year based on the realization of the implementation of duties, number and analysis review as well as recommendation and completion of work programs listed in the Audit Committee Work Plan and Budget. The Audit Committee performance assessment is reported to the Board of Commissioners in the Audit Committee report. The result of this assessment will be used as material for consideration for the Board of Commissioners to reappoint and/or dismiss members of the Audit Committee for the next term of office.

For the performance assessment of the Audit Committee in 2023, the Board of Commissioners considers that the audit committee has properly carried out its duties and responsibilities.

► **Profil Komite Audit**
Profil of Audit Committee

Andri Yunaldi

Ketua Komite Audit
Chairman of the Audit Committee

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Domisili | Domicile
Jakarta
Jakarta

Usia | Age
55 tahun per 31 Desember 2023
55 years old as of December 31, 2023

Periode | Period
Periode 1 : 2023 - 2024
1 Period : 2023 - 2024

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai ketua Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002.K/DEKOM-CDB/2023 tanggal 24 November 2023
Appointed as a Chairman of the Audit Committee based on Appointed based on the Decree of the Board of Commissioners No. 002.K/DEKOM-CDB/2023 dated November 24, 2023

Riwayat Pendidikan Educational Background

- S1-Proresi Psikologi, Universitas Indonesia (1993)
- S2 Bidang Manajemen SDM, Universitas Indonesia (2008)
- Bachelor in Psychology, University of Indonesia (1993)
- Master of Human Capital Management, University of Indonesia (2008)

Riwayat Pekerjaan Professional Experience

- Senior Audit Eksekutif Kantor Pusat I PT PLN (Persero) (2018)
- Kepala Pengembangan Sistem Kualitas Audit pada Satuan Pengawasan Intern PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2017-2018)
- *Vice President* Karir PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2016-2017)
- *Vice President* Rekrutmen PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2015-2016)
- Executive Senior Audit at the Head Office I of PT PLN (Persero) (2018)
- Head of Audit Quality System Development at Internal Control Unit of PT PLN (Persero) Head Office (2017-2018)
- Vice President of Career at PT PLN (Persero) Head Office (2016-2017)
- Vice President Recruitment at PT PLN (Persero) Head Office (2015-2016)

Rangkap Jabatan Concurrent Position

Tidak Ada
None

Keahlian Expertise


Manajemen SDM, Investasi dan Risiko Perusahaan
HC Management, Investment and Corporate Risk


Sertifikasi Certification


QRGP SNI manajemen risiko 18 Oktober
QRGP SNI risk management October 18


Fredy Eko Prasetyo T

Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

 **Kewarganegaraan | Citizenship**
Indonesia
Indonesian

 **Domisili | Domicile**
Jakarta
Jakarta

 **Usia | Age**
45 tahun per 31 Desember 2023
45 years old as of December 31, 2023

 **Periode | Period**
Periode 1 : 2023 - 2024
1 Period : 2023 - 2024

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai anggota Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002.K/DEKOM-CDB/2023 tanggal 24 November 2023
Appointed as a Member of the Audit Committee based on Appointed based on the Decree of the Board of Commissioners No. 002.K/DEKOM-CDB/2023 dated November 24, 2023

Riwayat Pendidikan Educational Background

- Sarjana Ekonomi di STIE IBMI (2010)
- Jurnalis di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta (1993-1999)
- Bachelor of Economic in STIE IBMI (2010)
- Journalist in Jakarta Institute of Social and Political Sciences (1993-1999)

Riwayat Pekerjaan Professional Experience

- *General Manager* di Bu Tani Rice (2018-Sekarang)
- *Contributor* di Tabloid Negerawan untuk Sumatera Utara (2015-2017)
- Staf Ahli Media Center di DPRD Labuhanbatu (2013)
- General Manager of Bu Tani Rice (2018-Present)
- Contributor in Negerawan Tabloid for North Sumatera (2015-2017)
- Media Expert Staff Center of DPRD Labuhanbatu (2013)

Rangkap Jabatan Concurrent Position

Komisaris Independen di PT PLN Indonesia Power Services
Independent Commissioner of PT PLN Indonesia Power Services

Keahlian Expertise

Ekonomi, Sosial dan Ilmu Politik
Economics, Social and Political Sciences

Sertifikasi Certification

Tidak Ada
None

Imam Subakti

Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Domisili | Domicile
Semarang
Semarang

Usia | Age
51 tahun per 31 Desember 2023
51 years old as of December 31, 2023

Periode | Period
Periode 1 : 2023 - 2024
1 Period : 2023 - 2024

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai anggota Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002.K/DEKOM-CDB/2023 tanggal 24 November 2023
Appointed as a Member of the Audit Committee based on Appointed based on the Decree of the Board of Commissioners No. 002.K/DEKOM-CDB/2023 dated November 24, 2023

Riwayat Pendidikan Educational Background

Sarjana Elektronika STT Fatahillah Cilegon (2008)
Bachelor of Electrical in Fatahillah STT (2008)

Riwayat Pekerjaan Professional Experience

- Wakil Presiden Manajemen Kontrak Dan Hubungan Pelanggan I (2023-Sekarang)
- Eksekutif Bidang Administrasi Kp Tugas Karya Ke Pt Pln (2019-2022)
- Manajer Unit Jasa Pembangkitan Pltu Jeranjang (2017-2018)
- Manajer Unit Jasa Pembangkitan Pltu Holtekamp (2016-2017)
- Ahli Madya Keamanan Korporat (2015-2016)
- Vice President Contract Management And Customer Relations I (2023-present)
- Executive of Administration Division of Works Task Force to PT PLN (2019-2022)
- Unit Manager of Generation Services Jeranjang PLTU (2017-2018)
- Unit Manager of Holtekamp PLTU (2016-2017)
- Corporate Security Associate Expert (2015-2016)

Rangkap Jabatan Concurrent Position

Wakil Presiden Manajemen Kontrak Dan Hubungan Pelanggan I
Vice President Contract Management And Customer Relations I

Keahlian Expertise

Elektronika
Electrical

Sertifikasi Certification

Tidak Ada
None

Komite Manajemen Risiko

Risk Management Committee

Di dalam rangka penerapan praktek Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) serta untuk memperoleh hasil, manfaat dan dampak positif yang optimal dari kinerja Perusahaan sesuai tugas pokok dan fungsinya yaitu bahwa Perusahaan wajib mengelola kegiatan usahanya dengan hemat, berdaya guna dengan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Dewan Komisaris Perusahaan membentuk Komite Manajemen Risiko yang berfungsi membantu Dewan Komisaris didalam melaksanakan tugas-tugasnya.

PEDOMAN KERJA/PIAGAM KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Pedoman kerja merupakan acuan tata tertib dan tata laksana Komite Manajemen Risiko dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Perusahaan telah menyusun pedoman kerja yang disahkan pada tanggal 19 Desember 2013 dan telah diperbaharu pada tanggal 26 Oktober 2023 yang mengatur antara lain:

1. Fungsi
2. Tugas Pokok
3. Tanggung Jawab
4. Kewajiban
5. Rapat
6. Etika Kerja

KRITERIA ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Keanggotaan Komite Manajemen Risiko haruslah bebas dari segala potensi benturan kepentingan yang dapat mengganggu independensi dan obyektivitas pendapatnya atas permasalahan yang dihadapi. Di dalam pedoman kerja Komite Manajemen Risiko, tercantum bahwa seluruh anggota Komite Manajemen Risiko bersifat independen dan tidak memiliki rangkap jabatan di dalam dan di luar Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertindak independen.

Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Komite Manajemen Risiko

In the context of implementing Good Corporate Governance practices and to obtain optimal results, benefits and positive impacts from the Company's performance according to its main duties and functions, namely that the Company is required to manage its business activities sparingly, efficiently by complying with laws and statutory regulations apply, the Company's Board of Commissioners form a Risk Management Committee which functions to assist the Board of Commissioners in carrying out their duties.

WORK GUIDELINES/RISK MANAGEMENT COMMITTEE CHARTER

Work guideline is a reference for the rules and procedures for the Risk Management Committee in carrying out its duties and responsibilities. The Company has developed work guidelines which was approved on December 19, 2013 and updated on October 26, 2023 that regulate among others:

1. Function
2. Main Duties
3. Responsibility
4. Liability
5. Meeting
6. Work Ethics

WORK GUIDELINES/CHARTER OF THE AUDIT COMMITTEE

Membership of the Risk Management Committee shall be free from any potential conflict of interest that could interfere with the independence and objectivity of its opinion on the problems it faces. In the Risk Management Committee work guidelines, it is stated that all members of the Risk Management Committee are independent and do not have multiple positions inside and outside the Company which may affect their ability to act independently.

Structure, Number, Composition and Basis of Appointment of the Risk Management Committee

Per 31 Desember 2023, susunan dan komposisi keanggotaan Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2023, the structure and composition of the Risk Management Committee membership is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Keahlian Expertise	Keterangan Description
Muhammad Mursid	Ketua	SK Dewan Komisaris No: 004.K/DEKOM-CDB/2019 tanggal 15 Desember 2022	2022-2025	Manajemen Pembangkit	Pihak Independen
	Chairman	Decree of the Board of Commissioners No: 004.K/DEKOM-CDB/2019 dated December 15, 2022		Generator Management	Independent Party
Mursaid	Anggota	SK Dewan Komisaris No: 004.K/DEKOM-CDB/2019 tanggal 15 Desember 2022	2022-2025	Manajemen Risiko	Pihak Independen
	Member	Decree of the Board of Commissioners No: 004.K/DEKOM-CDB/2019 dated December 15, 2022		Risk Management	Independent Party
Bayu Husodho	Anggota	SK Dewan Komisaris No: 004.K/DEKOM-CDB/2019 tanggal 15 Desember 2022	2022-2025	Manajemen Risiko	Pihak Independen
	Member	Decree of the Board of Commissioners No: 004.K/DEKOM-CDB/2019 dated December 15, 2022		Risk Management	Independent Party

INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Keanggotaan Komite Manajemen Risiko bersifat independen dan tidak rangkap jabatan di dalam dan di luar Perusahaan yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertindak independen. Seluruh anggota Komite Manajemen Risiko telah memenuhi persyaratan terkait independensi para anggota Komite Manajemen Risiko yaitu:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi
2. Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi
3. Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan
4. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit
5. Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah.

INDEPENDENCE OF MEMBER OF RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Membership of the Risk Management Committee is independent and does not hold multiple positions inside and outside the Company which affects their ability to act independently. All members of the Risk Management Committee have fulfilled the requirements regarding the independence of the members of the Risk Management Committee, namely:

1. Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors
2. Has no management relationship in the company, subsidiary or affiliated companies
3. Has no share ownership relationship in the company
4. Has no family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of the Audit Committee
5. Not serving as administrator of political parties, officials and the government.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Manajemen Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dengan melakukan penelaahan terhadap Kajian Risiko atas kelayakan kegiatan yang direncanakan oleh Manajemen Perusahaan dan termasuk melakukan penelaahan terhadap kebijakan di bidang Nominasi & Remunerasi.

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko sebagai berikut:

Tugas yang berkaitan dengan aspek kajian risiko

1. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris berupa penilaian terhadap pelaksanaan manajemen risiko serta kajian risiko yang dilakukan oleh manajemen Perusahaan pada :
 - Kegiatan perencanaan Perusahaan
 - Kegiatan Investasi Perusahaan
 - Kegiatan Operasi Perusahaan
2. Membuat laporan kepada Dewan Komisaris
3. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai perubahan dan penyempurnaan Piagam Komite Manajemen Risiko
4. Memantau dan memastikan bahwa semua kegiatan Perusahaan yang ada di dalam RJPP dan RKAP telah memperhatikan prinsip-prinsip manajemen risiko.
5. Memberikan rekomendasi kepada manajemen Perusahaan melalui Dewan Komisaris tentang berbagai hal yang dapat meningkatkan kelancaran dan efektivitas proses kajian risiko.

Tugas yang berkaitan dengan aspek nominasi dan remunerasi

1. Memberikan rekomendasi atas prosedur nominasi dan kriteria seleksi.
2. Memberikan rekomendasi tentang sistem penggajian dan pemberian tunjangan bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta :
 - Penilaian terhadap system yang diberlakukan
 - Opsi yang diberikan, antara lain opsi saham
 - Sistem Pensiun dan
 - Sistem Kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan pegawai

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Risk Management Committee is tasked with assisting the Board of Commissioners in carrying out their supervisory duties by reviewing the Risk Assessment on the feasibility of activities planned by the Company's Management and including reviewing policies in the field of Nomination & Remuneration.

The duties and responsibilities of the Risk Management Committee are as follows:

Duties related to aspect of risk assessment

1. Provide input to the Board of Commissioners in the form of an assessment of the implementation of risk management and risk studies conducted by the Company's management on:
 - Company planning activities
 - Company Investment Activities
 - Company Operational Activities
2. Make a report to the Board of Commissioners
3. Provide input to the Board of Commissioners regarding changes and improvements to the Risk Management Committee Charter
4. Monitor and ensure that all of the Company's activities in the RJPP and RKAP have taken into account the principles of risk management.
5. Provide recommendations to the Company's management through the Board of Commissioners on various matters that can improve the smoothness and effectiveness of the risk assessment process.

Duties related to nomination and remuneration aspect

1. Provide recommendation on nomination procedures and selection criteria.
2. Provide recommendation regarding the payroll system and provision of benefits for Members of the Board of Commissioners and Board of Directors as well as:
 - Evaluation of the implemented system
 - Options granted include stock options
 - Pension System and
 - Compensation System as well as other benefits in terms of employee reduction

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi. 4. Menyampaikan hasil review atas kebijakan yang terkait dengan sistem nominasi dan remunerasi 5. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai tindak lanjut hasil evaluasi, terutama terhadap kebijakan yang mempunyai dampak keuangan yang signifikan. 6. Melaporkan kendala dan hambatan dalam proses evaluasi. 7. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan adanya perubahan atau penyempurnaan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. 8. Memantau dan memastikan bahwa semua kebijakan di bidang nominasi dan remunerasi telah memperhatikan berbagai aspek yang terkait dan relevan. 9. Memberikan rekomendasi kepada Direksi/Manajemen Eksekutif untuk merancang dan melaksanakan kebijakan nominasi dan remunerasi yang efektif. 10. Memberikan saran kepada Manajemen melalui Dewan Komisaris mengenai berbagai hal yang dapat meningkatkan kelancaran dan efektivitas Perusahaan yang terkait dengan sistem nominasi dan remunerasi. | <ol style="list-style-type: none"> 3. Submit periodic reports to the Board of Commissioners regarding the activities of the Nomination and Remuneration Committee. 4. Deliver results of a review of policies related to the nomination and remuneration system 5. Provide input to the Board of Commissioners regarding follow-up on evaluation results, especially on policies that have significant financial impact. 6. Reporting constraints and obstacles in the evaluation process. 7. Provide input to the Board of Commissioners when it is necessary to amend or improve the Nomination and Remuneration Committee Charter. 8. Monitor and ensure that all policies in the field of nomination and remuneration have taken into account various related and relevant aspects. 9. Provide recommendations to the Board of Directors/ Executive Management to design and implement effective nomination and remuneration policies. 10. Provide advice to Management through the Board of Commissioners regarding various matters that can improve the smoothness and effectiveness of the Company related to the nomination and remuneration system. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

RAPAT KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Kebijakan dan Prosedur Rapat

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Komite Manajemen Risiko mengacu kepada Piagam Komite Manajemen Risiko tanggal 25 Oktober 2023 termasuk penyelenggaraan rapat. Rapat Komite Manajemen Risiko dapat dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Rapat Komite Manajemen Risiko akan dilaksanakan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan.
2. Melakukan pertemuan dengan pihak Unit Manajemen Risiko sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan.
3. Rapat berkala dengan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
4. Dalam pelaksanaan rapat Komite Manajemen Risiko dapat mengundang manajemen eksekutif melalui Unit Manajemen Risiko (UMR).

MEETING OF RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Meeting Policy and Procedures

In carrying out its duties and responsibilities, members of the Risk Management Committee refer to the Risk Management Committee Charter dated October 25, 2023, including holding meetings. Risk Management Committee meetings can be held in the following manner:

1. Risk Management Committee meetings will be held at least 1 (one) time a month.
2. Conduct meetings with the Risk Management Unit at least 1 (one) time a month.
3. Periodic meetings with the Board of Commissioners at least 1 (one) time in 2 (two) months.
4. In holding meetings, the Risk Management Committee may invite Executive Management through the Risk Management Unit ("UMR").

Sepanjang tahun 2023, Komite Manajemen Risiko telah melangsungkan 28 kali rapat internal dengan agenda dan frekuensi kehadiran sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Throughout 2023, the Risk Management Committee has held 28 internal meetings with the agenda and frequency of attendance as described in the following table:

► **Frekuensi Kehadiran**

Attendance Frequency

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Attendance	Persentase Percentage
Muhammad Mursid	Ketua Chairman	28	28	100%
Mursaid	Anggota Member	28	28	100%
Bayu Husodho	Anggota Member	28	24	85%

► **Agenda Rapat**

Meeting Agenda

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda
1.	13 Januari 2023 January 13, 2023	Profil Risiko Tahun 2023 Risk Profile 2023
2.	10 Februari 2023 February 10, 2023	Monitoring dan Evaluasi Risiko Bisnis Business Risk Monitoring and Evaluation
3.	17 Februari 2023 February 17, 2023	Monitoring dan Evaluasi Risiko Bisnis Business Risk Monitoring and Evaluation
4.	24 Februari 2023 February 24, 2023	Monitoring dan Evaluasi Risiko Bisnis Business Risk Monitoring and Evaluation
5.	10 Maret 2023 March 10, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Mitigasi risiko project DRUPS di Pertamina Grup Mitigasi risiko pengembangan workshop Progress Cost efficiency & Mitigasi risiko <ol style="list-style-type: none"> Risk mitigation of DRUPS in Pertamina Group Risk mitigation of workshop Progress Cost efficiency & Risk mitigation
6.	17 Maret 2023 March 17, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Mitigasi Risiko Alternatif Pendanaan Progress dan Mitigasi Risiko Program Alih Kompetensi Jasa O&M <ol style="list-style-type: none"> Risk Mitigation of Alternative Funding Progress and Risk Mitigation of PLTU O&M Supporting Services Competency
7.	31 Maret 2023 March 31, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Rencana Tender Progress Sosialisasi Program HSSE Secara Berkala dan Berkelanjutan Progress Menunjuk Agen-Agen K3 di Unit-Unit Baru <ol style="list-style-type: none"> Tender Plan Progress of Periodic and Continuous Socialization of HSSE Program Progress Appointing OHS Agents in New Units
8.	28 April 2023 April 28, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Program Sertifikasi Kompetensi Pegawai Program Ekspertise PT CDB <ol style="list-style-type: none"> Employee Competency Certification Program Expertise Program of PT CD
9.	5 Mei 2023 May 5, 2023	Laporan Manajemen Risiko TW I Risk Management Report Q1
10.	12 Mei 2023 May 12, 2023	Progress Pencapaian KPI Achievement Progress KPI
11.	26 Mei 2023 May 26, 2023	Mitigasi Risiko Dept Prokurmen Procurement Department Risk Mitigation
12.	9 Juni 2023 June 9, 2023	Progress Bisnis Overseas (EVNNPS) Vietnam Overseas Business Progress (EVNNPS) Vietnam

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda
13.	16 Juni 2023 June 16, 2023	1. Progres Pelaksanaan PLTS Aisin 2. Pendapatan Beyond Kwh 1. Aisin PLTS Implementation Progress 2. Beyond Kwh Revenue
14.	7 Juli 2023 July 7, 2023	Progres Pengembangan Bisnis <i>Beyond Kwh</i> Beyond Kwh Business Development Progress
15.	14 Juli 2023 July 14, 2023	Program Mitigasi Risiko Korporat dan Program <i>Market Riset</i> Corporate Risk Mitigation Program and Market Research Program
16.	28 Juli 2023 July 28, 2023	1. Pembahasan DRUPS 2. Tinjauan <i>Review Management</i> 1. DRUPS Discussion 2. Management Review
17.	4 Agustus 2023 August 4, 2023	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
18.	11 Agustus 2023 August 11, 2023	Progress Pengembangan <i>Workshop</i> Progress of Workshop Development
19.	1 September 2023 September 1, 2023	Program <i>Zero Accident</i> Zero Accident Program
20.	8 September 2023 September 8, 2023	Pengendalian Risiko Risk Control
21.	22 September 2023 September 22, 2023	Program Pencapaian <i>KPI Indicator</i> EAF EFOR EAF EAF KPI Indicator Achievement Program
22.	6 Oktober 2023 October 6, 2023	KSO Andalan & Varley KSO Andalan & Varley
23.	20 Oktober 2023 October 20, 2023	Kebijakan Perubahan Logo Perusahaan Company Logo Change Policy
24.	3 November 2023 November 3, 2023	1. Progress Kontrak Jasa O&M 2. Progress Bisnis Luar Negeri di Vietnam 1. Progress of O&M Service Contract 2. Overseas Business Progress in Vietnam
25.	17 November 2023 November 17, 2023	Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Procurement and Installation of 900.0 KWP Solar Power Plant (PLTS)
26.	21 November 2023 November 21, 2023	<i>Rebranding</i> perusahaan melalui perubahan nama dan logo perusahaan Rebranding the company through changing the company name and logo
27.	1 Desember 2023 December 1, 2023	Penyediaan Fasilitas <i>Zero Down Time</i> dan Penanganan Kebutuhan Listrik <i>Emergency</i> Provision of Zero DownTime Facilities and Handling Emergency Electricity Needs
28.	15 Desember 2023 December 15, 2023	Kebijakan Perubahan Logo Perusahaan Company Logo Change Policy

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Perusahaan memberikan kesempatan kepada seluruh anggota Komite Manajemen Risiko untuk mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi berupa pendidikan, pelatihan, maupun workshop sesuai dengan bidang keahliannya guna meningkatkan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.

COMPETENCY DEVELOPMENT OF RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The Company provides opportunities for all members of the Risk Management Committee to participate in various competency development program in the form of education, training, and workshop in accordance with their areas of expertise in order to improve competence to support the implementation of their duties.

KEBIJAKAN DAN BESARAN REMUNERASI BAGI KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Anggota Komite Manajemen Risiko yang bukan Komisaris diberikan honorarium berdasarkan penetapan Dewan Komisaris PT PLN Indonesia Power Services.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Program Kerja

- a. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris berupa penelaahan terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko serta Kajian Risiko yang dilakukan oleh Manajemen Perusahaan pada:
 - 1) Kegiatan perencanaan Perusahaan
 - 2) Kegiatan investasi Perusahaan
 - 3) Kegiatan operasi Perusahaan
- b. Memantau dan memastikan bahwa semua kegiatan Perusahaan yang ada di dalam RJP dan RKAP telah memperhatikan prinsip-prinsip Manajemen Risiko.
- c. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai tindak lanjut hasil evaluasi, terutama terhadap kebijakan yang mempunyai dampak keuangan yang signifikan.
- d. Memberikan rekomendasi kepada Manajemen Perusahaan melalui Dewan Komisaris untuk merancang dan melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko, termasuk berbagai hal yang dapat meningkatkan kelancaran dan efektivitas proses kajian risiko.
- e. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai perubahan dan penyempurnaan Piagam Komite Manajemen Risiko.
- f. Memberi rekomendasi tentang sistem pengajian dan pemberian tunjangan bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta:
 - 1) Penilaian terhadap sistem yang diberlakukan
 - 2) Opsi yang diberikan, antara lain opsi saham
 - 3) Sistem Pensiun dan
 - 4) Sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan pegawai
- g. Memberikan rekomendasi kepada Direksi/Manajemen Eksekutif untuk merancang dan melaksanakan kebijakan Nominasi dan Remunerasi yang efektif, termasuk berbagai hal yang dapat

POLICY AND AMOUNT OF REMUNERATION FOR THE RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Members of the Risk Management Committee who are not the Board of Commissioners are given an honorarium based on the determination of the Board of Commissioners of PT PLN Indonesia Power Services.

IMPLEMENTATION OF DUTIES OF RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Work Program

- a. Provide input to the Board of Commissioners in the form of reviewing the implementation of Risk Management and Risk Assessment conducted by the Company's Management on:
 - 2) The Company's planning activities
 - 3) The Company's investment activities
 - 4) The Company's operational activities
- b. Monitor and ensure that all of the Company's activities in the RJP and RKAP have taken into account the principles of risk management.
- c. Provide input to the Board of Commissioners regarding follow-up on evaluation results, especially on policies that have significant financial impact.
- d. Provide recommendations to the Company's Management through the Board of Commissioners to design and implement Risk Management policies, including various matters that can improve the smoothness and effectiveness of the risk assessment process.
- e. Provide input to the Board of Commissioners regarding changes and improvements to the Risk Management Committee Charter.
- f. Provide recommendations regarding the system of remuneration and provision of allowances for Members of the Board of Commissioners and Board of Directors as well as:
 - 1) Assessment of the system in place
 - 2) Options granted include stock options
 - 3) Pension System and
 - 4) Compensation system and other benefits in terms of employee reduction
- g. Provide recommendations to the Board of Directors/Executive Management to design and implement effective Nomination and Remuneration policies, including various matters that can improve the

meningkatkan kelancaran dan efektivitas Perusahaan yang terkait dengan sistem Nominasi dan Remunerasi.

- h. Membuat laporan tertulis dan melakukan paparan kepada Dewan Komisaris.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pertemuan / Rapat berkala :

- a. Rapat koordinasi Komite Manajemen Risiko dengan Manajemen Risiko Perusahaan dilaksanakan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan.
- b. Dalam pelaksanaan rapat Komite Manajemen Risiko dapat mengundang Manajemen Perusahaan melalui Manajemen Risiko Perusahaan untuk memberikan informasi yang diperlukan.

PENILAIAN KINERJA KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Kinerja Komite Manajemen Risiko dievaluasi oleh Dewan Komisaris setiap akhir tahun berdasarkan realisasi atas penyelesaian program kerja, kontribusi terhadap pencapaian target Perusahaan, jumlah analisis serta pemberian rekomendasi, kerjasama dan keaktifan kegiatan tim, dan pengelolaan anggaran yang dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam Laporan Komite Manajemen Risiko termasuk pencantuman risalah rapat yang memuat saran, rekomendasi dan masukan terkait dengan pelaksanaan tugas komite.

Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan anggota Komite Manajemen Risiko untuk periode jabatan berikutnya. Dewan Komisaris menilai kinerja Komite Manajemen Risiko sepanjang tahun 2023 sangat baik dan membantu pelaksanaan keseharian tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

smoothness and effectiveness of the Company related to the Nomination and Remuneration system.

- h. Make written reports and make presentations to the Board of Commissioners.
- i. Carry out other tasks assigned by the Board of Commissioners as long as they are within the scope of duties and obligations of the Board of Commissioners based on provisions of the applicable laws and regulations.

Periodic meetings / meetings:

- a. Coordination meeting between the Risk Management Committee and the Company's Risk Management is held at least 1 (one) time in a month.
- b. In carrying out the meeting the Risk Management Committee may invite the Company's Management through the Company's Risk Management to provide the necessary information.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF RISK MANAGEMENT COMMITTEE


The performance of the Risk Management Committee is evaluated by the Board of Commissioners at the end of each year based on the realization of work program completion, contribution to achieving the Company's targets, number of analyzes and recommendations, cooperation and active team activities, and budget management reported to the Board of Commissioners in the Risk Management Committee Report including inclusion of the minutes of meetings containing suggestions, recommendations and input related to the implementation of the committee's duties.


This assessment result will become material for consideration for the Board of Commissioners to reappoint and/or dismiss members of the Risk Management Committee for the next term of office. The Board of Commissioners considers that the performance of the Risk Management Committee throughout 2023 is very good and assists the implementation of the daily duties and responsibilities of the Board of Commissioners.


► **Profil Komite Manajemen Risiko**
Profile of the Risk Management Committee


Muhammad Mursid

Ketua Komite Manajemen Risiko
Chairman of Risk Management Committee

 **Kewarganegaraan | Citizenship**
Indonesia
Indonesian

 **Domisili | Domicile**
Bogor
Bogor

 **Usia | Age**
57 tahun per 31 Desember 2023
57 years old as of December 31, 2023

 **Periode | Period**
2019 - Sekarang
2019 - Present

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Ketua Komite Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.003.K/DEKOM-CDB/2019
Appointed as a Chairman of Risk Management Committee based on Decree of the Board of Commissioners No.003.K/DEKOM-CDB/2019

Riwayat Pendidikan Educational Background

S1 Teknik Mesin Universitas Diponegoro (1992)
Bachelor of Engineering from Diponegoro University (1992)

Riwayat Pekerjaan Professional Experience

- Komisaris PT PLN Indonesia Power Services (2021-2024)
- Kepala Divisi *Energi Primer* dan *Settlement II* (2018-2019)
- *Vice President of Primary Energy and Settlement II* (2019-2021)
- *Senior Analyst I of Power Generation II* (2021)
- Manager of Corporate Subsidiaries and Business Development Risk Management of PT PLN Indonesia Power Services (2019)
- Manager of Corporate Risk, AP and Business Development of PT Indonesia Power (2017)
- Risk Management Expert of PT Indonesia Power (2016 -2017)
- Corporate Risk Management Expert of PT Indonesia Power (2015)

Rangkap Jabatan Concurrent Position

Tidak Ada
None

Pelatihan pada Tahun Buku 2023 Trainings During 2023 Fiscal Year

Into the unknown : Charting the Future Agenda (7-8 Desember 2023)
Into the unknown : Charting the Future Agenda (December 7-8 2023)

Keahlian Expertise

Teknik Mesin
Mechanical Engineering

Sertifikasi Certification

Tidak Ada
None

Mursaid

Anggota Komite Manajemen Risiko
Member of Risk Management Committee

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Domisili | Domicile
Jakarta
Jakarta

Usia | Age
60 tahun per 31 Desember 2023
60 years old as of December 31, 2023

Periode | Period
2019 - Sekarang
2019 - Present

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.003.K/DEKOM-CDB/2019
Appointed as a Member of Risk Management Committee based on Decree of the Board of Commissioners No.003.K/DEKOM-CDB/2019

Riwayat Pendidikan Educational Background

S1 Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta (1994)
Bachelor of Administration from Lembaga Administrasi Negara Jakarta (1994)

Riwayat Pekerjaan Professional Experience

- *Manager of Corporate Subsidiaries and Business Development Risk Management PT Indonesia Power, (2019)*
- *Manager Risiko Korporat, AP dan Pengembangan Bisnis PT Indonesia Power, (2017)*
- *Ahli Manajemen Risiko Korporat Pt Indonesia Power, (2015)*
- *Manager of Corporate Subsidiaries and Business Development Risk Management of PT Indonesia Power (2019)*
- *Manager of Corporate Risk, AP and Business Development of PT Indonesia Power (2017)*
- *Risk Management Expert of PT Indonesia Power (2016 -2017)*
- *Corporate Risk Management Expert of PT Indonesia Power (2015)*

Rangkap Jabatan Concurrent Position

Tidak Ada
None

Pelatihan pada Tahun Buku 2023 Trainings During 2023 Fiscal Year

Into the unknown : Charting the Future Agenda (7-8 Desember 2023)
Into the unknown : Charting the Future Agenda (December 7-8 2023)

Keahlian Expertise


Administrasi
Administration


Sertifikasi Certification


Tidak Ada
None


Bayu Husodho

Anggota Komite Manajemen Risiko
Member of Risk Management Committee

 **Kewarganegaraan | Citizenship**
Indonesia
Indonesian

 **Domisili | Domicile**
Jakarta
Jakarta

 **Usia | Age**
51 tahun per 31 Desember 2023
51 years old as of December 31, 2023

 **Periode | Period**
2023 - 2024

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment

Surat Keputusan Dewan Komisaris No.004.K/DEKOM-CDB/2022 tanggal 15 Desember 2022 dan berlaku pada tanggal 1 Januari 2023
Decree of the Board of Commissioners No.004.K/DEKOM-CDB/2022 dated December 15, 2022 and valid on January 1, 2023

Riwayat Pendidikan Educational Background

- S2 Informatika Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (2003)
- S1 Elektro/Listrik Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (1995)
- Master of Informatics from Sepuluh Nopember Institute of Technology Surabaya (2003)
- Bachelor of Electro/Electricity from Adhi Tama Surabaya Institute of Technology (1995)

Riwayat Pekerjaan Professional Experience

- Kepala Bidang Risiko *Management* (2019 – sekarang)
- Kepala Bidang Manajemen Mutu dan Kinerja Korporat (2017 – 2019)
- Kepala Departemen Sistem Informasi (2013 – 2017)
- Head of Corporate Risk Management (2019 – present)
- Head of Quality Management and Corporate Performance (2017 – 2019)
- Head of Information System Department (Vice President of Information Technology) (2013 – 2017)

Rangkap Jabatan Concurrent Position

Tidak Ada
None

Keahlian Expertise

Electrical Engineering & Informatics

Sertifikasi Certification

Tidak Ada
None

Pelaksana Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi

Implementing Functions of The Nomination and Remuneration Committee

Hingga akhir tahun 2023 Perusahaan belum membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dikarenakan fungsi nominasi dan remunerasi secara keseluruhan masih dijalankan oleh Dewan Komisaris. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Manajemen Risiko.

Dalam penerapannya, Dewan Komisaris mengacu kepada Board Manual (Piagam Dewan Komisaris dan Direksi) Nomor.053.K/CDB/X/2021 dan Nomor 004.K/DEKOM-CDB/2021 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris melaksanakan Sistem Remunerasi dan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam kaitannya dengan remunerasi dan penilaian kinerja, Dewan Komisaris memiliki prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Memberi saran kepada RUPS mengenai sistem remunerasi dan penilaian kinerja yang tepat;
- b. Menyusun dan mengembangkan sistem remunerasi dan penilaian kinerja yang tepat.

Until the end of 2023, the Company has not established a Nomination and Remuneration Committee because the function of nomination and remuneration is still conducted by the Board of Commissioners. The Board of Commissioners is assisted by the Risk Management Committee in carrying out its duties and functions.

In its implementation, the Board of Commissioners refers to the Board Manual (Board of Commissioners and Board of Directors Charter) Decree Number 053.K/CDB/X/2021 and Number 004.K/DEKOM-CDB/2021, concerning the Board Manual of the Board of Commissioners and Board of Directors. The Board of Commissioners implements the Remuneration and Performance Appraisal System for the Board of Commissioners and Board of Directors. In relation to remuneration and performance appraisal, the Board of Commissioners has the following implementation procedures:

- a. Advise the GMS regarding the appropriate remuneration and performance appraisal system;
- b. Establish and develop an appropriate remuneration and performance appraisal system.

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan berperan penting dalam memfasilitasi komunikasi antar organ Perusahaan, hubungan antara Perusahaan dengan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya serta memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama, serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER -01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan PER-09/ MBU/2012, dimana Perusahaan wajib menunjuk dan mengangkat Sekretaris Perusahaan yang bertanggung jawab kepada Direksi. Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama, serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Sekretaris Perusahaan mempunyai fungsi utama dalam penanganan fungsi sekretariat perusahaan, hubungan kemasyarakatan, penerapan *Good Corporate Governance* dan serta dalam rangka menjaga citra perusahaan.

DASAR HUKUM

- Undang Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas;
- Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan PER-09/ MBU/2012.
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

Corporate Secretary plays an important role in facilitating communication between the Company's organs, relationship between the Company and Shareholders and other Stakeholders as well as ensuring the Company's compliance with applicable laws and regulations.

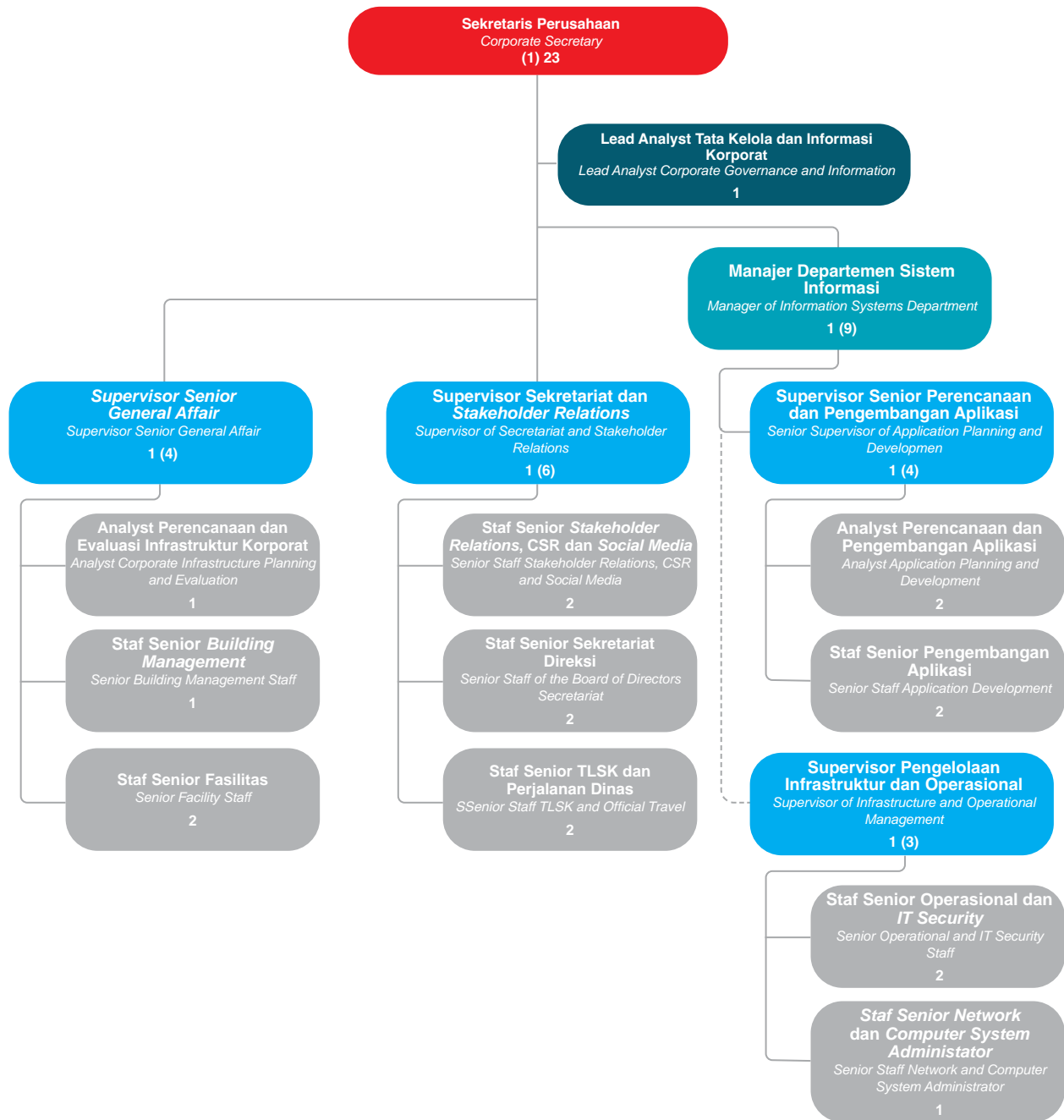
The Corporate Secretary is appointed and dismissed by the President Director, and is directly responsible to the President Director. Corporate Secretary appointment based on the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER -01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, as amended by PER-09/MBU/2012, where the Company is required to appoint a Corporate Secretary who is responsible to the Board of Directors. The Corporate Secretary is appointed and dismissed by the President Director, and is directly responsible to the President Director.

Corporate Secretary has the main function of handling the corporate secretariat functions, public relation, implementation of Good Corporate Governance and also in order to maintain the corporate image.

LEGAL BASIS

- Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies;
- Regulation of the State Minister for SOEs No. PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, as amended by PER-09/MBU/2012.
- Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises Number: PER-12/MBU/2012 on Supporting Organs for the Board of Commissioners/ Supervisory Board for State-Owned Enterprises

► **Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan**
Organizational Structure of Corporate Secretary



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Tugas Pokok

Tugas pokok Sekretaris Perusahaan sebagai berikut:

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis, menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja strategis, mengelola sumber

CORPORATE SECRETARY DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Main Duties

Main duties of Corporate Secretary is as follows:

Formulate and implement policies and technical standardization, formulate and implement strategic work plans and programs, manage resources and

daya dan kompetensi, menerapkan GCG dan cost effectiveness, mengelola K3 dan risiko, melakukan inovasi dan perbaikan berkesinambungan serta melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan di bidang kerja Sekretaris Perusahaan.

Fungsi Sekretaris Perusahaan

1. Pengelolaan kelancaran dan ketepatan aliran informasi atas *message* BOD, BOC dan Pemegang Saham serta keteraturan *schedule* BOD;
2. Penyelenggaraan dan pembinaan GCG;
3. Pengelolaan perizinan/persetujuan serta *monitoring* dan *reporting* progres pelaksanaan program-program strategis, RKAP dan LPT kepada BOC dan/ atau Pemegang Saham;
4. Pengelolaan efektivitas seluruh aktivitas administrasi, perijinan-perijinan, *reporting*, pengarsipan dan dokumentasi serta kesekretariatan korporat;
5. Penyelenggaraan aktivitas perkantoran, termasuk pengelolaan property, transportasi, perjalanan dinas serta pemenuhan kebutuhan kerumahtanggaan;
6. Penyelenggaraan kegiatan *shareholder relation*, *Corporate Communication & Image Management* serta *Community Relation Management*;
7. Pengelolaan *corporate image* yang positif, melalui upaya komunikasi dengan pihak eksternal (*market/ publik dan komunitas industri*) serta pihak internal (Pegawai dan Pemegang Saham);
8. Pengelolaan *website*, *media relation* dan *sponsorship*;
9. Penyelenggaraan aktivitas protokoler;
10. Pengelolaan pelaporan *whistleblowing*;
11. Perencanaan dan pengembangan strategi sistem dan teknologi informasi sesuai kebutuhan perusahaan;
12. Penetapan peran *information technology* perusahaan (kebijakan, fungsi, *value*);
13. Penyediaan *master plan* IT sebagai *guideline* dalam pendayagunaan sistem informasi dan pengembangannya;
14. Perencanaan kebutuhan sumber daya teknologi informasi (SOM, *software*, data, *hardware*);
15. Pengembangan teknologi informasi (data sistem informasi, aplikasi, infrastruktur dan sistem keamanan);

competencies, implement GCG and cost effectiveness, manage OHS and risk, innovate and improve continuously and coordinate with stakeholders in the field of work of the Corporate Secretary.

Corporate Secretary Function

1. Management of the flow and accuracy of information on the message of the Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders as well as the regularity of the Board of Directors schedule;
2. Implementation and development of GCG;
3. Management of permits/approvals as well as monitoring and reporting the progress of the implementation of strategic programs, RKAP and LPT to the Board of Commissioners and/or Shareholders;
4. Management of the effectiveness of all administrative activities, licenses, reporting, filing and documentation as well as corporate secretarial;
5. Organization of office activities, including property management, transportation, official travel and fulfillment of housekeeping needs;
6. Organizing shareholder relations activities, Corporate Communication & Image Management and Community Relation Management;
7. Management of a positive corporate image, through communication efforts with external parties (*market/ public and industrial community*) and internal parties (*employees and shareholders*);
8. Website management, media relations and sponsorship;
9. Organization of protocol activities;
10. Management of whistleblowing reporting;
11. Planning and development of information technology and system strategies according to company needs;
12. Determination of the company's information technology role (policy, function, value);
13. Provision of IT master plan as a guideline in information system utilization and development;
14. Planning the needs of information technology resources (SOM, software, data, hardware);
15. Development of information technology (information system data, applications, infrastructure and security systems);

16. Perancangan implementasi serta pemeliharaan sistem informasi perusahaan yang terintegrasi yang mampu mendukung upaya perusahaan dalam rangka meningkatkan kinerja;
17. Pengelolaan *database system* perusahaan berbasis teknologi informasi di dalamnya adalah infrastruktur *knowledge center* Perusahaan;
18. Pengelolaan kegiatan identifikasi dan analisis risiko teknologi informasi;
19. Pengelolaan *Data Center* dan *Disaster Recovery Center*.

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2023

Sebagaimana program kerja yang telah direncanakan di awal tahun, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dengan rincian sebagai berikut :

1. Sebagai pejabat penghubung (*liaison officer*) meliputi hubungan Perusahaan dengan Pemegang Saham, regulator, lembaga lain dan publik;
2. Penanggung jawab seluruh aktivitas kesekretariatan Perusahaan;
3. Mengikuti perkembangan peraturan-peraturan yang berlaku dan memastikan Perusahaan untuk mematuhi peraturan tersebut;
4. Membuat perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan komunikasi terhadap publik internal dan eksternal;
5. Membuat dokumentasi;
6. Mengawasi implementasi GCG dan aktivitas TJSL.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Perusahaan memberi kesempatan bagi Sekretaris Perusahaan untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian diri dalam program pengembangan kompetensi berupa pendidikan, pelatihan maupun seminar.

Sepanjang tahun 2023, berikut merupakan program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan yaitu:

16. Designing implementation and maintenance of an integrated corporate information system that is able to support the efforts of the company to improve performance;
17. Management of the Company's database system based on information technology, including the Company's knowledge center infrastructure;
18. Management of information technology risk identification and analysis activities;
19. Management of Data Center and Disaster Recovery Center.

IMPLEMENTATION OF CORPORATE SECRETARY DUTIES IN 2023

In accordance with the work program planned at the beginning of the year, the Corporate Secretary has carried out the following tasks:

1. As a liaison officer covering the Company's relationship with Shareholders, regulators, other institutions and the public;
2. In charge of all secretarial activities of the Company;
3. Following the development of applicable regulations and ensuring the Company to comply with these regulations;
4. Planning, implementing and controlling communication activities towards internal and external public;
5. Creating documentation;
6. Supervising the implementation of GCG and CSR activities.

COMPETENCY DEVELOPMENT OF CORPORATE SECRETARY

The Company provides opportunities for the Corporate Secretary to improve competence and self-expertise in competency development programs in the form of education, training and seminar.

Throughout 2023, the following are competency development programs followed by the Corporate Secretary:

No.	Jenis Pelatihan Training Type	Penyelenggara Organizer	Waktu Date
1.	Webinar GRC - Mengintegrasikan Budaya Risiko pada Penerapan GCG Organisasi GRC Webinar - Integrating Risk Culture in Organizational GCG Implementation	GRC Management	30 Maret 2023 March 30, 2023
2.	Webinar Enhancing Competitiveness Through The Integration of ESG and GRC Principles	GRC Management	30 Maret 2023 March 30, 2023

► **Profil Pejabat Sekretaris Perusahaan**
Profile of Corporate Secretary



Ulfa Milany
Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Kewarganegaraan | Citizenship

Indonesia
Indonesian

Domisili | Domicile

Bekasi
Bekasi

Usia | Age

45 tahun per 31 Desember 2023
45 years old as of December 31, 2023

Periode | Period

2023 - 2026
2023 - 2026

Dasar Hukum Pengangkatan
Legal Basis of Appointment

SK Direksi No 030.K/CDB-SDM/VII/2019
Decree of the Board of Directors No 030.K/CDB-SDM/VII/2019

Riwayat Pendidikan
Educational Background

S1 Ilmu Sosial Politik Universitas Pasundan Bandung (2000)
Bachelor of Social and Political Science from Pasundan University, Bandung (2000)

Riwayat Pekerjaan
Professional Experience

- Eksekutif Bidang SDM Kantor Pusat Tugas Karya Ke PT CDB (2019)
- Manajer GCG (2017-2019)
- Ahli GCG dan Informasi Korporat (2015-2017)
- Ahli Perencanaan Fasilitas (2014-2015)
- Manajer Stakeholder Relation (2010-2014)
- Supervisor Senior Perpustakaan dan Publikasi (2010)
- Executive of HC Headquarter Work Assignment to PT CDB (2019)
- GCG Manager (2017-2019)
- GCG and Corporate Information Expert (2015-2017)
- Facility Planning Expert (2014-2015)
- Stakeholder Relations Manager (2010-2014)
- Library and Publications Senior Supervisor (2010)

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

Tidak Ada
None

Keahlian
Expertise

Social Politics

Sertifikasi
Certification

Tidak Ada
None

Satuan Audit Internal

Internal Audit Unit

Perusahaan membentuk Satuan Audit Internal yang merupakan aparat pengawas intern Perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.19 Tahun 2003 pasal 67 ayat 1. Satuan Audit Internal (SAI) merupakan organ pendukung yang berfungsi dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen risiko dan penerapan GCG di dalam Perusahaan. Internal Audit merupakan aparat pengawas yang bersifat profesional serta independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan kinerja Perusahaan.

DASAR HUKUM

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
- Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris Nomor : 089.K/CDB/XII/2020 Tentang Piagam Audit Internal PT Cogindo Daya Bersama
- Anggaran Dasar Perusahaan beserta perubahannya.

PIAGAM AUDIT INTERNAL

Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) merupakan pernyataan formal bersama antara Satuan Audit Internal dengan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT PLN Indonesia Power Services yang memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Satuan Audit Internal untuk melaksanakan tugas dan fungsi audit dalam Perusahaan.

The Company established an Internal Audit Unit which is the Company's internal supervisory apparatus as stipulated in Law No. 19 of 2003 article 67 paragraph 1. The Internal Audit Unit (SAI) is a supporting organ that functions in evaluating the implementation of risk management and the implementation of GCG within Company. Internal Audit is a supervisory apparatus that is professional and independent in carrying out its duties and responsibilities to improve the Company's performance.

LEGAL BASIS

- Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2003 on SOEs.
- Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-09/MBU/2012 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises as amended by Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 dated March 3, 2023, on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.
- Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners Number: 089.K/CDB/XII/2020 on PT Cogindo Daya Bersama's Internal Audit Charter
- The Company's Articles of Association and their amendments.

INTERNAL AUDIT CHARTER

Internal Audit Charter is a joint formal statement between the Internal Audit Unit and the Board of Directors and Board of Commissioners of PT PLN Indonesia Power Services which gives authority and responsibility to the Internal Audit Unit to carry out audit duties and functions within the Company.

Perusahaan menyusun Piagam Audit Internal yang disahkan pada tanggal 21 Desember 2020 dan diperbaharui pada tanggal 14 Maret 2022 melalui Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Cogindo DayaBersama Nomor : 016.K/CDB/III/2022 dan Nomor : 001.K/DEKOM-CDB/2022. Dengan mempertimbangkan Standar Profesional Audit Intern yang dibuat oleh FK-SAI perusahaan dan/ atau Konsorsium Organisasi Profesi Audit Intern atau *International Professional Practices Framework Of Internal Auditing*.

Piagam Audit Internal Perusahaan ini berisikan antara lain:

1. Pendahuluan
2. Struktur
3. Tugas dan Tanggung Jawab serta Lingkup Pekerjaan
4. Wewenang
5. Pelaporan
6. Audit Internal Terintegrasi
7. Penggunaan Jasa External Untuk Mendukung Tugas Internal Audit
8. Komunikasi Audit
9. Standar Pelaksanaan Tugas Audit Internal, Kode Etik dan Program *Quality Assurance*
10. Pertanggungjawaban Satuan Audit Internal.

PRINSIP-PRINSIP POKOK SATUAN AUDIT INTERNAL

Berdasarkan Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal yang dikeluarkan oleh *The Institute of Internal Auditors*, prinsip-prinsip pokok Satuan Audit Internal adalah sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan kompetensi dan kecermatan profesi.
2. Objektif dan bebas dari pengaruh yang tidak semestinya (independen).
3. Selaras dengan strategi tujuan dan risiko organisasi.
4. Diposisikan secara layak dan didukung sumber daya memadai.
5. Menunjukkan kualitas dan perbaikan berkelanjutan.
6. Berkomunikasi secara efektif.
7. Memberi keyakinan berbasis risiko.
8. Menunjukkan integritas.
9. Berwawasan, proaktif dan fokus pada masa depan, dan
10. Mendorong perbaikan organisasi.

The company prepared an Internal Audit Charter that was approved on December 21, 2020, and updated on March 14, 2022, through the Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Cogindo DayaBersama Number: 016.K/CDB/III/2022 and Number: 001.K/DEKOM-CDB/2022. By considering the Internal Audit Professional Standards made by the FK-SAI of the company and/or the Consortium of Professional Organizations for Internal Auditing or the International Professional Practices Framework of Internal Auditing.

The Company's Internal Audit Charter contains, as follows:

1. Introduction
2. Structure
3. Duties and Responsibilities and Scope of Work
4. Authority
5. Reporting
6. Integrated Internal Audit
7. Use of External Services to Support Internal Audit Duties
8. Audit Communication
9. Internal Audit Task Implementation Standards, Code of Ethics and Quality Assurance Program
10. Accountability of the Internal Audit Unit.

CORE PRINCIPLES OF INTERNAL AUDIT UNIT

Based on the International Standards for Professional Practice of Internal Audit issued by The Institute of Internal Auditors, the main principles of SAI are as follows:

1. Implement professional competence and accuracy.
2. Objective and free from undue influence (independent).
3. Aligned with the strategic goals and risks of the organization.
4. Properly positioned and supported by adequate resources.
5. Demonstrate quality and continuous improvement.
6. Communicate effectively.
7. Providing risk-based confidence.
8. Demonstrate integrity.
9. Insightful, proactive and focused on the future, and
10. Drive organizational improvement.

VISI, MISI DAN TUJUAN SATUAN AUDIT INTERNAL

Visi:

Menjadi auditor internal yang memiliki integritas dan profesional tinggi untuk menjadi mitra strategis manajemen dan berkontribusi bagi terwujudnya tata kelola Perusahaan yang efektif dan efisien serta dapat memberi nilai tambah bagi Perusahaan.

Misi:

Aktif melakukan kegiatan pengawasan terhadap semua aktivitas organisasi Perusahaan dalam peningkatan kinerja Perusahaan dengan memberikan assurance, saran, pandangan secara objektif dan berbasis risiko berlandaskan prinsip *Good Corporate Governance*.

Tujuan:

Satuan Audit Internal membantu Direktur Utama untuk menentukan efektivitas dari kebijakan dan strategi yang telah disusun, dan dijalankan oleh Manajemen sehingga tercapai hal-hal sebagai berikut:

1. Informasi operasi, manajerial, finansial yang signifikan sudah akurat, dapat diandalkan dan tepat waktu.
2. Tindakan-tindakan pegawai sudah sesuai dengan kebijakan, standar, prosedur, hukum dan peraturan yang berlaku.
3. Sumber daya diperoleh secara ekonomis, digunakan secara efisien, dan diberdayakan serta dilindungi secara memadai.
4. Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang telah ada, dilaksanakan secara memadai.
5. Risiko-risiko Perusahaan telah dimutakhirkan dan dikelola secara efektif untuk mencapai sasaran Perusahaan.
6. Memastikan program-program, rencana dan tujuan Perusahaan tercapai.

VISION, MISSION AND OBJECTIVES OF THE INTERNAL AUDIT UNIT

Vision:

Become an internal auditor who has high integrity and professionalism to become a strategic management partner and contribute to the realization of effective and efficient corporate governance and can provide added value to the Company.

Mission:

Actively carry out supervisory activities on all activities of the Company's organization in improving the Company's performance by providing assurance, advice, views in an objective and risk-based manner based on the principles of Good Corporate Governance.

Objective:

The Internal Audit Unit assists the President Director to determine the effectiveness of the policies and strategies that have been prepared and implemented by Management hence the following things are achieved:

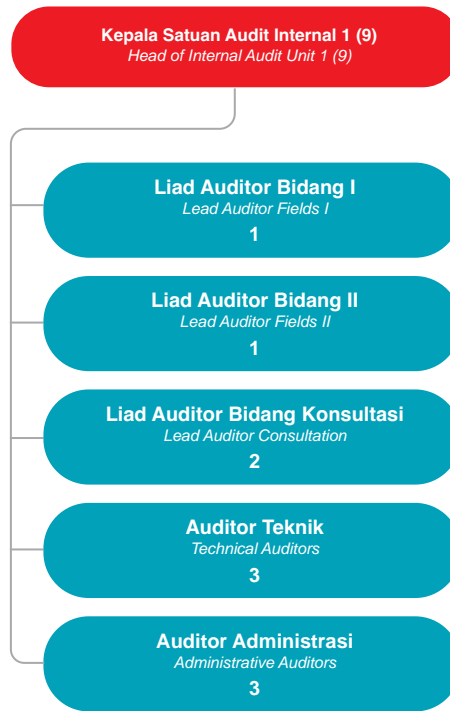
1. Significant operational, managerial and financial information is accurate, reliable and timely.
2. Employee actions are in accordance with applicable policies, standards, procedures, laws and regulations.
3. Resources are obtained economically, used efficiently, and adequately empowered and protected.
4. The existing principles of Good Corporate Governance (GCG) are adequately implemented.
5. The Company's risks have been updated and managed effectively to achieve the Company's goals.
6. Ensuring that the Company's programs, plans and objectives are achieved.

STRUKTUR ORGANISASI AUDIT INTERNAL DAN JUMLAH PEGAWAI

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 021.K/CDB/IV/2022 Tanggal 1 April 2022 Tentang Bagan Susunan Jabatan dan Formasi Pegawai Kantor Pusat PT Cogindo DayaBersama, bagan struktur organisasi Satuan Audit Internal adalah sebagai berikut:

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF INTERNAL AUDIT AND NUMBER OF EMPLOYEES

Based on the Decree of the Board of Directors Number: 021.K/CDB/IV/2022 Dated April 1, 2022, Regarding the Chart of Position Structure and Employee Formation of PT Cogindo DayaBersama Head Office, the organizational structure chart of the Internal Audit Unit is as follows:



Berdasarkan bagan struktur jabatan di atas terlihat bahwa Satuan Audit Internal dikepalai oleh Kepala Satuan Audit Internal dengan membawahi Lead Auditor Bidang 2 orang, *Lead Auditor* Konsultasi 1 orang, Auditor Teknik 3 orang dan Auditor Administrasi 3 orang.

Based on the position structure chart above, it can be seen that the Internal Audit Unit is headed by the Head of the Internal Audit Unit with 2 Lead Auditor Fields, 1 Lead Auditor Consultation, 3 Technical Auditors and 3 Administrative Auditors.

PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN KEPALA SATUAN AUDIT INTERNAL

Satuan Audit Internal dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Kepala Satuan Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dan merupakan pejabat satu tingkat di bawah Direksi yang memiliki hubungan fungsional dengan Komite Audit.

THE PARTY APPOINT AND DISMISS THE HEAD OF THE INTERNAL AUDIT UNIT

The Internal Audit Unit is led by the Head who is responsible to the President Director. The Head of the Internal Audit Unit is appointed and dismissed by the President Director after obtaining approval from the Board of Commissioners and is an official one level below the Board of Directors who has a functional relationship with the Audit Committee.

JUMLAH KARYAWAN DAN SERTIFIKASI PROFESI

Satuan Audit Internal dikepalai oleh Kepala Satuan Audit Internal dengan membawahi Lead Auditor Korporat, Auditor IT dan Teknik dan Auditor Administrasi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Cogindo DayaBersama Nomor : 016.K/CDB/III/2022 dan Nomor : 001.K/DEKOM-CDB/2022 tanggal 14 Maret 2022. Struktur organisasi di bawah Kepala SAI diatur dalam suatu Keputusan Direksi.

Dalam pelaksanaan fungsi harian Kepala Satuan Audit Internal secara struktur dibantu oleh 9 (sembilan) orang personil namun realisasi pemenuhan adalah 8 (delapan) orang personil yang masing-masing telah memiliki sertifikasi sebagaimana tabel berikut ini:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification
1.	Yakobus Krisnu Brayanto	Kepala Satuan Audit Internal Head of Internal Unit	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Audit Internal • Auditor Internal Sistem Manajemen <i>International Organization for Standardization</i> (ISO) (9001, 50001 & 55001) • Auditor Internal SMK3 • Sertifikasi Procurement / PBJ • Internal Audit Training • Internal Auditor for International Organization for Standardization (ISO) Management System (9001, 50001 & 55001) • Internal Auditor SMK3 • Procurement / PBJ Certification
2.	M. Akib Mapahir	Lead Auditor Korporat Corporate Lead Auditor	Sertifikasi Auditor Muda (BNSP) Junior Auditor Certification (BNSP)
3.	Candra Budiman	Lead Auditor Korporat Corporate Lead Auditor	-
4.	Iswandi Lodde	Lead Auditor Korporat Corporate Lead Auditor	-
5.	Barly Qomaruzzaman	Auditor Teknik Engineering Auditor	Sertifikasi Auditor Muda (BNSP) Junior Auditor Certification (BNSP)
6.	Himawan Septiaryanto	Auditor Teknik Engineering Auditor	-
7.	Arya Aryatna Bagja	Auditor Teknik Engineering Auditor	-
8.	Fahry Dwi Setiawan	Auditor Teknik Engineering Auditor	Sertifikasi Auditor Muda (BNSP) Junior Auditor Certification (BNSP)
9.	Adya Dinar Retha Prabara	Auditor Administrasi Administration Auditor	Dasar-dasar Audit Audit Basic

RUANG LINGKUP SATUAN AUDIT INTERNAL

Ruang lingkup Audit Internal yaitu memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*), konsultasi, menguji efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal dan proses *governance* yang meliputi:

1. Penelaahan atas profil risiko, pengendalian serta ketaatan pada kebijakan, rencana, prosedur, dan

NUMBER OF EMPLOYEES AND PROFESSIONAL CERTIFICATION

The Internal Audit Unit is headed by the Head of the Internal Audit Unit with oversight of the Lead Corporate Auditor, IT and Engineering Auditor and Administrative Auditor as regulated in the Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Cogindo DayaBersama Number: 016.K/CDB/III/2022 and Number: 001.K/DEKOM-CDB/2022 on March 14, 2022. The organizational structure under the Head of SAI is regulated in a Decree of the Board of Directors.

In the implementation of daily functions the Head of the Internal Audit Unit is structurally assisted by 9 (nine) personnel but the realization of fulfillment is 8 (eight) personnel, each of which has been certified as shown in the following table:

SCOPE OF INTERNAL AUDIT UNIT

The scope of Internal Audit is providing reasonable assurance, consulting, testing the effectiveness of risk management, internal control and governance processes which include:

1. Review of risk profile, control and adherence to policies, plans, procedures and laws and regulations

- peraturan perundang-undangan yang berdampak signifikan terhadap operasional Perusahaan.
2. Penelaahan atas akurasi, kecermatan dan ketelitian informasi keuangan dan non-keuangan baik manual maupun terkomputerisasi serta cara yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi dan melaporkan informasi tersebut secara akurat dan tepat waktu.
 3. Penelaahan atas cara pengadaan, penggunaan dan pengamanan aset dan melakukan verifikasi terhadap eksistensi aset.
 4. Penilaian atas pelaksanaan sistem informasi manajemen.
 5. Penelaahan atas operasi Perusahaan guna memastikan tingkat konsistensi dengan sasaran yang ingin dicapai dan rencana yang disusun.
 6. Melakukan investigasi dan audit khusus terhadap kasus yang berindikasi adanya kecurangan (*fraud*).
 7. Penelaahan atas Manajemen Aset Perusahaan guna meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan maupun kualitas lingkungan dimana Perusahaan beroperasi.
 8. Penelaahan atas mekanisme governance yang dilakukan oleh Manajemen guna memastikan program dan Implementasi yang dilakukan oleh Manajemen telah sesuai dengan nilai-nilai Perusahaan, *Enterprise Risk Management* dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
- that have significant impact on the Company's operations.
2. Review the accuracy and thoroughness of financial and non-financial information both manual and computerized and the methods used to identify, measure, classify and report this information accurately and in a timely manner.
 3. Reviewing the procedures for procuring, using and securing assets and verifying the existence of assets.
 4. Assessment of the implementation of management information systems.
 5. Review of the Company's operations to ensure the level of consistency with the goals to be achieved and the plans drawn up.
 6. Conduct special investigation and audit of cases indicating fraud.
 7. Review of the Company's Asset Management in order to improve the quality of the products produced and the quality of the environment in which the Company operates.
 8. Review of governance mechanisms carried out by Management to ensure programs and implementation carried out by Management are in accordance with the Company's values, Enterprise Risk Management and the principles of Good Corporate Governance.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN AUDIT INTERNAL

Tugas dan tanggung jawab Audit Internal adalah memastikan terlaksananya pengawasan (melalui kegiatan pengujian, penilaian, pelaporan, dan pemberian saran atau rekomendasi) serta pemberian konsultasi yang independen dan objektif terhadap efektivitas pengelolaan risiko dan pengendalian proses tata kelola kegiatan operasional dalam mencapai sasaran Perusahaan berdasarkan prinsip GCG (*Good Corporate Governance*), dengan tugas pokok sebagai berikut:

1. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan dan pengendalian intern di perusahaan sesuai dengan kebijakan perusahaan.
2. Melakukan kegiatan audit internal yang meliputi pengujian, penilaian, pelaporan, dan pemberian saran atau rekomendasi untuk memastikan tata kelola perusahaan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan pengendalian risiko secara optimal, serta telah mematuhi peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip GCG.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF INTERNAL AUDIT UNIT

Duties and responsibilities of the Internal Audit are to ensure the implementation of supervision (through testing, assessment, reporting and providing advice or recommendations) as well as providing independent and objective consultation on the effectiveness of risk management as well as control of operational governance processes in achieving the Company's goals based on GCG principles (Good Corporate Governance), with the following primary duties:

1. Test and evaluate the implementation and internal control in the company according to company policy.
2. Conducting internal audit activities which include testing, evaluating, reporting, and providing advice or recommendation to ensure that corporate governance has been implemented effectively and efficiently with optimal risk control, and has complied with laws and regulations and GCG principles.

3. Memastikan dan memonitor secara langsung terhadap kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan terutama pada kegiatan pengadaan dan investasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Mengelola kegiatan audit perusahaan yang dilaksanakan oleh pihak eksternal serta secara proaktif membina hubungan baik dengan auditor eksternal.
 5. Mengembangkan rencana audit tahunan yang dituangkan dalam Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) yang fleksibel dengan menggunakan metodologi pendekatan risiko.
 6. Melaksanakan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) termasuk segala tugas-tugas lain yang diminta oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Direktur Utama.
 7. Secara berkesinambungan mengembangkan kompetensi para auditor dengan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang cukup serta sertifikasi profesional.
 8. Berperan aktif dalam pengawasan mekanisme pelaksanaan *Code of Conduct* serta pencegahan tindakan kecurangan (*fraud*).
 9. Melakukan audit investigasi terhadap indikasi kecurangan di dalam organisasi dan menginformasikan hasilnya kepada Direktur Utama.
 10. Memberikan jasa konsultasi kepada pemilik proses bisnis atas permintaan pemilik proses bisnis atau atas inisiatif Auditor Internal dalam rangka mengidentifikasi kecukupan pengendalian internal yang akan diterapkan untuk menjamin tercapainya sasaran Perusahaan. Dalam melaksanakan peran "*Consulting*" tersebut, Auditor Internal melaporkan kepada Kepala Satuan Audit Internal sebelum dan sesudah pelaksanaan pekerjaan. Terkait hal ini tugas Auditor Internal hanya memberikan jasa konsultasi sesuai dengan standar profesi, sedangkan tanggung jawab atas pelaksanaan hasil konsultasi tetap berada pada pemilik proses bisnis dan tidak mengurangi wewenang Auditor Internal untuk melaksanakan fungsi tugas *assurance*-nya. Untuk menjamin objektivitas atas hasil audit maka Auditor Internal tidak boleh melaksanakan audit terhadap kegiatan yang merupakan hasil konsultasinya.
 11. Melaporkan isu-isu penting yang berhubungan dengan proses pengendalian kegiatan Perusahaan, unit usaha dan afiliasinya.
3. Ensure and directly monitor the policies, provisions, system and procedure as well as business activities carried out especially in procurement and investment activities in accordance with the applicable laws and regulations.
 4. Managing company audit activities by external parties and proactively fostering good relations with external auditors.
 5. Develop an annual audit plan as outlined in a flexible Annual Audit Work Program (PKAT) using a risk approach methodology.
 6. Carry out the Annual Audit Work Program (PKAT) including all other duties requested by the President Director and the Board of Commissioners through the President Director.
 7. Continuously developing the competence of auditors with sufficient knowledge, expertise and experience as well as professional certification.
 8. Playing an active role in overseeing the mechanism for implementing the Code of Conduct and preventing fraud.
 9. Conduct an investigative audit of indication of fraud within the organization and inform the results to the President Director.
 10. Provide consulting services to business process owners at the request of business process owners or on the initiative of the Internal Auditor in order to identify the adequacy of internal control to be implemented to ensure the achievement of the Company's goals. In carrying out the "Consulting" role, the Internal Auditor reports to the Head of the Internal Audit Unit before and after the implementation of work. In this regard, the task of the Internal Auditor is only to provide consulting services in accordance with professional standards, while the responsibility for implementing the results of the consultation remains with the business process owner and does not reduce the authority of the Internal Auditor to carry out his/her assurance function. To ensure objectivity on audit results, Internal Auditors may not carry out audits of activities that are the result of their consultations.
 11. Report on important issues related to the process of controlling the activities of the Company, its business units and affiliates.

WEWENANG SATUAN INTERNAL AUDIT

Satuan Audit Internal dalam melaksanakan fungsinya berwenang untuk:

1. Menyusun, mengubah dan melaksanakan kebijakan audit internal termasuk antara lain menetapkan sistem dan prosedur, serta lingkup pelaksanaan audit dengan persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris PT PLN Indonesia Power Services.
2. Melakukan audit terhadap semua kegiatan unit kerja, fungsi dalam organisasi Perusahaan, baik yang tertuang dalam rencana tahunan, maupun yang menjadi perhatian Direktur Utama dan Dewan Komisaris PT PLN Indonesia Power Services.
3. Melakukan audit terhadap badan usaha afiliasi Perusahaan atas perintah dari Direktur Utama PT PLN Indonesia Power Services selaku Kuasa Pemegang Saham.
4. Dapat mengakses dan melakukan forensik seluruh data dan informasi yang relevan dengan tupoksi unit kerja dan pegawai yang tersimpan dalam peralatan kerja, antara lain yang tidak terbatas pada fungsi, aktivitas, data, dokumen, korespondensi, laporan, aset, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan audit.
5. Memperoleh informasi dan penjelasan dari setiap pejabat/pegawai Perusahaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan audit dan pihak pejabat/pegawai dimaksud harus segera menanggapi kebutuhan tersebut.
6. Membantu penyidikan terhadap aspek yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, seperti penipuan, pemalsuan, penggelapan, pencurian, pembongkaran, perampokan dan bentuk kecurangan lainnya.
7. Melakukan pemeriksaan kepada vendor/rekan kerja Perusahaan atau pihak-pihak yang berkaitan dengan kejadian hanya terbatas pada konfirmasi dan klarifikasi baik secara administratif maupun fisik di lapangan.
8. Mengalokasikan sumber daya, menyusun jadwal, memilih objek audit, menentukan lingkup kerja dan menerapkan teknik-teknik yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan audit.
9. Jika diperlukan Satuan Audit Internal dapat meminta bantuan dari ahli/profesional dari dalam maupun luar Perusahaan atas biaya Perusahaan.

INTERNAL AUDIT UNIT AUTHORITIES

In carrying out its functions, the Internal Audit Unit is authorized to:

1. Develop, amend and implement internal audit policies including determining system and procedure, as well as the scope of audit implementation with the approval of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT PLN Indonesia Power Services.
2. Conduct an audit of all work unit activities, functions within the Company's organization, both those contained in the annual plan, as well as those that come to the attention of the President Director and the Board of Commissioners of PT PLN Indonesia Power Services.
3. Conducting audits of the Company's affiliated business entities on orders from the President Director of PT PLN Indonesia Power Services as the Shareholders' Attorney.
4. Can access and conduct forensics of all data and information relevant to the duties and functions of work units and employees stored in work equipment, including but not limited to functions, activities, data, documents, correspondence, reports, assets, and other matters related to the implementation of the audit.
5. Obtain information and explanation from every official/employee of the Company related to the implementation of the audit and the said official/employee must immediately respond to these needs.
6. Assist in investigation of aspects that may cause harm to the Company, such as fraud, counterfeiting, embezzlement, theft, demolition, robbery and other forms of fraud.
7. Examination of vendors/work partners of the Company or parties related to the incident is limited to confirmation and clarification both administratively and physically in the field.
8. Allocating resources, preparing schedules, selecting audit objects, determining the scope of work and implementing the techniques needed to achieve audit objectives.
9. If necessary, the Internal Audit Unit may request assistance from experts/professionals from within or outside the Company at the expense of the Company.

10. Wewenang Satuan Audit Internal sebatas pada penilaian dan analisa atas aktivitas yang diaudit, dalam hal pelaksanaan dan akibat dari aktivitas yang diaudit merupakan tanggung jawab manajemen.

INDEPENDENSI DAN OBJEKTIVITAS SATUAN INTERNAL AUDIT UNIT

Independensi

Auditor internal harus memiliki independensi dalam melakukan aktivitas audit, mengemukakan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar yang berlaku.

Dalam menegakkan independensinya, audit internal:

1. Mampu mengemukakan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun.
2. Memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, cakupan, cara, teknik dan pendekatan audit disertai dengan keahlian yang memadai dan kecermatan profesional.
3. Tidak melakukan kegiatan yang bersifat operasional di luar aktivitas audit.

Objektivitas

1. Auditor internal harus memiliki sikap mental independen dalam melaksanakan aktivitas audit. Sikap mental tersebut tercermin dari laporan yang lengkap, obyektif serta berdasarkan analisis yang cermat.
2. Auditor internal harus bebas dari pertentangan kepentingan atas objek atau kegiatan yang diaudit. Apabila auditor intern mempunyai pertentangan kepentingan, maka yang bersangkutan harus menyatakan keterkaitannya dan tidak ditugaskan untuk melaksanakan audit terhadap objek dan kegiatan tersebut.

KODE ETIK AUDITOR INTERNAL

Kode etik Auditor Internal merupakan aturan perilaku yang melekat pada diri/lembaga Auditor internal. Aturan perilaku tersebut berlaku baik di dalam tugas maupun di luar tugas. Dalam melaksanakan tugasnya, Auditor Internal senantiasa mengacu pada Standar dan kode etik audit internal dari The Institute Internal Auditors

10. Authority of the Internal Audit Unit is limited to the assessment and analysis of the activities being audited, in terms of the implementation and consequences of the activities being audited are management's responsibility.

INDEPENDENCE AND OBJECTIVITY OF INTERNAL AUDIT UNIT

Independence

Internal auditor must have independence in carrying out audit activities, express views and thoughts in accordance with his/her profession and applicable standards.

In upholding its independence, internal audit:

1. Must be able to express his/her views and thoughts without influence or pressure from any party.
2. Has freedom to determine the methods, scope, techniques and audit approaches accompanied by adequate expertise and professional rigor.
3. Not carrying out operational activities other than audit activities.

Objectivity

1. Internal auditor must have an independent mental attitude in carrying out audit activities. This mental attitude is reflected in a report that is complete, objective and based on careful analysis.
2. Internal auditor must be free from conflict of interest over the object or activity being audited. If the internal auditor has a conflict of interest, then the person concerned must declare his/her relationship and is not assigned to carry out an audit of the object and activity.

CODE OF ETHICS OF INTERNAL AUDITOR

Code of ethics of the Internal Auditor is a code of conduct inherent in the Internal Auditor's self/institution. These rules of conduct apply both on and off duty. In carrying out their duties, the Internal Auditor always refers to the internal audit standards and code of ethics from The Institute Internal Auditors (IIA) which include 4 (four)

(IIA) yang mencakup 4 (empat) prinsip yang relevan dengan profesi dan suasana praktik internal auditing, dan dijabarkan dalam 12 (dua belas) aturan perilaku.

Auditor Internal diharapkan menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip kode etik sebagai berikut:

Integritas

Integritas Auditor internal mendasari kepercayaan para pengguna terhadap pertimbangannya.

1. Melaksanakan pekerjaannya dengan kejujuran, kesungguhan dan tanggung jawab.
2. Mentaati hukum dan membuat pengungkapan sesuai hukum dan profesinya.
3. Sadar untuk tidak terlibat dalam aktivitas ilegal apapun, atau terlibat dalam tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau organisasinya.
4. Menghormati dan berkontribusi kepada tujuan organisasi yang sah dan etis.

Objektivitas

Auditor Internal menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diperiksa. Auditor Internal membuat penilaian yang seimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan mereka sendiri atau pun orang lain dalam membuat penilaian.

1. Tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat atau patut diduga dapat mengurangi kemampuannya untuk melakukan penilaian secara obyektif. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan atau hubungan yang mungkin bertentangan dengan kepentingan organisasi.
2. Tidak boleh menerima bentuk apapun yang dapat atau patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
3. Mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya, yaitu fakta-fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mendistorsi pelaporan dari kegiatan yang sedang diperiksa.

principles relevant to the profession and internal auditing practice environment, and are spelled out in 12 (twelve) rules of conduct .

Internal Auditor is expected to implement and uphold the following code of ethics principles:

Integrity

The integrity of the Internal Auditor underlies the trust of users in their judgment.

1. Conducting his/her work with honesty, sincerity and responsibility.
2. Obey the law and make legal and professional disclosures.
3. Be aware not to be involved in any illegal activity, or to be involved in any action that could discredit the internal audit profession or its organization.
4. Respect and contribute to the organization's legitimate and ethical goals.

Objectivity

Internal auditor demonstrate the highest level of professional objectivity in collecting, evaluating and communicating information about the activities or processes being examined. Internal Auditor make a balanced assessment of all relevant circumstances and are not influenced by their own interests or those of others in making the assessment.

1. May not participate in any activity or relationship that can or should be suspected of impairing his or her ability to make an objective assessment. Included in this are activities or relationships that may conflict with the interests of the organization.
2. May not accept any form that can or should be suspected of influencing professional judgment.
3. Disclose all important facts that are known, namely facts which, if not disclosed, could distort the reporting of the activity that is being examined.

Kerahasiaan

Auditor Internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang mereka terima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa izin kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya.

1. Bersikap hati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Tidak boleh menggunakan informasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk hal-hal yang dapat merugikan tujuan organisasi.

Kompetensi

Auditor Internal menerapkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan audit internal.

1. Hanya melakukan jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya.
2. Melakukan kegiatan audit sesuai dengan Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal.
3. Senantiasa meningkatkan keahlian dan efektivitas serta kualitas dari jasa yang diberikan.

METODOLOGI AUDIT

Metodologi pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Satuan Audit Internal telah menggunakan pendekatan *Risk Based Internal Audit* (RBIA) yang digunakan dalam rangka memberikan jaminan bahwa risiko telah dikelola dalam batasan risiko yang telah ditetapkan manajemen pada tingkatan korporasi.

HUBUNGAN DENGAN KOMITE AUDIT DAN AUDIT EKSTERNAL

Hubungan dengan Komite Audit

Hubungan dengan Komite Audit mencakup aktivitas sebagai berikut:

1. Mengadakan pertemuan dengan Komite Audit sedikitnya 1 (satu) kali sebulan atau lebih jika diperlukan untuk memastikan efektivitas pengendalian dan pengawasan secara umum.
2. Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, Satuan Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Dewan Komisaris setiap akhir periode pemeriksaan melalui Komite Audit.

Confidentiality

Internal Auditors respect the value and ownership of the information they receive and do not disclose information without permission unless there is a statutory provision or professional obligation to do so.

1. Be careful in using and maintaining the information obtained in the performance of their duties.
2. May not use information for personal gain or for things that can be detrimental to organizational goals.

Competence

Internal auditor apply the knowledge, skills and experience required in the implementation of internal audit services.

1. Only perform services that can be completed using the knowledge, expertise and experience they have.
2. Conduct audit activities in accordance with the International Standards for the Professional Practice of Internal Audit.
3. Constantly improve skills and effectiveness as well as the quality of the services provided.

AUDIT METHODOLOGY

The audit implementation methodology carried out by the Internal Audit Unit has used the Risk Based Internal Audit (RBIA) approach which is used in order to provide assurance that risks have been managed within the risk limits set by management at the corporate level.

RELATIONSHIP WITH THE AUDIT COMMITTEE AND EXTERNAL AUDIT

Relationship with the Audit Committee

Relationship with the Audit Committee includes the following activities:

1. Hold meetings with the Audit Committee at least 1 (once) a month or more if necessary to ensure the effectiveness of control and supervision in general.
2. In order to carry out the supervisory function, the Internal Audit Unit submits an Audit Result Report to the Board of Commissioners at the end of each inspection period through the Audit Committee.

3. Dewan Komisaris dapat meminta Auditor Internal untuk melaksanakan tugas audit khusus melalui Direktur Utama.
4. Melaporkan hasil audit khusus kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
5. Menyampaikan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
6. Dalam hal terdapat kejadian dimana Direksi telah melakukan sesuatu yang melebihi toleransi risiko Perusahaan, seperti tidak sesuai SOP dan kebijakan Perusahaan, KSAI akan melakukan diskusi dengan Direksi yang bersangkutan tentang alasan keputusan tersebut diambil, dan melaporkan kejadian tersebut kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Hubungan dengan Auditor Eksternal

Hubungan dengan Auditor Eksternal mencakup aktivitas sebagai berikut:

1. Satuan Audit Internal mendukung kelancaran tugas Auditor Eksternal termasuk dalam penyediaan informasi, dokumen, data dalam pelaksanaan audit dengan persetujuan Direktur Utama.
2. Satuan Audit Internal melakukan koordinasi dan monitoring terhadap seluruh Unit Kerja Perusahaan atas tindak lanjut temuan Auditor Eksternal.

PELAKSANAAN TUGAS TAHUN 2023

Pertanggungjawaban Satuan Audit Internal disampaikan langsung kepada Direktur Utama. Kegiatan Satuan Audit Internal sepanjang tahun 2023 telah sesuai dengan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) tahun 2023 sebagai berikut:

No.	Unit/Area Audit Audit Unit/Area	Progres Progress	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
I UNIT KERJA Work Unit			
1.	PLTU SINTANG	Terlaksana Implemented	16 s.d 18 Januari 2023 January 16-18, 2023
2.	PLTU SANGGAU	Terlaksana Implemented	19 s.d 21 Januari 2023 January 19-21, 2023
3.	PLTU BERAU	Terlaksana Implemented	16 s.d 20 Januari 2023 January 16-20, 2023
4.	PLTU PANGKALAN SUSU	Terlaksana Implemented	30 Januari s.d 03 February 2023 January 30-February 03, 2023
5.	PLTMG BAU BAU	Terlaksana Implemented	30 Januari s.d 03 February 2023 January 30-February 03, 2023

3. The Board of Commissioners may request the Internal Auditor to conduct a special audit assignment through the President Director.
4. Reporting the result of a special audit to the President Director with a copy to the Board of Commissioners through the Audit Committee.
5. Deliver the Annual Audit Work Program (PKAT) to the Board of Commissioners through the Audit Committee.
6. In the event that there is an incident where the Board of Directors has done something that exceeds the Company's risk tolerance, such as not according to SOP and Company policies, KSAI will hold discussions with the Board of Directors concerned about the reasons for the decision being taken, and report the incident to the Board of Commissioners through the Audit Committee.

Relationship with External Auditor

Relationship with the External Auditor include the following activities:

1. The Internal Audit Unit supports the seamless running of the External Auditor duties including in providing information, document, data in conducting audit with the approval of the President Director.
2. The Internal Audit Unit coordinates and monitors all of the Company's Work Units on the follow-up of the External Auditor's findings.

DUTIES IMPLEMENTATION IN 2023

The responsibility of the Internal Audit Unit is conveyed directly to the President Director. The activities of the Internal Audit Unit throughout 2023 are in accordance with the 2023 Annual Audit Work Program (PKAT), as follows:

No.	Unit/Area Audit Audit Unit/Area	Progres Progress	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
6.	PLTMG AMBON	Terlaksana Implemented	20 s.d 24 Februari 2023 February 20-24, 2023
7.	PLTU LABUAN	Terlaksana Implemented	13 s.d 17 Maret 2023 March 13-17, 2023
8.	PLTU PELABUHAN RATU	Terlaksana Implemented	13 s.d 17 Maret 2023 March 13-17, 2023
9.	PLTD NUSA PENIDA	Terlaksana Implemented	09 s.d 12 Mei 2023 May 09-12, 2023
10.	PLTMG TIMIKA MPP PAPUA	Terlaksana Implemented	22 s.d 26 Mei 2023 May 22-26, 2023
11.	PLTMG MONOKWARI MPP PAPUA	Terlaksana Implemented	22 s.d 26 Mei 2023 May 22-26, 2023
12.	PLTU LONTAR	Terlaksana Implemented	19 s.d 23 Juni 2023 June 19-23, 2023
13.	PLTU ADIPALA	Terlaksana Implemented	19 s.d 23 Juni 2023 June 19-23, 2023
14.	PLTMG SORONG	Terlaksana Implemented	24 s.d 28 Juli 2023 July 24-28, 2023
15.	PLTMG MERAUKE	Terlaksana Implemented	24 s.d 28 Juli 2023 July 24-28, 2023
16.	KANTOR PUSAT HEAD OFFICE	Terlaksana Implemented	23 Agustus s.d 4 Oktober 2023 August 23-October 2023
17.	PLTU Barru	Terlaksana Implemented	30 Oktober s.d 10 November 2023 October 30-November 10, 2023
18.	PLTU Suralaya	Terlaksana Implemented	30 Oktober s.d 10 November 2023 October 30-November 10, 2023
19.	PLTU Jeranjang	Terlaksana Implemented	30 Oktober s.d 10 November 2023 October 30-November 10, 2023
20.	PLTD Tenau	Terlaksana Implemented	20 November s.d 1 Desember 2023 November 20-December 1, 2023
21.	PLTP Ulumbu	Terlaksana Implemented	20 November s.d 1 Desember 2023 November 20-December 1, 2023
II ASSESMENT			
1.	ISO 45001:2015 (SMKL) PLTD Nusa Penida	Terlaksana Implemented	09 s.d 10 Mei 2023 May 09-10, 2023
2.	ISO 14001 : 2015 (SML) PLTD Nusa Penida	Terlaksana Implemented	17 s.d 19 Mei 2023 May 17-19, 2023
3.	ISO 37001:2016 (SMAP)	Terlaksana Implemented	14 s.d 16 Juni 2023 June 14-16, 2023
4.	ISO 9001:2015 (SMM)	Terlaksana Implemented	14 s.d 16 Juni 2023 June 14-16, 2023
5.	ISO 27001:2022 (SMKI)	Terlaksana Implemented	11 Oktober 2023 October 11, 2023

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN AUDIT INTERNAL

Perusahaan memberikan kesempatan kepada personil Satuan Audit Internal untuk mengikuti pelatihan/ pendidikan yang dapat meningkatkan kemampuan dan keahliannya untuk mendukung kegiatan operasional Perusahaan. Sepanjang tahun 2023, SAI telah mengikuti pelatihan sebagai berikut:

INTERNAL AUDIT UNIT COMPETENCY DEVELOPMENT

The Company provides opportunities for Internal Audit Unit personnel to attend training/education that can improve their abilities and expertise to support the Company's operational activities. Throughout 2023, SAI has participated in the following training:

Peserta Participants	Jenis Pelatihan Training Type	Penyelenggara Organizer	Waktu Date
Yakobus Krisnu Brayanto	Diklat dan Sertifikasi Kepala SPI Training and Certification of Head of SPI	PPA&K	12 s.d. 18 Oktober 2023 October 12-18, 2023
Yakobus Krisnu Brayanto	Undangan Pelatihan Metodologi & <i>Quality Assurance</i> Internal Audit Dalam Rangka Mendukung dan Menambah Value HSH PT PLN Indonesia Power Invitation to Internal Audit Methodology & Quality Assurance Training To Support and Add HSH Value PT PLN Indonesia Power	PT PLN Indonesia Power Semarang	03-05 Mei 2023 May 03-05, 2023
Yakobus Krisnu Brayanto	Undangan <i>Assessment Centre Soft Competency Batch 2</i> Invitation of Assessment Centre Soft Competency Batch 2	PLN UPAC	26 – 27 September 2023 September 26-27, 2023
Yakobus Krisnu Brayanto	Undangan Forum Auditor Internal dengan Tema Implementasi Pemahaman Proses Bisnis Dalam Rangka Mendukung <i>Strategic Goal</i> Transformasi 2.0 PT PLN IP 2024-2028 Invitation to the Internal Auditor Forum with the theme Implementation of Understanding Business Processes in Order to Support the Strategic Goal of PT PLN IP Transformation 2.0 2024-2028	PLTA Bengkulu, Dago Bandung	13-15 Desember 2023 December 13-15, 2023
M. Akib Mapahir	Komunikasi dan Psikologi Audit Communication and Audit Psychology	PPA&K	13 s.d. 22 Februari 2023 February 13-22, 2023
Iswandi Lodde	Komunikasi dan Psikologi Audit Communication and Audit Psychology	PPA&K	13 s.d. 22 Februari 2023 February 13-22, 2023
Barly Qomaruzzaman	Komunikasi dan Psikologi Audit Communication and Audit Psychology	PPA&K	13 s.d. 22 Februari 2023 February 13-22, 2023
Himawan Septiaryanto	Komunikasi dan Psikologi Audit Communication and Audit Psychology	PPA&K	13 s.d. 22 Februari 2023 February 13-22, 2023
Arya Aryatna Bagja	Dasar-Dasar Audit Audit Basics	PPA&K	14 s.d. 24 Agustus 2023 August 14-24, 2023
Adya Danar Retha Prabara	Dasar-Dasar Audit Audit Basics	PPA&K	15 s.d. 23 Mei 2023 May 15-23, 2023

TEMUAN DAN TINDAK LANJUT

Monitoring tindak lanjut Hasil Audit pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

FINDINGS AND FOLLOW UP

Follow-up monitoring of Audit Results in 2023 is as follows:

No.	Unit/Area Audit Audit Area/Unit	Jumlah AOI AOI Total	Jumlah Rekomendasi Total Recommendations	Jumlah Rekomendasi Selesai Total Recommendations Completed	Jumlah Rekomendasi Dalam Proses Total Recommendations In Process	Target Waktu Penyelesaian Target Completion Time
I UNIT KERJA						
1.	PLTU Sintang	3	4	4	0	28 Februari 2023 February 28, 2023
2.	PLTU Sanggau	3	5	5	0	30 Maret 2023 March 30, 2023
3.	PLTU Berau	1	3	3	0	06 April 2023 April 06, 2023
4.	PLTU Pangkalan Susu	1	2	2	0	20 Maret 2023 March 20, 2023
5.	PLTMG Bau bau	1	1	1	0	30 April 2023 April 30, 2023
6.	PLTMG Ambon	4	8	8	0	10 Maret 2023 March 10, 2023

No.	Unit/Area Audit Audit Area/Unit	Jumlah AOI AOI Total	Jumlah Rekomendasi Total Recommendations	Jumlah Rekomendasi Selesai Total Recommendations Completed	Jumlah Rekomendasi Dalam Proses Total Recommendations In Process	Target Waktu Penyelesaian Target Completion Time
7.	PLTU Labuan	3	7	7	0	20 Mei 2023 May 20, 2023
8.	PLTU Pelabuhan Ratu	4	10	10	0	30 Juli 2023 July 30, 2023
9.	PLTD Nusa Penida	4	5	5	0	31 Desember 2023 December 31, 2023
10.	PLTMG Timika	2	4	0	4	31 Oktober 2023 October 31, 2023
11.	PLTMG Monokwari	2	3	0	3	31 Agustus 2023 August 31, 2023
12.	PLTU Lontar	3	6	6	0	31 Juli 2023 July 31, 2023
13.	PLTU Adipala	5	6	0	0	31 Agustus 2023 August 31, 2023
14.	PLTMG Sorong	4	6	0	6	31 Desember 2023 December 31, 2023
15.	PLTMG Merauke	2	3	3	0	29 September 2023 September 29, 2023
16.	Kantor Pusat	0	0	0	0	31 Desember 2023 December 31, 2023
17.	PLTU Barru	1	1	1	0	31 Desember 2023 December 31, 2023
18.	PLTU Suralaya	2	5	1	4	15 Februari 2024 February 15, 2024 (ETL-2)
19.	PLTU Jeranjang	2	5	5	0	31 Desember 2023 December 31, 2023
20.	PLTD Tenau	2	5	2	3	15 Februari 2024 February 15, 2024 (ETL-2)
21.	PLTP Ulumbu	1	1	0	1	30 Juni 2024 June 30, 2024
22.	PLTU Kalbar	2	3	0	3	29 Februari 2024 February 29, 2024
II ASSESSMENT						
1.	ISO 45001:2015 (SMKL) PLTD Nusa Penida	2	2	0	0	31 Agustus 2023 August 31, 2023
2.	ISO 14001:2015 (SML) PLTD Nusa Penida	2	2	0	0	31 Agustus 2023 August 31, 2023
3.	ISO 37001:2016 (SMAP)	5	5	5	0	31 September 2023 September 31, 2023
4.	ISO 9001:2015 (SMM)	9	9	9	0	31 Agustus 2023 August 31, 2023
5.	ISO 27001:2022 (SMKI)	36	36	35	1	22 Desember 2023 December 22, 2023

PROFIL PEJABAT SATUAN AUDIT INTERNAL

Berdasarkan SK No 1064.K/020/IP/2022 tentang Penugaskaryaan Pegawai PT Indonesia Power ke PT Cogindo DayaBersama tanggal 19 Juli 2022, menugaskan dan menempatkan Sdr. Yakobus Krisnu Brayanto sebagai Kepala Satuan Audit Internal (KSAI) PT Cogindo DayaBersama dan berdasarkan SK No. 1063.K/020/IP/2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan membebaskan Sdr. Yudi Mulyadi dalam jabatan lamanya sebagai KSAI untuk menjabat posisi baru di perusahaan induk.

PROFILE OF INTERNAL AUDIT UNIT OFFICER

Based on SK No 1064.K/020/IP/2022 on the Assignment of Employees of PT Indonesia Power to PT Cogindo DayaBersama dated July 19, 2022, assigned and placed Mr. Yakobus Krisnu Brayanto as Head of the Internal Audit Unit (KSAI) of PT Cogindo DayaBersama and based on SK No. 1063.K/020/IP/2022 dated July 19, 2022 on the Appointment in Position, freeing Mr. Yudi Mulyadi in his old position as KSAI to take up a new position at the holding company.

► Profil Pejabat Satuan Audit Internal Profile of Internal Audit Unit Officers



Yakobus Krisna B.

Kepala Satuan Audit Internal
Head of Internal Audit Unit

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Domisili | Domicile
Semarang
Semarang

Usia | Age
50 tahun per 31 Desember 2023
50 years old as of December 31, 2023

Periode | Period
2023 - 2026
2023 - 2026

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment

SK Direksi No. 1064.K/020/IP/2022 tanggal 19 Juli 2022
Decree of the Board of Directors No. 1064.K/020/IP/2022 dated July 19, 2022

Riwayat Pendidikan Educational Background

S1 Ilmu Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang
Bachelor of Economics from University of 17 August 1945 (UNTAG) Semarang

Riwayat Pekerjaan Professional Experience

- Kepala Satuan Audit Internal (KSAI) PT Cogindo DayaBersama (Juli 2022 s.d sekarang)
- Auditor of Compliance and Consultation PT Indonesia Power (1 Januari 2022 – Juli 2022)
- Audit Konsultasi dan Kepatuhan PT Indonesia Power (1 Januari 2022 – 31 Desember 2021)
- Head of Internal Audit Unit (KSAI) of PT Cogindo DayaBersama (July 2022 until present)
- Auditor of Compliance and Consultation of PT Indonesia Power (January 1, 2022 – July 2022)
- Consulting and Compliance Audit of PT Indonesia Power (1 Januari 2022 – 31 Desember 2021)

Rangkap Jabatan Concurrent Position

Tidak Ada
None

Sertifikasi Certification

- Pelatihan Audit Internal
- Auditor Internal Sistem Manajemen *International Organization for Standardization* (ISO) (9001, 50001 & 55001)
- Auditor Internal SMK3
- Sertifikasi Prokurmen / PBJ
- Internal Audit Training
- Internal Auditor for *International Organization for Standardization* (ISO) Management System (9001, 50001 & 55001)
- Internal Auditor SMK3
- Procurement / PBJ Certification

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Sistem Pengendalian Internal Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER- 01/ MBU/2011 Pasal 26 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.

Penerapan Sistem Pengendalian Internal dilakukan pada semua lini bisnis dengan sistem berjenjang dari ujung kegiatan sampai dengan kompilasi pelaporan pada Perusahaan dan pelaksanaannya dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, Direksi serta seluruh pejabat sebagai suatu proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan dalam kategori:

1. Pengendalian kegiatan operasi yang efektif dan efisien;
2. Pengendalian keuangan dan keandalan laporan keuangan;
3. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku;
4. Penjagaan terhadap aset.

Perusahaan menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif dengan melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pegawai dalam Perusahaan untuk menetapkan suatu sistem pengendalian *intern* yang efektif dalam rangka mengamankan investasi dan aset Perusahaan, dengan melibatkan Audit Internal melalui identifikasi dan evaluasi berdasarkan standar maupun pedoman yang dikembangkan *Institute of Internal Auditors* (IIA).

PENGENDALIAN KEUANGAN DAN OPERASIONAL

Sistem pengendalian keuangan diterapkan Perusahaan dengan cara menyediakan informasi keuangan bagi setiap tingkatan Manajemen, para Pemegang Saham, serta Pemangku Kepentingan yang dijadikan dasar pengambilan keputusan ekonomi. Sistem ini dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan kegiatan operasi Perusahaan.

The Company's Internal Control System refers to the Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises No. PER- 01/MBU/2011 Article 26 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

The implementation of the Internal Control System is carried out in all business lines with a tiered system from the end of the activity to the compilation of reports to the Company and its implementation is influenced by the Board of Commissioners, Board of Directors and all officials as a process designed to provide adequate assurance regarding the achievement of objectives in the following categories:

1. Effective and efficient control of operational activities;
2. Financial control and reliability of financial statements;
3. Compliance with applicable laws and regulations;
4. Safeguarding assets.

The Company implements an effective internal control system by involving the Board of Commissioners, Board of Directors and all employees in the Company to establish an effective internal control system in order to safeguard the Company's investments and assets, involving Internal Audit through identification and evaluation based on standards and guidelines developed by the Institute of Internal Auditors (IIA).

FINANCIAL AND OPERATIONAL CONTROL

The Company implements an effective internal control system by involving the Board of Commissioners, Board of Directors and all employees in the Company to establish an effective internal control system in order to safeguard the Company's investments and assets, involving Internal Audit through identification and evaluation based on standards and guidelines developed by the Institute of Internal Auditors (IIA).

Sementara itu, sistem pengendalian operasional dilakukan dengan cara menerapkan kebijakan dan prosedur yang secara langsung digunakan untuk mencapai sasaran dan target serta menjamin atau menyediakan laporan keuangan yang tepat serta menjamin ditaatinya atau dipatuhinya hukum dan peraturan.

KESESUAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DENGAN KERANGKA COSO

Perusahaan memiliki sistem pengendalian intern yang sesuai dengan kerangka kerja yang diakui secara internasional, yakni *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO). Menurut COSO, Sistem Pengendalian Internal merupakan proses yang melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, serta personil lainnya. Hal ini sejalan dengan Sistem Pengendalian Internal yang ada di Perusahaan yang terus membangun sistem kontrol organisasi dengan melibatkan seluruh sumber daya manusia yang dimiliki.

Tujuan operasional berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi dan tujuan pelaporan berkaitan dengan kepentingan pelaporan keuangan yang memenuhi kriteria andal, tepat waktu, transparan dan persyaratan lain yang ditetapkan. Sedangkan tujuan kepatuhan berkaitan dengan kepatuhan Perusahaan terhadap hukum dan Peraturan Perundang-undangan.

Menurut COSO, unsur-unsur pengendalian intern meliputi komponen-komponen sebagai berikut.

1. Lingkungan pengendalian;
2. Penilaian risiko;
3. Aktivitas pengendalian;
4. Informasi dan Komunikasi;
5. Kegiatan pemantauan.

The Company implements a financial control system by providing financial information for each level of Management, Shareholders and Stakeholders which is used as the basis for making economic decisions. This system can be used by management to plan and control the Company's operations.

COMPATIBILITY OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM WITH THE COSO FRAMEWORK

The Company has an internal control system in accordance with an internationally recognized framework, namely the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). According to COSO, the Internal Control System is a process that involves the Board of Commissioners, Board of Directors, and other personnel. This is in line with the Internal Control System in the Company which continues to build an organizational control system by involving all of its human capital.

Operational objectives relate to the effectiveness and efficiency of operations and reporting objectives relate to the interests of financial reporting that meet reliable, timely, transparent criteria and other stipulated requirements. Meanwhile, the purpose of compliance is related to the Company's compliance with laws and regulations.

According to COSO, the elements of internal control include the following components.

1. Control environment;
2. Risk assessment;
3. Control activities;
4. Information and Communication;
5. Monitoring activities.

Komponen Pengendalian Internal versi COSO COSO version of Internal Control Component	Penjelasan Explanation	Penerapan di PLN IP Services Deployment in PLN IP Services
Lingkungan pengendalian	Lingkungan pengendalian adalah rangkaian standar, proses dan struktur yang menjadi dasar dalam pelaksanaan <i>Internal Control</i> di seluruh organisasi. Terdapat lima prinsip yang terkait dengan komponen ini yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Organisasi menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika • <i>Board of Directors</i> menunjukkan independensi dari manajemen dan melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan dan pelaksanaan <i>Internal Control</i>. • Dengan pengawasan Board, manajemen menetapkan struktur, bentuk pelaporan, tanggung jawab dan otoritas yang diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan. • Organisasi menetapkan komitmen dalam menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten dalam rangka pencapaian tujuan. • Organisasi memegang individu yang bertanggungjawab dalam <i>Internal Control</i> dalam rangka pencapaian tujuan. 	Lingkungan pengendalian di Perusahaan diselenggarakan dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Integritas dan nilai etika; 2. Komitmen terhadap kompetensi; 3. Kepemimpinan yang kondusif; 4. Pembentukan struktur Perusahaan yang sesuai dengan kebutuhan; 5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; 6. Penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian tujuan Perusahaan; 7. Hubungan kerja yang baik pada seluruh unit kerja di lingkungan PLN IP Services.
Control environment	Control environment is a set of standards, processes and structures that form the basis for the implementation of Internal Control throughout the organization. There are five principles associated with this component, namely: <ul style="list-style-type: none"> • The organization demonstrates a commitment to integrity and ethical values • The Board of Directors demonstrates independence from management and exercises supervision of the development and implementation of Internal Control. • Under the Board supervision, management determines the structure, reporting forms, responsibilities and authorities needed to achieve objectives. • The organization establish a commitment in attracting, developing and retaining competent individuals in order to achieve goals. • The organization holds individuals who are responsible for Internal Control in order to achieve goals. 	Control environment in the Company is organized by: Integrity and ethical values; <ol style="list-style-type: none"> 1. Commitment to competence; 2. Conducive leadership; 3. Formation of corporate structure according to needs; 4. Appropriate delegation of authority and responsibility; 5. Formulation and implementation of human capital development policies that support the achievement of corporate goals; 6. Good working relationship in all work units within PLN IP Services.
Penaksiran risiko	Penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko untuk mencapai tujuan, serta membentuk dasar mengenai bagaimana risiko harus dikelola. Terdapat empat prinsip yang berkaitan dengan komponen ini yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Organisasi menentukan tujuan yang spesifik sehingga memungkinkan untuk dilakukan identifikasi dan penilaian risiko yang terkait dengan tujuan. • Organisasi mengidentifikasi risiko yang terkait dengan pencapaian tujuan di seluruh entitas dan menganalisis risiko untuk menjadi dasar bagaimana risiko akan diperlakukan. • Organisasi mempertimbangkan potensi fraud dalam penilaian risiko. • Organisasi mengidentifikasi dan menilai perubahan yang akan memengaruhi sistem pengendalian internal secara signifikan. 	Penetapan tujuan Perusahaan memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu serta dikomunikasikan ke seluruh pegawai, dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap unit dan Departemen telah menyusun profil risiko serta upaya mitigasi yang diperlukan.

Komponen Pengendalian Internal versi COSO COSO version of Internal Control Component	Penjelasan Explanation	Penerapan di PLN IP Services Deployment in PLN IP Services
Risk assessment	Risk assessment involves a dynamic and iterative process to identify and analyze risks to achieve objectives, and forms the basis for how risks should be managed. There are four principles related to this component, namely: <ul style="list-style-type: none"> • The organization determine specific objectives so that it is possible to identify and assess the risks associated with the objectives. • The organization identify the risks associated with achieving its objectives across the entity and analyzes the risks to form the basis of how the risks will be treated. • The organization considers the potential for fraud in risk assessment. • The organization identify and assesses changes that will significantly affect the internal control system. 	Setting company goals contains specific, measurable, achievable, realistic and time-bound statements and directions and is communicated to all employees, while still guided by the applicable laws and regulations. Each unit and department has developed a risk profile and required mitigation efforts.
Kegiatan pengendalian	Aktivitas Pengendalian merupakan tindakan yang ditetapkan dengan prosedur dan kebijakan untuk meyakinkan bahwa manajemen telah mengarah untuk memitigasi risiko dalam rangka pencapaian tujuan. Terdapat tiga prinsip dalam komponen ini yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang berkontribusi terhadap mitigasi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima dalam rangka pencapaian tujuan. • Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian secara umum terkait teknologi dalam rangka pencapaian tujuan. • Organisasi menyebarkan aktivitas pengendalian melalui kebijakan dan prosedur dalam pengimplementasiannya. 	Kegiatan Pengendalian dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut namun tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> • Tinjauan Direksi atas kinerja Perusahaan; • Pembinaan sumber daya manusia; • Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; • Pengendalian fisik atas aset; • Pemisahan fungsi; • Pengendalian atas pengelolaan keuangan.
Control activities	Control activities are actions that are determined by procedures and policies to ensure that management has directed risk mitigation in order to achieve objectives. There are three principles in this component, namely: <ul style="list-style-type: none"> • The organization selects and develops control activities that contribute to risk mitigation to an acceptable level in order to achieve objectives. • The organization selects and develops general control activities related to technology in order to achieve objectives. • he organization deploys control activities through policies and procedures for implementation. 	Control activities are carried out through the following but not limited to: <ul style="list-style-type: none"> • Board of Directors' review of the Company's performance; • Development of human capital; • Control over management of information system; • Physical control over assets; • Separation of functions; • Control over financial management.
Informasi dan komunikasi	Informasi diperlukan dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab <i>Internal Control</i> nya dalam rangka pencapaian tujuan. Sedangkan komunikasi terjadi baik secara internal maupun eksternal dengan menyediakan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan <i>Internal Control</i> sehari-hari. Terdapat tiga prinsip dalam komponen ini yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Organisasi memperoleh dan menggunakan informasi yang berkualitas dan relevan dalam rangka mendukung fungsi dari komponen lain dalam <i>Internal Control</i>. • Organisasi secara internal mengkomunikasikan informasi, termasuk tujuan dan tanggung jawab <i>Internal Control</i> dalam rangka mendukung fungsi dari komponen lain dari <i>Internal Control</i>. • Organisasi berkomunikasi dengan pihak eksternal terkait hal yang mempengaruhi fungsi dari komponen lain dalam <i>Internal Control</i>. 	Setiap unit kerja wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam waktu dan bentuk (format) yang tepat untuk memudahkan pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawabannya. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif baik komunikasi di lingkungan Perusahaan maupun komunikasi dengan pihak luar yang terkait dalam program, proyek, dan kegiatan lainnya termasuk penganggaran. <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi dengan pegawai dan pihak lain yang terkait, antara lain melalui dan tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan buku Pedoman pelaksanaan kebijakan dan prosedur; • Surat Edaran; • Memorandum; • Pengumuman; • Pemanfaatan Intranet dan internet; • Arahan lisan

<p>Komponen Pengendalian Internal versi COSO COSO version of Internal Control Component</p>	<p>Penjelasan Explanation</p>	<p>Penerapan di PLN IP Services Deployment in PLN IP Services</p>
<p>Information and Communication</p>	<p>Information is needed in order to carry out its Internal Control responsibilities in order to achieve goals. Meanwhile, communication occurs both internally and externally by providing the necessary information in the context of the daily implementation of Internal Control. There are three principles in this component, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The organization obtain and use quality and relevant information in order to support the functions of other components in Internal Control. • The organization internally communicates information, including the objectives and responsibilities of Internal Control in order to support the functions of other components of Internal Control. • The organization communicates with external parties regarding matters that affect the function of other components in Internal Control. 	<p>2. Mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi untuk meningkatkan kegunaan dan keandalan komunikasi secara terus menerus.</p> <p>Each work unit is required to identify, record and communicate information related to the implementation of its main duties and functions in the right time and format to facilitate its implementation, control and accountability. Communication of information must be carried out effectively both within the Company and with external parties involved in programs, projects and other activities including budgeting.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Implement various forms and means of communication with employees and other related parties, including but not limited to: <ul style="list-style-type: none"> • Compilation of a guidebook for the implementation of policies and procedures; • Circular letter; • Memorandum; • Announcement; • Utilization of Intranet and internet; • Oral direction 2. Manage, develop and update information systems to improve the usability and reliability of communication on an ongoing basis.
<p>Pemantauan</p>	<p>Evaluasi berkelanjutan, terpisah, atau kombinasi keduanya untuk memastikan seluruh komponen <i>Internal Control</i> ada dan berfungsi. Terdapat dua prinsip dalam komponen ini yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organisasi memilih, mengembangkan, dan melaksanakan evaluasi berkelanjutan dan/ atau terpisah untuk memastikan seluruh komponen <i>Internal Control</i> ada dan berfungsi. • Organisasi mengevaluasi dan mengkomunikasikan defisiensi <i>Internal Control</i> pada pihak yang bertanggung jawab agar diambil tindakan korektif. 	<p>Pemantauan dilaksanakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan rutin terhadap kegiatan yang sedang berjalan (<i>on going monitoring</i>), diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan-tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. 2. Evaluasi oleh unit terpisah/independen (<i>separate evaluation</i>), selain dilakukan oleh Audit Internal yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Perusahaan juga dapat dilakukan oleh Auditor Eksternal termasuk Kantor Akuntan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
<p>Monitoring</p>	<p>Continuous evaluation, separate, or a combination of both to ensure all Internal Control components are present and functioning. There are two principles in this component, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The organization select, develop, and carry out ongoing and/or separate evaluation to ensure that all Internal Control components are present and functioning. • The organization evaluates and communicates Internal Control deficiencies to the responsible party so that corrective action is taken. 	<p>Monitoring is implemented through:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Routine monitoring of ongoing activities (on-going monitoring), carried out through routine management activities, supervision, comparison, reconciliation, and other actions related to the implementation of tasks. 2. Evaluation by a separate/independent unit (separate evaluation), apart from being carried out by an Internal Audit appointed and determined by the Company, can also be conducted by an External Auditor including a Public Accounting Firm in accordance with the applicable laws and regulations.

EVALUASI EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL

Evaluasi Sistem Pengendalian Internal atas pelaporan keuangan Perusahaan pada Tahun 2023 telah dilaksanakan melalui pelaksanaan beberapa macam kegiatan audit, diantaranya berupa Audit Operasional (Produksi dan Keuangan), *Assessment* Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), Audit Sistem Mutu, Audit Sistem Manajemen Keselamatan, dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L), dan Sistem Audit Teknologi Informasi (IT).

Evaluasi yang telah dilakukan ini menjadi salah satu pondasi bagi Perusahaan untuk terus melaksanakan perbaikan dan penyempurnaan sistem pengendalian yang dapat meningkatkan pertumbuhan bisnis Perusahaan.

PERNYATAAN DIREKSI ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Salah satu implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah memastikan bahwa sistem pengendalian internal telah dilaksanakan secara memadai. Sistem pengendalian intern dirancang untuk mengelola dan mengendalikan risiko dengan baik.

Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan sistem pengendalian intern yang baik untuk mencapai tujuan Perusahaan, sedangkan Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Komite Audit bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dalam rangka memastikan terselenggaranya pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian internal tersebut.

Pernyataan pengendalian intern ini menggambarkan setiap kegiatan dan transaksi Perusahaan dilaksanakan berdasarkan pengendalian internal yang memadai meliputi kegiatan operasional dijalankan secara efektif dan efisien, laporan keuangan dan laporan manajemen yang benar, lengkap dan tepat waktu, serta kepatuhan terhadap Undang - undang dan peraturan yang berlaku.

EVALUATION OF INTERNAL CONTROL EFFECTIVENESS

Evaluation of the Internal Control System for the Company's financial reporting in 2023 has been carried out through the implementation of several types of audit activities, including Operational Audit (Production and Finance), *Assessment* Implementation *Good Corporate Governance* (GCG), Quality System Audit, Safety Management System Audit, and Occupational Health and Environment (SMK3L), as well as Information Technology (IT) Audit System.

The evaluation that has been carried out has become one of the foundations for the Company to continue to carry out improvement and refinement of the control system that can enhance the Company's business growth.

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE ADEQUACY OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

One of the implementations of Good Corporate Governance is to ensure the internal control system has been adequately implemented. The internal control system is designed to manage and control risks properly.

The Board of Directors is responsible for implementing a good internal control system to achieve the Company's objectives, while the Board of Commissioners, assisted by the Audit Committee, is responsible for supervising to ensure the implementation of internal control in general, including the Board of Directors' policies determining such internal control.

This internal control statement describes every activity and transaction of the Company conducted based on adequate internal control, including operational activities carried out effectively and efficiently, correct, complete, and timely financial statements and management reports, and compliance with applicable laws and regulations.

Manajemen Risiko

Risk Management

Setiap perusahaan pastinya memiliki tujuan atau visi misi. Strategi perusahaan dalam mencapai tujuan tersebut, pastinya tak akan terlepas dari berbagai risiko. Kehadiran manajemen risiko perusahaan atau *Enterprise Risk Management* (ERM) sangat berperan penting dalam mengelola risiko yang mungkin dihadapi sebuah perusahaan.

Pengelolaan risiko di lingkungan PLN IP Services mempertimbangkan perubahan lingkungan baik eksternal maupun internal sehingga diperlukan pengelolaan semua risiko secara sistematis, terstruktur dan komprehensif dalam rangka meningkatkan kepastian tercapainya tujuan dan sasaran Perusahaan, baik dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) maupun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Penerapan Manajemen Risiko bertujuan agar tercipta budaya sadar risiko di perusahaan sehingga Manajemen Risiko menjadi bagian integral dalam setiap kegiatan bisnis Perusahaan. Hal tersebut memiliki pengertian bahwa dalam setiap kegiatan bisnis selalu memperhitungkan risiko yang melekat dari setiap keputusan bisnis yang dipilih dan menjaga perusahaan dari masalah yang kemungkinan akan terjadi.

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

Perusahaan berupaya maksimal dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko secara bertahap sesuai dengan pertumbuhan skala usaha, diselaraskan dengan perkembangan metoda pengelolaan risiko terkini serta dengan berlakunya peraturan dari Kementerian BUMN nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012, pada pasal 25 tentang Manajemen Risiko yang wajib menerapkan:

1. Direksi, dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan korporasi, harus mempertimbangkan risiko usaha.
2. Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.

Every company certainly has a goal or vision and mission. The company's strategy in achieving these goals, certainly will not be separated from various risks. The presence of enterprise risk management (ERM) plays an important role in managing the risks that a company may face.

Risk management within PLN IP Services takes into account environmental changes both external and internal so that it is necessary to manage all risks in a systematic, structured and comprehensive manner in order to increase certainty of achieving the Company's goals and objectives, both in the Company's Long Term Plan (RJPP) and the Company's Work Plan and Budget (RKAP).

Implementation of Risk Management aims to create a culture of risk awareness in the company so that Risk Management becomes an integral part of every business activity of the Company. This has the meaning that in every business activity always takes into account the risks inherent in every business decision chosen and protects the company from problems that are likely to occur.

RISK MANAGEMENT POLICY

The Company's making maximum efforts in implementing Risk Management in stages in accordance with the growth of business scale, aligned with the development of the latest risk management methods and with the enactment of regulations from the Ministry of SOEs number PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) and the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-09/MBU/2012, in article 25 on Risk Management which is required to apply:

1. The Board of Directors, in making every corporate decision/action, must consider business risks.
2. The Board of Directors is required to develop and implement an integrated corporate risk management program which is part of the implementation of the GCG program.

3. Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan, dengan:
 - Membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi; atau
 - Memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko.
4. Direksi wajib menyampaikan laporan profil risiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala Perusahaan.

Selain itu, PLN IP Services juga menyesuaikan diri dengan perkembangan standarisasi praktik *Enterprise Risk Management* (ERM) secara internasional, kebijakan manajemen risiko PLN IP Services disusun dengan mengadopsi standar internasional ISO 31000:2018 *Risk Management – Guidelines*.

1. SK No. 162.K/CDB/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023, Pedoman Umum Manajemen Risiko Terintegrasi PT Cogindo DayaBersama.
2. SK No.021/ED/CDB/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020, Pedoman Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko
3. SK No.023/ED/CDB/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020, Taksonomi Risiko PT Cogindo DayaBersama
4. SK No.073.K/CDB/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020, Manual Manajemen Risiko

3. Implementation of a risk management program can be carried out by:
 - Establish a separate work unit under the Board of Directors; or
 - Assign an existing and relevant work unit to carry out the risk management function.
4. The Board of Directors must submit a risk profile report and its handling together with the Company's periodic reports.

In addition, PLN IP Services also adapted to the development of standardization of international Enterprise Risk Management (ERM) practice, PLN IP Services's risk management policies are prepared by adopting international standards ISO 31000:2018 Risk Management - Guidelines.

1. Decree No. 162.K/CDB/X/2023 on October 31, 2023, General Guidelines for Integrated Risk Management PT Cogindo DayaBersama.
2. Decree No.021/ED/CDB/VII/2020 dated July 29, 2020, Guidelines for Preparing Risk Management Documents
3. Decree No.023/ED/CDB/VII/2020 dated July 29, 2020, Risk Taxonomy of PT Cogindo DayaBersama
4. Decree No.073.K/CDB/VIII/2020 dated August 5, 2020, Risk Management Manual.



DEPARTEMEN RISET BISNIS, PERENCANAAN STRATEGI PERUSAHAAN, RISIKO DAN SMT (SISTEM MANAJEMEN TERPADU)

Perusahaan menyadari bahwa pengelolaan Manajemen Risiko harus diterapkan di semua unit kerja, di mana setiap pegawai memiliki peranan dalam mengelola dan memastikan penerapan manajemen risiko. Untuk mendukung hal tersebut dibuat suatu Struktur yang berada dibawah Direktur Utama yaitu Departemen Riset Bisnis, Perencanaan Strategi Perusahaan, Risiko dan SMT dipimpin oleh seorang Manajer Departemen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Hingga akhir tahun 2023, formasi Departemen Riset Bisnis, Perencanaan Strategi Perusahaan, Risiko dan SMT terdiri dari 5 (lima) orang dengan komposisi sebagai berikut:

DEPARTMENT OF BUSINESS RESEARCH, CORPORATE PLANNING STRATEGY, RISK AND SMT (INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM)

The Company realizes that risk management must be implemented in all work units, where each employee has a role in managing and ensuring the implementation of risk management. To support this, a structure was created which is under the President Director, namely the Business Research, Corporate Planning Strategy, Risk and SMT Department led by the Department Manager and directly responsible to the President Director.

Until the end of 2023, the formation of the Business Research Department, Corporate Planning Strategy, Risk and SMT consists of 5 (five) people with the following composition:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification
1.	Agus Supriyono	Manager Riset Bisnis, Perencanaan Strategi Perusahaan, Risiko dan Sistem Manajemen Terpadu Manager of Business Research, Corporate Planning Strategy, Risk and Integrated Management System	<i>Certified Risk Management Professional (CRMP)</i>
2.	Anton Kurniawan	Analisis Manajemen Risiko dan Kinerja Risk Management and Performance Analyst	<i>Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP)</i>
3.	Ricky Rinaldi Putra	Analisis Proses Bisnis & Sistem Manajemen Terpadu Integrated Business Process & Management System Analyst	-
4.	Ade Mayliana	Analisis Manajemen Risiko dan Kinerja Risk Management and Performance Analyst	<i>Qualified Risk Management Analyst (QRMA)</i>
5.	Veryzal Danang Nugraha	Analisis Riset Bisnis dan Strategi Business Research and Strategy Analyst	<i>Certified Risk Management Officer (CRMO)</i>

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEMIMPIN DEPARTEMEN RISET BISNIS, PERENCANAAN STRATEGI PERUSAHAAN, RISIKO DAN SMT (SISTEM MANAJEMEN TERPADU)

Departemen Riset Bisnis, Perencanaan Strategi Perusahaan, Risiko dan SMT (Sistem Manajemen Terpadu) dipimpin oleh seorang manajer yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Direksi Perusahaan, untuk memastikan implementasi dan menjaga proses manajemen risiko dapat berjalan secara baik dan dengan pengendalian yang efektif dan efisien. Manajer Departemen Riset Bisnis, Perencanaan Strategi Perusahaan, Risiko dan SMT (Sistem Manajemen Terpadu) secara berkala akan melaporkan pelaksanaannya kepada Direksi.

APPOINTMENT AND DISMISSAL OF DEPARTMENT OF BUSINESS RESEARCH, CORPORATE PLANNING STRATEGY, RISK AND SMT (INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM)

Department of Business Research, Corporate Planning Strategy, Risk and SMT (Integrated Management System) is led by a manager who is appointed and dismissed by the Company's Board of Directors, to ensure the implementation and keep the risk management process running well and with effective and efficient control. Manager of Department of Business Research, Corporate Planning Strategy, Risk and SMT (Integrated Management System) will periodically report on its implementation to the Board of Directors.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Departemen Strategi, Risiko, SMT & Portofolio Unit Usaha dan Sistem Manajemen Terpadu bertugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis, menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja strategis, mengelola sumber daya dan kompetensi, menerapkan GCG dan *cost effectiveness*, mengelola K3 dan risiko, melakukan inovasi dan perbaikan berkesinambungan serta melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan di bidang kerja Manajemen Strategi, Risiko, Sistem Manajemen Terpadu serta pembinaan portofolio unit usaha.

FUNGSI

1. Penyusunan strategi dan business planning termasuk perencanaan pengalokasian sumber daya serta *roll over* setiap tahunnya;
2. Pengendalian realisasi *strategic initiative* dan program kerja Perusahaan dalam mempertahankan /meningkatkan pertumbuhan dengan upaya mendayagunakan sumberdaya perusahaan melalui pengembangan portofolio bisnis;
3. Pengkalkulasian risiko atas kejadian/*event* yang berpotensi mempengaruhi perusahaan, sehingga pengelolaan risiko benar pada level yang dikehendaki serta memberikan "*reasonable assurance*" terhadap upaya pencapaian tujuan perusahaan;
4. Standarisasi bisnis proses dan manajemen risiko perusahaan berikut rumusan *Key Performance Indicator* (KPI) mulai dari tingkat korporat, departemen, unit kerja hingga individu Pegawai agar selaras dengan strategi Perusahaan;
5. Pengukuran, pelaporan dan pembinaan manajemen risiko korporat, satuan kerja dan unit kerja;
6. Pengukuran, pelaporan dan pembinaan kinerja korporat, satuan kerja, unit kerja dan unit usaha kerjasama Perusahaan;
7. Pengembangan dan penyelarasan sistem manajemen korporat dengan strategi bisnis Perusahaan;
8. Pengelolaan kebijakan *Quality Management* dan sistem manajemen terpadu berikut pengawalan program implementasi, penyelenggaraan asesmen dan pengelolaan tindak lanjut pengembangannya;

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Department of Strategy, Risk, SMT & Business Unit Portfolio and Integrated Management System is in charge of formulating and implementing policies and technical standardization, preparing and implementing strategic work plans and programs, managing resources and competencies, implementing GCG and *cost effectiveness*, managing OHS and risk, implement continuous innovation and improvement as well as coordinate with stakeholders in the areas of Strategic Management, Risk, Integrated Management System and business unit portfolio development.

FUNCTIONS

1. Preparation of strategic and business planning including resources allocation planning and annual roll over;
2. Controlling the realization of the Company's strategic initiative and work program in maintaining/increasing growth by utilizing the company's resources through the development of business portfolio;
3. Calculation of risk for event that have potential to affect the company, hence risk management is correct at the desired level and provides "reasonable assurance" to efforts to achieve company goals;
4. Standardization of the company's business processes and risk management along with the formulation of Key Performance Indicators (KPI) starting from the corporate level, department, work unit to individual employees so that they are aligned with the Company's strategy;
5. Measuring, reporting and fostering corporate risk management and work unit;
6. Measuring, reporting and fostering the performance of corporate, work unit, and joint venture business unit of the Company;
7. Development and alignment of the corporate management system with the Company's business strategy;
8. Management of Quality Management policy and an integrated management system as well as overseeing program implementation, conducting assessment and managing follow-up development;

9. Pengelolaan *corporate database* dan informasi bisnis yang valid, *up to date* terstandarisasi, dan komprehensif yang mencakup seluruh aspek potensi dan performansi Perusahaan yang diperlukan dalam perencanaan strategis dan pengendalian manajemen tingkat korporasi.

9. Management of valid, up to date standardized and comprehensive corporate database and business information covering all aspects of the Company's potential and performance required in strategic planning and management control at the corporate level.

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Penerapan manajemen risiko di PLN IP Services dilakukan sesuai dengan ISO 31000:2018, yaitu dengan melakukan Penilaian Risiko (*Risk Assessment*) melalui tahapan proses identifikasi, analisis, evaluasi, perencanaan mitigasi, *review* dan *monitoring* secara menyeluruh di setiap divisi baik di Kantor Pusat maupun unit. Kegiatan Penilaian Risiko disusun untuk mendapatkan Profil Risiko yang kemudian menjadi dasar bagi Dewan Direksi dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan Perusahaan. Pemetaan Risiko dilakukan setiap tahun sebelum melaksanakan aktivitas pengelolaan usaha dan disahkan dalam RUPS RKAP. Tujuan dan kebijakan pemetaan profil ini adalah untuk memastikan bahwa sumber daya Perusahaan cukup tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis termasuk untuk mengelola risiko keuangan dan usaha mitigasi risiko berbagai aspek terkait. Pengelolaan risiko mengacu pada Kebijakan Pedoman Umum Manajemen Risiko Terintegrasi PT Cogindo DayaBersama yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi Nomor: 162.K/CDB/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023.

PRINSIP PENERAPAN ENTERPRISE RISK MANAGEMENT

Prinsip-prinsip manajemen risiko yang digunakan PLN IP Services sebagai landasan dalam penerapan manajemen risiko di Perusahaan, yaitu:

1. Terintegrasi (*Integrated*);
2. Terstruktur dan komprehensif (*Structured and Comprehensive*);
3. Disesuaikan dengan Kondisi Perusahaan (*Customized*);
4. Inklusif (*Inclusive*);
5. Dinamis (*Dynamic*);
6. Tersedia informasi terbaik (*Best available information*);
7. Faktor manusia dan budaya (*Human and Cultural Factors*);
8. Perbaikan berkelanjutan (*Continual Improvement*).

RISK MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

The implementation of risk management in PLN IP Services is conducted according to ISO 31000:2018, namely by conducting a Risk Assessment through the stages of the process of identification, analysis, evaluation, mitigation planning, review, and monitoring as a whole in each division both at the Head Office and units. Risk Assessment activities are structured to obtain a Risk Profile which then becomes the basis for the Board of Directors in making decisions and formulating Company policies. Risk Mapping is conducted annually before implementing business management activities and is authorized in the GMS RKAP. The purpose and policy of this profile mapping is to ensure the resources of the Company are sufficiently available for business operations and development including managing financial risks and risk mitigation efforts of various related aspects. Risk management refers to the General Guidelines Policy for Integrated Risk Management of PT Cogindo DayaBersama stipulated through the Decree of the Board of Directors Number: 162.K/CDB/X/2023 on October 31, 2023.

PRINCIPLES OF IMPLEMENTATION OF ENTERPRISE RISK MANAGEMENT

The risk management principles used by PLN IP Services as a basis for implementing risk management in the Company are:

1. Integrated (Integrated);
2. Structured and Comprehensive;
3. Adjusted to Company Conditions (Customized);
4. Inclusive;
5. Dynamic;
6. Best available information;
7. Human and Cultural Factors;
8. Continual Improvement.

Aspek Aspect	2022	2023	2024	2025	2026
Maturity Level	2.85	2.95	3.10	3.20	3.30
Kepemimpinan	Menentukan arah dan kebijakan risiko dalam organisasi serta menilai tingkat kematangan implementasi Manajemen Risiko.	Menilai keselarasan kebijakan, prosedur, rencana dan strategi sesuai konteks internal dan eksternal perusahaan.	Melakukan Update Kebijakan / Prosedur Manajemen Risiko	Optimalkan risiko dengan diperhitungkan/ calculated risk demi mempercepat pencapaian tujuan organisasi.	Menyediakan pendanaan jangka panjang untuk penerapan manajemen risiko dalam strategi keuangan organisasi.
Leadership	Determine the direction and risk policy within the organization and assess the maturity level of Risk Management implementation.	Assess the alignment of policy, procedure, plan and strategy according to the company's internal and external context.	Updating Risk Management Policy/ Procedure	Optimizing risk with calculated risk in order to accelerate the achievement of organizational goals.	Provide long-term funding for the implementation of risk management in the organization's financial strategy.
Kerangka Kerja	Pengembangan <i>Enterprise Architecture</i> (Risiko proses bisnis)	Integrasi dalam manajemen risiko dalam tata kelola, kepemimpinan dan komitmen perusahaan	<i>Update</i> dan mengembangkan SOP Berbasis Risiko	<i>Review</i> Mekanisme Kerja Pengelolaan Manajemen Risiko	<i>Review</i> desain organisasi dan konteksnya, penegasan komitmen manajemen risiko, penetapan peran, kewenangan, tanggung jawab dan akuntabilitas, alokasi sumber daya.
Framework	Development of Enterprise Architecture (Business process risk)	Integration of risk management in corporate governance, leadership and commitment	Update and develop Risk Based SOPs	Review of the Risk Management Work Mechanism	Review of organizational design and context, confirmation of risk management commitment, determination of roles, authority, responsibility and accountability, allocation of resources.
Proses	Aplikasi IRMA mulai digunakan untuk membuat monitoring profil risiko	Aplikasi IRMA konsisten digunakan untuk membuat dan memonitoring profil risiko	Aplikasi IRMA digunakan untuk pengambilan keputusan strategis	<i>Review</i> Unit dan Korporat terkait Eksisting Kontrol dan Progress Mitigasi	<i>Review</i> penetapan, Pengelolaan dan Pengawasan <i>Risk Profile</i> di Level Operasional
Process	IRMA application has been used to monitor risk profile	RMA application is consistently used to create and monitor risk profile	IRMA application is used for strategic decision making	Unit and Corporate Review regarding Existing Control and Mitigation Progress	Review of establishment, management and supervision of risk profile at the operational level
Budaya dan SDM	<i>Project Risk capacity building</i>	Kajian dan Updates Struktur Organisasi Manajemen Risiko	Mengelola proses asimilasi budaya sadar risiko yang positif	Kultivasi budaya risiko yang efektif dalam proses pengelolaan risiko di organisasi	Mengembangkan <i>Risk Quis</i> , <i>RM News</i> , dan <i>Benchmark</i>
Culture And HC	Project Risk capacity building	Review and Update of Risk Management Organizational Structure	Manage the assimilation process of a positive risk-aware culture	Cultivating an effective risk culture in the risk management process in the organization	Developing Risk Quis, RM News, and Benchmark

PROFIL & MITIGASI RISIKO PERUSAHAAN

Profil Risiko

Sejalan dengan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dan efisien di tingkat korporat, maka telah dilakukan update Profil Risiko Tahun 2023 sesuai dengan hasil auditor dari PT Indonesia Power sebagai berikut:

Ringkasan Profil Risiko 2023:

PERINGKAT KEMUNGKINAN Probability Rating	Sangat Besar Very High	E = V
	Besar High	D = IV
	Sedang Medium	C = III
	Kecil Small	B = II
	Sangat Kecil Very Small	A = I

Keterangan :
Description

Risiko Residu
Resiko Target

Risiko Target
Target Risk

Moderat Moderate	Moderat Moderate	Tinggi High	Sangat Tinggi Very High	Ekstrem Extream
Rendah Low	Moderat Moderate	Tinggi High	Sangat Tinggi Very High	Ekstrem Extream
Rendah Low	Moderat Moderate	Tinggi High	Tinggi High	Sangat Tinggi Very High
Rendah Low	Rendah Low	Moderat Moderate	Tinggi High	Sangat Tinggi Very High
Rendah Low	Rendah Low	Moderat Moderate	Tinggi High	Tinggi High
1	2	3	4	5
Tidak Signifikan Not significant	Minor	Medium	Signifikan Significant	Malapetaka Plagues

PERINGKAT DAMPAK Impact Rating

No.	Deskripsi Risiko	Tingkat Risiko Residu Residue Risk Level	Tingkat Risiko Target Target Risk Level	Risk Description
1.	Terancamnya keberlangsungan usaha perusahaan	Sangat Tinggi (D4) Very High (D4)	Moderat (C2) Moderate (C2)	Threatened business sustainability of the company
2.	Penurunan pendapatan perusahaan dalam periode tahun berjalan	Tinggi (C3) High (C3)	Moderat (C2) Moderate (C2)	Decrease in the revenue of the company in the current year period
3.	Gagal memenangkan tender	Tinggi (C4) High (C4)	Moderat (C2) Moderate (C2)	Loss in tender
4.	Kesulitan mencari pendanaan proyek	Tinggi (C3) High (C3)	Moderat (C2) Moderate (C2)	Difficulty finding project funding
5.	Menurunnya reputasi perusahaan di mitra kerja	Tinggi (C4) High (C4)	Moderat (C2) Moderate (C2)	Decreased company reputation with partners
6.	Jumlah SDM yang tersedia belum memenuhi kebutuhan perusahaan	Tinggi (C3) High (C3)	Moderat (C2) Moderate (C2)	The number of available human capital does not fulfill the needs of the company
7.	Jumlah SDM belum memenuhi kebutuhan perusahaan	Tinggi (C3) High (C3)	Moderat (C2) Moderate (C2)	The number of human capital does not fulfill the needs of the company

RISK PROFILE & MITIGATION OF THE COMPANY

Risk Profile

In line with the implementation of effective and efficient Risk Management at the corporate level, the 2023 Risk Profile has been updated according to the result of the auditor from PT Indonesia Power as follows:

Summary of the 2023 Risk Profile:

No.	Deskripsi Risiko	Tingkat Risiko Residu Residue Risk Level	Tingkat Risiko Target Target Risk Level	Risk Description
8.	Kompetensi SDM belum sesuai standar kebutuhan perusahaan	Tinggi (C3) High (C3)	Moderat (C2) Moderate (C2)	HC competencies are not yet in line with the standard needs of the company
9.	Terjadi kecelakaan kerja	Tinggi (C4) High (C4)	Moderat (C2) Moderate (C2)	Work accident occurred
10.	Pelaksanaan proses pengadaan terlambat	Tinggi (C3) High (C3)	Moderat (C2) Moderate (C2)	Delayed implementation of the procurement process
11.	Kenaikan anggaran <i>Operational Expense</i> (OPEX) ekstrim.	Tinggi (C4) High(C4)	Moderat (C2) Moderate (C2)	Extreme Operational Expense (OPEX) budget increase.

Sasaran Objective	Taksonomi Risiko Risk Taxonomy	Deskripsi Risiko Risk Description	Penyebab Risiko Risk Causes	Tingkat Risiko Risk Level	Rencana Mitigasi Risiko Risk Mitigation Plan
Menambah kontrak-kontrak baru dan memperluas market share di jasa O&M, MRO dan EPC di industri migas, pertambangan dan IPP	S.5.1 - Bisnis	Terancamnya keberlangsungan usaha perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stagnasi pertumbuhan bisnis <i>energy supply</i> 2. Investasi PLTD Nusa Penida yang merugi 	Sangat Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan riset bisnis <i>domestic</i> dan <i>overseas</i> 2. Mendapatkan <i>project</i> layanan listrik premium DRUPS di Pertamina Grup 3. Membuat Surat Peninjauan harga sewa mesin genset
Add new contracts and expand market share in O&M services, MRO and EPC services in the oil and gas, power generation and IPP industries.	Business	Threatened business sustainability of the company	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stagnating growth of energy supply business 2. Loss-making investment in Nusa Penida PLTD 	Very High	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conducted domestic and overseas business research 2. Obtained DRUPS premium electricity service project in Pertamina Group 3. Prepared a letter to review the rental price of generator sets
	F.6.1 - Pendapatan Usaha	Penurunan pendapatan perusahaan dalam periode tahun berjalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gagal mendapatkan kontrak baru pekerjaan di <i>overseas</i> 2. Gagal mendapatkan kontrak baru pekerjaan jasa OM, MRO dan EPC 3. Tidak tercapainya pendapatan beyond KWH di luar PLN Grup 4. Penurunan pendapatan GDES di PLN Indonesia Power karena perubahan kebijakan pengadaan <i>spare part</i> Wartsila (UP Bali dan PLTMG Sorong) dari PLN IP Services menjadi <i>direct</i> ke Wartsila Indonesia 5. Efisiensi anggaran operasi dan pemeliharaan di PLN Group yang berpotensi mengurangi pendapatan CDB 6. Rencana aksi korporasi PLN 7. Jumlah PLTD & PLTMG yang diserahkan belum teridentifikasi 8. Kontrak pekerjaan FGC belum disahkan 	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan representative bisnis <i>Overseas</i> di Vietnam dan Kuwait 2. Inisiasi penambahan asset baru pembangkit EBT 3. Mengembangkan workshop CDB dengan penambahan peralatan untuk rewinding motor listrik 4. Memperluas pasar dan mendapatkan kontrak pekerjaan Jasa O&M, MRO dan EPC di <i>industry Oil and Gas</i>, IPP, <i>Mining</i>, EBT 5. Menambah MSA dengan pabrikan (Mitsubishi, Cummins, dll) 6. Digitalisasi pengendalian anggaran 7. Program alih kompetensi jasa O&M <i>supporting</i> PLTU menjadi MRO pada PLTU berdampak retirement dan aksi korporasi IP/PLN 8. <i>Mapping</i> dan <i>assessment</i> bersama antara CDB dan PIP kondisi PLTD & PLTMG 9. Mengajukan penggantian biaya pengadaan FGC

Sasaran Objective	Taksonomi Risiko Risk Taxonomy	Deskripsi Risiko Risk Description	Penyebab Risiko Risk Causes	Tingkat Risiko Risk Level	Rencana Mitigasi Risiko Risk Mitigation Plan
	Operating Revenue	Decrease in the revenue of the company in the current year period	<ol style="list-style-type: none"> Failed to secure a new overseas contract Failure to obtain new OM, MRO, and EPC service contracts Non-achievement of revenue beyond KWH outside PLN Group Decrease in GDES revenue at PLN Indonesia Power due to changes in Wartsila spare part procurement policy (Bali UP and Sorong PLTMG) from PLN IP Services to direct to Wartsila Indonesia. Operation and maintenance budget efficiency in PLN Group that potentially reduces CDB revenue Corporate action plan of PLN The number of PLTD & PLTMG delivered has not been identified yet FGC work contract has not been authorized 	High	<ol style="list-style-type: none"> Placement of Overseas business representatives in Vietnam and Kuwait Initiate the addition of new renewable energy generation assets Develop CDB workshop with additional equipment for electric motor rewinding Expand the market and obtain O&M, MRO, and EPC service contracts in the Oil and Gas, IPP, Mining, EBT industries Increase MSA with manufacturers (Mitsubishi, Cummins, etc.) Digitalization of budget control Competency transfer program for O&M supporting PLTU services to MRO in PLTU affected by retirement and IP/PLN corporate actions Mapping and joint assessment between CDB and PIP of PLTD & PLTMG conditions Apply for reimbursement of FGC procurement costs.
	F.4.2 - Tender	Gagal memenangkan tender	<ol style="list-style-type: none"> Perubahan nama perusahaan Persyaratan administrasi tender belum lengkap Harga yang diajukan untuk tender diluar PLN Group masih tinggi 	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> Mengusulkan ke Pemegang Saham untuk tidak melakukan perubahan nama Perusahaan Maintain Sertifikasi ISO 9001, 14001, 45001, SMAP 37001, dan SMK3 Penambahan ijin KBLI baru Memperoleh Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas Inisiasi dan implementasi ESG Memperbanyak kerjasama dengan vendor/pabrikasi Menambah personil <i>project estimator</i> (TKWT) Melakukan standarisasi harga komponen harga pada tender melalui referensi
	Tender	Failed to win the tender	<ol style="list-style-type: none"> Change of company name Incomplete tender administration requirements Prices submitted for tenders outside PLN Group are still high 	High	<ol style="list-style-type: none"> Propose to Shareholders not to change the name of the Company Maintain ISO 9001, 14001, 45001, SMAP 37001, and SMK3 certifications Addition of a new KBLI license Obtained Oil and Gas Support Business Capability Letter ESG initiation and implementation Increase cooperation with vendors/manufacturers Increase project estimator personnel (TKWT) Standardize the price of price components in tenders through references

Sasaran Objective	Taksonomi Risk Taxonomy	Deskripsi Risiko Risk Description	Penyebab Risiko Risk Causes	Tingkat Risiko Risk Level	Rencana Mitigasi Risiko Risk Mitigation Plan
	P.2.1 - Risiko Sumber Pendanaan Proyek	Kesulitan mencari pendanaan proyek	Kekurangan <i>cash flow</i> modal kerja / pembiayaan <i>project</i> karena terbatasnya kas perusahaan	Tinggi	Mencari alternatif pendanaan untuk pembiayaan <i>project</i> dan investasi (NOTPOL, IMBT, dll)
	Risk of Project Funding Source	Difficulty finding project funding	Lack of cash flow/working capital/project financing due to limited company cash	High	Explore alternative funding for project and investment financing (NOTPOL, IMBT, etc.)
	S.2.3 - Reputasi Mitra Kerja	Menurunnya reputasi perusahaan di mitra kerja	Perusahaan belum setor modal penuh usaha ke PT MCB	Tinggi	Melakukan setoran modal untuk memenuhi kewajiban Pemegang Saham 30% memberikan SHL
	Partner Reputation	Decreased company reputation with partners	Company has not yet paid full venture capital to PT MCB	High	Make a capital deposit to fulfill the 30% Shareholder obligation to provide SHL
Program pengembangan produk dan layanan bisnis baru (<i>MRO, EBT, EPC, Digital Business : Drone, REOC, College, Colext, MRO Line dan Stockiest</i>)	O.8.2 - Organisasi	Jumlah SDM yang tersedia belum memenuhi kebutuhan perusahaan	STO eksisting belum memenuhi pengembangan bisnis digital	Tinggi	Pengembangan tim <i>MRO Marketplace (MROLine), College dan Colext</i> untuk mendukung <i>revenue</i> baru
New business product and service development programs (MRO, EBT, EPC, Digital Business: Drone, REOC, College, Colext, MRO Line and Stockiest)	Organization	The number of available human capital does not fulfill the needs of the company	Existing STOs do not fulfill digital business development	High	Development of MRO Marketplace (MROLine), College and Colext teams to support new revenue.
Mengelaborasi dan meningkatkan peran CDB sebagai <i>centralized supporting O&M, MRO dan EPC service</i> di PLN Indonesia Power sebagai <i>follow up</i> setelah pembentukan holding-subholding PLN	O.2.1 - Jumlah SDM	Jumlah SDM belum memenuhi kebutuhan perusahaan	Penambahan bisnis karena penugasan <i>Holding SubHolding</i>	Tinggi	Penambahan SDM jasa O&M, MRO dan AMC PLTU <50MW
	Total Human Capital	The number of human capital does not fulfill the needs of the company	Business addition due to Holding SubHolding assignment	High	Addition of human capital for O&M, MRO and AMC services for PLTU <50MW
	O.2.2 - Kompetensi SDM	Kompetensi SDM belum sesuai standar kebutuhan perusahaan	Terdapat gap kompetensi dalam pengembangan bisnis <i>beyond kWh</i>	Tinggi	Sertifikasi kompetensi pegawai dalam mendukung pekerjaan <i>beyond kWh</i> di <i>industry Oil and Gas – Mining</i>
Elaborate and enhance the role of CDB as a centralized supporting O&M, MRO and EPC service in PLN Indonesia Power as a follow-up after the establishment of PLN's subholding.	Human Capital Competency	HC competencies are not yet in line with the standard needs of the company	There is a competency gap in business development beyond kWh	High	Employee competency certification in supporting beyond kWh work in the Oil and Gas - Mining industry

Sasaran Objective	Taksonomi Risiko Risk Taxonomy	Deskripsi Risiko Risk Description	Penyebab Risiko Risk Causes	Tingkat Risiko Risk Level	Rencana Mitigasi Risiko Risk Mitigation Plan
Zero accident dan implementasi CSMS	O.3.1 - Kecelakaan kerja	Terjadi kecelakaan kerja	Adanya GAP <i>awareness</i> K3L di unit peralihan <i>asset holding subholding</i> yang akan dikelola CDB	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi program HSSE secara berkala dan berkelanjutan Menunjuk agen-agen K3 di unit-unit baru
Zero accident and CSMS implementation	Work Accident	Work accident occurred	There is an OHSE awareness GAP in the subholding asset holding transition unit that will be managed by CDB.	High	<ol style="list-style-type: none"> Periodic and continuous socialization of the HSSE program Appoint HSSE agents in new units
Program cost efficiency dan effectiveness agar BPP dan HPP MRO Services menjadi lebih kompetitif	O.7.2 - Dokumen pengadaan	Pelaksanaan proses pengadaan terlambat	Sistem pengadaan secara manual tidak mampu handle pengembangan bisnis	Tinggi	Pengembangan <i>E-Procurement</i> berbasis aplikasi
Cost efficiency and effectiveness program so that BPP and HPP MRO Services become more competitive	Procurement documents	Delayed implementation of the procurement process	Manual procurement system is not able to handle business development	High	Development of application-based E-Procurement
	F.7.2 - <i>Operational Expense</i>	Kenaikan anggaran <i>Operational Expense</i> (OPEX) ekstrim.	<ol style="list-style-type: none"> Restitusi pajak belum bisa sepenuhnya Implementasi <i>Asset Management</i> PLTD Tenau dan Nusa Penida masih belum optimal 	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> Minimalisasi potensi denda pajak <i>Cost efficiency</i> di PLTD Tenau 40 MW & PLTD Nusa Penida 10 MW.
	Operational Expense		<ol style="list-style-type: none"> Tax restitution has not been able to fully Implementation of <i>Asset Management</i> for Tenau and Nusa Penida PLTD is still not optimal 	High	<ol style="list-style-type: none"> Minimization of potential tax penalties <i>Cost efficiency</i> at Tenau PLTD 40 MW & Nusa Penida PLTD 10 MW.

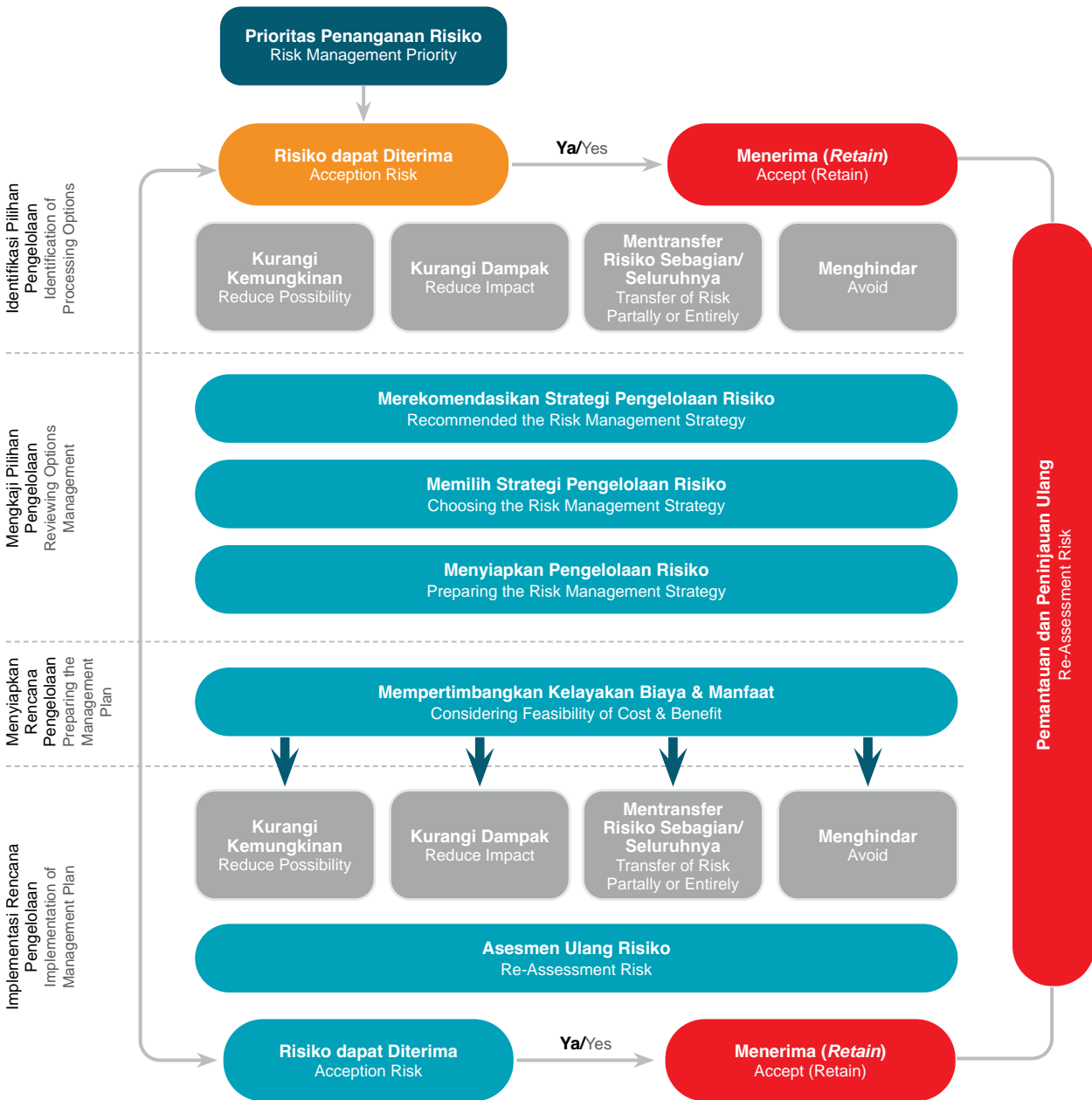
Mitigasi Risiko

Risk Mitigation

Prosedur pelaksanaan mitigasi risiko

Risk mitigation implementation procedures

► Bagan Prosedur Mitigasi Risiko Risk Mitigation Procedure Chart



Progress Pelaksanaan Mitigasi Risiko pada Tahun 2023 sebagai berikut:

Risk Mitigation Implementation Progress in 2023 is as follows:

No.	Tindakan Mitigasi Mitigation Action	PIC	%	Keterangan Description
1.	<p>a. Melakukan riset bisnis <i>domestic</i> dan <i>overseas</i></p> <p>Conduct domestic and overseas business research</p>	MRSR	99%	<p>1. Melakukan <i>due diligent</i> konsultan riset bisnis <i>domestic</i> dan <i>overseas</i></p> <p>2. Mengusulkan kepada PLN IP untuk melakukan <i>market research</i></p> <p>3. <i>Update</i> dan <i>monitoring</i> ke PLN IP</p> <p>4. Proses pengesahan RJPP 2024-2028</p> <p>1. Conduct due diligent domestic and overseas business research consultants.</p> <p>2. Propose to PLN IP to conduct market research</p> <p>3. Update and monitoring to PLN IP</p> <p>4. Process of ratification of RJPP 2024-2028</p>
	<p>b. Mendapatkan <i>project</i> layanan listrik premium DRUPS di Pertamina Grup</p> <p>Secured DRUPS premium electricity service project in Pertamina Group.</p>	PD KSO	100%	<p>1. Sudah dilakukan tandatangan MOU Layanan Fasilitas Ekstra untuk Pertamina EP Papua <i>Site</i> Klamono 2.075 MVA</p> <p>2. Proses <i>review</i> legal PKS antara PLN-CDB.</p> <p>3. Sudah terbit kontrak pekerjaan DRUPS tanggal 6 Oktober 2023</p> <p>1. Extra Facility Service MOU for Pertamina EP Papua Site Klamono 2,075 MVA has been signed.</p> <p>2. Legal review process of PKS between PLN-CDB.</p> <p>3. The DRUPS work contract has been issued on October 6, 2023.</p>
2.	<p>Membuat Surat Peninjauan harga sewa mesin PLTD Nusa Penida</p> <p>Create a letter to review the rental price of the Nusa Penida PLTD engine</p>	MBBC I	100%	<p>Telah disampaikan surat no. 0246.DIRBNS/125/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 kepada PIP terkait usulan perubahan kontrak sewa mesin Nusa Penida diantara adalah perubahan <i>threshold</i>, DMN PLTD Nusa Penida dan pengajuan kenaikan tarif sewa, namun belum ada <i>feed back</i> dari PIP.</p> <p>Letter no. 0246.DIRBNS/125/I/2023 dated January 27, 2023, was submitted to PIP regarding the proposed changes to the Nusa Penida engine lease contract, including changes to the threshold, the Nusa Penida DMN PLTD, and the proposed increase in rental rates, but no feedback from PIP yet.</p>
3.	<p>Inisiasi penambahan <i>asset</i> baru pembangkit EBT</p> <p>Initiation of new renewable energy generation assets</p>	MBBC III	100%	<p>1. Pekerjaan Terkontrak dengan PT ITH dengan skema PC & M PLTS Rooftop 900 kWp PT AISIN</p> <p>2. Pemeliharaan RLA <i>Trafo & Generator Unit</i> Saguling: Pekerjaan terkontrak, 3 unit selesai pelaksanaan pekerjaannya, kurang 2 unit</p> <p>3. Pekerjaan terkontrak untuk MO unit 2 dan 3 PLTA Singkarak</p> <p>4. Pembahasan GI PLTMH Ndungga sampai pelaksanaan <i>recovery</i> PLTP Unit 2 Ulumbu selesai</p> <p>5. <i>Software</i> untuk <i>design engineering</i> PLTS dan sertifikasi <i>design engineering</i> PLTS</p> <p>1. Contracted work with PT ITH with PC & M scheme of PT AISIN's 900 kWp Rooftop Solar PV Plant</p> <p>2. RLA Maintenance of Saguling Unit Transformers & Generators: Contracted work, 3 units completed, 2 units missing.</p> <p>3. Contracted work for MO units 2 and 3 of Singkarak Hydropower Plant</p> <p>4. Discussion on Ndungga GI PLTMH until Ulumbu PLTP Unit 2 recovery is completed.</p> <p>5. Software for PLTS engineering design and PLTS engineering design certification</p>
4.	<p>Menempatkan <i>representative</i> bisnis <i>Overseas</i> di Vietnam dan Kuwait</p> <p>Placed Overseas business representatives in Vietnam and Kuwait</p>	MBBC I	100%	<p>Telah ada <i>representative</i> bisnis baik d Vietnam maupun Kuwait</p> <p>There are already business representatives in both Vietnam and Kuwait.</p>

No.	Tindakan Mitigasi Mitigation Action	PIC	%	Keterangan Description
5	<p>a. Mengembangkan <i>workshop</i> CDB dengan penambahan peralatan untuk <i>rewinding</i> motor listrik</p> <p>Expand CDB workshop with additional equipment for electric motor rewinding</p>	MPMU	100%	<p>Usulan komite risiko untuk melakukan penambahan <i>tools</i> melalui pengadaan yang dibarengkan dengan pekerjaan <i>overhaul</i></p> <p>Risk committee proposal to add tools through procurement coupled with overhaul work.</p>
	<p>b. Memperluas pasar dan mendapatkan kontrak pekerjaan Jasa O&M, MRO dan EPC di <i>industry Oil and Gas</i>, IPP, <i>Mining</i>, EBT</p> <p>Expand the market and obtain contracts for O&M, MRO, and EPC services in the Oil and Gas, IPP, Mining, EBT industries.</p>	MBBC I, MBBC II, MBBC III	100%	<p>BBC I</p> <p>Telah mengikuti tender dengan total tender 62, dimana 4 tender ditunjuk sebagai pemenang (sudah terkontrak 3, 1 proses finalisasi kontrak), 10 proses penyusunan dokumen tender, 21 gagal, dan 27 proses PQ</p> <p>BBC III</p> <ol style="list-style-type: none"> Sudah mengikuti Tender PT Geo dipa Energi namun kalah dalam evaluasi teknis dan penawaran harga Info Tender Pekerjaan EPC PLTMH Brantas ditunda sampai waktu yang belum ditentukan Komunikasi dengan PIC PT Vale, informasi awal tim MSU PLN IP sudah memberikan penawaran untuk PLTA Lerona <p>BBC I</p> <p>Has participated in tenders with a total of 62 tenders, of which 4 tenders were appointed as winners (3 have been contracted, 1 is in the process of finalizing the contract), 10 are in the process of preparing tender documents, 21 failed, and 27 are in the PQ process.</p> <p>BBC III</p> <ol style="list-style-type: none"> Has participated in PT Geo dipa Energi Tender but lost in technical evaluation and price bidding. Tender info for the EPC work of the Brantas MHP has been postponed until an undetermined time. Communication with PT Vale's PIC, preliminary information that the PLN IP MSU team has provided an offer for the Lerona PLTA
6.	<p>Menambah MSA dengan pabrikan (Mitsubishi, Cummins, dll)</p> <p>Add MSA with manufacturers (Mitsubishi, Cummins, etc.)</p>	MBBC III	100%	<p><i>Sourcing</i> mitra baru untuk pengadaan spare part PLTD: <i>twinco</i></p> <p>Sourcing new partners for the procurement of spare parts for PLTD: <i>twinco</i></p>
7.	<p>Digitalisasi pengendalian anggaran</p> <p>Digitization of budget control</p>	MAPP, MSTI	100%	<p>Digitalisasi Pengendalian anggaran sudah terimplementasi dengan penuh</p> <p>Digitization Budget control has been fully implemented</p>
8.	<p>Program alih kompetensi jasa O&M supporting PLTU menjadi MRO pada PLTU terdampak retirement dan aksi korporasi IP/PLN</p>	MPMB	100%	<p>Pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perpanjangan dan pelaksanaan Sertifikasi baru SKTTK bidang O&M Sertifikasi SIO unit Sintang, Adipala dan Pangkalan Susu Sertifikasi Lingkungan unit Semarang, kalbar 1, Barru, Nusa Penida, Tenau, Jayapura <p>Telah dilaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Orang pegawai CDB tersertifikasi Vibrasi Level III Pelatihan <i>Asset Management</i> <p>Telah dilaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelatihan konversi motor listrik Sertifikasi <i>electrical hazardous</i> OPITO Sertifikasi Ahli K3 Umum untuk menunggang pekerjaan CEMS Sertifikasi Tenaga Kerja Bangunan Tinggi Sertifikasi H2S Sertifikasi Teknisi Mesin Migas Sertifikasi CompEx Pelatihan RLA <i>Generator</i> Pelatihan Alat <i>Phased Array</i> Sertifikasi NDT <p>Telah dilaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sertifikasi Verifikator TKDN <p>Telah dilaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelatihan <i>Polyworks Modeller</i>

No.	Tindakan Mitigasi Mitigation Action	PIC	%	Keterangan Description
	Competency transfer program of O&M supporting PLTU services into MRO at PLTU affected by retirement and IP/ PLN corporate actions			<p>Implementation:</p> <ol style="list-style-type: none"> Renewal and implementation of the new Certification of SKTTK in the field of O&M SIO certification of Sintang, Adipala and Pangkalan Susu units Environmental Certification of Semarang, West Kalimantan 1, Barru, Nusa Penida, Tenau, Jayapura units. <p>Has been implemented:</p> <ol style="list-style-type: none"> CDB employees certified in Level III Vibration Asset Management Training <p>Has been implemented:</p> <ol style="list-style-type: none"> Electric motor conversion training OPITO electrical hazardous certification General OHS Expert certification to support CEMS work High-rise Building Labor Certification H2S Certification Oil and Gas Engine Technician Certification CompEx Certification RLA Generator Training Phased Array Tool Training NDT Certification <p>Has been implemented:</p> <ol style="list-style-type: none"> TKDN Verifier Certification <p>Has been implemented:</p> <ol style="list-style-type: none"> Polyworks Modeller Training
9.	<i>Mapping dan assesment</i> bersama antara CDB dan PIP kondisi PLTD & PLTMG	MKIT	100%	<p><i>Assesment</i> kondisi PLTD & PLTMG Unit HSH sudah dilakukan oleh PIP sebelum diserahkan O&M nya ke CDB</p> <p>HSH PLTD & PLTMG Unit condition assessment has been conducted by PIP before handing over the O&M to CDB.</p>
	Joint mapping and assessment between CDB and PIP of the condition of PLTD & PLTMG.			
10.	Mengajukan penggantian biaya pengadaan FGC	MBBC I	100%	<p>kontrak FGC telah terbit</p> <p>FGC contract has been issued</p>
	Propose reimbursement of FGC procurement costs			
11.	Mengusulkan ke Pemegang Saham untuk tidak melakukan perubahan nama Perusahaan	SEKPER	100%	<p>Sudah diajukan DMR perubahan nama dan logo Perusahaan ke Pemegang Saham</p> <p>DMR for change of Company name and logo submitted to Shareholders</p>
	Propose to Shareholders not to change the Company's name			
12.	a. <i>Maintain</i> Sertifikasi ISO 9001, 14001, 45001, SMAP 37001, dan SMK3	MRSR	100%	<ol style="list-style-type: none"> Kontrak sertifikasi dan resertifikasi ISO sudah terbit Pelaksanaan Audit resertifikasi 14K, Audit <i>Surveillance</i> 9001 dan Audit <i>Surveillance</i> ISO 45K sudah dilaksanakan Rencana pelaksanaan audit eksternal SMK 3 PP 50 tanggal 9 Oktober dan SMAP di tanggal 1-2 November Audit sertifikasi ISO 27001 sudah dilaksanakan dengan catatan ada beberapa aspek yang harus di <i>improve</i> <p>1. ISO certification and recertification contract has been issued</p> <p>2. 14K Recertification Audit, 9001 Surveillance Audit and ISO 45K Surveillance Audit have been conducted.</p> <p>3. External audit plan for SMK3 PP 50 on October 9 and SMAP on November 1-2.</p> <p>4. ISO 27001 certification audit has been conducted with a note there are several aspects that must be improved.</p>
	Maintain ISO 9001, 14001, 45001, SMAP 37001, and SMK3 certifications.			
	b. Penambahan ijin KBLI baru	MLEG	100%	<p>Penambahan KBLI yang baru sudah disetujui Pemegang saham serta sudah dijadikan Akta Anggaran Dasar CDB</p> <p>The addition of the new KBLI was approved by the shareholders and has been incorporated into the Articles of Association of CDB.</p>
	Addition of new KBLI licenses			

No.	Tindakan Mitigasi Mitigation Action	PIC	%	Keterangan Description
	c. Memperoleh Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas Obtain Oil and Gas Support Business Capability Letter	MLEG	100%	Izin SKUP Migas telah terbit dengan bidang Jasa Non Konstruksi Subbidang Jasa O&M Sub Bagian Bidang Jasa Perbaikan Peralatan SKUP Migas license issued with Non-Construction Services Subfield O&M Services Subfield Equipment Repair Services
	d. Inisiasi dan implementasi ESG ESG initiation and implementation	SEKPER	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya usulan program kerja ESG untuk pembahasan dengan RSR dan Direksi 2. Pembahasan dengan Konsultan persiapan pembuatan <i>Roadmap</i> 2024- 2028 3. Penyiapan SK Tim dan Penyebaran <i>Form Materiality</i> 4. <i>Kick off</i> Penyusunan <i>Roadmap</i> ESG dan tersedianya <i>Roadmap</i> ESG 2024 -2028 5. Tersedia program kerja 2024-2028 untuk pembahasan dengan konsultan dan PIC terkait. 6. Pelaksanaan program ESG lainnya yaitu : <ul style="list-style-type: none"> • Konversi motor listrik • Penghematan air dan listrik HO <ol style="list-style-type: none"> 1. Availability of ESG work program proposal for discussion with RSR and Board of Directors 2. Discussion with Consultant in preparation of Roadmap 2024-2028 3. Preparation of Team Decree and Materiality Form Dissemination 4. Kick off of ESG Roadmap Preparation and availability of ESG Roadmap 2024-2028 5. Available work program 2024-2028 for discussion with relevant consultants and PICs. 6. Implementation of other ESG programs, namely: <ul style="list-style-type: none"> • Electric motor conversion • HO water and electricity saving
18.	a. Memperbanyak kerjasama dengan vendor/pabrikasi Increase cooperation with vendors/ manufacturers	MPKM	100%	Sudah dilakukan LTSA dengan MAN LTSA has been conducted with MAN
	b. Menambah personil <i>project</i> estimator (TKWT) Add project estimator personnel (TKWT)	MBBC I	95%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan memo terkait kebutuhan personil BBC 1 2. <i>Management review</i> perubahan STO(<i>review</i> Direksi dan revisi) <ol style="list-style-type: none"> 1. Request a memo regarding BBC 1 personnel requirements. 2. Management review of STO changes (Board of Directors review and revision)
	c. Melakukan standarisasi harga komponen harga pada tender melalui referensi Standardize the price of price components in tenders through references	MBBC I	100%	Telah dilakukan pembahasan terkait standarisasi harga komponen khususnya komponen kepegawaian melalui skema kerjasama dengan mitra strategis Discussions have been held regarding the standardization of component prices, especially staffing components through cooperation schemes with strategic partners.
19.	Mencari alternatif pendanaan untuk pembiayaan <i>project</i> dan investasi (NOTPOL, IMBT, dll) Find alternative funding for project and investment financing (NOTPOL, IMBT, etc.)	MAPP	100%	<p><i>Update</i> progres IMBT : Sudah terbit <i>Offering Letter</i> dari BCAS dan menunggu surat tanggapan dari CDB >> saat ini CDB menunggu kepastian sign kontrak dari DRUPS dahulu baru melakukan surat tanggapan atas <i>Offering Letter</i> nya BCAS untuk finalisasi (100%) DRUPS pembiayaan menggunakan Anggaran Investasi internal</p> <p><i>update</i> progres Notpol : sudah terbit Perjanjian Kerjasama PT PLN - CDB - BNI tentang Pelayanan Jasa Notional Pooling Nomor : 001.PJ/BBC I-CDB/IV/2023 (100%)</p> <p>IMBT progress update: Offering Letter issued from BCAS and waiting for a response letter from CDB >> currently CDB is waiting for certainty of signing the contract from DRUPS first and then responding to BCAS's Offering Letter for finalization (100%) DRUPS financing using the internal Investment Budget.</p> <p>Notpol progress update: PT PLN - CDB - BNI Cooperation Agreement has been issued regarding Notional Pooling Services Number: 001.PJ/BBC I-CDB/IV/2023 (100%)</p>

No.	Tindakan Mitigasi Mitigation Action	PIC	%	Keterangan Description
20.	Melakukan setoran modal untuk memenuhi kewajiban Pemegang Saham 30% memberikan SHL Make a capital deposit to fulfill the 30% Shareholder obligation to provide SHL	MAPP	100%	Pembayaran SHL sudah terealisasi tanggal 19 Januari 2023 SHL payment has been realized on January 19, 2023
21.	Penambahan STO untuk fungsi MRO Marketplace (MROLine), College dan Colext Addition of STOs for MRO Marketplace (MROLine), College and Collect functions	MTLN	95%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan data <i>review</i> organisasi 2. Proses pengadaan konsultan pendampingan 3. Sudah terlaksana <i>workshop review</i> organisasi 4. Sudah terlaksana FGD dan wawancara dengan manajemen BOD & BOD-1 5. Management <i>review</i> (<i>review</i> Direksi dan revisi) <ol style="list-style-type: none"> 1. Organizational review data collection 2. Procurement process of mentoring consultant 3. Organization review workshop has been conducted 4. FGDs and interviews with BOD & BOD-1 management have been conducted 5. Management review (BOD review and revision)
22.	Penambahan SDM jasa O&M, MRO dan AMC PLTU <50MW Addition of human capital for O&M, MRO and AMC services for PLTU <50MW	MTLN	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi dan pemetaan SDM di seluruh unit CDB (on process UP Semarang, UP Bali, UP Suralaya dan Lontar). 2. Progress rekrutmen semua berjalan kecuali Lontar 4 hold 3. Rekrutmen pemenuhan SDM eksternal Jasa OM per Agustus 2023 adalah 445/814, untuk PNS tahap deployment belum bisa terlaksana karena kontrak dengan mitra sebelumnya berakhir 31 Des 23 dan/atau 30 Jun 24 <ol style="list-style-type: none"> 1. Identification and mapping of human capital in all CDB units (on-process Semarang UP, Bali UP, Suralaya UP and Lontar). 2. Progress of recruitment all running except Lontar 4 holds 3. Recruitment of external HC fulfillment of OM Services as of August 2023 is 445/814, for civil servants the deployment stage cannot be implemented because the contract with the previous partner ended December 31, 2023 and/or June 30, 2024..
23.	Sertifikasi kompetensi pegawai dalam mendukung pekerjaan <i>beyond kWh</i> di <i>industry Oil and Gas – Mining</i> Employee competency certification in supporting beyond kWh work in the Oil and Gas - Mining industry	MPMB	100%	<p>Telah dilaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Teknisi Listrik Migas BNSP b. Juru Las (<i>Welder</i>) Migas BNSP c. Teknisi Level I Perawatan Mekanik Migas BNSP d. H2S BNSP e. OPITO POL Electrical Hazardous Area (<i>International</i>) f. <i>Electrical Installation and Inspection (CompEX) - Oil and Gas</i> g. <i>Vibration Analysis Level III</i> h. <i>Pipe Fitter</i> i. Verifikator TKDN j. NDT Level 2 MT PT <p>Has been conducted:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. BNSP Oil and Gas Electrician b. BNSP Oil and Gas Welder c. Level I Mechanical Maintenance Technician Oil and Gas BNSP d. H2S BNSP e. OPITO POL Electrical Hazardous Area (<i>International</i>) f. <i>Electrical Installation and Inspection (CompEX) - Oil and Gas</i> g. <i>Vibration Analysis Level III</i> h. <i>Pipe Fitter</i> i. TKDN Verifier j. NDT Level 2 MT PT
24.	a. Sosialisasi program HSSE secara berkala dan berkelanjutan Periodic and sustainable socialization of the HSSE program	MK3J	100%	Sudah dilakukan pembuatan program HSSE serta <i>monitoring</i> pelaksanaannya The HSSE program has been developed and its implementation monitored.
	b. Menunjuk agen-agen K3 di unit-unit baru Appoint OHS agents in new units	MK3J	100%	Sudah dilakukan penunjukan agen-agen K3 Has been appointed the OHS agents

No.	Tindakan Mitigasi Mitigation Action	PIC	%	Keterangan Description
25.	Pengembangan E-Procurement berbasis aplikasi Development of application-based E-Procurement	MPKM	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Database mitra sudah terdaftar dalam MROLine. 2. Mitra sudah melakukan upload Produk/<i>Catalog</i> sebanyak 6 Perusahaan. 3. Fitur <i>Request For Quotation</i> (RFQ) sudah tersedia dan beberapa sudah dilakukan permintaan RFQ via MROline <ol style="list-style-type: none"> 1. Partner database already registered in MROLine. 2. Partners have uploaded products / catalogs to as many as 6 companies. 3. The Request For Quotation (RFQ) feature is available and several RFQ requests have been made via MROline.
a.	Percepatan administrasi kontrak dan penerbitan BA Acceleration of contract administration and BA issuance	Manajer Direktorat Bisnis dan Operasi Business and Operations Directorate Manager	100%	<p>Durasi penagihan pekerjaan di IP dan Non IP masih sesuai target</p> <p>Duration of work billing in IP and Non IP is still on target</p>
b.	<i>Cost efficiency</i> di PLTD Tenau 40 MW & PLTD Nusa Penida 10 MW <i>Cost efficiency</i> at Tenau 40 MW PLTD & Nusa Penida 10 MW PLTD	MKIT, MU PLTD NP dan TNU MKIT, MU PLTD NP and TNU	100%	<p>sudah dilakukan penggantian liner di PLTD Nusa Penida dan honing di PLTD Tenau</p> <p>Liner replacement has been conducted at Nusa Penida PLTD and honing at Tenau PLTD.</p>

Penilaian *Maturity Level* Manajemen Risiko

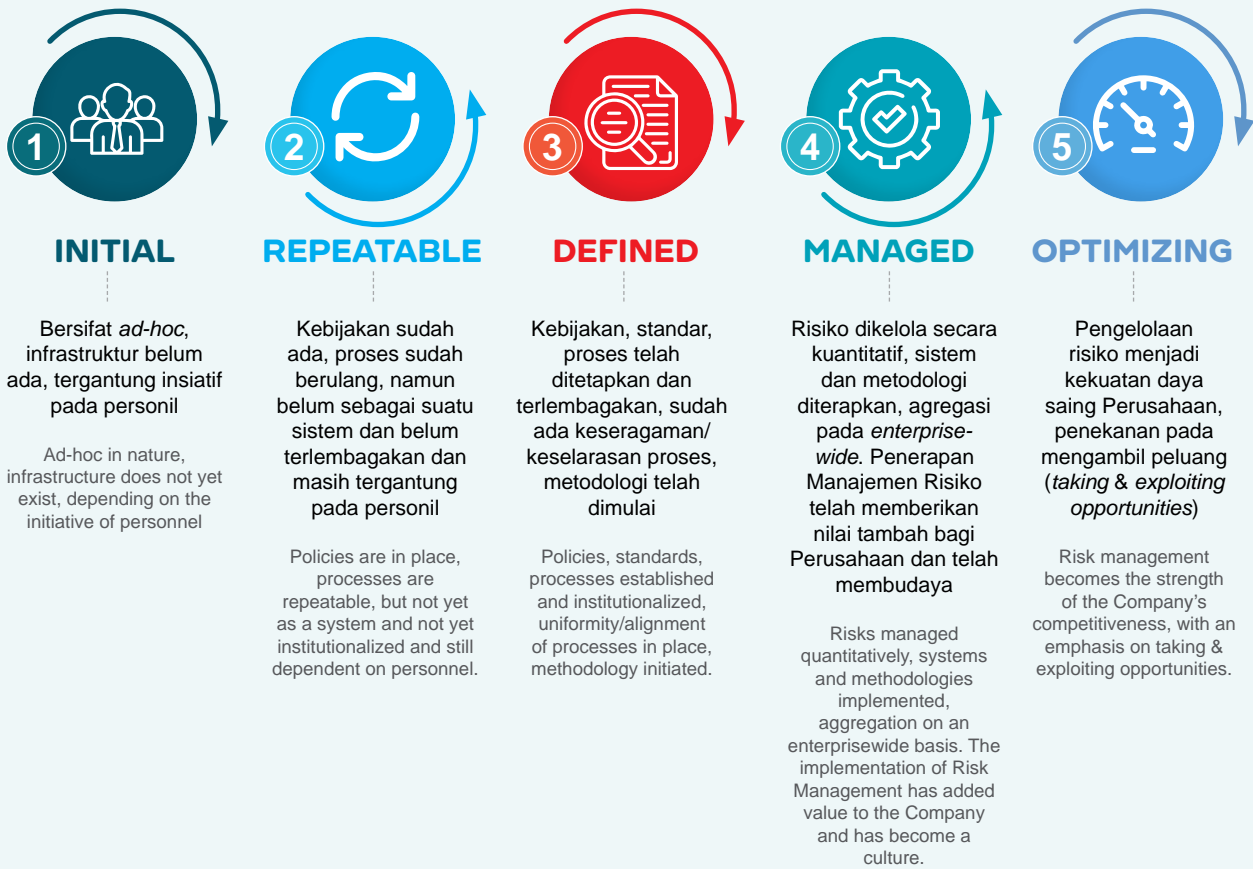
Pengukuran *maturity level* (tingkat kematangan) penerapan manajemen risiko Perusahaan mengacu pada kriteria yang ditetapkan oleh Perusahaan induk yaitu dengan mengacu ISO 31000 : 2018. Berdasarkan hal tersebut, tingkat kematangan Manajemen Risiko PLN IP Services masih di level *Defined* dengan skor *Risk Maturity Level* sebesar 3,48 mencapai target 104%.

Risk Management Maturity Level Assessment

Measurement of the maturity level of the Company's risk management implementation refers to the criteria set by the Holding Company, namely by referring to ISO 31000: 2018. Based on this, PLN IP Services's Risk Management maturity level is still at the *Defined* level with a Risk Maturity Level score of 3.48 reaching the target of 104%.

Tingkatan Risk Management Maturity

Risk Management Maturity Level



Level	Keterangan Description
1 Ad Hoc	Berdokumen dalam keadaan perubahan dinamis, tergantung pada individu perorangan. Documents are in a state of dynamic change, depending on the individual person.
2 Preliminary	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan dikelola dalam silo. Kedisiplinan dalam proses tidak ketat. Risks are defined in different ways and managed in silos. Discipline in the process is not strict.
3 Defined	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi. A general risk assessment/response framework begins to be organized. Executive leaders provide insight into the risks encountering the organization as a whole. Implementation plans are implemented by prioritizing high risks.
4 Integrated	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, tegan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan. Organizational risk management activities are coordinated across business areas using common risk management tools and processes where appropriate, with organization-wide risk monitoring, measurement and reporting.
5 Optimized	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal dan dalam pengambilan keputusan <i>shear hard</i> . Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan. Discuss risks along with strategic planning, capital allocation, and hard shear decision-making. Early warning system to notify the board and management when risks are above a set limit.

EVALUASI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Evaluasi dan penilaian terhadap implementasi manajemen risiko yang mengacu pada roadmap manajemen risiko tahun 2022-2026. Direksi perseroan agar memastikan mitigasi risiko bisnis yang sedang berjalan dilaksanakan sesuai rencana dan mengambil langkah antisipatif jika terindikasi terdapat hal-hal yang dapat mempengaruhi target RKAP 2023 dan dilaporkan secara berkala.

PERAN AKTIF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Peran Komisaris secara keseluruhan dalam hal Manajemen Risiko adalah:

1. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan manajemen risiko di Perusahaan.
2. Melakukan kajian risiko atas kelayakan kegiatan yang direncanakan oleh Manajemen Perusahaan.
3. Melakukan penilaian terhadap kegiatan Perusahaan yang memiliki potensi risiko yang dapat mempengaruhi kinerja Perusahaan melalui hasil kajian dan penilaian yang telah dilakukan oleh Komite.

Sedangkan peran Direksi antara lain:

1. Menyusun kebijakan manajemen risiko yang memuat: kerangka, tahapan pelaksanaan manajemen risiko, pelaporan risiko dan penanganannya. Kebijakan Manajemen Risiko disosialisasikan kepada seluruh karyawan Perusahaan;
2. Memiliki fungsi yang bertugas melaksanakan program manajemen risiko Terdapat rencana kerja Perusahaan untuk menerapkan kebijakan Manajemen Risiko;
3. Melakukan sosialisasi Kebijakan manajemen risiko kepada seluruh karyawan Perusahaan;
4. Menyusun rencana kerja Perusahaan untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko;
5. Melaksanakan program manajemen risiko (program manajemen risiko antara lain mencakup identifikasi dan penanganan risiko pada proses bisnis, proyek maupun usulan tindakan Perusahaan yang harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan/ atau RUPS);

EVALUATION OF RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION

Evaluation and assessment of the implementation of risk management with reference to the 2022-2026 risk management roadmap. The Board of Directors of the company to ensure that ongoing business risk mitigation is conducted according to plan and take anticipatory steps if there are indications of matters that may affect the 2023 RKAP target and reported regularly.

ACTIVE ROLE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The overall role of the Board of Commissioners in terms of Risk Management is:

1. Assessing the implementation of risk management in the Company.
2. Conducting a risk assessment on the feasibility of activities planned by the Company's Management.
3. Conducting an assessment of the Company's activities with potential risks that may affect the Company's performance through the results of studies and assessments conducted by the Committee.

The roles of the Board of Directors include:

1. Develop a risk management policy that contains: the framework, stages of risk management implementation, risk reporting, and handling. The Risk Management Policy is socialized to all employees of the Company;
2. Having a function in charge of implementing the risk management program there is a Company work plan to implement the Risk Management policy;
3. Conduct socialization of risk management policy to all employees of the Company;
4. Develop the Company's work plan to implement the risk management policy;
5. Implement the risk management program (the risk management program includes, among others, the identification and handling of risks in business processes, projects, and proposed Company actions that must be approved by the Board of Commissioners and/or GMS);

6. Melaksanakan pemantauan terhadap program manajemen risiko;
7. Melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris.

PERNYATAAN ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Direksi dan Dewan Komisaris berkomitmen untuk memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan dijalankan dengan baik sebagai dasar pencapaian visi dan misi Perusahaan. Penerapan manajemen risiko telah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan antara lain terkait; kerangka, tahapan pelaksanaan manajemen risiko, pelaporan risiko dan penanganannya.

Kebijakan Manajemen Risiko juga telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan seluruh identifikasi serta penanganan risiko pada proses bisnis, proyek maupun usulan tindakan Perusahaan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dan/atau RUPS. Direksi juga melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program manajemen risiko dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris.

6. Monitoring the risk management program;
7. Reporting the implementation of risk management to the Board of Commissioners.

STATEMENT ON THE ADEQUACY OF RISK MANAGEMENT SYSTEM

The Board of Directors and Board of Commissioners are committed to ensuring that Corporate Governance is well implemented as the basis for achieving the Company's vision and mission. The implementation of risk management is in line with established policies, among others related to; the framework, stages of risk management implementation, risk reporting, and handling.

The Risk Management Policy has also been socialized to all employees and all identification and handling of risks in business processes, projects, and proposed Company actions approved by the Board of Commissioners and/or GMS. The Board of Directors also monitors the implementation of the risk management program and reports to the Board of Commissioners.

Perkara Hukum dan Sanksi Administratif Legal Case and Administrative Sanction

Hingga akhir tahun 2023, Perusahaan tidak memiliki permasalahan hukum yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris maupun karyawan sehingga tidak terdapat informasi terkait sanksi administratif yang diterima.

Hingga akhir tahun 2023, Perusahaan tidak memiliki permasalahan hukum yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris maupun karyawan sehingga tidak terdapat informasi terkait sanksi administratif yang diterima.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Access to Company Information and Data

Perusahaan bertanggung jawab memberikan informasi Komitmen secara transparan dengan tetap menjaga kerahasiaan kegiatan bisnis dan operasional sebagai bentuk penerapan prinsip GCG. Pengelolaan dan Keterbukaan akan informasi tentang PLN IP Services sangat penting dalam membangun citra Perusahaan di mata publik khususnya para *stakeholder*. Perusahaan senantiasa memberikan informasi yang aktual dan bermanfaat dengan memperhatikan ketentuan terkait untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan pelanggan akan informasi kegiatan Perusahaan yang terkini.

Informasi mengenai hal-hal tersebut dipublikasikan pada laman situs jejaring, yaitu www.plnipservices.co.id, Laporan Tahunan dan media sosial.

Perusahaan telah membuat kebijakan terkait pengelolaan dan penggunaan media sosial dan sosial grup dalam Surat Keputusan Direksi Nomor. 085.K/CDB/IX/2022 tanggal 13 September 2022 tentang Pengelolaan Media Sosial, yang bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dan penyebaran informasi bagi pihak eksternal dan internal, juga untuk memperkenalkan/ mempromosikan/ membangun branding Perusahaan serta menjaga citra Perusahaan.

Perusahaan senantiasa memberikan informasi secara tepat waktu, relevan, memadai, jelas, akurat, dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan melalui banyak cara, antara lain:

MEDIA ELEKTRONIK/MEDIA SOSIAL

Departemen Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab atas pengelolaan media elektronik dan media sosial. Penambahan dan pengurangan akun senantiasa ditinjau secara berkala sesuai kebutuhan Perusahaan dan pembuatan akun di Tingkat Unit Kerja dapat dilakukan dengan persetujuan Sekretaris Perusahaan.

The Company is responsible for providing Commitment information in a transparent manner while maintaining the confidentiality of business and operational activities as a form of implementing GCG principles. Management and Disclosure of information about PLN IP Services is very important in building the Company's image in the eyes of the public, especially stakeholders. The Company always provides actual and useful information by taking into account related regulations to answer the needs of the public and customers for the latest information on the Company's activities.








Information regarding these matters is published on Company website, www.plnipservices.co.id, Annual Report, and social media.

The Company has made policies regarding the management and use of social media and social group in the Decree of the Board of Directors Number. 085.K/CDB/IX/2022 dated September 13, 2022 on the Management of Social Media, which aims to improve communication and socialization of information for external and internal parties, as well as to introduce/promote/build Company's branding and maintaining Company's image.

The Company always provides information in a timely, relevant, adequate, clear, accurate and easily accessible way for all stakeholders in many ways, including:

ELECTRONIC MEDIA/SOCIAL MEDIA

Corporate Secretary Department is responsible for managing electronic media and social media. Account additions and reductions are regularly reviewed according to the Company's needs and account creation at the Work Unit Level can be carried out with the approval of the Corporate Secretary.

 Facebook	: PLN Indonesia Power Services
 Instagram	: @cogindodayabersama
 YouTube	: PLN Indonesia Power Services
 LinkedIn	: PLN Indonesia Power Services
 Website Perusahaan	: www.plnip-services.co.id
 Email	: info@plnip-services.co.id
 Telepon	: +62 21 2178 9990 (ext. 1202)

WhatsApp Internal Perusahaan

Perusahaan juga menggunakan aplikasi WhatsApp sebagai wadah komunikasi internal Perusahaan yang dikelola oleh Manajemen. Hal ini dilakukan guna meningkatkan komunikasi internal Perusahaan dalam menyampaikan informasi-informasi kepada para pegawai secara lebih intens, lebih cepat dan lebih luas lagi.

Media Cetak

Kemudahan mencari informasi di media elektronik saat ini sudah banyak digunakan, tetapi penggunaan media cetak harian juga tetap dijadikan salah satu sarana penyampaian informasi Perusahaan, selain mematuhi aturan regulator juga dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang masih belum dapat memanfaatkan media elektronik.

Perusahaan juga masih memberikan informasi kinerja Perusahaan dalam bentuk laporan keuangan dan laporan tahunan yang secara *transparent* dilaporkan kepada pemegang saham. Bentuk pelaporan kepada pemegang saham antara lain:

1. Laporan Kinerja Bulanan
2. Laporan setiap 3 bulan (triwulan)
3. Laporan Manajemen
4. Pemberitaan di media massa terkait keterbukaan informasi akan kegiatan Perusahaan
5. Laporan Tahunan

Company Internal WhatsApp

The Company also use WhatsApp application as a means of internal company communication managed by management. This is done in order to improve the Company's internal communication in conveying information to employees more intensely, faster and more broadly.

Print Media

The ease of finding information on electronic media is now widely used, but the use of daily print media is also still used as a means of conveying Company information. In addition to complying with regulatory rules it can also provide information to the public who are still unable to utilize electronic media.

The Company also still provides information on the Company's performance in the form of financial statements and annual report which are reported transparently to shareholders. Forms of reporting to shareholders include:

1. Monthly Performance Report
2. Report every 3 months (quarterly)
3. Management Report
4. Coverage in the mass media regarding information disclosure regarding the Company's activities
5. Annual Report

Kode Etik

Code of Conduct

Kode etik adalah pedoman perilaku yang menjadi acuan bagi organ Perusahaan dan karyawan dalam menerapkan nilai-nilai budaya yang telah sesuai dengan visi dan misi Perusahaan. Perusahaan secara konsisten mengimplementasikan budaya AKHLAK dan menginternalisasi seluruh pedoman perilaku kepada seluruh jajaran Perusahaan.

Pedoman Perilaku merupakan salah satu struktur/perangkat Perusahaan dalam upaya untuk mewujudkan *Good Corporate Governance* yang berfungsi sebagai Pedoman bagi Insan PLN IP Services dalam melakukan interaksi dengan *stakeholders* dan sebagai bagian dari sistem yang menyeluruh berupa standar perilaku yang tertinggi untuk mendorong berlangsungnya perilaku etis bagi seluruh Insan PLN IP Services.

PEDOMAN KODE ETIK

Pedoman Perilaku telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor: 027.K/CDB/V/2021 dan No. 03.K/DEKOM-CDB/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Pedoman Budaya Perusahaan.

Pedoman Budaya Perusahaan mengatur tentang tata nilai dalam menciptakan iklim kerja yang dapat mendukung visi dan misi Perusahaan yang disusun berdasarkan nilai-nilai luhur yang berkembang di lingkungan Perusahaan dan diyakini mempunyai pengaruh yang positif untuk menciptakan suasana yang kondusif.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkannya Keputusan ini adalah :

1. Agar tersedianya acuan dan pedoman mengenai cara berpikir dan bertindak setiap Pegawai serta cara Perusahaan menjalankan bisnisnya.
2. Sebagai dasar dan pedoman bagi Pegawai dalam menjalankan Budaya Perusahaan yang merupakan bagian dari mekanisme pembuat dan pengontrol sikap dan tingkah laku Pegawai di Perusahaan.

The code of conduct serves as a reference for the Company's organs and employees in implementing cultural values that are in line with the Company's vision and mission. The Company consistently implementing AKHLAK culture and internalize all code of conduct to all levels of the Company.

Code of Conduct is one of the Company's structures/tools in an effort to realize Good Corporate Governance which functions as a guideline for PLN IP Services people in interacting with stakeholders and as part of a comprehensive system in the form of the highest standards of behavior to encourage ethical behavior for all PLN IP Services people.

CODE OF CONDUCT GUIDELINE

The Code of Conduct has been stipulated in the Joint Decree of the Board of Commissioners and Board of Directors Number: 027.K/CDB/V/2021 and No. 03.K/DEKOM-CDB/2021 dated May 17, 2021 on Guidelines for Corporate Culture.

The Corporate Culture Guidelines regulate the values in creating a work climate that can support the Company's vision and mission which are prepared based on the noble values that develop in the Company's environment and are believed to have a positive influence to create a conducive atmosphere.

PURPOSE AND OBJECTIVE

The purpose of enactment of this decision are:

1. To provide reference and guideline regarding how each employee think and act and how the Company runs its business.
2. As a basis and guideline for Employees in carrying out the Corporate Culture which is part of the mechanism for making and controlling the attitude and behavior of Employees in the Company.

3. Sebagai upaya penyempurnaan nilai-nilai sebelumnya sehingga lebih mendorong dan mendukung tercapainya visi dan misi Perusahaan.
4. Sebagai upaya menyamakan persepsi dan pemahaman mengenai Tata Nilai Perusahaan dan komponennya yang merupakan hasil dari penyelarasan Tata Nilai di PLN Group.

Tujuan ditetapkan perubahan Pedoman Budaya Perusahaan adalah:

1. Agar Pegawai memiliki perilaku yang dapat mendukung pencapaian visi dan misi Perusahaan dan mencerminkan identitas Perusahaan secara khas/spesifik.
2. Memastikan Budaya Perusahaan yang kondusif untuk meningkatkan motivasi dan kinerja Pegawai.
3. Mewujudkan Budaya Perusahaan yang sejalan dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan mendorong tercapainya target Perusahaan.
4. Memastikan Budaya Perusahaan yang mendukung Perusahaan untuk tumbuh dan terus berkelanjutan.

POKOK KODE ETIK PLN IP SERVICES

Kode etik PLN IP Services merupakan bentuk komitmen Perusahaan dalam menerapkan integritas sebagai salah satu dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Kode etik adalah bentuk perwujudan dari nilai-nilai budaya perusahaan AKHLAK yang menjadi jiwa dan pedoman setiap Insan PLN IP Services dalam berpikir, bertindak/bekerja, dan melakukan kegiatan bisnis yang terangkum ke dalam 2 Etika Perusahaan yakni:

1. Etika Pegawai, adalah sekumpulan norma atau nilai yang ditetapkan oleh Perusahaan sebagai suatu standar perilaku Insan PLN IP Services dalam aktivitas kerja sehari-hari.
2. Etika Bisnis, adalah sekumpulan norma atau nilai etis yang sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dan ditetapkan oleh Perusahaan untuk Insan PLN IP Services dalam menjalankan kegiatan bisnis.

3. As an effort to improve previous values so that they encourage and support the achievement of the Company's vision and mission.
4. As an effort to equalize perception and understanding of the Company's Values and its component which are the result of alignment of Values in the PLN Group.

The objectives of the changes to the Corporate Culture Guidelines are:

1. So that employees have behavior that can support the achievement of the vision and mission of the Company and reflect the unique/specific identity of the Company.
2. Ensuring conducive Corporate Culture to increase Employee motivation and performance.
3. Creating Corporate Culture that is in line with the Company's Long Term Plan (RJPP) and encourage the achievement of the Company's targets.
4. Ensuring Corporate Culture that supports the Company to grow and be sustainable.

PLN IP SERVICES'S CODE OF CONDUCT

The PLN IP Services code of conduct is a form of the Company's commitment to implementing integrity as one of the principles of good corporate governance. The code of conduct is a form of embodiment of AKHLAK's corporate cultural values which are the soul and guideline for every PLN IP Services People in thinking, acting/working, and conducting business activities which are summarized in 2 Corporate Ethics, namely:

1. Employee Ethics, is a set of norms or values set by the Company as a standard of behavior for PLN IP Services People in their daily work activities.
2. Business Ethics, is a set of ethical norms or values that are in accordance with applicable legal principles and are determined by the Company for PLN IP Services Individuals in carrying out business activities.

PENGUNGKAPAN KEPATUHAN BAHWA KODE ETIK BERLAKU BAGI SELURUH LEVEL ORGANISASI

Kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan merupakan tuntutan perilaku bisnis dan norma-norma yang berlaku di masyarakat yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pengurus dan pegawai Perusahaan sejalan dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Kode etik PLN IP Services berlaku bagi seluruh pegawai, termasuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi tanpa memandang jabatannya dalam perusahaan, dan berlaku setiap saat dalam melakukan kegiatan bisnis.

KOMITMEN TERHADAP PEDOMAN PERILAKU

Seluruh insan PLN IP Services harus bertanggung jawab dan berkewajiban untuk berperilaku etis dan benar, oleh karenanya diberikan kewajiban untuk membaca, memahami dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam Pedoman Perilaku.

Pada tanggal 1 sampai 31 Juli 2023, penandatanganan komitmen COC telah dilaksanakan oleh seluruh pegawai yang menyatakan akan mematuhi Pedoman Perilaku. Lembar pernyataan komitmen dapat diakses oleh seluruh pegawai melalui melalui Aplikasi *I-morning* terintegrasi.

SOSIALISASI KODE ETIK

Perusahaan melakukan sosialisasi kode etik kepada seluruh karyawan dan pihak yang terkait tanpa terkecuali, baik di dalam Perusahaan maupun yang berkaitan langsung dengan bisnis perusahaan. Pedoman perilaku disosialisasikan kepada seluruh Insan PLN IP Services dengan menginformasikan isi dari Pedoman Kode Etik melalui media sosial, email, dan secara online meeting.

JENIS PELANGGARAN DAN SANKSI

Pencapaian visi dan misi Perusahaan memerlukan partisipasi dan kedisiplinan dari seluruh karyawan dengan disiplin, cekatan dan terampil dalam melaksanakan pekerjaan untuk pengambilan keputusan, penempatan rencana atau dasar kebijakan khususnya menyangkut perilaku kedisiplinan seperti, kelalaian dalam bekerja, keterlambatan kerja, kehadiran kerja dan tingkat kehadiran karyawan.

COMPLIANCE DISCLOSURE THAT THE CODE OF CONDUCT APPLIES TO ALL ORGANIZATIONAL LEVELS

Compliance with laws and regulations is a demand for business behavior and norms that apply in society that must be implemented by all management and employees of the Company in line with the principles of Good Corporate Governance (GCG). PLN IP Services's code of conduct applies to all employees, including members of the Board of Commissioners and Board of Directors regardless of their position in the company, and applies at all times in conducting business activities.

COMMITMENT TO THE CODE OF CONDUCT

All PLN IP Services people must be responsible and obliged to behave ethically and correctly, therefore they are given the obligation to read, understand and comply with the provisions set out in the Code of Conduct.

On July 1 to July 31, 2023, the COC commitment signing was carried out by all employees who stated that they would comply with the Code of Conduct. The commitment statement sheet can be accessed by all employees through the integrated I-morning Application.

SOCIALIZATION OF CODE OF CONDUCT

The Company socializes the code of conduct to all employees and related parties without exception, both within the company and those directly related to the company's business. The code of conduct is socialized to all PLN IP Services People by informing them the content of the Code of Conduct through social media, email and online meeting.

TYPES OF VIOLATION AND SANCTION

Achieving the Company's vision and mission requires participation and discipline of all employees with discipline, agility and skill in fulfilling work for decision making, placement of plans or basic policies, especially regarding disciplinary behavior such as negligence at work, late for work, work attendance and employee attendance level.

Pelaksanaan Pedoman Perilaku merupakan langkah-langkah untuk menegakkan peraturan dalam pencapaian tujuan organisasi. Penerapan peraturan yang tegas dalam praktik yang sama terhadap bawahan dan memberikan sanksi yang tegas pada karyawan yang telah melanggar peraturan yang dibuat. Untuk mengantisipasi berbagai kendala/hambatan tersebut diperlukan adanya tingkatan dan jenis konsekuensi bagi pelanggar kode etik di lingkungan kerja.

Perusahaan berkomitmen untuk memberikan penghargaan terhadap pelaksanaan Pedoman perilaku sebagai bagian dari penilaian kinerja demikian pula sebaliknya, akan memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.

Keputusan pemberian tindakan disiplin kepada pegawai dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan dan klarifikasi yang dilakukan oleh KP2DP (Komite Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pegawai) dan dihadiri oleh para saksi, yang hasil akhirnya disampaikan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan untuk ditandatangani pihak-pihak yang terkait.

Implementation of the Code of Conduct are steps to enforce regulation in achieving organizational goals. Implementation of strict regulation in the same practice to subordinates and provide strict sanction to employees who have violated the regulations made. To anticipate these various obstacles/barriers, it is necessary to have levels and types of consequences for violators of the code of conduct in the work environment.

The Company is committed to rewarding the implementation of the Code of Conduct as part of performance assessment and vice versa, will provide sanction for violation committed.

The decision to grant disciplinary action to employees was made after going through an examination and clarification process carried out by KP2DP (Committee for Examination of Employee Discipline Violations) and attended by witness, the final result of which submitted in the form of Minutes of Examination to be signed by the parties concerned.

Pelanggaran Violation	Sanksi/Hukuman Sanction/Punishment
<p>Pelanggaran Ringan</p> <p>Salah satu pelanggaran yang dilakukan adalah terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya lebih dari 4 (empat) kali dalam sebulan dan/atau 12 (dua belas) kali dalam setahun dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tanpa ijin dari atasan)</p> <p>Minor Violation</p> <p>One of the violations committed is being late for work and/or leaving prematurely more than 4 (four) times a month and/or 12 (twelve) times a year for reason that cannot be accounted for and without permission from superior)</p>	<p>Sanksi disiplin ringan:</p> <p>Peringatan tertulis selama 6 (enam) bulan Mendapatkan nilai kinerja maksimal 2 (tidak memenuhi target kinerja) dalam 1 (satu) semester penilaian.</p> <p>Minor disciplinary sanctions:</p> <p>Written warning for 6 (six) months Get a maximum performance score of 2 (does not meet the performance target) in 1 (one) assessment semester.</p>
<p>Pelanggaran Sedang</p> <p>Salah satu contohnya adalah kedapatan melanggar disiplin ringan lebih dari 1 (satu) pelanggaran di waktu yang sama dan mangkir kerja selama lebih dari 3 (tiga) hari berturut-turut</p> <p>Moderate Violation</p> <p>One example is being caught violating minor discipline for more than 1 (one) violation at the same time and being absent from work for more than 3 (three) consecutive days</p>	<p>Sanksi disiplin sedang:</p> <p>Peringatan tertulis selama 6 (enam) bulan; Mendapatkan nilai kinerja maksimal 2 (tidak memenuhi target kinerja) dalam 2 (dua) semester penilaian.</p> <p>Moderate disciplinary sanctions:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Written warning for 6 (six) months; • Get a maximum performance score of 2 (does not meet performance targets) in 2 (two) assessment semesters.
<p>Pelanggaran Berat</p> <p>Pelanggaran yang dilakukan adalah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana, tidak termasuk pelanggaran lalu lintas)</p> <p>Serious Violation</p> <p>Violation committed is found guilty and sentenced to imprisonment based on a court decision that has permanent legal force for committing a crime, not including traffic offense)</p>	<p>Sanksi disiplin berat:</p> <p>Peringatan tertulis selama 6 (enam) bulan; Penurunan jenjang jabatan secara permanen dengan Keputusan Direksi dan/atau; Mendapatkan nilai kinerja maksimal 2 (tidak memenuhi target kinerja) dalam 3 (tiga) semester penilaian; Memungkinkan dijatuhi Pemutusan Hubungan kerja atas Keputusan Direksi.</p> <p>Serious disciplinary sanctions:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Written warning for 6 (six) months; • Permanent demotion by decision of the Board of Directors and/or; • Get a maximum performance score of 2 (does not meet performance targets) in 3 (three) assessment semesters; • Possibility of being subject to Termination of Employment by Decision of the Board of Directors.



Untuk setiap pelanggaran dalam setiap tingkatan hukuman yang diberikan PLN IP Services menetapkan: Pegawai yang dijatuhi dan sedang menjalani sanksi disiplin ditetapkan sebagai berikut:

1. Tidak dapat dipromosikan selama sanksi disiplin diberlakukan;
2. Tidak dapat mengikuti program pendidikan, pelatihan dan/atau pengembangan individu, serta melakukan perjalanan dinas kecuali atas ijin pengelolaan pembinaan;
3. Bagi Pegawai dalam masa percobaan (Pegawai TKWT Proyeksi organik) yang melanggar Peraturan Disiplin, Pegawai tersebut ini dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Pegawai dan dilakukan pemutusan hubungan kerja tanpa melalui penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

For each violation at each level of punishment given PLN IP Services stipulates: Employees who have been sentenced and are currently undergoing disciplinary sanctions are determined as follows:

1. Cannot be promoted as long as disciplinary sanctions are imposed;
2. Not being able to take part in education, training and/or individual development program, as well as going on business trip except with the permission of management;
3. For employees on probation (organic Projection TKWT employees) who violate the Disciplinary Regulation, this employee is considered not meeting the requirement to be appointed as an employee and termination of employment is conducted without going through the establishment of an industrial relations dispute resolution institution.

Jumlah Pelanggaran dan Sanksi

Number of Violation and Sanction

No.	Jenis Pelanggaran	Jenis Sanksi Type of Sanction	Jumlah Pegawai terkena sanksi Number of employees affected by sanction	Type of Violation
1.	Kehadiran	SP 1/SP 2	6 / 1	Attendance
2.	Pelanggaran atas larangan pada Pedoman Disiplin	SP 1	3	Violation of the prohibition on the Discipline Guideline
		SP 2	2	
		SP 3	0	

Cogindo Bersih

Cogindo Bersih

Cogindo Bersih (CDB Bersih) merupakan program implementasi GCG yang melibatkan seluruh *Stakeholder* baik internal maupun eksternal. CDB Bersih selaras dengan program ‘PLN Bersih’ dan ‘IP Bersih’ yang bertujuan menjadikan PLN dan afiliasinya bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme pada tahun 2016. CDB Bersih dilaksanakan di semua Organ Perusahaan, Pegawai, Pejabat dan Pemangku Kepentingan.

Cogindo Bersih (Clean CDB) is a GCG implementation program that involves all stakeholders, both internal and external. CDB Bersih is in line with ‘PLN Bersih’ and ‘IP Bersih’ program which aim to make PLN and its affiliate free from corruption, collusion and nepotism in 2016. CDB Bersih is implemented in all Company Organs, Employees, Officials and Stakeholders.

Cogindo Bersih memiliki 4 Pilar PITA yang selaras dengan prinsip GCG yaitu:

Cogindo Bersih has 4 PITA Pillars which are aligned with GCG principles, namely:



Partisipasi | *Participation*

Prinsip partisipasi diwujudkan dalam bentuk Komitmen Integritas Internal Perusahaan, *collective action* yang menjadi komitmen bersama Perusahaan dengan mitra kerja dan *multi stakeholders forum*.

The principle of participation is manifested in the form of the Company's Internal Integrity Commitment, collective action which is a joint commitment between the Company and its work partner and multi-stakeholder forum.



Integritas | *Integrity*

Prinsip integritas diwujudkan dalam bentuk kepatuhan terhadap *Code of Conduct* (Budaya Perusahaan, ketentuan gratifikasi dan benturan kepentingan). Prinsip integritas juga diterapkan untuk meningkatkan layanan terhadap pelanggan dan mitra kerja.

The principle of integrity is manifested in the form of compliance with the Code of Conduct (Corporate Culture, gratuity provision and conflict of interest). Integrity principle is also applied to improve service to customer and business partner.



Transparansi | *Transparency*

Prinsip transparansi menjadi dasar bagi Perusahaan untuk selalu responsif terhadap permintaan layanan informasi publik. Perusahaan memberikan kemudahan terhadap permintaan informasi publik dan senantiasa meningkatkan keterbukaan informasi publik.

The principle of transparency is the basis for the Company to always be responsive to requests for public information services. The Company provides convenience to requests for public information and always improves public information disclosure.



Akuntabilitas | *Accountability*

Prinsip akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk *complaint handling mechanism* yang responsif, opini audit yang sangat baik, *Whistleblowing System* dan pengelolaan gratifikasi yang kredibel.

The principle of accountability is manifested in the form of a responsive complaint handling mechanism, an excellent audit opinion, a credible Whistle Blowing System and gratuity management.



Whistleblowing System

Whistleblowing System

PLN IP Services memiliki *Whistleblowing System* (WBS) merupakan salah satu bentuk komitmen Perusahaan dalam mendukung penerapan GCG yang baik dan praktik bisnis yang berintegritas. Sistem pelaporan pelanggaran diterapkan oleh PLN IP Services dengan komitmen dari Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai dalam rangka mewujudkan visi Perusahaan.

WBS disediakan oleh Perusahaan sebagai saluran komunikasi yang memfasilitasi *whistleblower*/pelapor untuk melaporkan kejadian atau dugaan terkait dengan tindakan *fraud*, pelanggaran kebijakan, penyuapan/pinjam-meminjam uang dengan *customer*, pelecehan seksual, pencurian/ penggelapan, kecurangan laporan keuangan, aktivitas ilegal dan pelanggaran kode etik lainnya yang melibatkan karyawan Perusahaan dan/atau dengan pihak-pihak terkait yang terjaga kerahasiaan identitas pelapornya.

Whistleblowing System berfungsi sebagai sarana dalam pencegahan, pengungkapan pelanggaran atau tindak kecurangan dalam Perusahaan sekaligus bentuk peningkatan perlindungan *stakeholders* dalam rangka menjamin hak-hak nya dalam berhubungan dengan Perusahaan .

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Menteri Negara BUMN: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
4. Pedoman Sistem Pengaduan Pelanggaran Tahun 2008 oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG);

PLN IP Services has a Whistleblowing System (WBS) which is a form of the Company's commitment to supporting the implementation of GCG and business practices with integrity. The violation reporting system is implemented by PLN IP Services with commitment from the Board of Commissioners, Board of Directors and all employees in order to realize the Company's vision.

The WBS is provided by the Company as a communication channel that facilitate whistleblower/reporter to report incident or allegation related to acts of fraud, policy violation, bribery/borrowing money with customer, sexual harassment, theft/embezzlement, fraudulent financial statements, illegal activities and other violations of code of conduct involving Company employees and/or with related parties whose identity of the whistleblower is kept confidential.

The Whistleblowing System function as a means of prevention, disclosure of violation or acts of fraud within the Company as well as a form of increasing the protection of stakeholders in order to guarantee their rights in dealing with the Company.

LEGAL BASIS

1. Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 on Consumer Protection;
2. Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 71 of 2000 on Procedures for Implementing Community Participation and Giving Award in the Prevention and Eradication of Criminal Acts of Corruption;
3. Regulation of the Minister of State Owned Enterprises: PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises (BUMN);
4. Guidelines for the 2008 Violation Complaint System by the National Committee on Governance Policy (KNKG);

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 5. Anggaran Dasar PT Cogindo DayaBersama; 6. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: 079.K/CDB/XII/2019 dan Nomor : 004.K/DEKOM-CDB/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (<i>Whistleblowing</i>) PT Cogindo DayaBersama; 7. Keputusan Bersama Komisaris dan Direksi No.004.K/DEKOM-CDB/XII/2015 dan No.036.K/CDB/XII/2015 tentang Pedoman penerimaan, pemberian hadiah/cinderamata & hiburan (<i>entertainment</i>) di lingkungan PT PLN Indonesia Power Services; 8. Keputusan Bersama Direksi PT Cogindo DayaBersama Nomor 014.K/CDB/III/2019 tentang Pedoman Budaya Perusahaan PT Cogindo DayaBersama; 9. Keputusan Bersama Direksi dan Komisaris PT Cogindo DayaBersama Nomor: 082.2.K/CDB/XI/2020 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) di Lingkungan PT Cogindo DayaBersama; 10. Keputusan Direksi PT Cogindo DayaBersama Nomor: 074.K/CDB/XI/2019 tentang Pedoman Disiplin Pegawai PT Cogindo DayaBersama. | <ol style="list-style-type: none"> 5. PT Cogindo DayaBersama's Articles of Association and their amendment; 6. Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners Number: 079.K/CDB/XII/2019 and Number: 004.K/DEKOM-CDB/2019 on Guidelines for Whistle Blowing Management of PT Cogindo DayaBersama; 7. Joint Decree of Board of Commissioners and Board of Directors No.004.K/DEKOM-CDB/XII/2015 and No.036.K/CDB/XII/2015 on Guidelines for receiving, giving gift/souvenir & entertainment within PT PLN Indonesia Power Services; 8. Joint Decree of the Board of Directors of PT Cogindo DayaBersama Number 014.K/CDB/III/2019 on PT Cogindo DayaBersama's Corporate Culture Guidelines; 9. Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Cogindo DayaBersama Number: 082.2.K/CDB/XI/2020 on Guidelines for Good Corporate Governance within PT Cogindo DayaBersama; 10. Decree of the Board of Directors of PT Cogindo DayaBersama Number: 074.K/CDB/XI/2019 on Guidelines for Employee Discipline of PT Cogindo DayaBersama. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Bentuk komitmen Perusahaan dalam implementasi GCG antara lain adalah memperhatikan kepentingan setiap stakeholders berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan sesuai prinsip GCG. Pengaduan pelanggaran harus diselesaikan secepatnya sesuai mekanisme untuk menghindari perselisihan yang berlarut-larut. Oleh karena itu Perusahaan telah menetapkan dan mengesahkan Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran dalam Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris dengan Nomor 079.K/CDB/ XII/2019 dan Nomor 004.K/DEKOM-CDB/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran PT Cogindo DayaBersama pada tanggal 9 Desember 2019 yang telah diperbarui dalam Surat Edaran Direksi No. 021/ED/CDB/XI/2021 tanggal 18 November 2021 tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Pengaduan Pelanggaran.

Sistematika dari isi pedoman antara lain menjelaskan:

1. Pendahuluan
2. Ketentuan umum Penanganan Pengaduan Pelanggaran

VIOLATION REPORTING SYSTEM GUIDELINE

The form of the Company's commitment to implementing GCG includes paying attention to the interest of each stakeholder based on the principles of fairness and equality in accordance with GCG principles. Violation complaint must be resolved as soon as possible according to the mechanism to avoid protracted dispute. Therefore the Company has established and ratified the Guidelines for Management of Complaints of Violation in the Joint Decree of the Board of Directors and the Board of Commissioners Number 079.K/CDB/XII/2019 and Number 004.K/DEKOM-CDB/2019 on Guidelines for Management of Violation Complaint of PT Cogindo DayaBersama on December 9, 2019 which has been updated in the Circular Letter of the Board of Directors No. 021/ED/CDB/XI/2021 dated November 18, 2021 on Procedures for Handling Report of Violation Complaint.

Systematic of the content of the guideline include explaining:

1. Introduction
2. General Provision for Handling Violation Complaint

3. Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran.
4. Perlindungan, Apresiasi dan Sanksi.
5. Penutup.
6. Lampiran

3. Management of Violation Complaint.
4. Protection, Appreciation and Sanction.
5. Closing
6. Appendix

Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran ini diberlakukan bagi pihak internal maupun eksternal PT PLN Indonesia Power Services dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelapor pelanggaran yang dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris, Organ Penunjang Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Pegawai di lingkungan PT PLN Indonesia Power Services maupun *stakeholders* lainnya dalam menjalankan hubungan kerja sesuai dengan standar etika yang berlaku di PT PLN Indonesia Power Services.
- b. Oknum pelaku pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Organ Penunjang Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Pegawai di lingkungan PT PLN Indonesia Power Services.

This Violation Complaint Management Policy applies to internal and external parties of PT PLN Indonesia Power Services with the following conditions:

- a. Reporting violation that can be carried out by the Board of Commissioners, Supporting Organs of the Board of Commissioners, Board of Directors, and all employees within PT PLN Indonesia Power Services and other stakeholders in carrying out work relationship in accordance with the ethical standard that apply at PT PLN Indonesia Power Services
- b. The perpetrator of the violation allegedly committed by members of the Board of Commissioners, Supporting Organs of the Board of Commissioners, Board of Directors, and all employees within PT PLN Indonesia Power Services.

TIM PENGELOLA PENGADUAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING*)

1. Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan pengaduan pelanggaran.
2. Direksi membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 080.K/CDB/XII/2019 Tentang Susunan Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing*) PT PLN Indonesia Power Services tanggal 9 Desember 2019.
 - 2.1 Tim Pengelola WBS untuk tingkat terduga pelaku pelanggaran : Pegawai Jenjang Eksekutif

WHISTLEBLOWING MANAGEMENT TEAM

1. The Compliance Function is responsible for managing complaint of violation.
2. The Board of Directors formed a Whistleblowing Management Team as stipulated in the Decree of the Board of Directors Number 080.K/CDB/XII/2019 on the Composition of PT PLN Indonesia Power Services Whistleblowing Management Team December 9, 2019.
 - 2.1 WBS Management Team for the level of suspected perpetrator of violation: Executive level staff

Ketua Head	: Direktur Utama President Director
Anggota Member	: Direktur SDM Director of Human Capital
	: Direktur Keuangan Director of Finance
	: Direktur Bisnis Director of Business
	: Direktur Operasi Director of Operations
Admin Pengaduan Complaint Admin	: <i>Lead Analyst</i> Tata Kelola dan Informasi Korporat Lead Analyst of Corporate Governance and Information

2.2 Tim Pengelola WBS untuk tingkat terduga pelaku pelanggaran : Pegawai Jenjang Supervisor dan Pelaksana

3.2 WBS Management Team for the level of suspected perpetrator of violation: Supervisor and Implementer level staff

Ketua Head	: Kepala Satuan Audit Internal Internal Head of Internal Audit Unit
Anggota Member	: <i>Lead Analyst</i> Hukum Bisnis dan Korporat Lead Analyst of Business and Corporate Law
	: <i>Manager</i> Organisasi, Perencanaan & Talenta Organization, Planning and Talent Manager
	: <i>Manager Human Capital Management</i> Human Capital Management Manager
	: Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary
Admin Pengaduan Complaint Admin	: <i>Lead Analyst</i> Tata Kelola dan Informasi Korporat Lead Analyst of Corporate Governance and Information

2.3 Tim Pengelola WBS untuk tingkat terduga adalah oknum Direksi, Dewan Komisaris dan Organ Penunjang Dewan Komisaris, dibentuk dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris yang terdiri dari perwakilan Komite audit dan pihak lain yang diperlukan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.

2.3 WBS Management Team for the unexpected level are members of the Board of Directors, Board of Commissioners and Supporting Organs of the Board of Commissioners, formed and determined by the Board of Commissioners consisting of representatives of the audit Committee and other parties as needed according to their competence and expertise.

2.4 Tim Investigasi WBS

2.4 WBS Investigation Team

Ketua Head	: Kepala Satuan Audit Internal Head of Internal Audit Unit
Anggota Member	: <i>Lead Analyst</i> Hukum Bisnis dan Korporat Lead Analyst of Business and Corporate Law
	: <i>Lead Auditor</i> Teknik Lead Technical Auditor
	: Anggota tambahan yang ditunjuk Direksi Additional members appointed by the Board of Directors

TUGAS TIM PENGELOLA PENGADUAN PELANGGARAN :

1. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran menerima laporan pengaduan pelanggaran yang disampaikan oleh Admin Pengaduan
2. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi yang merupakan kegiatan untuk mencari kebenaran awal terhadap adanya indikasi pelanggaran dari bukti pendukung serta dokumen yang disampaikan dan dokumen lain yang berkaitan dengan Pengaduan Pelanggaran yang disampaikan
3. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran memanggil/melakukan klarifikasi kepada Terlapor atas Dugaan Pelanggaran yang masuk untuk menjamin azas praduga tidak bersalah pihak Terlapor dan melakukan klarifikasi kepada Pelapor

DUTIES OF THE WHISTLEBLOWING MANAGEMENT TEAM

1. The Whistleblowing Management Team receive report of complaint of violation submitted by Complaint Admin
2. The Whistleblowing Management Team conduct verification which is an activity to seek the initial truth of indication of violation from supporting evidence and submitted document and other documents related to the submitted Violation Complaint
3. The Whistleblowing Management Team summon/ clarify the Reported Party regarding the Alleged Violation entered to ensure the principle of the presumption of innocence of the Reported party and clarify with the Whistleblower (if the Whistleblower is

(jika Pelapor bersedia diungkap identitasnya) untuk memastikan terbukti atau tidaknya dugaan pelanggaran tersebut.

4. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran dengan bukti pendukung/dokumen awal yang masuk dan hasil klarifikasi dengan Terlapor membuat laporan verifikasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan disampaikan kepada Direksi.
5. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan pemantauan tindak lanjut Pengaduan Pelanggaran
6. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran menyampaikan laporan secara berkala Pengaduan Pelanggaran yang masuk, yang diinvestigasi, dan yang telah dianggap selesai kepada Direksi.

TUGAS TIM INVESTIGASI PENGADUAN PELANGGARAN

1. Tim Investigasi Pengaduan Pelanggaran menerima tugas dari Direksi atas Pengaduan Pelanggaran berdasarkan Berkas/Dokumen dan Berita Acara yang dibuat oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran untuk melakukan investigasi yaitu merupakan serangkaian kegiatan untuk membuktikan dan mendapatkan kepastian adanya hubungan antara terduga pelaku Pelanggaran dengan tindakan yang dilakukannya adalah benar telah melanggar hukum dan kebijakan dan standar yang ditetapkan oleh PT PLN Indonesia Power Services atas kasus dugaan pelanggaran tersebut.
2. Tim Investigasi melakukan proses Investigasi atas Pengaduan yang diterima dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. Bila dipandang perlu, masa kerja ini dapat diperpanjang paling lama untuk 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya.
3. Tim Investigasi melakukan investigasi yang diperlukan untuk melihat kasus pelanggaran tersebut serta dampaknya baik secara materiil atau non materiil terhadap Perusahaan, jika diperlukan memanggil Terlapor dan Pihak-pihak lainnya yang terkait dalam dugaan pelanggaran tersebut.

willing to reveal his/her identity) to ensure whether or not the alleged violation is proven.

4. The Whistleblowing Management Team with supporting evidence/initial document that came in and result of clarification with the Reported Party makes a verification report within 30 (thirty) working days and can be extended for a maximum of the next 30 (thirty) working days as set forth in the Minutes of Result Verification and submitted to the Board of Directors.
5. The Whistleblowing Management Team monitors the follow-up of Violation Complaint
6. The Whistleblowing Management Team submit regular reports on incoming, investigated, and considered completed Violation Complaint to the Board of Directors.

DUTIES OF THE WHISTLEBLOWING INVESTIGATION TEAM

1. The Whistleblowing Investigation Team receive assignment from the Board of Directors on Violation Complaint based on Files/Documents and Minutes made by the Whistleblowing Management Team to conduct an investigation, which is a series of activities to prove and obtain certainty that there is a relationship between the alleged perpetrator of the Violation and the actions it has taken are has truly violated the law and the policies and standards set by PT PLN Indonesia Power Services for the alleged violation case.
2. The Investigation Team conducts an Investigation process on Complaints received within 30 (thirty) working days. If deemed necessary, this working period can be extended for a maximum of the next 30 (thirty) working days.
3. The Investigation Team conduct the necessary investigation to look at the violation case and its impact both materially and non-materially on the Company, if necessary summon the Reported Party and other parties involved in the alleged violation.

TUGAS ADMIN PENGADUAN

1. Admin Pengaduan bertugas untuk melakukan penerimaan pengaduan pelanggaran yang masuk pada media WBS.
2. Admin Pengaduan, meregister, memilah dan meneruskan laporan kepada Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran serta menjamin/menjaga identitas Pelapor, dengan catatan penerima Pengaduan Pelanggaran memuat sekurangnya :
 - a. Tanggal Penerimaan
 - b. Petugas Penerima
 - c. Deskripsi Singkat
3. Admin Pengaduan bertugas sebagai penghubung komunikasi jika Pelapor tidak ingin diungkapkan Identitasnya selama proses Pengaduan Pelanggaran
4. Admin Pengaduan melakukan administrasi seluruh proses Pengaduan Pelanggaran, dan menyampaikannya kepada Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran

MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

1. Perusahaan wajib menerima Pengaduan Pelanggaran dari pihak internal maupun eksternal.
2. Perusahaan wajib menindaklanjuti Pengaduan Pelanggaran dari Pelapor yang mencantumkan identitas maupun tanpa identitas (anonim) yang disertai dengan Bukti Pendukung atas laporan pelanggaran yang disampaikan.
3. Perusahaan memiliki beberapa media untuk menyampaikan Pengaduan jika seseorang mengetahui adanya pelanggaran terhadap kebijakan manajemen atau perilaku yang ia anggap sebagai perilaku yang dapat dilaporkan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pegawai/pihak Eksternal dapat menyampaikan pengaduan kepada Direksi dan atau Fungsi Kepatuhan perusahaan.
 - Surat resmi yang ditujukan kepada Dewan Komisaris/ Direksi/ Fungsi Kepatuhan ke alamat kantor Pusat : U.p Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran, Jl. Pasar Minggu Kav. 190, Jakarta Selatan 12510
 - Melalui *email* Perusahaan: wbs@plnipservices.co.id
 - Telepon: +62 21 521 4515
 - *Website* : <https://www.plnipservices.co.id>

DUTIES OF COMPLAINT ADMIN

1. The Complaint Admin is tasked with receiving complaints of violation that enter the WBS media.
2. Complaint Admin, register, sort and forward report to the Whistleblowing Management Team and guarantee/maintain the identity of the Whistleblower, provided that the recipient of the Whistleblowing Complaint contains at least:
 - a. Receipt date
 - b. Receiving Officer
 - c. Short Description
3. The Complaint Admin serves as a communication liaison if the Whistleblower does not want his/her Identity disclosed during the Whistleblowing process
4. The Complaints Admin administer the entire Whistleblowing Process, and submit it to the Whistleblowing Management Team.

MECHANISM FOR SUBMISSION OF VIOLATION REPORT

1. The Company is required to receive Whistleblowing Complaint from internal and external parties.
2. The Company is required to follow up on Violation Complaint from Whistleblower who include identity or without identity (anonymous) accompanied by Supporting Evidence for the violation report submitted.
3. The Company has several media to submit Complaint if someone knows there is a violation of management policies or behavior that he/she considers as behavior that can be reported, namely as follows:
 - a. Employees/external parties can submit complaint to the Board of Directors and/or the Compliance Function of the company.
 - Official letter addressed to the Board of Commissioners/ Board of Directors/ Compliance Function to the address of the Head office: U.p Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran Jl. Pasar Minggu Kav. 190, Jakarta Selatan 12510
 - Via corporate email: wbs@plnipservices.co.id
 - Telephone: +62 21 521 4515
 - *Website* : <https://www.plnipservices.co.id>

- b. Apabila terlapor adalah pegawai (Eksekutif, Supervisor, dan Pelaksana) disampaikan melalui:
- Direksi PT PLN Indonesia Power Services
 - Fungsi kepatuhan PT PLN Indonesia Power Services
 - *Email* Perusahaan: wbs@plnip-services.co.id
 - Surat resmi yang ditujukan kepada Direksi/ Fungsi Kepatuhan, dengan cara diantar langsung atau melalui pos ke kantor pusat sesuai alamat diatas.
- c. Apabila terlapor adalah oknum Direksi, Dewan Komisaris dan Organ Penunjang Dewan Komisaris, dapat disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris melalui:
- Fungsi Kepatuhan PT PLN Indonesia Power Services
 - *Email* Perusahaan; wbs@plnip-services.co.id
 - Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Dewan Komisaris, dengan cara diantar langsung, atau melalui pos ke Perusahaan sesuai alamat diatas.
- d. Pegawai/Eksternal dapat menyampaikan pengaduan melalui Media komunikasi yang disediakan oleh perusahaan yang dikelola oleh seorang Admin dari Fungsi Kepatuhan perusahaan
- e. Setelah Pengaduan diterima, maka pengaduan tersebut wajib diteruskan kepada Fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan mengenai kerahasiaan yang ditetapkan dalam Kebijakan ini.
- b. If the reported party is an employee (Executive, Supervisor, and Executor) it is submitted via:
- Board of Directors of PT PLN Indonesia Power Services
 - Compliance function of PT PLN Indonesia Power Services
 - Company Email: wbs@plnip-services.co.id
 - Official letter addressed to the Board of Directors/Compliance Function, by direct delivery or by post to the head office according to the address above
- c. If the reported person is a member of the Board of Directors, Board of Commissioners and Supporting Organs of the Board of Commissioners, it can be submitted directly to the Board of Commissioners via:
- Compliance function of PT PLN Indonesia Power Services
 - Company Email; wbs@plnip-services.co.id
 - Deliver official letters addressed to the Board of Commissioners, by direct delivery, or by post to the Company according to the address above.
- d. Employees/Externals can submit complaints through the communication media provided by the company which is managed by an Admin from the company's Compliance Function
- e. After the complaint is received, the complaint must be forwarded to the compliance function in accordance with the provisions regarding confidentiality set out in this Policy.

JENIS PENGADUAN DAN SANKSI

Jenis Pengaduan

Insan PLN IP Services diwajibkan untuk melaporkan terjadi aktivitas dengan indikasi terdapat pelanggaran terhadap kebijakan Perusahaan. Perilaku yang dapat dilaporkan antara lain:

1. Tidak jujur, curang atau korup, termasuk suap atau kegiatan lainnya;
2. Adalah aktivitas ilegal (seperti pencurian, penjualan atau penggunaan obat-obatan, kekerasan, pelecehan atau intimidasi, kerusakan pidana pada properti atau pelanggaran hukum negara bagian atau federal lainnya);

TYPES OF COMPLAINT AND SANCTION

Complaint Type

PLN IP Services people required to report activity with indication of violation of Company policy. Reportable behavior includes:

1. Dishonest, fraudulent or corrupt, including bribery or other activities;
2. Is an illegal activity (such as theft, sale or use of drugs, violence, harassment or intimidation, criminal damage to property or violation of other state or federal laws);

3. Tidak etis atau melanggar kebijakan perusahaan (seperti mengubah catatan atau data perusahaan secara tidak jujur, mengadopsi praktik akuntansi yang dipertanyakan atau dengan sengaja melanggar pedoman etika perusahaan atau kebijakan atau prosedur lain);
4. Berpotensi merugikan atau membahayakan perusahaan, karyawan perusahaan atau pihak ketiga, seperti praktik kerja yang tidak aman, kerusakan lingkungan, risiko kesehatan, atau penyalahgunaan properti atau sumber daya perusahaan;
5. Sama dengan penyalahgunaan wewenang;
6. Dapat menyebabkan kerugian finansial bagi perusahaan atau merusak reputasinya atau sebaliknya merugikan kepentingan perusahaan;
7. Melibatkan pelecehan, diskriminasi, viktimisasi, atau intimidasi; atau
8. Melibatkan segala bentuk ketidakwajaran yang serius lainnya.

Sanksi

Pemberian sanksi kepada karyawan yang melakukan pelanggaran serta pemberian apresiasi bagi pelapor merupakan bentuk dukungan atas penerapan sistem pelaporan pelanggaran di Perusahaan. Pemberian sanksi maupun apresiasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan disiplin pegawai yang telah ditetapkan antara lain berupa teguran lisan, teguran tertulis, penurunan jabatan hingga pemberhentian kerja.

TINDAK LANJUT PELAPORAN

1. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran wajib melakukan verifikasi atas laporan yang masuk dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja kepada Pelapor ataupun pihak-pihak terkait. Admin dapat meminta Pelapor untuk bekerjasama memberikan informasi melalui *Form* Pengaduan WBS (Lampiran I) dan Pelapor dapat memberikan informasi tambahan, jika ada. Kegiatan Verifikasi Pengaduan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya. Hasil Verifikasi dimuat dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan dilaporkan kepada Direksi.
2. Direksi dan Dewan Komisaris mempelajari laporan dan kesimpulan dari Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran beserta bukti awal yang ada, dan kemudian menetapkan, apakah Pengaduan perlu ditindak lanjut ke tahap Investigasi atau tidak (ditutup).

3. Unethical or violating company policy (such as dishonestly altering company records or data, adopting questionable accounting practices or knowingly violating company ethics guidelines or other policies or procedures);
4. Potential harm or harm to the company, company employees or third parties, such as unsafe work practices, environmental damage, health risk, or misuse of company property or resources;
5. Same with abuse of authority;
6. Can cause financial loss to the company or damage its reputation or otherwise harm the interest of the company;
7. Involves harassment, discrimination, victimization, or intimidation; or
8. Involves any other serious form of impropriety.

Sanctions

Giving sanction to employees who commit violation and giving appreciation to whistleblower is a form of support for the implementation of whistleblowing system in the Company. Sanction and appreciation is fulfilled in accordance with laws and regulations and employee disciplinary regulation that have been stipulated, including verbal warning, written reprimand, demotion to termination of employment.

REPORTING FOLLOW UP

1. The Whistleblowing Management Team is required to verify the incoming report within 30 (thirty) working days to the Reporting Party or related parties. Admin can ask the Rapporteur to cooperate in providing information through the WBS Complaint Form (Attachment I) and the Whistleblower can provide additional information, if any. Complaint Verification activity can be extended for maximum of the next 30 (thirty) working days. Verification result contained in the Minutes of Verification Result and reported to the Board of Directors.
2. The Board of Directors and Board of Commissioners study the report and conclusion of the Whistleblowing Management Team along with the initial available evidence, and then determine whether the Complaint needs to be followed up to the Investigation stage or not (closed).

3. Berita Acara Hasil Verifikasi yang akan diproses ke tahap Investigasi disampaikan / diteruskan oleh Direksi kepada Tim Investigasi.
4. Terkait Pengaduan Pelanggaran yang melibatkan oknum Pegawai maka Tim Investigasi akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Direksi.
5. Terkait pengaduan pelanggaran yang melibatkan oknum Direksi, Dewan Komisaris, dan Organ Penunjang Dewan Komisaris, maka Tim Investigasi akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Dewan Komisaris.
6. Tim Investigasi melakukan proses Investigasi atas Pengaduan yang diterima dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. Bila dipandang perlu, masa kerja ini dapat diperpanjang paling lama untuk 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya. Hasil Investigasi dimuat dalam Berita Acara Hasil Investigasi dan dilaporkan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris sesuai dengan jalur dan level pelaku Pelanggaran.
7. Direksi dan Dewan Komisaris mempelajari laporan dan kesimpulan dari Tim Investigasi jalur terkait, dan kemudian memberikan keputusan kepada Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran jalur terkait, apakah Pengaduan perlu ditindaklanjuti atau tidak (ditutup).
8. Apabila Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran jalur terkait setelah mendapatkan keputusan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris menyatakan terbukti adanya Pelanggaran oleh Terlapor maka Direksi dan/atau Dewan Komisaris harus menindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.
9. Hasil Investigasi terbukti adanya pelanggaran disiplin oleh Pegawai maka ditindaklanjuti melalui sidang disiplin oleh Komite Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pegawai (KP2DP) sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
10. Hasil Investigasi terbukti adanya pelanggaran oleh Pegawai, oknum Direksi, Dewan Komisaris dan Organ Penunjang Dewan Komisaris yang mengarah ke tindak pidana, maka akan ditindaklanjuti dengan proses hukum yang berlaku kepada lembaga penegak hukum dengan Direksi sebagai pejabat penyerah perkara.
3. Minutes of Verification Result which will be processed to the Investigation stage are submitted/forwarded by the Board of Directors to the Investigation Team.
4. Regarding Complaint of Violation involving unscrupulous Employees, the Investigation Team will be further determined in Decree of the Board of Directors.
5. Regarding complaint of violation involving individual members of the Board of Directors, Board of Commissioners and Supporting Organs of the Board of Commissioners, the Investigation Team will be further determined in Decision of the Board of Commissioners.
6. The Investigation Team conduct an Investigation process on Complaint received within 30 (thirty) working days. If deemed necessary, this working period can be extended for a maximum of the next 30 (thirty) working days. Investigation result contained in the Minutes of Investigation Result and reported to the Board of Directors and the Board of Commissioners according to the path and level of the perpetrator of the Violation.
7. The Board of Directors and the Board of Commissioners study the report and conclusion of the Investigation Team in the related line, and then make decision to the Violation Complaint Management Team in the related line, whether the Complaint needs to be followed up or not (closed).
8. If the Whistleblowing Management Team for Complaint of Violation related channels after obtaining decision from the Board of Directors and/or Board of Commissioners state that there has been evidence of a violation by the Reported Party, the Board of Directors and/or Board of Commissioners must follow up in accordance with applicable laws and regulations.
9. Investigation result proved that there was a disciplinary violation by the employee, so it was followed up through a disciplinary hearing by the Committee to Examine Employee Discipline Violations (KP2DP) according to the provisions in force in the Company.
10. Investigation result shows that there have been violation by employees, members of the Board of Directors, Board of Commissioners and Supporting Organs of the Board of Commissioners that lead to criminal acts, then this will be followed up with legal process that apply to law enforcement agencies with the Board of Directors as the official who submit the case.

11. Hasil Investigasi menunjukkan tidak terbukti adanya Pelanggaran oleh Terlapor, maka Terlapor dinyatakan tidak bersalah.

11. Investigation result shows that there is no evidence of any violation by the Reported Party, so the Reported Party was declared innocent.

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR DAN TERLAPOR

1. Perusahaan berkewajiban untuk melindungi Pelapor.
2. Perlindungan Pelapor memiliki manfaat atas kepastian perlakuan terhadap pelapor serta jaminan atas kerahasiaan Pelapor sehingga mendorong keberanian melaporkan Pelanggaran.
3. Pelapor dapat mengadukan apabila mendapatkan balasan berupa tekanan atau ancaman atau tindakan balasan lain yang dialaminya. Pengaduan harus disampaikan kepada Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Dalam hal masalah ini tidak dapat dipecahkan secara internal, Pelapor dijamin haknya untuk membawa ke lembaga independen di luar Perusahaan seperti misalnya mediator, lembaga perlindungan saksi dan korban atas biaya Perusahaan.
4. Perusahaan memberikan perlindungan kepada Pelapor meliputi: pemecatan yang tidak adil, penurunan jabatan atau pangkat, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya serta catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (*personal file record*).
5. Perusahaan memberikan jaminan kerahasiaan identitas Terlapor sampai berubah pada status diperiksa.

PROTECTION FOR WHISTLEBLOWER AND REPORTED PARTY

1. The Company is obliged to protect the Whistleblower
2. Whistleblower Protection has the benefit of ensuring the treatment of the complainant and guaranteeing the confidentiality of the whistleblower so that it encourages the courage to report violation.
3. Whistleblower can complain if they receive a response in the form of pressure or threat or other retaliatory action they experience. Complaint must be submitted to the Whistleblowing Management Team through a predetermined mechanism. In the event that this problem cannot be resolved internally, the Whistleblower is guaranteed the right to bring it to independent institution outside the Company such as mediator, witness and victim protection agencies at the expense of the Company.
4. The Company provides protection to the Whistleblower including: unfair dismissal, demotion or promotion, harassment or discrimination in all its forms and detrimental records in the personal data file (personal file record).
5. The Company guarantees the confidentiality of the Reported Party's identity until it changes to examiner status.

PUBLIKASI DAN SOSIALISASI WBS

Perusahaan mempublikasikan pedoman kebijakan Pengaduan Pelanggaran serta mensosialisasikannya dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris kepada seluruh Pegawai PT PLN Indonesia Power Services maupun Stakeholders melalui berbagai media Perusahaan, antara lain:

1. Mendistribusikan dokumen kebijakan/pedoman kepada masing-masing pegawai
2. *Website* Perusahaan sehingga mudah diakses siapa saja, dimana saja dan kapan saja
3. Forum internal Pegawai, *workshop*, intranet, brosur, *banner*, maupun Laporan Tahunan

PUBLICATION AND SOCIALIZATION OF THE WBS

The Company publish the Violation Complaint policy guideline and socialize them in Indonesian and English to all PT PLN Indonesia Power Services employees and stakeholders through various company media, including:

1. Distribute policy/guideline document to each employee
2. Company website so that it can be easily accessed by anyone, anywhere and anytime
3. Internal employee forum, workshop, intranet, brochure, banner, and annual report.

Selain itu sosialisasi WBS di lingkungan PLN IP Services dilakukan secara berkesinambungan antara lain melalui media sosial yang dimiliki oleh Perusahaan dan pelaksanaan *Quiz* sebagai bentuk internalisasi kepada pegawai Perusahaan setiap bulan, untuk memberi pemahaman atas kebijakan WBS kepada seluruh Insan PLN IP Services sehingga diharapkan penerapannya akan lebih efektif di kemudian hari.

JUMLAH PELAPORAN PELANGGARAN DAN SANKSI

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan menerima 2 (dua) pelaporan pelanggaran yang masuk melalui sistem WBS. Status laporan telah ditindaklanjuti dan terselesaikan 100% pada tahun yang sama dengan hasil tidak ditemukannya jenis pelanggaran apapun.

In addition, WBS socialization within PLN IP Services is carried out continuously, including through social media owned by the Company and the implementation of Quiz as a form of internalization for Company employees every month, to provide an understanding of WBS policies to all PLN IP Services employees so that it is hoped that their implementation will be more effective in the future.

NUMBER OF VIOLATION REPORT AND SANCTION

Throughout 2023, the Company received 2 (two) violation reports submitted through the WBS system. The status of the report was followed up and completed 100% in the same year with the result that no types of violations were found.

Transparansi Praktik Bad Corporate Governance Transparency of Bad Corporate Governance Practice

LAPORAN ATAS AKTIVITAS PERUSAHAAN YANG MENCEMARI LINGKUNGAN

Hingga akhir tahun 2023, Perusahaan tidak pernah mendapatkan adanya laporan atas aktivitas Perusahaan yang mencemari lingkungan. Perusahaan memberikan perhatian terhadap lingkungan dan telah menerapkan ISO 14001:2015 terkait Sistem Manajemen Lingkungan dan Direksi senantiasa memastikan pelaksanaan protokol peningkatan budaya dan lingkungan (K3L) pada seluruh kegiatan di lingkungan Perusahaan.

REPORT ON COMPANY ACTIVITY THAT POLLUTE THE ENVIRONMENT

Until the end of 2023, the Company has never received any report on the Company's activities that pollute the environment. The Company pays attention to the environment and has implemented ISO 14001:2015 related to the Environmental Management System and the Board of Directors always ensure the implementation of culture and environment improvement (K3L) protocol in all activities within the Company.

PENGUNGKAPAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

PLN IP Services merupakan perusahaan yang taat terhadap peraturan penundang-undangan dan senantiasa memenuhi kewajiban pembayaran dan juga pelaporan pajak, baik pajak penghasilan, pajak badan maupun pajak-pajak lainnya. Pada tahun 2023, Perusahaan telah membayar pajak sebesar Rp24,140 miliar sebagai wujud kontribusi kepada negara.

DISCLOSURE OF FULFILLMENT OF TAX OBLIGATION

PLN IP Services is a company that complies with laws and regulations and always fulfills tax payment and reporting obligations, both income tax, corporate tax and other taxes. In 2023, the Company paid Rp24,140 billion in taxes as a form of contribution to the state.

Kesesuaian Penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan Peraturan yang Berlaku dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Dalam penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan, informasi, analisa dan pembahasan kinerja telah mengacu pada Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PwC Indonesia).

Laporan keuangan Perusahaan disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (“DSAK”) Ikatan Akuntan Indonesia.

KASUS TERKAIT DENGAN BURUH DAN KARYAWAN

PLN IP Services tidak memiliki permasalahan baik pidana maupun perdata terkait buruh dan karyawan di sepanjang tahun 2023

KESESUAIAN BUKU LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN TAHUNAN DIGITAL

Perusahaan senantiasa melakukan pengecekan sebelum mengunggah Laporan Tahunan untuk memastikan kesesuaian data antara Laporan Tahunan hardcopy dengan softcopy. Laporan Tahunan PLN IP Services Tahun 2023 baik yang disampaikan kepada pemegang saham, pemangku kepentingan, maupun yang telah diunggah pada situs web resmi Perusahaan telah sesuai dengan buku Laporan Tahunan yang dicetak dan diterbitkan oleh Perusahaan.

Conformity of Presentation of Annual Report and Financial Statements with Applicable Regulations and Financial Accounting Standards (SAK)

In preparing the Company’s Annual Report and Financial Statements, information, analysis and discussion of performance have referred to the Company’s Financial Statements for the year ended December 31, 2022 and December 31, 2023 which have been audited by Rintis, Jumadi, Rianto & Partners (PwC Indonesia).

The Company’s financial statements are prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK), namely Statements of Financial Accounting Standards (PSAK), which include Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board (“DSAK”) of the Indonesian Chartered Accountants.

CASE RELATED TO LABOR AND EMPLOYEES

PLN IP Services has no criminal or civil problems related to employees throughout 2023.

COMPATIBILITY OF ANNUAL REPORT BOOK AND DIGITAL ANNUAL REPORT

The Company always checks before uploading the Annual Report to ensure data conformity between the hardcopy and softcopy Annual Report. PLN IP Services’s 2023 Annual Report, whether submitted to shareholders, stakeholders, or uploaded to the Company’s official website, is in accordance with the Annual Report book printed and published by the Company.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Lainnya Implementation of Other Corporate Governance

Untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan, Perusahaan telah menyusun pedoman dan acuan penerapan Tata Kelola, Risiko dan Kepatuhan (*Governance, Risk and Compliance (GRC)*), beserta tim pengelolanya dalam SK No. Nomor : 011.K/CDB/III/2022 perihal Kebijakan Umum Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko Dan Kepatuhan/*Governance, Risk And Compliance (GRC)* Di Lingkungan PT PLN Indonesia Power Services.

To increase the effectiveness, efficiency, growth and sustainability of the company, the Company has developed guidelines and references for the implementation of Governance, Risk and Compliance (GRC), along with its management team in SK No. Number: 011.K/CDB/III /2022 regarding the General Policy for Implementation of Governance, Risk Management and Compliance / Governance, Risk and Compliance (GRC) within PT PLN Indonesia Power Services.

Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan/atau Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan

Management Stock Ownership Program (MSOP) and/or Employee Stock Ownership Program (ESOP)

PLN IP Services dimiliki oleh PT Indonesia Power (99,99%) dan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Pegawai PT Indonesia Power (0,01%). Hingga akhir tahun 2023, Perusahaan belum memiliki kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (*Management Stock Ownership Program/ MSOP*) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (*Employee Stock Ownership Program/ESOP*) sehingga tidak terdapat informasi terkait jumlah saham dan/atau opsi; jangka waktu pelaksanaan; persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak dan harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan.

PLN IP Services is owned by PT Indonesia Power (99.99%) and PT Indonesia Power Employee Education and Welfare Foundation (0.01%). Until the end of 2023, the Company does not yet have a policy of providing long-term performance-based compensation to management and/or employees, including in the form of management stock ownership program (MSOP) and/or employee stock ownership program (Employee Stock Ownership Program)/ESOP so that there is no information related to the number of shares and/or options; implementation period; requirements of employees and/or management who are entitled and the exercise price or determination of the exercise price.

Kebijakan Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi

Anti-Corruption Policy and Gratification Control

Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha perusahaan telah dilakukan secara legal, prudent, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Kebijakan tersebut antara lain dapat meliputi program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), *fraud*, suap dan/ atau gratifikasi dalam perusahaan terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut menggambarkan pencegahan perusahaan terbuka terhadap segala praktik korupsi, baik memberi maupun menerima dari pihak lain.

Perusahaan telah memiliki acuan dalam pengendalian gratifikasi, korupsi dan benturan kepentingan sebagai panduan dalam memitigasi timbulnya tindakan yang dapat merugikan Perusahaan. Beberapa acuan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. 028.1.1.K/CDB/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Tata Kelola Anti Penyuapan dan Surat Keputusan Direksi Nomor.059.K/CDB/IX/2019 tanggal 2 Oktober 2019 yang penyusunannya disesuaikan dengan Sistem Manajemen Anti Penyuapan SMAP SNI ISO 37001:2016. Selain itu, Perusahaan juga mengatur terkait benturan kepentingan tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No.003.K/DEKOM-CDB/2020 dan Nomor: 064.K/CDB/VI/2020 yang dijadikan sebagai langkah preventif adanya kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tidak sengaja) untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan objektif dan berpotensi menimbulkan kerugian kepada pihak tertentu.

Perusahaan melakukan sosialisasi terkait kebijakan anti korupsi dan gratifikasi secara berkala melalui media sosial dan whatsapp group.

The anti-corruption policy is useful for ensuring that the company's business activities are carried out legally, prudently, and in accordance with the principles of good governance. The policy can be part of the code of conduct, or in a separate form. These policies may include, among other things, program and procedure fulfilled in overcoming corrupt practice, kickback, fraud, bribery and/or gratuity in public company. The scope of this policy describes the prevention of public company from all corrupt practices, both giving and receiving from other parties.

The Company has a reference in controlling gratification, corruption and conflicts of interest as a guidance in mitigating the actions that could be detrimental to the Company. Some of these references are contained in Directors' Decree No. 028.1.1.K/CDB/VI/2021 dated June 14, 2021 concerning Anti-Bribery Governance and Directors' Decree No.059.K/CDB/IX/2019 dated October 2, 2019, which are adapted to SMAP SNI ISO Anti-Bribery Management System 37001:2016. Apart from that, the Company also regulates conflicts of interest as stated in the Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors No. 003.K/DEKOM-CDB/2020 and No.064.K/CDB/VI/2020 is used as a preventive measure for someone's interests taking advantage of his/her position and authority (whether intentionally or unintentionally) for personal, family or group interests so that the mandated tasks cannot be carried out objectively and has the potential to cause harm to certain parties.

The Company periodically socializes anti-corruption and gratification policies through social media and whatsapp groups.

PEDOMAN ANTI PENYUAPAN/SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)

Dalam upaya meningkatkan integritas dan penguatan terhadap sistem pengendalian internal dan mencegah terjadinya penyuapan di lingkungan Perusahaan, Direksi dan Dewan Komisaris telah mengesahkan pedoman anti korupsi dalam SK Direksi No. 028.1.1.K/CDB/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Tata Kelola Anti Penyuapan sesuai dengan SMAP – ISO 37001:2016.

Ruang lingkup Peraturan ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksana Tata Kelola Anti Penyuapan.
2. Jenis-jenis Praktik Penyuapan.
3. Hadiah, Jamuan, Donasi, dan Keuntungan Serupa.
4. Hubungan dengan Pihak Eksternal.
5. Penerapan Tata Kelola Anti Penyuapan.
6. Budaya Anti Penyuapan. .
7. Strategi Proaktif untuk Pencegahan Penyuapan.
8. Strategi Proaktif untuk Pendeteksian Penyuapan.
9. Strategi Reaktif.
10. Sanksi

Penerapan program anti penyuapan di lingkungan Perusahaan dimaksudkan untuk mencegah, mendeteksi, dan menindaklanjuti terjadinya Penyuapan, sehingga memberikan efek jera agar tidak terjadi praktik penyuapan dalam proses bisnis Perusahaan. Budaya anti Penyuapan dilakukan dengan menerapkan *zero tolerance* terhadap Penyuapan yang dilakukan oleh setiap Insan CDB dan penghargaan atas integritas dan perilaku etis.

Pedoman Anti Penyuapan berlaku bagi seluruh Insan CDB dan mencakup seluruh proses bisnis Perusahaan baik di tingkat Kantor Pusat, Unit Induk, Pusat-pusat Unit Pelaksana, Unit Layanan, Anak Perusahaan, Perusahaan Terafiliasi dan Mitra. Pegawai yang melakukan pelanggaran terkait Peraturan ini termasuk melakukan tindakan Penyuapan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Disiplin Pegawai dan perundang-undangan yang berlaku.

Pengendalian dan pemantauan atas keefektifan SMAP dilakukan secara proaktif oleh FKAP, fungsi Compliance, SPI, dengan dievaluasi dan ditinjau oleh Dewan Pengarah dan Manajemen Puncak. Pada tahun 2023, terdapat 7 (tujuh) sasaran pengendalian gratifikasi tertuang dalam sistem pengendalian gratifikasi Perusahaan yang terlaksana 100% dari sasaran yang ditetapkan.

GUIDELINES FOR ANTI-BRIBERY/ANTI- BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM (SMAP)

In an effort to improve integrity and strengthen the internal control system and prevent bribery within the Company, the Board of Directors and Board of Commissioners have ratified anti-corruption guidelines in the Decree of the Board of Directors No. 028.1.1.K/CDB/VI/2021 dated June 14, 2021 on Anti-Bribery Governance in accordance with SMAP – ISO 37001:2016.

The scope of this Regulation is as follows:

1. Implementing Anti-Bribery Governance
2. Types of Bribery Practice
3. Gift, Entertainment, Donation and Similar Benefits
4. Relation with External Parties
5. Implementation of Anti-Bribery Governance
6. Anti-Bribery Culture
7. Proactive Strategy for Bribery Prevention
8. Proactive Strategy for Bribery Detection
9. Reactive Strategy
10. Sanction

The implementation of an anti-bribery program within the Company is intended to prevent, detect and follow up on the occurrence of bribery, thus providing a deterrent effect so that bribery does not occur in the Company's business processes. An anti-bribery culture is carried out by implementing zero tolerance for bribery committed by all CDB people and respect for integrity and ethical behavior.

The Anti-Bribery Guidelines apply to all CDB people and cover all of the Company's business processes at the Head Office, Main Unit, Implementing Unit Center, Service Unit, Subsidiaries, Affiliated Companies and Partners. Employees who commit violation related to this Regulation, including committing act of Bribery, are subject to sanction in accordance with the Employee Discipline Regulation and applicable laws.

Control and monitoring of the effectiveness of SMAP is proactively conducted by FKAP, Compliance function, SPI, by being evaluated and reviewed by the Board of Commissioners and Top Management. In 2023, there have been 7 (seven) gratification control targets set out in the gratification control systems of the Company which have been implemented 100% of the targets set.

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Perusahaan juga memiliki kebijakan Direksi tentang Pedoman pengendalian gratifikasi yang disahkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 059.K/CDB/IX/2019 pada tanggal 2 Oktober 2019. Kebijakan ini dirancang untuk mencegah penerimaan, permintaan, penawaran, dan pemberian gratifikasi oleh seluruh Insan PT PLN Indonesia Power Services (dan Anak Perusahaan serta Perusahaan Terafiliasi) dimana tawaran, penyediaan, atau penerimaan tersebut adalah atau layak dapat dianggap sebagai penyuapan.

Kebijakan terkait dengan pengendalian gratifikasi telah dikomunikasikan kepada Dewan Komisaris, dan seluruh Pegawai Perusahaan. Disamping itu, disosialisasikan kepada para Pemangku Kepentingan melalui website Apabila ada penerimaan hadiah/bingkisan tidak terhindarkan maka pegawai yang bersangkutan dapat menyampaikan laporan beserta hadiah/bingkisan tersebut kepada Sekretaris Perusahaan dengan mengisi formulir yang disediakan selambat-lambatnya 30 hari setelah penerimaan. Sekretaris Perusahaan telah menerima laporan penerimaan Hadiah/bingkisan yang tidak terhindarkan dari mitra kerja.

Prinsip Dasar Pengendalian Gratifikasi

1. Semua Insan PLN IP Services dan/atau Keluarga dilarang untuk meminta, menerima, atau menawarkan gratifikasi secara langsung maupun tidak langsung, selain yang dilakukan berdasarkan persyaratan dan prosedur yang diatur dalam Kebijakan ini.
2. Semua Insan PLN IP Services dan/atau Keluarga dilarang meminta atau menerima secara langsung ataupun tidak langsung Gratifikasi dari Stakeholders, Mitra Kerja dan/atau Pihak Ketiga karena jabatan Insan PLN IP Services dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Insan PLN IP Services yang diterima di dalam negeri maupun luar negeri dan yang dilakukan dengan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
3. Semua Insan PLN IP Services dan/atau Keluarga bertanggung jawab mencegah dan mengupayakan sistem pencegahan korupsi di lingkungan Perusahaan.

GRATIFICATION CONTROL

The Company also has policy of the Board of Directors regarding Guidelines for controlling gratification which was ratified in the Decree of the Board of Directors Number: 059.K/CDB/IX/2019 on October 2, 2019. This policy is designed to prevent the receipt, request, offer and giving of gratuities by all PT PLN Indonesia Power Services People (and its Subsidiaries and Affiliated Companies) where the offer, provision or acceptance is or is appropriate can be considered as a bribe.

Policies related to gratification control have been communicated to the Board of Commissioners, and all Company Employees. In addition, it is socialized to Stakeholders through the website. If there is an unavoidable receipt of a gift/parcel, the employee concerned can submit a report along with the gift/parcel to the Corporate Secretary by filling out the form provided no later than 30 days after receipt. Corporate Secretary has received report on receipt of gifts that are unavoidable from work partner.

Basic Principles of Gratification Control

1. All PLN IP Services People and/or Family are prohibited from ask, receive, or offer gratification directly or indirectly, other than those carried out based on the requirements and procedures set out in this Policy.
2. All PLN IP Services People and/or Family are prohibited from ask or receive directly or indirectly Gratification from Stakeholders, Work Partners and/or Third Parties because of the position of PLN IP Services People and contrary to the obligations or duties of PLN IP Services People received domestically or abroad and carried out by electronic means or without electronic means.
3. All members of PLN IP Services and/or their family are responsible for prevent and pursue a corruption prevention system within the Company.

4. Terhadap pemberian gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman ini, Insan PLN IP Services dan/atau Keluarga wajib melakukan penolakan secara sopan dan santun atas pemberian Gratifikasi dengan memberikan penjelasan tentang Pedoman ini kepada pihak pemberi.
5. Atas penerimaan, pemberian dan penolakan gratifikasi yang telah dilakukan maka Insan PLN IP Services tersebut harus melaporkan kepada UPG.

Pengelolaan Gratifikasi

Pengelolaan gratifikasi dilakukan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dimana struktur keanggotaannya diatur dalam Surat Keputusan Direksi. UPG dibantu oleh Admin Unit yang ditunjuk atau melekat pada jabatannya.

Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Gratifikasi

Untuk memastikan bahwa Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini diketahui oleh seluruh Insan PLN IP Services dan *Stakeholders*, maka ditugaskan kepada seluruh Insan PLN IP Services untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mencantumkan ketentuan larangan penerimaan dan/atau pemberian Gratifikasi pada setiap dokumen dalam proses Pekerjaan yang terkait dengan *Stakeholders*.
2. Mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian Gratifikasi pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang dan jasa dan atau pada kontrak pengadaan barang dan jasa serta pada setiap dokumen yang disampaikan kepada Mitra Kerja.
3. Menugaskan kepada Unit di lingkungan Perusahaan yang memiliki hubungan kerja dengan Mitra Kerja untuk melakukan penyampaian Pedoman Gratifikasi kepada seluruh pihak terkait dalam mata rantai *supply chain management* (penyedia barang dan jasa, pabrik, agen, distributor, konsultan, auditor/asesor dan pelanggan serta *Stakeholders* lainnya) di lingkungannya melalui sosialisasi, internalisasi, diskusi, FGD, multi *stakeholders* forum, dan *collective action* tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi.

Pelaporan dan Sanksi

Apabila diketahui adanya Insan PLN IP Services menerima/memberi Gratifikasi yang tidak diperbolehkan atau berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang/

4. Regarding the giving of gratuities that are not in accordance with the provision stipulated in the guidelines, PLN IP Services people and/or the Family required to refuse the provision of Gratification by provide an explanation of the Guidelines to the giver.
5. For the acceptance, giving and refusal of gratuities that have been carried out, the PLN IP Services People must report to UPG.

Gratification Management

Gratification management is carried out by the Gratification Control Unit (UPG) where the membership structure is regulated in Decree of the Board of Directors. UPG is assisted by an Admin Unit appointed or attached to his/her position.

Socialization of Gratification Control Policy

To ensure that all PLN IP Services People and Stakeholders know this Gratification Control Guideline, all PLN IP Services People are assigned to do the following:

1. Include provisions prohibiting the acceptance and/or giving of Gratification in every document in the Work process related to Stakeholders.
2. Include provisions prohibiting acceptance, giving gratuities in every announcement in the process of procuring goods and services and or in contracts for the procurement of goods and services as well as in every document submitted to Work Partners.
3. Assign Units within the Company that have a working relationship with Work Partners to submit Gratification Guidelines to all parties involved in the supply chain management chain (goods and service providers, manufacturers, agents, distributors, consultants, auditors/assessors and customers as well as Other stakeholders) in their environment through outreach, internalization, discussion, FGDs, multi-stakeholder forum, and collective action on Gratification Control Guidelines.

Reporting and Sanction

If it is known that PLN IP Services People receive/give Gratification that is not permitted or has the potential for abuse of authority/position and the intended PLN

jabatan dan Insan PLN IP Services dimaksud tidak melaporkannya maka dapat dilaporkan melalui mekanisme *Whistleblowing System*.

Program *Whistleblowing* sebagai sarana pelaporan pelanggaran juga diharapkan dapat menekan pelaksanaan praktek gratifikasi dan menghimbau para karyawan, mitra kerja, nasabah serta *stakeholder* lainnya untuk melaporkan bila mencurigai adanya praktek tersebut.

Secara berkala setiap bulannya Perusahaan menyampaikan pelaporan terkait gratifikasi kepada Pemegang Saham. Hasil pemantauan laporan gratifikasi sepanjang tahun 2023 terdapat 21 penerimaan gratifikasi yang masuk dalam kategori boleh diterima dan wajib dilaporkan.

IP Services People do not report it, it can be reported through the Whistleblowing System mechanism.

It is also hoped that the whistleblowing program as a means of reporting violation can suppress the implementation of gratuity practice and encourage employees, work partners, customers and other stakeholders to report if they suspect this practice.

In every month, the Company submits its related gratification report to shareholders. Monitoring gratuity reports through 2023 resulted 21 gratification reports which were categorized as acceptable and mandatory reporting.

Pemberian Dana untuk Kegiatan Politik dan Sosial

Provision of Funding for Political and Social Activities

Pedoman kode etik Perusahaan menyebutkan adanya larangan dalam mengeluarkan dana untuk menyumbang aktivitas politik meskipun Perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik yang sah di Indonesia, akan tetapi tidak diperkenankan meninggalkan tugas dan kewajibannya sebagai karyawan perusahaan serta tidak diperkenankan untuk menggunakan fasilitas Perusahaan atau hal-hal lain yang terkait dengan atribut Perusahaan untuk aktivitas politik.

Dalam Pedoman Anti Penyuapan telah disebutkan pasal terkait pemberian donasi bahwa:

1. Donasi kepada pihak eksternal dapat diberikan dengan memenuhi kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan antara lain, namun tidak terbatas pada dokumen pengajuan, tanda terima penyerahan donasi, dan laporan pertanggungjawaban donasi dari Perusahaan.
2. Dukungan lain (*sponsorship*) kepada pihak eksternal dapat diberikan dengan memenuhi kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan antara lain, namun tidak terbatas pada proposal pengajuan, komitmen pertanggungjawaban penggunaan dukungan lain, dan tanda terima penyerahan dukungan lain.
3. Donasi dan/atau dukungan lain yang diberikan wajib dilaporkan kepada UPG kecuali terhadap:

The Company's code of conduct guidelines state that there is a prohibition on spending funds to contribute to political activities, even though the Company gives freedom to employees to participate in legal political activities in Indonesia, but is not allowed to leave their duties and obligations as company employees and is not allowed to use Company facilities or other things. -Other matters related to the Company's attributes for political activity.

The Anti-Bribery Guidelines have stated an article related to donations that:

1. Donation to external parties can be made by fulfilling the completeness of the required documents, including, but not limited to application document, donation receipt, and donation accountability report from the Company.
2. Other support (*sponsorship*) to external parties can be provided by fulfilling the completeness of the required documents, including, but not limited to submission of proposal, commitment to accountability for the use of other support, and receipt of delivery of other support.
3. Donation and/or other support provided must be reported to UPG except for:

- Pemberian donasi dan dukungan lain kepada individu/korporasi/perusahaan dalam rangka kegiatan resmi Perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e di atas;
 - Pemberian donasi dicatat secara akurat dan sebenarnya di dalam pembukuan Perusahaan; dan/atau
 - Pemberian donasi dengan tujuan penggunaan donasi yang jelas dan/atau memiliki dokumen pendukung yang memadai.
- Provision of donation and other support to individual/corporation/company in the context of official Company activities that meet the requirements referred to in letter d and letter e above;
 - Donation recorded accurately and truthfully in the Company's books; and/or
 - Giving donation with a clear purpose of using donation and/or having adequate supporting documents.

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Management of State Official Wealth Report (LHKPN)

Sebagai Perusahaan yang dimiliki oleh Pemerintah, PLN IP Services wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang mengikat. Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dilandasi oleh semangat pemberantasan korupsi dan tindakan penyimpangan internal adalah kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Perusahaan senantiasa menghimbau pejabat dalam jenjang tertentu untuk melapor dan mematuhi peraturan pemerintah dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Perusahaan juga berkomitmen akan memberikan sanksi kepada pejabat wajib lapor yang belum menyampaikan LHKPN. Sebagai bentuk komitmen, PLN IP Services melakukan review dan penyesuaian kembali atas aturan LHKPN di lingkungan Perusahaan. Pada tanggal 2 Juli 2022, Direksi Perusahaan telah menandatangani Surat Keputusan Direksi PT Cogindo DayaBersama Nomor: 047.1.K/CDB/VII/2022 tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Pejabat di Lingkungan PT Cogindo DayaBersama.

As a company owned by the Government, PLN IP Services is required to comply with binding laws and regulations. One form of legislation that is based on the spirit of eradicating corruption and acts of internal deviation is the obligation to the state official wealth report (LHKPN).

The Company always encourages officials at certain levels to report and comply with government regulations by register and examine the State Official Wealth Report (LHKPN) to the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia. The Company is also committed to imposing sanction on mandatory reporting officials who have not submitted their LHKPN. As a form of commitment, PLN IP Services has reviewed and readjusted the LHKPN regulation within the Company. On July 2, 2022, the Company's Board of Directors signed the Decree of the Board of Directors of PT Cogindo DayaBersama Number: 047.1.K/CDB/VII/2022 on Guidelines for Reporting the Wealth of Officials in the Environment of PT Cogindo DayaBersama.

Perusahaan selalu menghendaki agar para insan PLN IP Services bekerja dengan rasa integritas yang kuat dan selalu berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan untuk mendukung implementasi “Cogindo Bersih” sebagai wujud penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan. Hal tersebut dapat memperkuat posisi Perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha dan menjaga kepercayaan serta kredibilitas Perusahaan dengan pemerintah, pemegang saham, pelanggan, mitra kerja dan pemangku kepentingan lainnya.

DASAR HUKUM

Dasar hukum penyampaian LHK terdiri dari:

1. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN
2. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
4. Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)
5. Peraturan Direksi PT PLN Nomor 0074.P/DIR/2017 tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan PT PLN (Persero)
6. Surat Keputusan Direksi PT Cogindo DayaBersama Nomor: No 047.1.K/CDB/VII/2022 tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Pejabat di Lingkungan PT Cogindo DayaBersama
7. Anggaran Dasar PT PLN Indonesia Power Services

PEJABAT WAJIB LAPOR LHK

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Cogindo DayaBersama Nomor: No 047.1.K/CDB/VII/2022, pejabat yang berkewajiban untuk melapor LHKPN di Perusahaan terdiri:

1. Dewan Komisaris PT PLN Indonesia Power Services dimana dalam pengelolaannya mengikuti pengelolaan pada instansi asal;
2. Direksi PT PLN Indonesia Power Services;
3. Pegawai PT PLN Indonesia Power Services pada Jenjang Eksekutif;
4. Pegawai PT PLN Indonesia Power Services yang memangku jabatan penyelia atas yang pendaftaran Wajib Laporan LHKPNnya dilakukan secara bertahap berdasarkan arahan dari PT Indonesia Power.

The Company always encourages PLN IP Services people to work with a strong sense of integrity and is always guided by various laws and regulations to support the implementation of “Cogindo Bersih” as a form of consistent and sustainable implementation of the principles of good corporate governance (GCG). This can strengthen the Company’s position in facing business competition and maintain the trust and credibility of the Company with the government, shareholders, customers, work partners and other stakeholders.

LEGAL BASIS

Legal basis for submitting LHK consists of:

1. Law no. 28 of 1999 on State Officials who are Clean and Free from KKN
2. Law no. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission
3. Law no. 40 of 2007 on Limited Liability Companies
4. KPK Regulation Number 7 of 2016 on Procedures for Registration of Announcement and Examination of the State Officials Wealth (LHKPN)
5. Regulation of the Board of Directors of PT PLN Number 0074.P/DIR/2017 on Guidelines for State Officials Wealth Report (LHKPN) within PT PLN (Persero)
6. Decree of the Board of Directors of PT Cogindo DayaBersama Number: No 047.1.K/CDB/VII/2022 on Guidelines for State Officials Wealth Report in the Environment of PT Cogindo DayaBersama
7. Articles of Association of PT Cogindo DayaBersama

MANDATORY REPORTING OFFICIALS OF LHK

Based on the Decree of the Board of Directors of PT Cogindo DayaBersama Number: 061.K/CDB/X/2019, officials who are obliged to report LHKPN at the Company consist of:

1. The Board of Commissioners of PT PLN Indonesia Power Services, whose management follows the management of the original institution;
2. Board of Directors of PT PLN Indonesia Power Services;
3. Employees of PT PLN Indonesia Power Services at the Executive Level;
4. PT PLN Indonesia Power Services employees who hold upper supervisory positions whose mandatory LHKPN Report registration is carried out in stages based on direction from PT Indonesia Power.

MEKANISME PELAPORAN LHK

Mekanisme pelaporan harta kekayaan pejabat Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Menyampaikan LHK kepada KPK pada saat:
 - a. Wajib LHK yang pertama kali menjabat, wajib melaporkan LHK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak secara resmi menduduki jabatan
 - b. Wajib LHK yang diangkat kembali setelah berakhirnya masa jabatan wajib melaporkan LHK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak secara resmi menduduki jabatan
 - c. Wajib LHK yang berhenti atau pensiun dari jabatannya wajib melaporkan LHK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat berakhirnya jabatan
 - d. Sewaktu-waktu atas permintaan KPK
2. Wajib LHK melaporkan LHK secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya kepada KPK
3. Penyampaian LHK kepada KPK dilakukan dengan menggunakan formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang ditetapkan oleh KPK melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat <https://elhkpn.kpk.go.id>
4. Dokumen pendukung yang harus dilampirkan oleh Direksi dan Pegawai Perusahaan antara lain:
 - a. Salinan dokumen yang menerangkan kepemilikan harta kekayaan pada lembaga keuangan yang kemudian di unggah ke dalam aplikasi e-LHKPN
 - b. Lembar Surat Kuasa bermeterai Rp6.000,00 wajib diisi sesuai nama dalam KTP dan ditandatangani masing-masing oleh Wajib Lapor, pasangan (istri/suami), dan seluruh anak yang ditanggung yang kemudian dicetak, ditandatangani dan dikirimkan kepada KPK dengan alamat:

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Gedung Merah Putih KPKJI. Kuningan Persada Kav. 4 Setiabudi - Jakarta 12950

REPORTING MECHANISM OF LHK

The mechanism for reporting the wealth of Company officials is as follows:

1. Submit LHK to KPK when:
 - b. LHK obligatory who first takes office, must report LHK no later than 3 (three) months after officially taking office
 - c. Mandatory LHK reappointed after the end of the term of office must report LHK no later than 3 (three) months after officially occupying the position
 - d. LHK obligatory who stops or retires from his position must report LHK no later than 3 (three) months from the end of his position
 - e. From time to time at the request of the KPK
2. It is mandatory for LHK to report LHK periodically every 1 (one) year for the assets acquired from January 1 to December 31, no later than March 31 of the following year to the KPK
3. Submission of LHK to the KPK is carried out using the State Officials Wealth Report (LHKPN) form determined by the KPK through the e-LHKPN application at the address <https://elhkpn.kpk.go.id>
4. Supporting documents that must be attached by the Board of Directors and Employees of the Company include:
 - a. Copy of documents explaining ownership of assets in financial institutions which are then uploaded into the e-LHKPN application
 - b. Power of Attorney with a stamp duty of Rp6000.00 must be filled in according to the name on the KTP and signed by the Compulsory Reporter, spouse (wife/husband), and all dependent children which are then printed, signed and sent to the KPK with address:

Directorate of LHKPN Registration and Inspection KPK Red and White BuildingJI. Kuningan Persada Kav. 4 Setiabudi - Jakarta 12950

5. Dalam hal Wajib LHK tidak melaporkan LHK atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, maka Wajib LHK dikenakan sanksi disiplin pegawai berdasarkan Peraturan yang berlaku di lingkungan PLN IP Services.

PENGELOLA LHK

Direksi telah menunjuk Lead Analyst Tata Kelola Informasi Korporat sebagai Admin Pengelola LHK PT PLN Indonesia Power Services.

Tugas dan tanggung jawab dari Admin Pengelola LHK PT PLN Indonesia Power Services adalah :

1. Memfasilitasi PPT PLN Indonesia Power Services dalam sosialisasi pemahaman serta teknik pelaporannya sesuai pedoman LHKPN kepada wajib LHKPN, di lingkungan PT PLN Indonesia Power Services;
2. Monitoring dan evaluasi kepatuhan wajib LHKPN di PT PLN Indonesia Power Services dalam pelaporan LHKPN.

LAPORAN LHKPN TAHUN 2023

Kegiatan pengiriman pelaporan LHKPN dilaksanakan pada tanggal 2 Januari hingga 28 Februari 2023. Seluruh pejabat wajib lapor sebanyak 112 orang telah menyusun dan menyampaikan LHKPN secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. In the event that the LHK Compulsory does not report LHK or does not fulfill his/her obligation as referred to in this Regulation, then the LHK Compulsory is subject to employee disciplinary sanction based on the regulation in force within PLN IP Services.

LHK MANAGER

The Board of Directors has appointed a Corporate Information Governance Lead Analyst as PT PLN Indonesia Power Services LHK Management Admin.

Duties and responsibilities of PT PLN Indonesia Power Services LHK Management Admin are:

1. Facilitating PT PLN Indonesia Power Services in socializing its understanding and reporting techniques according to LHKPN guidelines to LHKPN obligatory, within PT PLN Indonesia Power Services;
2. Monitoring and evaluation of mandatory LHKPN compliance at PT PLN Indonesia Power Services in LHKPN reporting.

LHKPN REPORT IN 2023

LHKPN reporting submission activity was carried out from January 2 to February 28, 2023. All 112 officials who are required to report have compiled and submitted the LHKPN in a timely manner in accordance with the applicable laws and regulations.



06 ◀

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Kinerja Ekonomi

Economic Performance



“

PLN IP Services berkomitmen untuk membentuk sistem rantai pasokan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab

PLN IP Services is committed to establishing a sustainable and responsible supply chain system

Perusahaan terus berupaya mengoptimalkan kinerja ekonomi sampai dengan akhir tahun 2023 melalui pembangkit listrik yang dimiliki yaitu PLTD Nusa Penida dan PLTD Tenau dengan total capaian produksi listrik sebesar 201,52 GWh dan berhasil melakukan penjualan energi listrik sebesar 265,10 GWh. Selain itu, PLN IP Services juga memiliki beberapa pembangkit energi baru terbarukan (EBT) diantaranya PLTU Sanggau, PLTU Sintang, PLTU Holtekamp, dan PLTP Ulumbu yang memproduksi listrik menggunakan energi panas bumi dan uap sebagai sumber tenaga penggerak turbin untuk menghasilkan listrik sebagai langkah untuk meningkatkan pembangkit EBT demi ketersediaan energi bersih dan berkelanjutan.

Dalam menjalankan usahanya, PLN IP Services menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap kegiatan usahanya untuk menghasilkan produk dan layanan berkualitas terbaik dan memberikan nilai tambah dalam melayani kebutuhan pelanggan dengan kualitas terbaik, produktivitas tinggi, efisiensi biaya, serta diikuti dengan reputasi yang baik. Sejalan dengan Kebijakan Keberlanjutan Perusahaan, PLN IP Services berkomitmen untuk membentuk sistem rantai pasokan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. PLN IP Services menerapkan skema kemitraan dengan pihak ketiga mandiri. Pendekatan ini tidak hanya memastikan

The Company strives to optimize economic performance until the end of 2023 through its power plants, namely Nusa Penida PLTD and Tenau PLTD with a total electricity production achievement of 201.52 GWh and successfully sold 265.10 GWh of electrical energy. In addition, PLN IP Services also has several new renewable energy (“EBT”) plants including Sanggau PLTU, Sintang PLTU, Holtekamp PLTU, and Ulumbu PLTP which produce electricity using geothermal energy and steam as a source of turbine propulsion to produce electricity as a step to increase EBT plants for the availability of clean and sustainable energy.

In running its business, PLN IP Services implements sustainability principles in each of its business activities to produce the best quality products and services and provide added value in serving customer needs with the best quality, high productivity, cost efficiency, and followed by a good reputation. In line with the Sustainability Policy of the Company, PLN IP Services is committed to establishing a sustainable and responsible supply chain system. PLN IP Services implements a partnership scheme with independent third parties. This approach not only ensures the sustainability of the production supply of labor and tools but also contributes to improving the

keberlanjutan suplai produksi tenaga kerja dan alat-alat yang dibutuhkan, namun juga turut berkontribusi dalam meningkatkan standar hidup masyarakat dengan meningkatkan kualitas bahan baku yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas masyarakat.

KINERJA PRODUKSI DAN KEUANGAN

PLN IP Services berhasil mencatatkan realisasi produksi energi listrik yaitu sebesar 201,52 GWh dengan pencapaian 76,02% dari target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yaitu sebesar 265,10 GWh. Meskipun masih belum mencapai target namun dalam penjualan energi listrik berhasil memperoleh capaian yang melebihi target rencana yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 265,10 GWh dengan pencapaian 103,52% dari target RKAP yaitu sebesar 256,08 GWh.

Perusahaan mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp1,61 triliun dengan pencapaian 72,53% dari target RKAP yaitu sebesar Rp2,22 triliun. Selain itu, Perusahaan mencatatkan laba tahun berjalan pada tahun 2023 sebesar Rp91,10 miliar dengan pencapaian 36,71% dari target RKAP yaitu sebesar Rp248,15 miliar.

KONTRIBUSI EKONOMI TIDAK LANGSUNG

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PLN IP Services selalu memperhatikan kepedulian terhadap lingkungan hidup, hak pekerja, dan hak asasi manusia (HAM). Demi kelancaran usaha, Perusahaan bekerja sama dengan produsen bahan industrial dan berbagai pemasok untuk memenuhi kebutuhan aktivitas operasional Perusahaan. Dalam menjalin kerja sama dengan pemasok, PLN IP Services berupaya untuk menggandeng pemasok nasional, yakni pemasok yang secara geografis tinggal dan beroperasi di Indonesia. Kebijakan tersebut diambil sejalan dengan komitmen Perusahaan untuk memberdayakan segenap potensi yang ada di Tanah Air. Pelibatan penyedia lokal dan penggunaan tenaga kerja lokal merupakan dampak ekonomi tidak langsung yang terus dikelola dan dihadirkan PLN IP Services bagi pemangku kepentingan. Hal ini bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berpengaruh pada peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya akibat dari berlangsungnya operasi Perusahaan.

community's standard of living by improving the quality of raw materials, which in turn impacts the community's productivity.

PRODUCTION AND FINANCIAL PERFORMANCE

PLN IP Services managed to record the realization of electrical energy production of 201.52 GWh with an achievement of 76.02% of the target of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) of 265.10 GWh. Although it still has not reached the target, but in the sale of electrical energy managed to obtain achievements that exceed the target plan set, which amounted to 265.10 GWh with an achievement of 103.52% of the RKAP target of 256.08 GWh.

The Company recorded an operating income of Rp1.61 trillion with an achievement of 72.53% of the RKAP target of Rp2.22 trillion. In addition, the Company recorded a profit for the year of Rp91.10 billion with an achievement of 36.71% of the RKAP target of Rp248.15 billion.

INDIRECT ECONOMIC CONTRIBUTION

In running its business activities, PLN IP Services always pays attention to environmental concerns, workers' rights, and human rights. For the smooth running of its business, the Company cooperates with industrial material producers and various suppliers to fulfill the needs of the operational activities of the Company. In establishing cooperation with suppliers, PLN IP Services strives to cooperate with national suppliers, namely suppliers who geographically live and operate in Indonesia. This policy is in line with the Company's commitment to empower all potentials in the country. The involvement of local suppliers and the use of local labor are indirect economic impacts that PLN IP Services continues to manage and present to stakeholders. This aims to encourage economic development that has an effect on increasing the independence and welfare of the community and other stakeholders as a result of the operation of the Company.

Kinerja Lingkungan Hidup

Environmental Performance

PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN

Untuk mengarahkan, mendorong, mengendalikan, dan mengatur pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, PLN IP Services telah menerapkan kebijakan dan sistem manajemen lingkungan yang komprehensif. Alat-alat ini dirancang untuk memastikan semua kegiatan yang dijalankan oleh PLN IP Services mematuhi dan memenuhi semua perundang-undangan serta peraturan terkait lingkungan yang berlaku, serta sebagai pedoman untuk mengukur dan mengelola program-program perusahaan terkait perbaikan lingkungan.

Kebijakan Pengelolaan Lingkungan PLN IP Services:

- Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan
- Pedoman Penerapan *Green Power Plant*
- Manajemen pembangkit terkait Manajemen Efisiensi
- Pedoman Manajemen Efisiensi Listrik Pembangkit Thermal
- Kebijakan *Integrated Management System (IMS)*
- Kebijakan Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3
- Komitmen Menjaga Ekosistem dan Pelestarian untuk Keberlanjutan Planet

PLN IP Services telah menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan yang mengacu pada ISO 14001:2015 yang terintegrasi dengan PLN IP Services *Integrated Management System*. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan merupakan bagian dari Sistem Manajemen Lingkungan yang mengacu pada Peta Jalan Transformasi Lingkungan PLN IP Services. Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pengelolaan lingkungan guna memitigasi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif terhadap lingkungan.

SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

To direct, encourage, control, and regulate sustainable environmental management, PLN IP Services has implemented comprehensive environmental policies and management systems. These tools are designed to ensure that all activities carried out by PLN IP Services comply with and meet all applicable environmental laws and regulations, serving as guidelines to measure and manage the company's environmental improvement programs.

Environmental Management Policies of PLN IP Services:

- Occupational Health and Safety and Environmental Policy
- Green Power Plant Implementation Guidelines
- Power Plant Management related to Efficiency Management
- Thermal Power Plant Efficiency Management Guidelines
- Integrated Management System (IMS) Policy
- B3 and Non B3 Waste Management Policy
- Commitment to Ecosystem Maintenance and Preservation for Planet Sustainability

PLN IP Services has implemented an Environmental Management System based on ISO 14001:2015, integrated with the PLN IP Services Integrated Management System. Environmental management and monitoring are part of the Environmental Management System, referencing the PLN IP Services Environmental Transformation Roadmap. These activities aim to measure the effectiveness of environmental management implementation to mitigate negative impacts and maximize positive impacts on the environment.

Dalam proses perencanaan lingkungan hidup, perusahaan mengedepankan AMDAL dan UKL-UPL, serta peraturan perundangan lain yang relevan. Pada proses pengelolaan lingkungan hidup, PLN IP Services menjaga baku mutu dan standar kualitas lingkungan yang ditetapkan pemerintah. Dalam proses pemantauan lingkungan, perusahaan mematuhi mekanisme pelaporan pemantauan lingkungan yang mencakup kualitas air, kualitas udara, dan tingkat kebisingan. Hasil pemantauan dilaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dinas Lingkungan Hidup, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) secara berkala.

Selama periode pelaporan, tidak pernah terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dalam bidang lingkungan hidup.

KEGIATAN TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN

PLN IP Services berkomitmen untuk memastikan kepatuhan terhadap pengelolaan lingkungan melalui kegiatan pendampingan dan pemantauan secara rutin. Komitmen ini diwujudkan dalam Program Pengembangan Pembangkit Ramah Lingkungan (*Green Power Plant*) yang bertujuan untuk memastikan PLN IP Services beroperasi secara andal, aman, dan ramah lingkungan. Program *Green Power Plant* merupakan salah satu program strategis yang dirancang untuk meningkatkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan, guna mendukung keberlanjutan usaha jangka panjang.

Selama tahun 2023, beberapa inisiatif telah dilaksanakan untuk mewujudkan visi *Green Power Plant*, antara lain:

1. **Pemantauan, Pemeriksaan, Evaluasi, dan Pembinaan:**
Kegiatan pengelolaan lingkungan dilakukan secara rutin di seluruh unit pembangkit untuk memastikan kepatuhan dan peningkatan berkelanjutan.
2. **Pendampingan, Pemeriksaan, dan Koordinasi:**
Dukungan diberikan dalam penyusunan Dokumen *Comply Regulation* dan *Beyond Compliance*, memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan dan berusaha mencapai standar yang lebih tinggi.

In the environmental planning process, the company prioritizes AMDAL (Environmental Impact Analysis) and UKL-UPL (Environmental Management and Monitoring Plans), as well as other relevant regulations. In the environmental management process, PLN IP Services maintains government-determined environmental quality standards. In the environmental monitoring process, the company adheres to environmental monitoring reporting mechanisms, which include water quality, air quality, and noise levels. The monitoring results are periodically reported to the Ministry of Environment and Forestry (KLHK), the Environmental Agency, and the Ministry of Energy and Mineral Resources (KESDM).

During the reporting period, there were no violations of environmental laws and regulations.

ENVIRONMENTAL CSR ACTIVITIES

PLN IP Services is committed to ensuring environmental compliance through regular guidance and monitoring activities. This commitment is embodied in the Green Power Plant Development Program, which aims to ensure PLN IP Services operates reliably, safely, and in an environmentally friendly manner. The Green Power Plant initiative is a strategic program designed to enhance economic, social, and environmental benefits, thereby supporting the long-term sustainability of the business.

Throughout 2023, several initiatives were undertaken to realize the Green Power Plant vision, including:

1. **Monitoring, Inspection, Evaluation, and Guidance:**
Regular environmental management activities were conducted across all power generation units to ensure compliance and continuous improvement.
2. **Assistance, Inspection, and Coordination:**
Support was provided in the preparation of *Comply Regulation* and *Beyond Compliance* documents, ensuring adherence to environmental regulations and striving for standards beyond compliance.

3. Peningkatan Kompetensi Personil:

Upaya dilakukan untuk meningkatkan kompetensi personil di bidang lingkungan melalui program pelatihan dan sertifikasi khusus.

4. Penghijauan:

Berbagai jenis pohon endemik ditanam di sekitar unit pembangkit untuk mereduksi emisi dan meningkatkan indeks keanekaragaman hayati.

5. Penghargaan Prestasi Pengelolaan Lingkungan:

Penghargaan diberikan kepada unit yang berhasil mencapai kinerja pengelolaan lingkungan yang baik, mendorong perbaikan berkelanjutan dan penerapan praktik terbaik.

6. Kunjungan dan Koordinasi Eksternal:

Kunjungan dan koordinasi dengan pihak eksternal terkait bidang lingkungan dilakukan untuk menyelaraskan dan meningkatkan praktik pengelolaan lingkungan.

3. Personnel Competency Enhancement:

Efforts were made to improve the environmental competencies of personnel through specialized training and certification programs.

4. Reforestation Efforts:

Various endemic tree species were planted in the vicinity of power generation units to reduce emissions and enhance biodiversity indices.

5. Environmental Management Achievement Awards:

Recognition was given to units that excelled in environmental management performance, encouraging continuous improvement and best practices.

6. External Coordination and Visits:

Engagements and coordination with external parties were conducted to align and enhance environmental practices.

Melalui inisiatif-inisiatif ini, PLN IP Services terus berupaya untuk memajukan pengelolaan lingkungan, mendukung keberlanjutan operasional, dan berkontribusi terhadap tujuan lingkungan nasional.

Through these initiatives, PLN IP Services continues to foster environmental stewardship, supporting operational sustainability and contributing to national environmental goals.

PENGELOLAAN DAN EFISIENSI ENERGI

PLN IP Services secara konsisten menghitung intensitas energi untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan energi di seluruh operasional Perusahaan. Rasio intensitas energi dihitung berdasarkan total produksi listrik, yang mencerminkan seberapa efisien energi digunakan dalam proses produksi.

ENERGY MANAGEMENT

PLN IP Services consistently measures energy intensity to evaluate the efficiency of energy usage across the Company's operations. The energy intensity ratio is calculated based on total electricity production, reflecting how efficiently energy is used in the production process.

“ Pada tahun 2023, rasio intensitas energi Perusahaan mencapai **9.376 GJ/GWh**, mengalami **peningkatan sebesar 0,29%** dibandingkan tahun 2022 yang mencatatkan rasio sebesar **9.349 GJ/GWh**.

In 2023, the Company's energy intensity ratio reached 9,376 GJ/GWh, representing an increase of 0.29% compared to 2022, which recorded a ratio of 9,349 GJ/GWh.



Selain itu, penggunaan energi fosil selama tahun 2023 mencapai 1.861.945,97 Gigajoule, yang menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 51,41% dibandingkan konsumsi energi fosil sebesar 1.247.852,56 Gigajoule pada tahun 2022. Kenaikan ini menegaskan pentingnya upaya berkelanjutan untuk mengoptimalkan efisiensi energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Melalui komitmen ini, PLN IP Services terus berupaya untuk meningkatkan praktik pengelolaan energi, mendukung keberlanjutan operasional, dan berkontribusi terhadap tujuan efisiensi energi nasional.

Pengembangan Pembangkit Energi Baru Terbarukan

Energi Baru Terbarukan (EBT) merupakan *green energy* yang bersumber dari air, panas bumi, tenaga surya, gelombang air laut, biomassa, biofuel, hingga yang berasal dari sampah, memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi energi listrik. Sampai dengan akhir tahun 2023, PLN IP Services memiliki 2 pembangkit yang menggunakan EBT sebagai sumber energi, yaitu PLTS Nusa Penida dan PLTP Ulumbu yang memproduksi listrik menggunakan tenaga surya dan energi panas bumi sebagai sumber energi untuk menghasilkan listrik dengan total kapasitas sebesar 14 MW.

Pengembangan pembangkit berbasis EBT merupakan bagian dari komitmen strategis PLN IP Services untuk mendukung transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan. Selain mengurangi ketergantungan penggunaan pada bahan bakar fosil, penggunaan EBT turut berkontribusi penurunan emisi karbon dan dampak lingkungan negatif lainnya.

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

PLN IP Services berkomitmen melakukan upaya untuk menggunakan air dengan bijak dan sesuai kebutuhan. Sampai dengan akhir 2023, PLN IP Services belum memiliki mekanisme daur ulang air. Namun demikian, PLN IP Services tetap memprioritaskan pelestarian sumber daya air dengan melakukan efisiensi penggunaan air dengan cara menggunakan teknologi ramah lingkungan seperti penggunaan keran air otomatis dan penggunaan kloset hemat air serta melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran karyawan agar memiliki perilaku efisien dalam menggunakan air.

Additionally, fossil energy consumption in 2023 amounted to 1,861,945.97 Gigajoules, showing a significant increase of 51.41% compared to fossil energy consumption of 1,247,852.56 Gigajoules in 2022. This increase underscores the importance of ongoing efforts to optimize energy efficiency and reduce dependence on fossil fuels.

Through this commitment, PLN IP Services continues to strive to enhance energy management practices, support operational sustainability, and contribute to national energy efficiency goals.

New & Renewable Energy Power Plant Development

New Renewable Energy (EBT) is green energy sourced from water, geothermal, solar power, seawater waves, biomass, biofuels, to those derived from waste, has the potential to be developed into electrical energy. Until the end of 2023, PLN IP Services has 2 power plants that use EBT as an energy source, namely PLTS Nusa Penida and PLTP Ulumbu which produce electricity using solar power and geothermal energy as a energy source to produce electricity with a total capacity of 14 MW.

The development of EBT-based power plants is part of PLN IP Services' strategic commitment to support the transition towards clean and sustainable energy. In addition to reducing dependence on fossil fuels, the use of EBT contributes to lowering carbon emissions and other negative environmental impacts.

WATER RESOURCES MANAGEMENT

PLN IP Services is committed to prudent and sustainable water usage practices. As of the end of 2023, PLN IP Services has not yet implemented a water recycling mechanism. Nevertheless, PLN IP Services prioritizes the conservation of water resources by enhancing water use efficiency through eco-friendly technologies such as automatic faucets and water-saving toilets. The company also conducts awareness campaigns among employees to promote efficient water usage behaviors.

Pada tahun 2023, jumlah air yang digunakan PLN IP Services untuk menunjang kegiatan operasional sebanyak 2.402 m³. Jumlah ini meningkat 108,32% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 1.153 m³. Ada beberapa faktor jumlah pegawai dan peralihan dari masa covid Peningkatan ini terjadi karena bertambahnya jumlah pegawai serta peralihan dari masa covid ke masa normal yang menyebabkan peralihan dari bekerja secara *hybrid* menjadi *full office work* sehingga jumlah penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga semakin bertambah.

PLN IP Services juga melakukan pengujian atas pengelolaan air limbah domestik dengan standar baku mutu yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.

PLN IP Services melakukan pengujian sesuai dengan ketentuan dan dianalisa melalui laboratorium yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN). Pada tahun 2023, hasil pengukuran kualitas air limbah PLN IP Services menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan kualitas air limbah telah memenuhi baku mutu dari seluruh parameter yang diukur.

Pengelolaan Limbah Cair

Kegiatan produksi yang dijalankan oleh PLN IP Services menghasilkan limbah cair yang harus dikelola dengan baik. Untuk memastikan pemenuhan ketaatan terhadap baku mutu pengelolaan limbah cair, limbah tersebut dianalisis secara periodik. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, kualitas air limbah yang dihasilkan tidak boleh melebihi standar yang telah ditetapkan.

PLN IP Services memahami pentingnya pemantauan dan pengelolaan limbah cair secara ketat. Jika terdapat poin-poin dalam hasil analisis yang tidak memenuhi kriteria baku mutu, maka langkah-langkah peningkatan pengelolaan limbah cair harus segera diambil. Hal ini mencakup evaluasi dan penerapan teknologi serta metode baru untuk memastikan bahwa limbah cair yang dihasilkan memenuhi semua standar lingkungan yang berlaku.

In 2023, PLN IP Services utilized a total of 2,402 m³ of water to support operational activities, marking a 108.32% increase compared to the previous year's usage of 1,153 m³. This increase occurred due to the increase in the number of employees and the transition from the covid period to the normal period which caused the transition from hybrid work to full office work so that the amount of water use for household needs increased.

PLN IP Services also conducts regular testing of domestic waste water management practices according to the standard quality regulations specified in the Ministry of Environment and Forestry Regulation of the Republic of Indonesia No. 68/2016 concerning Domestic Wastewater Quality Standards.

PLN IP Services conducts testing in accordance with regulations and analyzes them through laboratories accredited by the National Accreditation Committee (KAN). In 2023, the results of water quality testing for PLN IP Services showed compliance with the quality standards across all measured parameters.

Liquid Waste Management

Production activities conducted by PLN IP Services produce liquid waste that needs to be managed properly. To ensure compliance with the quality standards of liquid waste management, the waste is analyzed periodically. According to the Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number 68 of 2016 concerning Domestic Wastewater Quality Standards, the quality of wastewater produced must not exceed the predetermined standards.

PLN IP Services understands the importance of strict monitoring and management of liquid waste. If there are points in the analysis results that do not meet the quality standard criteria, then steps to improve the management of liquid waste must be taken immediately. This includes evaluating and implementing new technologies and methods to ensure that the effluent produced meets all applicable environmental standards.

PENGELOLAAN EMISI UDARA

PLN IP Services melakukan pemantauan dan pengukuran serta pengendalian proses agar seluruh emisi gas buang yang dikeluarkan oleh Unit Pembangkitan yang dikelola sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.15 Tahun 2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal. Pengelolaan emisi udara meliputi kegiatan inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), program verifikasi dan sertifikasi data *baseline* emisi GRK, inventarisasi emisi gas buang, program inisiatif penurunan emisi dan bahan perusak ozon, dan mekanisme pembangunan bersih.

Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Pada tahun 2023, hasil penghitungan inventarisasi emisi gas rumah kaca mencapai 9.412,49 ton CO²e, mengalami peningkatan sebesar 2,93% dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar 9,144.82 ton CO²e.

Program Inisiatif Penurunan Emisi dan Bahan Perusak Ozon

Lapisan ozon adalah lapisan gas yang melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet (UV). Namun, lapisan ini dapat mengalami penipisan akibat penggunaan Bahan Perusak Ozon (BPO) atau *Ozone-Depleting Substances* (ODS) seperti *klorofluorokarbon* (CFC), *hidrofluorokarbon* (HFC), dan *hidroklorofluorokarbon* (HCFC). Emisi BPO dapat berasal dari penggunaan peralatan seperti pendingin ruangan (*air conditioner*), lemari pendingin (*freezer*), dan alat pemadam api ringan (*fire extinguisher*).

Sebagai wujud komitmen PLN IP Services untuk menciptakan lingkungan yang lestari dan mencapai karbon netral, serta mendukung komitmen Pemerintah Indonesia dalam Protokol Montreal untuk melindungi lapisan ozon melalui penghapusan penggunaan BPO, selama tahun 2023, PLN IP Services tidak menggunakan BPO dalam kegiatan operasional maupun aktivitas kantor. Oleh karena itu, dalam laporan ini tidak terdapat perhitungan terkait volume produksi, impor, maupun ekspor BPO.

AIR EMISSION MANAGEMENT

PLN IP Services conducts monitoring and measurement and process control so that all exhaust emissions released by the managed Generating Unit are following the Minister of Environment and Forestry Regulation Number 15 of 2019 on Emission Quality Standards for Thermal Power Plants. The air emission management programs include inventory of greenhouse gas emissions (GGE), GGE base line data verification and certification program, inventory of exhaust gas emissions, emission and ozone-depleting substance (ODS) reduction initiative, and clean development Mechanism (CDM).

Inventory of Greenhouse Gas Emissions (GGE)

In 2023, the results of the greenhouse gas emission inventory calculation reached 9,412.49 tons CO²e, an increase of 2.93% compared to 2022 which was recorded at 9,144.82 tons CO²e.

Emission and Ozone-Depleting Substance (ODS) Reduction Initiative

The ozone layer is a layer of gas that protects the earth from ultraviolet (UV) radiation. However, this layer can deplete due to the use of Ozone Depleting Substances (ODS) such as chlorofluorocarbons (CFCs), hydrofluorocarbons (HFCs), and hydrochlorofluorocarbons (HCFCs). The ODS emissions can come from the use of equipment such as air conditioners, freezers, and fire extinguishers.

As a form of PLN IP Services' commitment to creating a sustainable environment and achieving carbon neutrality, and supporting the commitment of the Government of Indonesia in the Montreal Protocol to protect the ozone layer through the elimination of the use of ODSs, during 2023, PLN IP Services does not use ODSs in operational activities or office activities. Therefore, in this report there are no calculations related to the volume of ODS production, imports, or exports.

PENGELOLAAN LIMBAH

Dalam menjalankan operasional, PLN IP Services tidak terlepas dari timbulnya limbah yang berpotensi menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Untuk mengelola limbah dengan efektif, PLN IP Services mengkategorikan limbah yang dihasilkan dari kegiatan pembangkit menjadi tiga jenis utama: limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun), limbah non-B3 (non-bahan beracun dan berbahaya), dan limbah cair.

Untuk mengatasi tantangan pengelolaan limbah, PLN IP Services menerapkan pendekatan sistem 3R (*Reuse, Reduce, dan Recycle*) guna meminimalkan dampak lingkungan. Selain itu, pengelolaan limbah juga dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki kompetensi dan izin resmi dalam penanganan limbah.

Pengelolaan Limbah B3

PLN IP Services melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan dari kegiatan produksi listrik dan pemeliharaan pembangkit. Limbah B3 tersebut mencakup pelumas bekas, majun bekas, serta limbah B3 lainnya seperti *sludge oil*, kemasan bekas B3, filter oil bekas, bahan kimia kadaluwarsa, lampu TL bekas, limbah klinis, aki bekas, *sludge* IPAL, resin bekas, dan limbah terkontaminasi B3 lainnya. Proses penyimpanan limbah B3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan dan izin yang dimiliki oleh masing-masing unit pembangkit.

Selama tahun 2023, jumlah limbah B3 PLN IP Services yang diangkut dari tempat penyimpanan Perusahaan menuju lokasi pengelola (pihak ketiga) sebanyak 72.262 ton. Untuk limbah B3 yang tidak dapat dimanfaatkan sendiri, limbah B3 perusahaan diangkut oleh pihak ketiga yang memiliki izin dari Kementerian Perhubungan dan rekomendasi pengangkutan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Perusahaan tidak mengimpor maupun mengeksport limbah B3.

Jumlah limbah B3 yang dihasilkan pada tahun 2023 adalah 454,28 ton meningkat 175,98 % dari tahun 2022 yang tercatat 164,61 ton. Peningkatan ini mencerminkan beberapa faktor, termasuk peningkatan volume produksi, serta pengelolaan limbah yang lebih baik dan akurat.

WASTE MANAGEMENT

In running its operations, PLN IP Services is inseparable from the generation of waste that has the potential to negatively impact the environment. To manage waste effectively, PLN IP Services categorizes waste produced from power plant activities into three main types: hazardous and toxic waste (B3), non-B3 waste (non-toxic and hazardous), and liquid waste.

To overcome the challenges of waste management, PLN IP Services applies the 3R system approach (Reuse, Reduce, and Recycle) to minimize environmental impacts. In addition, waste management is also conducted in collaboration with third parties who have competence and official licenses in waste handling.

Hazardous and Toxic (B3) Waste Management

PLN IP Services manages Hazardous and Toxic Waste (B3) generated from its electricity production and power plant maintenance activities. This includes used lubricants, spent catalysts, as well as other B3 waste such as sludge oil, used B3 packaging, used filter oil, expired chemicals, used fluorescent lamps, clinical waste, used batteries, IPAL sludge, used resins, and other contaminated B3 waste. The storage of B3 waste complies with regulations and permits held by each power plant unit.

In 2023, PLN IP Services transported 72,262 tons of B3 waste from its storage facilities to disposal sites managed by third parties. For B3 waste that cannot be utilized internally, the company collaborates with third-party transporters authorized by the Ministry of Transportation and endorsed for transport by the Ministry of Environment. The company does not import or export B3 waste.

The amount of hazardous waste produced in 2023 was 454.28 tons, an increase of 175.98% from 2022's 164.61 tons. This increase reflects several factors, including increased production volume, as well as better and more accurate waste management.

Dengan komitmen terhadap pengelolaan limbah yang berkelanjutan, Perusahaan berusaha meminimalkan dampak lingkungan dari kegiatan operasionalnya dengan kerjasama antara Perusahaan dengan pengelola pihak ketiga berizin untuk memastikan limbah terkelola dengan baik dan sesuai dengan regulasi. Upaya ini selaras dengan komitmen Perusahaan untuk mencapai lingkungan berkelanjutan dan operasional yang bertanggung jawab.

Pengelolaan Limbah Non B3

PLN IP Services juga mengelola limbah non Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan dari berbagai kegiatan operasional. Limbah non B3 ini meliputi berbagai jenis material seperti limbah domestik, limbah kertas, limbah plastik, limbah kayu, dan limbah logam yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari di unit-unit pembangkit.

Proses pengelolaan limbah non B3 dilakukan dengan mematuhi standar prosedur operasional yang telah ditetapkan. Unit-unit pembangkit PLN IP Services menjalankan program pengelolaan limbah non B3 dengan memisahkan, mengurangi, dan mengelola limbah sesuai dengan karakteristiknya. Pendekatan ini tidak hanya mematuhi peraturan yang berlaku tetapi juga mendukung upaya perusahaan dalam meminimalkan dampak lingkungan dari kegiatan operasionalnya.

Selama tahun 2023, PLN IP Services berhasil mengelola limbah non B3 dengan efektif dan efisien. Proses ini mencakup pemantauan secara rutin terhadap kuantitas dan kualitas limbah, serta penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan limbah. Perusahaan terus meningkatkan praktik pengelolaan limbah non B3 untuk mendukung keberlanjutan operasional dan memastikan bahwa limbah yang dihasilkan dikelola secara bertanggung jawab sesuai dengan standar yang berlaku.

Limbah non B3 yang dihasilkan dan dikelola oleh pihak ketiga selama tahun 2023 sebanyak 5,62 ton. Perusahaan mengambil peran langsung dalam mengurangi timbunan limbah non-B3 untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan berbagai cara, diantaranya:

With a commitment to sustainable waste management, the Company strives to minimize the environmental impact of its operations by collaborating with licensed third-party managers to ensure that waste is managed properly and following regulations. This effort is in line with the commitment of the Company to achieve a sustainable environment and responsible operations.

Non-Hazardous and Non-Toxic (Non-B3) Waste Management

PLN IP Services also manages non-Hazardous and Toxic Waste (non-B3) generated from various operational activities. This non-B3 waste includes various materials such as domestic waste, paper waste, plastic waste, wood waste, and metal waste generated from daily activities at power plant units.

The management process of non-B3 waste follows established operational procedures. PLN IP Services power plant units implement a non-B3 waste management program by separating, reducing, and managing waste according to its characteristics. This approach not only complies with applicable regulations but also supports the company's efforts to minimize environmental impacts from its operational activities.

In 2023, PLN IP Services successfully managed non-B3 waste effectively and efficiently. This process includes regular monitoring of the quantity and quality of waste, as well as the use of environmentally friendly technologies in waste management. The company continues to improve its practices in non-B3 waste management to support operational sustainability and ensure that waste generated is responsibly managed according to applicable standards.

Non-B3 waste managed by third parties during 2023 amounted to 5.62 tons. The company plays a direct role in reducing the accumulation of non-B3 waste to preserve the environment through various methods, including:

1. Menerapkan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*).
2. Mengolah limbah organik.
3. Mendaur ulang sampah kertas dan sampah non organik lainnya serta menyalurkan sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali ke tempat pembuangan akhir (TPA).

PENANGANAN TUMPAHAN

PLN IP Services berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan dari dampak negatif yang dapat timbul dari kegiatan operasional perusahaan. Salah satu aspek penting yang dikelola secara ketat adalah penanganan limbah cair, yang memiliki potensi mencemari lingkungan jika tidak ditangani dengan baik. PLN IP Services telah menetapkan standar tindakan yang ketat dalam pengelolaan limbah cair untuk mencegah terjadinya tumpahan.

Selama tahun 2023, hasil dari upaya pengelolaan yang baik adalah tidak tercatatnya insiden tumpahan di seluruh pembangkit PLN IP Services. Hal ini menunjukkan efektivitas dari sistem pengelolaan risiko yang diterapkan oleh perusahaan dalam menghadapi potensi risiko lingkungan.

PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

PLN IP Services berkomitmen untuk memastikan operasinya tidak hanya andal dan aman, tetapi juga ramah lingkungan. Salah satu upaya nyata dalam mendukung komitmen ini adalah melalui Program Pengembangan Pembangkit Ramah Lingkungan, yang dikenal sebagai *Green Power Plant*. Program ini dirancang untuk memperkuat perlindungan lingkungan dengan cara yang berkelanjutan.

Salah satu inisiatif utama dalam *Green Power Plant* adalah kegiatan penghijauan di sekitar Unit Pembangkit. PLN IP Services aktif menanam pohon-pohon endemik yang tidak hanya memberikan manfaat estetika, tetapi juga memiliki dampak positif dalam mereduksi emisi dan meningkatkan indeks keanekaragaman hayati di area tersebut.

1. Implementing the 3R principle (*reduce, reuse, recycle*).
2. Processing organic waste.
3. Recycling paper waste and other non-organic waste and disposing of non-recyclable waste at final disposal sites (TPA).

HANDLING OF SPILLAGE

PLN IP Services is committed to preserving the environment from negative impacts that can arise from the operational activities of the Company. One important aspect that is strictly managed is the handling of liquid waste, which potentially pollutes the environment if not handled properly. PLN IP Services has set strict standards of action in liquid waste management to prevent spills.

During 2023, the result of good management efforts was no recorded spill incidents at all PLN IP Services plants. This shows the effectiveness of the risk management system implemented by the company in dealing with potential environmental risks.

PRESERVATION OF THE ENVIRONMENT AND BIODIVERSITY

PLN IP Services is committed to ensuring its operations are not only reliable and safe but also environmentally friendly. One of the concrete efforts in supporting this commitment is through the Green Power Plant Development Program, known as Green Power Plant. This program is designed to strengthen environmental protection in a sustainable way.

One of the main initiatives in the Green Power Plant is the reforestation activities around the Generating Unit. PLN IP Services actively plants endemic trees that not only provide aesthetic benefits but also positively impact emissions reduction and increase the biodiversity index in the area.

JUMLAH DAN MATERI PENGADUAN MASALAH LINGKUNGAN

Selama periode pelaporan, PLN IP Services tidak menerima pengaduan terkait masalah lingkungan dari masyarakat sekitar dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam menjalankan operasionalnya dengan mematuhi semua regulasi lingkungan yang berlaku. Sebagai hasil dari ketaatan ini, PLN IP Services tidak dikenakan sanksi non-moneter atau denda terkait ketidakpatuhan terhadap Undang-undang dan peraturan lingkungan.

BIAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

PLN IP Services menerapkan Kebijakan Keberlanjutan yang menjadi panduan/pedoman dalam menjalankan seluruh kegiatan operasional, dengan fokus pada aspek keselamatan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan. Kebijakan ini menggarisbawahi prinsip-prinsip pencegahan, pengelolaan risiko sepanjang daur hidup, kepatuhan terhadap regulasi, partisipasi aktif, perlindungan lingkungan, serta peningkatan berkelanjutan.

Pada tahun 2023, PLN IP Services mengalokasikan dana sebesar Rp2.976.807.893 untuk biaya yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Pengeluaran ini direalisasikan untuk mendukung implementasi kebijakan keberlanjutan perusahaan, termasuk:

1. Pemantauan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
2. Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3
3. Pengelolaan dan Pemantauan Udara Emisi
4. Pengelolaan dan Pemantauan Kualitas Air
5. Pengurangan dan Pemanfaatan Limbah Non B3 melalui *composting*
6. Penanaman Tanaman Energi, Perindang, Pelindung, dan Tanaman Hias Area Unit

NUMBER AND MATERIAL OF ENVIRONMENTAL PROBLEM COMPLAINTS

During the reporting period, PLN IP Services did not receive any complaints related to environmental issues from the surrounding community and other stakeholders. This reflects the commitment of the company to conducting its operations in compliance with all applicable environmental regulations. As a result of this compliance, PLN IP Services was not subject to any non-monetary sanctions or fines related to non-compliance with environmental laws and regulations.

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT EXPENSE

PLN IP Services implements a Sustainability Policy that guides all operational activities, with a focus on safety, health, security, and the environment. This policy underlines the principles of prevention, life-cycle risk management, regulatory compliance, active participation, environmental protection, and continuous improvement.

In 2023, PLN IP Services allocated Rp2,976,807,893 for costs related to environmental management. This expenditure was realized to support the implementation of the sustainability policy of the Company, including:

1. Monitoring of Environmental Management Efforts and Environmental Monitoring Efforts (“UKL-UPL”)
2. B3 and Non B3 Waste Management
3. Air Emission Management and Monitoring
4. Water Quality Management and Monitoring
5. Reduction and Utilization of Non B3 Waste through *composting*
6. Planting Energy, Shade, Protective, and Ornamental Plants Unit Area

Kinerja Sosial

Performance on Social Aspects

PT PLN Indonesia Power Services berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya, yang mencakup aspek pelanggan, ketenagakerjaan, keselamatan kerja, dan kontribusi kepada masyarakat. Memastikan hak-hak, keamanan, dan keselamatan pelanggan serta karyawan adalah prioritas utama karena hal ini berhubungan langsung dengan kinerja operasional dan keuangan Perusahaan.

Sebagai agen perubahan, Perusahaan secara konsisten mengimplementasikan prinsip tanggung jawab sosial. Perusahaan berupaya memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi masyarakat dan peningkatan kualitas hidup komunitas lokal, serta tetap menjaga kesejahteraan karyawan.

KINERJA SOSIAL ASPEK PELANGGAN

PT PLN Indonesia Power Services memperlakukan setiap pelanggan dengan bermartabat, sesuai dengan kultur dan nilai-nilai Perusahaan yang mengedepankan relasi timbal balik berdasarkan kemitraan dan persahabatan jangka panjang. Selain itu, Perusahaan juga fokus pada inovasi berkelanjutan dalam pengembangan produk dan layanan.

Secara internal, Perusahaan mengambil langkah-langkah progresif dalam menjalankan bisnis di sektor usaha. Upaya ini bertujuan untuk memastikan kepuasan pelanggan maksimal, yang merupakan prioritas utama Perusahaan.

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Aspek Pelanggan

Perusahaan telah mengembangkan produk dengan mengembangkan kebutuhan dari berbagai segmen pelanggan. Untuk menjamin kualitas dan mutu produk yang ditawarkan, Perusahaan selalu menerima saran dan masukan untuk peningkatan mutu serta memperhatikan dan menanggapi dengan baik keluhan pelanggan sesuai dengan pedoman layanan. Selain itu, untuk menjamin keakuratan informasi, produk dan layanan yang ditawarkan oleh Perusahaan selalu disertai informasi yang akurat.

PT PLN Indonesia Power Services is committed to fulfilling its social responsibilities, which include aspects of customers, employment, work safety, and contributions to society. Ensuring the rights, security, and safety of customers and employees is a top priority as this is directly related to the operational and financial performance of the Company.

As an agent of change, the Company consistently implements the principle of social responsibility. The Company strives to contribute significantly to the economic development of society and improve the quality of life of local communities while maintaining employee welfare.

SOCIAL PERFORMANCE ON CUSTOMER ASPECT

PT PLN Indonesia Power Services treats every customer with dignity, following the culture and values of the Company that prioritizes reciprocal relationships based on long-term partnerships and friendships. In addition, the Company also focuses on continuous innovation in product and service development.

Internally, the Company is taking progressive steps in conducting business in the business sector. These efforts are aimed at ensuring maximum customer satisfaction, which is the top priority of the Company.

Corporate Social Responsibility Activities on Customer Aspect

The Company manufactured its products by anticipating the needs of various market segments. To ensure the quality and consistency of its products, the Company is always open to suggestions and feedback for quality improvement, and it pays attention to and responds properly to customer complaints in line with service standards. Furthermore, to ensure information accuracy, the Company's products and services are always accompanied with accurate information

Survei Kepuasan Pelanggan

PT PLN Indonesia Power Services berkomitmen untuk memastikan bahwa pelanggannya menerima produk dan layanan yang memuaskan. Untuk mendukung komitmen ini, Perusahaan secara rutin mengadakan survei kepuasan pelanggan. Hasil survei tersebut digunakan sebagai masukan penting untuk perbaikan dan pengambilan keputusan strategis Perusahaan.

Pada tahun 2023, indeks kepuasan pelanggan mencapai 85,39, meningkat dari 84,55 pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pelanggan sangat puas dengan produk dan layanan yang diberikan oleh Perusahaan. Temuan ini memotivasi Perusahaan untuk terus berupaya memberikan yang terbaik bagi pelanggan, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan kualitas dan kemajuan Indonesia.

Informasi Produk dan Sarana Komunikasi Pelanggan

PT PLN Indonesia Power Services secara berkala memastikan ketersediaan dan kemudahan akses informasi terkait produk. Informasi ini dapat diakses melalui situs web resmi PLN IP Services di www.plnipsservices.co.id dan laporan tahunan Perusahaan. Pelanggan juga memiliki kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan Perusahaan, menyampaikan keluhan, pertanyaan, saran, dan umpan balik mengenai tingkat kepuasan terhadap produk dan layanan yang diberikan oleh PLN IP Services.

Tanggung Jawab Pengembangan Produk Berkelanjutan

Untuk terus mengembangkan dan berinovasi dalam produk yang berkelanjutan, PT PLN Indonesia Power Services berkomitmen untuk menjamin kualitas dan mutu produk yang ditawarkan. Perusahaan senantiasa menerima saran dan masukan guna meningkatkan mutu, serta tetap mempertimbangkan standar keselamatan dan kesehatan demi menjamin produk yang aman dan berkualitas. Selain itu, Perusahaan selalu berupaya memperhatikan dan menanggapi keluhan pelanggan dengan baik, sesuai dengan pedoman layanan yang berlaku.

Customer Satisfaction Survey

PT PLN Indonesia Power Services is committed to ensuring its customers receive satisfactory products and services. To support this commitment, the Company regularly conducts customer satisfaction surveys. The results of the survey are used as an important input for the improvement and strategic decision-making of the Company.

In 2023, the customer satisfaction index reached 85.39, an increase from 84.55 in 2022. This increase shows that customers are very satisfied with the products and services provided by the Company. This finding motivates the Company to continue to strive to provide the best for customers while contributing to the improvement of quality and progress in Indonesia.

Information about Products and Communication Channel Available for Customers

PT PLN Indonesia Power Services regularly ensures the availability and ease of access to product-related information. This information can be accessed through the official website of PLN IP Services at www.plnipsservices.co.id and the Company's annual report. Customers also have the opportunity to interact directly with the Company, submitting complaints, questions, suggestions, and feedback regarding the level of satisfaction with the products and services provided by PLN IP Services.

Responsibility for Sustainable Product Development

To continuously develop and innovate in sustainable products, PT PLN Indonesia Power Services is committed to ensuring the quality and quality of the products offered. The Company always welcomes suggestions and input to improve quality and continues to consider safety and health standards to ensure safe and quality products. In addition, the Company always strives to pay attention and respond to customer complaints properly, according to applicable service guidelines.

Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan

PT PLN Indonesia Power Services berkomitmen untuk menyediakan produk yang aman dan berkualitas kepada para pelanggannya. Layanan yang ditawarkan memenuhi standar keselamatan dan kesehatan yang ketat. Setiap tahapan, mulai dari perizinan, sertifikasi, fabrikasi hingga distribusi, dilakukan dengan cermat untuk memastikan keamanan pelanggan.

Dengan fokus pada peningkatan ekonomi dan memberikan layanan terbaik, Perusahaan memastikan bahwa produk dan layanan yang disediakan tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat tetapi juga dilakukan secara adil dan aman.

Mekanisme Penyampaian dan Penanganan Pengaduan Pelanggan

Sebagai bagian dari upaya perlindungan pelanggan dan pemberian layanan optimal, PLN IP Services menyediakan mekanisme penanganan pengaduan pelanggan yang dapat diakses melalui laman situs Perusahaan, khususnya pada menu “Hubungi Kami.”

Semua produk dan layanan Perusahaan dipastikan telah memenuhi peraturan perundangan yang berlaku dan dievaluasi keamanannya secara berkala. Komitmen Perusahaan terhadap kualitas dan keamanan produk telah membuahkan hasil yang baik, terbukti dengan tidak adanya tuntutan terkait ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang ekonomi dan sosial. Selain itu, selama tahun pelaporan, tidak ada produk yang ditarik kembali.

KINERJA SOSIAL ASPEK KETENAGAKERJAAN

PT PLN Indonesia Power Services berkomitmen untuk memperluas kegiatan operasionalnya melalui kerja sama dan kesempatan kerja yang setara dengan individu-individu yang memiliki daya saing tinggi dan determinasi untuk menghadapi tantangan. Perusahaan memandang pendidikan dan pelatihan sebagai kebijakan strategis dalam meningkatkan kualitas karyawan, yang pada akhirnya memberikan manfaat besar bagi kemajuan Perusahaan.

Customer Health and Safety

PT PLN Indonesia Power Services is committed to providing safe and quality products to its customers. The services offered comply with strict safety and health standards. Every stage, from licensing, certification, and manufacturing to distribution, is carefully conducted to ensure customer safety.

With a focus on improving the economy and providing the best services, the Company ensures that the products and services provided not only satisfy the needs of the community but are also conducted in a fair and safe manner.

Mechanism for Filing and Handling Customer Complaints

As part of customer protection efforts and optimal service delivery, PLN IP Services provides a customer complaint handling mechanism that can be accessed through the website of the Company, specifically on the “Contact Us” menu.

All of the products and services of the Company are ensured to comply with the prevailing laws and regulations and are regularly evaluated for safety. The commitment of the Company to product quality and safety has yielded good results, as proven by the absence of claims related to non-compliance with laws and regulations in the economic and social fields. In addition, during the reporting year, no products were recalled.

SOCIAL PERFORMANCE ON EMPLOYMENT ASPECT

PT PLN Indonesia Power Services is committed to expanding its operations through cooperation and equal employment opportunities with individuals who have high competitiveness and determination to encounter challenges. The Company considers education and training as a strategic policy in improving the quality of employees, which in turn provides great benefits for the progress of the Company.

Oleh karena itu, Perusahaan secara teratur mengadakan berbagai pelatihan, termasuk pelatihan profesional, sertifikasi, dan peningkatan motivasi karyawan. Program peningkatan kompetensi ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan terhadap Perusahaan. Selain itu, Perusahaan memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan untuk melanjutkan pendidikan mereka, mendapatkan promosi, mengembangkan karir, dan memperoleh berbagai hak lainnya yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Perusahaan juga menjunjung tinggi lingkungan kerja yang layak dan aman sebagai wujud kepedulian terhadap kesejahteraan dan kenyamanan seluruh karyawan.

Kesetaraan dan Kesempatan Kerja

PT PLN Indonesia Power Services mengedepankan prinsip keragaman, kesetaraan, dan nondiskriminasi. Perusahaan tidak membedakan gender, ras, agama, suku, dan golongan dalam seluruh tingkatan karyawan dan manajemen, baik dalam proses penerimaan karyawan maupun dalam sistem remunerasi dan jabatan.

Lingkungan kerja yang beragam menjadi kekuatan Perusahaan, memungkinkan kolaborasi ide yang efektif untuk menciptakan inovasi dalam produk dan layanan kelistrikan bagi pelanggan. Kinerja dan kemajuan karir karyawan dinilai secara objektif berdasarkan evaluasi kinerja yang transparan.

PT PLN Indonesia Power Services membangun budaya Perusahaan yang berlandaskan prinsip kesetaraan, sehingga selama tahun 2023 tidak terdapat insiden diskriminasi dalam lingkungan kerja Perusahaan.

Pemenuhan Ketentuan Terkait Tenaga Kerja Anak dan Kerja Paksa

PT PLN Indonesia Power Services menghargai hak asasi manusia sebagai hak dasar dan kebebasan yang dimiliki setiap individu di seluruh dunia. Perusahaan memperhatikan batas usia minimal karyawan untuk memastikan tidak ada karyawan di bawah usia yang ditentukan bekerja di lingkungan Perusahaan. Selain itu, Perusahaan menerapkan kebijakan yang melarang kerja paksa, yaitu praktik memaksa seseorang untuk bekerja dengan ancaman hukuman apapun, karena individu tersebut tidak berpartisipasi secara sukarela.

Therefore, the Company regularly conducts several training programs, including professional training, certification, and employee motivation enhancement. This competency improvement program is expected to increase employee satisfaction and loyalty to the Company. In addition, the Company provides opportunities for all employees to continue their education, get promotions, develop their careers, and obtain various other rights stated in the Collective Labor Agreement (CLA) according to the prevailing rules and regulations. The Company also upholds a decent and safe working environment as a form of concern for the welfare and comfort of all employees.

Equality and Employment Opportunity

PT PLN Indonesia Power Services prioritizes the principles of diversity, equality, and nondiscrimination. The Company does not differentiate between gender, race, religion, ethnicity, and class at all levels of employees and management, both in the recruitment process and in the remuneration and position system.

A diverse work environment is the strength of the Company, enabling effective collaboration of ideas to create innovations in electrical products and services for customers. Employee performance and career advancement are objectively assessed based on transparent performance evaluations.

PT PLN Indonesia Power Services builds a corporate culture based on the principle of equality, so that during 2023 there are no incidents of discrimination in the work environment of the Company.

Compliance with the Regulation on Child Worker and Forced Labor

PT PLN Indonesia Power Services respects human rights as a basic right and freedom that every individual has around the world. The Company pays attention to the minimum age limit of employees to ensure that there are no employees under the specified age working in the environment of the Company. In addition, the Company implements a policy that prohibits forced labor, which is the practice of forcing an individual to work under the threat of any penalty, because the individual does not participate voluntarily.

Pemenuhan Atas Upah Minimum Regional

PLN IP Services menghargai kinerja dan prestasi karyawan melalui sistem remunerasi yang disusun dengan baik. Kebijakan remunerasi dan tunjangan di PLN IP Services bukan hanya sebagai strategi untuk mempertahankan produktivitas sumber daya manusia, tetapi juga sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi karyawan.

Semua karyawan tetap di PLN IP Services memiliki hak untuk menerima upah entry level yang setara atau bahkan lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan oleh pemerintah. Prinsip kesetaraan dan keadilan dijunjung tinggi, sehingga remunerasi disesuaikan dengan hasil kerja dan kompetensi masing-masing karyawan.

PLN IP Services tidak melakukan diskriminasi dalam pemberian remunerasi dan upah entry level antara karyawan pria dan wanita. Setiap karyawan, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki kesempatan yang sama untuk menerima remunerasi yang setara, dengan perbandingan 1:1 untuk setiap kategori jabatan.

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Ketenagakerjaan

PLN IP Services aktif mengambil langkah-langkah keberlanjutan dalam aspek ketenagakerjaan sebagai bagian dari komitmen Perusahaan untuk memastikan kesempatan yang setara tanpa diskriminasi, memenuhi hak-hak sosial karyawan, mengimplementasikan, meningkatkan pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk mengurangi tingkat kecelakaan kerja, memberikan jaminan pensiun, dan memberikan cuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengembangan Kompetensi Pegawai

Perusahaan secara aktif mengadakan program pendidikan dan pelatihan untuk seluruh karyawan dengan tujuan meningkatkan kemampuan, keahlian, dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pelaksanaan program ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas karyawan, serta mendorong pengembangan karir mereka.

Compliance with the Regulation on Regional Minimum Wage

PLN IP Services values employee performance and achievements through a well-organized remuneration system. The remuneration and benefits policy at PLN IP Services is not only a strategy to maintain human capital productivity, but also a form of appreciation for employee contributions.

All permanent employees in PLN IP Services have the right to receive entry-level wages equal to or even higher than the Provincial Minimum Wage set by the government. The principles of equality and fairness are upheld, so that remuneration is adjusted to the work results and competencies of each employee.

PLN IP Services does not discriminate in the provision of remuneration and entry-level wages between male and female employees. Every employee, regardless of gender, has the same opportunity to receive equal remuneration, in a ratio of 1:1 for each position category.

Corporate Social Responsibility Activities Related to Employment

PLN IP Services actively takes sustainability steps in the aspect of employment as part of the commitment of the Company to ensure equal opportunities without discrimination, fulfill the social rights of employees, implement zero accidents, improve Occupational Safety and Health (OHS) training to reduce the rate of work accidents, provide pension insurance, and provide leave according to applicable regulations.

Employee Competency Building

The Company actively conducts education and training programs for all employees with the aim of improving the capabilities, skills, and quality of human capital (HC). The implementation of this program is expected to increase employee effectiveness and productivity, as well as encourage their career development.

Selama tahun 2023, Perusahaan telah melaksanakan berbagai program peningkatan kompetensi seperti sertifikasi, seminar, lokakarya, dan pelatihan bagi para karyawan. Anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan SDM pada tahun ini mencapai Rp22,5 miliar. Jumlah karyawan yang berpartisipasi dalam pelatihan dan pengembangan kemampuan mencapai 4.289 orang.

Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Perusahaan menganggap karyawan sebagai mitra yang berarti dalam perjalanan kesuksesannya, dan dengan demikian, Perusahaan meneguhkan komitmennya untuk menyediakan lingkungan kerja yang mendukung bagi setiap karyawan untuk berkembang secara optimal. Pemimpin Perusahaan memberikan dukungan penuh kepada karyawan di garis depan dengan memberikan dukungan moral, semangat, dan fasilitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama.

Perusahaan juga memprioritaskan implementasi dan pengawasan penuh terhadap semua aspek terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Hal ini mencakup tanggung jawab untuk melindungi karyawan serta menyediakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif. Pendekatan ini diwujudkan melalui penerapan Sistem Manajemen yang mengacu pada peraturan nasional dan persyaratan lainnya.

Manajemen K3 di Perusahaan dimulai dengan melakukan identifikasi potensi bahaya dari setiap aktivitas atau area kerja. Setiap bahaya yang teridentifikasi dievaluasi risikonya, dengan mempertimbangkan tingkat kemungkinan dan konsekuensi yang mungkin terjadi. Hasil dari proses identifikasi bahaya dan penilaian risiko tersebut didokumentasikan dalam Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko (IBPR), yang menjadi dasar untuk menentukan upaya mitigasi guna mengurangi risiko terjadinya kecelakaan atau penyakit akibat kerja.

Selama tahun 2023, tidak tercatat adanya kecelakaan fatal atau penyakit akibat kerja. Sebagai bagian dari komitmennya untuk mencegah kecelakaan, Perusahaan secara terus-menerus melakukan perbaikan pada program pencegahan kecelakaan dengan tujuan mencapai zero accident.

During the year, the Company has implemented several competency improvement programs such as certifications, seminars, workshops, and training for employees. The budget allocated for HC development this year reached Rp22.5 billion. The number of employees who participated in training and skills development reached 4,289 people.

Occupational Health and Safety Program

The Company considers employees as meaningful partners in its journey of success, and therefore the Company affirms its commitment to provide a supportive work environment for each employee to develop optimally. The leaders of the Company give full support to the frontline employees by providing moral support, encouragement, and facilities needed to achieve common goals.

The Company also prioritizes the full implementation and supervision of all aspects related to Occupational Safety and Health (OHS). This includes the responsibility to protect employees and provide a safe, comfortable, and conducive working environment. This approach is realized through the implementation of a Management System that refers to national regulations and other requirements.

The Company's OHS management starts with the identification of potential hazards from each activity or work area. Each identified hazard is evaluated for its risk, by considering the level of likelihood and consequences that may occur. The results of the hazard identification and risk assessment process are documented in the Hazard Identification and Risk Assessment ("IBPR"), which serves as the basis for determining mitigation efforts to reduce the risk of occupational accidents or diseases.

During 2023, no fatal accidents or occupational diseases were recorded. As part of its commitment to prevent accidents, the Company continuously improves its accident prevention program with the aim of achieving zero accidents.



Perusahaan mendorong interaksi yang positif dengan masyarakat dan melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan kualitas hidup mereka

the Company encourages positive interaction with the community and implements several programs to improve their quality of life

Manfaat Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Ketenagakerjaan serta Upaya Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait ketenagakerjaan merupakan langkah penting dalam menciptakan manfaat bagi PLN IP Services, karyawan, dan pihak-pihak terkait lainnya. Bagi Perusahaan, hal ini dianggap sebagai komitmen jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan operasional, memenuhi tanggung jawab kepada pemegang saham, serta meningkatkan efisiensi dengan mengurangi biaya pengelolaan ketenagakerjaan. Manfaat dari inisiatif tanggung jawab sosial terhadap ketenagakerjaan antara lain:

1. Meningkatkan kepuasan dan keterlibatan karyawan.
2. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
3. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi karyawan, pengunjung, dan mitra kerja.
4. Melindungi aset produksi dari kerusakan yang dapat merugikan Perusahaan.
5. Mengurangi kerugian akibat kecelakaan kerja atau penyakit terkait pekerjaan.

Benefits of CSR Activities Related to Employment and Supports for Sustainable Development

The implementation of social responsibility related to employment is an important step in creating benefits for PLN IP Services, employees, and other related parties. For the Company, this is considered a long-term commitment to maintain operational sustainability, fulfill responsibilities to shareholders, and improve efficiency by reducing labor management costs. The benefits of social responsibility initiatives towards employment include:

1. Increase employee satisfaction and engagement.
2. Ensure compliance with applicable labor regulations.
3. Create a safe and healthy working environment for employees, visitors, and partners.
4. Protect production assets from damage that could harm the Company.
5. Reduce losses due to occupational accidents or work-related diseases.

Selain manfaat langsung tersebut, kegiatan tanggung jawab sosial terkait ketenagakerjaan juga diharapkan memberikan dampak positif secara tidak langsung terhadap pembangunan berkelanjutan, termasuk praktik produksi yang bertanggung jawab, pemberdayaan gender, dan penciptaan lapangan kerja yang layak.

KINERJA SOSIAL ASPEK MASYARAKAT

PLN IP Services berkomitmen tinggi dalam mengoptimalkan dampak positif dan manfaat bersama kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Berdasarkan hasil analisis pemangku kepentingan, masyarakat merupakan salah satu pemangku kepentingan kunci yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Masyarakat yang berdaya dan memiliki hubungan baik dengan Perusahaan akan sangat mendukung aktivitas Perusahaan dalam jangka panjang serta akan menjadi aktor yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pelaksanaan TJSJ di PLN IP Services didorong oleh rasa tanggung jawab PLN IP Services dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan kepada seluruh pemangku kepentingan yang mengacu kepada ISO 26000 sebagai best practice dan Peraturan Kementerian BUMN terkini, yaitu:

1. Peraturan Menteri BUMN PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara PER6/MBU/09/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Kemasyarakatan

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSJ) Perusahaan difokuskan untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar yang berada dalam wilayah operasional Perusahaan. Perusahaan aktif melibatkan tokoh-tokoh masyarakat lokal untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, sehingga program TJSJ yang diimplementasikan dapat memberikan solusi yang sesuai dan bermanfaat.

In addition to these direct benefits, labor-related social responsibility activities are also expected to have indirect positive impacts on sustainable development, including responsible production practices, gender empowerment, and decent job creation.

SOCIAL PERFORMANCE ON COMMUNITY ASPECT

PLN IP Services is highly committed to optimizing positive impacts and shared benefits to all stakeholders, including the community. Based on the results of the stakeholder analysis, the community is one of the key stakeholders that needs special attention. Communities that are empowered and have a good relationship with the Company will greatly support the activities of the Company in the long term and will become supporting actors for sustainable development.

The implementation of TJSJ in PLN IP Services is driven by PLN IP Services' sense of responsibility in economic, social, and environmental aspects to all stakeholders, which refers to ISO 26000 as best practice and the latest Ministry of SOE Regulations, namely:

1. Regulation of the Minister of SOEs PER-05/MBU/04/2021 concerning Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises.
2. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises PER6/MBU/09/2022 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-05/MBU/04/2021 concerning Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises.

Corporate Social Responsibility Activities

The Social and Environmental Responsibility (CSR) program of the Company is focused on providing positive impacts to the surrounding communities within the Company's operational areas. The Company actively involves local community leaders to identify problems encountered by the community, so that the CSR programs implemented can provide appropriate and useful solutions.

Partisipasi aktif komunitas lokal memiliki kontribusi signifikan terhadap kemajuan dan kelancaran aktivitas bisnis Perusahaan. Sebagai hasilnya, Perusahaan mendorong interaksi yang positif dengan masyarakat dan melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Beberapa program yang telah dilaksanakan mencakup pengembangan ekonomi kreatif, pelatihan keahlian, penciptaan lapangan kerja, serta berbagai program pemberdayaan masyarakat.

Pada tahun 2023, Perusahaan mengalokasikan dana sebesar Rp1.451.857.384 untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan kemasyarakatan ini.

Manfaat Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Masyarakat serta Upaya Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Implementasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) diarahkan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan tujuan memperkuat hubungan yang harmonis antara Perusahaan dan masyarakat sebagai salah satu pihak yang terlibat. Program TJSL ini diharapkan dapat menghasilkan efek positif yang mendukung peningkatan kesehatan masyarakat, pengembangan keterampilan dan perekonomian mereka, serta mempromosikan pembangunan infrastruktur nasional. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mendorong inisiatif swadaya dalam membangun perumahan yang layak, meningkatkan fasilitas pendidikan, dan memperbaiki kualitas sarana ibadah.

Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar

Perusahaan melaksanakan upaya penanggulangan dampak negatif keberadaan kawasan industri Perusahaan dengan berlandaskan kepada perundangan yang berlaku serta melibatkan manajemen lingkungan untuk menjamin bahwa kegiatan Perusahaan tidak mempengaruhi masyarakat. Hingga saat ini tidak ada dampak negatif yang terjadi akibat kegiatan TJSL ini. Hal ini didukung dengan tidak terdapatnya aduan dari masyarakat terkait penyelenggaraan kegiatan TJSL.

The active participation of local communities has a significant contribution to the progress and smooth running of the business activities of the Company. As a result, the Company encourages positive interaction with the community and implements several programs to improve their quality of life. Some of the programs implemented include creative economy development, skills training, job creation, and several community empowerment programs.

In 2023, the Company allocated Rp1,451,857,384 to support the implementation of these social and community responsibility activities.

Benefits of CSR Activities and Supports for Sustainable Development

The implementation of the Social and Environmental Responsibility (CSR) program is directed towards achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) with the aim of strengthening the harmonious relationship between the Company and the community as one of the parties involved. This CSR program is expected to have a positive effect that supports the improvement of community health, development of their skills and economy, as well as promoting the development of national infrastructure. In addition, the program also aims to encourage self-help initiatives in building decent housing, improving educational facilities, and improving the quality of religious facilities.

Corporate Operation Impact to the Surrounding Communities

The Company employs environmental management to guarantee that its operations do not have a detrimental influence on the local population and to mitigate the negative effects of its industrial area. This CSR action has not yet had any negative effects. This is confirmed by the lack of public complaints about the execution of CSR efforts.

Di samping menjalankan program CSR, Perusahaan berinovasi untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan CSV (*Creating Shared Value*), yang merupakan pengembangan dari kegiatan CSR perusahaan. Program CSV ini melibatkan masyarakat penerima manfaat dan para pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari perencanaan program, implementasi dan monitoring kegiatan, hingga evaluasi kendala dan pencapaian selama pelaksanaan yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan di masa depan. Peran penting CSV adalah memberikan solusi yang holistik dan membawa manfaat yang lebih luas dengan memberdayakan masyarakat secara langsung.

Pengaduan Masyarakat

Perusahaan telah mengembangkan mekanisme pengaduan bagi masyarakat yang juga mencakup isu sosial dan lingkungan di lingkungan wilayah operasi. Perusahaan telah menjalankan *whistleblowing system*. Masyarakat dapat melaporkan pengaduannya secara tertulis melalui:

Email : wbs@plnipservices.co.id

Telepon : +62 21 521 4515

Website : <https://www.plnipservices.co.id>

Semua surat pengaduan akan ditindaklanjuti oleh divisi terkait dengan melakukan verifikasi atas keluhan yang diterima. Sepanjang tahun 2023, Perusahaan menerima/tidak menerima keluhan dari masyarakat atas hal-hal yang bertentangan dengan etika, integritas, norma-norma dan dugaan pelanggaran peraturan atau tindakan yang mengganggu lingkungan hidup, dan lainnya.

In addition to conducting CSR programmes, the Company innovates to empower the community via CSV (*Creating Shared Value*) initiatives, which are the evolution of CSR programmes. This CSV programme engages beneficiary communities and stakeholders in a variety of activities, beginning with programme planning, implementation, and monitoring of activities, and concluding with an evaluation of implementation constraints and accomplishments that can be used as a basis for future decisions. CSV's main function is to give comprehensive answers and to empower the community directly in order to bring about broader advantages.

Community Complaints

In addition to addressing social and environmental concerns in its working region, the Company has devised a process for community complaints. The Company has created a procedure for reporting misconduct. The public may submit written concerns through:

Email : wbs@plnipservices.co.id

Telephone : +62 21 521 4515

Website : <https://www.plnipservices.co.id>

The appropriate division will follow up on all complaint letters by validating the complaints received. Throughout 2023, the Company receives/does not receive public complaints involving concerns contradictory to ethics, integrity, norms, and alleged breaches of rules or acts that affect the environment, among others.

Pengungkapan Laporan Keberlanjutan

Sustainability Report Disclosure

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, laporan terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat penjelasan strategi keberlanjutan, profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik, penjelasan Direksi, tata kelola keberlanjutan, kinerja keberlanjutan, verifikasi tertulis dari pihak independen (jika ada), lembar umpan balik (*feedback*) untuk pembaca (jika ada), dan tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya. Semua elemen ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai komitmen dan pencapaian perusahaan dalam aspek keberlanjutan sosial dan lingkungan. Informasi tersebut diungkapkan terpisah dalam Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*).

As stipulated in Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 regarding the Implementation of Sustainable Finance for Financial Institutions, Issuers, and Public Companies, the report on social and environmental responsibilities includes explanations of sustainability strategies, brief profiles of the Issuer or Public Company, Director's explanations, sustainability governance, sustainability performance, written verification from independent parties (if any), feedback sheets for readers (if any), and the Issuer or Public Company's responses to feedback from the previous year's report. These elements aim to provide a comprehensive overview of the company's commitments and achievements in social and environmental sustainability. This information is disclosed separately in the Sustainability Report.

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

**Surat Pernyataan Anggota
Dewan Komisaris dan Direksi
Tentang Tanggung Jawab atas
Laporan Tahunan 2023
PT PLN Indonesia Power Services**

Statement of Board of Commissioners and
Board of Directors Members on Accountability for
the Annual Reports 2023 of PT PLN Indonesia Power Services

Surat Pernyataan Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2023 PT PLN Indonesia Power Services

Statement of Members of Board of Commissioners on the Accountability
for the 2023 Annual Report PT PLN Indonesia Power Services

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT PLN Indonesia Power Services tahun 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan ini.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 10 Juli 2024

We, the undersigned, testify that all information in the Annual Report of PT PLN Indonesia Power Services for 2023 is presented in its entirety and we are fully responsible for the correctness of the contents in the Annual Report and Financial Report of the Company.

This statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, July 10, 2024

Dewan Komisaris Board of Commissioners



Julita Indah
Komisaris
Commissioner



Khusnul Mubien
Komisaris Utama
President Commissioner



Masykuri Abdillah
Komisaris
Commissioner



Sunandar
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Fredy Eko Prasetyo T
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2023 PT PLN Indonesia Power Services

Statement of Members of Board of Directors on the Accountability
for the 2023 Annual Report PT PLN Indonesia Power Services

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT PLN Indonesia Power Services tahun 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan ini.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 10 Juli 2024

We, the undersigned, testify that all information in the Annual Report of PT PLN Indonesia Power Services for 2023 is presented in its entirety and we are fully responsible for the correctness of the contents in the Annual Report and Financial Report of the Company.

This statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, July 10, 2024

Direksi
Board of Directors



Hari Cahyono
Direktur Utama
President Director



Imam Adi Prihantoro
Direktur Sumber Daya Manusia
Director of Human Capital



Kukuh Pambudi
Direktur Bisnis
Director of Business



Mulyadi
Direktur Operasi
Director of Operations



Hari Muhardani Nasution
Direktur Keuangan
Director of Finance

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

**Referensi SEOJK Nomor 16/
SEOJK.04/2021:
Bentuk dan Isi Laporan Tahunan
Emiten atau Perusahaan Publik**

SEOJK Reference Number 16/SEOJK.04/2021:
Form and Content of the Annual Report of Issuers
or Public Companies

Referensi SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021: Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

SEOJK Reference Number 16/SEOJK.04/2021: Form and Content of the Annual Report of Issuers or Public Companies

Keterangan	Halaman Page	Description
I. Ketentuan Umum		I. General Disclosure
1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:		1. In this Financial Services Authority Circular Letter what is meant by:
a. Laporan Tahunan adalah laporan pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap emiten atau perusahaan publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada rapat umum pemegang saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Tahunan emiten atau perusahaan publik.	√	a. Annual Report is a report on the accountability of the Board of Directors and the Board of Commissioners in managing and supervising issuers or public companies within a period of 1 (one) financial year to the General Meeting of Shareholders based on the provisions of the Financial Services Authority Regulation regarding the Annual Report of Issuers or Public Companies.
b. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.	√	b. Issuers are parties who make public offerings.
c. Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	√	c. Public Company is a company whose shares are owned by at least 300 (three hundred) shareholders and has a paid-up capital of at least Rp. 3,000,000,000.00 (three billion rupiah) or a number of shareholders and paid-up capital as determined by the Financial Services Authority.
d. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik.	√	d. Public Company is an Issuer that has made a public offering of equity securities or a Public Company.
e. Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.	√	e. A Sustainability Report is a report published to the public that contains the economic, financial, social, and environmental performance of a financial service institution, Issuer, and Public Company in running a sustainable business.
f. Direksi:		f. Board of Directors
1) Bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan	√	1) For an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, the Board of Directors as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or Public Company; and
2) Bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melaksanakan pengurusan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan mengenai badan hukum tersebut.	√	2) For an Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company is an organ that runs the management of the legal entity as referred to in the laws and regulations concerning the legal entity.
g. Dewan Komisaris:		g. Board of Commissioners
1) Bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan	√	1) For an Issuer or Public Company in the form of a limited liability company is the Board of Commissioners as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies; and
2) Bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melakukan pengawasan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan mengenai badan hukum tersebut	√	2) For an Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company is the organ that supervises the legal entity as referred to in the laws and regulations concerning the legal entity.

Keterangan	Halaman Page	Description
h. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS:	√	h. General Meeting of Shareholders hereinafter abbreviated as GMS:
1) Bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan	√	1) For an Issuer or Public Company in the form of a limited liability company is the GMS as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company; and
2) Bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada organ yang melaksanakan fungsi pengurusan dan fungsi pengawasan, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar yang mengatur badan hukum tersebut.	√	2) For an Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company is an organ that has authority that could not be given to an organ that carries out management and supervisory functions, within the limits specified in the laws and/or articles of association governing the legal entity.
2. Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik merupakan sumber informasi penting bagi investor atau pemegang saham sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.	√	2. The Annual Report of a listed company is one of the most important sources as the base for investors or shareholders in making an investment decision, and is a means of monitoring an issuer or public company.
3. Seiring dengan perkembangan pasar modal dan meningkatnya kebutuhan investor atau pemegang saham atas keterbukaan informasi, Direksi dan Dewan Komisaris dituntut untuk menyajikan informasi yang berkualitas, akurat, dan akuntabel melalui Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.	√	3. Along with the development of the Capital Market and the growing needs of investors or shareholders regarding information disclosure, the Board of Directors and the Board of Commissioners are required to improve the quality of information disclosure through an annual report.
4. Laporan Tahunan yang disusun secara teratur dan informatif dapat memberikan kemudahan bagi investor atau pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.	√	4. Annual Report should be prepared in an orderly manner and should be informative to provide conveniences for the investors or shareholders in getting the information they need.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan pedoman bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang wajib diterapkan dalam menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan.	√	5. This Circular Letter of the Financial Service Agency serves guidelines for Issuers or Public Companies that should be applied in preparing their Annual Report.
II. Bentuk Laporan Tahunan		II. Format of Annual Report
1. Laporan Tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan salinan dokumen elektronik.	√	1. Annual Report should be presented in the printed format and in electronic document copy.
2. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik.	√	2. The printed version of the Annual Report should be printed on light-colored paper of fine quality, in A4 size, bound and can be reproduced in good quality.
3. Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami.	√	3. Annual Report may present the information in form of images, charts, tables, and diagrams are presented by mentioning the title and/or clear description, that is easy to read and be understood;
4. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk salinan dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam <i>portable document format</i> (PDF).	√	4. The Annual Report presented in electronic document format is the Annual Report converted into portable document format.
III. Isi Laporan Tahunan		III. Format of Annual Report
1. Laporan Tahunan paling sedikit memuat:	√	1. Annual Report should contain at least the following information:
a. Ikhtisar data keuangan penting;	12-16	a. Summary of key financial information;
b. Informasi saham (jika ada);	17-18	b. Stock information (if any);
c. Laporan Direksi;	52-75	c. The Board of Directors report;
d. Laporan Dewan Komisaris;	38-51	d. The Board of Commissioners report;
e. Profil Emiten atau Perusahaan Publik;	77-196	e. Profile of Issuer or Public Company;
f. Analisis dan pembahasan manajemen;	199-261	f. Management Discussion and Analysis
g. Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;	263-475	g. Corporate governance applied by the Issuer or Public Company;
h. Tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik;	477-500	h. Corporate social and environmental responsibility of the Issuer or Public Company;

Keterangan	Halaman Page	Description
i. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan	551-623	i. Audited annual report; and
j. Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan;	503-505	j. Statement that the Board of Directors and the Board of Commissioners are fully responsible for the Annual Report;
2. Uraian Isi Laporan Tahunan		2. Description of Content of Annual Report
a. Ikhtisar Data Keuangan Penting Ikhtisar Data Keuangan Penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat:	12-16	a. Summary of Key Financial Information Summary of Key Financial Information contains financial information presented in comparison with previous 3 (three) fiscal years or since the commencement of business if the Issuers or the Public Company commencing the business less than 3 (three) years, at least contain:
1) Pendapatan/penjualan;	14	1) Income/sales;
2) Laba bruto;	14	2) Gross profit;
3) Laba (rugi);	14	3) Profit (loss);
4) Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	14	4) Total profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and non-controlling interest;
5) Total laba (rugi) komprehensif;	14	5) Total comprehensive profit (loss);
6) Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	14	6) Total comprehensive profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and non controlling interest;
7) Laba (rugi) per saham;	14	7) Earning (loss) per share;
8) Jumlah aset;	12	8) Total assets;
9) Jumlah liabilitas;	13	9) Total liabilities;
10) Jumlah ekuitas;	13	10) Total equities;
11) Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;	15	11) Profit (loss) to total assets ratio;
12) Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;	15	12) Profit (loss) to equities ratio;
13) Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/ penjualan;	15	13) Profit (loss) to income ratio;
14) Rasio lancar;	15	14) Current ratio;
15) Rasio liabilitas terhadap ekuitas;	15	15) Liabilities to equities ratio;
16) Rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan	15	16) Liabilities to total assets ratio; and
17) Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya;	15	17) Other information and financial ratios relevant to the Issuer or Public Company and type of industry;
b. Informasi saham Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat:	17	b. Stock Information Stock Information for Public Company at least contains:
1) Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat:	N/R	1) Shares issued for each three-month period in the last 2 (two) fiscal years (if any), at least covering:
a) Jumlah saham yang beredar;	N/R	a) Number of outstanding shares;
b) Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;	N/R	b) Market capitalization based on the price at the Stock Exchange where the shares listed on
c) Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan	N/R	c) Highest share price, lowest share price, closing share price at the Stock Exchange where the shares listed on; and
d) Volume perdagangan pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;	N/R	d) Share volume at the Stock Exchange where the shares listed on;
Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek;		Information in point b), point c), and point d) only be disclosed if the Issuer is a public company whose shares is listed in the Stock Exchange;

Keterangan	Halaman Page	Description
2) Dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:	17	2) In the event of corporate actions, including stock split, reverse stock, dividend, bonus share, and change in par value of shares, then the share price referred to in point 1), should be added with explanation on:
a) Tanggal pelaksanaan aksi korporasi;	N/R	a. Date of corporate action;
b) Rasio pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham;	N/R	b. Stock split ratio, reverse stock, dividend, bonus shares, and change in par value of shares;
c) Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi;	N/R	c. Number of outstanding shares prior to and after corporate action;
d) Jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan	N/R	d. Number of conversion shares proceed (if any); and
e) Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi;	N/R	e. Share price prior to and after corporate action;
3) Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) tersebut; dan	18	3) In the event that the company's shares were suspended and/or delisted from trading during the year under review, then the Issuers or Public Company should provide explanation on the reason for the suspension and/or delisting; and
4) Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) tersebut.	18	4) In the event that the suspension and/or delisting as referred to in point 3) was still in effect until the date of the Annual Report, then the Issuer or the Public Company should also explain the corporate actions taken by the company in resolving the suspension and/or delisting;
c. Laporan Direksi Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	52-75	c. The Board of Directors Report The Board of Directors Report should at least contain the following items:
1) Kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:		1) The performance of the Issuer or Public Company, at least covering:
a) Strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik;	60-62	a) Strategy and strategic policies of the Issuer or Public Company;
b) Peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik;	62-63	b) The Board of Directors roles in formulating strategies and strategic policies of Issuers or Public Companies;
c) Proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik;	63-64	c) The process carried out by the Board of Directors to ensure the implementation of the Issuer or Public Company strategy;
d) Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan	64-65	d) Comparison between achievement of results and targets; or Public Company; and
e) Kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik;	65-69	e) Challenges faced by the Issuer or Public Company;
2) Gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dan	71-74	2) Description on business prospects; or Public Company; and
3) Penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	69-70	3) Implementation of good corporate governance by Issuer or Public Company;
d. Laporan Dewan Komisaris Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	39-51	d. The Board of Commissioners Report The Board of Commissioners Report should at least contain the following items:

Keterangan	Halaman Page	Description
1) Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi;	40-42	1) Assessment of the performance of the Board of Directors in managing the Issuer or the Public Company, including the supervision of the Board of Commissioners in the formulation and implementation of the strategy of the Issuer or Public Company carried out by the Board of Directors;
2) Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; dan	43-44	2) View on the business prospects of the Issuer or Public Company as established by the Board of Directors; and
3) Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	44-45	3) View on the implementation of the corporate governance by the Issuer or Public Company;
e. Profil Emiten atau Perusahaan Publik Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat informasi:	77-196	e. Profile of the Issuer or Public Company Profile of the Issuer or Public Company should cover at least:
1) Nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku;	78 ; 84	1) Name of Issuer or Public Company, including change of name, the reason for the change, and the effective date of the change of name during the year under review;
2) Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:	79	2) Access to Issuer or Public Company, including branch office or representative office, where the public can have access of information of the Issuer or Public Company, which include:
a) Alamat;	√	a) Address;
b) Nomor telepon;	√	b) Telephone number;
c) Alamat surat elektronik; dan	√	c) E-mail address; and
d) Alamat Situs Web;	√	d) Website address;
3) Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik;	80-84	3) Brief history of the Issuer or Public Company;
4) Visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik serta budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>) atau nilai-nilai perusahaan;	85-92	4) Vision and mission of the Issuer or Public Company as well as corporate culture or values;
5) Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/ atau jasa yang dihasilkan;	93-98	5) Line of business according to the latest Articles of Association, and types of products and/or services produced;
6) Wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan.	100-103	6) The operational area of the Issuer or Public Company; operational area is the area or district for implementing operational activities or the range of the company's operational activities.
7) Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan;	104-105	7) Structure of organization of the Issuer or Public Company in chart form, at least 1 (one) level below the Board of Directors, with the names and titles;
8) Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan;	98	8) A list of industry association memberships both on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance;
9) Profil Direksi, paling sedikit memuat:	107; 118-124	9) The Board of Directors profiles include:
a) Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;	√	a) Name and short description of duties and functions;
b) Foto terbaru;	√	b) Latest photograph;
c) Usia;	√	c) Age;
d) Kewarganegaraan;	√	d) Citizenship;
e) Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi;	√	e) education;
f) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	√	f) History position, covering information on:
(1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	√	(1) Legal basis for appointment as member of the Board of Directors to the said Issuer or Public Company;

Keterangan	Halaman Page	Description
(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan	√	(2) Concurrent position, as member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or member of committee, and other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Directors does not have concurrent positions, then this is disclosed; and
(3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	√	(3) Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
g) Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan	√	g) Disclosure of affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and major or controlling shareholders, either directly or indirectly, to individual owners, including the names of affiliated parties. In the event that a member of the Board of Directors has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter; and
h) Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	125	h) Changes in the composition of the Board of Directors and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the Board of Directors, this matter shall be disclosed;
10) Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	106; 108-115	10) The Board of Commissioners profiles, at least include:
a) Nama dan jabatan;	√	a) Name;
b) Foto terbaru;	√	b) Latest photograph;
c) Usia;	√	c) Age;
d) Kewarganegaraan;	√	d) Citizenship;
e) Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi;	√	e) Education;
f) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	√	f) History position, covering information on:
(1) Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris;	√	(1) Legal basis for appointment as member of the Board of Commissioners
(2) Dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	√	(2) Legal bases for the first appointment as member of the Board of Commissioners who also Independent Commissioner at the said Issuer or Public Company;
(3) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan	√	(3) Concurrent position, as member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or member of committee, and other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Directors does not have concurrent positions, then this is disclosed; and
(4) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	√	(4) Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
g) Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut;	√	g) Disclosure of affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and major or controlling shareholders, either directly or indirectly, to individual owners, including the names of affiliated parties. In the event that a member of the Board of Directors has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter; and

Keterangan	Halaman Page	Description
h) Pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; dan	√	h) Statement of independence of Independent Commissioner in the event that the Independent Commissioner has been appointed more than 2 (two) periods; and
i) Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	116-117	i) Changes in the composition of the Board of Commissioners and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Commissioners, this matter shall be disclosed;
11) Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya;	116-117; 125	11) In the event that there were changes in the composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors occurring between the period after year-end until the date the Annual Report submitted, then the last and the previous composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors shall be stated in the Annual Report;
12) Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	145-147	12) Number of employees by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/contracted) in the financial year; Disclosure of information can be presented in table form.
13) Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai:	185	13) Names of shareholders and ownership percentage at the end of the fiscal year, including:
a) Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik;	185	a) Shareholders having 5% (five percent) or more shares of Issuer or Public Company;
b) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan	185	b) Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners who own shares in Issuers or Public Companies. In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not own shares, then this matter is disclosed; and
c) Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik; Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel.	185	c) Groups of public shareholders, or groups of shareholders, each with less than 5% (five percent) ownership shares of the Issuers or Public Company;
14) Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	185	14) The percentage of indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners at the beginning and end of the financial year, including information on shareholders registered in the shareholder register for the benefit of indirect ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners; In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not have indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company, this matter shall be disclosed.
15) Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi:	185	15) Number of shareholders and ownership percentage at the end of the fiscal year, based on:
a) Kepemilikan institusi lokal;	√	a) Ownership of local institutions;
b) Kepemilikan institusi asing;	√	b) Ownership of foreign institutions;
c) Kepemilikan individu lokal; dan	√	c) Ownership of local individual; and
d) Kepemilikan individu asing;	√	d) Ownership of foreign individual;
16) Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;	184 ; 186	16) Information on major shareholders and controlling shareholders the Issuers of Public Company, directly or indirectly, and also individual shareholder, presented in the form of scheme or diagram;

Keterangan	Halaman Page	Description
17) Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama; Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut.	187	17) Name of subsidiaries, associated companies, joint venture controlled by Issuers or Public Company, with entity, percentage of stock ownership, line of business, total assets and operating status of the Issuers of Public Company (if any); For subsidiaries, include the addresses of the said subsidiaries;
18) Kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada);	188	18) Chronology of share listing, number of shares, par value, and bid price from the beginning of listing up to the end of the financial year, and name of Stock Exchange where the Issuers of Public Company shares are listed;
19) Informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18), yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbalance, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada);	189	19) Chronology of securities listing in addition to the said security in point 18), which at least should contain the name of the Securities, year of issuance, date of maturity, bid price, and rating of the securities (if any);
20) Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliannya meliputi:	189-191	20) Information on public accounting services (AP) and public accounting firms (KAP) and their networks/associations/allies includes:
a) Nama dan alamat;	√	a) Name and address
b) Periode penugasan;	√	b) Assignment period
c) Informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan;	√	c) Information on audit and/or non-audit services provided;
d) Biaya jasa (<i>fee</i>) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan	√	d) Audit and/or non-audit fee for each assignment given during the financial year; and
e) Dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliannya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; dan Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliannya dapat disajikan dalam bentuk tabel.	√	e) In the event that AP and KAP and their network/association/alliance, which are appointed do not provide non-audit services, then the information is disclosed; and Disclosure of information on AP and KAP services and their networks/associations/allies can be presented in table form.
21) Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP.	192-193	21) Name and address of capital market supporting institutions and/or professions other than AP and KAP.
f. Analisis dan Pembahasan Manajemen Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat:	199-261	f. Management Discussion and Analysis Management Analysis and Discussion Annual should contain discussion and analysis on financial statements and other material information emphasizing material changes that occurred during the year under review, at least including:
1) Tinjauan operasi per segmen operasi sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	206-219	1) Operational review per business segment, according to the type of industry of the Issuer or Public Company including:
a) Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya;	207-218	a) Production, which includes process, capacity and its development;
b) Pendapatan/penjualan; dan	206	b) Income/sales; and
c) Profitabilitas;	219	c) Profitability;
2) Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai:	220-232	2) Comprehensive financial performance analysis which includes a comparison between the financial performance of the last 2 (two) fiscal years, and explanation on the causes and effects of such changes, among others concerning:
a) Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;	220-223	a) Current assets, non-current assets, and total assets;

Keterangan	Halaman Page	Description
b) Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas;	223-226	b) Short term liabilities, long term liabilities, total liabilities;
c) Ekuitas;	226	c) Equities;
d) Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan	227-229	d) Sales/operating revenues, expenses and profit (loss), other comprehensive revenues, and total comprehensive profit (loss); and
e) Arus kas;	229-232	e) Cash flows;
3) Kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	232-234	3) The capacity to pay debts by including the computation of relevant ratios;
4) Tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	234	4) Accounts receivable collectability of the Issuer or Public Company, including the computation of the relevant ratios;
5) Struktur modal (<i>capital structure</i>) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure</i>) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud;	235-236	5) Capital structure and management policies concerning capital structure, including the basis for determining the said policy;
6) Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit meliputi:	237-239	6) Discussion on material ties for the investment of capital goods, including the explanation on at least:
a) Tujuan dari ikatan tersebut;	N/R	a) The purpose of such ties;
b) Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut;	N/R	b) Source of funds expected to fulfill the said ties;
c) Mata uang yang menjadi denominasi; dan	N/R	c) Currency of denomination; and
d) Langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;	N/R	d) Steps taken by the Issuer of Public Company to protect the position of a related foreign currency against risks;
7) Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:	240-241	7) Discussion on investment of capital goods which was realized in the last fiscal year, at least include:
a) Jenis investasi barang modal;	240	a) Type of investment of capital goods;
b) Tujuan investasi barang modal; dan	240	b) Objective of the investment of capital goods; and
c) Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan;	240	c) Value of the investment of capital goods;
8) Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada);	247-248	8) Material Information and facts that occurring after the date of the accountant's report (if any);
9) Prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya;	257-261	9) Information on the prospects of the Issuer or the Company in connection with industry, economy in general, accompanied with supporting quantitative data if there is a reliable data source;
10) Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai:	243	10) Comparison between target/projection at beginning of year and result (realization), concerning:
a) Pendapatan/penjualan;	√	a) Income/sales;
b) Laba (rugi);	√	b) Profit (loss);
c) Struktur modal (<i>capital structure</i>); atau	√	c) Capital structure; or
d) Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	√	d) Others that deemed necessary for the Issuer or Public Company;
11) Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai:	244	11) Target/projection at most for the next one year of the Issuer or Public Company, concerning:
a) Pendapatan/penjualan;	√	a) Income/sales;
b) Laba (rugi);	√	b) Profit (loss);
c) Struktur modal (<i>capital structure</i>); atau	√	c) Capital structure; or
d) Kebijakan dividen; atau	√	d) Dividend policy; or
e) Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	√	e) Others that deemed necessary for the Issuer or Public Company;

Keterangan	Halaman Page	Description
12) Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar;	256-257	12) Marketing aspects of the company's products and/or services the Issuer or Public Company, among others marketing strategy and market share;
13) Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit:	245	13) Description regarding the dividend policy during the last 2 (two) fiscal years, at least:
a) Kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih;	√	a) Dividend policy, which includes information on the percentage of dividends distributed to net income;
b) Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas;	√	b) The date of the payment of cash dividend and/or date of distribution of non-cash dividend;
c) Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan	√	c) Amount of cash per share (cash and/or non cash); and
d) Jumlah dividen per tahun yang dibayar; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	√	d) The amount of dividends paid per year; Disclosure of information can be presented in table form. In the event that the Issuer or Public Company does not distribute dividends in the last 2 (two) years, this matter shall be disclosed.
14) Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, dengan ketentuan:	246	14) Use of proceeds from Public Offerings, under the condition of:
a) Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan	N/R	a) During the year under review, on which the Issuer has the obligation to report the realization of the use of proceeds, then the realization of the cumulative use of proceeds until the year end should be disclosed; and
b) Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut;	N/R	b) In the event that there were changes in the use of proceeds as stipulated in the Regulation of the Financial Services Authority on the Report of the Utilization of Proceeds from Public Offering, then Issuer should explain the said changes;
15) Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, paling sedikit memuat:	249	15) Material information (if any), among others concerning investment, expansion, divestment, acquisition, debt/capital restructuring, transactions with related parties and transactions with conflict of interest that occurred during the year under review, along others include:
a) Tanggal, nilai, dan objek transaksi;	N/R	a) Transaction date, value, and object;
b) Nama pihak yang melakukan transaksi;	252	b) Name of transacting parties;
c) Sifat hubungan Afiliasi (jika ada);	252	c) Nature of affiliate relationship (if any);
d) Penjelasan mengenai kewajaran transaksi;	252	d) Description of the fairness of the transaction;
e) Pemenuhan ketentuan terkait; dan	253	e) Compliance with related rules and regulations; and
f) Dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi:		f) In the event that there is an affiliation relationship, in addition to disclosing the information as referred to in letter a) to letter e), the Issuer or Public Company also discloses information:
(1) Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (<i>arm's length principle</i>); dan	253-254	(1) A statement from the Board of Directors that the affiliate transaction has conducted through adequate procedures to ensure that the affiliate transaction is in line with generally accepted business practices, among others, by complying with the arm's length principle; and

Keterangan	Halaman Page	Description
(2) Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (<i>arm's length principle</i>);	253-254	(2) The Board of Commissioners and the audit committee roles in carrying out adequate procedures to ensure that affiliate transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices, among others, by complying with the arm's length principle;
g) Untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan; Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut.	253	g) For affiliate transactions or material transactions which are business activities carried out in order to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously, an explanation is added that the affiliate transactions or material transactions are business activities carried out in order to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously; In the event that the affiliated transactions or material transactions referred to have been disclosed in the annual financial statements, additional information regarding the disclosure reference in the annual financial statements is added.
h) Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut;	250	h) For disclosure of affiliate transactions and/or conflict of interest transactions resulting from the implementation of affiliate transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, additional information regarding the date of the GMS which approved the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions is added;
i) Dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	250	i) in the event that there is no affiliate transaction and/or conflict of interest transaction, then this matter shall be disclosed;
16) Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan	254	16) Changes in regulation which have a significant effect on the Issuer or Public Company and impacts on the company (if any); and
17) Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada).	255	17) Changes in the accounting policy, rationale and impact on the financial statement (if any).
g. Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	262-475	g. Corporate Governance of the Issuer or Public Company Corporate Governance of the Issuer or Public Company contains at least:
1) RUPS, paling sedikit memuat:	288-304	1) GMS, at least contains:
a) Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi:	293-302	a) Information on the resolution from the AGM of the previous 1 (one) year, covering:
(1) Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan	293-294	(1) Resolutions of the GMS in the financial year and 1 (one) year before the financial year are realized in the financial year; and
(2) Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan;	N/R	(2) Resolutions of the GMS for the financial year and 1 (one) year prior to the financial year that have not been realized and the reasons for not realizing them;
b) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;		b) In the event that the Issuer or Public Company uses an independent party in GMS to calculate the votes, then this matter shall be disclosed;
2) Direksi, paling sedikit memuat:	323-343	2) The Board of Directors, covering:

Keterangan	Halaman Page	Description
a) Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel.	327-330; 333-334	a) Duties and responsibilities of each member of the Board of Directors; Information regarding the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors is described and can be presented in table.
b) Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Direksi;	323-324	b. A statement that the Board of Directors has guidelines or charter for the Board of Directors;
c) Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.	344-351	c) Policies and frequency of Board of Directors meetings, joint meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners, and the attendance of members of the Board of Directors in the meeting including attendance at the GMS; Information on the attendance of members of the Board of Directors at the meeting of the Board of Directors, joint meeting of the Board of Directors with the Board of Commissioners, or the GMS can be presented in table.
d) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi:	340-343	d) Training and/or competency of members of the Board of Directors:
(1) Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan	340	(1) Policies related to training and/or the competence improvement of members of the Board of Directors, including an orientation program for newly appointed members of the Board of Directors (if any); and
(2) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada);	342-343	(2) Training and/or competency improvement attended by members of the Board of Directors in the financial year (if any);
e) Penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat:	343	e) The Board of Directors' assessment of the committees' performance that support the implementation of the Board of Directors' duties for the financial year shall at least contain:
(1) Prosedur penilaian kinerja; dan	N/R	(1) Performance appraisal procedures; and
(2) Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan	N/R	(2) The criteria used such as performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings; and
f) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	343	f) In the event that the Issuer or Public Company does not have a committee that supports the implementation of the duties of the Board of Directors, then this shall be disclosed.
3) Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	305-322	3) The Board of Commissioners, at least contains:
a) Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;	311-314	a) Duties and responsibilities of the Board of Commissioners;
b) Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Dewan Komisaris;	305-306	b) Statement that the Board of Commissioner has already have the board manual or charter;
c) Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.	344-351	c) Policies and the frequency of the Board of Commissioners meetings, joint meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors and the attendance of members of the Board of Commissioners at the meeting including attendance at the GMS; Information on the attendance of members of the Board of Commissioners at the meeting of the Board of Commissioners, the meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors, or the GMS can be presented in table.

Keterangan	Halaman Page	Description
d) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris:	321	d) Training and/or competency improvement of members of the Board of Commissioners:
(1) Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan	321	(1) Policies on training and/or the competency improvement of members of the Board of Commissioners, including orientation programs for newly appointed members of the Board of Commissioners (if any); and
(2) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada);	321	(2) Training and/or competency improvement attended by members of the Board of Commissioners in the financial year (if any);
e) Penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	364-369	e) Performance appraisal of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners, at least contain:
(1) Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja;	364	(1) Procedure for the implementation of performance assessment;
(2) Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan	364-365	(2) The criteria used such as performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings; and
(3) Pihak yang melakukan penilaian; dan	364	3. Assessor; and
f) Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi:	322	f) The Board of Commissioners' assessment of the Committees' performance that support the implementation of the duties of the Board of Commissioners in the financial year includes:
(1) Prosedur penilaian kinerja; dan	√	(1) Performance appraisal procedures; and
(2) Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat;	√	(2) The criteria used such as performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings;
4) Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	354-359	4) The nomination and remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall at least contain:
a) Prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan	354-355	a) Nomination procedure, including a brief description of the policies and process for nomination of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and
b) Prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain:	355	b) Procedures and implementation of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners, including:
(1) Prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;	356	(1) The procedure for determining the remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners;
(2) Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan	357-358	(2) The remuneration structure of the Board of Directors and the Board of Commissioners such as salary, allowances, tantiem/bonus and others; and
(3) Besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	359	(3) The amount of remuneration for each member of the Board of Directors and member of the Board of Commissioners; Disclosure of information can be presented in table.
5) Dewan Pengawas Syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat:	N/R	5) Sharia Supervisory Board, for Issuer or Public Company that conduct business based on sharia law, as stipulated in the articles of association, at least containing:

Keterangan	Halaman Page	Description
a) Nama;	N/R	a. Name;
b) Dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah;	N/R	b) Legal basis of appointment of Sharia Supervisory Board;
c) Periode penugasan dewan pengawas syariah;	N/R	c) Term of office of Sharia Supervisory Board;
d) Tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah; dan	N/R	d) Duty and responsibility of Sharia Supervisory Board and;
e) Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik;	N/R	e) Frequency and procedure in providing advice and suggestion, as well as the compliance of Sharia Principles of the Issuer or Public Company in the Capital Market;
6) Komite Audit, mencakup antara lain:	373-383	6) Audit Committee, among others covering:
a) Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	381-383	a) Name and position in the committee;
b) Usia;	381-383	b) Age;
c) Kewarganegaraan;	381-383	c) Citizenship;
d) Riwayat pendidikan;	381-383	d) Education background;
e) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	381-383	e) History of position; including:
(1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	√	(1) Legal basis for the appointment as member of the committee;
(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	√	(2) Concurrent position, as a member of Board of Commissioners, member of Board of Directors, and/or member of the committee, and other position (if any); and
(3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	√	(3) Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
f) Periode dan masa jabatan anggota Komite Audit;	381-383	f) Period and terms of office of the member of Audit Committee;
g) Pernyataan independensi Komite Audit;	376	g) Statement of independence of the Audit Committee;
h) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada);	379	h) Training and competency development participated in during the book year (if any);
i) Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; dan	377-379	i) Policies and implementation of the frequency of meeting of the Audit Committee and attendance of member of Audit Committee; and
j) Pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Komite Audit;	379	j) The activities of the Audit Committee in the year under review, in accordance with the Audit Committee Charter;
7) Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	395	7) Committee or remuneration and nomination functions of Issuer or Public Company at least contains;
a) Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	N/R	a) Name and position in the committee;
b) Usia;	N/R	b) Age;
c) Kewarganegaraan;	N/R	c) Citizenship;
d) Riwayat pendidikan;	N/R	d) Education background;
e) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	N/R	e) History of position; including:
(1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	N/R	(1) Legal basis for the appointment as member of the committee;
(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	N/R	(2) Concurrent position, as a member of Board of Commissioners, member of Board of Directors, and/or member of the committee, and other position (if any); and
(3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	N/R	(3) Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
f) Periode dan masa jabatan anggota Komite Audit;	N/R	f) Period and terms of office of the member of Audit Committee;
g) Pernyataan independensi komite;	N/R	g) Independence statement of Audit Committee;

Keterangan	Halaman Page	Description
h) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada);	N/R	h) Training and/or competency development participated in during the book year (if any);
i) Uraian tugas dan tanggung jawab;	N/R	i) Description of Duties and Responsibilities;
j) Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>);	N/R	j) A statement that already has charter or guidelines;
k) Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut;	N/R	k) Policies and frequency of meeting and attendance level at the meeting;
l) Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan	N/R	l) Description of duties implementation during the book year; and
m) Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan:	N/R	m) In the event that nomination and remuneration committee is not formed, the Issuer or Public Company is sufficient to disclose the information as referred to in letter i) to letter l) and disclose:
(1) Alasan tidak dibentuknya komite; dan	N/R	(1) The reason why does not form the committee; and
(2) Pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi;	N/R	(2) The party who carries out the nomination and remuneration function;
8) Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	384-394	8) Other committees owned by the Issuer or Public Company in order to support the functions and duties of the Board of Directors (if any) and/or committees that support the functions and duties of the Board of Commissioners, at least contains;
a) Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	392-394	a) Name and position in the committee;
b) Usia;	392-394	b) Age;
c) Kewarganegaraan;	392-394	c) Citizenship;
d) Riwayat pendidikan;	392-394	d) Education background;
e) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	392-394	e) History of position; including:
(1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	392-394	(1) Legal basis of appointment as member of Committee;
(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	392-394	(2) Concurrent position, as a member of Board of Commissioners, member of Board of Directors, and/or member of the committee, and other position (if any); and
(3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	392-394	(3) Work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;
f) Periode dan masa jabatan anggota komite;	392-394	f) Periode and tenure of Committee member;
g) Pernyataan independensi komite;	385	g) Statement of independence of Committee;
h) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan	389	h) Training and/or Competency Development participated in during the book year (if any); and
i) Uraian tugas dan tanggung jawab;	386-387	i) Description of Duties and Responsibilities;
j) Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) komite;	384	j) Statement that already have work guideline and board charter;
k) Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan	387-389	k) Policies and frequency of meetings, and attendance level at the meetings; and
l) Uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku;	390-391	l) Description of Duties Implementation during the book year;
9) Sekretaris perusahaan, paling sedikit memuat:	396-400	9) Corporate Secretary, including:
a) Nama;	400	a) Name;

Keterangan	Halaman Page	Description
b) Domisili;	400	b) Domicile;
c) Riwayat jabatan, meliputi:	400	c) History of position, including:
(1) Dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan	400	(1) Legal basis for the appointment as Corporate Secretary; and
(2) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	400	(2) Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
d) Riwayat pendidikan;	400	d) Education background;
e) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan	399-400	e) Training and competency development participated in during the book year; and
f) Uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku;	399	f) Brief description on the implementation of duties of the Corporate Secretary in the year under review;
10) Unit audit internal, paling sedikit memuat:	401-416	10) Internal Audit Unit, among others including:
a) Nama kepala unit audit internal;	416	a) Name of Head of Internal Audit Unit;
b) Riwayat jabatan, meliputi:	416	b) History of position, including:
(1) Dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal; dan	√	(1) Legal basis for the appointment as Head of Internal Audit Unit; and
(2) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	√	(2) Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
c) Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada);	405	c) Qualification or certification as internal auditor (if any);
d) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku;	413-414	d) Training and/or Competency Development participated in during the book year;
e) Struktur dan kedudukan unit audit internal;	404	e) Structure and position of Internal Audit Unit;
f) Uraian tugas dan tanggung jawab;	406-407	f) Description of duties and responsibilities;
g) Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) unit audit internal; dan	401-402	g) a statement that the Internal Audit Unit has already had Internal Audit Unit charter; and
h) Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit;	412-413	h) Brief description of the duties implementation of the internal audit unit in the financial year including the policy and implementation of the frequency of meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or audit committee;
11) Uraian mengenai sistem pengendalian internal (<i>internal control</i>) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	417-422	11) Description on internal control system adopted by the Issuer or Public Company, at least covering:
a) Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; dan	417-418	a) Financial and operational control, and compliance to the other prevailing rules; and
b) Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; dan	422	b) Review on the effectiveness of internal control systems; and
c) Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal;	422	c) Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system;
12) Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	423-443	12) Risk management system implemented by the company, at least includes:
a) Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik;	423	a) General description about the company's risk management system the Issuer or Public Company;
b) Jenis risiko dan cara pengelolannya;	429-433	b) Types of risk and the management;
c) Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; dan	442	c) Review the effectiveness of the risk management system applied by the Issuer or Public Company; and

Keterangan	Halaman Page	Description
d) Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko;	443	d) Statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners or the audit committee on the adequacy of the risk management system;
13) Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), paling sedikit memuat:	443	13) Legal cases that have a material impact faced by Issuers or Public Companies, subsidiaries, members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners (if any), at least contain:
a) Pokok perkara/gugatan;	N/R	a) Substance of the case/claim;
b) Status penyelesaian perkara/gugatan; dan	N/R	b) Status of settlement of case/claim; and
c) Pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik;	N/R	c) Potential impacts on the condition of the Issuer or Public Company;
14) Informasi tentang sanksi administratif/ sanksi yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada);	443	14) Information about administrative sanctions imposed to Issuer or Public Company, members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, by the Capital Market Authority and other authorities during the last fiscal year (if any);
15) Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi:	446-450	15) Information about codes of conduct of the Issuer or Public Company, includes:
a) Pokok-pokok kode etik;	447	a) Key points of the code of conduct;
b) Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan	448	b) Socialization of the code of conduct and enforcement; and
c) Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;	448	c) Statement that the code of conduct is applicable for the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees of the Issuer of Public Company;
16) Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (<i>management stock ownership program/ MSOP</i>) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (<i>employee stock ownership program/ESOP</i>); Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (<i>management stock ownership program/MSOP</i>) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (<i>employee stock ownership program/ESOP</i>), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat:	464	16) A brief description of the policy for providing long-term performance-based compensation to management and/or employees owned by the Issuer or Public Company (if any), including the management stock ownership program (ESOP) and/or program employee stock ownership (ESOP); In terms of providing compensation in the form of a management stock ownership program (ESOP) and/or employee stock ownership program (ESOP), the information disclosed must at least contain:
a) Jumlah saham dan/atau opsi;	N/R	a) Number of share and/or option;
b) Jangka waktu pelaksanaan;	N/R	b) Period;
c) Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan	N/R	c) The requirement for eligible employee and/ or management; and
d) Harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan;	N/R	d) exercised price;
17) Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai:	N/R	17) Description of employee or management stock ownership program of the Issuer or Public Company, among others contains:
a) Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; dan	N/R	a) Share ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners no later than 3 (three) working days after the occurrence of ownership or any change in ownership of shares of a Public Company; and
b) Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud;	N/R	b) Implementation of that policy;
18) Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>) di Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	452-462	18) A description of whistleblowing system at the Issuer or Public Company, among others include:
a) Cara penyampaian laporan pelanggaran;	453-454	a) Mechanism for violation reporting;
b) Perlindungan bagi pelapor;	461	b) Protection for the whistleblower;

Keterangan	Halaman Page	Description
c) Penanganan pengaduan;	455-456	c) Handling of violation reports;
d) Pihak yang mengelola pengaduan; dan	454-455	d) Unit responsible for handling of violation report; and
e) Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit:	462	e) Results from violation report handling, at least includes:
(1) Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan	√	(1) Number of complaints received and processed during the fiscal year; and
(2) Tindak lanjut pengaduan;	√	(2) Follow up of complaints;
Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>), maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		In the event that the Issuer or Public Company does not have a whistleblowing system, it is disclosed regarding this matter
19) Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	465-469	19) A description of the anti-corruption policy of the Issuer or Public Company, at least contains;
a) Program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (<i>kickbacks</i>), fraud, suap dan/ atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan	465-466	a) Programs and procedures implemented in overcoming corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery and/or gratuities in Issuers or Public Companies; and
b) Pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud.	468	b) Anti-corruption training/socialization to employees of Issuers or Public Companies; In the event that the Issuer or Public Company does not have an anti-corruption policy, the reasons for not having the said policy are explained.
20) Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi:	278-286	20) Implementation of the Guidelines of Corporate Governance for Public Companies for Issuer issuing Equity-based Securities or Public Company, including:
a) Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau	283-285	a) Statement regarding the recommendation that has been implemented; and/or
b) Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada);	283-285	b) Description of recommendation that has not been implemented, along with the reason and alternatives of implementation (if any);
Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	√	Disclosure of information can be presented in table.
h. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik	498	h. Social and Environmental Responsibility of the Issuer or Public Company
1) Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:		1) Information disclosed in the social and environmental responsibility section is a Sustainability Report as referred to in the Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, containing at least :
a) Penjelasan strategi keberlanjutan;	498	a) Sustainability strategy explanation;
b) Ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup);	498	b) Sustainability aspects overview (economic, social and environmental);
c) Profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik;	498	c) Brief Profile of Issuers or Public Company;
d) Penjelasan Direksi;	498	d) The Board of Directors explanation;
e) Tata kelola keberlanjutan;	498	e) Sustainability Governance;
f) Kinerja keberlanjutan;	498	f) Sustainability performance;
g) Verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada;	498	g) Written verification from an Independent Party (if any);
h) Lembar umpan balik (<i>feedback</i>) untuk pembaca, jika ada; dan	498	h) Feedback sheet for stakeholders (if any);
i) Tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya;	498	i) The Issuer or Public Company response to the previous year's report feedback;

Keterangan	Halaman Page	Description
2) Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;	√	2) The Sustainability Report as referred to in number 1) must be prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of a Sustainability Report for Issuers and Public Companies as contained in Attachment II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter;
3) Informasi Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) pada angka 1) dapat:	√	3) Information on the Sustainability Report in number 1) shall be;
a) Diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi; dan/atau	√	a) Is disclosed in other relevant sections outside of the social and environmental responsibility section, such as the Directors' explanation regarding the Sustainability Report disclosed in the section related to the Directors' Report; and/or
b) Merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik;	√	b) Referring to other sections outside the social and environmental responsibility section while still referring to the Technical Guidelines for the Preparation of Sustainability Reports for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter, such as profile of Issuer or Public Company;
4) Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan;	√	4) The Sustainability Report as referred to in number 1) is an inseparable part of the Annual Report but can be presented separately from the Annual Report;
5) Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus:	√	5) In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, the information disclosed in the said Sustainability Report must:
a) Memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan	√	a) Contains all the information as referred to in number 1); and
b) Disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;	√	b) Compiled according to the Technical Guidelines for the Preparation of a Sustainability Report for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter;
6) Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan; dan	√	6) In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, then the social and environmental responsibility section contains information that information regarding social and environmental responsibility has been disclosed in the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report; and
7) Penyampaian Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.	√	7) Submission of the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report must be submitted together with the submission of the Annual Report.

Keterangan	Halaman Page	Description
<p>i. Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan keuangan tahunan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai laporan berkala perusahaan efek dalam hal Emiten merupakan perusahaan efek.</p>	547-617	<p>i. Audited Financial Statements The annual financial statements contained in the Annual Report are prepared in accordance with financial accounting standards in Indonesia and have been audited by a public accountant registered with the Financial Services Authority. The said annual financial report contains a statement regarding the accountability for financial statements as regulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the Board of Directors' responsibility for financial reports or the laws and regulations in the capital market sector which regulates the periodic reports of securities companies in the event that the Issuer is a securities company.</p>
<p>j. Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.</p>	501-503	<p>j. Statement Letter of Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners regarding Responsibility for the Annual Report Statement letters from members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners regarding responsibilities for the Annual Report are prepared in accordance with the format of Statement Letters from Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners regarding Responsibilities for the Annual Report as contained in Appendix I which is an integral part of this Circular Letter of the Financial Services Authority.</p>

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

Kriteria **Annual Report Award**

Annual Report Award Criteria

Kriteria Annual Report Awards

Annual Report Award Criteria

Keterangan	Halaman Page	Description
I. Umum		I. General
1. Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris.	√	1. The Annual Report shall be written in good and correct Indonesian, and is recommended to be presented in English.
2. Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca..	√	2. The Annual Report shall be printed with good quality using readable type and size of fonts.
3. Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas Nama perusahaan dan tahun annual report ditampilkan di:	√	3. The Annual Report shall present clear identity of the company name and the annual report financial year shall be presented on:
1. Sampul muka;	√	1. Front Cover;
2. Samping;	√	2. Side Cover;
3. Sampul belakang; dan	√	3. Back Cover; and
4. Setiap halaman.	√	4. Every page
4. Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan, mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir.	√	4. Annual reports shall be displayed on the company's website, including the latest annual reports and at least the last 4 years.
II. Ikhtisar Data Keuangan Penting	12-16	II. Key Financial Highlights
1. Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun.	14	1. Income statement in comparison for 3 (three) financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years.
Informasi memuat antara lain:		Information contains the following:
1. Penjualan/pendapatan usaha;	14	1. Front Cover;
2. Laba (rugi):	14	2. Profit (loss):
a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan	N/R	a. Attributable to equity holders of the parent entity; and
b. Diatribusikan kepada kepentingan non pengendali;	N/R	b. Attributable to non controlling interest;
3. Penghasilan komprehensif periode berjalan:	14	3. Total comprehensive profit (loss):
a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan	N/R	a. Attributable to equity holders of the parent entity; and
b. Diatribusikan kepada kepentingan non pengendali;	N/R	b. Attributable to non controlling interest;
4. Laba (rugi) per saham.	N/R	4. Earning (loss) per share.
Catatan: Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, perusahaan menyajikan laba (rugi) dan penghasilan komprehensif periode berjalan secara total.	√	Note: If the company does not have subsidiaries, the profit (loss) and other comprehensive income is presented in total.
2. Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun.	12-13	2. Financial position in comparison for 3 (three) financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years.
Informasi memuat antara lain:		Information contains the following:
1. Jumlah investasi pada entitas asosiasi;	12	1. Total investment on associates;
2. Jumlah aset;	12	2. Total assets
3. Jumlah liabilitas; dan	13	3. Total liabilities; and
4. Jumlah ekuitas.	13	4. Total equity.

Keterangan	Halaman Page	Description
3. Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun.	15	3. Financial ratio in comparison for 3 (three) financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years.
Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan.	15	Information covers 5 (five) financial ratios, which are generally applied and relevant to the company's industry.
4. Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik	17	4. Share price information in tables and charts
1. Jumlah saham yang beredar;	N/R	1. Number of shares outstanding;
2. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat:		2. The table forms contain the following information:
a. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;	N/R	a. Market capitalization based on the share price on the Stock Exchange where the share are listed;
b. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan	N/R	b. Highest, lowest and closing the share price based on share price on the Stock Exchange where the share are listed; and
c. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan.	N/R	c. Trading volume of shares on the Stock Exchange where the shares are listed.
3. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang:		3. The graph forms contain at least the following information:
a. Harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan	N/R	a. The closing price of shares based on the share price on the Stock Exchange where the shares are listed; and
b. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan.	N/R	b. Trading volume of shares on the Stock Exchange where the shares are listed
Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kapitalisasi pasar, informasi harga saham, dan volume perdagangan saham, agar diungkapkan.	17	Note: Should be disclosed if the company does not have market capitalization, share price, and share trading volume.
5. Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir.	17	5. Information regarding outstanding bonds, sukuk or convertible bonds, in 2 (two) latest financial years.
Informasi memuat:		Information contains:
1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (<i>outstanding</i>);	N/R	1. Number of outstanding bonds, sukuk or convertible bonds;
2. Tingkat bunga/imbalan;	N/R	2. Interest rate/yield;
3. Tanggal jatuh tempo; dan	N/R	3. Maturity date; and
4. Peringkat obligasi/sukuk tahun 2018 dan 2019.	N/R	4. Rating of bonds/sukuk in 2018 and 2019.
Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/sukuk/obligasi konversi, agar diungkapkan.	17	Note: Should be disclosed if the company does not have outstanding bonds, sukuk or convertible bonds.
III. Laporan Manajemen		III. Management Report
1. Laporan Dewan Komisaris	39-51	1. Board of Commissioners' Report
Informasi memuat:		Information contains:
1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya;	40-43	1. Assessment on the performance of the Board of Directors in managing the company and the basis for such evaluation;
2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya;	43-44	2. Views on the business prospects of the company as prepared by the Board of Directors and the basis for such consideration;
3. Pandangan atas penerapan/pengelolaan <i>whistle blowing system</i> (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut; dan	45-46	3. Views on the implementation/management of the company's whistleblowing system (WBS), and the role of the Board of Commissioners in the WBS; and
4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya.	49-50	4. Changes in the composition of the Board of Commissioners (if any) and the reason for such changes.
2. Laporan Direksi	52-75	2. Board of Directors' report
Memuat hal-hal sebagai berikut:		Contain the following:
1. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain:	57-69	1. Analysis of the company's performance, covering among others:

Keterangan	Halaman Page	Description
a. Kebijakan strategis;	60-64	a. Strategic policies;
b. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan	64-65	b. Comparison between targets and achievements; and
c. Kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dan langkah-langkah penyelesaiannya;	65-69	c. Challenges faced by the company and initiatives to deal with those challenges;
2. Analisis tentang prospek usaha;	71-74	2. Analysis on business prospects;
3. Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan pada tahun buku; dan	69-70	3. Developments in the implementation of GCG during the fiscal year; and
4. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya.	71	4. Changes in the composition of the Board of Directors (if any) and the reason for such changes.
3. Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi	501-503	3. Signatures of members of the Board of Commissioners and Board of Directors
Memuat hal-hal sebagai berikut:		Contain the following:
1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri;	501-503	1. Signatures on a separate page;
2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan;	501-503	2. Statement of responsibility of the Board of Commissioners and Board of Directors for the accuracy of the contents of the Annual Report;
3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan	501-503	3. Signed by all members of the Board of Commissioners and Board of Directors by stating their names and position; and
4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.	501-503	4. Written explanation in a separate letter from the person(s) concerned in the event that member(s) of Board of Commissioners or Board of Directors fail to sign the annual report; or: written explanation a separate letter from other member(s) in the event that there is no written explanation from the person(s) concerned.
IV. Profil Perusahaan	76-196	IV. Company Profile
1. Nama dan alamat lengkap perusahaan	78-79	1. Name and address of the company
Informasi memuat antara lain: nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan website.	78-79	Information contains, among others, name and address, postcode, telephone number, fax, email and website.
2. Riwayat singkat perusahaan	80-84	2. Brief history of the company
Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan.	80-84	Contain among others: date/year of establishment, name of the company, change of name (if any), and effective date of the change of name.
Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan.	84	Note: to be disclosed if the company never had a change of name
3. Bidang usaha	93-98	3. Line of business
Uraian mengenai antara lain:		Description of, among others:
1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir;	93-98	1. The line of business as stated in the latest Articles of Association;
2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan	93-98	2. Business activities; and
3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.	93-98	3. Product and/or services offered.
4. Struktur Organisasi	104-105	4. Organization structure
Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah Direksi.	104-105	Diagram of organization structure, containing name and position of personnel up to one level below Director, at least
5. Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan Mencakup:	85-92	5. Vision, Mission and Corporate Culture Covers:
1. Visi perusahaan;	86	1. Vision;
2. Misi perusahaan;	86	2. Mission;
3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah di-review dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris pada tahun buku; dan	86	3. Statement that the vision and mission have been reviewed and approved by the Board of Commissioners/ Directors in the fiscal year; and
4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>) yang dimiliki perusahaan.	85; 87-90	4. Statement on the corporate culture.

Keterangan	Halaman Page	Description
6. Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris	108-115	6. Profiles of members of the Board of Commissioners
Informasi memuat antara lain:		Contain information on:
1. Nama;	√	1. Name;
2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain);	√	2. Position and period in position (including position(s) held at other company/institution);
3. Umur;	√	3. Age;
4. Domisili;	√	4. Domicile;
5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan);	√	5. Education (study field and education institution);
6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan	√	6. Work experience (position, company, and period in position); and
7. Riwayat penunjukan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	√	7. History of assignments (period and position) as a member of the Board of Commissioners at the company since the first appointment.
7. Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi Informasi memuat antara lain:	118-124	7. Profiles of members of the Board of Directors Contain information on:
1. Nama;	√	1. Name;
2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain);	√	2. Position and period in position (including position(s) held at other company/institution);
3. Umur;	√	3. Age;
4. Domisili;	√	4. Domicile;
5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan);	√	5. Education (study field and education institution);
6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan	√	6. Work experience (position, company, and period in position); and
7. Riwayat penunjukan (periode dan jabatan) sebagai anggota Direksi di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	√	7. History of assignments (period and position) as member of the Board of Directors at the company since the first appointment.
8. Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan data pengembangan kompetensi karyawan yang mencerminkan adanya kesempatan untuk masing-masing level organisasi.	145-147	8. Total number of employees (comparative for 2 years) and data on employee competence development programs reflecting equal opportunities for each level of the organization.
Informasi memuat antara lain:		Information contains, among others:
1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi;	146	1. Number of employees at each level of the organization;
2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan;	146	2. Number of employees by education;
3. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian;	146	3. Number of employees by employment status;
4. Data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan; dan	147-167	4. Data on employee competence development programs during the fiscal year, concerning the position of participants, type of training, and purpose of training; and
5. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku.	167	5. The costs of employee competence development programs in the fiscal year.
9. Komposisi Pemegang saham	184-187	9. Shareholders composition
Mencakup antara lain:		Covering among others:
1. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya;	184	1. Names of the 20 largest shareholders and their shareholding percentage;
2. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi:		2. Details of shareholders and shareholding percentage:
a. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham; dan	184-185	a. Names of shareholders with 5% or more shareholding; and
b. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%.	185	b. Group of public shareholders with individual shareholding of less than 5% each.

Keterangan	Halaman Page	Description
3. Saham yang dimiliki Direksi dan Komisaris	185	3. Share own by the Board of Directors and the Board of Commissioners
Catatan: apabila Direktur dan Komisaris tidak memiliki saham langsung dan tidak langsung, agar diungkapkan.	185	Note: should be disclosed if the Director and Commissioner does not own shares, directly or indirectly.
10. Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi	187	10. List of subsidiaries and/or associated entities
Dalam bentuk tabel memuat informasi antara lain:		In table form, containing:
1. Nama entitas anak dan/atau asosiasi;	187	1. Name of subsidiary and/or associated entity;
2. Persentase kepemilikan saham;	187	2. Share-ownership percentage;
3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan	187	3. Line of business of subsidiary and/or associated entity; and
4. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).	187	4. The operational status of subsidiary and/or associated entity (in commercial operation/not yet in commercial operation).
11. Struktur grup perusahaan	188	11. Corporate group structure
Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi, <i>joint venture</i> , dan <i>special purpose vehicle</i> (SPV).	188	Diagram of corporate group structure involving relationship of the parent company, subsidiary, associated entity, joint venture, and special purpose vehicle (SPV).
12. Kronologi penerbitan saham (termasuk <i>private placement</i>) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku	188-189	12. Chronology of share listing (including private placement) and/or share listing from the share issuance up to the end of the fiscal year
Mencakup antara lain:		Covers, among others:
1. Tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (<i>corporate action</i>);	N/R	1. Year of share issuance, number of shares issued, par value, and share offer price, for each separate corporate action;
2. Jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (<i>corporate action</i>); dan	N/R	2. Total number of shares outstanding following the corporate action; and
3. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan.	N/R	3. The stock exchange where the shares are listed.
Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham, agar diungkapkan.	188-189	Note: should be disclosed if the company does not have the chronology of share listing.
13. Kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku	189	13. Chronology of other securities issuance and/or listing from the time of issuance up until the end of the fiscal year
Mencakup antara lain:	N/R	Covers, among others:
1. Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya;	N/R	1. Name of security instrument, year of issuance, interest rate/yield of securities, and maturity date;
2. Nilai penawaran efek lainnya;	N/R	2. Offering price of other securities;
3. Nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan; dan	N/R	3. The stock exchange where the securities are listed; and
4. Peringkat efek.	N/R	4. Rating of securities.
Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham, agar diungkapkan.	188-189	Note: should be disclosed if the company does not have the chronology of share listing.
14. Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang	189-193	14. Name and address of supporting institutions and/or professionals
Mencakup antara lain:		Covering among others:
1. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan;	N/R	1. Name and address of the company's Share Registrar;
2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan	192	2. Name and address of Public Accountant Firm; and
3. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek.	N/R	3. Name and address of rating agencies.
15. Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional	29-34	15. Awards received during the fiscal year, or valid certification in the fiscal year, at both national and international levels
Informasi memuat antara lain:		Information covers, among others:
1. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi;	√	1. Name of award and/or certification;

Keterangan	Halaman Page	Description
2. Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi;	√	2. Year received/issued;
3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi; dan	√	3. Name of institution that issued the award/certification; and
4. Masa berlaku (untuk sertifikasi).	√	4. Validity period (certification).
16. Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada)	187	16. Name and address of subsidiaries and/or branch offices or representative offices (if any)
Informasi memuat antara lain:		Information covers, among others:
1. Nama dan alamat entitas anak; dan	√	1. Name and address of subsidiaries; and
2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan.	N/R	2. Name and address of branch/representative office.
Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan.	187	Note: should be disclosed if the company does not have a subsidiary, branch office or representative office.
17. Informasi pada Website Perusahaan	195-196	17. Information in the corporate website
Meliputi paling kurang:		Covers at the very least:
1. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu;	√	1. Information of shareholders up to the individual ultimate shareholder;
2. Isi Kode Etik;	√	2. Contents of the Code of Conduct;
3. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan;	N/R	3. Information on the General Meeting of Shareholders (GMS), covering at least agenda of the GMS, the summary of GMS resolutions, and information of pertinent dates, namely the dates of GMS announcement, GMS invitation, GMS event, an announcement of summary GMS resolutions;
4. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir);	N/R	4. Annual financial statements (last 5 years);
5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi; dan	√	5. Profiles of the Board of Commissioners and Directors; and
6. Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komitekomite, dan Unit Audit Internal.	√	6. Board manual/Charter of the BoC, BoD, Committees and Internal Audit Unit.
18. Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal		18. Training and education for Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit
Meliputi paling kurang informasi (jenis dan pihak yang relevan dalam mengikuti):		Cover at least information of type of training and participant of:
1. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan Komisaris;	321	1. Training and/or education for Board of Commissioners;
2. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Direksi;	340-343	2. Training and/or education for Board of Directors;
3. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Audit;	379	3. Training and/or education for Audit Committee;
4. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi;	N/R	4. Training and/or education for Nomination and Remuneration Committee;
5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi; dan	108-125	5. Profiles of Board of Commissioners and Board of Directors; and
6. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan; dan	399-400	6. Training and/or education for Corporate Secretary; and
7. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Unit Audit Internal. yang diikuti pada tahun buku.	413-414	7. Training and/or education for Internal Audit Unit. During the fiscal year.
Catatan: apabila tidak terdapat pendidikan dan/atau pelatihan pada tahun buku, agar diungkapkan	√	Note: should be disclosed if there are no training and/or education during the fiscal year
V. Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan		V. Management Discussion and Analysis on the Company Performance
1. Tinjauan operasi per segmen usaha	206-219	1. Operation review per business segment
Memuat uraian mengenai:		Includes analysis on:
1. Penjelasan masing-masing segmen usaha.	207-218	1. Elaboration on each business segment.
2. Kinerja per segmen usaha, antara lain:	207-218	2. Performance of each business segment, among others:

Keterangan	Halaman Page	Description
a. Produksi;	207-218	a. Production;
b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi;	207; 209-211	b. Increase/Decrease of production capacity;
c. Penjualan/pendapatan usaha; dan	206	c. Sales/income; and
d. Profitabilitas.	219	d. Profitability.
2. Uraian atas kinerja keuangan perusahaan	220-232	2. Description on the Company's financial performance
Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan suatu akun (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai:		An analysis comparing the performance of the current year and that of the previous year (in the form of narration and tables) and the reasons for the increase/decrease of the accounts, including in:
1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;	220-223	1. Current assets, non-current assets, and total assets;
2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas;	223-226	2. Current liabilities, Non-current liabilities, and total liabilities;
3. Ekuitas;	226	3. Equity;
4. Penjualan/pendapatan usaha, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan penghasilan komprehensif periode berjalan; dan	227-229	4. Sales/operating revenues, expenses, Profit (Loss), other comprehensive income, comprehensive income for the current year; and
5. Arus kas.	229-232	5. Cash flows.
3. Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan	232-234	3. Discussion and analysis on solvability and level of the company receivables collectibility, by presenting relevant ratio calculation in line with the company's type of industry
Penjelasan tentang:		Explanation on:
1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan	232-234	1. Solvability, both short term and long term; and
2. Tingkat kolektibilitas piutang.	234	2. Level of receivables collectibility.
4. Bahasan tentang struktur modal (<i>capital structure</i>) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policy</i>)	235-236	4. Discussion on capital structure and Capital Structure Policy
Penjelasan tentang:		Explanation on:
1. Rincian struktur modal (<i>capital structure</i>) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas;	235	1. Details of capital structure comprising of interestbearing debts/sukuk and equity;
2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policies</i>); dan	235	2. Capital structure policies; and
3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen atas struktur modal.	235	3. Basis for the determination of capital structure policies.
5. Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir	237-239	5. Discussion on material commitments of capital investments (instead of funding commitments) in the last fiscal year
Penjelasan tentang:		Explanation on:
1. Nama pihak yang melakukan ikatan;	N/R	1. Parties in the commitments;
2. Tujuan dari ikatan tersebut;	N/R	2. Objectives of the commitments;
3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut;	N/R	3. Sources of funds to meet the commitments;
4. Mata uang yang menjadi denominasi; dan	N/R	4. Denomination currency of commitments; and
5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.	N/R	5. Initiatives taken to mitigate exchange rate risk.
Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.	237	Note: should be disclosed if the company does not have any material commitment to capital investments in the fiscal year.
6. Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir	240-241	6. Discussion on capital investment realized at the latest financial year
Penjelasan tentang:		Explanation on:
1. Jenis investasi barang modal;	240	1. Type of capital investment;

Keterangan	Halaman Page	Description
2. Tujuan investasi barang modal; dan	240	2. Objectives of capital investment; and
3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir.	240	3. The nominal value of capital investment realized in the last fiscal year.
Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.		Note: should be disclosed if there are no capital investment.
7. Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan.	243-244	7. Information on the comparison between initial target at the beginning of the financial year and the realization and target or the projection for the next year concerning income, profit, capital structure, and others considered a significant target for the company.
Informasi memuat antara lain:		Contain information on:
1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); dan	243	1. Comparison of targets at the beginning of fiscal year and achievements; and
2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang.	244	2. Targets or projections set for the next 1 (one) year.
8. Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan	247-248	8. Information and material facts following the date of accounting report (Subsequent events)
Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.	248	Description of significant events following the date of accounting report including its impact on business risk and performance in the future.
Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan.		Note: should be disclosed if there are no subsequent events.
9. Uraian tentang prospek usaha perusahaan	257-261	9. Description about Company's Business prospects
Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.	257-261	The description of on business prospects related to the general industry and economy including quantitative supporting data from reliable resources
10. Uraian tentang aspek pemasaran	256-257	10. Description about Marketing Aspects
Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar	256-257	The description of on marketing aspects of the company's products and/or services, among others marketing strategy and market shares
11. Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir	245	4. The description of on dividend policy and total cash dividend per share and total dividend per year that are published or disbursed during last 2 (two) financial years
Memuat uraian mengenai:		Contain information on:
1. Kebijakan pembagian dividen;	√	1. Dividend payout policy;
2. Total dividen yang dibagikan;	√	2. Total dividend disbursement;
3. Jumlah dividen kas per saham;	√	3. Total cash dividend per share;
4. <i>Payout ratio</i> ; dan	√	4. Payout ratio; and
5. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas untuk masing-masing tahun.	√	5. Announcement date and cash dividend payout for each year.
Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.		Note: To disclose if there are no dividend disbursement and its reasons.
12. Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP) yang masih ada sampai tahun buku	249	12. Employee/Management Share Ownership Program (ESOP/MSOP) still ongoing in the fiscal year
Memuat uraian mengenai:		Contain information on:
1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya;	N/R	1. Number of ESOP/MSOP shares and its execution;
2. Jangka waktu;	N/R	2. Period;
3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan	N/R	3. Eligible employee/management; and
4. <i>Harga exercise</i> .	N/R	4. Exercise price.
Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan.	249	Note: should be disclosed if there are no such programs
13. Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)	246	13. Realization of initial public offering proceeds (in the event of the company is obligated to submit the report)

Keterangan	Halaman Page	Description
Memuat uraian mengenai:	N/R	Contain information on:
1. Total perolehan dana;	N/R	1. Total proceeds;
2. Rencana penggunaan dana;	N/R	2. Proceeds utilization plan;
3. Rincian penggunaan dana;	N/R	3. Proceeds utilization details;
4. Saldo dana; dan	N/R	4. Proceeds balance; and
5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada).	N/R	5. The date of GMS/GMB resolution on the change of proceeds utilization (if any).
Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan.	246	Note: should be disclosed if there are no such information of realization of proceeds of public offering.
14. Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi	250-254	14. Material transaction information with conflict of interest and/or transaction with related parties
Memuat uraian mengenai:		Contain information on:
1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi;	252	1. Name of transacting parties and the nature of related parties;
2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi;	252	2. Description of the transaction fairness;
3. Alasan dilakukannya transaksi;	253	3. Transaction background;
4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir;	253	4. Transaction realization at the last financial year;
5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme <i>review</i> atas transaksi; dan	253-254	5. Company policy related with transaction review mechanism; and
6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait.	253	6. Compliance to relevant regulations and provisions.
Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan.	250	Note: To disclose if there are no transactions.
15. Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir	254	15. Description on changes in laws and regulations during the fiscal year that impacted on the company
Uraian memuat antara lain:		Name of regulations; and
1. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan	N/R	1. Name of regulations; and
2. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan.	N/R	2. The impact (quantitative and/or qualitative) on the company (if significant or statement that this impact not significant).
Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	254	Note: To disclose if there are no changes in the laws and regulations that have significant impacts
16. Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir	255	16. Description on the changes in accounting policy implemented by the company at the last financial year
Uraian memuat antara lain:		Descriptions include among others:
1. Perubahan kebijakan akuntansi;	√	1. Changes in accounting policy;
2. Alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan	√	2. Reasons for the change; and
3. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan.	√	3. Quantitative impact on the financial statements.
Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.		Note: To disclose if there are no changes in accounting policies during the fiscal year
17. Informasi kelangsungan usaha Pengungkapan informasi mengenai:	261	17. Information on business continuity Disclosures on:
1. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir;	√	1. Significant issues on the company business continuity at the last financial year;
2. <i>Assessment</i> manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan	√	2. Management assessment on point 1; and
3. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan <i>assessment</i> .	√	3. Assumption implemented by the management in conducting the assessment.

Keterangan	Halaman Page	Description
Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir.	√	Note: if there are no issues that potentially have significant influences to the company's business continuity at the last financial year, to disclose the basis of management assumption in ensuring that there are no issues that potentially have significant influences on the company's business continuity at the last financial year.
VI. Good Corporate Governance		VI. Good Corporate Governance
1. Uraian Dewan Komisaris	305-322	1. Description of the Board of Commissioners
Uraian memuat antara lain:		Covers the following:
1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris;	311-316	1. Board of Commissioners responsibilities;
2. Penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dan dasar penilaiannya; dan	322	2. Assessment of performance of committees under the Board and the basis for such assessment; and
3. Pengungkapan mengenai <i>Board Charter</i> (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris).	305-306	3. Board Charter disclosures (Board of Commissioners work guidelines and procedures).
2. Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris)	308-309	2. Independent Commissioners (at least 30% of the total personnel of the Board of Commissioners)
Meliputi antara lain:		Covers the following:
1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan	309	1. Assignment criteria of Independent Commissioners; and
2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen.	309	2. Independence statement of each Independent Commissioner.
3. Uraian Direksi	323-344	3. Description of the Board of Directors
Meliputi antara lain:		Covers the following:
1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;	333-334	1. Duties and responsibilities of each member of the Board of Directors;
2. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada); dan	344	2. Assessment of performance of committees under the Board (if any); and
3. Pengungkapan mengenai <i>Board Charter</i> (pedoman dan tata tertib kerja Direksi)	323-324	3. Board Charter disclosures (Board of Directors work guidelines and procedures)
4. Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2022 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi	278-286	4. GCG implementation assessment for 2022, at least for aspects of the Board of Commissioners and/or Board of Directors
Memuat uraian mengenai:		Covers the following:
1. Kriteria yang digunakan dalam penilaian;	278-280	1. Assessment criteria;
2. Pihak yang melakukan penilaian;	278	2. Assessor;
3. Skor penilaian masing-masing kriteria;	280	3. Assessment score on each criteria;
4. Rekomendasi hasil penilaian; dan	280-285	4. Recommendations on results of assessment; and
5. Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi.	283-285	5. Reasons for the delay or non implementation of such recommendations.
Catatan: apabila tidak ada penilaian penerapan GCG untuk tahun buku 2021, agar diungkapkan.	N/R	Note: should be disclosed if there are no GCG assessment for fiscal 2021.
5. Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi	354-359	5. Description of the remuneration policy for the Board of Commissioners and Board of Directors
Mencakup antara lain:		Covers the following:
1. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Dewan Komisaris;	354-356	1. Disclosure of procedure for the proposal and determination of remuneration for the Board of Commissioners;
2. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Direksi;	354-356	2. Disclosure of procedure for the proposal and determination of remuneration for the Board of Directors;
3. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris;	357-358	3. Remuneration structure showing the remuneration components and amounts per component for each member of the Board of Commissioners;
4. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Direksi;	357-358	4. Remuneration structure showing the remuneration components and amounts per component for each member of the Board of Directors;

Keterangan	Halaman Page	Description
5. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi; dan	356-357	5. Disclosure of indicators for the remuneration of the Board of Directors; and
6. Pengungkapan bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/atau opsi saham yang diterima masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi (jika ada).	357	6. Disclosure of performance bonus, nonperformance bonus, and/or share option received by each members of the Board of Commissioners and Directors (if any).
Catatan: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan.	N/R	Note: should be disclosed if there are no performance bonus, non-performance bonus, and/or share option received by each members of the Board of Commissioners and Directors.
6. Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat yang dihadiri mayoritas anggota pada rapat Dewan Komisaris (minimal 1 kali dalam 2 bulan), Rapat Direksi (minimal 1 kali dalam 1 bulan), dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (minimal 1 kali dalam 4 bulan)	344-351	6. Meeting frequency and attendance of Board of Commissioners (at least once in 2 months), Board of Directors (at least once in a month), and joint meetings of BoC and BoD (at least once in 4 months)
Informasi memuat antara lain:		Covers among others:
1. Tanggal Rapat;	√	1. Date;
2. Peserta Rapat; dan	√	2. Attendance; and
3. Agenda Rapat. untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan.	√	3. Agenda. Of each of the meetings of BoC, BoD and Joint Meetings of BoC and BoD.
7. Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu.	183-186	7. Information on majority and controlling shareholders, direct or indirect, up to the ultimate individual shareholder.
Dalam bentuk skema atau diagram yang memisahkan pemegang saham utama dengan pemegang saham pengendali.	183 ; 186	Diagram with separate illustration for majority shareholders and controlling shareholders
Catatan: yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali.	183-186	Note: majority shareholders are parties that own, directly or indirectly, at least 20% of the voting rights of the total share with voting rights issued by the company, but is not the controlling shareholder
8. Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali	363	8. Disclosure of affiliation between members of the Board of Directors, Board of Commissioners and Majority/Controlling Shareholders
Mencakup antara lain:		Covers among others:
1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya;	√	1. The affiliation between a member of the Board of Directors with fellow members of the Board of Directors;
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;	√	2. The affiliation between a member of the Board of Directors with members of the Board of Commissioners;
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali;	√	3. The affiliation between a member of the Board of Directors with Majority and/or Controlling Shareholder;
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan	√	4. The affiliation between a member of the Board of Commissioners with fellow members of the Board of Commissioners; and
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.	√	5. The affiliation between a member of the Board of Commissioners with Majority and/or Controlling Shareholder.
Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan.	√	Note: should be disclosed if there is no affiliation relationship
9. Komite Audit	373-383	9. Audit Committee
Mencakup antara lain:		Covers among others:
1. Nama, jabatan, dan periode jabatan anggota komite audit;	381-383	1. Name, position and tenure of audit committee members;
2. Riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) anggota komite audit;	381-383	2. Education qualifications (study field and institution) and work experience (position, company and tenure) of audit committee members;
3. Independensi anggota komite audit;	376	3. Independency of audit committee members;
4. Uraian tugas dan tanggung jawab;	376-377	4. Duties and responsibilities;

Keterangan	Halaman Page	Description
5. Uraian pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku; dan	379	5. Brief report of audit committee activity; and
6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit.	377-379	6. Meeting frequency and attendance of audit committee.
10. Komite Nominasi dan/atau Remunerasi	395	10. Nomination and/or Remuneration Committee
Mencakup antara lain:		Covers among others:
1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/atau remunerasi;	N/R	1. Name, position and brief profiles of members of the Nomination and/or Remuneration Committee;
2. Independensi komite nominasi dan/atau remunerasi;	N/R	2. Independency of Nomination and/or Remuneration Committee;
3. Uraian tugas dan tanggung jawab;	N/R	3. Duties and responsibilities;
4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/ atau remunerasi pada tahun buku;	N/R	4. Brief report of Nomination and/or Remuneration committee activity; and
5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan/atau remunerasi;	N/R	5. Meeting frequency and attendance of nomination and/or remuneration committee.
6. Pernyataan adanya pedoman komite nominasi dan/atau remunerasi; dan	N/R	6. Statement of nomination and/or remuneration committee charter; and
7. Kebijakan mengenai suksesi Direksi.	N/R	7. Policies on Director succession.
11. Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan	384-394	11. Other committees under the Board of Commissioners
Mencakup antara lain:		Covers among others:
1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain;	392-394	1. Name, position and brief profile of members of committee;
2. Independensi komite lain;	385	2. Independency of committee;
3. Uraian tugas dan tanggung jawab;	386-387	3. Duties and responsibilities;
4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain pada tahun buku; dan	390-391	4. Committee activity in the fiscal year; and
5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain.	387-389	5. Committee meeting frequency and attendance.
12. Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan	397-399	12. Description of duties and functions of Corporate Secretary
Mencakup antara lain:		Covers among others:
1. Nama, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan;	400	1. Name and brief work experience of Corporate Secretary;
2. Domisili;	400	2. Domicile;
3. Uraian tugas dan tanggung jawab; dan	397-399	3. Duties and responsibilities; and
4. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku.	399	4. Report of activities of Corporate Secretary in the fiscal year
13. Uraian mengenai unit audit internal	401-416	13. Description on Internal Audit Unit
Mencakup antara lain:		Covers among others:
1. Nama ketua unit audit internal;	416	1. Name of internal audit unit head;
2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal;	405	2. Total employees (internal auditors) in internal audit unit;
3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal;	405 ; 414	3. Certification on internal audit profession;
4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan;	404	4. Internal audit unit composition in the company's structure;
5. Uraian pelaksanaan kegiatan unit audit internal pada tahun buku; dan	412-413	5. Brief report on internal audit unit activity implementation; and
6. Pihak yang mengangkat dan memberhentikan ketua unit audit internal.	404	6. The parties responsible to appoint/terminate the internal audit unit head.
14. Akuntan Publik	188-191	14. Public Accountant
Informasi memuat antara lain:		Information, among others:
1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir;	189-190	1. Name and year of the public accountant that audits the annual financial statements in the last 5 years;

Keterangan	Halaman Page	Description
2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir;	189-190	2. Name and year of Public Accountant Firm that audits the annual financial statements in the last 5 years;
3. Besarnya <i>fee</i> untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir; dan	189-190	3. The amount of fee for each service provided by public accountant at the last financial year; and
4. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir.	190	4. Other services provided by the accountant apart from the audit service of annual financial statements at the last financial year.
Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.	N/R	Note: to disclose if there are no other services rendered
22. Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan	423-443	22. Description on risk management of the company
Mencakup antara lain:		Includes the following:
1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan;	434	1. Explanation on risk management system implemented by the company;
2. Penjelasan mengenai hasil reviu yang dilakukan atas sistem manajemen risiko pada tahun buku;	435-440	2. Explanation on risk management system effectiveness evaluation;
3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan	429-433	3. Explanation on risks faced by the company; and
4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut.	435-440	4. Risk mitigation.
23. Uraian mengenai sistem pengendalian intern	417-422	23. Description of internal control system
Mencakup antara lain:		Includes the following:
1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional;	417-422	1. Brief explanation on internal control system, among others on financial and operational control;
2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – <i>internal control framework</i>); dan	419-421	2. Explanation on internal control system alignment with international standard framework (COSO – internal control framework); and
3. Penjelasan mengenai hasil reviu yang dilakukan atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pada tahun buku.	422	3. Explanation on internal control system effectiveness evaluation.
24. Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan, mencakup antara lain:	443	24. Description of corporate social responsibility related to responsibility to consumers, including among others:
1. Pokok perkara/gugatan;	N/R	1. Case/ Claim;
2. Status penyelesaian perkara/gugatan;	N/R	2. Settlement status of litigation/claims;
3. Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan; dan	N/R	3. Impact to the company's condition; and
4. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi).	443	4. Administration sanctions charged to the company, members of the Board of Commissioners and Board of Directors, by relevant authorities (capital market, banking and others) at the last fiscal year (or a statement of no administration sanction being charged).
Catatan: dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan.	445	Note: in the case of a Corporate, a subsidiary, a member of the Board of Commissioners, and a member of the Board of Directors has no important case to disclose.
25. Akses informasi dan data perusahaan	444-445	25. Access to company information and data
Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, <i>mailing list</i> , buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya.	444-445	Description on the availability of company information and data for public access, including dissemination through company website (in Bahasa and English), mass media, mailing list, bulletin, analyst gatherings, and others.
26. Bahasan mengenai kode etik, memuat uraian antara lain:	446-450	26. The description on code of ethic, which contains, among others:
1. Pokok-pokok kode etik;	447	1. Contents of Code of Conduct;
2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi;	448	2. Disclosure of code of conduct application in all level of organization;

Keterangan	Halaman Page	Description
3. Penyebarluasan kode etik;	448	3. Code of conduct dissemination;
4. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan	448-450	4. Sanctions on code of conduct violations; and
5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir.	450	5. Number of violation and sanction in the last fiscal year.
Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	N/R	Note: should be disclosed if there are no violations of code of conduct in the last fiscal year.
27. Pengungkapan mengenai <i>whistleblowing system</i>	452-462	27. Disclosure on whistleblowing system
Memuat uraian tentang mekanisme <i>whistleblowing system</i> antara lain:		Includes the following mechanism of whistleblowing system:
1. Penyampaian laporan pelanggaran;	457-458	1. Violations report submission;
2. Perlindungan bagi <i>whistleblower</i> ;	461	2. Whistleblowers protection;
3. Penanganan pengaduan;	459-461	3. Complaints handling;
4. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir; dan	462	4. Total claims registered in the fiscal year; and
5. Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku.	462	5. Sanctions/report processed at the last fiscal year including its follow up measures.
Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk dan telah selesai diproses pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	N/R	Note: should be disclosed if there is no report and follow up action in the last fiscal year.
28. Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Uraian kebijakan tertulis Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin.	361-362	28. Diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors Composition. Description of written policy regarding diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors composition regarding education, work experience, age, and gender.
Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya.	N/R	Note: to disclose the reasons and considerations, if there is no policy applied.
VII. Informasi Keuangan		VII. Financial Information
1. Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan	548	1. Board of Directors and/or Board of Commissioners' Statements regarding the Responsibility for the Financial Statements
Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan.	548	Conformity with related regulations regarding the Financial Statements Responsibility.
2. Opini auditor independen atas laporan keuangan	549	2. Independent auditor opinion on financial statements
3. Deskripsi Auditor Independen di Opini	549-551	3. Independent Auditor Description in the Opinion
Deskripsi memuat tentang:	√	Description contains the following:
1. Nama dan tanda tangan;	√	1. Name & signatures;
2. Tanggal Laporan Audit; dan	√	2. Audit Report date; and
3. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik.	√	3. License of Public Accountant Firm and license of Public Accountant
4. Laporan keuangan yang lengkap	547-617	4. Comprehensive financial statements
Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan:		Comprehensively covers the financial statements elements:
1. Laporan posisi keuangan;	552-553	1. Statements of financial position;
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;	554	2. Statements of profit (loss) and other comprehensive income;
3. Laporan perubahan ekuitas;	555	3. Statements of changes in equity;
4. Laporan arus kas;	556	4. Statements of cash flows;
5. Catatan atas laporan keuangan;	557-617	5. Notes to financial statements;
6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan	N/R	6. Comparative information on previous periods; and
7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pospos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pospos dalam laporan keuangannya (jika relevan).	N/R	7. Statements of financial position at the beginning of previous periods upon the application of retrospective accounting policy by the entity or representation of financial statements postings, or reclassifications of postings in the financial statements (if relevant).

Keterangan	Halaman Page	Description
5. Perbandingan tingkat profitabilitas	554	5. Profitability level comparison
Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.	554	Comparison of current profit (loss) with the previous year.
6. Laporan Arus Kas	556	6. Statements of Cash Flows
Memenuhi ketentuan sebagai berikut:		Conformity to the following provisions:
1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan;	√	1. Grouping into three category of activities: operations, investment, and financing;
2. Penggunaan metode langsung (<i>direct method</i>) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi;	√	2. Direct method application in the statements of cash flows from operations activity;
3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan	√	3. Separation of presentation between cash in and or cash out during current year in the operation, investment and financing activities; and
4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.	√	4. Disclosure of non cash transaction shall be stated in the notes to financial statements.
7. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi	558-581	7. Accounting policies highlights
Meliputi sekurang-kurangnya:		Including at least:
1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK;	√	1. Compliance statement to SAK;
2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan;	√	2. Basis of measurement and formulation of financial statements;
3. Pajak penghasilan;	√	3. Income tax;
4. Imbalan kerja; dan	√	4. Employee benefits; and
5. Instrumen Keuangan.	√	5. Financial instrument.
8. Pengungkapan transaksi pihak berelasi	606-608	8. Disclosure of related parties transactions
Hal-hal yang diungkapkan antara lain:		The disclosures includes:
1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi;	606	1. Name of related parties, and the nature and relationship with related parties;
2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan	607-608	2. Transaction values and its percentage to total income and expense; and
3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait.	253	3. Total balance and its percentage to total assets or liabilities.
9. Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan	602-605	9. Disclosure related to taxes
Hal-hal yang harus diungkapkan:		The disclosures shall includes:
1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini;	√	1. Fiscal reconciliation and current tax expense calculation;
2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi;	√	2. Explanation of relationship between tax expenses (income) and accounting profit;
3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2016;	√	3. Statement that Taxable Income as a result of reconciliation is used as the basis in completing the 2016 Annual corporate income tax return;
4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan	√	4. The details of deferred tax assets and liabilities recognized in the financial position statements for every presentation period, and total deferred tax expenses (income) recognized in the income statements if the total are not visible from the total deferred tax assets or liabilities recognized in the financial position statements; and
5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.	√	5. Disclosure of availability or un-availability of tax disputes.
10. Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap	592-593	10. Disclosure related to fixed assets
Hal-hal yang harus diungkapkan:		The disclosures shall includes:
1. Metode penyusutan yang digunakan;	570-571	1. Used depreciation method;

Keterangan	Halaman Page	Description
2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya;	570-571	2. Description on accounting policies selected between revaluation model and cost model;
3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan	564-568	3. Significant methods and assumptions used in estimation of fixed assets fair value (for revaluation model) or disclosure of fixed assets fair value (for cost model); and
4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi.	592-593	4. Reconciliation of gross total recorded and accumulation of fixed assets depreciation at the beginning and end of period by presenting: addition, deduction and reclassification.
11. Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi	N/R	11. Disclosure related to operations segments
Hal-hal yang harus diungkapkan:		The disclosures shall includes:
1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan;	N/R	1. General information covering factors used to identify reported segments;
2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan;	N/R	2. Information on segment's reported profit loss, assets, and liabilities;
3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan	N/R	3. Reconciliation of segment's total revenues, segment's reported profit loss, segment's assets, segment's liabilities, and segment's other material elements to related total in entity; and
4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama.	N/R	4. Disclosure of entity level, which covers information on products and/or services, geographic areas and main customers.
12. Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan	610-615	12. Disclosure related to Financial Instruments
Hal-hal yang harus diungkapkan:		The disclosures shall includes:
1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya;	√	1. Financial instrument classification;
2. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan;	√	2. Fair value of every financial instrument group;
3. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas;	√	3. Explanation on risks related to financial instrument: market risk, credit risk and liquidity risk;
4. Kebijakan manajemen risiko; dan	√	4. Risk management policies; and
5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif.	√	5. Risk analysis related to financial instrument in quantitative way.
13. Penerbitan laporan keuangan	548	13. Financial statements publication
Hal-hal yang diungkapkan antara lain:		The disclosures includes:
1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan	√	1. Date of financial statements authorized for publication; and
2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.	√	2. Parties responsible to authorize the financial statements.

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

Laporan Keuangan Konsolidasian

Consolidated Financial Report

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

PT COGINDO DAYABERSAMA

**LAPORAN KEUANGAN/
*FINANCIAL STATEMENTS***

**31 DESEMBER 2023/
*31 DECEMBER 2023***



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023**

**DIRECTOR'S STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY
ON THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT 31 DECEMBER 2023
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023**

Kami yang bertandatangan dibawah ini/ *We, the undersigned:*

1. Nama/ *Name* : Hari Cahyono
Alamat kantor/ *Office address* : Jl. Raya Pasar Minggu No. 190, RT.1/RW.1, Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510
Alamat Domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/ *Domicile as stated in ID Card* : Jalan Tanah Lot Raya N 4/28 Graha Cinere RT/RW. 006/013, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo Kota Depok.
Nomor telepon/ *Phone number* : 08128721904
Jabatan/ *Position* : Direktur Utama/ *President Director*

2. Nama/ *Name* : Hari Muhandani Nasution
Alamat kantor/ *Office address* : Jl. Raya Pasar Minggu No. 190, RT.1/RW.1, Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510
Alamat Domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/ *Domicile as stated in ID Card* : Jl. Arafah Blok I E-1 No. 15 Vila Ilhami RT/RW. 004/010, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas
Nomor telepon/ *Phone number* : 0811123292
Jabatan/ *Position* : Direktur Keuangan/ *Director of Finance*

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Cogindo DayaBersama ("Perusahaan");
2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.

state that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Cogindo DayaBersama ("the Company");
2. The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information has been disclosed in a complete and truthful manner in the Company's financial statements;
b. The Company's financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information or facts; and
4. We are responsible for the internal control system of the Company.


Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

The statement letter is made truthfully.

Jakarta, 2 Juli/July 2024


Hari Cahyono
Direktur Utama/
President Director




Hari Muhandani Nasution
Direktur Keuangan/
Director of Finance

PLN Indonesia Power Services Kantor Pusat
JL. Raya Pasar Minggu No. 190, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12510, Indonesia

T (021) 21789990 W www.plnip-services.co.id



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF**

PT COGINDO DAYABERSAMA

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Cogindo DayaBersama ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf "Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan" pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Opinion

We have audited the financial statements of PT Cogindo DayaBersama (the "Company"), which comprise the statement of financial position as at 31 December 2023, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as at 31 December 2023, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the "Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements" paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia
T: +62 (21) 5099 2901 / 3119 2901, F: +62 (21) 5290 5555 / 5290 5050, www.pwc.com/id

Nomor Izin Usaha: KEP-015/PM.1/2024.

00288/2.1457/AU.1/02/1789-1/11/VII/2024



Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*

00268/2.1457/AJ.1/02/1789-1/1/VII/2024



- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
 - Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
 - Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
 - *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*
 - *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

JAKARTA,
2 Juli/July 2024

Firman Sababalat, CPA
Izin Akuntan Publik/Public Accountant License No. AP.1789



Copyright © PwC Indonesia
00288/2-1457/AU.1/02/1789-1/1/VII/2024

00288/2-1457/AU.1/02/1789-1/1/VII/2024

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 1/1 Schedule

LAPORAN POSISI KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali nilai nominal dan data saham)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
except for par value and share data)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	5	227,025	259,449	Cash and cash equivalents
Deposito berjangka	6	2,500	-	Time deposits
Kas yang dibatasi penggunaannya - bagian lancar	7	22,900	-	Restricted cash - current portion
Piutang usaha	8	408,483	464,792	Trade receivables
Piutang lain-lain		4,581	7,606	Other receivables
Persediaan	9	15,649	9,348	Inventory
Pajak dibayar di muka - bagian lancar	24a	70,906	39,034	Prepaid taxes - current portion
Biaya dibayar di muka dan uang muka - bagian lancar		9,475	14,525	Prepaid expenses and advances - current portion
Aset lancar lainnya	10	<u>6,711</u>	<u>2,551</u>	Other current assets
JUMLAH ASET LANCAR		<u>768,230</u>	<u>797,305</u>	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Kas yang dibatasi penggunaannya - bagian tidak lancar	7	2,083	-	Restricted cash - non-current portion
Piutang dari ventura bersama	11	22,826	17,559	Receivables from a joint venture
Pajak dibayar di muka - bagian tidak lancar	24a	78,110	86,445	Prepaid taxes - non-current portion
Biaya dibayar di muka dan uang muka - bagian tidak lancar		-	3,244	Prepaid expenses and advances - non-current portion
Aset tetap	12	188,370	254,767	Fixed assets
Aset hak-guna	13a	12,784	12,679	Right-of-use assets
Investasi pada ventura bersama	14a	11,057	9,521	Investment in a joint venture
Aset pajak tangguhan	24d	20,795	8,662	Deferred tax assets
Aset tidak lancar lainnya	10	<u>13,096</u>	<u>9,461</u>	Other non-current assets
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		<u>349,121</u>	<u>402,338</u>	TOTAL NON-CURRENT ASSETS
JUMLAH ASET		<u>1,117,351</u>	<u>1,199,643</u>	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 1/2 Schedule

LAPORAN POSISI KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali nilai nominal dan data saham)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
except for par value and share data)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha	15	42,577	82,180	Trade payables
Utang lain-lain		1,976	2,539	Other payables
Utang pajak penghasilan badan	24b	9,996	2,654	Corporate income tax payable
Utang pajak lainnya	24b	14,144	28,565	Other taxes payable
Biaya yang masih harus dibayar	16	64,951	134,680	Accrued expenses
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	17	31,791	18,857	Short-term employee benefit liabilities
Liabilitas sewa - jangka pendek	13b	<u>6,993</u>	<u>7,664</u>	Lease liabilities - current portion
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		<u>172,428</u>	<u>277,139</u>	TOTAL CURRENT LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas sewa - jangka panjang	13b	5,209	5,566	Lease liabilities - non-current portion
Liabilitas imbalan pascakerja	17	<u>40,627</u>	<u>30,047</u>	Post-employment benefit liabilities
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG		<u>45,836</u>	<u>35,613</u>	TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
JUMLAH LIABILITAS		<u>218,264</u>	<u>312,752</u>	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp1.000 (nilai penuh) per saham				Capital stock - par value of Rp1,000 (full amount) per share
Modal dasar: ditempatkan dan disetor 514.867.770 lembar saham	18	514,868	514,868	Authorized: subscribed and paid 514,867,770 shares
Tambahan modal disetor		23,719	23,719	Additional paid-in capital
Saldo laba				Retained earnings
Ditentukan penggunaannya	19a	159,332	159,332	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya		203,842	190,973	Unappropriated
Rugi komprehensif lain		<u>(2,674)</u>	<u>(2,001)</u>	Other comprehensive loss
JUMLAH EKUITAS		<u>899,087</u>	<u>886,891</u>	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>1,117,351</u>	<u>1,199,643</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 2 Schedule

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

**STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2023**
(Expressed in millions of Rupiah)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Pendapatan usaha	20	1,607,653	1,752,466	Revenue
Beban pokok pendapatan	21	(1,371,525)	(1,438,402)	Cost of revenue
LABA BRUTO		236,128	314,064	GROSS PROFIT
Beban umum dan administrasi	22	(91,269)	(85,464)	General and administrative expenses
Beban lain-lain - bersih	23	(13,759)	(15,662)	Other expenses - net
LABA USAHA		131,100	212,938	OPERATING INCOME
Penghasilan keuangan		5,567	4,868	Finance income
Biaya keuangan (Kerugian)/keuntungan selisih kurs - bersih	13	(922)	(1,143)	Finance costs (Loss)/gain on foreign exchange - net
Bagian atas laba bersih pada ventura bersama	14a	1,585	121	Share in net profit of a joint venture
LABA SEBELUM PAJAK		137,152	219,277	PROFIT BEFORE TAX
Beban pajak penghasilan	24c	(46,055)	(62,822)	Income tax expense
LABA TAHUN BERJALAN		91,097	156,455	PROFIT FOR THE YEAR
(Rugi)/penghasilan komprensif lain				Other comprehensive (loss)/income
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will be reclassified to profit or loss:
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	14a	(49)	1,166	Exchange difference due to financial statements translation
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pascakerja	17	(800)	2,270	Remeasurement on post-employment benefit liabilities
Pajak penghasilan terkait	24d	176	(499)	Related income tax
(Rugi)/penghasilan komprensif lain, setelah pajak		(673)	2,937	Other comprehensive (loss)/income, net of tax
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		90,424	159,392	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 3 Schedule

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

**STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2023**
(Expressed in millions of Rupiah)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Subscribed and paid-up share capital	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Saldo laba/ Retained earnings Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income Selisih kurs karena laporan keuangan/ Difference in foreign currency translation of the financial statements	Pengukuran kembali atas program manfaat pensiun/ Remeasurement on defined benefit plans	Remeasurement Jumlah ekuitas/ Total equity	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2022	514,868	23,719	159,332	179,827	-	(4,938)	872,808	Balance as at 1 January 2022
Laba tahun berjalan	-	-	-	156,455	-	-	156,455	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	-	-	-	-	1,166	1,771	2,937	Other comprehensive income for the year
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	-	156,455	1,166	1,771	159,392	Total comprehensive income for the year
Dividen	-	-	-	(145,309)	-	-	(145,309)	Dividends
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022	514,868	23,719	159,332	190,973	1,166	(3,167)	886,891	Balance as at 31 December 2022
Laba tahun berjalan	-	-	-	91,097	-	-	91,097	Profit for the year
Rugi komprehensif lain tahun berjalan	-	-	-	-	(49)	(624)	(673)	Other comprehensive loss for the year
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	-	91,097	(49)	(624)	90,424	Total comprehensive income for the year
Dividen	-	-	-	(78,228)	-	-	(78,228)	Dividends
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023	514,868	23,719	159,332	203,842	1,117	(3,791)	899,087	Balance as at 31 December 2023

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 4 Schedule

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah)

	Catatan/ Notes	2023	2022	
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI				OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan		1,668,398	1,666,822	<i>Receipts from customers</i>
Pembayaran kepada pemasok		(1,053,370)	(1,016,720)	<i>Payments to suppliers</i>
Pembayaran kepada karyawan		(508,170)	(384,904)	<i>Payments to employees</i>
Pembayaran pajak penghasilan badan		(50,670)	(65,057)	<i>Payments of corporate income tax</i>
Penerimaan pengembalian pajak	24e	39,421	-	<i>Receipts of tax refunds</i>
Penerimaan dari penghasilan keuangan		8,567	3,525	<i>Receipts of finance income</i>
Penempatan kas yang dibatasi penggunaannya untuk jaminan pelaksanaan	7	(24,983)	-	<i>Placement of restricted cash for performance bonds</i>
Pembayaran beban keuangan	13	(922)	(1,143)	<i>Payments of finance expenses</i>
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi		<u>78,271</u>	<u>202,523</u>	Net cash generated from operating activities
ARUS KAS DARI				CASH FLOW FROM
AKTIVITAS INVESTASI				INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	12	(17,236)	(45,821)	<i>Purchase of fixed assets</i>
Penempatan deposito berjangka	6	(2,500)	-	<i>Placements of time deposits</i>
Penambahan piutang dari ventura bersama	11	(19,397)	-	<i>Additions of receivables from a joint venture</i>
Penerimaan atas pembayaran piutang dari ventura bersama	11	14,956	-	<i>Receipt for payments of receivables from a joint venture</i>
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		<u>(24,177)</u>	<u>(45,821)</u>	Net cash used in investing activities
ARUS KAS DARI				CASH FLOW FROM
AKTIVITAS PENDANAAN				FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran dividen	19b	(78,228)	(145,309)	<i>Payments of dividends</i>
Pembayaran liabilitas sewa	28b	(8,290)	(13,262)	<i>Payment of lease liabilities</i>
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan		<u>(86,518)</u>	<u>(158,571)</u>	Net cash used in financing activities
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(32,424)	(1,883)	NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		<u>259,449</u>	<u>261,332</u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		<u><u>227,025</u></u>	<u><u>259,449</u></u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR

Lihat Catatan 28 untuk penyajian informasi arus kas Perusahaan.

Refer to Note 28 for the presentation of the Company's cash flow information.

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/1 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Cogindo Daya Bersama ("Perusahaan") didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris No. 52 tanggal 15 April 1998 dan Akta perubahan No. 67 tanggal 28 Desember 1998, keduanya dibuat dihadapan SP. Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-3669-HT.01.01.Th.99 tanggal 8 Maret 1999.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah berdasarkan Akta Notaris No. 15 tanggal 12 April 2023 yang dibuat dihadapan Shahreza Annaz S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta tentang perubahan kegiatan usaha Perusahaan yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0073902.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 14 April 2023.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan unit bisnis pembangkit yang berlokasi di Bali dan Nusa Tenggara Timur. Kantor pusat Perusahaan berkedudukan di Gedung Cogindo, Jl. Raya Pasar Minggu No. 190, Jakarta Selatan.

Perusahaan bergerak dalam bisnis ketenagalistrikan, perindustrian terkait ketenagalistrikan, jasa dan perdagangan.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1999.

Entitas induk pengendali Perusahaan adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN").

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah karyawan Perusahaan termasuk karyawan yang penugasan dari PT PLN Indonesia Power ("PIP") adalah masing-masing berjumlah 4.305 (tidak diaudit) dan 3.488 (tidak diaudit).

1. GENERAL

a. Establishment and general information

PT Cogindo Daya Bersama (the "Company") was established in Jakarta based on Notarial Deed No. 52 dated 15 April 1998 and Deed of Amendment No. 67 dated 28 December 1998, both of SP. Henny Singgih, S.H., a Notary in Jakarta. The Company's Deed of establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. C2-3669-HT.01.01.Th.99 dated 8 Maret 1999.

The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No.15, dated 12 April 2023 of Shahreza Annaz S.H., M.Kn., Notary in Jakarta regarding changes to business activities of the Company which has been notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and confirmed as received in Decree No. AHU-0073902.AH.01.11.Tahun 2023 dated 14 April 2023.

The Company is domiciled in Jakarta, and the power plant business unit is located in Bali and East Nusa Tenggara. The Company's main office is located in Cogindo Building, Jl. Raya Pasar Minggu No. 190, Jakarta Selatan.

The Company is engaged in the electricity business, power industry business, services and wholesale business.

The Company commenced its commercial operations in 1999.

The Company's controlling parent entity is Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN").

As at 31 December 2023 and 2022, the number of the Company's employees including employees seconded from PT PLN Indonesia Power ("PIP") amounted to 4,305 (unaudited) and 3,488, respectively (unaudited).

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/2 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Susunan pengurus dan informasi lain

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022,
susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Perusahaan adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>
Komisaris Utama	Khusnul Mubien
Komisaris	Masykuri Abdillah
Komisaris	Muhammad Mursid
Komisaris Independen	Sunandar
Komisaris Independen	Fredy Eko Prasetyo
Direktur Utama	Ade Hendratno
Direktur Bisnis	Kukuh Pambudi
Direktur Operasi	Mulyadi
Direktur Sumber Daya Manusia	R. Triyono Budi
Direktur Keuangan	Hari Muhandani Nasution

1. GENERAL (continued)

b. Management and other information

As at 31 December 2023 and 2022, the
composition of the Company's Boards of
Commissioners and Directors was as follows:

	<u>2022</u>	
Susiana Mutia		President Commissioner
Masykuri Abdillah		Commissioner
Muhammad Mursid		Commissioner
Zaenal Mustofa		Independent Commissioner
-		Independent Commissioner
Ade Hendratno		President Director
Kukuh Pambudi		Director of Business
Mulyadi		Director of Operation
R. Triyono Budi		Director of Human Resources
Hari Muhandani Nasution		Director of Finance

**2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR
AKUNTANSI KEUANGAN ("PSAK") BARU DAN
AMANDEMEN**

Penerapan dari amandemen terhadap standar
akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal
1 Januari 2023 tidak menyebabkan perubahan
signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan
dan tidak memberikan dampak yang material
terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan
keuangan pada tahun berjalan:

- Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan - Pengungkapan Kebijakan Akuntansi"
- Amandemen PSAK No. 16, "Aset Tetap - Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan"
- Amandemen PSAK No. 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan - Definisi Estimasi Akuntansi"
- Amandemen PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan - Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal"
- Amandemen PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan - Reformasi Pajak Internasional - Ketentuan Model Pilar Dua"

**2. NEW AND AMENDMENTS STATEMENTS OF
FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD ("SFAS")**

The adoption of the following amendments to
accounting standards which are effective from
1 January 2023 did not result in substantial changes
to the Company's accounting policies and had no
material effect on the amounts reported in the
financial statements for the current year:

- Amendment to SFAS No. 1, "Presentation of Financial Statements - Disclosure of Accounting Policies"
- Amendment to SFAS No. 16, "Property, Plant and Equipment - Proceeds before Intended Use"
- Amendment to SFAS No. 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors - Definition of Accounting Estimates"
- Amendments to SFAS No. 46, "Income Taxes - Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction"
- Amendment to SFAS No. 46, "Income Taxes - International Tax Reform - Pillar Two Model Rules"

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/3 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR
AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”) BARU DAN
AMANDEMEN (lanjutan)

Standar baru dan amandemen yang telah diterbitkan, namun berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024, tapi penerapan dini diperkenankan, adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK No. 1, “Penyajian Laporan Keuangan - Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang”
- PSAK No. 74, “Kontrak Asuransi”
- Amandemen PSAK No. 1, “Penyajian Laporan Keuangan - Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan”
- Amandemen PSAK No. 2, “Laporan Arus Kas”
- Amandemen PSAK No. 10, “Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing - Kekurangan Ketertukaran”
- Amandemen PSAK No. 60, “Instrumen Keuangan: Pengungkapan - Pengaturan Pembiayaan Pemasok”
- Amandemen PSAK No. 73, “Sewa - Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa-Balik”
- Amandemen PSAK No. 74, “Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK No. 74 dan PSAK No. 71 - Informasi Komparatif”

Standar baru dan amandemen di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2024, kecuali untuk PSAK No. 74, Amandemen PSAK No. 10 dan Amandemen PSAK No. 74 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, tetapi penerapan dini diperkenankan.

Pada tanggal laporan keuangan ini, Perusahaan sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amandemen dan interpretasi pada laporan keuangan Perusahaan.

Mulai dari 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) akan diubah sesuai dengan penerbitan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Institut Akuntan Indonesia.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. NEW AND AMENDMENTS STATEMENTS OF
FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD (“SFAS”)
(continued)

The new standard and amendments issued but only effective for financial years beginning on or after 1 January 2024, but for which early adoption is permitted, are as follows:

- *Amendment to SFAS No. 1, “Presentation of Financial Statements - Classification of Liabilities as Current or Non-Current”*
- *SFAS No. 74, “Insurance Contracts”*
- *Amendment to SFAS No. 1, “Presentation of Financial Statements - Non-current Liabilities with Covenants”*
- *Amendment to SFAS No. 2, “Statement of Cash Flow”*
- *Amendment to SFAS No. 10, “The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates - Lack of Exchangeability”*
- *Amendment to SFAS No. 60, “Financial Instruments: Disclosures - Supplier Finance Arrangements”*
- *Amendment to SFAS No. 73, “Leases - Lease Liability in a Sale and Leaseback”*
- *Amendment to SFAS No. 74, “Insurance Contracts regarding Initial Application of SFAS No. 74 and SFAS No. 71 - Comparative Information”*

The above new standard and amendments are effective beginning 1 January 2024, except for SFAS No. 74, Amendment to SFAS No. 10 and Amendment to SFAS No. 74 which are effective beginning 1 January 2025, but early adoption is permitted.

As at the date of these financial statements, the Company is evaluating the potential impact of these new standards, amendments and interpretations on the Company’s financial statements.

Beginning 1 January 2024, references to the individual SFAS and Interpretations of Financial Accounting Standards (“IFAS”) will be changed as published by the Financial Accounting Standards Board of Indonesian Institute of Accountants.

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/4 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan. Kebijakan ini telah diaplikasikan secara konsisten terhadap semua tahun yang disajikan, kecuali dinyatakan lain.

a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan ("SAK")

Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

b. Dasar penyusunan laporan keuangan

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas adalah dasar akrual. Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha dan dengan pengukuran nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 4.

c. Penjabaran mata uang asing

i. Mata uang fungsional dan penyajian

Akun-akun yang disertakan dalam laporan keuangan Perusahaan diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional").

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah ("Rp") yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Perusahaan. Angka-angka dalam laporan keuangan ini dibulatkan menjadi jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION

Presented below are the material accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Company. These policies have been consistently applied to all of the years presented, unless otherwise stated.

a. Compliance with the Financial Accounting Standards ("FAS")

The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

b. Basis of preparation of financial statements

The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared on the accrual basis of accounting. The preparation and presentation of the financial statements are based on the going concern assumption and the measurement basis is historical cost, except for certain accounts that have been measured on the basis described in the related accounting policies.

The statement of cash flows has been prepared using the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Company's accounting policies. Those areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 4.

c. Foreign currency translation

i. Functional and presentation currency

Items included in the financial statements of the Company are measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates (the "functional currency").

The financial statements are presented in Rupiah ("Rp" or "IDR"), which is the functional currency and the presentation currency of the Company. Figures in the financial statements are rounded in millions of Rupiah, unless otherwise stated.

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/5 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

3. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)

c. Penjabaran mata uang asing (lanjutan)

c. Foreign currency translation (continued)

ii. Transaksi dan saldo

ii. Transactions and balances

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.

Foreign currency transactions are translated into Rupiah using the exchange rates prevailing at the date of the transactions.

Pada tanggal pelaporan, setiap aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs penutup. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs yang berlaku pada akhir tahun pelaporan diakui di dalam laba rugi.

As at the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are translated into Rupiah using the closing exchange rate. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in profit or loss.

Kurs yang digunakan pada tanggal laporan posisi keuangan, berdasarkan kurs penutup yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan yang diterbitkan Bank Indonesia, adalah sebagai berikut:

As at the statement of financial position dates, the exchange rates used, based on the exchange rates prevailing at the date of statement of financial position published by Bank Indonesia, were as follows:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS" atau "AS\$")	15,439	15,592	United States Dollars ("US Dollars" or "US\$")
Euro (EUR)	17,140	16,713	Euro (EUR)
Dinar Kuwait (KWD)	50,220	51,350	Kuwaiti Dinar (KWD)

*) dalam jumlah penuh

in full amount *)

d. Transaksi dengan pihak berelasi

d. Transactions with related parties

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sesuai yang didefinisikan oleh PSAK No. 7 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

The Company has entered into transactions with certain related parties as defined under SFAS No. 7 "Related Party Disclosures".

Saldo dan transaksi yang material antara Perusahaan dengan Pemerintah Negara Republik Indonesia dan entitas berelasi dengan Pemerintah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Perusahaan memilih untuk mengungkapkan transaksi dengan entitas berelasi dengan Pemerintah dengan menggunakan pengecualian dari persyaratan pengungkapan pihak berelasi.

Significant transactions and balances of the Company with the Government of the Republic of Indonesia and Government-related entities are disclosed in the relevant notes to the financial statements. The Company elected to disclose the transactions with Government-related entities, using the exemption from general related party disclosure requirements.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah termasuk entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan pemegang saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") sebagai kuasa pemegang saham.

Government-related entities include entities that are controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance which are the shareholders of the entity or an entity controlled by the Government of the Republic of Indonesia, represented by the Ministry of State-Owned Enterprise ("SOE") as the shareholder's representative.

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/6 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

3. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)

d. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan yang relevan.

d. Transactions with related parties (continued)

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes.

e. Pengaturan bersama

Berdasarkan PSAK No. 66, "Pengaturan Bersama", investasi dalam pengaturan bersama diklasifikasikan sebagai operasi bersama atau ventura bersama. Klasifikasi tersebut tergantung pada hak dan kewajiban kontraktual masing-masing investor, dan bukan pada struktur hukum pengaturan bersama. Perusahaan memiliki operasi bersama.

e. Joint operation

Under SFAS No. 66, "Joint Arrangements", investments in joint arrangements are classified as either joint operations or joint ventures. The classification depends on the contractual rights and obligations of each investor, rather than the legal structure of the joint arrangement. The Company has joint operations.

Perusahaan mengakui hak langsungnya atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban dari operasi bersama dan bagiannya atas setiap aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dimiliki atau ditanggung bersama. Ini telah dimasukkan dalam laporan keuangan di bawah judul yang sesuai. Lihat Catatan 14 untuk rincian perjanjian pengaturan bersama yang dibuat oleh Perusahaan.

The Company recognises its direct right to the assets, liabilities, revenues and expenses of joint operations and its share of any jointly held or incurred assets, liabilities, revenues and expenses. These have been incorporated in the financial statements under the appropriate headings. See Note 14 for details of the joint arrangement agreement entered by the Company.

f. Akuntansi atas ventura bersama

Ventura bersama merupakan pengaturan bersama antara beberapa pihak yang melakukan kesepakatan pengendalian bersama yang memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Ventura bersama ini menggunakan metode ekuitas dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

f. Accounting for joint venture

A joint venture is a joint arrangement in which the parties that share joint control have rights to the net assets of the arrangement. Joint ventures are accounted for using the equity method less impairment losses, if any.

- Akuisisi

Investasi atas ventura bersama pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan, instrumen ekuitas yang diterbitkan atau liabilitas yang timbul atau diambil alih pada tanggal akuisisi, ditambah biaya yang berhubungan langsung dengan akuisisi.

- Acquisitions

Investment in a joint venture is initially recognised at cost. The cost of an acquisition is measured at the fair value of the assets transferred, equity instruments issued or liabilities incurred or assumed as at the date of exchange, plus costs directly attributable to the acquisition.

Goodwill pada akuisisi ventura bersama merupakan selisih lebih yang terkait dengan biaya perolehan investasi pada ventura bersama dengan bagian Perusahaan atas nilai wajar neto aset teridentifikasi dari ventura bersama dan dimasukkan dalam jumlah tercatat investasi.

Goodwill on acquisition of a joint venture represents the excess of the cost of acquisition of the joint venture over the Company's share of the fair value of the identifiable net assets of the joint venture and is included in the carrying amount of the investment.

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/7 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

3. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)

f. Akuntansi atas ventura bersama (lanjutan)

f. Accounting for joint venture (continued)

- Metode ekuitas

- Equity method of accounting

Dalam menerapkan metode ekuitas, bagian Perusahaan atas laba rugi ventura bersama setelah perolehan diakui dalam laba rugi, dan bagian Perusahaan atas penghasilan komprehensif lain setelah tanggal perolehan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

In applying the equity method of accounting, the Company's share of its joint venture's post-acquisition profit or loss is recognised in profit or loss and its share of post-acquisition other comprehensive income is recognised in other comprehensive income.

Perubahan dan penerimaan distribusi dari ventura bersama setelah tanggal perolehan disesuaikan terhadap nilai tercatat investasi.

These post-acquisition movements and distributions received from a joint venture are adjusted against the carrying amounts of the investment.

Jika bagian Perusahaan atas rugi ventura bersama, sama dengan atau melebihi kepentingannya pada ventura bersama, termasuk piutang tidak lancar tanpa jaminan, maka Perusahaan menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut, kecuali Perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atau telah melakukan pembayaran atas nama ventura bersama.

When the Company's share of the losses of a joint venture equal or exceeds its interest in the joint venture, including any other unsecured non-current receivables, the Company does not recognise further losses, unless it has obligations to make or has made payments on behalf of the joint venture.

Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi antara Perusahaan dengan ventura bersama dieliminasi sebesar bagian Perusahaan dalam ventura bersama tersebut. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi ventura bersama akan disesuaikan, apabila diperlukan, agar konsisten dengan kebijakan akuntansi Perusahaan.

Unrealised gains on transactions between the Company and its joint venture are eliminated to the extent of the Company's interest in the joint venture. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of impairment of the asset being transferred. The accounting policies of the joint venture have been changed where necessary to ensure consistency with the accounting policies adopted by the Company.

Dividen yang akan diterima dari ventura bersama diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

Dividend receivables from a joint venture are recognised as reductions in the carrying amounts of the investment.

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai atas investasi pada ventura bersama. Jika bukti tersebut ada, maka Perusahaan menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada ventura bersama dan mengakui selisih tersebut pada laba rugi.

At each reporting date, the Company determines whether there is any objective evidence that the investment in a joint venture is impaired. If any such evidence exists, the Company calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the joint venture and its carrying amount and recognises the amount in profit or loss.

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/8 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)

f. Akuntansi atas ventura bersama (lanjutan)

f. Accounting for joint venture (continued)

- Pelepasan

- Disposal

Investasi pada ventura bersama dihentikan pengakuannya apabila Perusahaan tidak lagi memiliki pengaruh signifikan. Perusahaan mengukur investasi yang tersisa sebesar nilai wajar. Selisih antara jumlah tercatat investasi yang tersisa pada tanggal hilangnya pengaruh signifikan dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi.

An investment in a joint venture is derecognised when the Company loses significant influence and any retained equity interest in the entity is remeasured at its fair value. The difference between the carrying amount of the retained interest at the date when significant influence is lost and its fair value is recognised in profit or loss.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pelepasan sebagian atau dilusi yang timbul pada investasi pada ventura bersama dimana pengaruh signifikan masih dipertahankan diakui dalam laba rugi dan hanya suatu bagian proporsional atas jumlah yang telah diakui sebelumnya pada penghasilan komprehensif lain yang direklasifikasi ke laba rugi.

Gains and losses arising from partial disposal or dilution of an investment in a joint venture in which significant influence is retained are recognised in profit or loss, and only a proportionate share of the amount previously recognised in other comprehensive income is reclassified to profit or loss.

g. Aset keuangan

g. Financial assets

i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran

i. Classification, recognition and measurement

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori pengukuran berikut ini:

The Company classifies its financial assets into the following measurement categories:

- aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dan
- aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

- financial assets measured at amortised cost, and
- financial assets measured at fair value through profit or loss ("FVTPL") or through other comprehensive income ("FVOCI").

Klasifikasi ini tergantung pada model bisnis Perusahaan dan persyaratan kontraktual arus kas pada saat menentukan apakah arus kasnya semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga.

The classification depends on the Company's business model and the contractual terms of the cash flows when determining whether their cash flows are solely payment of the principal and interest.

Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal:

The Company determines the classification of its financial assets at initial recognition:

- (i) Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

- (i) Financial assets measured at amortised cost

Klasifikasi ini berlaku untuk instrumen utang yang dikelola dalam model bisnis "dimiliki untuk mendapatkan arus kas" dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

This classification applies to debt instruments which are held under a "hold to collect" business model and which have cash flows that meet the SPPI criteria.

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/9 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI	3. MATERIAL ACCOUNTING	POLICY
MATERIAL (lanjutan)	INFORMATION (continued)	

g. Aset keuangan (lanjutan)

g. Financial assets (continued)

i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

i. Classification, recognition and measurement (continued)

Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal: (lanjutan)

The Company determines the classification of its financial assets at initial recognition: (continued)

(i) Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

(i) Financial assets measured at amortised cost (continued)

Pada pengakuan awal, piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan, diakui sebesar harga transaksi. Aset keuangan lainnya awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang dicatat yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada laba rugi.

At initial recognition, trade receivables that do not have a significant financing component are recognised at their transaction price. Other financial assets are initially recognised at fair value plus related transaction costs. They are subsequently measured at amortised cost using the effective interest method. Any gains or losses on derecognition or modification of a financial asset held at amortised cost are recognised in profit or loss.

(ii) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

(ii) Financial assets measured at FVTPL

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut. Dalam semua kasus, biaya transaksi dibebankan pada laba rugi.

The classification applies to the following financial assets. In all cases, transaction costs are immediately expensed in profit or loss:

- Instrumen utang yang tidak memiliki kriteria biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya akan dicatat pada laba rugi.
- Investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dimana pilihan penghasilan komprehensif lain tidak berlaku. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dan penghasilan dividen terkait diakui pada laba rugi.
- Derivatif yang bukan merupakan instrumen lindung nilai. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya diakui pada laba rugi.

- Debt instruments that do not meet the criteria of amortised cost or FVOCI. Subsequent fair value gains or losses are recognised in profit or loss.
- Equity investments that are held for trading or where FVOCI election has not been applied. All fair value gains or losses and related dividend income are recognised in profit or loss.
- Derivatives that are not designated as a hedging instrument. All subsequent fair value gains or losses are recognised in profit or loss.

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/10 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

g. Aset keuangan (lanjutan)

i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

- (iii) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut ini:

- Instrumen utang yang dikelola dengan model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual dan di mana arus kasnya memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

Perubahan nilai wajar aset keuangan ini dicatat pada penghasilan komprehensif lain, kecuali pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga (termasuk biaya transaksi menggunakan metode suku bunga efektif), keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian dan keuntungan dan kerugian dari selisih kurs diakui pada laba rugi. Ketika aset keuangan dihentikan, keuntungan atau kerugian nilai wajar kumulatif yang sebelumnya diakui pada penghasilan komprehensif lain direklasifikasi pada laba rugi.

- Investasi ekuitas dimana Perusahaan telah memilih secara tak terbatal untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar dari revaluasi pada penghasilan komprehensif lain.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)

g. Financial assets (continued)

i. Classification, recognition and measurement (continued)

- (iii) Financial assets measured at FVOCI

This classification applies to the following financial assets:

- Debt instruments that are held under a business model where they are held for collection of contractual cash flows and also for sale ("collect and sell") and which have cash flows that meet the SPPI criteria.

All movements in the fair value of these financial assets are taken through other comprehensive income, except for the recognition of impairment gains or losses, interest revenue (including transaction costs by applying the effective interest method), gains or losses arising on derecognition and foreign exchange gains and losses that are recognised in profit or loss. When the financial asset is derecognised, the cumulative fair value gains or losses previously recognised in other comprehensive income are reclassified to profit or loss.

- Equity investments where the Company has irrevocably elected to present fair value gains and losses on revaluation in other comprehensive income.

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/11 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

g. Aset keuangan (lanjutan)

i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

- (iii) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut ini: (lanjutan)

Pilihan dapat didasarkan pada investasi individu, namun, tidak berlaku pada investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dari revaluasi investasi ekuitas, termasuk komponen selisih kurs, diakui pada penghasilan komprehensif lain. Ketika investasi ekuitas dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian nilai wajar yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi pada laba rugi. Dividen diakui dalam laba rugi ketika hak untuk menerima pembayaran telah ditetapkan.

ii. Penghentian Pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari investasi tersebut telah jatuh tempo atau telah ditransfer dan Perusahaan telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

g. Financial assets (continued)

i. Classification, recognition and measurement (continued)

- (iii) *Financial assets measured at FVOCI (continued)*

This classification applies to the following financial assets: (continued)

The election can be made for each individual investment; however, it is not applicable to equity investments held for trading. Fair value gains or losses on the revaluation of such equity investments, including any foreign exchange component, are recognised in other comprehensive income. When the equity investment is derecognised, there is no reclassification of fair value gains or losses previously recognised in other comprehensive income to profit or loss. Dividends are recognised in profit or loss when the right to receive payment is established.

ii. Derecognition

Financial assets are derecognised when the rights to receive cash flows from the investments have expired or have been transferred and the Company has transferred substantially all the risks and rewards of ownership.

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/12 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

3. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)

g. Aset keuangan (lanjutan)

g. Financial assets (continued)

iii. Penurunan nilai aset keuangan

iii. Impairment of financial assets

Pada setiap periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Perusahaan menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian ("KKE"). Dalam melakukan penilaian, Perusahaan membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

At each reporting date, the Company assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Company uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses ("ECL"). To make that assessment, the Company compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and considers reasonable and supportable information, which is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

Perusahaan menerapkan pendekatan umum untuk mengukur KKE untuk seluruh saldo aset keuangan. Pendekatan disederhanakan termasuk penelaahan perubahan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal. Penelaahan KKE termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk mengukur KKE, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa, terkecuali kepada piutang-piutang yang dapat dinilai sendiri KKENya.

The Company applies the general approach to measuring ECL for all financial assets. The simplified approach incorporates a review for any significant increase in counterparty credit risk since initial recognition. The ECL reviews include assumptions about the risk of default and expected loss rates. To measure the ECL, trade receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due, with the exception of the receivables that can be assessed at their own rating of ECL.

iv. Saling hapus antar instrumen keuangan

iv. Offsetting financial instruments

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously.

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/13 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

3. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)

h. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas mencakup kas, kas di bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

h. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks and time deposits with original maturity of three months or less.

i. Piutang usaha

Piutang usaha adalah jumlah terutang dari pelanggan atas penjualan listrik, sewa genset, operasi dan pemeliharaan dan material atau jasa yang diberikan dalam kegiatan usaha biasa.

i. Trade receivables

Trade receivables are amounts due from customers for electricity, rental genset, operation and maintenance and materials sold or services performed in the ordinary course of business.

Piutang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, jika dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi dengan provisi atau penurunan nilai.

Trade receivables are initially recognised at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, less any provision for impairment.

Kerugian penurunan nilai piutang disajikan sebagai bagian dari beban usaha pada laba rugi. Jumlah yang selanjutnya dapat dipulihkan kembali atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan, dikreditkan pada laba rugi terhadap item baris yang sama.

The impairment losses on receivables are presented as part of operating expenses in profit or loss. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the same line item.

Lihat Catatan 3g untuk informasi lebih lanjut mengenai kebijakan penentuan jumlah cadangan kerugian piutang Perusahaan.

See Note 3g for further information regarding the policy on the determination of the amount for the loss allowance on the Company's receivables.

j. Persediaan

Material dan suku cadang dan minyak pelumas dinilai dengan harga perolehan dikurangi dengan penyisihan untuk persediaan usang dan bergerak lambat. Harga perolehan ditentukan dengan metode rata-rata bergerak. Provisi persediaan usang dan bergerak lambat ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan atau penjualan masing-masing jenis persediaan pada masa mendatang. Persediaan barang pemeliharaan dibebankan pada beban pokok pendapatan pada periode pemakaiannya atau dijual.

j. Inventories

Materials, spare parts and lubricants are valued at cost less a provision for obsolete and slow moving inventory. Cost is determined based on the moving average method. A provision for obsolete and slow moving inventory is determined on the basis of estimated future usage or sale of each type of inventory. Supplies of maintenance materials are charged to cost of revenues in the period in which they are used or sold.

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/14 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)

k. Aset tetap

k. Fixed assets

Perusahaan menganalisis fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis tanah dan hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk masing-masing tanah dan hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat suatu kejadian atau transaksi ekonomis yang mendasarinya. Jika tanah dan hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada Perusahaan, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Perusahaan menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK No. 73, "Sewa". Jika tanah dan hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Perusahaan menerapkan PSAK No. 16, "Aset tetap" yaitu tanah dan hak atas tanah diakui sebesar harga perolehan dan tidak disusutkan.

The Company analyses the facts and circumstances for each type of land and land rights in determining the accounting for each of these land and land rights so that it can accurately represent an underlying economic event or transaction. If the land and land rights do not transfer control of the underlying assets to the Company, but gives the rights to use the underlying assets, the Company applies the accounting treatment of these transactions as leases under SFAS No. 73, "Leases". If the land and land rights are substantially similar to land purchases, the Company applies SFAS No. 16, "Property, plant and equipment" under which land and land rights are recognised at cost and not depreciated.

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Fixed assets are initially recognised at cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable to bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus. Penyusutan atas aset tetap berdasarkan estimasi masa manfaat sebagai berikut:

Depreciation is calculated using the straight-line method. Fixed assets are depreciated based on the following estimated useful lives:

	<u>Tahun/Year</u>	
Bangunan umum dan prasarana	10 - 50	<i>Buildings and infrastructure</i>
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	10	<i>Telecommunication and data processing equipment</i>
Perlengkapan umum	2 - 5	<i>General equipment</i>
Instalasi dan mesin pembangkit	12 - 40	<i>Installations and power plants</i>

Masa manfaat ekonomis dan metode penyusutan aset tetap ditelaah, jika diperlukan, setidaknya disesuaikan, pada setiap akhir tahun buku. Dampak dari setiap revisi diakui dalam laba rugi, ketika perubahan terjadi.

The useful lives and depreciation methods of fixed assets are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each financial year. The effects of any revisions are recognised in profit or loss, when the changes arise.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan apabila nilai tercatat aset lebih besar daripada estimasi jumlah yang dapat dipulihkan (Catatan 3I).

An asset's carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount (Note 3I).

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/15 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)

k. Aset tetap (lanjutan)

k. Fixed assets (continued)

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap diakui sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

The costs of repairs and maintenance are charged to profit or loss as incurred. Subsequent costs incurred to add, replace part of, or service an item of fixed assets, are recognised as assets if and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

Aset yang tidak digunakan lagi atau dijual, nilai tercatatnya dikeluarkan dari laporan keuangan dan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut diakui dalam laba rugi.

For assets which are no longer utilised or sold, the carrying amount is eliminated from the financial statements and resulting gains or losses on disposal of fixed assets are recognised in profit or loss.

Pekerjaan dalam pelaksanaan merupakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan pembangunan aset tetap. Pekerjaan dalam pelaksanaan dinyatakan sebesar biaya perolehan, termasuk biaya pinjaman selama masa pembangunan dari pinjaman yang digunakan untuk pembangunan, beban penyusutan aset tetap yang digunakan dalam pekerjaan pembangunan dan biaya pengujian ketika aset dapat berfungsi setelah dikurangi penjualan listrik ketika masa uji coba. Pekerjaan dalam pelaksanaan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan. Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

Construction in progress represents costs directly attributable to the construction of fixed asset. Construction in progress is stated at cost, which includes borrowing costs during construction on debts incurred to finance the construction, depreciation of fixed assets used in the construction and cost of testing whether the asset is functioning properly after deducting sales of electricity during the commissioning period. Construction in progress is transferred to the respective fixed asset account when completed and ready for use. Depreciation is charged from the date on which the assets are ready for use in the manner intended by management.

l. Penurunan nilai aset nonkeuangan

l. Impairment of non-financial assets

Aset yang memiliki masa manfaat yang terbatas diamortisasi diuji ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai aset. Dalam menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah dimana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi. Aset nonkeuangan selain *goodwill* yang mengalami penurunan nilai diuji setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai.

Assets that have a definite useful life are subject to amortisation are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognised for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs of disposal and value-in-use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows. Non-financial assets other than goodwill that suffer impairment are reviewed for a possible reversal of the impairment at each reporting date.

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/16 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)

l. Penurunan nilai aset nonkeuangan (lanjutan)

Pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset selain *goodwill* diakui jika dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali dilakukan. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi. Pembalikan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset melebihi biaya perolehan disusutkan sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pembalikan dilakukan. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dibalik lagi.

l. Impairment of non-financial assets (continued)

Reversal of impairment losses for assets other than goodwill is recognised if and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal of impairment losses will be immediately recognised in profit or loss. The reversal should not result in the carrying amount of an asset exceeding what the depreciated cost would have been had the impairment not been recognised as the date on which the impairment was reversed. Impairment losses relating to goodwill would not be reversed.

m. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang diperoleh dari pemasok dalam kegiatan usaha biasa. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek bila pembayaran dilakukan dalam jangka waktu satu tahun atau kurang. Jika tidak, utang tersebut akan disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

m. Trade payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Trade payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less. If not, they are presented as non-current liabilities.

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya amortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

Trade payables are initially recognised at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

n. Provisi

Provisi diakui ketika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Perusahaan diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

n. Provision

Provisions are recognised when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event and it is probable that the Company will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisi diukur pada nilai kini dari estimasi terbaik manajemen atas pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai kini adalah tingkat diskonto sebelum pajak, yang mencerminkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan liabilitas tersebut. Peningkatan provisi sehubungan dengan berlalunya waktu diakui sebagai beban keuangan.

The provision is measured at the present value of the management's best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the end of the reporting period. The discount rate used to determine the present value is a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the liabilities. The increase in the provision due to the passage of time is recognised as finance cost.

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/17 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)

n. Provisi (lanjutan)

Jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga, maka penggantian itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti akan diterima jika entitas menyelesaikan kewajiban. Penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah. Jumlah yang diakui sebagai penggantian tidak boleh melebihi nilai provisi.

n. Provision (continued)

Where some or all of the expenditure required to settle a provision is expected to be reimbursed by another party, the reimbursement shall be recognised when, and only when, it is virtually certain that reimbursement will be received if the entity settles the obligation. The reimbursement shall be treated as a separate asset. The amount recognised for the reimbursement shall not exceed the amount of the provision.

o. Sewa

Perusahaan sebagai penyewa

Pada tanggal inepsi kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Perusahaan menyewa aset tetap tertentu, yang kontrak sewanya dibuat untuk periode tetap dari satu hingga tiga tahun tetapi mungkin memiliki opsi perpanjangan.

Persyaratan sewa dinegosiasikan secara individual dan berisi berbagai persyaratan dan ketentuan yang berbeda. Perjanjian sewa tidak memberlakukan perjanjian apa pun selain jaminan untuk tujuan peminjaman.

Sewa diakui sebagai aset hak-guna dan liabilitas terkait pada tanggal di mana aset sewaan tersedia untuk digunakan oleh Perusahaan. Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara liabilitas dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan ke laba rugi selama masa sewa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa untuk setiap periode. Aset hak-guna didepresiasi selama periode yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa sewa dengan metode garis lurus.

o. Leases

The Company as a lessee

At the contract inception date, the Company assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if it conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

The Company leases certain fixed asset, in which the rental contracts are typically made for fixed periods of one to three years but may have extension options.

Lease terms are negotiated on an individual bases and contain a wide range of different terms and conditions. The lease agreements do not impose any covenants other than security for borrowing purposes.

Leases are recognised as a right-of-use asset and a corresponding liability at the date on which the leased asset is available for use by the Company. Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period. The right-of-use asset is depreciated over the shorter of the asset's useful life and the lease term on a straight-line basis.

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/18 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

o. Sewa (lanjutan)

Perusahaan sebagai penyewa (lanjutan)

Aset dan liabilitas yang timbul dari sewa pada awalnya diukur dengan basis nilai kini. Liabilitas sewa termasuk nilai bersih sekarang dari pembayaran sewa berikut:

- Pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi), dikurangi piutang insentif sewa;
- Pembayaran sewa variabel yang didasarkan pada indeks atau tingkat, pada awalnya diukur menggunakan indeks atau tingkat pada tanggal mulai;
- Jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa berdasarkan jaminan nilai residu;
- Harga pelaksanaan dari opsi pembelian jika penyewa cukup yakin untuk menggunakan opsi tersebut; dan
- Pembayaran penalti untuk penghentian sewa, jika masa sewa mencerminkan penyewa yang melaksanakan opsi tersebut.

Pembayaran sewa yang harus dilakukan berdasarkan opsi perpanjangan tertentu juga termasuk dalam pengukuran liabilitas.

Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika tarif tidak dapat segera ditentukan, di mana hal tersebut secara umum terjadi pada sewa dalam Perusahaan, suku bunga pinjaman inkremental penyewa digunakan, yaitu tarif yang harus dibayar oleh penyewa untuk meminjam dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak-guna dalam lingkungan ekonomi serupa dengan syarat dan ketentuan yang serupa.

Untuk menentukan suku bunga pinjaman tambahan, Perusahaan:

- jika memungkinkan, menggunakan pembiayaan pihak ketiga terkini yang diterima oleh penyewa individu sebagai titik awal, disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kondisi pembiayaan sejak pembiayaan pihak ketiga diterima;
- menggunakan pendekatan build-up yang dimulai dengan suku bunga bebas risiko yang disesuaikan dengan risiko kredit untuk sewa yang dimiliki oleh Perusahaan, yang tidak memiliki pembiayaan pihak ketiga baru-baru ini; dan

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)

o. Leases (continued)

The Company as a lessee (continued)

Assets and liabilities arising from a lease are initially measured on a present value basis. Lease liabilities include the net present value of the following lease payments:

- Fixed payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives receivable;
- Variable lease payment that are based on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;
- Amounts expected to be payable by the lessee under residual value guarantees;
- The exercise price of a purchase option if the lessee is reasonably certain to exercise that option; and
- Payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the lessee exercising that option.

Lease payments to be made under reasonably certain extension options are also included in the measurement of the liability.

The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease. If the rate cannot be readily determined, which is generally the case for leases in the Company, the lessee's incremental borrowing rate is used, being the rate that the individual lessee would have to pay to borrow the funds necessary to obtain an asset of similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment with similar terms, security and conditions.

To determine the incremental borrowing rate, the Company:

- where possible, uses recent third-party financing received by the individual lessee as a starting point, adjusted to reflect changes in financing conditions since third party financing was received;
- uses a build-up approach that starts with a risk-free interest rate adjusted for credit risk for leases held by the Company, which does not have recent third-party financing; and

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/19 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

o. Sewa (lanjutan)

Perusahaan sebagai penyewa (lanjutan)

Untuk menentukan suku bunga pinjaman tambahan, Perusahaan: (lanjutan)

- membuat penyesuaian spesifik untuk sewa, misalnya: jangka waktu dan jaminan.

Perusahaan dihadapkan pada potensi kenaikan di masa depan dalam pembayaran sewa variabel berdasarkan indeks atau tarif, yang tidak termasuk dalam liabilitas sewa sampai diberlakukan. Ketika penyesuaian pembayaran sewa berdasarkan indeks atau suku bunga mulai berlaku, liabilitas sewa dinilai kembali dan disesuaikan dengan aset hak-guna.

Pembayaran sewa dialokasikan antara biaya pokok dan keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama masa sewa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas sisa saldo liabilitas untuk setiap periode.

Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan yang terdiri dari berikut ini:

- Jumlah pengukuran awal liabilitas sewa;
- Pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal dimulainya dikurangi insentif sewa yang diterima;
- Biaya langsung awal; dan
- Biaya restorasi.

Aset hak-guna umumnya disusutkan sepanjang waktu yang lebih pendek antara lama masa manfaat aset dan jangka waktu sewa menggunakan metode garis lurus. Jika Perusahaan cukup yakin untuk melaksanakan opsi pembelian, aset hak-guna disusutkan selama masa manfaat aset yang mendasarinya.

Aset hak-guna juga mengalami penurunan nilai (Catatan 3I).

Pembayaran terkait dengan sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diakui atas dasar garis lurus sebagai beban dalam laporan laba rugi. Sewa jangka pendek adalah sewa dengan masa sewa 12 bulan atau kurang. Aset bernilai rendah terdiri dari peralatan umum.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)

o. Leases (continued)

The Company as a lessee (continued)

To determine the incremental borrowing rate, the Company: (continued)

- makes adjustments specific to the lease, such as terms and guarantees.

The Company is exposed to potential future increases in variable lease payments based on an index or rate, which are not included in the lease liability until they take effect. When adjustments to lease payments based on an index or rate take effect, the lease liability is reassessed and adjusted against the right-of-use asset.

Lease payments are allocated between principal and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

Right-of-use assets are measured at cost comprising the following:

- The amount of the initial measurement of lease liability;
- Any lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received;
- Any initial direct costs; and
- Restoration costs.

Right-of-use assets are generally depreciated over the shorter of the asset's useful life and the lease term on a straight-line basis. If the Company is reasonably certain to exercise a purchase option, the right-of-use asset is depreciated over the underlying asset's useful life.

The right-of-use assets are also subject to impairment (Note 3I).

Payments associated with short-term leases and leases of low-value assets are recognised on a straight-line basis as an expense in profit or loss. Short-term leases are leases with a lease term of 12 months or less. Low-value assets comprise general equipment.

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/20 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI **3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY**
MATERIAL (lanjutan) **INFORMATION (continued)**

o. Sewa (lanjutan)

o. Leases (continued)

Perusahaan sebagai penyewa (lanjutan)

The Company as a lessee (continued)

Opsi perpanjangan dan terminasi

Extension and termination options

Opsi perpanjangan dan terminasi termasuk dalam sejumlah sewa properti dan peralatan di seluruh Perusahaan. Istilah-istilah ini digunakan untuk memaksimalkan fleksibilitas operasional dalam hal pengelolaan kontrak. Mayoritas opsi perpanjangan dan terminasi yang dimiliki hanya dapat dilaksanakan oleh Perusahaan dan bukan oleh pemberi sewa masing-masing.

Extension and termination options are included in a number of property, plant, and equipment leases across the Company. These terms are used to maximise operational flexibility in terms of managing contracts. The majority of extension and termination options held are exercisable only by the Company and not by the respective lessor.

Sewa jangka-pendek

Short-term leases

Perusahaan memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Perusahaan mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

The Company has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less. The Company recognises the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Modifikasi sewa

Lease modification

Penyewa mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

A lessee shall account for a lease modification as a separate lease if both:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

- the modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and
- the consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, penyewa:

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, at the effective date of the lease modification a lease shall:

- mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian; dan
- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian berdasarkan sisa umur sewa dan sisa pembayaran sewa dengan melakukan penyesuaian terhadap aset hak-guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan pada tanggal efektif modifikasi;

- allocate the consideration in the modified contract;
- determine the lease term of the modified lease; and
- remeasures the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate on the basis of the remaining lease term and the remaining lease payment with a corresponding adjustment to the right-of-use assets. The revised discount rate is determined as the Company's incremental borrowing rate at the effective date of the modification;

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/21 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

o. Sewa (lanjutan)

Perusahaan sebagai penyewa (lanjutan)

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, penyewa mencatat pengukuran kembali liabilitas sewa dengan:

- menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna untuk merefleksikan penghentian parsial atau penuh sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Penyewa mengakui dalam laba rugi setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan penghentian parsial atau penuh sewa tersebut.
- membuat penyesuaian terkait dengan aset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

p. Imbalan kerja

Imbalan pascakerja

Skema pensiun diklasifikasikan sebagai program iuran pasti atau program imbalan pasti, tergantung pada substansi ekonomi dari syarat dan kondisi utama program tersebut. Program iuran pasti adalah program pensiun yang mewajibkan Perusahaan membayar sejumlah iuran tertentu kepada entitas yang terpisah. Perusahaan tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika entitas tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan atas jasa yang diberikan pekerja pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Program imbalan pasti adalah program pensiun yang bukan merupakan program iuran pasti. Program imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima seorang pekerja pada saat pensiun, biasanya berdasarkan pada satu atau lebih faktor seperti usia, masa kerja, dan kompensasi.

Perusahaan harus mencadangkan jumlah minimal imbalan pensiun sesuai dengan Peraturan-peraturan Ketenagakerjaan atau Peraturan Perusahaan ("PP"), mana yang lebih tinggi. Karena Peraturan-peraturan Ketenagakerjaan atau PP menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, program pensiun berdasarkan Peraturan-peraturan Ketenagakerjaan atau PP adalah program imbalan pasti.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)

o. Leases (continued)

The Company as a lessee (continued)

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, the lessee shall account for the remeasurement of the lease liability by:

- decreasing the carrying amount of the right-of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The lessee shall recognise in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease.
- making a corresponding adjustment to the right-of-use asset for all other lease modifications.

p. Employee benefits

Post-employment benefits

Pension schemes are classified as either defined contribution plans or defined benefit plans, depending on the economic substance of the plan as derived from its principal terms and conditions. A defined contribution plan is a pension plan under which the Company pays fixed contributions into a separate entity. The Company has no legal or constructive obligations to pay further contributions if the fund does not hold sufficient assets to pay all employees the benefits relating to employee service in the current and prior years. A defined benefit plan is a pension plan that is not a defined contribution plan. Typically, defined benefit plans define an amount of pension benefit that an employee will receive upon retirement, usually dependent on one or more factors such as age, years of service and compensation.

The Company is required to provide a minimum amount of pension benefit in accordance with Manpower Regulations or the Company's Regulation (the "CR"), whichever is higher. Since the Manpower Regulation or the CR sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the Manpower Regulations or the CR represent defined benefit plans.

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/22 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)

p. Imbalan kerja (lanjutan)

p. Employee benefits (continued)

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan setara dengan nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir tahun pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Imbalan pascakerja terdiri dari imbalan pesangon dan penghargaan purna jabatan.

The liability recognised in the statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is equivalent to the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting year less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. Post-employment benefits consist of severance benefits and employment awards.

Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga obligasi korporat berkualitas tinggi dalam denominasi mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun. Apabila tidak terdapat pasar aktif untuk obligasi korporat tersebut, digunakan bunga obligasi pemerintah.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using the interest rates of high quality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms of maturity approximating the terms of the related pension obligations. When there is no deep market for such bonds, the market rates of government bonds are used.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti diakui pada saat kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Past service costs are recognised immediately in profit or loss. Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognised in profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

Pengukuran kembali yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi-asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan pada ekuitas dalam laporan penghasilan komprehensif lain pada tahun dimana beban tersebut terjadi.

Remeasurements arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in the statement of other comprehensive income in the year in which they arise.

Pesangon pemutusan kontrak kerja

Termination benefits

Pesangon pemutusan kontrak kerja dibayarkan ketika pekerja diberhentikan, atau ketika pekerja menerima tawaran imbalan dari entitas atas terminasi kontrak kerja. Perusahaan mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja pada tanggal yang lebih dahulu dari: (i) ketika Perusahaan tidak bisa lagi membatalkan penawaran pesangon; dan (ii) ketika Perusahaan mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam lingkup PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi" dan melibatkan pembayaran pesangon pemutusan kontrak kerja. Dalam hal pekerja menerima tawaran imbalan dari entitas atas terminasi kontrak kerja, pesangon pemutusan kontrak kerja diukur berdasarkan ekspektasi jumlah karyawan yang menerima penawaran tersebut. Pesangon pemutusan kontrak kerja yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan didiskontokan ke nilai kini.

Termination benefits are payable when employment is terminated by the Company or when the employee accepts a compensation offer from the entity for terminating the employment contract. The Company recognises termination benefits at the earlier of the following dates: (i) when the Company can no longer withdraw the offer of those benefits; and (ii) when the Company recognises costs for a restructuring that is within the scope of SFAS No. 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" and involves the payment of termination benefits. In the case the employee accepts an offer of compensation from the entity upon termination of the employment contract, the termination benefits are measured based on the number of employees expected to accept the offer. Benefits falling due more than 12 months after the reporting date are discounted to their present value.

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/23 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)

q. Modal saham

Saham biasa dikelompokkan sebagai ekuitas, dan biaya langsung yang berkaitan dengan penerbitan saham baru atau opsi disajikan sebagai pengurang ekuitas, setelah dikurangi pajak, dari jumlah yang diterima.

q. Share capital

Ordinary shares are classified as equity and incremental costs directly attributable to the issuance of new shares are shown in equity as deduction, net of tax, from the proceeds.

r. Pembagian dividen

Pembagian dividen kepada pemegang saham Perusahaan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan Perusahaan dalam periode ketika pembagian dividen telah diumumkan.

r. Dividend distributions

Dividend distributions to the Company's shareholders are recognised as liabilities in the financial statements in the period when the dividends are declared.

s. Pengakuan pendapatan dan beban

Pengakuan pendapatan

Pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 (lima) langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak;
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin; dan
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

s. Revenue and expense recognition

Revenue recognition

Revenue recognition has to fulfil five steps of assessment, as follows:

1. Identify contract(s) with a customer;
2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct;
3. Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Company estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period;
4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative standalone selling prices of each distinct good or service promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative standalone selling price is estimated based on expected cost plus margin; and
5. Recognise revenue when the performance obligation is satisfied by transferring the promised good or service to the customer (which is when the customer obtains control of the goods or services).

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/24 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

s. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pengakuan pendapatan (lanjutan)

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

- a) Pada waktu tertentu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- b) Sepanjang waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam sepanjang waktu, Perusahaan memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Penjualan tenaga listrik

Pendapatan penjualan listrik diakui berdasarkan pemakaian energi listrik (kWh) yang dipasok kepada PLN dengan menggunakan tarif yang ditetapkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. Perusahaan mengakui pendapatan atas kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dalam sepanjang waktu ketika listrik dikonsumsi PLN.

Pendapatan jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik

Perusahaan mengakui pendapatan atas kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dalam suatu periode waktu hanya jika Perusahaan dapat mengukur dengan andal atas penyelesaian kewajiban pelaksanaan. Dalam keadaan tertentu, Perusahaan mungkin tidak dapat mengukur hasil atas kewajiban pelaksanaan secara wajar, tetapi Perusahaan berekspektasi untuk memulihkan biaya yang timbul dalam memenuhi kewajiban pelaksanaan. Dalam keadaan tersebut, Perusahaan mengakui pendapatan hanya sebatas biaya yang timbul sampai saat yang dapat mengukur hasil kewajiban pelaksanaan secara wajar.

Pendapatan jasa operasi dan pemeliharaan juga diakui ketika kontrol atas jasa tersebut telah diberikan dan diterima oleh pelanggan.

Pendapatan dari penjualan material dan suku cadang

Penjualan dari material dan suku cadang diakui pada setiap penjualan individu ketika kontrol telah beralih ke pelanggan dan telah Perusahaan telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)

s. Revenue and expense recognition (continued)

Revenue recognition (continued)

A performance obligation may be satisfied at the following:

- a) *A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or*
- b) *Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Company selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognised as the performance obligation is satisfied.*

Sales of electricity

Revenue from the sale of electricity is recognised based on electricity usage (kWh) to PLN using the tariff stipulated in the power purchase agreement. The Company recognises revenue for a performance obligation satisfied over time when electricity is consumed by PLN.

Rendering of services on operation and maintenance of power plant

The Company recognises revenue for a performance obligation satisfied over time only if the Company can reasonably measure its progress towards complete satisfaction of the performance obligation. In some circumstances, the Company may not be able to reasonably measure the outcome of a performance obligation, but the Company expects to recover the costs incurred in satisfying the performance obligation. In those circumstances, the Company recognises revenue only to the extent of the costs incurred until such time that it can reasonably measure the outcome of the performance obligation.

Revenues from services on maintenance and operations are also recognised when control over the services is completed and accepted by the customer.

Revenue from sales of material and spare parts

Sales of material and spare parts are recognised on each individual sale when control transfers to the customers and the Company has completed the performance obligations.

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/25 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

s. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pengakuan beban

Beban diakui pada saat terjadi dengan menggunakan dasar akrual.

t. Pajak penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laba rugi, kecuali jika pajak itu terkait dengan kejadian atau transaksi yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, beban pajak tersebut masing-masing diakui pada penghasilan komprehensif lain atau secara langsung dicatat ke ekuitas.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan dan dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil dalam Surat Pemberitahuan Tahunan sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi atas peraturan pajak yang berlaku. Jika perlu, manajemen menentukan provisi dibentuk berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar pada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan menggunakan tarif dan peraturan pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada akhir tahun pelaporan dan diharapkan diterapkan jika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasikan atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasikan dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)

s. Revenue and expense recognition (continued)

Expenses recognition

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis

t. Income tax

Tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax expense is recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws that have been enacted as at the reporting date and computed using the prevailing tax rates.

Management periodically evaluates the positions taken in Annual Tax Returns with respect to situations in which the applicable tax regulations are subject to interpretation. It establishes a provision where appropriate on the basis of the amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred income tax is recognised using the liability method on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements. Deferred income tax is determined using the tax rate and laws that have been enacted or substantially enacted at the end of the reporting year and is expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the temporary differences can be utilised.

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/26 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

4. PERTIMBANGAN PENTING DAN ESTIMASI
AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi, pertimbangan dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan, serta jumlah pendapatan dan beban selama tahun pelaporan. Estimasi, asumsi dan pertimbangan tersebut dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk harapan peristiwa di masa datang yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Perusahaan telah mengidentifikasi hal-hal berikut dimana diperlukan pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan dan dimana hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut jika menggunakan asumsi dan kondisi yang berbeda dan dapat mempengaruhi secara material hasil keuangan atau posisi keuangan Perusahaan yang dilaporkan dalam tahun mendatang.

Pertimbangan penting dalam penerapan kebijakan akuntansi

Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Karena Perusahaan tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir.

Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Perusahaan mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Perusahaan, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu di mana sewa dimasukkan, dan mata uang di mana pembayaran sewa ditentukan.

4. CRITICAL JUDGEMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make estimates, judgements and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and the disclosure of contingent assets and liabilities at the reporting date and the reported amounts of revenue and expenses during the reporting year. Estimates, assumptions and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

The Company has identified the following matters under which significant judgements, estimates and assumptions are made and where actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions and may materially affect the financial results or financial position of the Company as reported in future years.

Critical judgements in applying accounting policies

Leases

Determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgement to assess whether the arrangement conveys a right to obtain substantially all the economic benefits from the use of the asset throughout the period of use and the right to direct the use of the asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement.

Since the Company could not readily determine the implicit rate, management uses the Company's incremental borrowing rate as a discount rate. There are a number of factors to consider in determining an incremental borrowing rate, many of which need judgement in order to be able to reliably quantify any necessary adjustments to arrive at the final discount rates.

In determining the incremental borrowing rate, the Company considers the following main factors: the Company's corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered into, and the currency in which the lease payments are denominated.

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/27 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

4. PERTIMBANGAN PENTING DAN ESTIMASI
AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan penting dalam penerapan kebijakan akuntansi (lanjutan)

Sewa (lanjutan)

Dalam menentukan jangka waktu sewa, manajemen mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menciptakan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan). Penilaian tersebut ditinjau jika terjadi peristiwa signifikan atau perubahan signifikan dalam situasi yang memengaruhi penilaian ini dan berada dalam kendali Perusahaan.

Untuk sewa gedung dan peralatan, faktor-faktor berikut yang biasanya paling relevan:

- a. Jika ada hukuman yang signifikan untuk dihentikan (atau tidak diperpanjang), Perusahaan biasanya cukup pasti untuk memperpanjang (atau tidak menghentikan).
- b. Jika setiap perbaikan prasarana diharapkan memiliki nilai yang signifikan, Perusahaan biasanya cukup pasti untuk memperpanjang (atau tidak menghentikan).
- c. Jika tidak, Perusahaan mempertimbangkan faktor-faktor lain termasuk durasi sewa historis dan biaya serta gangguan bisnis yang diperlukan untuk mengganti aset yang disewa.

Kepentingan dalam pengaturan bersama

Pertimbangan diperlukan untuk menentukan ketika Perusahaan memiliki pengendalian bersama, yang membutuhkan penilaian mengenai aktivitas yang relevan dan ketika keputusan yang berkaitan dengan aktivitas tersebut membutuhkan persetujuan dengan suara bulat. Perusahaan menentukan bahwa aktivitas yang relevan untuk pengaturan bersama adalah aktivitas yang berkaitan dengan operasi dan pengambilan keputusan modal dari pengaturan tersebut.

4. CRITICAL JUDGEMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES (continued)

Critical judgements in applying accounting policies (continued)

Leases (continued)

In determining the lease term, management considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated). The lease term is reviewed if a significant event or a significant change in circumstances occurs which affects this assessment and that is within the control of the Company.

For leases of buildings and equipment, the following factors are normally the most relevant:

- a. If there are significant penalties to terminate (or not extend), the Company is typically reasonably certain to extend (or not terminate).*
- b. If any leasehold improvements are expected to have a significant remaining value, the Company is typically reasonably certain to extend (or not terminate).*
- c. Otherwise, the Company considers other factors including historical lease durations and the costs and business disruption required to replace the leased asset.*

Interest in joint arrangements

Judgement is required to determine when the Company has joint control, which requires an assessment of the relevant activities and when the decisions relating to those activities require unanimous consent. The Company has determined that the relevant activities for its joint arrangements are those relating to the financial, operating and capital decisions of the arrangement.

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/28 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

4. PERTIMBANGAN PENTING DAN ESTIMASI
AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan penting dalam penerapan
kebijakan akuntansi (lanjutan)

Kepentingan dalam pengaturan bersama
(lanjutan)

Pertimbangan juga diperlukan untuk mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai pengendalian bersama atau ventura bersama. Pengklasifikasian pengaturan tersebut mengharuskan Perusahaan untuk menilai hak dan kewajiban yang timbul dari pengaturan tersebut. Secara khusus, Perusahaan mempertimbangkan:

- Struktur dari pengaturan bersama - apakah dibentuk melalui kendaraan terpisah.
- Ketika pengaturan tersebut terstruktur melalui kendaraan terpisah, Perusahaan juga mempertimbangkan hak dan kewajiban yang timbul dari:
 - a. Bentuk legal dari kendaraan terpisah;
 - b. Persyaratan dari perjanjian kontraktual; dan
 - c. Fakta dan kondisi lainnya, jika relevan.

Penilaian ini sering membutuhkan pertimbangan yang signifikan. Kesimpulan yang berbeda mengenai pengendalian bersama dan apakah suatu pengaturan adalah sebuah operasi bersama atau ventura bersama, dapat memiliki dampak material terhadap laporan keuangan.

Sumber ketidakpastian estimasi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

Provisi atas KKE piutang usaha dan aset keuangan lainnya

Penerapan PSAK No. 71 mengakibatkan perubahan penilaian atas estimasi dan pertimbangan akuntansi yang signifikan terkait dengan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang. Perusahaan menerapkan pendekatan disederhanakan untuk mengukur KKE yang menggunakan penyisihan kerugian ekspektasian seumur hidup untuk piutang.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

4. CRITICAL JUDGEMENTS AND SIGNIFICANT
ACCOUNTING ESTIMATES (continued)

Critical judgements in applying accounting
policies (continued)

Interest in joint arrangements (continued)

Judgement is also required to classify a joint arrangement as either a joint operation or a joint venture. Classifying the arrangement requires the Company to assess its rights and obligations arising from the arrangement. Specifically, it considers:

- *The structure of the joint arrangement - whether it is structured through a separate vehicle.*
- *When the arrangement is structured through a separate vehicle, the Company also considers the rights and obligations arising from:
 - a. *The legal form of the separate vehicle;*
 - b. *The terms of the contractual arrangement; and*
 - c. *Other facts and circumstances, when relevant.**

This assessment often requires significant judgement. A different conclusion on joint control and also whether the arrangement is a joint operation or a joint venture, may materially impact the financial statements.

Sources of estimation uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation at the end of the reporting period which have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below:

Provision for ECL of trade receivables and other financial assets

The implementation of SFAS No. 71 resulted in a change to the assessment of the significant accounting estimates and judgements related to provision for loss impairment of receivables. The Company applies a simplified approach to measure ECL which uses a lifetime expected loss allowance for the receivables.

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/29 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

4. PERTIMBANGAN PENTING DAN ESTIMASI
AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Sumber ketidakpastian estimasi (lanjutan)

Provisi atas KKE piutang usaha dan aset keuangan lainnya (lanjutan)

Dalam menentukan KKE, manajemen diharuskan untuk menggunakan pertimbangan dalam menentukan apa yang dianggap sebagai peningkatan signifikan dalam risiko kredit dan dalam membuat asumsi dan estimasi untuk memasukkan informasi yang relevan tentang peristiwa masa lalu, kondisi saat ini, dan prakiraan kondisi ekonomi. Pertimbangan telah diterapkan dalam menentukan umur dan titik pengakuan awal piutang. Tingkat provisi tertentu dievaluasi oleh manajemen berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kolektibilitas piutang.

Dalam kasus ini, Perusahaan menggunakan penilaian berdasarkan fakta dan keadaan terbaik yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada hubungan dengan pelanggan dan status kredit mereka berdasarkan laporan kredit pihak ketiga dan faktor pasar yang diketahui, untuk mencatat cadangan khusus untuk pelanggan terhadap jumlah yang jatuh tempo. dalam jumlah yang diharapkan untuk dikumpulkan. Cadangan spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan karena informasi tambahan yang diterima mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap

Masa manfaat setiap aset tetap, Perusahaan ditentukan berdasarkan periode kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset.

Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan beban yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

4. CRITICAL JUDGEMENTS AND SIGNIFICANT
ACCOUNTING ESTIMATES

Sources of estimation uncertainty (continued)

Provision for ECL of trade receivables and other financial assets (continued)

In determining ECL, management is required to exercise judgement in defining what is considered to be a significant increase in credit risk and in making assumptions and estimates to incorporate relevant information about past events, current conditions and forecasts of economic conditions. Judgement has been applied in determining the lifetime and point of initial recognition of receivables. A certain provision rate is evaluated by management based on factors that affect the collectability of the receivable.

The level of a specific provision is evaluated by management on the basis of factors that affect the collectability of the accounts. In these cases, the Company uses judgement based on the best available facts and circumstances, including but not limited to the relationship with the customers and their credit status based on third party credit reports and known market factors, to record specific reserves for customers against amounts due in that it expects to collect. These specific reserves are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts estimated.

Estimated useful lives of property, plant, and equipment

The useful life of each item of the Company's fixed asset, is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset.

It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/30 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

4. PERTIMBANGAN PENTING DAN ESTIMASI
AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Sumber ketidakpastian estimasi (lanjutan)

Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap
(lanjutan)

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan nilai tercatat aset tetap.

Imbalan pascakerja

Nilai kini kewajiban pensiun tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan berdasarkan basis dari aktuarial dengan menggunakan sejumlah asumsi. Asumsi yang digunakan dalam menentukan beban/(pendapatan) bersih untuk pensiun termasuk tingkat diskonto, perubahan remunerasi masa depan, tingkat pengurangan karyawan, tingkat harapan hidup dan tahun sisa yang diharapkan dari masa aktif karyawan. Setiap perubahan dalam asumsi-asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat atas kewajiban pensiun.

Perusahaan menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada setiap akhir tahun. Tingkat suku bunga inilah yang digunakan untuk menentukan nilai kini dari estimasi arus kas keluar masa depan yang akan dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pensiun. Dalam menentukan tingkat diskonto yang sesuai, Perusahaan menggunakan tingkat suku bunga obligasi korporat berkualitas tinggi (atau obligasi pemerintah, dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan memiliki waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo kewajiban pensiun yang bersangkutan.

Asumsi kunci lainnya untuk kewajiban pensiun didasarkan sebagian pada kondisi pasar saat ini.

4. CRITICAL JUDGEMENTS AND SIGNIFICANT
ACCOUNTING ESTIMATES (continued)

Sources of estimation uncertainty (continued)

Estimated useful lives of property, plant, and
equipment (continued)

A change in the estimated useful life of any item of fixed asset would affect the recorded depreciation expense and the carrying values of property, plant, and equipment.

Post-employment benefits

The present value of the pension obligation depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost/(income) for pensions include the discount rate, future remuneration changes, employee attrition rates, life expectancy and the expected remaining service years of employees. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of the pension obligation.

The Company determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the related pension obligation. In determining the appropriate discount rate, the Company considers the interest rates of high quality corporate bonds (or government bonds, if there is no deep market for high quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation.

Other key assumptions for pension obligation benefits are based in part on current market conditions.

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/31 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

4. PERTIMBANGAN PENTING DAN ESTIMASI
AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Sumber ketidakpastian estimasi (lanjutan)

Pajak penghasilan

Perhitungan beban pajak penghasilan Perusahaan memerlukan pertimbangan dan asumsi dalam menentukan pengurangan beban tertentu selama proses pengestimasian. Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ("DJP"). Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Perusahaan, melalui negosiasi dengan otoritas pajak yang relevan dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi fiskal dan perbedaan temporer, diakui apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Asumsi atas pembentukan laba kena pajak sangat dipengaruhi oleh estimasi dan asumsi manajemen atas tingkat penjualan dan biaya-biaya terkait yang terdapat risiko ketidakpastian, sehingga ada kemungkinan perubahan estimasi dan asumsi tersebut akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

4. CRITICAL JUDGEMENTS AND SIGNIFICANT
ACCOUNTING ESTIMATES (continued)

Sources of estimation uncertainty (continued)

Income taxes

The calculations of income tax expense for the Company require judgements and assumptions in determining the deductibility of certain expenses during the estimation process. All judgements and estimates made by management may be challenged by the Directorate General of Taxation ("DGT"). As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. The resolution of tax positions taken by the Company, through negotiations with the relevant tax authorities, can take several years to complete and in some cases it is difficult to predict the ultimate outcome. Where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax provision in the year in which this determination is made.

Deferred tax assets, including those arising from tax losses carried forward and temporary differences, are recognised only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which is dependent on the generation of sufficient future taxable profits. The assumptions about the generation of future taxable profits are heavily affected by the level of sales and the associated costs which are subject to risk and uncertainty. Hence, there is a possibility that changes in circumstances will alter the projected future taxable profits.

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/32 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

5. KAS DAN SETARA KAS

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Kas di bank			Cash in banks
Pihak berelasi (Catatan 25)			Related parties (Note 25)
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	195,748	78,848	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	17,984	43,123	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")
<u>AS\$</u>			<u>US\$</u>
Bank Mandiri	2,413	44,711	Bank Mandiri
BNI	524	4,491	BNI
Pihak ketiga			Third party
<u>KWD</u>			<u>KWD</u>
National Bank of Kuwait	10,356	52,817	National Bank of Kuwait
Sub-jumlah	<u>227,025</u>	<u>223,990</u>	Sub-total
Deposito berjangka			Time deposits
Pihak berelasi (Catatan 25)			Related party (Note 25)
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
BNI	-	35,459	BNI
Jumlah	<u>227,025</u>	<u>259,449</u>	Total
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun	-	2.50% - 2.75%	Interest rates per annum on time deposits
Jangka waktu	-	1 - 3 bulan/ Months	Maturity

Lihat Catatan 25 untuk informasi rincian transaksi
dan saldo dengan pihak berelasi.

Refer to Note 25 for information on the details of
transactions and balances with related parties.

6. DEPOSITO BERJANGKA

6. TIME DEPOSITS

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Deposito berjangka			Time deposits
Pihak berelasi (Catatan 25)			Related party (Note 25)
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
BNI	<u>2,500</u>	<u>-</u>	BNI
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun	2.75%	-	Interest rates per annum on time deposits
Jangka waktu	6 bulan/ months	-	Maturity

Lihat Catatan 25 untuk informasi rincian transaksi
dan saldo dengan pihak berelasi.

Refer to Note 25 for information on the details of
transactions and balances with related parties.

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/33 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

7. RESTRICTED CASH

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Pihak berelasi (Catatan 25)			Related parties (Note 25)
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
Bank Mandiri	8,807	-	Bank Mandiri
BNI	5,431	-	BNI
<u>AS\$</u>			<u>US\$</u>
Bank Mandiri	10,745	-	Bank Mandiri
Sub-jumlah	<u>24,983</u>	<u>-</u>	Sub-total
Dikurangi: jangka pendek	<u>(22,900)</u>	<u>-</u>	Less: current portion
Bagian jangka panjang	<u>2,083</u>	<u>-</u>	Non-current portion

Kas yang dibatasi penggunaannya dipergunakan sebagai jaminan pelaksanaan untuk pengadaan dengan pelanggan.

Restricted cash is used as performance bond in relation to procurement with customers.

Lihat Catatan 25 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Refer to Note 25 for information on the details of transactions and balances with related parties.

8. PIUTANG USAHA

8. TRADE RECEIVABLES

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Pihak berelasi (Catatan 25)	327,641	378,780	Related parties (Note 25)
Pihak ketiga	92,666	102,272	Third parties
Jumlah	420,307	481,052	Total
Cadangan KKE	(11,824)	(16,260)	Allowance for ECL
Jumlah, bersih	<u>408,483</u>	<u>464,792</u>	Total, net

Analisa umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

The aging analysis of trade receivables is as follows:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Belum jatuh tempo	271,939	385,215	Not yet due
Sudah jatuh tempo			Past due
1 - 30 hari	71,407	52,083	1 - 30 days
31 - 60 hari	21,007	6,458	31 - 60 days
61 - 90 hari	8,056	11,905	61 - 90 days
Diatas 90 hari	47,898	25,391	> 90 days
Jumlah	<u>420,307</u>	<u>481,052</u>	Total

Mutasi cadangan KKE adalah sebagai berikut:

The movement of the allowance for ECL is as follows:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Saldo awal	16,260	19,032	Balance at beginning of year
Pembalikan cadangan KKE	(4,436)	(2,772)	Reversal of ECL
Saldo akhir tahun	<u>11,824</u>	<u>16,260</u>	Balance at end of year

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/34 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Manajemen berpendapat bahwa cadangan atas kerugian kredit ekspektasian yang dibentuk cukup untuk menutupi KKE nilai dari piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

8. TRADE RECEIVABLES (continued)

Management believes that the allowance for ECL for trade receivables is sufficient to cover the ECL of trade receivables as at 31 December 2023 and 2022.

9. PERSEDIAAN

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Suku cadang	12,332	6,682
Bahan bakar dan pelumas	<u>3,417</u>	<u>2,745</u>
Jumlah	15,749	9,427
Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan dan persediaan usang	<u>(100)</u>	<u>(79)</u>
Jumlah, bersih	<u>15,649</u>	<u>9,348</u>

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan yang ditetapkan memadai untuk menutupi risiko penurunan nilai persediaan dan persediaan usang pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

9. INVENTORY

Spare parts
Fuel and lubricants
Total
Allowance for decline in value of inventories and inventory obsolescence
Total, net

Management believes that the allowance is adequate to cover possible losses on the decline in value of inventories and inventory obsolescence as at 31 December 2023 and 2022.

10. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Uang jaminan	10,831	4,985
Perangkat lunak	2,265	4,474
Lainnya	<u>6,711</u>	<u>2,553</u>
Jumlah	<u>19,807</u>	<u>12,012</u>
Dikurangi: jangka pendek	<u>(6,711)</u>	<u>(2,551)</u>
Bagian jangka panjang	<u>13,096</u>	<u>9,461</u>

Uang Jaminan merupakan dana yang ditahan oleh Pihak *Ministry of Electricity and Water* ("MEW") Kuwait terkait ketentuan pajak penghasilan yang berlaku di Kuwait sebesar 5% dari harga kontrak, atau setiap pembayaran akan ditahan dan dilepaskan setelah memberikan instrumen yang membuktikan pelepasan kewajiban perpajakan (tersedia surat keterangan pembebasan kewajiban pajak), sesuai dengan kontrak perjanjian No. MEW/MW/5620-2020/2021 tentang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Distribusi Sektor Jaringan pasal 15.

10. OTHER NON-CURRENT ASSETS

Security deposits
Software
Others
Total
Less: current portion
Non-current portion

The deposit is funds held by the Ministry of Electricity and Water ("MEW") Kuwait in connection with the income tax provisions applicable in Kuwait amounting to 5% of the contract price, or each payment shall be retained and shall be released only after providing an instrument evidencing discharge of tax liabilities (availability of a certificate of exemption from tax obligations), in accordance with contract agreement no. MEW/MW/5620-2020/2021 related to Operation and Maintenance of Distribution Networks in the Network Sector article 15.

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/35 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. PIUTANG DARI VENTURA BERSAMA

11. RECEIVABLES FROM A JOINT VENTURE

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
PT Maxpower Cogindo Batam ("MCB")	<u>22,826</u>	<u>17,559</u>	PT Maxpower Cogindo Batam ("MCB")

Pada tanggal 30 Desember 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian pinjaman jangka panjang dengan MCB, ventura bersama, dimana Perusahaan memberikan fasilitas pinjaman sebesar Rp8.200 dengan suku bunga yang dihitung menggunakan tingkat bunga deposito bank pemerintah periode 3 bulanan. Pengembalian pinjaman akan dilakukan dengan jangka waktu cicilan 3 bulan dan akan dibayarkan selambat-lambatnya pada setiap tanggal 28 setiap bulannya.

On 30 December 2020, the Company entered into a long-term loan agreement with MCB, a joint venture, whereby the Company provided a loan facility of Rp8,200 with an interest rate based on the interest rate of the bank deposit of a government bank for a 3-month period. The loan repayment will be made with an installment period of 3 months and will be paid no later than the 28th of each month.

Pada tanggal 18 Februari 2022, Perusahaan melakukan perjanjian pinjaman jangka panjang dengan MCB, dimana Perusahaan memberikan fasilitas pinjaman dengan limit maksimal sebesar Rp35.826 dengan bunga per tahunnya sebesar 7,55%. Jatuh tempo pinjaman adalah 29 November 2030.

On 18 February 2022, the Company entered into a long-term loan agreement with MCB, where the Company provided a loan facility with a maximum limit of Rp35,826 with annual interest of 7.55%. The maturity date of the loan is 29 November 2030.

Pinjaman ini digunakan untuk pembiayaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas ("PLTMG") Baloi 30 MW.

This loan is used to finance the 30 MW Baloi Gas Engine Power Plant ("PLTMG") project.

Selama tahun 2023, MCB melakukan pembayaran pokok pinjaman sebesar Rp14.956 (2022: nihil) dan bunga pinjaman sebesar Rp3.000 (2022: nihil) dan juga melakukan penarikan pinjaman sebesar Rp19.397.

During 2023, MCB made a loan payment of Rp14,956 (2022: nil) and an interest loan amounting to Rp3,000 (2022: nil) and also made a drawdown of loan amounting to Rp19,397.

Pada tanggal 31 Desember 2023, saldo piutang terdiri dari pokok pinjaman dan bunga masing-masing sebesar Rp20.870 (2022: Rp16.429) dan Rp1.956 (2022: Rp1.130).

As at 31 December 2023, the outstanding receivables consisted of principal and interest amounting to Rp20,870 (2022: Rp16,429) and Rp1,956 (2022: Rp1,130), respectively.

Berdasarkan penilaian penyisihan KKE, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa penyisihan atas KKE atas piutang dari ventura bersama tidak material, sehingga penyisihan atas KKE dianggap tidak diperlukan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Based on the assessment of allowance for ECL, the management of the Company is of the opinion that the provision for ECL of receivables from a joint venture is not material. Therefore, a provision for ECL is considered not necessary as at 31 December 2023 and 2022.

Lihat Catatan 25 untuk informasi transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 25 for the information of the transactions related parties.

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/36 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

12. ASET TETAP

12. FIXED ASSETS

	2023			31 Desember/ December 2023	
	31 Desember/ December 2022	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions		
Biaya perolehan					Acquisition cost
Tanah	55,091	-	-	55,091	Land
Bangunan umum dan prasarana	21,990	-	-	21,990	Buildings and infrastructure
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	19,297	-	-	19,297	Telecommunication and data processing equipment
Perlengkapan umum	58,328	7	-	58,335	General equipment
Instalasi dan mesin pembangkit	703,990	7,536	-	711,526	Installations and power plants
Subjumlah	858,696	7,543	-	866,239	Subtotal
Pekerjaan dalam pelaksanaan	-	9,693	-	9,693	Construction in progress
Jumlah	858,696	17,236	-	875,932	Total
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Bangunan umum dan prasarana	4,526	1,032	-	5,558	Buildings and infrastructure
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	9,972	3,283	-	13,255	Telecommunication and data processing equipment
Perlengkapan umum	22,066	9,296	-	31,362	General equipment
Instalasi dan mesin pembangkit	567,365	70,022	-	637,387	Installations and power plants
Jumlah	603,929	83,633	-	687,562	Total
Jumlah tercatat	254,767			188,370	Net carrying value
	2022				
	31 Desember/ December 2021	Penambahan/ Additions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 2022	
Biaya perolehan					Acquisition cost
Tanah	55,091	-	-	55,091	Land
Bangunan umum dan prasarana	21,921	-	69	21,990	Buildings and infrastructure
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	19,293	-	4	19,297	Telecommunication and data processing equipment
Perlengkapan umum	53,109	2,344	2,875	58,328	General equipment
Instalasi dan mesin pembangkit	663,461	43,477	(2,948)	703,990	Installations and power plants
Jumlah	812,875	45,821	-	858,696	Total
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Bangunan umum dan prasarana	3,724	1,032	(230)	4,526	Buildings and infrastructure
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	6,703	3,283	(14)	9,972	Telecommunication and data processing equipment
Perlengkapan umum	25,406	9,901	(13,241)	22,066	General equipment
Instalasi dan mesin pembangkit	493,123	60,757	13,485	567,365	Installations and power plants
Jumlah	528,956	74,973	-	603,929	Total
Jumlah tercatat	283,919			254,767	Net carrying value

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/37 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (lanjutan)

Beban penyusutan selama tahun berjalan dialokasikan sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Beban pokok pendapatan (Catatan 21)	76,964	68,244
Beban umum dan administrasi (Catatan 22)	<u>6,669</u>	<u>6,729</u>
Jumlah	<u>83,633</u>	<u>74,973</u>

Instalasi dan mesin pembangkit diasuransikan kepada PT Asuransi Perisai Listrik Nasional terhadap risiko kerusakan dan kemungkinan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp281.398 pada tanggal 31 Desember 2023. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Berdasarkan hasil kajian, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai tercatat pada aset tetap pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

12. FIXED ASSETS (continued)

Depreciation expense during the years is allocated as follows:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Beban pokok pendapatan (Catatan 21)	76,964	68,244	Cost of revenue (Note 21)
Beban umum dan administrasi (Catatan 22)	<u>6,669</u>	<u>6,729</u>	General and administrative expenses (Note 22)
Jumlah	<u>83,633</u>	<u>74,973</u>	Total

Installation and power plant were insured against breakdown and other possible risks with PT Asuransi Perisai Listrik Nasional with insurance coverage of Rp281,398 as at 31 December 2023. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

Based on the assessment result, the management is of the opinion that there was no indication of impairment in value of fixed assets as at 31 December 2023 and 2022.

13. SEWA

Perusahaan memiliki kontrak sewa untuk kendaraan yang digunakan dalam operasinya. Sewa kendaraan memiliki masa sewa lebih dari satu tahun.

a. Aset hak-guna

2023					
<u>31 Desember/ December 2022</u>	<u>Penambahan/ Additions</u>	<u>Pengurangan/ Deductions</u>	<u>31 Desember/ December 2023</u>		
Biaya perolehan Kendaraan	28,689	7,807	(12,895)	23,601	Acquisition cost Vehicles
Akumulasi penyusutan Kendaraan	(16,010)	(7,702)	12,895	(10,817)	Accumulated depreciation Vehicles
Jumlah tercatat	<u>12,679</u>			<u>12,784</u>	Net carrying value
2022					
<u>31 Desember/ December 2021</u>	<u>Penambahan/ Additions</u>	<u>Pengurangan/ Deductions</u>	<u>31 Desember/ December 2022</u>		
Biaya perolehan Kendaraan	32,200	8,195	(11,706)	28,689	Acquisition cost Vehicles
Akumulasi penyusutan Kendaraan	(14,735)	(12,981)	11,706	(16,010)	Accumulated depreciation Vehicles
Jumlah tercatat	<u>17,465</u>			<u>12,679</u>	Net carrying value

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/38 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

13. SEWA (lanjutan)

a. Aset hak-guna (lanjutan)

Beban penyusutan selama tahun berjalan
dialokasikan sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Beban pokok pendapatan (Catatan 21)	3,727	10,079
Beban umum dan administrasi (Catatan 22)	<u>3,975</u>	<u>2,902</u>
Jumlah	<u>7,702</u>	<u>12,981</u>

Berdasarkan hasil kajian, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai tercatat pada nilai aset hak-guna pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

b. Utang sewa

Tabel dibawah ini menunjukkan rincian liabilitas sewa dalam laporan posisi keuangan Perusahaan:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Koperasi Karyawan Cogindo	<u>12,202</u>	<u>13,230</u>
Dikurangi:		
Bagian jangka pendek	<u>6,993</u>	<u>7,664</u>
Bagian jangka panjang	<u>5,209</u>	<u>5,566</u>

Laporan laba rugi Perusahaan menyajikan saldo berikut berkaitan dengan sewa:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Beban bunga (disajikan dalam biaya keuangan)	922	1,143
Beban yang berkaitan dengan sewa jangka pendek (termasuk dalam harga pokok pendapatan dan biaya umum dan administrasi)	14,431	5,697
Biaya yang berkaitan dengan sewa aset bernilai rendah yang bukan merupakan sewa jangka pendek (termasuk dalam biaya umum dan administrasi)	681	29

Total arus kas keluar untuk sewa selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah Rp24.324 dan Rp20.131.

13. LEASES (continued)

a. Right-of-use assets (continued)

Depreciation expenses during the years is allocated as follows:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Cost of revenue (Note 21)	10,079	10,079
General and administrative expenses (Note 22)	<u>2,902</u>	<u>2,902</u>
Total	<u>12,981</u>	<u>12,981</u>

Based on the assessment result, the management is of the opinion that there was no indication of impairment in value of right-of-use assets as at 31 December 2023 and 2022.

b. Lease liabilities

The table below shows details of lease liabilities in the Company's statement of financial position:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Koperasi Karyawan Cogindo	<u>12,202</u>	<u>13,230</u>
Less:		
Current portion	<u>6,993</u>	<u>7,664</u>
Non-current portion	<u>5,209</u>	<u>5,566</u>

The Company's statement of profit or loss show the following amounts related to lease:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Interest expense (presented in finance costs)	922	1,143
Expenses relating to short-term leases (included in cost of revenue and general and administrative expenses)	14,431	5,697
Expenses relating to leases of low-value assets that are not short-term leases (included in general and administrative expenses)	681	29

The total cash outflow for leases for the years ended 31 December 2023 and 2022 were Rp24,324 and Rp20,131, respectively.

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/39 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. KEPENTINGAN DALAM ENTITAS LAIN

a. Investasi pada ventura bersama

Rincian investasi pada ventura bersama
adalah sebagai berikut:

Nama entitas ventura bersama/ Name of joint venture	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of business	Awal operasi komersial/ Start of commercial operations	Persentase penyertaan/ Percentage of ownership	
				2023	2022
PT Maxpower Cogindo Batam ("MCB")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik, aktivitas penunjang kelistrikan, perdagangan mesin, suku cadang dan perengkapannya/ Electricity supplier, electrical support activities, sale of machinery, spare parts and accessories	2022	30,00	30,00

Perusahaan ventura bersama dicatat oleh
Perusahaan dengan metode ekuitas.
Perusahaan ventura bersama adalah
perusahaan nonpublik dan tidak ada kuotasi
harga pasar yang tersedia untuk saham
mereka.

Perusahaan memiliki perwakilan Direksi dan
Komisaris di dalam ventura bersama di atas.

Mutasi investasi pada entitas ventura
bersama adalah sebagai berikut:

2023					
	Jumlah tercatat 1 Januari 2023/ Carrying Amount 1 January 2023	Bagian atas laba bersih/ Share in net income	Bagian atas penghasilan komprehensif lainnya/ Share of other comprehensive income	Jumlah tercatat 31 Desember 2023/ Carrying amount 31 December 2023	
MCB	9,521	1,585	(49)	11,057	MCB
2022					
	Jumlah tercatat 1 Januari 2022/ Carrying Amount 1 January 2022	Bagian atas laba bersih/ Share in net income	Bagian atas penghasilan komprehensif lainnya/ Share of other comprehensive income	Jumlah tercatat 31 Desember 2022/ Carrying amount 31 December 2022	
MCB	8,234	121	1,166	9,521	MCB

Berikut ini adalah ringkasan informasi
keuangan entitas ventura bersama
Perusahaan pada tanggal 31 Desember
2023 dan 2022:

	2023	2022	
Kas dan setara kas	3,990	29,200	Cash and cash equivalents
Aset lancar lainnya	28,432	11,370	Other current assets
Jumlah aset lancar	32,422	40,570	Total current assets
Aset tidak lancar	402,130	426,722	Non-current assets

14. INTERESTS IN OTHER ENTITIES

a. Investments in a joint venture

Details of the investments in joint ventures
are as follows:

The joint venture company is recorded by the
Company using the equity method. The joint
venture company is a private company and
there was no quoted market price available for
its shares.

The Company has representation on the
Board of Directors and Commissioners of the
above joint venture.

The movements in investments in a joint
venture were as follows:

The following tables contain the summary of
the financial information of the Company's joint
venture as at 31 December 2023 and 2022:

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/40 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. KEPENTINGAN DALAM ENTITAS LAIN 14. **INTERESTS IN OTHER ENTITIES** (continued)
(lanjutan)

a. Investasi pada ventura bersama (lanjutan)

Berikut ini adalah ringkasan informasi keuangan entitas ventura bersama Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022: (lanjutan)

a. Investments in a joint venture (continued)

The following tables contain the summary of the financial information of the Company's joint venture as at 31 December 2023 and 2022: (continued)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Utang usaha	-	2,132	Trade payables
Liabilitas lancar lainnya	28,680	29,632	Other current liabilities
Jumlah liabilitas lancar	<u>28,680</u>	<u>31,764</u>	Total current liabilities
Liabilitas keuangan	292,324	279,830	Financial liabilities
Liabilitas tidak lancar lainnya	76,691	123,960	Other non-current liabilities
Jumlah liabilitas tidak lancar	<u>369,015</u>	<u>403,790</u>	Total non-current liabilities
Aset bersih	36,857	31,738	Net assets
% kepemilikan	30.00%	30.00%	% of ownership
Nilai tercatat investasi pada ventura bersama	11,057	9,521	Carrying amount of investments in a joint venture
	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Pendapatan	64,067	54,195	Revenue
Beban pokok pendapatan	(9,851)	(27,194)	Cost of revenue
Beban operasi	(5,225)	(1,892)	Operating expenses
Penghasilan keuangan	44	2	Finance income
Beban keuangan	(39,768)	(20,385)	Finance costs
Pendapatan (beban) lain-lain, bersih	2,444	(1,823)	Other income (expenses), net
Beban pajak penghasilan	(2,577)	(2,501)	Income tax expense
Laba tahun berjalan	<u>9,134</u>	<u>402</u>	Profit for the year
% kepemilikan efektif	30.00%	30.00%	% of effective ownership
Bagian Perusahaan atas laba bersih tahun berjalan	2,740	121	The Company's share in net income for the year
Penyesuaian metode ekuitas	(1,155)	-	Adjustments of equity method
Bagian Perusahaan atas laba bersih, setelah penyesuaian	1,585	121	The Company's share in net income, after adjustments
(Rugi)/penghasilan komprehensif lain	(163)	3,888	Other comprehensive (loss)/income
Bagian Perusahaan atas (rugi)/penghasilan komprehensif lainnya dari ventura bersama	(49)	1,166	The Company's share of other comprehensive (loss)/income from joint venture

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa tidak ada kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan permanen nilai wajar investasi, oleh karena itu, tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai investasi pada ventura bersama pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

The Company's management is of the opinion that there are no events or changes of circumstances which indicate a permanent decline in the fair value of the investment. Therefore, no provision for impairment in the value of investment in the joint venture is necessary as at 31 December 2023 and 2022.

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/41 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. KEPENTINGAN DALAM ENTITAS LAIN
(lanjutan)

b. Kerja Sama Operasi

Pada tahun 2017, Perusahaan mempunyai 60% kepemilikan dalam perjanjian bersama dengan:

- a. PT Sinar Sakti Matra Nusantara dengan nama KSO Cogindo - Matra yang bermitra hingga 12 Desember 2027.
- b. PT Taka Turbomachinery Indonesia dengan nama KSO Cogindo - Taka yang bermitra hingga 3 Oktober 2025.
- c. PT Andalan Fluid System dengan nama KSO Cogindo - Andalan yang bermitra hingga 15 Desember 2025.

Pada tahun 2018, Perusahaan mempunyai 55% kepemilikan dalam perjanjian bersama yang disebut KSO Cogindo - ISS yang didirikan sebagai kemitraan bersama dengan PT ISS Indonesia, hingga 31 Desember 2024 dan Perusahaan juga mempunyai 60% kepemilikan dalam perjanjian bersama dengan PT Varley Indonesia dengan nama KSO Cogindo - Varley yang bermitra hingga 29 Januari 2026.

Tempat usaha utama kerjasama operasi ini berada di Indonesia.

Para mitra ini mempunyai hak langsung atas aset persekutuan dan secara tanggung renteng bertanggung jawab atas liabilitas yang ditimbulkan oleh persekutuan. Oleh karena itu, entitas-entitas ini diklasifikasikan sebagai operasi bersama dan Perusahaan mengakui hak langsungnya atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dimiliki bersama sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3e.

15. UTANG USAHA

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Pihak ketiga	<u>42,577</u>	<u>82,180</u>	Third parties

Utang usaha sehubungan dengan pembelian bahan bakar, barang dan jasa.

14. INTERESTS IN OTHER ENTITIES (continued)

b. Joint operation

In 2017, the Company has a 60% interest in a joint arrangement with:

- a. PT Sinar Sakti Matra Nusantara called KSO Cogindo - Matra which partnership until 12 December 2027.
- b. PT Taka Turbomachinery Indonesia called KSO Cogindo - Taka which partnership until 3 October 2025.
- c. PT Andalan Fluid System called KSO Cogindo - Andalan which partnership until 15 December 2025.

In 2018, the Company has a 55% interest in a joint arrangement called the KSO Cogindo - ISS which was set up as a partnership together with PT ISS Indonesia, to 31 December 2024 and the Company has also a 60% interest in a joint arrangement with PT Varley Indonesia called KSO Cogindo - Varley which partnership until 29 January 2026.

The principal place of business of the joint operations is in Indonesia.

These partners have direct rights to the assets of the partnership and are jointly and severally liable for the liabilities incurred by the partnership. These entities are therefore classified as a joint operation and the Company recognises its direct right to the jointly held assets, liabilities, revenues and expenses as described in Note 3e.

15. TRADE PAYABLES

Trade payables arise from purchases of fuel, goods and services.

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/42 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

16. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

16. ACCRUED EXPENSES

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Biaya material	31,408	48,201	Material costs
Jasa pendukung	17,849	64,555	Support services
Perbaikan dan pemeliharaan	8,883	10,748	Repairs and maintenance
Pendidikan dan pelatihan	1,123	3,955	Education and training
Lain-lain	<u>5,688</u>	<u>7,221</u>	Others
Jumlah	<u>64,951</u>	<u>134,680</u>	Total

17. LIABILITAS IMBALAN KERJA

17. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES

Perhitungan aktuaria atas imbalan pensiun dan imbalan kerja jangka panjang lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, dihitung oleh kantor konsultan aktuaria terdaftar, Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafril dan Amran Nangasan dalam laporannya masing-masing tertanggal 9 Maret 2024 dan 21 Maret 2023.

The actuarial calculations of pension benefits and other long-term employee benefits for the years ended 31 December 2023 and 2022 were calculated by a registered actuarial consulting firm, Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafril dan Amran Nangasan based on its reports dated 9 March 2024 and 21 March 2023.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Program pensiun	40,959	30,356	Pension plan
Bagian jangka panjang	<u>(40,627)</u>	<u>(30,047)</u>	Non-current portion
Bagian jangka pendek	332	309	Current portion
Bonus dan insentif prestasi kerja	<u>31,459</u>	<u>18,548</u>	Bonus and performance incentives
Jumlah bagian jangka pendek	<u>31,791</u>	<u>18,857</u>	Total current portion
Beban diakui di laba rugi: (Catatan 22)			Expenses recognised in profit or loss: (Note 22)
Beban pensiun manfaat pasti	<u>11,488</u>	<u>9,156</u>	Defined benefit pension expense
Pengukuran kembali program pensiun manfaat pasti diakui di penghasilan komprehensif lain: Program pensiun manfaat pasti	<u>800</u>	<u>(2,270)</u>	Remeasurement on defined benefit pension program recognised in other comprehensive income: Defined benefit pension program
<u>Program pensiun manfaat pasti</u>			<u>Defined benefit pension program</u>

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetap. Program pensiun ini memberikan imbalan pensiun yang ditentukan berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan.

The Company provides a defined benefit pension program for all permanent employees. This pension program provides pension benefits that are determined based on the employee's basic pension income and years of service.

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/43 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

17. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Mutasi kewajiban pensiun manfaat pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movements in the defined benefit pension liabilities during the years were as follows:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Saldo awal	30,356	23,671	Beginning balance
Dibebankan ke laba rugi			Charged to profit or loss:
Biaya jasa kini	9,308	7,358	Current service cost
Biaya bunga	2,180	1,798	Interest expense
Kerugian/(keuntungan) aktuarial dari perubahan:			Actuarial losses/(gain) from changes in:
Asumsi keuangan	2,405	155	Financial assumptions
Asumsi demografik	-	122	Demographic assumptions
Asumsi lainnya	-	21	Other assumptions
Penyesuaian atas pengalaman	<u>(1,605)</u>	<u>(2,568)</u>	Experience adjustments
Jumlah	42,644	30,557	Total
Pembayaran manfaat	<u>(1,685)</u>	<u>(201)</u>	Benefit payments
Saldo akhir	<u>40,959</u>	<u>30,356</u>	Ending balance

Mutasi beban program pensiun manfaat pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movements in the defined benefit pension program expense during the years were as follows:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Biaya jasa kini	9,308	7,358	Current service cost
Biaya bunga	<u>2,180</u>	<u>1,798</u>	Interest expense
Jumlah	11,488	9,156	Total

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:

The principal assumptions used were in determining the defined benefit obligation as follows:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Tingkat diskonto	6.99%	7.44%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7.12%	7.12%	Salary increase rate per annum
Tabel mortalitas	CSO-1958	CSO-1958	Mortality table
Usia pensiun normal	56 tahun/years	56 tahun/years	Normal retirement age

Melalui program pensiun imbalan pascakerja, Perusahaan menghadapi sejumlah risiko signifikan sebagai berikut:

Through its defined benefit obligation, the Company is exposed to a number of significant risks which are detailed below:

- 1) Perubahan tingkat diskonto
Penurunan pada tingkat diskonto menyebabkan kenaikan liabilitas program.
- 2) Tingkat kenaikan gaji
Liabilitas imbalan pensiun Perusahaan berhubungan dengan tingkat kenaikan gaji, dan semakin tinggi tingkat kenaikan gaji akan menyebabkan semakin besarnya liabilitas.

- 1) Changes in discount rate
A decrease in the discount rate will increase plan liabilities.
- 2) Salary growth rate
The Company's pension obligations are linked to the salary growth rate, and a higher salary growth rate will lead to higher liabilities.

Rata-rata durasi adalah masing-masing 23,47 tahun untuk program pensiun manfaat pasti.

The weighted average durations are 23.47 years for defined benefit pension program.

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/44 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Sensitivitas dari liabilitas imbalan pascakerja terhadap perubahan asumsi utama pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

17. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

The sensitivity of the defined benefit obligations to changes in the principal assumptions as at 31 December 2023 is as follows:

**Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti/
Impact on defined benefit obligation**

	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption	
Tingkat diskonto	1%	(4,747)	5,641	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1%	5,943	(5,038)	Salary increase rate

Perkiraan analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pascakerja yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted post-employment benefits as at 31 December 2023 is as follows:

	Kurang dari 1 tahun Less than a year	1 sampai 2 tahun Between 1 - 2 years	2 sampai 5 tahun Between 2 - 5 years	Lebih dari 5 tahun More than 5 years	Jumlah/ Total	
Imbalan pascakerja	<u>332</u>	<u>207</u>	<u>2,987</u>	<u>47,398</u>	<u>50,924</u>	Post-employment benefits

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa estimasi liabilitas imbalan pasca kerja adalah cukup untuk menutupi seluruh persyaratan imbalan pasca kerja yang diatur dalam Peraturan Ketenagakerjaan atau PP.

The management of the Company is of the opinion that the estimated liability provided for post-employment benefits is adequate to cover all post-employment benefits requirements of the Manpower Regulations or CR.

18. MODAL SAHAM

18. SHARE CAPITAL

	2023 dan/and 2022			
	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase pemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah modal disetor/ Total paid-in capital	
Pemegang saham				Shareholders
PIP	514,867,769	99.99%	514,867	PIP
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan - PT Indonesia Power ("YPK IP")	<u>1</u>	<u>0.01%</u>	<u>1</u>	Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan - PT Indonesia Power ("YPK IP")
Jumlah	<u>514,867,770</u>	<u>100%</u>	<u>514,868</u>	Total

**19. SALDO LABA YANG DICADANGKAN DAN
DIVIDEN**

a. Cadangan umum

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Republik Indonesia No. 40/2007, Perusahaan diharuskan untuk membuat penyisihan cadangan umum hingga sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

Pada tahun 2023 dan 2022, pemegang saham telah membentuk cadangan umum dari saldo laba sebesar Rp159.332.

**19. APPROPRIATED RETAINED EARNINGS AND
DIVIDENDS**

a. General reserve

Pursuant to Indonesian Limited Liability Company Law of the Republic of Indonesia No. 40/2007, the Company is required to establish a general reserve amounting to at least 20% of the Company's issued and fully paid capital.

In 2023 and 2022, the shareholders have established a general reserve from retained earnings amounting to Rp159,332.

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/45 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

19. SALDO LABA YANG DICADANGKAN DAN
DIVIDEN (lanjutan)

b. Dividen

Berdasarkan Surat PIP No. 3914/
MNJ.01.02/PLNIP010000/2023-R tanggal
5 September 2023, pemegang saham
menyetujui pembagian dividen tunai untuk
tahun buku 2022 sebesar Rp78.228.

Berdasarkan Surat PIP No. 2320/000/IP/2022-
R pada tanggal 5 Agustus 2022, pemegang
saham menyetujui pembagian dividen tunai
untuk tahun buku 2021 sebesar Rp145.309.

19. APPROPRIATED RETAINED EARNINGS AND
DIVIDENDS (continued)

b. Dividends

Based on PIP Letter No.
3914/MNJ.01.02/PLNIP010000/2023-R dated 5
September 2023, the shareholders approved
the distribution of cash dividends for the
financial year 2022 amounting to Rp78,228.

Based on PIP Letter No. 2320/000/IP/2022-R
dated 5 August 2022, the shareholders
approved the distribution of cash dividends for
the financial year 2021 amounting to
Rp145,309.

20. PENDAPATAN USAHA

20. REVENUE

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Jasa operasi dan pemeliharaan	917,384	652,933	Operation and maintenance services
Penjualan material dan suku cadang	509,128	942,906	Sales of materials and spareparts
Penjualan tenaga listrik	181,141	156,627	Sales of electricity
Jumlah	<u>1,607,653</u>	<u>1,752,466</u>	Total
Pendapatan sebesar Rp1.098.525 (2022: Rp809.560) diakui sepanjang waktu dan Rp509.128 (2022: Rp942.906) pada waktu tertentu.			Revenue of Rp1,098,525 (2022: Rp809,560) has been recognised by overtime and Rp509,128 (2022: Rp942,906) by a point in time.

Lihat Catatan 25 untuk informasi transaksi dengan
pihak berelasi.

Refer to Note 25 for the information of the
transactions related parties.

21. BEBAN POKOK PENDAPATAN

21. COST OF REVENUE

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Perbaikan dan pemeliharaan	702,850	982,847	Repairs and maintenance
Gaji dan tunjangan	479,217	355,991	Salaries and allowances
Pemakaian suku cadang	97,345	9,020	Sparepart usage
Penyusutan (Catatan 12 dan 13)	80,691	78,323	Depreciation (Notes 12 and 13)
Bahan bakar dan minyak pelumas	11,422	12,221	Fuel and lubricants
Jumlah	<u>1,371,525</u>	<u>1,438,402</u>	Total

22. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

22. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Gaji dan tunjangan	37,865	36,187	Salaries and allowances
Jasa profesional	14,048	11,275	Professional fees
Imbalan pascakerja (Catatan 17)	11,488	9,156	Post-employment benefits (Note 17)
Penyusutan (Catatan 12 dan 13)	10,644	9,631	Depreciation (Notes 12 and 13)
Beban pajak	8,756	12,266	Tax expense
Lain-lain	8,468	6,949	Others
Jumlah	<u>91,269</u>	<u>85,464</u>	Total

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/46 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

23. BEBAN LAIN-LAIN - BERSIH

23. OTHER EXPENSES - NET

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Denda pajak	13,149	10,758	Tax penalty
Lain-lain	610	4,904	Others
Jumlah	<u>13,759</u>	<u>15,662</u>	Total

24. PERPAJAKAN

24. TAXATION

a. Pajak dibayar di muka

a. Prepaid taxes

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")	123,489	108,870	Value-Added Tax ("VAT")
Pajak Penghasilan Badan ("PPH Badan"):			Corporate Income Tax ("CIT"):
2022	9,432	514	2022
2016	16,095	16,095	2016
Jumlah	149,016	125,479	Total
Dikurangi: bagian lancar	<u>(70,906)</u>	<u>(39,034)</u>	Less: current portion
Bagian tidak lancar	<u>78,110</u>	<u>86,445</u>	Non-current portion

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
PPH Badan:			CIT:
Pasal 29	9,996	-	Article 29
Pasal 25	-	2,654	Article 25
Sub-jumlah	<u>9,996</u>	<u>2,654</u>	Sub-total
PPN	4,952	18,697	VAT
Pajak lainnya:			Other taxes:
Pasal 21	6,847	9,161	Article 21
Pasal 23	1,621	621	Article 23
Pasal 4(2)	723	85	Article 4(2)
Pasal 26	1	1	Article 26
Sub-jumlah	<u>14,144</u>	<u>28,565</u>	Sub-total
Jumlah	<u>24,140</u>	<u>31,219</u>	Total

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/47 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

24. PERPAJAKAN (lanjutan)

24. TAXATION (continued)

c. Beban pajak penghasilan

c. Income tax expense

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Pajak penghasilan kini	51,903	62,205	Current income tax
Pajak penghasilan tangguhan	(11,957)	617	Deferred income tax
Penyesuaian tahun lalu	<u>6,109</u>	<u>-</u>	Prior year adjustments
Jumlah	<u>46,055</u>	<u>62,822</u>	Total
Perhitungan beban pajak penghasilan kini adalah sebagai berikut:			The calculation of current income tax expense is as follows:
	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Laba sebelum pajak	137,152	219,277	Profit before income tax
Koreksi fiskal:			Fiscal correction:
Penyisihan imbalan pascakerja	9,803	8,955	Provision for post-employment benefits
Bonus	12,895	(39,026)	Bonus
Penyisihan KKE	(4,436)	(2,772)	Provision for ECL
Penyisihan/(pemulihan) penurunan nilai persediaan dan persediaan usang	21	(3)	Provision/(recovery) for decline in value of inventories and inventory obsolescence
Penyusutan aset tetap	37,195	30,326	Depreciation of fixed assets
Sewa	(1,028)	31,523	Lease
Aset hak guna	(106)	(31,804)	Right-of-use assets
Penghasilan bunga yang telah dikenakan pajak final	(1,741)	(3,524)	Finance income subject to final tax
Beban yang tidak dapat dikurangkan secara pajak	<u>46,166</u>	<u>69,800</u>	Non-deductible expenses
	<u>98,769</u>	<u>63,475</u>	
Laba kena pajak	<u>235,921</u>	<u>282,752</u>	Taxable income
Beban pajak penghasilan kini dengan tarif 22%	<u>51,903</u>	<u>62,205</u>	Current income tax expense at 22%
Dikurangi:			Less:
Pembayaran pajak penghasilan di muka			Payment of prepaid taxes
Pasal 22	3,703	8,822	Article 22
Pasal 23	22,864	18,555	Article 23
Pasal 25	<u>15,340</u>	<u>35,342</u>	Article 25
Sub-jumlah	<u>41,907</u>	<u>62,719</u>	Sub-total
Jumlah kurang/(lebih) bayar pajak kini	<u>9,996</u>	<u>(514)</u>	Total under/(over) payment of current tax

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/48 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

24. PERPAJAKAN (lanjutan)

24. TAXATION (continued)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax expense (continued)

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan jumlah teoritis beban pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan laba sebelum pajak adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income tax expense and the theoretical tax amount on the Company's profit before tax is as follows:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Laba sebelum pajak	137,152	219,277	Profit before tax
Beban pajak dengan tarif pajak yang berlaku 22%	30,173	48,241	Tax expense at prevailing tax rate of 22%
Penghasilan bunga yang telah dikenakan pajak final	(383)	(775)	Finance income subject to final tax
Beban yang tidak dapat dikurangkan secara pajak	10,156	15,356	Non-deductible expenses
Penyesuaian tahun lalu	6,109	-	Prior year adjustments
Jumlah	<u>46,055</u>	<u>62,822</u>	Total

d. Pajak tangguhan

d. Deferred tax

Rincian aset pajak tangguhan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Details of the Company's deferred tax assets as at 31 December 2023 and 2022 are as follows:

<u>31 Desember/December 2023</u>					
	<u>1 Januari/ January 2023</u>	<u>Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi/ Credited/ (charged) to profit or loss</u>	<u>Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ Charged to other comprehensive income</u>	<u>31 Desember/ December 2023</u>	
Aset pajak tangguhan					Deferred tax assets
Aset tetap	(5,812)	8,183	-	2,371	Property, plant and equipment
Bonus	4,080	2,837	-	6,917	Bonus
Cadangan KKE	3,577	(976)	-	2,601	Allowance for ECL
Penyisihan penurunan nilai atas persediaan dan persediaan usang	18	5	-	23	Allowance for decline in inventories and obsolescence
Liabilitas imbalan kerja	6,679	2,157	176	9,012	Post-employment benefits liabilities
Aset hak-guna	(2,790)	(23)	-	(2,813)	Right-of-use assets
Liabilitas sewa	2,910	(226)	-	2,684	Lease liabilities
Jumlah	<u>8,662</u>	<u>11,957</u>	<u>176</u>	<u>20,795</u>	Total
<u>31 Desember/December 2022</u>					
	<u>1 Januari/ January 2022</u>	<u>Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi/ Credited/ (charged) to profit or loss</u>	<u>Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ Charged to other comprehensive income</u>	<u>31 Desember/ December 2022</u>	
Aset pajak tangguhan					Deferred tax assets
Aset tetap	(12,484)	6,672	-	(5,812)	Property, plant and equipment
Bonus	12,666	(8,586)	-	4,080	Bonus
Cadangan KKE	4,187	(610)	-	3,577	Allowance for ECL
Penyisihan penurunan nilai atas persediaan dan persediaan usang	19	(1)	-	18	Allowance for decline in inventories and obsolescence
Liabilitas imbalan kerja	5,208	1,970	(499)	6,679	Post-employment benefits liabilities
Aset hak-guna	4,207	(6,997)	-	(2,790)	Right-of-use assets
Liabilitas sewa	(4,025)	6,935	-	2,910	Lease liabilities
Jumlah	<u>9,778</u>	<u>(617)</u>	<u>(499)</u>	<u>8,662</u>	Total

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/49 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

24. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Surat ketetapan pajak

Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak No. 00012/206/16/051/2020 untuk tahun pajak 2016 yang menetapkan menetapkan kurang bayar PPh badan sebesar Rp13.042 beserta sanksi administrasi sebesar Rp5.697 (dengan jumlah Rp18,739). Perusahaan telah melakukan pembayaran atas jumlah tersebut pada bulan Maret 2021. Perusahaan menerima Rp1.732 atas ketetapan tersebut dan telah dibebankan di laba rugi tahun berjalan. Perusahaan mengajukan surat keberatan atas nilai sisanya dan mencatat Rp16.095 sebagai pajak dibayar dimuka pada tanggal 31 Desember 2021. Pada tahun 2022, keberatan Perusahaan ditolak dan Perusahaan telah mengajukan banding. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, Perusahaan belum menerima hasil banding tersebut.

Pada tahun 2023, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") atas PPh Badan untuk tahun pajak 2018 sebesar Rp6.109 beserta sanksi administrasi sebesar Rp2.668 (dengan jumlah Rp8.777). Perusahaan telah melakukan pembayaran atas jumlah tersebut pada bulan Oktober 2023 dan disajikan sebagai bagian dari pajak penghasilan kini.

Selama tahun 2023, Perusahaan juga menerima Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pajak ("SKPPKP") atas PPN untuk tahun pajak 2021 sebesar Rp39.421 yang telah diterima oleh Perusahaan pada tahun 2023.

Pada bulan Mei 2024, Perusahaan menerima SKPLB atas PPN untuk tahun pajak 2022 sebesar Rp70.906. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, Perusahaan belum menerima pengembalian tersebut.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, Perusahaan sedang dalam proses audit oleh DJP atas PPh Badan untuk tahun pajak 2022.

f. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan yang berdomisili di Indonesia menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. DJP Indonesia dapat menetapkan atau mengubah pajak dalam batas waktu lima tahun saat terutangnya pajak.

24. TAXATION (continued)

e. Tax assessment letters

The Company received Tax Assessment Letter No. 00012/206/16/051/2020 for the fiscal year 2016 which identified an underpayment of CIT of Rp13,042 and administration sanction of Rp5,697 (with a total amount of Rp18,739). The Company had paid this amount in March 2021. The Company accepted Rp1,732 of the assessment and charged this amount to the current year's profit or loss. The Company filed an objection letter for the remaining amount and recorded Rp16,095 as prepaid tax as at 31 December 2021. In 2022, the Company's objection was rejected, and the Company has filed an appeal. Up to the completion date of these financial statements, the Company has not received the appeal result.

In 2023, the Company received an Underpayment Tax Assessment Letter ("SKPKB") for CIT for the fiscal year 2018 amounting to Rp6,109 and an administration sanction of Rp2,668 (with a total amount of Rp8,777). The Company had paid this amount in October 2023 and presented as part of current income tax.

During 2023, the Company also received a Decision for Preliminary Tax Refund ("SKPPKP") for VAT for fiscal year 2021 amounting to Rp39,421 which was received by the Company in 2023.

In May 2024, the Company received a SKPLB for VAT for fiscal year 2022 amounting to Rp70,906. Up to the completion date of these financial statements, the Company has not received the refund.

Up to the completion date of these financial statements, the Company is being audited by the DGT regarding Corporate Income Tax for the fiscal year 2022.

f. Administration

Under the taxation laws of Indonesia, the Company which is domiciled in Indonesia calculate and pay tax on the basis of self assessment. The DGT may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/50 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat hubungan dan transaksi dengan pihak berelasi

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Perusahaan:

25. THE BALANCE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Nature of relationship and transactions with related parties

Below is the list of related parties with which the Company has transactions:

Pihak-pihak berelasi/ Related parties	Sifat hubungan/ Nature of relationship	Sifat transaksi/ Nature of transactions
Bank Mandiri	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan kas di bank dan kas yang dibatasi penggunaannya/ Placement of cash in bank and restricted cash
BNI	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan kas di bank, deposito berjangka/ kas yang dibatasi penggunaannya/ Placement of cash in bank, time deposits and restricted cash
PLN	Pemegang saham utama/ The ultimate parent entity	Transaksi pendapatan atas penjualan material dan suku cadang dan penjualan tenaga listrik/ Revenue from sales of material and spare parts and sales of electricity.
PIP	Pemegang saham Perusahaan/ Shareholders of the Company	Transaksi pendapatan jasa operasi dan pemeliharaan, penjualan material dan suku cadang/ Revenue from operation and maintenance services and sales of material and spare parts
YPK IP	Pemegang saham Perusahaan/ Shareholders of the Company	Penyertaan modal/ Paid-in capital
PT PLN Nusantara Power ("PNP")	Entitas anak dari PT PLN (Persero)/ Subsidiary of PT PLN (Persero)	Transaksi pendapatan dari penjualan material dan suku cadang/ Revenue from sales of material and spare parts
PT Indonesia Comnet Plus ("ICP")	Entitas anak dari PT PLN (Persero)/ Subsidiary of PT PLN (Persero)	Utang usaha/ Trade payables
PT Indo Ridlatama Power ("IRP")	Di bawah entitas sepengendali/ Under common control entity	Transaksi pendapatan atas penjualan material dan suku cadang/ Revenue from sales of material and spare parts
PT PLN Indonesia Geothermal ("IGEO")	Di bawah entitas sepengendali/ Under common control entity	Transaksi pendapatan atas penjualan material dan suku cadang/ Revenue from sales of material and spare parts
PT Artha Daya Coalindo ("ADC")	Di bawah entitas sepengendali/ Under common control entity	Transaksi pendapatan atas penjualan material dan suku cadang/ Revenue from sales of material and spare parts
PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara ("MCTN")	Di bawah entitas sepengendali/ Under common control entity	Transaksi pendapatan dari penjualan material dan suku cadang/ Revenue from sales of material and spare parts
PT GCL Indo Tenaga ("GCL")	Di bawah entitas sepengendali/ Under common control entity	Transaksi pendapatan dari penjualan material dan suku cadang/ Revenue from sales of material and spare parts
MCB	Ventura bersama/ Joint venture	Pemberian pinjaman kepada ventura bersama/ Loans to a joint venture

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/51 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

25. THE BALANCE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi

Details of balances and transactions with related parties

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Kas dan setara kas (Catatan 5)			Cash and cash equivalents (Note 5)
BNI	196,272	118,798	BNI
Bank Mandiri	20,397	87,834	Bank Mandiri
Jumlah	<u>216,669</u>	<u>206,632</u>	Total
Deposito berjangka (Catatan 6)			Time deposits (Note 6)
BNI	<u>2,500</u>	-	BNI
Kas yang dibatasi penggunaannya (Catatan 7)			Restricted cash (Note 7)
Bank Mandiri	19,552	-	Bank Mandiri
BNI	5,431	-	BNI
Jumlah	<u>24,983</u>	<u>-</u>	Total
Piutang usaha (Catatan 8)			Trade receivables (Note 8)
PIP	305,606	357,578	PIP
PLN	18,032	20,173	PLN
IGEO	2,888	-	IGEO
ADC	516	773	ADC
PNP	361	-	PNP
GCL	238	256	GCL
Jumlah	<u>327,641</u>	<u>378,780</u>	Total
Piutang lain-lain			Other receivables
PIP	-	<u>33</u>	PIP
Piutang dari ventura bersama (Catatan 11)			Receivables from a joint venture (Note 11)
MCB	<u>22,826</u>	<u>17,559</u>	MCB
Jasa operasi dan pemeliharaan			Operation and maintenance services
PIP	<u>747,544</u>	<u>565,314</u>	PIP
Penjualan material dan suku cadang			Sales of material and spare parts
PIP	398,162	642,971	PIP
PNP	28,269	7,377	PNP
PLN	16,654	180,611	PLN
IRP	3,057	-	IRP
IGEO	2,601	-	IGEO
MCTN	154	-	MCTN
GCL	132	3,223	GCL
ADC	-	2,916	ADC
Jumlah	<u>449,029</u>	<u>837,098</u>	Total

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/52 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)

Rincian saldo dan transaksi dengan pihak
berelasi (lanjutan)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Penjualan tenaga listrik		
PLN	155,776	82,808
PIP	<u>25,046</u>	<u>73,492</u>
Jumlah	<u>180,822</u>	<u>156,300</u>
Pendapatan bunga		
MCB	<u>3,000</u>	<u>-</u>

Kompensasi manajemen kunci

Jumlah kompensasi yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp9.837 dan Rp10.755. Seluruh kompensasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan tersebut merupakan imbalan kerja jangka pendek.

25. THE BALANCE AND TRANSACTIONS WITH
RELATED PARTIES (continued)

Details of balances and transactions with related parties (continued)

Sales of electricity

PLN
PIP

Total

Interest income

MCB

Key management compensation

Total remuneration paid to the Company's Boards of Commissioners and Directors in 2023 and 2022 amounting to Rp9,837 and Rp10,755, respectively. All the compensation to the Company's Boards of Commissioners and Directors represents short-term employee benefits.

26. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN
KONTINJENSI

a. PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat

Pada tanggal 22 Desember 2021, Perusahaan dan PLN menandatangani amandemen perjanjian atas kapasitas pengadaan dan pengoperasian sewa mesin genset MFO menjadi 20 MW di Pringgabaya Lombok Timur dan Jeranjang melalui perjanjian No. 009.Amd/BBC1-CDB/XII/2021.

Pada tanggal 23 Juni 2023, Perusahaan dan PLN melakukan amandemen perjanjian untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian menjadi 30 April 2024. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, perjanjian ini masih dalam proses perpanjangan.

b. Ministry of Electricity and Water State of Kuwait

Pada tahun 2021, Perusahaan mengadakan Perjanjian No. MEW/MW/5620-2020/2021 tanggal 15 April 2021 dengan Ministry of Electricity and Water State of Kuwait tentang Pengadaan Jasa Penunjang Operasi dan Pemeliharaan ("O&M") untuk jaringan pembangkit listrik di negara Kuwait. Perjanjian ini telah diamandemen untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 16 Mei 2025.

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS
AND CONTINGENCIES

a. PT PLN (Persero) Region West Nusa Tenggara

On 22 December 2021, the Company and PLN signed an amendment agreement on the procurement and operation of the MFO generator engine rental with a capacity set to 20 MW in Pringgabaya, East Lombok and Jeranjang by agreement No.009.Amd/BBC1-CDB/XII/2021. This agreement will expire on 31 December 2022.

On 23 June 2023, the Company and PLN amended the agreement to extend the term of the agreement to 30 April 2024. As of the completion date of the financial report, this agreement is still in the process of being extended.

b. Ministry of Electricity and Water State of Kuwait

In 2021, the Company entered into Agreement No. MEW/MW/5620-2020/2021 dated 15 April 2021 with the Ministry of Electricity and Water State of Kuwait regarding Procurement of Operation and Maintenance ("O&M") Support services for the electrical power distribution grids in Kuwait. This agreement has been amendment to extend the maturity date of the agreement is 16 May 2025.

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/53 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

26. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

c. National Alliances for Projects Company for General Trading W.L.L ("NAPCO")

Pada tahun 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian tanggal 17 Februari 2020 dengan NAPCO dimana Perusahaan menunjuk NAPCO sebagai agen lokal eksklusif untuk mengerjakan dan menjalankan proyek di Kuwait. Perjanjian ini telah diamandemen beberapa kali dengan terakhir amandemen untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 17 Februari 2025.

d. PIP

Pada tanggal 10 Agustus 2018, Perusahaan mengadakan perjanjian No. 330.PJ/061/IP/2018 dengan PT PLN Indonesia Power tentang penyediaan tenaga listrik kapasitas neto 10 MW di Nusa Penida, Bali. Perjanjian ini telah diamandemen beberapa kali dengan terakhir amandemen untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 28 Februari 2028. Dalam perjanjian tersebut, Perusahaan akan menerima pembayaran penyediaan listrik sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan formula yang ditentukan.

Pada tanggal 28 Oktober 2014, Perusahaan mengadakan Perjanjian No. 147.PJ/061/IP/2014 dengan PIP tentang Pengadaan Jasa O&M untuk pembangkit di daerah Jawa dan telah dilakukan amandemen pada tanggal 28 Juni 2015 meliputi Labuan, Suralaya, Lontar, Pelabuhan Ratu dan Adipala. Perjanjian ini telah diamandemen beberapa kali dengan terakhir amandemen untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Dalam perjanjian ini, Perusahaan akan menerima pembayaran atas jasa O&M sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan formula yang ditentukan.

Pada tanggal 9 September 2014, Perusahaan mengadakan Perjanjian No. 115.PJ/061/IP/2014 dengan PIP tentang Pengadaan Jasa O&M untuk pembangkit di daerah Luar Jawa meliputi Sanggau, Ulumbu, Barru, Jeranjang dan Pangkalan Susu. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2024. Dalam perjanjian tersebut, Perusahaan akan menerima pembayaran atas jasa O&M sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan formula yang ditentukan.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

c. National Alliances for Projects Company for General Trading W.L.L ("NAPCO")

In 2020, the Company entered into an agreement dated 17 February 2020 with NAPCO in which the Company appointed NAPCO as a local exclusive agent for the purpose of executing and performing projects in Kuwait. This agreement has been amendment several times, with the latest amendment to extend the maturity date of the agreement is 17 February 2025.

d. PIP

On 10 August 2018, the Company entered into agreement No. 330.PJ/061/IP/2018 with PT PLN Indonesia Power regarding providing electricity with a net capacity of 10 MW in Nusa Penida, Bali. This agreement has been amendment several times, with the latest amendment to extend the maturity date of the agreement is 28 February 2028. Under the agreement, the Company will receive payments for the rental of a generator engine for an amount according to the determined formula.

On 28 October 2014, the Company entered into Agreement No. 147.PJ/061/IP/2014 with PIP regarding O&M service for power plants in Java region and has been amended on 28 June 2015 including Labuan, Suralaya, Lontar, Pelabuhan Ratu and Adipala. This agreement has been amendment several times, with the latest amendment to extend the maturity date of the agreement is 31 December 2024. Under this agreement, the Company will receive payment for O&M service for an amount according to the determined formula.

On 9 September 2014, the Company entered into Agreement No. 115.PJ/061/IP/2014 with PIP regarding Procurement of O&M Support service for power plants in region Outside Java covering Sanggau, Ulumbu, Barru, Jeranjang and Pangkalan Susu. The term of the agreement is valid until 31 December 2024. Under the agreement, the Company will receive payment for O&M service for an amount according to the determined formula.

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/54 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

26. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

e. Kerja Sama Operasi dengan PT ISS Indonesia

Perusahaan mengadakan Perjanjian Kerja Sama Operasi dengan PT ISS Indonesia melalui perjanjian No. 001.2/SPR-CDB/XII/2018 pada tanggal 28 Desember 2018 dan addendumnya tentang penyediaan jasa pembersihan industri. Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2024.

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

e. Joint Operation with PT ISS Indonesia

The Company entered into a Joint Operation with PT ISS Indonesia through agreement No. 001.2/SPR-CDB/XII/2018 on 28 December 2018 and its addendum regarding providing industrial cleaning services. The term of the agreement is from 18 December 2017 to 31 December 2024.

27. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL

a. **Kategori dan klasifikasi instrumen keuangan**

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan mengklasifikasikan kas dan setara kas, deposito berjangka, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang lain-lain dan piutang dari ventura bersama sebesar Rp690.398 (2022: Rp751.957) sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan mengklasifikasikan utang usaha, utang lain-lain, biaya yang masih harus dibayar dan liabilitas sewa sebesar Rp121.706 (2022: Rp232.629) sebagai liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

b. **Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan**

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko keuangan, antara lain risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Perusahaan beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Dewan Direksi.

Perusahaan menggunakan berbagai metode untuk mengukur risiko yang dihadapinya, metode ini mencakup analisis sensitivitas dalam hal suku bunga dan nilai tukar mata uang asing untuk risiko pasar dan analisis umur piutang untuk risiko kredit.

27. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT

a. **Categories and classes of financial instruments**

As at 31 December 2023, the Company classified its cash and cash equivalents, time deposits, restricted cash, trade receivables, other receivables and receivables from a joint venture and other current assets amounting to Rp690,398 (2022: Rp751,957) as financial assets at amortised cost.

As at 31 December 2023, the Company classified its trade payables, other payables, accrued expenses and lease liabilities amounting to Rp121,706 (2022: Rp232,629) as financial liabilities measured at amortised cost.

b. **Financial risk management objectives and policies**

The Company's overall financial risk management and policies aim to ensure that adequate financial resources are available for the operation and development of its business, while managing its exposure to financial risk, which is market risk (including foreign exchange risk and interest rate risk) credit risk and liquidity risk. The Company operates within defined policies that are approved by the Board of Directors.

The company uses various methods to measure the risks it faces. These methods include sensitivity analysis in terms of interest rates and foreign exchange rates for market risk and ageing of receivables analysis for credit risk.

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/55 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

27. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL
(lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko
keuangan (lanjutan)

i. Risiko pasar

a. Risiko tingkat suku bunga

Pada tanggal 31 Desember 2023, aset keuangan dan liabilitas keuangan Perusahaan yang dipengaruhi oleh suku bunga mengambang adalah kas di bank, deposito berjangka, kas yang dibatasi penggunaannya. Risiko pengaruh suku bunga mengambang tidak signifikan.

Perusahaan menganalisis eksposur suku bunga secara dinamis. Berbagai skenario didorong dengan mempertimbangkan pembiayaan kembali, pembaruan dan alternatif pembiayaan.

b. Risiko nilai tukar mata uang asing

Pembiayaan dan sebagian besar pengeluaran operasional dalam mata uang Rupiah, yang secara tidak langsung merupakan lindung nilai alami atas eksposur fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Dengan demikian, manajemen berkeyakinan bahwa Perusahaan tidak memiliki eksposur yang signifikan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

ii. Risiko kredit

Risiko kredit timbul dari risiko kegagalan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban kontraktual yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan kepada Perusahaan. Eksposur risiko kredit Perusahaan timbul terutama atas piutang usaha dari pelanggan. Untuk aset keuangan lainnya seperti kas di bank, deposito berjangka, kas yang dibatasi penggunaannya, Perusahaan mengelola rekening pada beberapa bank dengan reputasi baik dengan tujuan meminimalkan risiko kredit dan untuk menghindari konsentrasi kas yang signifikan dengan satu institusi. Perusahaan menempatkan dana di bank yang kredibel (Catatan 5, 6 dan 7).

Perusahaan mengelola eksposur risiko kredit dari kas di bank, deposito berjangka, kas yang dibatasi penggunaannya dengan memantau reputasi dan peringkat kredit masing-masing pihak.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK
MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT
(continued)

b. Financial risk management objectives and
policies (continued)

i. Market risk

a. Interest rate risk

As of 31 December 2023, the Company's financial assets and financial liabilities affected by floating interest rates are cash in banks, time deposits and restricted cash. The risk of the influence of floating interest rates is not significant.

The Company analyses its interest rate exposure dynamically. Various scenarios are simulated, taking into consideration the refinancing, renewal and alternative financing.

b. Foreign exchange risk

Financing and most operational expenses are denominated in Rupiah, which indirectly provides a natural hedge for exposure to foreign exchange rate fluctuations. Thus, management believes that the Company does not have significant exposure to fluctuations in foreign currency exchange rates.

ii. Credit risk

Credit risk arises from the risk that a counterparty will default on its contractual obligations, resulting in financial loss to the Company. The Company exposures to credit risk mainly arise from receivables from its customers. For other financial assets, such as cash in banks, time deposits, and restricted cash, in order to minimise the credit risk and to avoid significant concentration of cash with one institution, the Company places the funds in reputable local banks (Notes 5, 6 and 7).

The Company manages credit risk exposure from its cash in banks, time deposits, and restricted cash by monitoring the reputation and credit ratings of each individual counterparty.

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/56 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

27. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL
(lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko
keuangan (lanjutan)

ii. Risiko kredit (lanjutan)

Jumlah tercatat aset keuangan pada laporan keuangan setelah dikurangi dengan penyisihan untuk KKE mencerminkan eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit. Pada tanggal 31 Desember 2023, total maksimum eksposur dari risiko kredit adalah Rp690.398 (2022: Rp749.406) yang terutama berasal dari kas di bank, deposito berjangka, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang lain-lain dan piutang dari ventura bersama.

Tujuan Perusahaan adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan dengan meminimalkan kerugian yang dapat terjadi karena meningkatnya eksposur risiko kredit.

Pelanggan utama Perusahaan adalah PLN dan PIP. Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022, PLN dan PIP memberikan kontribusi 83,55% (2022: 88,17%) dari jumlah penjualan bersih. Manajemen berkeyakinan bahwa risiko kredit terbatas karena risiko kegagalan kredit PLN dan PIP rendah dimana Perusahaan telah secara legal terikat dalam perjanjian dengan PLN dan PIP untuk penjualan listrik dan pelaksanaan jasa lainnya.

Aset keuangan tertentu dinilai secara individu untuk penurunan nilai dan jika ditemukan terjadi penurunan nilai, rugi penurunan nilai harus diterapkan secara individu.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK
MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT
(continued)

b. Financial risk management objectives and
policies (continued)

ii. Credit risk (continued)

The carrying amount of financial assets recorded in the financial statements, net of any allowance for ECL, represents the Company's exposure to credit risk. As at 31 December 2023, the total maximum exposure from credit risk was Rp690,398 (2022: Rp749,406), which consists of cash in banks, time deposit, restricted cash, trade receivables, other receivables and receivables from a joint venture.

The Company's objective is to seek continual revenue growth while minimising losses incurred due to an increase in credit risk exposure.

The Company's customers are PLN and PIP. For the years ended 31 December 2023 and 2022, the sales from PLN and PIP make up 83.55% (2022: 88.17%) of the total net revenues. Management believes that the credit risk is limited because the credit default of PLN and PIP is low because the Group has a legally binding agreement with PLN and PIP for electricity sales transactions and other services.

Certain financial assets are individually assessed for impairment and, if found to be impaired, the impairment loss should be applied individually.

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/57 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

27. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL
(lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko
keuangan (lanjutan)

ii. Risiko kredit (lanjutan)

Kualitas kredit aset keuangan Perusahaan dinilai dan dikelola berdasarkan peringkat internal. Kualitas kredit dimonitor dengan menggunakan Sistem Peringkat Perusahaan. Sistem peringkat dinilai dan diperbarui secara berkala untuk menjaga akurasi dan konsistensi peringkat risiko. Kualitas kredit dan Sistem Peringkat dinilai sebagai berikut:

- Tingkat tinggi

Aset keuangan tingkat tinggi meliputi kas dan setara kas kepada pihak ketiga atau bank yang memiliki kualitas kredit yang baik. Oleh sebab itu, risiko kredit adalah minimal. Untuk piutang usaha, pelanggan maupun pihak berelasi dapat diberi peringkat tingkat tinggi jika tidak memiliki kesulitan keuangan, tidak terjadi pelanggaran kontrak, tidak ada pemberian keringanan dan memiliki kelangsungan usaha.

- Tingkat rendah

Aset keuangan peringkat rendah termasuk piutang usaha yang tidak diklasifikasikan sebagai tingkat tinggi. Untuk piutang usaha, pelanggan dapat diberi peringkat rendah jika pelanggan memiliki kesulitan keuangan, melakukan pelanggaran kontrak, menerima pemberian keringanan, dan tidak memiliki kelangsungan usaha.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, kualitas kredit semua aset keuangan Perusahaan berada dalam klasifikasi tingkat tinggi.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan setelah dikurangi dengan penyisihan atas kerugian kredit ekspektasian mencerminkan eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK
MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT
(continued)

b. Financial risk management objectives and
policies (continued)

ii. Credit risk (continued)

The credit quality of the Company's financial assets is assessed and managed using internal ratings. The credit quality is monitored using the Company's rating system. The rating system is assessed and updated regularly to maintain accurate and consistent risk rating. The credit quality and the rating system are as follows:

- High grade

High grade financial assets include cash and cash equivalents to counterparties with good credit ratings or bank standing. Consequently, credit risk is minimal. For trade receivables, a customer or a related party is given a high grade rating if it does not have any financial difficulty, has no breach of contract, no waivers and will be able to continue as a going concern.

- Low grade

Low grade financial assets include trade receivables that are not classified as high grade. For trade receivables, a customer is given a low grade rating if it is deemed to have financial difficulty, there is a breach of contract, there are waivers and it will not be able to continue as a going concern.

As at 31 December 2023 and 2022, all the Company's financial assets are classified as high grade.

The carrying amount of financial assets recorded in the financial statements after deducting the allowance for ECL represents the Company's exposure to credit risk.

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/58 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL
(lanjutan)

27. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK
MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT
(continued)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko
keuangan (lanjutan)

b. Financial risk management objectives and
policies (continued)

iii. Risiko likuiditas

iii. Liquidity risk

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko bahwa Perusahaan akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban terkait dengan liabilitas keuangan yang diselesaikan dengan pembayaran kas atau aset keuangan lainnya. Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada Dewan Direksi, yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang Perusahaan.

Liquidity risk is defined as the risk that the Company will encounter difficulty in meeting its obligations associated with financial liabilities that are settled by delivering cash or other financial assets. The ultimate responsibility for liquidity risk management is in the Board of Directors, which has built an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Company's short, medium and long-term funding and liquidity management requirements.

Selanjutnya, Perusahaan juga memelihara kecukupan dana dengan cara untuk mempertahankan kecukupan jumlah kas dan setara kas yang mudah dikonversi menjadi uang tunai ketika mengalami gangguan yang tak terduga dari penagihan kas.

Furthermore, the Company maintains sufficient funds by maintaining adequate amounts of cash and cash equivalents that can be easily converted into cash when experiencing unexpected disruptions from cash collection.

Tabel dibawah ini menganalisa liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal pelaporan berdasarkan kelompok jatuh temponya dari sisa periode hingga tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel ini adalah nilai arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto termasuk estimasi pembayaran bunga:

The table below analyses the Company's financial liabilities at the reporting date into relevant maturity grouping based on the remaining period to the contractual maturity date. The amounts disclosed in this table represents contractual undiscounted cash flows including estimated interest payments:

	2023				Jumlah/ Total	
	Dalam satu tahun/ Within one year	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ Over one year but not longer than three years	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ Over three years but not longer than five years			
Utang usaha	42,577	-	-	-	42,577	Trade payables
Utang lain-lain	1,976	-	-	-	1,976	
Biaya yang masih harus dibayar	64,951	-	-	-	64,951	Accrued expenses
Liabilitas sewa	7,584	5,429	-	-	13,013	Lease liabilities
Jumlah	117,088	5,429	-	-	122,517	Total

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/59 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL
(lanjutan)

27. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK
MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT
(continued)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko
keuangan (lanjutan)

b. Financial risk management objectives and
policies (continued)

iii. Risiko likuiditas (lanjutan)

iii. Liquidity risk (continued)

	2022			Jumlah/ Total	
	Dalam satu tahun/ Within one year	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ Over one year but not longer than three years	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ Over three years but not longer than five years		
Utang usaha	82,180	-	-	82,180	Trade payables
Utang lain-lain	2,539	-	-	2,539	Other payables
Biaya yang masih harus dibayar	134,680	-	-	134,680	Accrued expenses
Liabilitas sewa	8,301	5,794	-	14,095	Lease liabilities
Jumlah	227,700	5,794	-	233,494	Total

c. Manajemen risiko modal

Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha dan untuk memastikan pemenuhan batasan rasio kecukupan modal. Struktur modal Perusahaan terdiri dari ekuitas pemegang saham, yang terdiri dari modal saham, tambahan modal disetor dan saldo laba.

Direksi Perusahaan secara berkala melakukan tinjauan struktur permodalan Perusahaan. Sebagai bagian dari tinjauan ini, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

Perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya modal sehingga dapat memaksimalkan nilai Perusahaan. Oleh karena itu, kebijakan Perusahaan dalam mencari pendanaan akan selalu memperhitungkan risiko keuangan yang mungkin timbul di masa depan.

d. Estimasi nilai wajar

Manajemen berpendapat bahwa nilai buku dari aset dan liabilitas keuangannya diperkirakan sama dengan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan tersebut pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

c. Capital risk management

The Company manages capital risk to ensure that it will be able to continue as a going concern and to ensure compliance with the covenants of the capital adequacy ratio. The Company's capital structure consists of equity shareholders that comprise capital share, additional paid-in capital and retained earnings.

The Board of Directors of the Company periodically reviews the Company's capital structure. As part of this review, the Board of Directors considers the cost of capital and related risks.

The Company seeks to minimise the cost of capital, in order to maximise the Company's value. Therefore, the Company's policy in seeking funding will always take into account the financial risks that may arise in the future.

d. Estimated fair value

Management is of the opinion that the carrying value of its financial assets and financial liabilities approximates the fair value of the financial assets and liabilities as at 31 December 2023 and 2022.

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/60 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. INFORMASI ARUS KAS

a. Transaksi non-kas

Tabel dibawah ini menunjukkan transaksi non-kas Perusahaan selama tahun berjalan sebagai berikut:

28. CASH FLOW INFORMATION

a. Non-cash transactions

The table below shows the Company's non-cash transactions during the year as follows:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Perolehan aset hak-guna melalui liabilitas sewa	7,807	8,195	Additions of right-of-use assets through lease liabilities
Penambahan piutang dari ventura bersama melalui piutang lain-lain	-	6,991	Additions of receivables from a joint venture through other receivables

b. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan

Tabel dibawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

b. Reconciliation of liabilities arising from financing activities

The table below sets out the reconciliation of the liabilities arising from financing activities for the years ended 31 December 2023 and 2022, as follows:

	<u>Perubahan transaksi non kas/ Non-cash changes</u>				<u>2023</u>
	<u>Saldo awal/ Beginning balance</u>	<u>Arus kas/ Cash flows</u>	<u>Sewa baru/ New leases</u>	<u>Perubahan lainnya/ Other changes</u>	
<u>2023</u>					
Liabilitas sewa	13,230	(8,290)	7,807	(545)	12,202
					<u>2022</u>
					Lease liabilities

	<u>Perubahan transaksi non-kas/ Non-cash changes</u>				<u>2022</u>
	<u>Saldo awal/ Beginning balance</u>	<u>Arus kas/ Cash flows</u>	<u>Sewa baru/ New leases</u>	<u>Jumlah/ Total</u>	
<u>2022</u>					
Liabilitas sewa	18,297	(13,262)	8,195	13,230	13,230
					<u>2022</u>
					Lease liabilities

29. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

a. Berdasarkan Akta Notaris No. 02, tanggal 5 Januari 2024 yang dibuat dihadapan Shahreza Annaz S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen

Khusnul Mubien
Julita Indah
Masykuri Abdillah
Sunandar
Fredy Eko Prasetyo T.

President Commissioner
Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner

Direktur Utama
Direktur Sumber Daya Manusia
Direktur Bisnis
Direktur Operasi
Direktur Keuangan

Hari Cahyono
Imam Adi Prihantoro
Kukuh Pambudi
Mulyadi
Hari Muhandani Nasution

President Director
Director of Human Resources
Director of Business
Director of Operation
Director of Finance

29. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

a. Based on Notarial Deed No. 02, dated 5 January 2024 of Shahreza Annaz S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta, the shareholders agreed to change the composition of the Boards or Commissioners and Directors, which became as follows:

PT COGINDO DAYABERSAMA
Lampiran 5/61 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

29. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)

- b. Dalam Akta Notaris No. 08 tanggal 19 April 2024 dari Shahreza Annaz, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0025785.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024, pemegang saham Perusahaan juga telah memberikan persetujuan untuk melakukan perubahan nama Perusahaan yang semula bernama PT Cogindo DayaBersama menjadi PT PLN Indonesia Power Services.

30. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN
PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 2 Juli 2024.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

29. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

- b. Based on Notarial Deed No. 08, dated 19 April 2024 of Shahreza Annaz S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta, which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia pursuant to Decree No. AHU-0025785.AH.01.02.Tahun 2024 dated 2 May 2024, the Company's shareholders have given approval to change in the name of the Company which was formerly PT Cogindo DayaBersama, to become PT PLN Indonesia Power Services.

30. MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY AND
APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS

The preparation of the financial statements was the responsibilities of the management and were approved by the Directors and authorised for issue on 2 July 2024.





PT PLN Indonesia Power Services


Jalan Raya Pasar Minggu No. 190
Jakarta Selatan 12510

Phone : (021) 5366 8360

Fax : (021) 5367 3748

 PLN Indonesia Power Services

 PLN Indonesia Power Services

 @cogindodayabersama



www.plnip-services.co.id

